RKPD

(Rencana Kerja Pemerintah Daerah)

Provinsi Papua

Tahun 2020

Siap Sukseskan
Pekan Olahraga Nasional (PON)
XX/2020 Papua

PON XX PEKAN OLAHRAGA NASIONAL PAPUA 2020

BAPPEDA
Provinsi Papua
Tahun 2019

GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, Pemerintah Provinsi Papua wajib menyusun RKPD Tahun 2020 yang digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang.... /2

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;

12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 14);

13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 21);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan..../3

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
2. Gubernur ialah Gubernur Papua.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua.
11. Rencana Strategis SKPD selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pemerintah Tahunan Daerah.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran program RPJMD .

(2) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :

a. evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah;
b. rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
c. prioritas pembangunan daerah tahun 2020; dan
d. rencana kerja dan pendanaan daerah.

(3) Evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah dalam satu (1) tahun anggaran;

(4) Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pemerintah daerah.

(5) Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD dan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025.

(6) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memperhatikan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Penjabaran program RPJMD dalam RKPD tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1) Penetapan RKPD Tahun 2020 dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan :

a. RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun Anggaran 2020; dan

b. RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020.

(2) Penyusunan RKPD Provinsi Papua sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013-2018, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

a. persiapan penyusunan RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2020;
b. penyusunan rancangan awal RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2020 ;
c. penyusunan rancangan RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2020;
d. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RKPD;
e. perumusan rancangan akhir RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2020; dan
f. penetapan RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2020.

(3) Penyusunan RKPD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk Tahun 2020 dalam RPJMD, rencana kerja pemerintah, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(4) Penyusunan...../5

(4) Penyusunan RKPD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kewenangan dan hasil inventarisasi personil, pendanaan sarana dan prasarana serta dokumen.

(5) Penyusunan RKPD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pencapaian nasional dan arah kebijakan pemerintah.

Pasal 5

Penetapan RKPD Tahun 2020 mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Papua.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 26 Juni 2019

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
T.E.A.HERY DOSINAEN,S.IP.,M.KP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR,SH.,MH
NIP.19661202 198603 1 002

GUBERNUR PAPUA

LUKAS ENEMBE, SIP, MH

WAKIL GUBERNUR PAPUA

KLEMEN TINAL, SE, MM

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen RKPD Provinsi Papua Tahun 2020 merupakan dokumen wajib yang dipersyaratkan untuk dibuat sebagai dasar pelaksanaan satu tahun rencana pembangunan.

Sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pada pasal 12 ayat 3 bahwa RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD Provinsi Papua Tahun 2020 kali ini merupakan RKPD tahun ke-II pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua tahun 2019-2023, dengan tema "Peningkatan Kualitas Hidup yang Berkeadilan dan Berkelanjutan" tema ini merupakan landasan kita dalam pembangunan untuk tahun 2020 yang akan didukung oleh 5 (lima) prioritas pembangunan, yaitu : 1)Peningkatan Kualitas SDM dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar; 2)Pemantapan Rasa Aman, Tentram dan Kedewasaan Berdemokrasi; 3)Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan; 4)Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi; dan 5)Pemantapoan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan. Diharapkan dengan tema dan prioritas ini dapat menjawab tantangan pembangunan di Provinsi Papua tahun 2020 mendatang.

Dokumen RKPD ini akan menjadi rujukan dan pegangan bagi seluruh stakeholders di Provinsi Papua tanpa terkecuali, untuk bersama-sama mewujudkan visi **KITA** bersama yaitu **Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan.**

Jayapura, 2019

GUBERNUR PAPUA

TTD

LUKAS ENEMBE, SIP, MH

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar isi ii
Daftar Tabel v
Daftar Gambar x

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 3

1.3. Hubungan Antar Dokumen 5

1.4. Maksud dan Tujuan 8

1.5. Sistematika Penulisan Dokumen RKPD 2020 8

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 10

2.1. Kondisi Umum Daerah 10

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi 10

2.1.2. Aspek Demografi 41

2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 45

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 96

2.1.5. Aspek Pelayanan Umum 110

2.1.6. Aspek Otonomi Khusus Provinsi Papua 199

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD 220

2.2.1. Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan 222

2.2.2. Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan 223

2.2.3. Evaluasi Kinerja Rumah Sakit 225

2.2.4. Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 227

2.2.5. Evaluasi Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 229

2.2.6. Evaluasi Kinerja Dinas Kebudayaan 230

2.2.7. Evaluasi Kinerja Dinas Olah Raga dan Pemuda 231

2.2.8. Evaluasi Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 233

2.2.9. Evaluasi Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 234

2.2.10. Evaluasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan 235

2.2.11. Evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 236

2.2.12. Evaluasi Kinerja Dinas Pariwisata 237

2.2.13. Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyakat dan Kampung 238

2.2.14. Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 239

2.2.15. Evaluasi Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 240

2.2.16. Evaluasi Kinerja Dinas Kehutanan 241

2.2.17. Evaluasi Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan 243

2.2.18. Evaluasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 244

2.2.19. Evaluasi Kinerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup 245
2.2.20. Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan 246
2.2.21. Evaluasi Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan 247
2.2.22. Evaluasi Kinerja Dinas Perkebunan 248
2.2.23. Evaluasi Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 250
2.2.24. Evaluasi Kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil 251
2.2.25. Evaluasi Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 252
2.2.26. Evaluasi Kinerja Dinas Tenaga Kerja 254
2.2.27. Evaluasi Kinerja Badan Kepegawaian Daerah 255
2.2.28. Evaluasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 256
2.2.29. Evaluasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 258
2.2.30. Evaluasi Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan 259
2.2.31. Evaluasi Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah 260
2.2.32. Evaluasi Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah 261
2.2.33. Evaluasi Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 262
2.2.34. Evaluasi Kinerja Badan Penghubung Daerah 263
2.2.35. Evaluasi Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 264
2.2.36. Evaluasi Kinerja Biro Hukum 266
2.2.37. Evaluasi Kinerja Biro Humas Dan Protokol 268
2.2.38. Evaluasi Kinerja Badan Biro Kesejahteraan Masyarakat dan Kemasyarakatan 269
2.2.39. Evaluasi Kinerja Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 270
2.2.40. Evaluasi Kinerja Biro Organisasi 271
2.2.41. Evaluasi Kinerja Biro Otonomi Khusus 272
2.2.42. Evaluasi Kinerja Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri 273
2.2.43. Evaluasi Kinerja Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam 274
2.2.44. Evaluasi Kinerja Biro Tata Pemerintahan 275
2.2.45. Evaluasi Kinerja Biro Umum 276
2.2.46. Evaluasi Kinerja Inspektorat 277
2.2.47. Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 278
2.2.48. Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah 280
2.2.49. Evaluasi Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua 281
2.2.50. Evaluasi Kinerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua 281
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah 282
2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah 282
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 283
BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 299
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 299

3.1.1. Perkembangan Ekonomi Provinsi Papua 301
3.1.2. Tantangan Dan Prospek Perekonomian Wilayah Tahun 2019 dan 2020 313
3.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Tahun 2020 327
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 330
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 331
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah 344
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 356
BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 361
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah 361
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020 375
4.2.1. Fokus Pembangunan Tahun 2020 376
4.2.2. Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 384
4.2.3. Telaah RTRW Provinsi Papua 386
4.2.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRP Provinsi Papua Terhadap Penyusunan RKPD 2020 391
4.2.5. Penetapan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020 416
4.2.6. Sasaran Pembangunan tahun 2020 424
BAB 5 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH 431
5.1. Kerangka Pengembangan Kewilayahan 431
5.2. Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah 440
5.3. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 441
5.4. Pengembangan Perekonomian Wilayah 444
5.5. Kebijakan Pengembangan Konektivitas 446
BAB 6 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 455
6.1. Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2020 456
6.2. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaannya 544
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 545
7.1. Indikator Kinerja Utama 545
7.2. Indikator Kinerja Kunci 547
BAB 8 P E N U T U P 569

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kondisi Wilayah Administratif Provinsi Papua Tahun 2017 12
Tabel 2.2 Luas Wilayah Laut dan Panjang Garis Pantai di Provinsi Papua 16
Tabel 2.3 Kawasan Terluar di Provinsi Papua 16
Tabel 2.4 Daerah Tertinggal dan Penyebab Utama Ketertinggalan Wilayah Papua Tahun 2015-2019 18
Tabel 2.5 Jumlah Desa Berkembang dan Desa Tertinggal di Provinsi Papua Tahun 2017* 20
Tabel 2.6 Tingkat Kerawanan Bencana di Provinsi Papua Tahun 2013.....22
Tabel 2.7 Panjang Sungai dan Luas Daerah Tangkapan di Provinsi Papua.....27
Tabel 2.8 Jenis Penggunaan Lahan di Provinsi Papua Berdasarkan RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2023.....32
Tabel 2.9 Keadaan Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2017 43
Tabel 2.10 Struktur Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%) 47
Tabel 2.11 Ketimpangan Distribusi Pendapatan Tahun 2013-2016.....53
Tabel 2.12 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2013-2017 60
Tabel 2.13 Indikator Ketenagakerjaan di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 71
Tabel 2.14 Pemenuhan Konsumsi Energi dan Protein Berdasarkan Kelompok Bahan Pangan di Provinsi Papua Tahun 2013-2017.....80
Tabel 2.15 Komposisi PDRB Sektor Pertanian dan Perkebunan Menurut Harga Konstan 2010 Tahun 2013-2017 (milyar rupiah).....84
Tabel 2.16 Komposisi PDRB Sektor Pariwisata Provinsi Papua (milyar rupiah) 87
Tabel 2.17 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%) 91
Tabel 2.18 Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Kabupaten/Kota Se Papua Tahun 2017 (%) 94
Tabel 2.19 Produktifitas Total Daerah per Tenaga Kerja (juta rupiah/orang) 102
Tabel 2.20 Simpanan dan Kredit yang Disalurkan Sektor Perbankan di Provinsi Papua Tahun 2013-2017.....104
Tabel 2.21 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia (ribu orang) 106
Tabel 2.22 Angka Partisipasi Pendidikan di Kabupaten/Kota Tahun 2017 113
Tabel 2.23 Angka Putus Sekolah (APS) Tahun 2017 115
Tabel 2.24 Angka Melanjutkan SD ke SMP dan SMP ke SMA/SMK 117
Tabel 2.25 Jumlah Gedung Sekolah Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (unit) 118
Tabel 2.26 Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Papua 119
Tabel 2.27 Jumlah Murid di Provinsi Papua Tahun 2013-2017.....120
Tabel 2.28 Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar 121
Tabel 2.29 Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah.....122
Tabel 2.30 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Tahun 2017.....123
Tabel 2.31 Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar 142
Tabel 2.32 Rasio Tempat Ibadah per 10.000 penduduk 147
Tabel 2.33 APM Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2017.....155
Tabel 2.34 Data Peralihan Tanah di Provinsi Papua Tahun 2016-2017 (ha) 158
Tabel 2.35 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Papua 159
Tabel 2.36 Persentase Anak, Bayi dan Balita Berakte Kelahiran Tahun 2017.....160
Tabel 2.37 Persentase Penduduk dan Anak yang Memiliki KTP Berbasis NIK Tahun 2017.....161
Tabel 2.38 Alokasi Dana Desa di Provinsi Papua 165
Tabel 2.39 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) 167
Tabel 2.40 Rasio Akseptor KB.....169
Tabel 2.41 Jumlah PUS yang Tidak ber-KB 170
Tabel 2.42 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN dan PMA) 174
Tabel 2.43 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Dari Perusahaan PMA Dan PMDN.....174

Tabel 2.44 Pemberdayaan Pemuda Provinsi Papua tahun 2013-2017 176
Tabel 2.45 Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Papua tahun 2013-2017 177
Tabel 2.46 Perkembangan Warisan Budaya Tak Benda Papua 179
Tabel 2.47 Luas Panen, Produksi Dan Produktifitas Komoditas Utama Pertanian Di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 184
Tabel 2.48 Luas Panen, Produksi Dan Produktifitas Komoditas Utama Perkebunan Di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 185
Tabel 2.49 Produksi Kayu Hutan Menurut Jenisnya di Provinsi Papua (m3) 187
Tabel 2.50 Luas Areal Pengunaan Lahan Pertambangan (ha) 187
Tabel 2.51 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Listrik PLN Tahun 2013-2017 190
Tabel 2.52 Volume Ekspor dan Impor Menurut Negara Tujuan (ton) 191
Tabel 2.53 Volume Ekspor dan Impor Menurut Pelabuhan (ton) 192
Tabel 2.54 Volume dan Nilai Ekspor Menurut Golongan Barang HS 2 Digit Provinsi Papua Tahun 2013 – 2016 (ton/US$) 193
Tabel 2.55 Nilai Ekspor-Impor Provinsi Papua dan Indonesia (Juta US$) Tahun 2013-2016 (US$/%) 193
Tabel 2.56 Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan 195
Tabel 2.57 Jumlah Rumah Tangga Perikanan 197
Tabel 2.58 Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 198
Tabel 2.59 Perdasus Perintah Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 199
Tabel 2.60 Perdasi yang diamanatkan oleh UU No. 21 Tahun 2001 200
Tabel 2.61 Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua 211
Tabel 2.62 Rata-Rata Orang Bekerja Dan Tingkat Pengangguran Terbuka 216
Tabel 2.63 Rata-Rata Percepatan IPM Di Provinsi Papua Dan Indonesia 217
Tabel 2.64 Efektifitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Papua 218
Tabel 2.65 Kriteria Penilaian Berdasarkan Rasio Pencapaian Kinerja 221
Tabel 2.66 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Pendidikan 222
Tabel 2.67 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2018 224
Tabel 2.68 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Tahun 2018 225
Tabel 2.69 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2018 227
Tabel 2.70 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018 229
Tabel 2.71 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Kebudayaan Tahun 2018 231
Tabel 2.72 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Olah Raga dan Pemuda Tahun 2018 232
Tabel 2.73 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2018 233
Tabel 2.74 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2018 234
Tabel 2.75 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 235
Tabel 2.76 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 236
Tabel 2.77 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Pariwisata Tahun 2018 237
Tabel 2.78 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyakat dan Kampung Tahun 2018 238
Tabel 2.79 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2018 239

Tabel 2.80 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018 241
Tabel 2.81 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Kehutanan Tahun 2018 242
Tabel 2.82 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 243
Tabel 2.83 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 244
Tabel 2.84 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018 245
Tabel 2.85 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2018 247
Tabel 2.86 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018 248
Tabel 2.87 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Perkebunan Tahun 2018 249
Tabel 2.88 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 250
Tabel 2.89 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2018 251
Tabel 2.90 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2018 252
Tabel 2.91 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018 254
Tabel 2.92 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2018 256
Tabel 2.93 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2018 257
Tabel 2.94 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018 258
Tabel 2.95 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2018 259
Tabel 2.96 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2018 260
Tabel 2.97 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tahun 2018 261
Tabel 2.98 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2018 262
Tabel 2.99 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Badan Penghubung Daerah Tahun 2018 ..264
Tabel 2.100 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 265
Tabel 2.101 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Hukum Tahun 2018 267
Tabel 2.102 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Humas Dan Protokol Tahun 2018 ...268
Tabel 2.103 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Kesejahteraan Masyarakat dan Kemasyarakatan Tahun 2018 269
Tabel 2.104 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018 271
Tabel 2.105 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Organisasi Tahun 2018 272
Tabel 2.106 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Otonomi Khusus Tahun 2018 272
Tabel 2.107 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Tahun 2018 274
Tabel 2.108 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tahun 2018 275
Tabel 2.109 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Tata Pemerintahan Tahun 2018 275
Tabel 2.110 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Umum Tahun 2018 277
Tabel 2.111 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Inspektorat Tahun 2018 277

Tabel 2.112 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018 279
Tabel 2.113 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2018 280
Tabel 2.114 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2018 281
Tabel 2.115 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Sekretariat Majelis Rakyat Papua Tahun 2018 282
Tabel 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Di Provinsi Papua Periode 2013 – 2018 (dalam %).302
Tabel 3.2 Kontribusi Sektoral Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Periode 2013 – 2018 (dalam %) 303
Tabel 3.3 Struktur Ekonomi Provinsi Papua Periode 2013 – 2018 (dalam %).....304
Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2018 (dalam %) 305
Tabel 3.5 Struktur Ekonomi Provinsi Papua Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2018 (dalam %) 306
Tabel 3.6 Indonesia Provincial Competitiveness Ranking & Score Overall Competitiveness 308
Tabel 3.7 Ekspor Provinsi Papua Menurut Negara Tujuan Tahun 2013 - 2016.....310
Tabel 3.8 Target Pembangunan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2020 326
Tabel 3.9 Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 - 2017 (Rp juta).....333
Tabel 3.10 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2018 337
Tabel 3.11 Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Provinsi Papua Tahun 2017 s.d tahun 2021 (dalam Rp.) 339
Tabel 3.12 Perkembangan Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (Rp juta).....346
Tabel 3.13 Target dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2017 ..347
Tabel 3.14 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Tahun 2017 s.d tahun 2021 (dalam Rp.) 348
Tabel 3.15 Target Dan Proyeksi Belanja Daerah Yang Bersumber Dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun 2019 dan 2020 (dalam Rp.) 353
Tabel 3.16 Target Dan Proyeksi Alokasi Dana Otonomi Khusus Untuk Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2019 dan 2020 (dalam Rp.) 355
Tabel 3.17 Target Dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 dan 2020 (dalam Rp.).....358
Tabel 4.1 Keselarasan Misi, Tujuan, Sasaran Dan Strategi Pembangunan 364
Tabel 4.2 Sandingan Isu-Isu Strategis Nasional, RPJMD Provinsi Papua Tahun 2018-2023 dan RKPD 2020.....377
Tabel 4.3 Prioritas Nasional 2020, Prioritas Daerah Dan Fokus Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2020 417
Tabel 4.4 Sasaran Makro Pembangunan Daerah tahun 2020 424
Tabel 4.5 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran Pembangunan Tahun 2020 425
Tabel 5.1 Target Pertumbuhan PDRB Tahun 2020 Menurut Wilayah Adat Dan Kabupaten/Kota 434
Tabel 5.2 Target Pertumbuhan PDRB Per Kapita Tahun 2020 Menurut Wilayah Adat Dan Kabupaten/Kota 435
Tabel 5.3 Target Ketimpangan Pendapatan Gini Ratio Tahun 2020 436
Tabel 5.4 Target Tingkat Kemiskinan Tahun 2020 Menurut Wilayah Adat Dan Kabupaten/Kota 437
Tabel 5.5 Target Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 Menurut Wilayah Adat Dan Kabupaten/Kota 438

Tabel 5.6 Target Tingkat Pengangguran Tahun 2020 Menurut Wilayah Adat Dan Kabupaten/Kota 438
Tabel 5.7 Pusat Pertumbuhan dalam Pengembangan Wilayah Provinsi Papua 441
Tabel 5.8 Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan 442
Tabel 5.9 Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Peningkatan Sarana Kesehatan dalam Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan di Papua 443
Tabel 5.10 Pengembangan Perekonomian Wilayah 445
Tabel 5.11 Pengembangan Wilayah Perbatasan 453
Tabel 6.1 Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020 457
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 546
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2020 547

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jadwal Dan Tahapan Penyusunan RKPD Dan KUA-PPAS 2020 3
Gambar 1.2 Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 7
Gambar 2.1 Peta Batas Administrasi Provinsi Papua 11
Gambar 2.2 Peta Kondisi Ketinggian Wilayah Papua 14
Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng 15
Gambar 2.4 Peta Pos Lintas Batas Negara di Indonesia Tahun 2018 17
Gambar 2.5 Kejadian Konflik di Provinsi Papua Tahun 2015 21
Gambar 2.6 Peta Rawan Bencana Alam 24
Gambar 2.7 Peta Intensitas Curah Hujan 25
Gambar 2.8 Peta Satuan Wilayah Sungai Provinsi Papua 29
Gambar 2.9 Peta Tutupan Lahan Tahun 2012 31
Gambar 2.10 Kondisi Tutupan Lahan Provinsi Papua Berdasarkan Citra 8 OLI Liputan Tahun 2017 (dalam hektar) 33
Gambar 2.11 Peta Penetapan Lokasi Fasilitasi Pada 5 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dan 4 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Papua Tahun 2015 . 34
Gambar 2.12 Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2013 dan 2017 41
Gambar 2.13 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk 42
Gambar 2.14 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Sex 42
Gambar 2.15 Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Dengan Tambang dan Tanpa Tambang Tahun 2013-2017 (%) 45
Gambar 2.16 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 dengan Tambang per Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017 (%) 46
Gambar 2.17 Perkembangan Indeks Harga Konsumen dan Inflasi 48
Gambar 2.18 Laju Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Berdasarkan Angka Deflator Tahun 2014-2017 (%) 49
Gambar 2.19 Tingkat Kemahalan Konstruksi di Provinsi Papua 50
Gambar 2.20 Pendapatan Perkapita Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan dengan dan Tanpa Tambang Tahun 2013-2017 (juta Rp) 51
Gambar 2.21 Pendapatan Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Dengan Tambang dan Tanpa Tambang di Provinsi Papua Tahun 2017 52
Gambar 2.22 Angka Rasio Gini di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 53
Gambar 2.23 Distribusi Pendapatan Menurut Kategori Bank Dunia 55
Gambar 2.24 Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah Berdasarkan Angka Williamson Index dengan Menyertakan Sektor Pertambangan 55
Gambar 2.25 Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah Berdasarkan Angka Williamson Index Tanpa Sektor Pertambangan 56
Gambar 2.26 Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan di Papua 57
Gambar 2.27 Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua (%) 58
Gambar 2.28 Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Provinsi Papua (%) 59
Gambar 2.29 Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Pada Tahun 2017 60
Gambar 2.30 Tingkat Pertumbuhan IPM Beserta Komponennya di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%) 61
Gambar 2.31 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 62
Gambar 2.32 Angka Melek Huruf di Provinsi Papua Tahun 2013-2016 (%) 63
Gambar 2.33 Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Papua (tahun) 64
Gambar 2.34 Harapan Lama Sekolah di Provinsi Papua (tahun) 66
Gambar 2.35 Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Papua 68
Gambar 2.36 Status Gizi Anak Balita Umur 0 - 23 Bulan Berdasarkan Indeks BB/U di Provinsi Papua dan Indonesia Tahun 2015-2017 (%) 69

Gambar 2.37 Angka Stunting Tertinggi di Indonesia Tahun 2017 (%) 70
Gambar 2.38 Cakupan Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Posbindu TM di Indonesia sampai dengan Tahun 2017 (%) 71
Gambar 2.39 Tingkat Pengangguran di Provinsi Papua Tahun 2017 (%) 73
Gambar 2.40 Komposisi dan Struktur Tenaga Kerja Menurut Sektor.....74
Gambar 2.41 Struktur Tenaga Kerja Menurut Pendidikan (%) 74
Gambar 2.42 Struktur Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha dan Tingkat Pendidikan di Provinsi Papua Tahun 2017 (%).....75
Gambar 2.43 Produktifitas Regional (Juta Rupiah Per Tenaga Kerja) 76
Gambar 2.44 Kondisi Demografi Keluarga di Provinsi Papua Tahun 2017 77
Gambar 2.45 Indeks Kebahagiaan Menurut Provinsi Tahun 2014 dan 2017.....78
Gambar 2.46 Perbedaan Nilai Sub Indeks Terpenting Pembentuk Indeks Kebahagiaan di Provinsi Papua Antara Tahun 2014 dan 2017 79
Gambar 2.47 Skor Pola Pangan Harapan di Indonesia dan Provinsi Papua 81
Gambar 2.48 Kondisi Ketahanan Pangan di Provinsi Papua 82
Gambar 2.49 Ketersediaan Cadangan Pangan di Provinsi Papua (ribu ton) 83
Gambar 2.50 Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%).....84
Gambar 2.51 Nilai PDRB, Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%).....85
Gambar 2.52 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%).....86
Gambar 2.53 Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%).....88
Gambar 2.54 Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perikanan dan Kelautan Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%).....89
Gambar 2.55 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%) 90
Gambar 2.56 Pengeluaran Per Kapita Riil di Provinsi Papua (juta rupiah).....97
Gambar 2.57 Struktur Pengeluaran Per Kapita di Provinsi Papua 97
Gambar 2.58 Komposisi Pengeluaran Per Kapita Papua Tahun 2017 (%).....98
Gambar 2.59 Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan di Provinsi Papua Tahun 2013 dan 2017 (ribu rupiah) 98
Gambar 2.60 Nilai Tukar Petani di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%) 99
Gambar 2.61 Nilai Tukar Petani di Indonesia pada Desember 2017 (%) 100
Gambar 2.62 Nilai Tukar Petani dan Nelayan Provinsi Papua (%) 101
Gambar 2.63 Net Ekspor Daerah dan Rasionya Terhadap PDRB 103
Gambar 2.64 Penyaluran Kredit Pada UMKM di Provinsi Papua 105
Gambar 2.65 Proyeksi Bonus Demografi di Provinsi Papua 106
Gambar 2.66 Penyelesaian Kejahatan di Provinsi Papua dan Indonesia (%) 107
Gambar 2.67 Daya Saing Investasi Berdasarkan ICOR Tahun 2014 dan 2017 109
Gambar 2.68 Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Papua.....111
Gambar 2.69 Angka Partisipasi Pendidikan di Provinsi Papua.....112
Gambar 2.70 Jumlah Sekolah pendidikan SD, SMP dan SMA Tahun 2017 118
Gambar 2.71 Angka Melek Huruf Penduduk Usia > 15 Tahun (%) 124
Gambar 2.72 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup.....125
Gambar 2.73 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup.....126
Gambar 2.74 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%) 127
Gambar 2.75 Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Tahun 2016 128
Gambar 2.76 Cakupan Puskesmas per 10.000 Penduduk di Provinsi Papua 129
Gambar 2.77 Rasio Dokter dan Tenaga Medis per 100.000 Penduduk 129

Gambar 2.78 Angka Penderita Malaria di Provinsi Papua Dan Indonesia Tahun 2013-2017 130
Gambar 2.79 Angka Penderita Malaria DI Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua Tahun 2013-2017 131
Gambar 2.80 HIV/AIDS di Provinsi Papua (orang) 131
Gambar 2.81 HIV/AIDS Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 132
Gambar 2.82 Cakupan Kunjungan K4 di Provinsi Papua....133
Gambar 2.83 Panjang Jalan Provinsi Menurut Jenis Permukaan Tahun 2016 134
Gambar 2.84 Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/kota dan Kondisi Jalan di Provinsi Papua Tahun 2016 (km) 135
Gambar 2.85 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk....136
Gambar 2.86 Akses terhadap Sarana Pendidikan dan Kesehatan 137
Gambar 2.87 Jumlah Jembatan berdasarkan Kondisi Tahun 2016....138
Gambar 2.88 Penduduk Berakses Air Bersih di Provinsi Papua....139
Gambar 2.89 Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Provinsi Papua....140
Gambar 2.90 Sumber Air Minum, Mandi, dan Cuci Dominan 140
Gambar 2.91 Persentase Pelanggan PDAM di Provinsi Papua Tahun 2014....141
Gambar 2.92 Persentase Rumah Tangga dengan Jamban Tidak Layak Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2015....142
Gambar 2.93 Kondisi Ketersediaan Infrastruktur Air Limbah Domestik di Provinsi Papua Tahun 2017 144
Gambar 2.94 Kondisi Penanganan Sampah di Provinsi Papua 2013-2018 145
Gambar 2.95 Tempat Buang Sampah Dominan (Kiri); Persentase Sampah yang Dikelola secara Mandiri oleh Masyarakat di Sumber (Kanan)....146
Gambar 2.96 Ketersediaan Infrastruktur Persampahan Domestik Papua....146
Gambar 2.97 Kondisi Rumah Layak Huni di Provinsi Papua 149
Gambar 2.98 Kondisi Penyenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Papua 149
Gambar 2.99 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Papua Tahun 2017 (orang) 150
Gambar 2.100 Angka Perselisihan Pengusaha-Pekerja Per Tahun (%) 152
Gambar 2.101 Kondisi Pengembangan Kapasitas Tenaga Kerja....152
Gambar 2.102 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Papua Tahun 2013-2017....154
Gambar 2.103 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Papua 155
Gambar 2.104 Jumlah KDRT Provinsi Papua Tahun 2013-2016....157
Gambar 2.105 Proporsi Penduduk Di Provinsi Papua dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar = 2.100 Kkal/kapita/hari) 157
Gambar 2.106 Kondisi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 162
Gambar 2.107 Jumlah Swadaya Masyarakat yang Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013-2017 (program) 163
Gambar 2.108 Jumlah kelompok PKK dan binaan PKK....164
Gambar 2.109 Perkembangan APBK, APBD Provinsi, dan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Tahun 2015-2017 (Ribu Rupiah)....166
Gambar 2.110 Persentase Dana Desa terhadap APBD Provinsi, Dana Otonomi Khusus, dan APBK di Provinsi Papua Tahun 2015-2017 (%)....166
Gambar 2.111 Persentase APBK terhadap APBD Provinsi, dan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Tahun 2015-2017 (%) 167
Gambar 2.112 Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga 168
Gambar 2.113 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan 171
Gambar 2.114 Individu yang Menggunakan Telepon Genggam dan Internet....172
Gambar 2.115 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016 173

Gambar 2.116 Capaian Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga 175
Gambar 2.117 Tingkat Apresiasi Seni dan Budaya Daerah di Kalangan Pemerintah, Masyarakat dan Swasta 180
Gambar 2.118 Kondisi Perpustakaan di Provinsi Papua 181
Gambar 2.119 Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip secara Baku 182
Gambar 2.120 Jumlah Objek Wisata dan Kunjungan Tamu di Provinsi Papua 183
Gambar 2.121 Jumlah Tamu WNA dan WNI Tahun 2016 (orang) 183
Gambar 2.122 Distribusi Penyebaran Luas Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Papua Tahun 2016 186
Gambar 2.123 Jumlah Cadangan (Reserve) yang Terdata dan Tingkat Pengelolaan Sumber Daya Batubara di Provinsi Papua 188
Gambar 2.124 Potensi dan Jumlah Cadangan Tembaga dan Emas yang Sudah Diketahui (Juta Ton Bijih) 188
Gambar 2.125 Total Produksi Tembaga dan Emas (Juta Ton Bijih) 189
Gambar 2.126 Kondisi Perindustrian di Provinsi Papua 194
Gambar 2.127 Mekanisme Hubungan Gubernur, DPRP dan MRP 204
Gambar 2.128 Alokasi Dana Otsus Provinsi Papua Tahun 2002-2016 210
Gambar 2.129 Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Papua dan Indonesia 212
Gambar 2.130 Struktur Ekonomi Provinsi Papua Tahun 1995-2017 (%) 213
Gambar 2.131 Jumlah Orang Bekerja dan Tingkat Pengangguran di Papua 215
Gambar 2.132 IPM di Provinsi Papua dan Indonesia 217
Gambar 3.1 Pertumbuhan Investasi, COR Dan ICOR Provinsi Papua Tahun 2013-2018 307
Gambar 3.2 Perkembangan Neraca Perdagangan Luar Negeri Provinsi Papua Tahun 2011-2016 (Rp. Triliun) 309
Gambar 3.3 Perbandingan Neraca Perdagangan Luar Negeri Dan Antar Daerah Provinsi Papua Tahun 2011-2016 (Rp. Triliun) 309
Gambar 3.4 Tingkat Inflasi Bulanan Kota Jayapura dan Indonesia Periode Januari 2013 - Desember 2017 311
Gambar 3.5 Tingkat Inflasi Tahunan Kota Jayapura dan Indonesia Tahun 2013 – 2018 311
Gambar 3.6 Indeks Kemahalan Kontruksi Di Provinsi Papua Tahun 2010 - 2017 313
Gambar 3.7 Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2018 332
Gambar 3.8 Struktur Pendapatan Daerah Provinsi Papua 2013-2018 336
Gambar 4.1 Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2018-2023 376
Gambar 5.1 Kerangka Pengembangan Kewilayahan Papua 432
Gambar 5.2 Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah Provinsi Papua 440
Gambar 5.3 Pengembangan Klaster Ekonomi di Papua 444
Gambar 5.4 Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Mamta 447
Gambar 5.5 Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Saereri 448
Gambar 5.6 Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Mee Pago 449
Gambar 5.7 Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat La Pago 450
Gambar 5.8 Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Anim Ha 451

BAB I

PENDAHULUAN

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 3 telah mengamanatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Dimana salah satu dokumen dari perencanaan pembangunan daerah yang disebutkan adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Pasal 260 juga mengamanatkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan daerah, yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Secara operasional, RKPD memuat arahan untuk mencapai kinerja pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). RKPD menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi Provinsi Papua 2018-2023 yaitu: "***Papua Bangkit, Mandiri Dan Sejahtera Yang Berkeadilan***".

RKPD Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2020 disusun berdasarkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik bermakna bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah yang disepakati bersama DPRD. Sedangkan perencanaan melalui pendekatan teknokratis dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilaksanakan oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsi

memiliki tugas untuk itu. Adapun perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang kepentingan (*stakeholder*) terhadap pembangunan, di mana pelibatan para pihak tersebut dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dan menumbuhkembangkan rasa memiliki. Terakhir, untuk pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Selain itu, penyusunan RKPD 2020 juga diperkuat dengan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial (HITS) dengan memperhatikan pada beberapa hal yaitu :

1. Pengendalian perencanaan;
2. Konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran;
3. Perencanaan berbasis kewilayahan, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Integrasi sumber pendanaan.

Selanjutnya, untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, penyusunan RKPD 2020 menggunakan *e-planning* dan *e-musrenbang*. Melalui penerapan berbasis IT (Informasi dan Teknologi) tersebut diharapkan RKPD 2020 akan lebih berkualitas, yang dapat memenuhi beberapa kriteria antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya;
2. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk program dan indikator kinerja keluaran (*output*) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur;
4. Program dan kegiatan dalam RKPD dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas tersebut, maka proses penyusunan RKPD 2020 dilaksanakan dalam beberapa tahap, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 16 Permendagri

Nomor 86 tahun 2017, meliputi : (a) persiapan penyusunan; (b) penyusunan rancangan awal; (c) penyusunan rancangan; (d) pelaksanaan Musrenbang; (e) perumusan rancangan akhir; dan (f) penetapan. Semua ini dijabarkan dalam skedul dan tahapan penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Provinsi Papua 2020 sebagai berikut :

Gambar 1.1 Jadwal Dan Tahapan Penyusunan RKPD Dan KUA-PPAS 2020

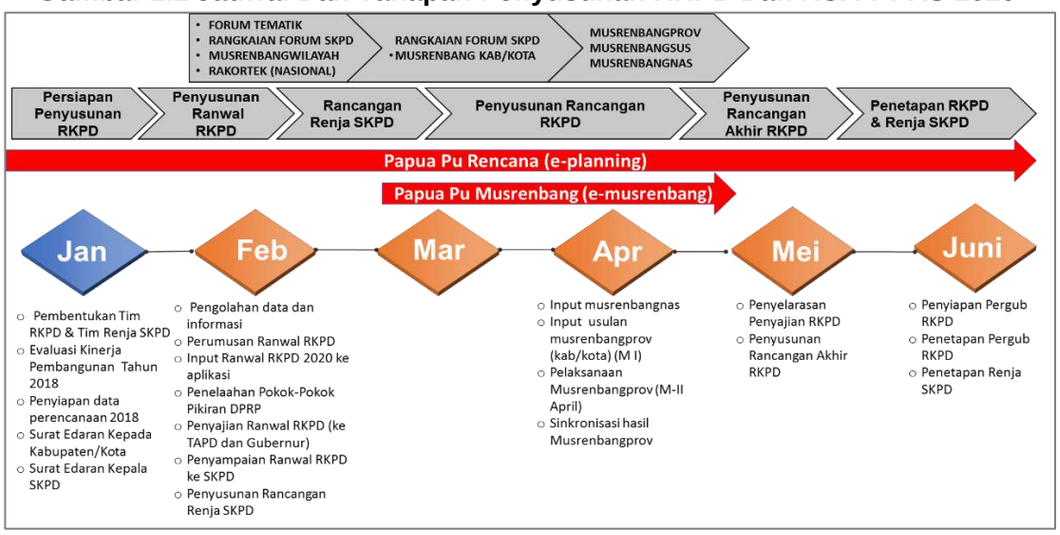

RKPD 2020 ini sangat strategis, karena merupakan basis perencanaan pemerintah provinsi dan tolok ukur dari kesuksesan penyelenggaraan PON XX Provinsi Papua di tahun 2020. Untuk itu pondasi yang dibangun melalui RKPD 2020 harus lebih mantap yang diwujudkan dengan perumusan prioritas daerah yang komprehensif dan holistik, yang dijabarkan secara integratif dan spasial, serta disusun secara teknokratik, partisipatif, politik, *bottom-up* dan *top-down*. Semua ini merupakan rangkaian proses sistematis dan terstruktur yang diimplementasikan melalui *e-planning Papua Pu Rencana* yang menjadi inovasi dari penyusunan RKPD Provinsi Papua saat ini, oleh karena hirarkinya semakin bertambah kuat dan terkendali yang akan menjamin dan memastikan terintegrasiya RKPD 2020 dengan RPJMD 2018-2023, RENSTRA-PD 2018-2023, RENJA-PD 2020, dan kepentingan seluruh *stakeholder* pembangunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2019 adalah:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Inpres Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
12. Inpres Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 Di Provinsi Papua.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020;
16. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua 2005-2025;
17. Perdasus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25/2013 tentang tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus;
18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033;
19. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus, yang selanjutnya mengalami perubahan kedua kali melalui Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus.
20. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Provinsi Papua Tahun 2020 selain disusun dengan mempedomani RPJMD Provinsi Papua Tahun 2018-2023, juga berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya, seperti rencana tata ruang, RPJPD, RPJP dan RPJM Nasional. Di samping itu, RKPD Provinsi Papua Tahun 2020 ini disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi kinerja pembangunan 2 (dua) tahun sebelumnya serta isu-isu strategis yang berkembang.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dari proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pernbangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RPJMD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD 2020 ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2 Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

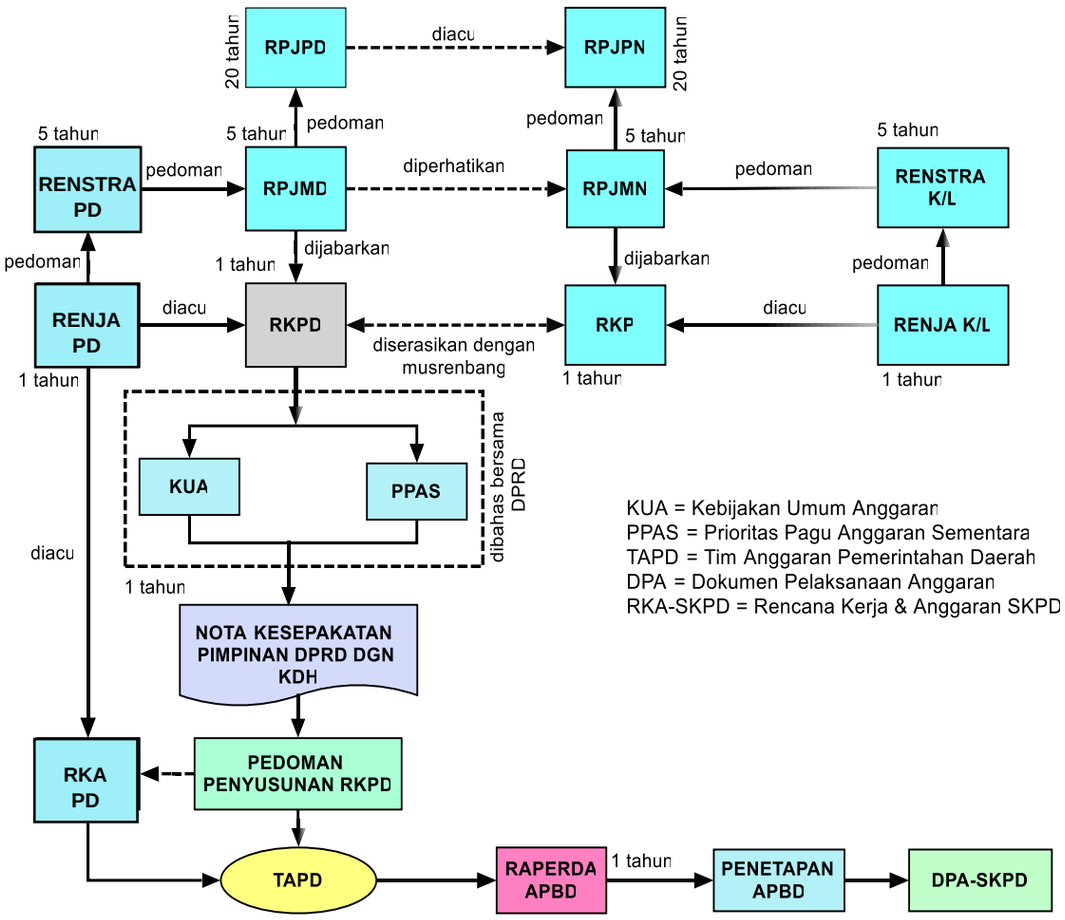

Mengacu pada Gambar 1.2 tersebut dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah: (1) RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJP Nasional dan RPJM Nasional melalui mekanisme Musrenbangnas, (2) RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah. (3) selanjutnya RKPD ini menjadi pedoman bagi penyusunan Renja-PD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap OPD. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi OPD dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBN dan APBD. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2020, menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Provinsi Papua tahun 2020 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD tahun 2020.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka penyusunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2020 ini harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanan di kabupaten/kota di Provinsi Papua sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju adalah dokumen perncanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud : (1). Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2020, (2). Mewujudkan sinergi rancangan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2020.

Sedangkan tujuannya adalah : (1). Sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja (Renja) tahun 2020; (2). Menjadi landasan bagi tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dalam menyusun kebijakan umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020; (3). Menjadi acuan penyusunan RKPD tahun 2020 bagi kabupaten/kota di Provinsi Papua; (4). Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pembangunan.

1.5. Sistematika Penulisan Dokumen RKPD 2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2020 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN. Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH. Menjelaskan mengenai kondisi faktual daerah yang dijabarkan menjadi Kondisi Umum Daerah mencakup Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah, serta dilengkapi dengan hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan, Pengelolaan Otonomi Khusus, dan Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH. Bab ini terdiri atas Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH. Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan, serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH. Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJPD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP. Merupakan bab terakhir, yang pada dasarnya memuat tentang rumusan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD 2020 yang menjadi komitmen bagi seluruh *stakeholder* baik yang langsung menjadi pelaksana program kegiatan maupun pihak lain yang ikut berperan dalam pembangunan daerah Provinsi Papua.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah Provinsi Papua dalam pembahasan ini ditinjau berdasarkan luas wilayah, letak dan kondisi geografis, kondisi kawasan, topografi, klimatologi, hidrologi dan tutupan lahan.

2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Posisi Provinsi Papua secara geografis terletak antara garis koordinat 01°00' LU - 9°10' LS dan 134°00' BT - 141°05' BT dengan luas 32.027.839 hektar. Wilayah administrasi Provinsi Papua terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota, yang terbagi menjadi 470 distrik dan 4.378 kampung. Secara administratif Provinsi Papua berbatasan dengan:

a. sebelah utara : Samudra Pasifik
b. sebelah selatan : Laut Arafuru
c. sebelah barat : Papua Barat
d. sebelah timur : Papua New Guinea

Sementara jika diperhatikan dari luas wilayah, terlihat jelas bahwa Kabupaten Sarmi memiliki luas yang paling besar di Papua yakni mencapai 3.558.900 hektar, dan yang paling kecil adalah Kabupaten Supiori hanya seluas 52.800 hektar. Sedangkan bila diamati menurut wilayah adat, berturut-turut luas wilayah yang paling besar adalah Wilayah Mamta seluas 8.624.691 hektar, kemudia Anim Ha seluas 8.215.000 hektar, La Pago seluas 7.467.900 hektar, Mee Pago seluas 5.507.848 hektar, dan terakhir Saireri seluas 2.212.400 hektar.

Gambar 2.1 Peta Batas Administrasi Provinsi Papua

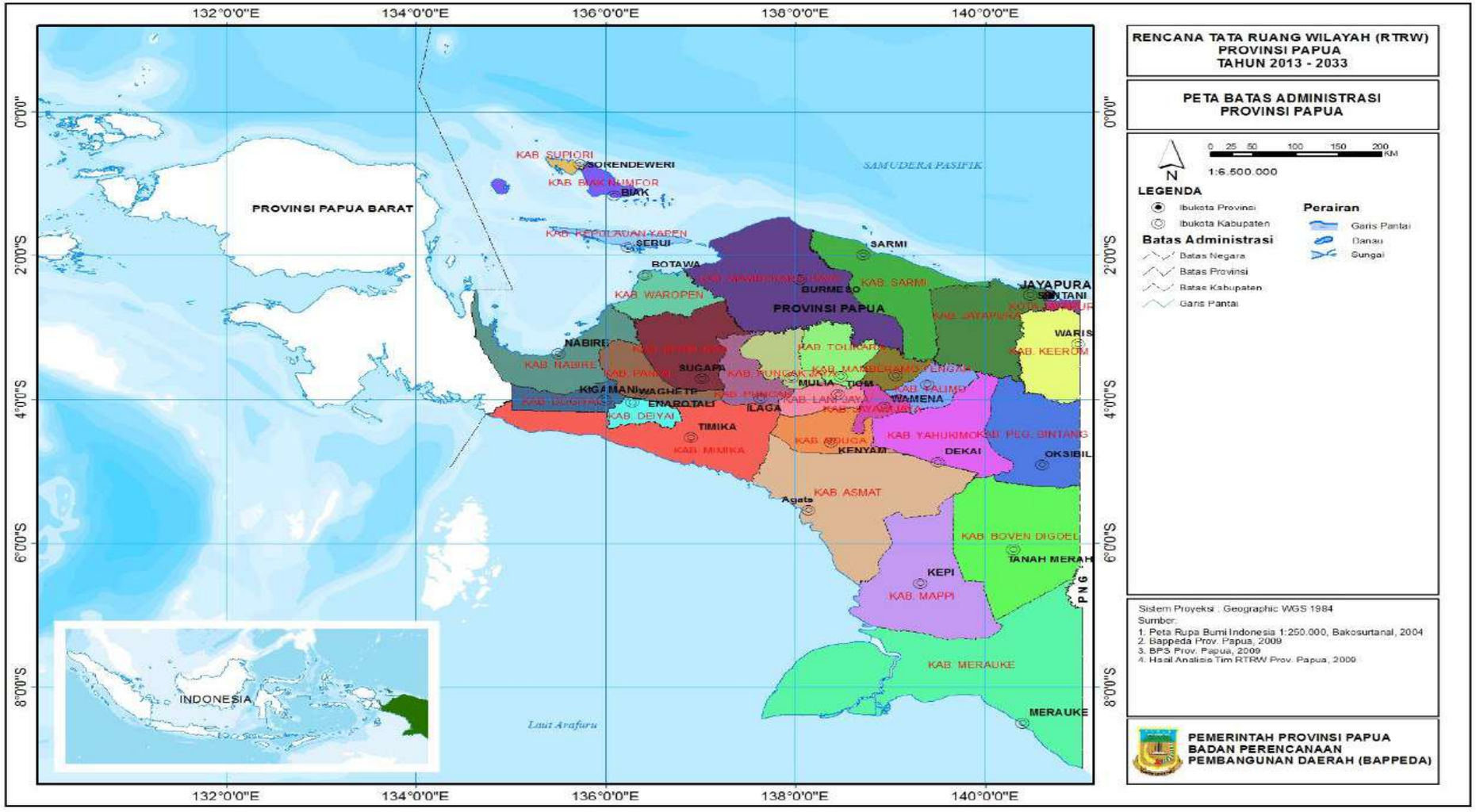

Tabel 2.1 Kondisi Wilayah Administratif Provinsi Papua Tahun 2017

Wilayah Adat	Kabupaten /Kota	Luas Wilayah (Ha)*	Ibu Kota	Jumlah Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah Kelurahan	Keterangan
Anim Ha	Merauke	647.200	Merauke	20	165	10	Dataran Mudah Akses
	Asmat	2.965.800	Agats	23	217	4	Dataran Sulit Akses
	Boven Digoel	2.710.800	Tanah Merah	20	105	5	
	Mappi	1.891.200	Keppi	15	162	2	
La Pago	Jayawijaya	658.500	Wamena	39	317	14	Pegunungan Tengah
	Lanny Jaya	224.800	Tiom	38	353	-	
	Mamberamo Tengah	127.500	Kobakma	5	59	-	
	Nduga	216.800	Kenyam	32	248	-	
	Pegunungan Bintang	1.568.200	Oksibil	34	277	-	
	Puncak	805.500	Ilaga	25	205	-	
	Puncak Jaya	680.000	Mulia	26	302	-	
	Tolikara	1.456.400	Karubaga	46	545	-	
	Yahukimo	1.604.900	Dekai	51	517	1	
	Yalimo	125.300	Elelim	5	254	-	
Mee Pago	Nabire	1.535.801	Nabira	15	76	9	Dataran Mudah Akses
	Mimika	2.003.900	Timika	18	123	24	Dataran Sulit Akses
	Deiyai	53.739	Waghete	5	67	-	Pegunungan Tengah
	Dogiyai	423.740	Kigamani	10	79	-	
	Intan Jaya	392.202	Sugapa	6	78	-	
	Paniai	1.098.466	Enarotali	20	74	-	
Saireri	Biak Numfor	260.200	Biak	19	239	23	Dataran Mudah Akses
	Kepulauan Yapen	205.000	Serui	16	147	18	
	Supiori	52.800	Sorendiweri	5	37	1	
	Waropen	1.694.400	Waren	12	116	1	Dataran Sulit Akses
Mamta	Jayapura	1.751.400	Sentani	19	127	17	Dataran Mudah Akses
	Keerom	839.000	Arso	11	91	-	
	Sarmi	3.558.900	Sarmi	19	108	2	
	Mamberamo Raya	2.381.391	Burmeso	9	59	-	
	Kota Jayapura	94.000	Jayapura	5	16	23	Dataran Sulit Akses
Total		**32.027.839**		**568**	**5.163**	**154**	

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2017 (diolah)

Keterangan: (*) Luas wilayah berdasarkan undang-undang pemekaran

Berdasarkan Tabel 2.1, terdapat 19 kabupaten di wilayah Papua yang berada di daerah dataran sulit akses dan pegunungan. Dari 5.163 kampung yang teridentifikasi melalui data statistik tahun 2017, sekitar 79,68% atau sebanyak 4.114 kampung terletak di daerah pegunungan dan sulit akses, dimana kurang lebih 70% dari seluruh kampung tersebut masih merupakan daerah yang terisolasi dari akses transportasi. Keragaan kondisi geografi wilayah kabupaten/kota yang tidak seimbang baik itu dilihat dari luas maupun letak wilayahnya, menjadi salah satu kendala bagi pemerintah provinsi selama ini dalam memberi memberi pelayanan publik ke seluruh pelosok kampung secara optimal.

Masalah lainnya adalah yang terkait dengan wilayah administrasi, terutama sengketa tapal batas antarwilayah kabupaten. Misalkan Kabupaten Tolikara yang mengklaim memiliki luas 1.456.400 hektar menurut UU pemekaran selama ini mempunyai persoalan sengketa wilayah dengan beberapa kabupaten di sekelilingnya, seperti dengan Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Yahukimo. Begitu juga dengan Kabupaten Kepulauan Yapen yang memiliki luas wilayah 205.000 hektar bersengketa tapal batas dengan Kabupaten Nabire. Permasalahan tapal batas ini jika tidak ditangani segera akan menjadi penyulut pecahnya konflik horisontal yang lebih besar di masa mendatang.

2.1.1.1.2. Topografi

Wilayah Provinsi Papua terdiri dari wilayah dataran rendah, pesisir, dan pegunungan yang terdiri atas tiga deretan pegunungan yaitu: 1) Pegunungan Utara di lingkar luar, 2) deretan Pegunungan Selatan di lingkar dalam, serta 3) deretan Pegunungan Tengah yang merupakan tepi dari *The Australian Continent*. Daerah pegunungan berada pada ketinggian di antara 3000-4000 dan lebih dari 4000 meter dari permukaan laut (mdpl). Wilayah tertinggi terdapat di Kabupaten Puncak Jaya dengan ketinggian 2.980 mdpl sedangkan yang paling rendah adalah Kota Jayapura dengan ketinggian rata-rata 4 mdpl.

Kelerengan yang mendominasi wilayah provinsi papua adalah lereng landai (0 – 8)% menempati 45,9% dan lereng sangat terjal (>40%) menempati 43,3%, yang tersebar pada wilayah Haanim, Meepago, Mamta dan Laapago.

Kondisi topografi Papua yang sangat ekstrim (lihat 0 dan 2.3) menyebakan pembangunan jaringan transportasi darat sangat sulit dilakukan dan membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk juga dalam pembangunan jaringan fasilitas publik lainnya seperti listrik, air bersih, informasi dan komunikasi juga terkendala dengan kondisi topografi ini. Semuanya membutuhkan biaya besar dan sangat mahal yang tidak dapat ditangani sendiri oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Karenanya dalam hal pembangunan infrastruktur Papua, peran pemerintah pusat sangat diperlukan selama ini.

Gambar 2.2 Peta Kondisi Ketinggian Wilayah Papua

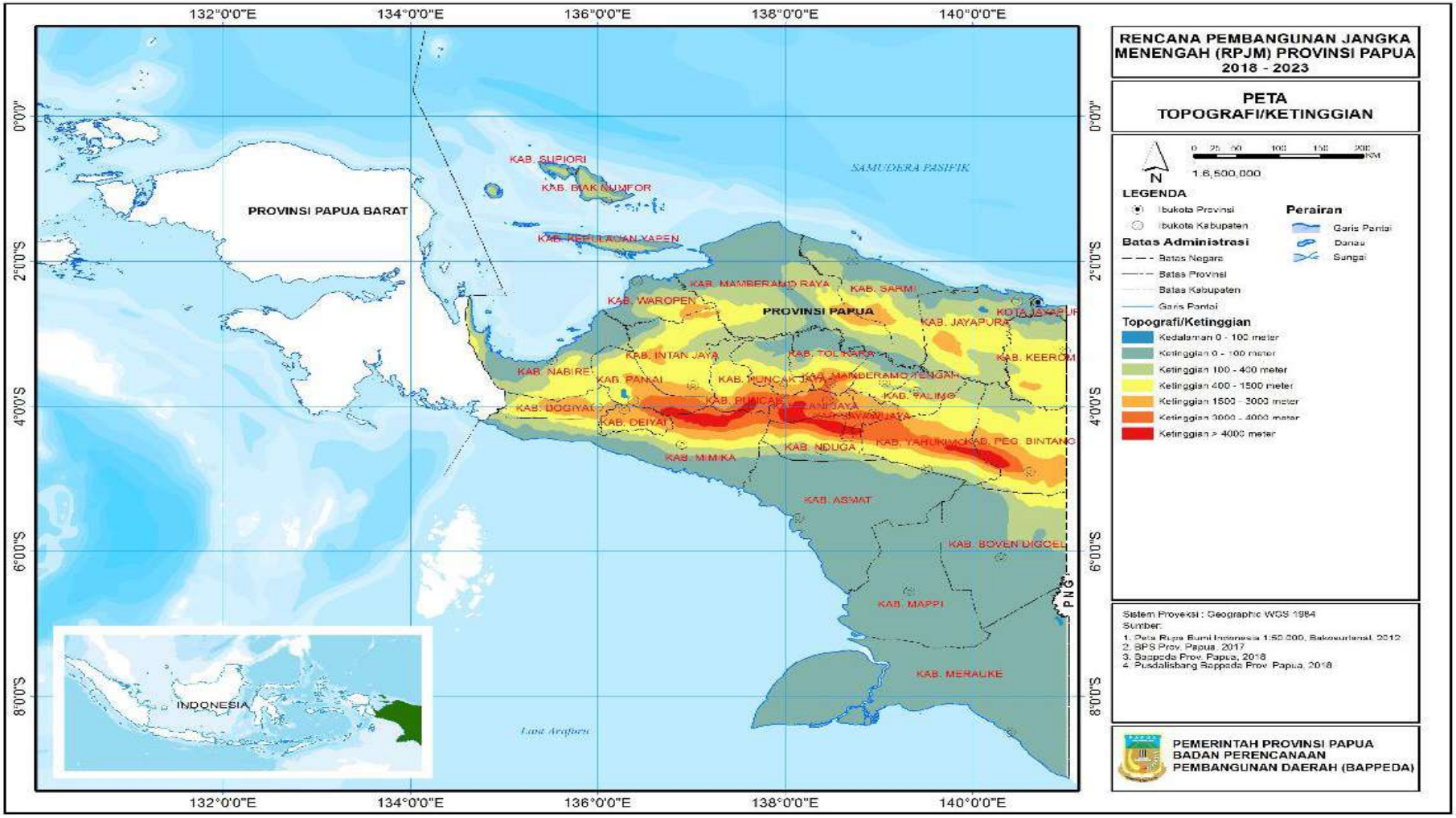

Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng

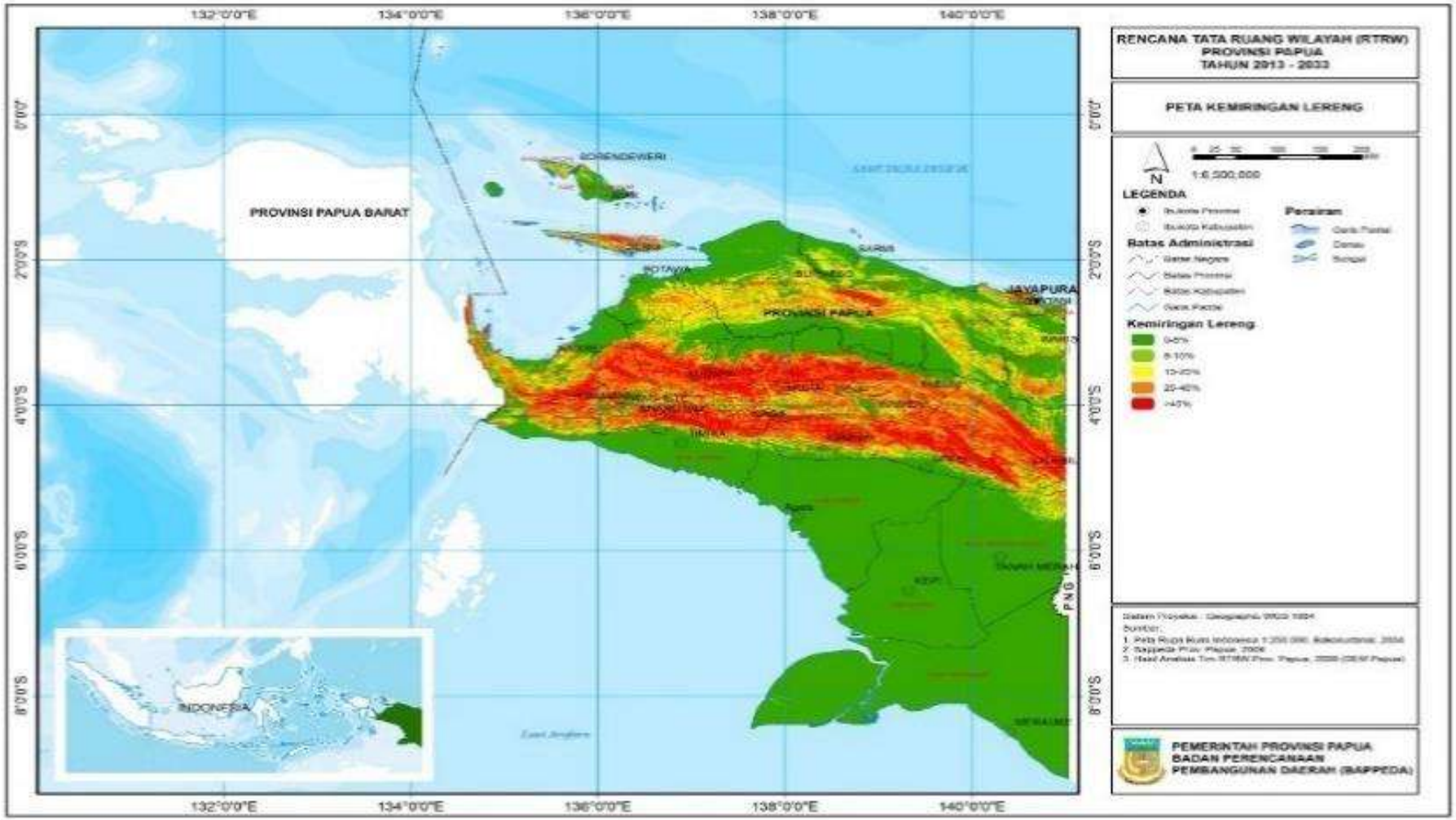

2.1.1.1.3. Kondisi Kawasan

Selain terhampar daratan yang sangat luas, Provinsi Papua juga merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan lautan yaitu Laut Arafuru dan Samudera Pasifik, sehingga wilayah Papua memiliki potensi di bidang perikanan laut tangkap. Adapun luas wilayah laut di Provinsi Papua sebesar 12.151,61 km^2 dan panjang garis pantai sebesar 5.878,11 km (lihat 2.1.1.1.3).

Tabel 2.2 Luas Wilayah Laut dan Panjang Garis Pantai di Provinsi Papua

No	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah Laut (km^2)	Panjang Garis Pantai (km)
1	Merauke	3.179,51	1.497,01
2	Jayapura	1,35	148,33
3	Nabire	234,97	641,16
4	Kepulauan Yapen	40,03	897,72
5	Biak Numfor	47,85	537,17
6	Mimika	2.832,30	464,80
7	Mappi	582,14	151,47
8	Asmat	2.845,91	275,97
9	Sarmi	31,85	302,20
10	Waropen	666,69	222,58
11	Supiori	35,83	340,80
12	Mamberamo Raya	1.650,37	291,45
Provinsi Papua		**12.151,61**	**5.878,11**

Sumber: BPS, Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2008, Bakorsutanal, dan hasil pengukuran GIS Tahun 2009, Buku Rencana RTRW Provinsi Papua 2013-2033

Sebagai wilayah yang dikelilingi laut dan berada di perairan bebas samudera pasifik, Provinsi Papua juga memiliki beberapa pulau yang berbatasan dengan negara lain. Terdapat 2 *daerah terluar* di Papua yang wilayahnya berbatasan dengan perairan negara Palau dan Australia, yaitu di Kabupaten Supiori dan Merauke (lihat Tabel 2.2).

Tabel 2.3 Kawasan Terluar di Provinsi Papua

No	Nama Pulau	Kabupaten/Kota	Negara yang berbatasan	Keterangan
1	P. Fanildo	Supiori	Palau	Tidak berpenduduk
2	P. Brass	Supiori	Palau	Berpenduduk
3	P. Bepondi	Supiori	Palau	Berpenduduk
4	P. Liki	Sarmi	Palau	Berpenduduk
5	P. Kolepon/P. Dolok	Merauke	Australia	Berpenduduk

Sumber: Biro Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah Provinsi Papua 2008 dalam RPJPD 2005-2025

Provinsi Papua juga merupakan salah satu kawasan strategis nasional karena berbatasan langsung dengan Negara Papua New

Guninea (PNG). Terdapat 5 (lima) kabupaten/kota sebagai *daerah terdepan* di Provinsi Papua yang posisinya berbatasan langsung dengan PNG yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Pegunungan Bintang, Boven Digul dan Merauke. Dinamika perbatasan RI-PNG diwarnai oleh adanya mobilitas lintas batas tradisional. Untuk memfasilitasi aktivitas lintas batas tersebut, Pemerintah Indonesia sampai dengan tahun 2018 telah membangun 17 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah Papua (lihat 0).

Gambar 2.4 Peta Pos Lintas Batas Negara di Indonesia Tahun 2018

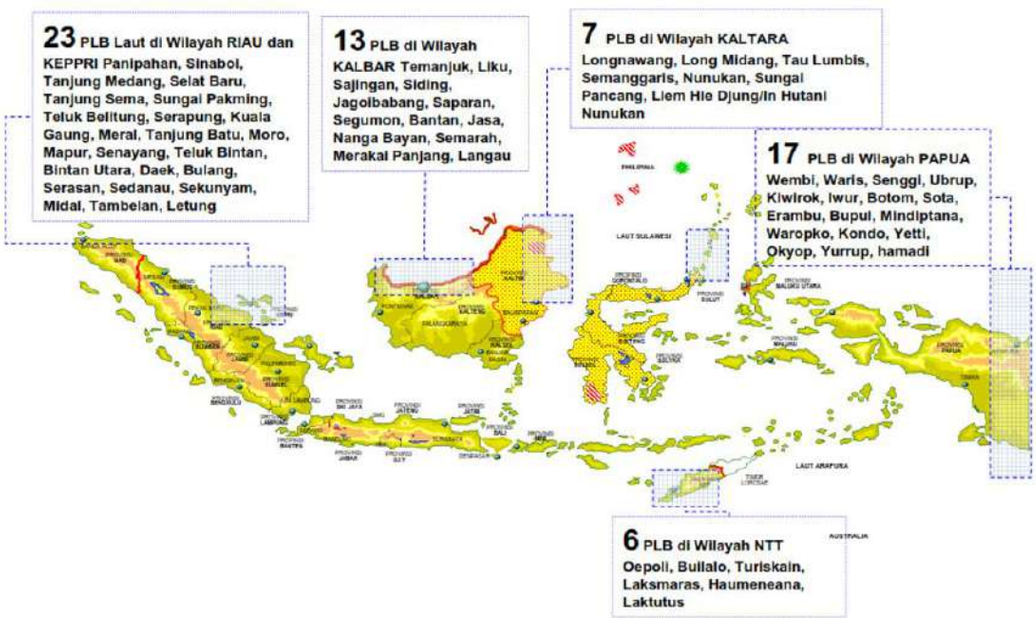

Sumber: Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI (2018)

Melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, pemerintah pusat telah membangun PLBN Skouw di Kota Jayapura. PLBN Skouw berdiri megah di atas lahan dengan luas total mencapai 10,7 hektar, dengan luas bangunan mencapai 7.619 m^2 yang terbagi dalam beberapa zona. Desain Gedung PLBN Skouw ini mengusung budaya lokal Papua yang mengadaptasi bentuk bangunan khas Rumah Tangfa, penggunaan ornamen lokal, serta penerapan prinsip-prinsip bangunan hijau (*green building*). Direncanakan pada tahun 2018, PLBN Sota di Kabupaten Merauke akan direnovasi dan dibangun lebih besar, namun tidak semegah seperti PLBN Skouw, karena aktifitas ekonomi dan lintas batas antar 2 (dua) negara RI-PNG pada PLBN Sota tidak seintensif PLBN Skouw.

Kondisi topografi yang begitu ekstrim yang tersebar di hampir sebagian wilayah Papua menyebabkan banyak daerah yang terisolasi dan belum tersentuh oleh pelayanan publik dari pemerintah secara memadai, sehingga jumlah daerah di Papua yang terkategori sebagai *daerah tertinggal* paling banyak di Indonesia. Sebagaimana yang dipaparkan dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019 disebutkan jumlah daerah tertinggal di Papua sebanyak 26 Kabupaten, yang mana lebih jauh lagi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 dikatakan penyebab utama ke-26 tersebut menjadi daerah tertinggal ada 6 faktor yakni : (1) aksesbilitas, (2) Sumber Daya Manusia, (3) Ekonomi, (4) Sarana dan Prasarana, (5) Karakteristik Daerah, dan (6) Kemampuan Keuangan Daerah. Urutan faktor-faktor penyebab utama ketertinggalan suatu daerah di wilayah di Papua dapat dilihat dalam Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4 Daerah Tertinggal dan Penyebab Utama Ketertinggalan Wilayah Papua Tahun 2015-2019

Wilayah Adat	Kabupaten	Penyebab Utama Ketertinggalan (Menurut Urutan)					
		1	2	3	4	5	6
Anim Ha	Merauke	Aksesbilitas	SDM	Ekonomi	Sarana dan Prsarana		
	Boven Digul	Aksesbilitas	SDM	Ekonomi			
	Mappi	Aksesbilitas	SDM	Ekonomi	Sarana dan Prsarana		
	Asmat	Aksesbilitas	SDM	Ekonomi	Sarana dan Prsarana	Karakteristik Daerah	
Mamta	Sarmi	Aksesbilitas	SDM	Ekonomi			
	Keerom	Aksesbilitas	Ekonomi	Kemampuan Keuangan Daerah	SDM		
	Mamberamo Raya	Aksesbilitas	Ekonomi	SDM			
La Pago	Jaywijaya	Ekonomi	SDM	Sarana dan Prsarana	Aksesbilitas		
	Puncak Jaya	Aksesbilitas	Sarana dan Prsarana	Ekonomi	SDM		
	Yahukimo	Aksesbilitas	Ekonomi	SDM	Sarana dan Prsarana		
	Pegunungan Bintang	Aksesbilitas	SDM	Ekonomi	Sarana dan Prsarana		
	Tolikara	Aksesbilitas	Sarana dan Prsarana	SDM	Ekonomi		
	Nduga	SDM	Ekonomi	Sarana dan Prsarana	Aksesbilitas	Kemampuan Keuangan Daerah	
	Lanny Jaya	Ekonomi	SDM	Sarana dan Prsarana	Aksesbilitas		
	Mamberamo Tengah	Ekonomi	SDM	Sarana dan Prsarana	Aksesbilitas		
	Yalimo	Ekonomi	SDM	Sarana dan Prsarana	Karakteristi k Daerah		

Wilayah Adat	Kabupaten	Penyebab Utama Ketertinggalan (Menurut Urutan)					
		1	2	3	4	5	6
	Puncak	Ekonomi	SDM	Sarana dan Prsarana	Aksesbilitas		
Mee Pago	Nabire	Aksesbilitas	Ekonomi	SDM	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	
	Paniai	Ekonomi	SDM	Sarana dan Prsarana	Aksesbilitas	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah
	Dogiyai	Ekonomi	SDM	Aksesbilitas	Sarana dan Prsarana	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah
	Intan Jaya	SDM	Ekonomi	Aksesbilitas	Sarana dan Prsarana	Karakteristik Daerah	
	Deyiai	Ekonomi	SDM	Sarana dan Prsarana	Kemampuan Keuangan Daerah		
Saireri	Kepulauan Yapen	Ekonomi	Kemampuan Keuangan Daerah	Aksesbilitas			
	Biak Numfor	Ekonomi	Aksesbilitas	Kemampuan Keuangan Daerah			
	Waropen	Aksesbilitas	Ekonomi	SDM	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	
	Supiori	Ekonomi	Aksesbilitas	Kemampuan Keuangan Daerah	Karakteristik Daerah	SDM	

Sumber: Perpres No. 21 Tahun 2018 (diolah)

Dalam Tabel 2.4 terlihat bahwa permasalahan yang paling utama (nomor 1) penyebab ketertinggalan suatu daerah kabupaten di wilayah Papua menurut perspektif pemerintah pusat adalah aksesbilitas, ekonomi dan Sumber Daya Manusia. Merujuk kepada indikasi yang tercantum dalam Tabel 2.4 tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penyebab utama ketertinggalan wilayah Anim Ha dan Mamta adalah faktor aksesibilitas. Penyebab utama ketertinggalan di La Pago dan Mee Pago adalah faktor aksesbilitas, ekonomi, dan Sumber Daya Manusia. Adapun penyebab ketertinggalan Saireri adalah ekonomi, terkecuali untuk Waropen penyebab utamanya adalah aksesbilitas.

Dalam tataran wilayah yang lebih kecil yakni perdesaan, berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, jumlah desa tertinggal yang menjadi prioritas untuk wilayah Papua sebanyak 615 desa atau 88,87% dari yang dilaporkan pada tahun 2017 (lihat Tabel 2.5).

Tabel 2.5 Jumlah Desa Berkembang dan Desa Tertinggal di Provinsi Papua Tahun 2017*

Wilayah Adat dan Kabupaten/Kota	Desa Berkembang	Desa Tertinggal	Total
Anim Ha	**3**	**102**	**138**
Asmat	1	18	20
Boven Digoel	1	11	14
Mappi		14	14
Merauke	1	59	90
La Pago	**3**	**233**	**236**
Jayawijaya	1	67	68
Puncak	1	3	4
Puncak Jaya	0	15	15
Tolikara	0	29	29
Yahukimo	0	15	15
Lanny Jaya	0	19	19
Mamberamo Tengah	0	15	15
Nduga	0	14	14
Pegunungan Bintang	0	11	11
Yalimo	1	45	46
Mee Pago	**3**	**62**	**66**
Deiyai	1	4	5
Intan Jaya		14	14
Mimika		8	8
Nabire	1	5	6
Paniai		15	15
Dogiyai	1	16	18
Saireri	**3**	**111**	**118**
Biak Numfor	1	55	59
Kepulauan Yapen	1	30	31
Supiori		7	7
Waropen	1	19	21
Mamta	**4**	**107**	**134**
Jayapura	1	9	19
Keerom	1	16	21
Mamberamo Raya	1	4	5
Sarmi	1	78	89
Total	**16**	**615**	**692**

Sumber: Kemendes PDTT RI (2017)

Keterangan*:
1. Penetapan desa tertinggal berdasarkan nilai IDM (Indeks Desa Membangun)
2. Jumlah desa yang dinilai tergantung dari banyaknya desa yang memberi laporan
3. Jumlah desa di Papua (diluar yang ada di Kota Jayapura) sebanyak 4.339 desa
4. Hanya 16% dari total desa di Papua yang dapat dinilai IDM-nya

Sebagian besar desa tertinggal di Papua tersebar di daerah-daerah pegunungan, terutama di wilayah adat La Pago mencapai 233 desa. Berikutnya di wilayah Saireri sebanyak 111 desa, di Mamta sebanyak 107 desa, dan Anim Ha sebanyak sebanyak 102 desa. Adapun di Mee Pago, jumlahnya yang terlihat sedikit karena banyak desa yang belum melaporkan kepada pemerintah pusat, sehingga teridentifikasi hanya 62 desa yang terkategori sebagai desa tertinggal.

Selain terdapat daerah-daerah terdepan, terluar dan tertinggal, Provinsi Papua juga teridentifikasi memiliki *Daerah Tertentu*, khususnya daerah rawan konflik dan bencana. Berdasarkan *data base*

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI (Kemendes PDTT RI) tahun 2015, terekam 2.624 kejadian konflik di Papua, yang sebagian besar (33,84%) disebabkan karena main hakim sendiri.

Terdapat 3 (tiga) daerah tertentu yang sangat rawan konflik main hakim sendiri yakni di Kota Jayapura, Kabupaten Mimika dan Jayapura. Sedangkan untuk konflik sumber daya lebih dominan di Kabupaten Mimika yang kaya akan sumber daya tambang emas dan tembaga. Adapun untuk daerah lainnya, seperti Kabupaten Deiyai, Intan Jaya, Mamberamo Raya, Boven Digoel, Yalimo, Mamberamo Tengah, Nduga, Supiori, Waropen dan Mappi semuanya terindikasi merupakan daerah yang sangat rendah kerawanan konfliknya (lihat 0).

Gambar 2.5 Kejadian Konflik di Provinsi Papua Tahun 2015

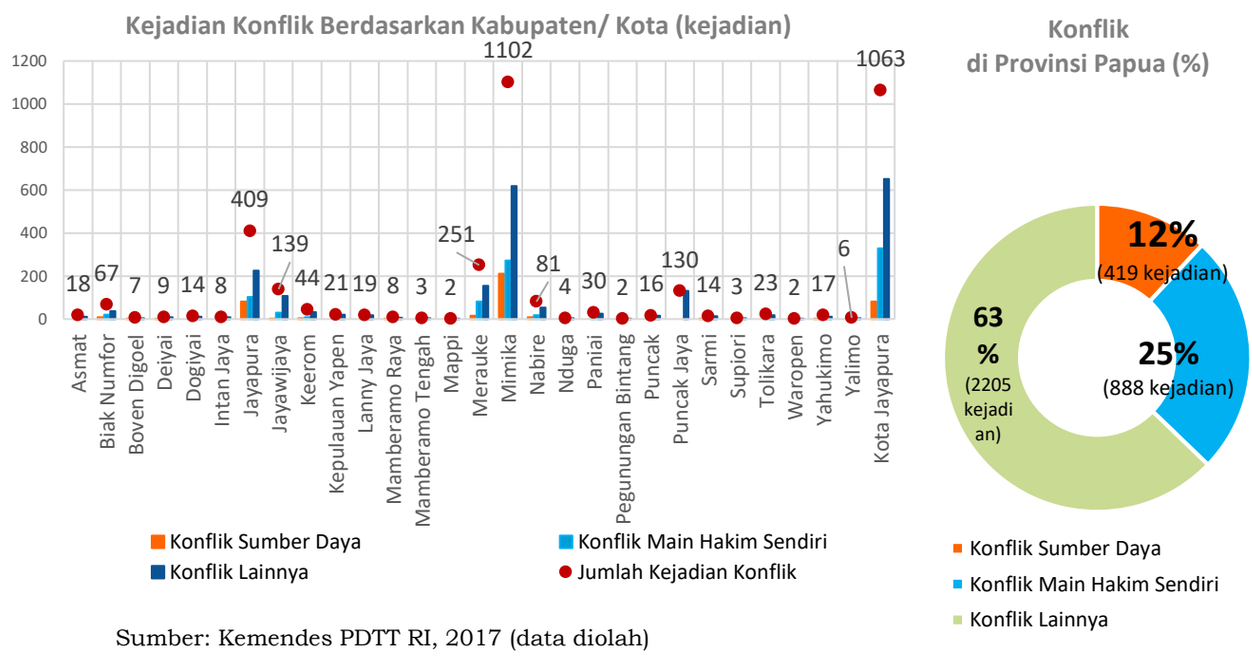

Sumber: Kemendes PDTT RI, 2017 (data diolah)

Kawasan daerah tertentu lainnya yang patut diperhatikan adalah kawasan bencana. Berdasarkan *data base* yang dikeluarkan Kemendes PDTT RI tahun 2013, terdapat tiga bencana yang sangat rawan terjadi di Provinsi Papua yaitu banjir, tanah longsor dan kebakaran (lihat Tabel 2.6).

Tabel 2.6 Tingkat Kerawanan Bencana di Provinsi Papua Tahun 2013

Kabupaten/Kota	RB Banjir	RB Gempa Bumi	RB Tsunami	RB Tanah Longsor	RB Gelombang Ekstrim & Abrasi	RB Kebakaran	RB Cuaca Ekstrim	RB Kekeringan
Merauke	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Jayawijaya	-	Sedang	-	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	-
Jayapura	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Nabire	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang	-
Kep. Yapen	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	-
Biak Numfor	-	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Puncak Jaya	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	-	Sedang	Sedang	Tinggi
Paniai	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	-
Mimika	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	-
Sarmi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
Keerom	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	-	Tinggi	Rendah	Tinggi
Peg. Bintang	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Tinggi
Yahukimo	Tinggi	Sedang	-	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Tinggi
Tolikara	Tinggi	Sedang	-	Tinggi	-	Tinggi	Rendah	Tinggi
Waropen	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	-
Boven Digoel	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	Tinggi
Mappi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	-
Asmat	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	-
Supiori	-	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah	-
Mamb. Raya	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
Mamb. Tengah	Sedang	Tinggi	-	Sedang	-	Sedang	Rendah	-
Yalimo	Tinggi	Sedang	-	Tinggi	-	Sedang	Sedang	-
Lanny Jaya	-	Sedang	-	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	-
Nduga	Tinggi	Sedang	-	Sedang	-	Sedang	Sedang	-
Puncak	Tinggi	Sedang	-	Tinggi	-	Sedang	Sedang	-
Dogiyai	Tinggi	Sedang	-	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	-
Intan Jaya	-	Tinggi	-	Tinggi	-	Sedang	Sedang	-
Deiyai	Tinggi	Sedang	-	Tinggi	-	Tinggi	Sedang	-
Kota Jayapura	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	-	Sedang	Tinggi

Sumber: Kemendes PDTT RI (2017)

Dalam Tabel 2.6 tergambarkan bahwa tingkat kerawanan bencana banjir pada hampir setiap kabupaten/kota termasuk dalam kelas yang tinggi. Hanya 6 daerah tertentu saja yang diindikasikan tidak memiliki kerawanan banjir yakni Kabupaten Jayawijaya, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Supiori, Lanny Jaya dan Intan Jaya. Sedangan untuk kerawanan tanah longsor sebagian besar daerah di Papua berpotensi tinggi, terkecuali untuk Kabupaten Merauke, Nabire, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah dan Nduga yang mempunyai kelas sedang. Selanjutnya untuk rawan kebakaran, oleh karena Papua memiliki hutan yang sangat luas dan menyebar diseluruh daerah,

akhirnya hampir seluruh daerah di Papua terindikasi rawan kebakaran, kecuali Kota Jayapura saja yang dianggap tidak berpotensi rawan kebakaran. Untuk daerah lain potensi kerawanan kebakarannya bervariasi antara kelas yang tinggi dan sedang, dengan yang terbanyak pada kerawanan tinggi seperti di Kabupaten Merauke, Jayawijaya, Jayapura, Nabire, Biak Numfor, Paniai, Mimika, Sarmi, Keerom, Pegunungan Bintang, Yahukimo dan Tolikara. Daerah yang potensi rawan kebakarannya dalam kelas sedang hanya ada 7 (tujuh) yakni Kabupaten Kepulauan Yapen, Puncak Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Nduga, Puncak dan Intan Jaya. Secara visual, kondisi penyebaran rawan bencana alam di Provinsi Papua dapat diperhatikan pada Gambar 2.6.

2.1.1.1.4. Klimatologi

Iklim Papua termasuk dalam iklim hutan hujan tropis (*tropical rain forest*), yang dipengaruhi oleh musim kemarau, hujan, dan angin Muson yang menyebabkan Papua kaya dengan flora dan fauna khas hutan hujan tropis. Secara umum, musim kemarau di Papua terjadi di Bulan Juni-September, sedangkan musim hujan terjadi pada Bulan Desember-Maret, dengan masa peralihan pada Bulan April-Mei dan Bulan Oktober-November. Terdapat 32,4% tanah di wilayah Papua berada di kelas kemiringan di atas 40° dan rawa-rawa yang luas terutama di sepanjang pesisir pantai Selatan Papua yang terbentang hingga ke hulu sungai-sungai pedalaman. Curah hujan di Provinsi Papua cukup tinggi. Data curah hujan dan hari hujan dari berbagai stasiun lima tahun terakhir menunjukkan angka merata dihampir seluruh wilayah di provinsi Papua. Terdapat kecenderungan jumlah curah hujan meningkat sejalan dengan peningkatan ketinggian tempat Pola penyebaran curah hujan menunjukkan adanya variasi antar wilayah, dari curah hujan sedang (1750 mm), tinggi (2500-4000mm), hingga sangat tinggi (>4000mm), secara umum dapat dikatakan tinggi.

Gambar 2.6 Peta Rawan Bencana Alam

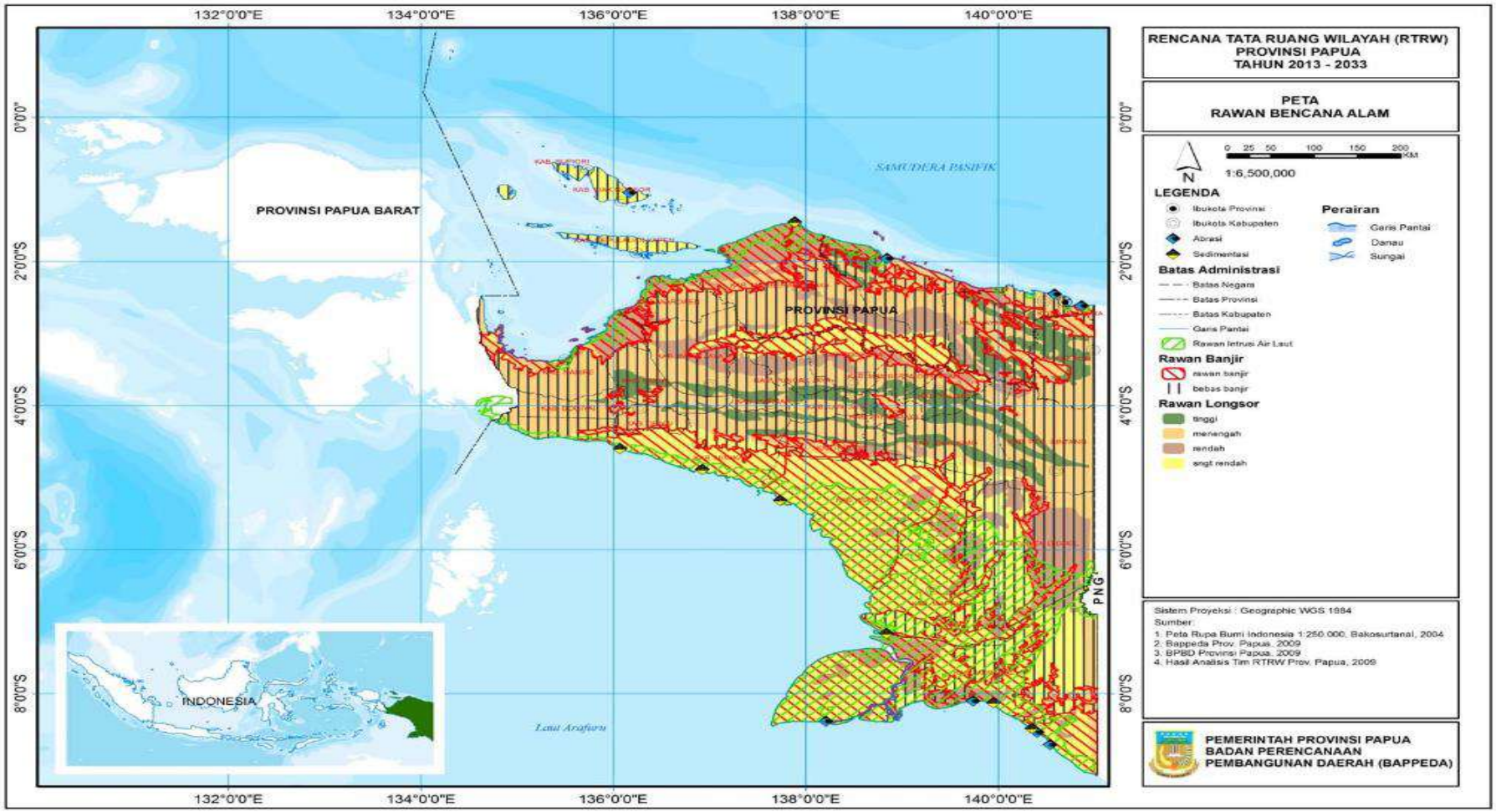

Gambar 2.7 Peta Intensitas Curah Hujan

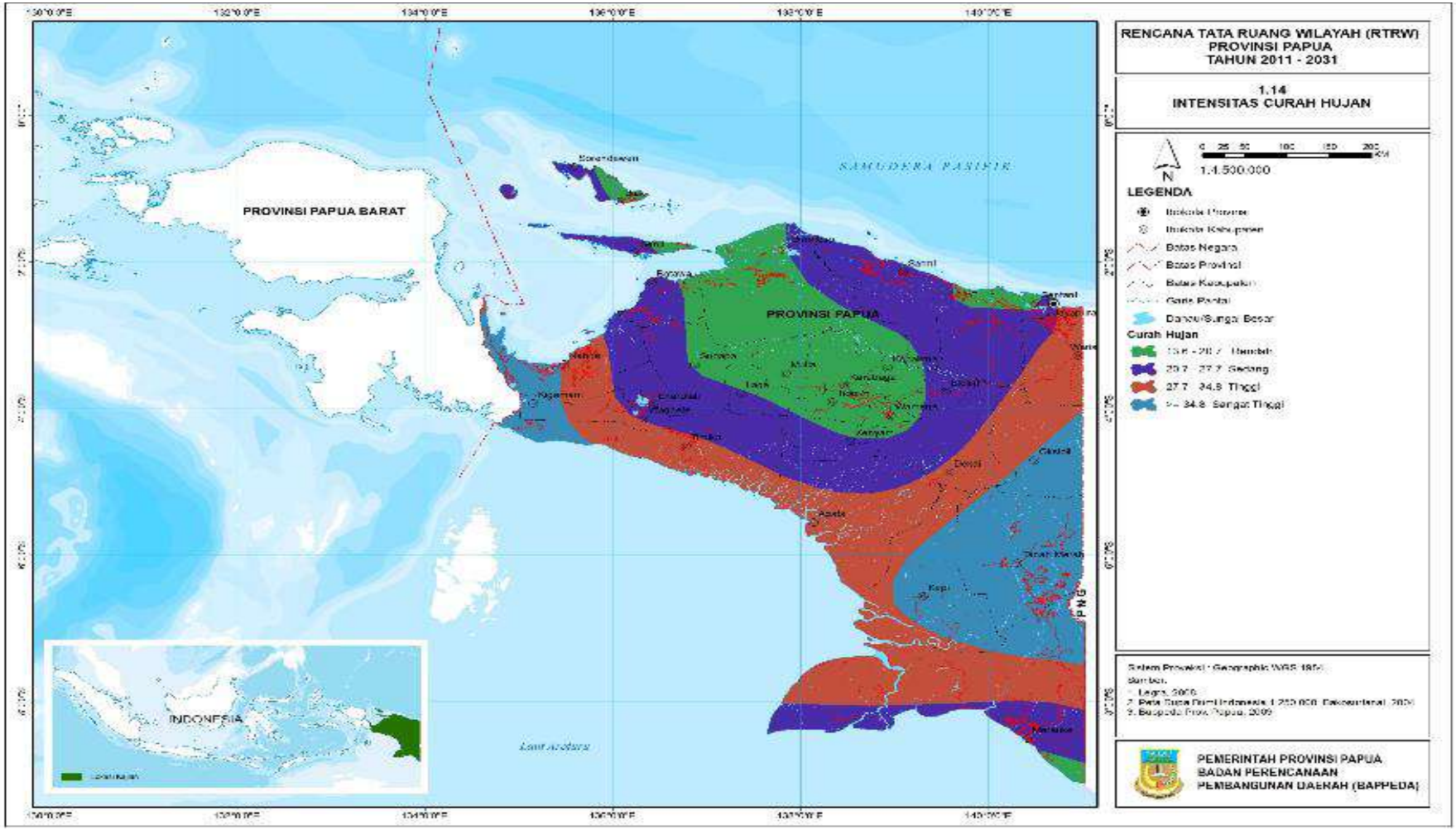

Penyebaran curah hujan sedang, hanya dijumpai di kabupaten Biak Numfor, kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Keerom, Kabupaten paniai, kabupaten Puncak Jaya, kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Yahukimo. Sedangkan kabupaten-kabupaten lainnya memiliki curah hujan tinggi hingga sangat tinggi (lihat Gambar 2.7).

Selain memiliki potensi yang menguntungkan, curah hujan yang tinggi juga dapat memberikan permasalahan bagi bidang pertanian, perhubungan, infrastruktur jalan, dan sebagainya. Dampak langsung dari curah hujan ada yang dirasakan seketika, dan ada yang dirasakan secara lambat. Dampak langsung seketika, misalnya curah hujan yang tinggi atau terus menerus dapat menimbulkan tanah longsor saat itu. Kondisi ini dapat dilihat sering terjadi di daerah-daerah pegunungan seperti di Yalimo, Lanni Jaya, Puncak Jaya, dan sebagainya.

Suhu udara di Provinsi Papua, sangat variatif. Pada daerah pengunungan dengan variasi ketinggian wilayah yang beragam memiliki suhu udara minimum 15°C dan daerah pesisir dan landai suhu maksimal mencapai 33°C. Kelembaban udara rata-rata yaitu 78-85% dan durasi penyinaran matahari di Provinsi papua berada pada level 35-68% dengan tekanan udara rata-rata 1.008 mbs.

Kondisi yang ekstrim juga terjadi di beberapa daerah pegunungan dengan adanya hujan yang tinggi diiringi dengan butiran es sehingga menimbulkan hujan es. Hujan es yang pernah terjadi di tahun 2015 berlangsung selama 10 hari di tiga Kampung di Distrik Agadugume Kabupaten Puncak misalkan mengakibatkan tanaman di kebun warga membusuk dan mati, dan kurang lebih 10.000 jiwa penduduk yang mendiami tiga kampung tersebut terancam mengalami rawan pangan akibat peristiwa ini. Fenomena yang sama juga terjadi di Kabupaten Lanny Jaya dan Puncak Jaya.

2.1.1.1.5. Hidrologi

Provinsi Papua memiliki 64 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan total panjang sungai 35.924,737 km dan total luas daerah tangkapan 572.753, 823 km² (lihat Tabel 2.7). Banyaknya jumlah DAS menunjukkan bahwa Provinsi Papua memiliki kekayaan Sumber Daya Air yang berlimpah. Sungai-sungai besar yang terbentang dan danau yang tersebar di Papua dapat menjadi sumber energi listrik terbarukan

sebagai modal dasar pembangunan ekonomi produktif, pendapatan asli daerah, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Tabel 2.7 Panjang Sungai dan Luas Daerah Tangkapan di Provinsi Papua

Nama DAS	Panjang Sungai (Km)	Luas Daerah Tangkapan (Km^2)
Memberamo Hilir	660.457	80.099,16
Turitatu Hilir	788.626	47.872,90
Turiku Hilir	930.094	34.912,40
Apauwer	252.59	2.998,00
Wiru	155.114	2.494,80
Verkume	155.798	1.845,50
Biri	116.087	2.173,00
Sermo	151.866	1.599,20
Tor	244.29	3.153,60
Van Dallen	513.64	8.585,15
Wediman	875.27	11.492,30
Digul Kanan	420.912	7.253,70
Digul Hilir	1,178.81	33.698,04
Digul Kiri	615.753	6.162,50
Digul Timur	196.058	3.189,91
Digul Barat	196.01	2.489,90
Ein Hilir	1,956.46	65.315,43
Ein Hulu	509.886	5.337,72
Wapoga	574.393	10.637,14
Sobger	1.262.169	35.174,80
Turitatu Tengah	662.304	20.312,70
Bigadu	315.5	9.103,53
Sirowo	150.915	4.013,00
Turiku Hulu	10.628.779	7.925,61
Maro	559.804	9.909,00
Tami	320.328	7.015,40
Omba	157.253	3.427,60
Yawe	147.289	4.170,30
Lorentz	747.383	8.717,65
Kumbe	262.015	3.282,00
Wanggar	361.35	4.776,20
Kapiraya	121.26	2.860,90
Peter	682.955	10.992,30
Otokwa	187.337	3.395,30
Sentani	35.04	968,60
Grime	110.725	1.050,00
Bunga	397.783	3.457,07
Vriendschaps	475.472	5.912.508,00
Bian	640.218	12.080,12
Kamura	118.525	2.187,60
Rombak	346.119	1.971,20
Nadubuai	222.608	1.971,20
Brazza	990.666	10.088,02
Parongga	31.33	593,20
Yawe	61.296	1.272,00
Akimuga	288.925	2.660,10

Nama DAS	Panjang Sungai (Km)	Luas Daerah Tangkapan (Km^2)
Mimika	477,71	4.670,01
Aidoma	306.834	3.184.599,00
Minajerwi	447.597	5.054,70
Cemara	280.4	2.556,40
Otokwa	181.007	1.662,00
Nordwest	624.39	7.832,82
Odamun	264.36	6.808
Dolok	224.573	3.119,20
Bulaka	331.26	6.418,01
Siriwo	155.759	1.187,60
Kumbe	38.4	483,90
Paranggo	94.882	774,90
Kamura	270.438	2.243,20
Mappi	524.98	7.596,00
Biak	84.27	467,15
Supiori	83.457	245.917,00
Yapen	298.986	1.266.089,00
Gesa	457.979	5.551,02

Sumber: RPJPD Provinsi Papua 2005-2025

Adapun berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A Tahun 2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai menetapkan pembagian wilayah sungai di Provinsi Papua sebagai berikut :

1) WS Mamberamo-Tami-Apauvar (kewenangan BWS Papua), terdiri atas beberapa DAS:DAS Mamberamo, DAS Gesa, DAS Bigabu, DAS Sobger, DAS Tariku, DAS Nawa, DAS Taritatu, DAS Van Dalen, DAS Tami, DAS Sermo, DAS Grimer dan DAS Sentani.
2) WS Einlanden-Digoel-Bikuma (kewenangan BWS Papua Merauke), terdiri atas beberapa daerah aliran sungai:DAS Einlanden, DAS Digoel, DAS Maro, DAS Kumber, DAS Bulaka, DAS Bian, DAS Dolak, DAS Digoel dan DAS Cemara.
3) Wilayah sungai Omba (lintas Provinsi Papua-Provinsi Papua Barat, kewenangan Papua Barat), terdiri atas WS Omba mencakup beberapa DAS:DAS Omba, DAS Lengguru, DAS Madefa, DAS Bedidi dan DAS Bomberai.
4) Wilayah sungai lintas kabupaten/kota terdiri atas WS Wapoga-Mimika (kewenangan Dinas PU Provinsi), yang mencakup beberapa DAS:DAS Wapoga, DAS Aikimuga, DAS Otokwa, DAS Minarjerwi, DAS Kamura, DAS Mimika, DAS Yawe, DAS Parongga, DAS Aidoma, DAS Wanggar, DAS Siriwo, DAS Rombak, DAS Nadubuai, DAS Yapen, DAS Biak, DAS Supiori dan DAS Kemabu.

Gambar 2.8 Peta Satuan Wilayah Sungai Provinsi Papua

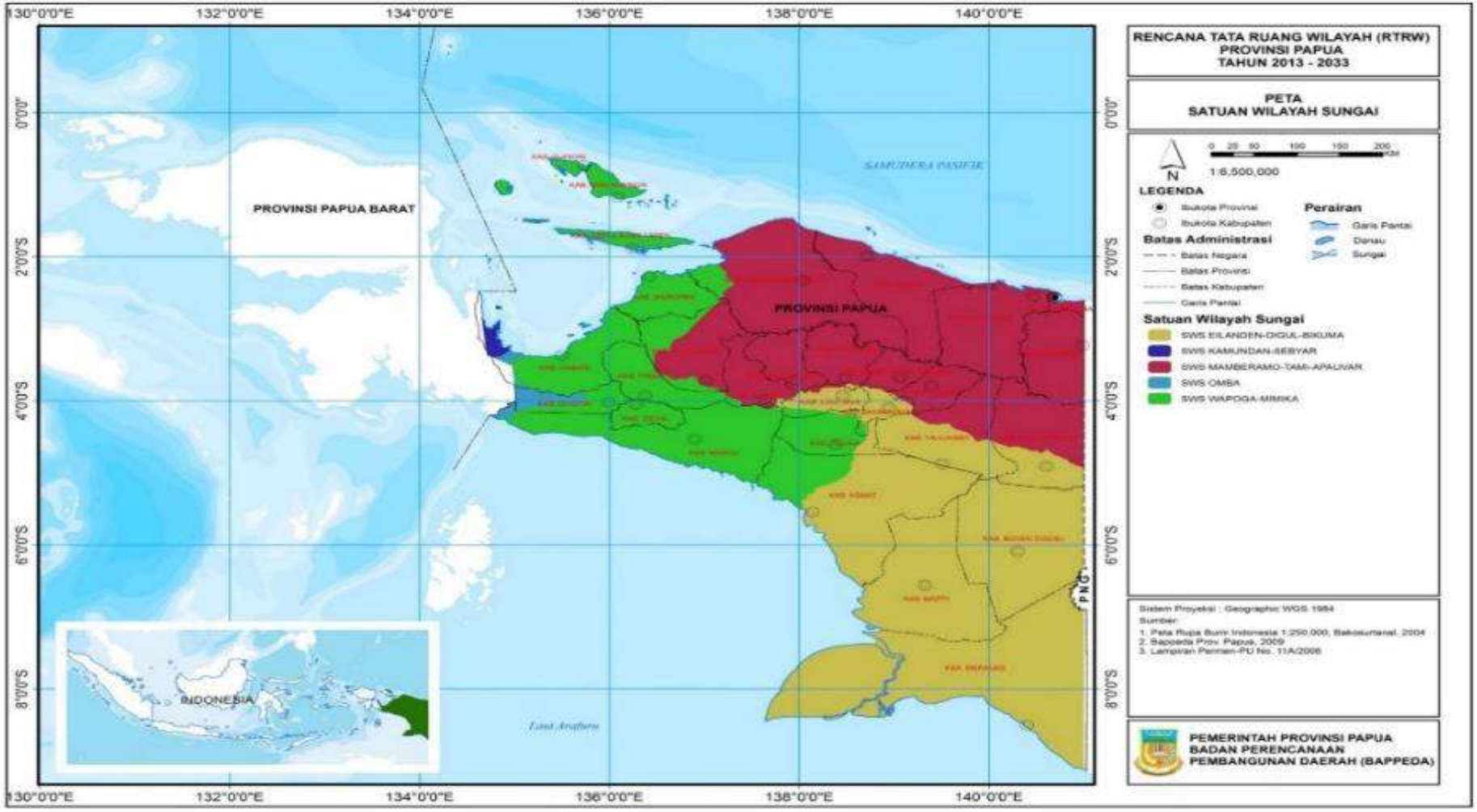

Instansi yang terlibat dalam pengelolaan DAS cukup banyak, misalkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Bakosurtanal, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan banyaknya pihak yang terlibat, baik itu secara administrasi, perencanaan dan teknis dilapangan, maka diperlukan adanya koordinasi intensif berbagai pihak terkait baik lintas sektoral maupun lintas daerah.

Selain memberi peluang yang besar untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, banyaknya sungai dan rawa juga merupakan tantangan dalam pembangunan infrastruktur di Papua. Pada wilayah yang dikelilingi rawa atau banyak rawa membuat pembangunan jalan di daerah-daerah tersebut membutuhkan konstruksi yang lebih kokoh dibanding biasanya, yang dipastikan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Seringkali ditemukan pada pembangunan jalan di Papua, dalam satu lajur tidak sampai ratusan kilo ada perubahan formasi dari tanah keras ke tanah lunak, gambut dan rawa. Kondisi ini yang menyebabkan perkiraan biaya pembangunan jalan di wilayah Papua selalu bisa *over estimated*. Banyaknya sungai juga menjadi permasalahan tersendiri, karena pembangunan jalan harus dihubungkan juga dengan banyaknya jembatan yang dibangun di atas sungai, yang akhirnya membutuhkan biaya yang lebih besar.

2.1.1.1.6. Tutupan Lahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033, diindikasikan Papua memiliki kawasan hutan yang luas dengan tutupan lahan yang relatif masih utuh. Hutan lahan kering primer dan hutan rawa primer merupakan daerah terluas yaitu masing-masing sekitar 15 juta ha (49%) dan 4,5 juta ha (14,5%); kemudian hutan lahan kering sekunder seluas 3,2 juta ha (10,5%) dan savanna seluas 1,4 juta ha (4,5%). Sementara itu, hutan lindung dan hutan produksi memiliki luasan yang hampir sama masing-masing sebesar 8,3 juta ha dan 8,2 juta ha. Sedangkan, jenis penggunaan hutan produksi konversi dan KSA/KPA mencapai 6,4 juta ha dan 5,6 juta ha (lihat Gambar 2.8 dan Gambar 2.9).

Gambar 2.9 Peta Tutupan Lahan Tahun 2012

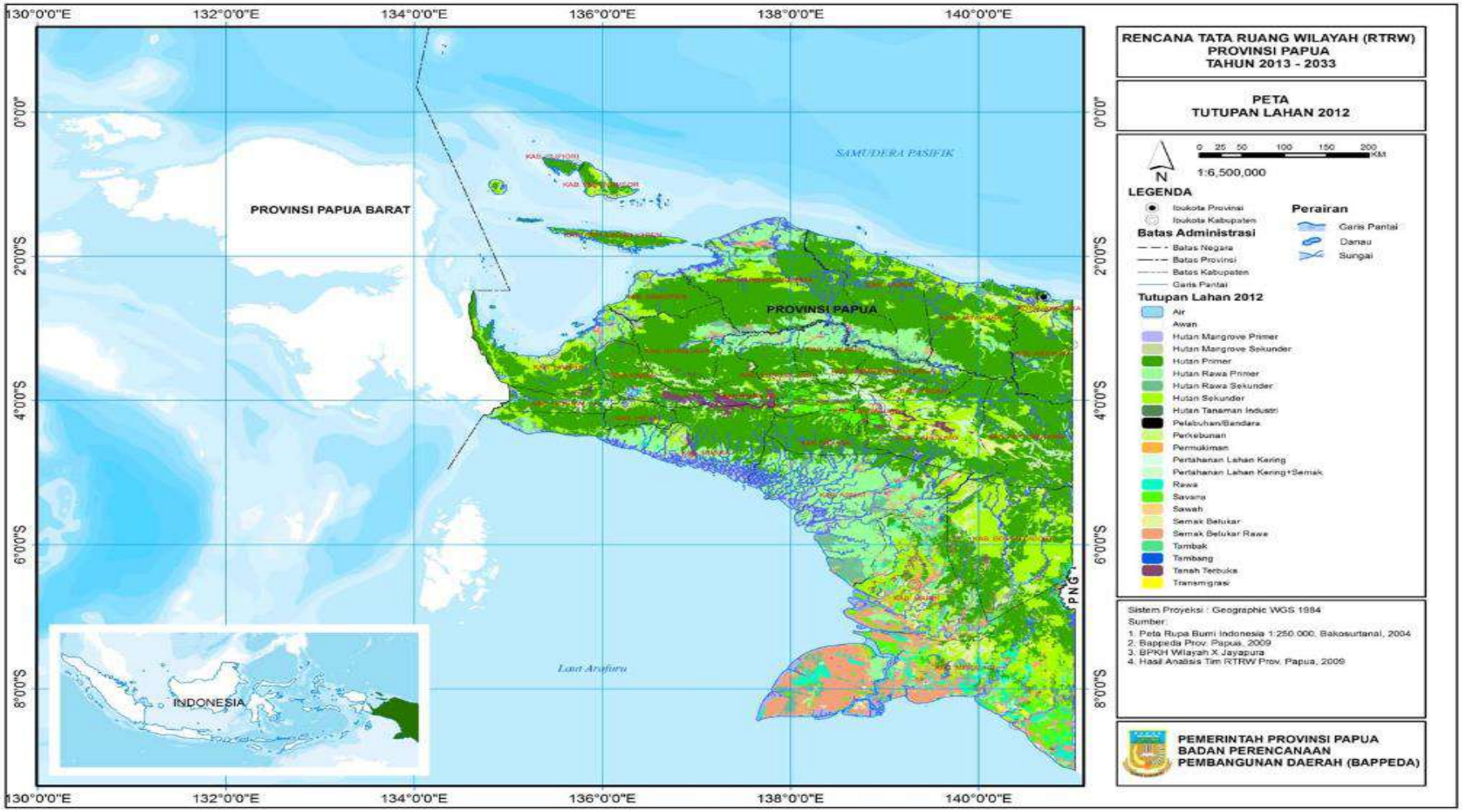

Tabel 2.8 Jenis Penggunaan Lahan di Provinsi Papua Berdasarkan RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2023

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luasan	Persentase
1	A i r	551.789,45	2%
2	APL	1.707.014,50	5%
3	Hutan Lindung	7.838.861,32	24%
4	Hutan Produksi	4.767.346,35	14%
5	Hutan Produksi Konversi	4.136.177,07	13%
6	HPT	5.982.030,10	18%
7	KSA	6.755.034,81	21%
8	KSA Air	1.019.016,51	3%
JUMLAH		32.757.270,10	100%

Sumber: RTRW 2012, Pemerintah Provinsi Papua

Sekitar 81,14% luas lahan di Papua berupa tutupan hutan yang mengandung kekayaan keanekaragaman hayati begitu tinggi. Diperkirakan dalam hutan Papua terdapat 602 jenis burung (52% jenis endemik), 223 jenis mamalia (58% jenis endemik), 223 jenis reptil (35% jenis endemik) dan 1.030 jenis tumbuhan (55% jenis endemik) hidup di belantara Papua.

Selanjutnya, menurut data terbaru yang dipublikasikan oleh BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah X Papua, Kondisi Tutupan Lahan Provinsi Papua berdasarkan Citra 8 OLI liputan tahun 2017 adalah seluas 32.498.762 hektar yang terdiri atas : (1) Kawasan Berhutan seluas 25.028.044 hektar, dan (2) Kawasan Tidak Berhutan seluas 7.470.718 hektar. Dimana Kelas Tutupan Lahan paling luas adalah untuk Hutan Lahan Kering Primer yaitu 14.746.788 hektar, serta daerah yang paling besar memiliki tutupan lahan adalah Kabupaten Merauke seluas 4.640.188. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.10.

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua tahun 2013-2033, maka potensi pengembangan wilayah dalam jangka panjang ialah sebagai berikut:

2.1.1.2.1. Potensi Hutan

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Provinsi Papua memiliki 3 jenis kawasan peruntukan hutan produksi, yaitu: Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi tetap (HP), dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).

Gambar 2.10 Kondisi Tutupan Lahan Provinsi Papua Berdasarkan Citra 8 OLI Liputan Tahun 2017 (dalam hektar)

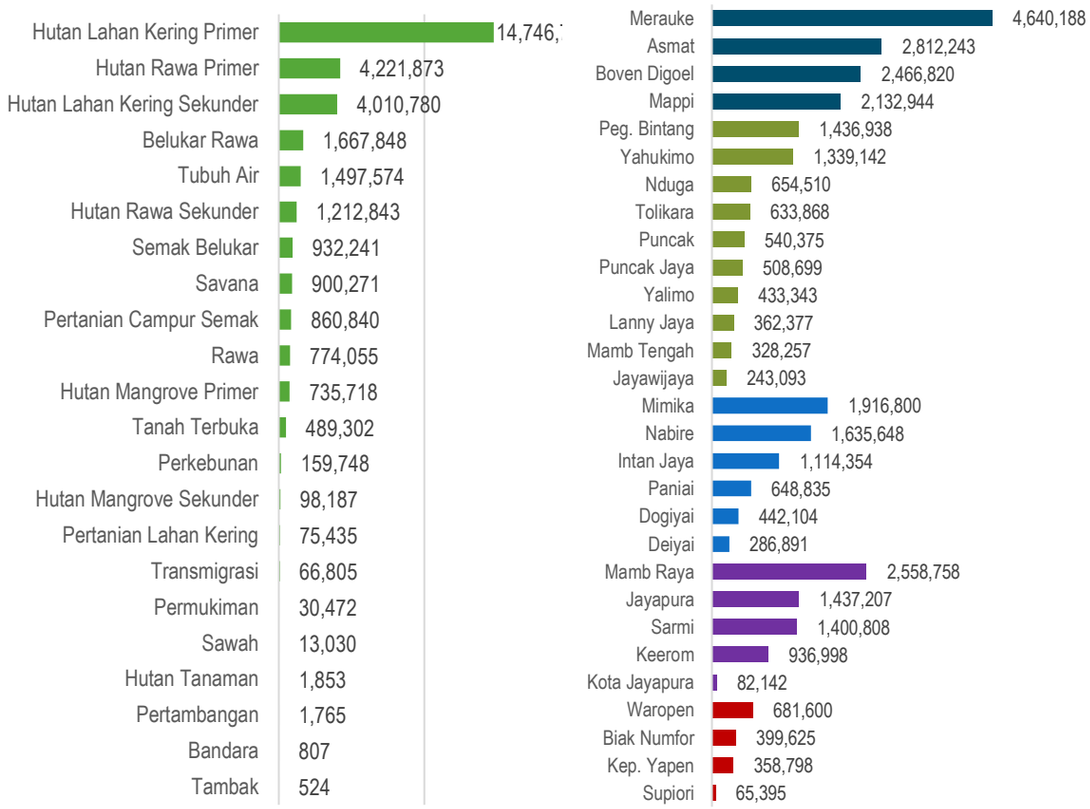

Sumber : BPKH Wilayah X Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Hutan Produksi Terbatas memiliki kriteria: a) memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125-174, b) kawasan hutan yang digunakan untuk budi daya hutan alam. Sedangkan Hutan Produksi tetap (HP) memiliki kriteria: 10 memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124, b) kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) memiliki kriteria, sebagai berikut: a) memiliki faktor kemiringan, lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 dan/atau, b) merupakan kawasan yang jika dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan, c) kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan sebagainya.

Gambar 2.11 Peta Penetapan Lokasi Fasilitasi Pada 5 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dan 4 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Papua Tahun 2015

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MenLHK/2015 Tentang Fasilitasi Biaya Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan, di Provinsi Papua terdapat 9 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dimana secara garis besarnya terdiri atas KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) dan KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) yang tersebar pada : (1) KPHL Unit II Lintas Nabire, Dogiyai, (2) KPHL Unit VI Lintas Mimika, Dogiyai, Deyiai, (3) KPHL Unit X Lintas Intan Jaya, Waropen, Puncak, (4) KPHP Unit XXII Sarmi, (5) KPHL Unit XLII Lintas Lanny Jaya, Puncak Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, (6) KPHP Unit XLIII Lintas Yahukimo, Nduga, (7) KPHL Unit XXXV Lintas Pegunungan Bintang, Yahukimo, (8) KPHP Unit LI Lintas BOVEN DIGUL, Pegunungan Bintang, dan (9) KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.11 di atas.

b. Kawasan Hutan rakyat

Kawasan perutukan hutan rakyat ditetapkan dengan kriteria kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik. Selain itu, kawasan hutan rakyat berada pada lahan-lahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat. Pada kawasan ini, kegiatan yang diperbolehkan ialah kegiatan permanenen berdasarkan sistem tebang butuh.

c. Kawasan Peruntukan Pertanian dan Perkebunan

Kawasan perumtukan pertanian dan perkebunan terdiri dari pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura. Kawasan ini memiliki beberapa kriteria, yaitu: kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi, mendukung ketahanan pangan nasional, dan atau dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.

Kegiatan pada kawasan pertanian adalah pertanian budidaya lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat yang diatur oleh pemerintah kabupaten dan atau oleh Kementerian Pertanian. Selain itu, kegiatan pertanian skala besar, baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus lebih dulu memiliki kajian studi AMDAL.

Penanganan limbah pertanian tanaman (kadar pupuk dan pestisida yang terlaur dalam air drainase) dan polusi industry pertanian (udara-bau dan asap, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL. Kawasan yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang. Kawasan pertanian diharapkan menyediakan kegiatan pertanian berskala besar untuk menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja yang merupakan penduduk asli setempat, baik Orang Asli Papua maupun pendatang.

Potensi pengembangan lahan pertanian di Papua masih terbuka sangat lebar melalui klarifikasi status lahan untuk pembangunan pertanian oleh Pemerintah dan masyarakat adat, pengembangan infrastruktur pertanian termasuk jaringan irigasi, jaringan jalan pendukung pertanian, pasar, peningkatan SDM secara konsisten dan terpadu, dan pemberdayaan masyarakat untuk membangun sektor pertanian. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lahan yang tersedia secara tepat dan lestari bukan tidak mungkin mengangkat Provinsi Papua sebagai sentra produksi pertanian di wilayah timur, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua, dan melestarikan sumber pangan lokal yang sudah terbukti adaptif untuk ketahanan pangan dan kelestarian budaya setempat. Kegiatan perkebunan juga masih terbatas pada komoditas dengan orientasi pada pasar lokal. Meski demikian, beberapa investasi perkebunan untuk kako dan kopi telah menunjukkan kemajuan dan layak dikembangkan dengan basis pengelolaan oleh masyarakat adat.

2.1.1.2.2. Potensi Perikanan

a. Perikanan Tangkap

Provinsi Papua memiliki panjang pantai kurang lebih 1.170 mil laut. Secara umum, Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Papua terbagi dua, yaitu perairan utara Papua tergabung dalam WPP 717 yang mencakup perairan Laut Cendrawasih dan Pasifik dengan pantai 509 mil laut (916 km) dan luas diperkirakan 6.110 mil laut (11.000 km^2) sebagai kawasan yang kaya akan sumberdaya perikanan Pelagis Besar (Tuna, Paruh Panjang, Cakalang, dan Tenggiri). Sedangkan pada bagian selatan, Papua masuk dalam WPP 718 yang mencakup perairan

Laut Arafura dengan panjang pantai 662 mil laut (1.191 km) dengan luas perairan 7.944 mil laut (14.300 km) dan merupakan kawasan yang kaya akan sumberdaya Ikan Demersal (Udang, Kakap Merah, Kakap Putih, Bawal, Pari, Cucut dan Ikan Pelagis kecil lainnya (Teri, Tongkol, Kembung). Kelompok ikan lainnya adalah Ikan Kerapu, Napoleon, Lobster dan ikan hias. Papua memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar, terutama pada wilayah pesisir dan lautnya. Sumber daya ini dapat dilihat dari berbagai ekosistem tropik yang ada (mangrove, terumbu karang dan padang lamun) dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi. Selain itu, Papua juga memiliki potensi sumberdaya hayati perikanan terutama perairan utara Papua dengan potensi Ikan Pelagis dan perairan selatan dengan komoditi utama udang. Berbagai sumberdaya tambang, mineral dan gas juga dapat ditemukan di perairan pesisir dan Laut Papua. Pengembangan perikanan tangkap meliputi wilayah:

- Laut Papua Utara dengan pusat kegiatan di Biak, dan Jayapura;
- Laut Papua Selatan dengan pusat kegaitan di Mimika dan Merauke.

Kegiatan perikanan dapat dikatakan masih relatif sederhana. Jenis alat tangkap yang digunakan oleh masyarakat lokal masih bersifat tradisional, contohnya jaring insang, pancing dan alat tangkap lainnya seperti tonda, tombak serta kalawai (tombak bermata banyak).

b. Perikanan Budidaya

Secara umum, Kawasan Bentang Laut Papua memiliki potensi budidaya kelautan dan perikanan sangat besar. Pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya kelautan dan perikanan dibagi menurut prioritas penanganannya sebagai berikut:

1. Perikanan budidaya laut di Teluk Cendrawasih, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura;
2. Perikanan budidaya air payau (tambak) di Kabuapten Sarmi dan Waropen;
3. Perikanan budidaya air tawar (kolam) di Kabupaten Jayawijaya dan Jayapura, serta Kota Jayapura.

Peta produksi perikanan budidaya di Provinsi Papua tersebar di seluruh pesisir dan pulau-pulau, meskipun pemanfaatannya terbatas

di daerah pesisir Jayapura dan Kabupaten Nabire. Di kedua kabupaten potensial tersebut jenis perikanan budidaya perairan umum, dengan jenis ikan unggulan kerapu dan baronang, sedangkan untuk perairan laut terbesar di Kabupaten Biak dengan budidaya unggulan rumput laut yang dapat terus ditingkatkan produktivitasnya.

2.1.1.2.3. Pertambangan

Pulau Papua terbentuk dari hasil benturan Lempeng Benua Australia (*Australia Plate*) yang bergerak ke Utara dengan Lempeng Pasifik (*Pacific Crustal Plate*) yang bergerak ke arah Barat. Konsentrasi mineral-mineral logam diperkirakan terdapat pada Lajur Pegunungan Tengah Papua. Posisi tektonik Papua yang berada di Lingkar Pasifik, yang berupa cincin gunung api memberikan potensi endapan mineral logam maupun non logam yang besar, sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel 2.9.

Tabel 2.9.
Potensi Mineral Logam dan Non Logam

Kabupaten /Kota	Lokasi	Jenis Galian Mineral
Kota Jayapura	S.Numbai, Kodam	Emas
	S. Yapis, Kel. Imbi	Emas
	S. APO	Emas
	S. Entrop	Emas
	S. Perumnas IV	Emas
	S. Borgonjie	Emas
	S. Kujabu, Waena	Emas
Jayapura	Sentani	Kobal
		Tungsten
		Nikel
		Asbes
	S. Kemiri	Emas
	Sentani	Emas
	S. Deyau, Sentani	Emas
	S. Sawe Sentani	Emas
	S. Ayapo Sentani	Emas
	S. Tami	Krom
	Tg. Tanahmerah	Talk
	Waris	Emas, tembaga, timah hitam
	Web	Emas, perak
	Arso	Krom, batubara
	Depapre	Marmer
	Bonggo	Batubara
	Genyem	Batubara
	Siduarsi	Nikel Laterit
	S.Pis dan S.Pas	Emas
	Senggi	Tembaga, timah hitam
Jayawijaya	Kurulu	Pasir Kuarsa, batu gamping
	Assolokobal	Pasir Kuarsa, batu gamping
	Asologaima	Batubara
	Borme Utara	Emas
	Okbibab	Tungsten
	Soba	Timbal-Seng

Kabupaten /Kota	Lokasi	Jenis Galian Mineral
	Holuwan	Timbal-Seng
	Bokondini	Tembaga, emas
	Tiom	Emas, batu garam
	Mbua	Batubara
	Nalca	Emas
	Dabera	Emas, tembaga
	Aboyi	Emas, molibdenum
Nabire	Yaur	Pasir kuarsa, granit, marmer
	Logari	Emas
	S. Sanoba, Nabire	Emas
	S.Nabarua, Nabire	Marmer
	Uwapa	Seng, Kaolin
	Jali Bumi, Topo	Emas
	Cemara, Topo	Emas
	Haiura	Emas, tembaga
	Wapoga	Emas
Biak Numfor	Supiori	Emas, Batu Kapur
	Korido	Kalsit
	Biak	Fosfat, Pasir Besi
Kepualauan Yapen	Yapen	Pasir Besi
	P. Num	Nikel
Waropen	Waropen Bawah	Emas
	Waropen Atas	Batu bara
Merauke	Jair	Emas, perak
	Mediptana	Tembaga, timah hitam, seng
	Kuoh	Emas
Puncak Jaya	Obaa	Emas, Perak
	Ilu	Arsenit, tembaga
	Ilaga	Arsenit, tembaga, emas, perak
Paniai	Enarotali	Pasir kuarsa
	Bilogai	Emas
	Mapia	Garnet
	Kemabu	Tembaga, Emas
	Uwagimamo	Emas, tembaga, bismuth
	Mandoga	Tembaga, emas
	Komopa	Tembaga, emas
Mimika	Tembagapura	Tembaga, perak, emas

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Papua, 2016 (data diolah)

Berdasarkan potensi geologinya, wilayah Papua mempunyai kekayaan bahan galian mineral yang sangat besar dan potensial. Mulai dari emas, tembaga, nikel, timah, batu kapur, gamping, dan sebagainya tersedia di wilayah ini. Akan tetapi, meskipun kekayaan mineral tersebut sudah teridentifikasi sejak lama, namun hanya sedikit wilayah yang dapat memanfaatkan potensi tersebut. Salah satunya di Kabupaten Mimika yang memiliki potensi tembaga dan emas terbesar di dunia yang selama ini telah dikelola oleh perusahaan multinasional yaitu PT. Freeport Indonesia. Sedangkan di daerah-daerah penghasil emas lainnya seperti di Paniai dan Nabire lebih banyak dikelola oleh penambangan rakyat dengan jumlah yang sangat kecil.

Eksplorasi pertambangan di Papua sangat berisiko. Ditambah lagi cadangannya berada di lokasi-lokasi terpencil yang minim infrastruktur, tersembunyi di hutan dan pegunungan. Pada saat eksplorasi, membutuhkan teknik khusus untuk menemukan cadangan mineral di Papua. Wilayah pertambangan secara topografi sangat sulit sehingga tak mudah merancang infrastruktur untuk tambang. Semua kondisi ini menjadi kendala bagi investor lain untuk menanamkan modalnya di sektor pertambangan mineral. Sehingga perusahaan besar pertambangan yang ada masih sangat sedikit. Investasi pertambangan di Papua perlu dalam skala besar dengan resiko bisnis tinggi yang membutuhkan stabilitas jangka panjang.

2.1.1.2.4. Pariwisata

Provinsi Papua memiliki beragam potensi pariwisata yang dapat menjadi potensi unggulan daerah. Beberapa Taman Nasional yang dimiliki oleh Provinsi Papua ialah: Taman Nasional Lorentz di Mimika, Jayawijaya, Puncak Jaya dan Asmat, Taman Nasional Wasur di Merauke, dan Taman Naional Teluk Cendrawasih di Nabire. Meskipun demikian, potensi pariwisata tersebut belum dikelola secara maksimal, sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Obyek wisata potensial di Papua dikelompokkan menjadi 7 kawasan yaitu kawasan wisata bahari, kawasan wisata air terjun, kawasan wisata pulau, kawasan wisata budaya, kawasan wisata sejarah, kawasan wisata religi, dan kawasan wisata alam.

Selain itu, ada beberapa obyek wisata di Provinsi Papua yang tidak termasuk ke dalam 7 kelompok di atas, yaitu: KP Asmat (Kabupaten Asmat), TW Parieri (Kabupaten Biak Numfor), SM. D. Bian (Kabupaten Boven Digoel), DS. Anguruk (Kabupaten Mappi), TR. Timika dan Kuala Kencana (Kabupaten Mimika), KP Paradoi (Kabupaten Nabire), dan KP. Kurudu dan KP. Paradoi (Kabupaten Waropen). Pemanfaatan potensi wisata perlu dioptimalkan dengan menyediakan SDM handal dengan memanfaatkan jaringan pariwisata internasional untuk kepentingan promosi. Salah satunya adalah penyediaan paket wisata dan pengelolaan potensi pariwisata yang memenuhi standar internasional dengan tetap melibatkan peran aktif masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

2.1.2. Aspek Demografi

Berdasarkan bentuk piramida penduduk yang ekspansif mencirikan struktur penduduk di Provinsi Papua selama ini adalah struktur penduduk muda. Baik itu di tahun 2013 maupun 2017 bentuk piramida penduduk Provinsi Papua kurang signifikan mengalami perubahan. Lihat Gambar 2.12 berikut ini.

Gambar 2.12 Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2013 dan 2017

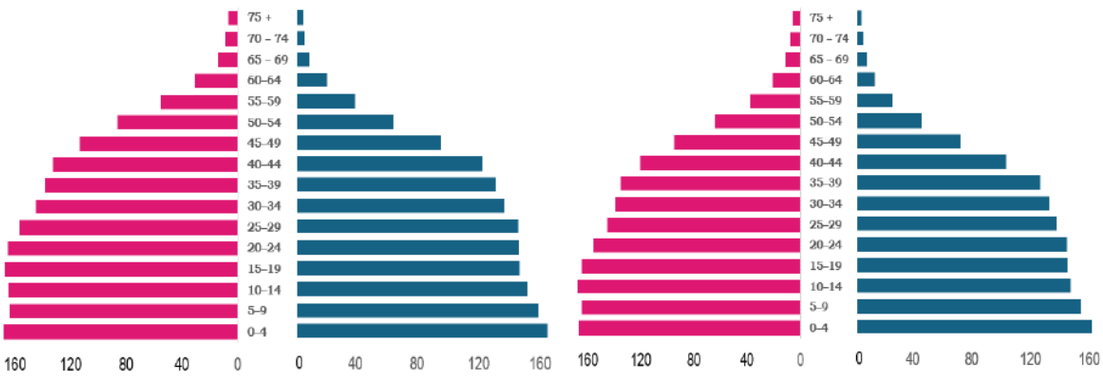

[a] Piramida Tahun 2013 [b] Piramida Tahun 2017

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2014 & 2018 (data diolah)

Penduduk usia muda (0-14 tahun) masih dominan, namun dengan kecenderungan tingkat kelahiran bayi semakin menurun di tahun 2017. Selain itu, bentuk piramida yang gemuk, terutama di antara usia 15-44 tahun mengindikasikan bahwa penduduk usia yang sangat produktif lebih dominan dibandingkan yang non produktif. Adapun bentuk kerucut piramida yang tajam diantara tahun 2013 dan tahun 2017 memvisualisasikan bahwa usia harapan hidup di Provinsi Papua masih berkisar diantara 65-69 tahun, dan ada kecenderungan usia harapan hidup untuk jenis kelamin perempuan dan laki-laki mengalami peningkatan di tahun 2017.

Jumlah penduduk Papua selama periode 2013-2017 berkembang pada tingkat pertumbuhan yang sangat terkendali dan relatif menurun. Pada tahun 2013, jumlah penduduk Papua sebesar 3.032,5 ribu jiwa dengan tingkat pertumbuhannya sebesar 1,97%. Selanjutnya di tahun 2014 pertumbuhan penduduk Papua relatif mengalami pelambatan, lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 1,93%. Kondisi ini terus berlanjut sepanjang periode 2015-2017, dimana pada tahun 2017 pertumbuhan penduduk dapat

ditekan menjadi 1,80%, yang terlihat jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2013. Adapun jumlah penduduk yang tercatat di tahun 2017 adalah sebanyak 3.265,2 ribu jiwa (lihat Gambar 2.13).

Gambar 2.13 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

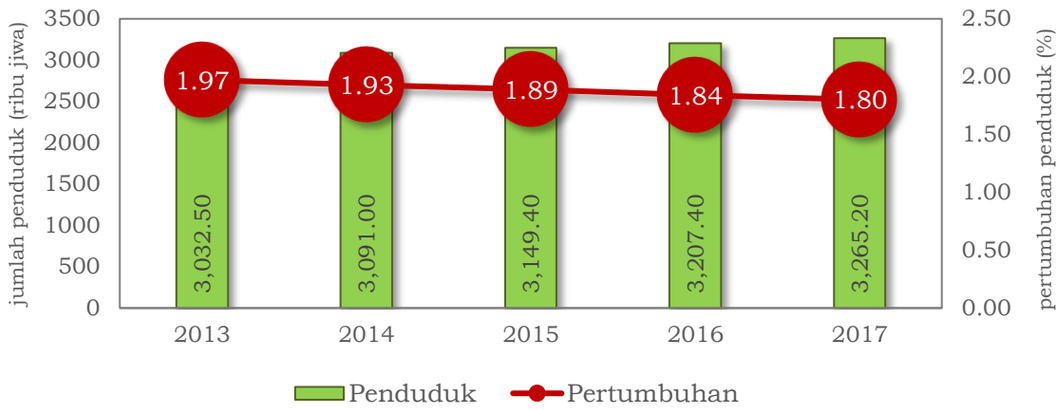

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2016 (data diolah)

Berdasarkan jenis kelaminnya, jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Papua lebih besar dibanding jumlah penduduk perempuan (lihat Gambar 2.14). Jumlah penduduk laki-laki tahun 2013 tercatat 1.603.158 jiwa, dan meningkat menjadi 1.718.513 jiwa pada tahun 2017. Sementara jumlah penduduk perempuan pada tahun 2013 sebesar 1.429.330 jiwa, dan meningkat menjadi 1.546.689 jiwa pada tahun 2016. Hal ini menyebabkan angka Rasio Sex menjadi lebih besar dari 100, namun mempunyai kecenderungan angka yang relatif menurun. Tahun 2013 angka Rasio Sex mencapai 112,16 dan menurun menjadi 111,11 di tahun 2017.

Gambar 2.14 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Sex

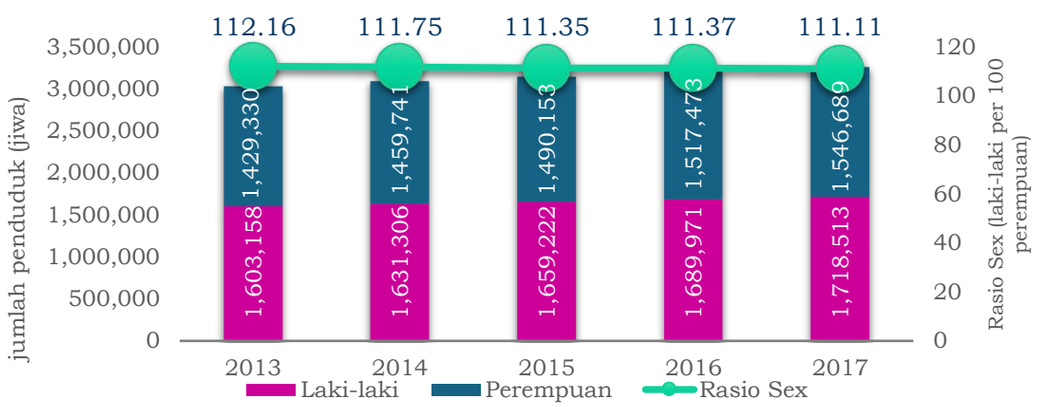

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Kemudian dari persebaran penduduk di setiap kabupaten/ kota di Provinsi Papua terlihat tidak merata. Terdapat kabupaten/ kota yang memiliki luas wilayah yang sangat luas namun jumlah penduduk yang berada di kabupaten/kota tersebut sedikit, sebaliknya ada kabupaten/kota dengan luas wilayah yang kecil tetapi memiliki jumlah penduduk yang besar. Daerah dengan penduduk terbesar, terlihat di kota Jayapura, dengan tingkat kepadatannya tertinggi di Provinsi Papua di tahun 2017 sebesar 309,02 jiwa per km^2 luas wilayah. Adapun yang paling rendah di Kabupaten Mamberamo Raya, hanya sebesar 0,80 jiwa per km^2 (lihat Tabel 2.10).

Tabel 2.9 Keadaan Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2017

Wilayah Adat	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk 2017 (jiwa)	Kepadatan 2017 (jiwa/km2)	Pertumbuhan 2013-2017 (%)	Rasio Sex (Laki-laki per 100 perempuan)
Anim Ha	Merauke	223.389	4,71	1,56	105,02
	Boven Digoel	66.209	2,68	2,32	116,82
	Mappi	94.671	4,08	1,84	100,96
	Asmat	92.909	3,76	2,25	104,03
	Total/Rata-rata	477.178	3,81	1,99	106,71
La Pago	Jayawijaya	212.811	91,29	1,18	105,40
	PuncakJaya	123.591	50,52	2,49	124,06
	Yahukimo	187.021	12,42	1,66	105,00
	Peg. Bintang	73.473	5,01	1,47	107,21
	Tolikara	136.576	22,21	2,17	118,91
	Nduga	97.012	16,65	3,09	123,99
	Lanny Jaya	176.687	51,37	2,34	114,66
	Mamb. Tengah	47.487	14,03	2,70	113,75
	Yalimo	60.822	16,62	2,59	114,13
	Puncak	107.822	19,19	1,92	109,78
	Total/Rata-rata	1.223.302	29,93	2,16	113,69
Mee Pago	Nabire	145.101	31,89	1,39	112,80
	Paniai	170.193	8,23	1,35	107,83
	Mimika	210.413	91,47	1,74	128,47
	Dogiyai	94.997	21,01	1,55	98,26
	Intan Jaya	48.318	5,18	2,72	100,57
	Deiyai	72.206	31,04	2,07	105,10
	Total/Rata-rata	741.228	31,47	1,80	108,84
Saireri	Kep. Yapen	95.007	19,25	1,88	105,70
	Biak Numfor	144.697	11,12	1,73	107,00
	Waropen	29.480	5,48	2,31	106,11
	Supiori	19.104	30,12	3,00	103,41
	Total/Rata-rata	288.288	16,49	2,23	105,55
Mamta	Jayapura	125.975	8,75	1,48	111,13
	Sarmi	38.210	2,74	1,85	114,48

Wilayah Adat	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk 2017 (jiwa)	Kepadatan 2017 (jiwa/km2)	Pertumbuhan 2013-2017 (%)	Rasio Sex (Laki-laki per 100 perempuan)
	Keerom	55.018	6,10	1,53	115,46
	Mamb. Raya	22.313	0,80	3,06	104,35
	Kota Jayapura	293.690	309,02	1,89	115,98
	Total/Rata-rata	535.206	65,48	1,96	112,28
Provinsi Papua		3.265.202	10,31	1,87	111,11

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Walaupun kepadatan penduduknya rendah, akan tetapi laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mamberamo Raya selama tahun 2013-2017 terlihat paling tinggi di Provinsi Papua bersama dengan Kabupaten Nduga. Laju pertumbuhan penduduk di Mamberamo Raya dan Nduga berkisar diantara 3,06-3,09% per tahun. Sedangkan pertumbuhan yang terendah di Kabupaten Jayawijaya hanya sebesar 1,18% per tahun untuk periode yang sama.

Jika diperhatikan pada perbandingan antara penduduk laki-laki dengan perempuan, terlihat di seluruh kabupaten/kota wilayah Papua mempunyai angka Rasio Sex di atas 100, terkecuali Kabupaten Dogiyai yang memiliki Rasio Sex di bawah 100 yakni 98,26 laki-laki per 100 perempuan, yang mengindikasikan bahwa diantara jumlah penduduk perempuan sebanyak 100 jiwa terdapat penduduk laki-laki sebanyak 98 jiwa. Dengan kata lain jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Sementara daerah dengan angka rasio sex yang tertinggi adalah Kabupaten Nduga mencapai 123.99 laki-laki per 100 perempuan.

Ditinjau berdasarkan wilayah adat, diketahui bahwa wilayah yang paling banyak jumlah penduduknya adalah La Pago yakni sebanyak 1.223.302 jiwa, dengan tingkat pertumbuhannya sekitar 2,16% per tahun selama periode 2013-2017, serta kepadatan penduduk mencapai 29,93 per km^2, dan angka Rasio Sex sebesar 13,69 laki-laki per 100 perempuan. Adapun wilayah adat yang memiliki pertumbuhan penduduk paling tinggi adalah Saireri (2,23% per tahun), dengan total penduduk 288.288 jiwa yang terindikasi paling rendah untuk seluruh wilayah pembangunan. Wilayah Mamta dapat dikatakan merupakan wilayah pembangunan yang paling padat penduduknya, rata-rata sekitar 65.48 jiwa per km^2, namun dengan

pertumbuhannya yang paling rendah bersama wilayah Mee Pago sebesar 1,96% per tahun.

2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Perkembangan ekonomi Provinsi Papua dapat dilihat melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan komponen untuk melihat jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di daerah. Penghitungan PDRB menggunakan dua jenis harga yaitu harga berlaku dan harga konstan, yang mana untuk pengukuran pertumbuhannya lebih jauh dapat dipisahkan untuk wilayah Papua menjadi pertumbuhan PDRB dengan sektor pertambangan dan tanpa tambang. Pertumbuhan ekonomi Papua dengan menyertakan sektor pertambangan (DP) berada dalam kondisi yang sangat fluktuatif sepanjang tahun 2013-2017 (lihat Gambar 2.15).

Gambar 2.15 Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Dengan Tambang dan Tanpa Tambang Tahun 2013-2017 (%)

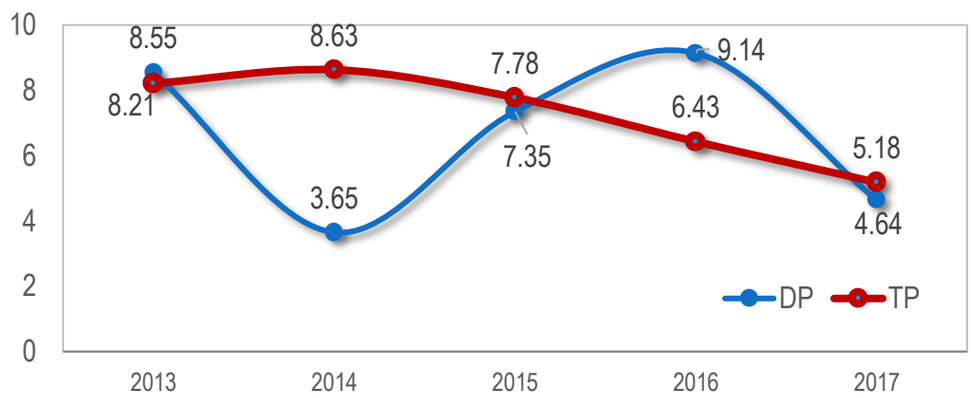

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Pertumbuhan ekonomi dengan sektor pertambangan cenderung mengalami ekpansif selama periode 2014-2016, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 6,86% per tahun. Kemudian di tahun 2017 ada kontraksi kurang lebih -3,96% sehingga laju pertumbuhan di tahun tersebut melambat menjadi 5,18%. Lain halnya pertumbuhan ekonomi Papua jika diamati tanpa menyertakan sektor pertambangan, cenderung melambat selama tahun 2014-2017, dengan rata-ratanya

sekitar 7,00 yang terlihat jauh lebih baik dibandingkan dengan sektor pertambangan.

Secara spasial terlihat sebagian besar wilayah kabupaten/ kota mengalami kontraksi perekonomian yang cukup besar jika dilakukan perbandingan antara tahun 2013 dengan 2017. Pelambatan yang terbesar untuk wilayah adat Saireri adalah di Kabupaten Biak Numfor yang mengalami kontraksi rata-rata sekitar -2,90% per tahun. Kemudian untuk Mee Pago adalah Kabupaten Intan Jaya sebesar -1,90% per tahun, di La Pago adalah Kabupaten Yalimo sebesar -1,79% per tahun, di Mamta adalah Kabupaten Keerom sebesar -1,17% per tahun, dan di Anim Ha adalah Kabupaten Boven Digoel sebesar -0,60% per tahun. Lihat Gambar 2.16.

Gambar 2.16 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 dengan Tambang per Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017 (%)

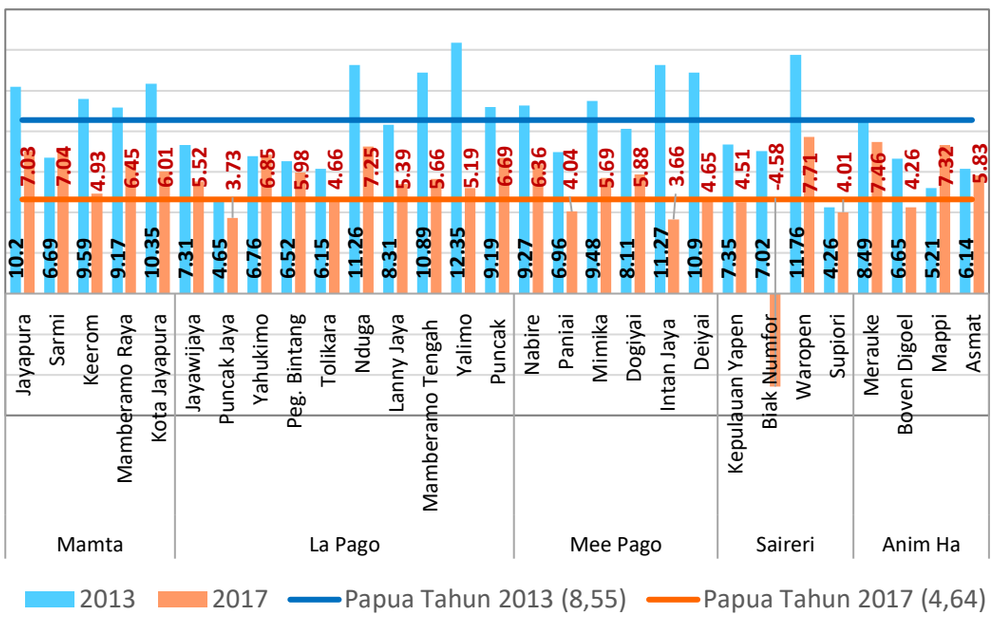

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Hanya ada 3 (tiga) daerah di Papua yang dapat dikatakan mengalami ekspansif perekonomian yakni Kabupaten Mappi yang paling tinggi mencapai 0,53% per tahun, selanjutnya Sarmi sebesar 0,09% per tahun, dan terakhir Yahukimo mencapai 0,02% per tahun. Terjadinya pelambatan ekonomi di sebagian besar wilayah di Papua tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya kinerja ekonomi di berbagai sektor potensial, rendahnya akses infrastruktur penggerak ekonomi dan masih lemahnya tata kelola pemerintahan

yang baik serta kualitas tenaga kerja yang rendah, sehingga berimplikasi langsung terhadap rendahnya produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara sektoral struktur perekonomian Papua terlihat kurang berimbang, oleh karena sektor pertambangan dan penggalian menjadi penyumbang terbesar PDRB dari tahun 2013 hingga 2017. Rata-rata kontribusi sektor pertambangan dan penggalian per tahunnya mencapai 41,77% dengan kecenderungan yang menurun. Selain itu, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga memiliki kontribusi yang tinggi dengan rata-rata 11,38% per tahun (lihat Tabel 2.11).

Tabel 2.10 Struktur Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017	Rata²
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.66	11.89	11.66	10.87	10.80	11.38
B. Pertambangan dan Penggalian	43.56	40.84	40.60	42.08	41.78	41.77
C. Industri Pengolahan	1.96	2.06	1.99	1.91	1.94	1.97
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05
F. Konstruksi	10.07	10.54	10.87	10.84	10.90	10.64
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.71	7.98	8.04	7.88	8.00	7.92
H. Transportasi dan Pergudangan	3.88	4.14	4.23	4.19	4.24	4.13
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.63	0.68	0.68	0.66	0.67	0.66
J. Informasi dan Komunikasi	3.65	3.75	3.68	3.48	3.56	3.62
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.47	1.53	1.46	1.42	1.39	1.45
L. Real Estate	2.32	2.42	2.39	2.34	2.36	2.37
M,N. Jasa Perusahaan	1.11	1.18	1.14	1.10	1.11	1.13
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.47	8.27	8.55	8.59	8.56	8.29
P. Jasa Pendidikan	2.00	2.07	2.07	2.04	2.06	2.05
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.42	1.50	1.52	1.50	1.51	1.49
R,S,T,U. Jasa lainnya	1.00	1.05	1.05	1.02	1.03	1.03
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2018

Struktur perekonomian Papua tergolong bersifat ekstratif karena ditopang oleh sektor-sektor primer seperti pertambangan dan pertanian. Adapun peranan sektor industri manufaktur masih sangat kecil dalam komposisi PDRB, rata-rata hanya 1,97% per tahun, yang terlihat lebih rendah dibandingkan sektor-sektor jasa tersier seperti perdagangan (7,92%), transportasi dan pergudangan (4,13%), informasi dan komunikasi (3,62%), administrasi pemerintahan (8,29%), dan sebagainya. Untuk itu, penguatan sektor industri dalam perekonomian wilayah menjadi kebijakan yang sangat penting dan strategis dimasa mendatang, dalam upaya mengubah struktur ekonomi ke sektor yang lebih banyak menyerap lapangan kerja, memberi pendapatan yang lebih baik, memiliki keterkaitan yang tinggi terhadap sektor lainnya, dan menghasilkan efek multiplier yang lebih besar bagi wilayah lainnya.

b. Laju Inflasi dan Tingkat Kemahalan Harga

Kenaikan harga-harga di Provinsi Papua sepanjang tahun 2013-2017 cenderung terkendali. Meskipun sempat mengalami kenaikan tinggi di tahun 2014, namun untuk tahun 2015-2017 berikutnya terus mengalami penurunan, hingga mencapai titik terendah di tahun 2017 sebesar 2,41%. Kondisi ini mengindkasikan bahwa Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua yang dimotori oleh Bank Indonesia berperan efektif sehingga mampu mengendalikan inflasi.

Gambar 2.17 Perkembangan Indeks Harga Konsumen dan Inflasi

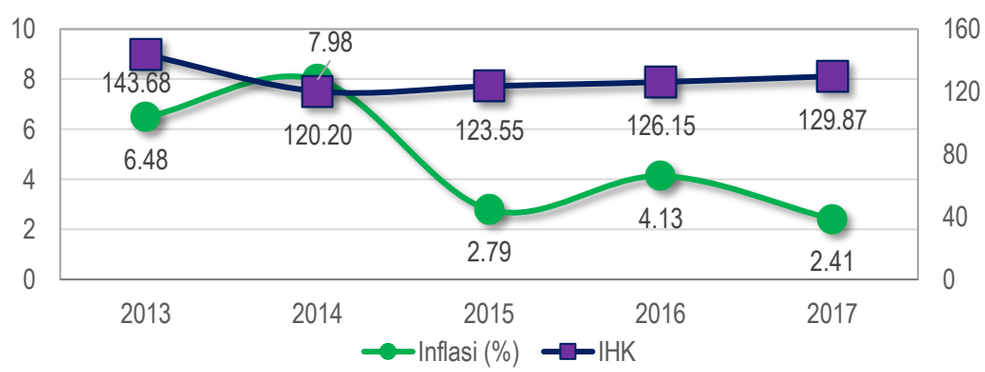

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2018 (diolah)

Laju inflasi dapat menjadi tolak ukur bagi kemampuan finansial daerah dan kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi di berbagai

wilayah Papua dapat dikatakan cukup terkendali karena bergerak diantara 3,98% hingga 7,04% (lihat Gamber 2.18). Inflasi tertinggi di wilayah adat Mamta tercatat di Mamberamo Raya sebesar 6,82% per tahun sepanjang periode 2014-2017. Sedangkan untuk La Pago di Jayawijaya sebesar 7,04% per tahun. Kemudian di Mee Pago di Intan Jaya sebesar 6,52% per tahun, untuk Saireri di Biak Numfor sebesar 6,82% per tahun, dan di Anim Ha pada Kabupaten Asmat sebesar 5,79% per tahun. Beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga yang cukup tinggi di beberapa daerah (inflasi 5-7%) antara lain masih besarnya ketergantungan konsumsi pangan dari luar daerah (terutama beras), sulitnya akses transportasi perdagangan, tingginya harga BBM dan faktor stabilitas sosial yang berpengaruh pada tingkat kelancaran distribusi barang ke berbagai daerah pegunungan dan dataran rendah sulit akses.

Gambar 2.18 Laju Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Berdasarkan Angka Deflator Tahun 2014-2017 (%)

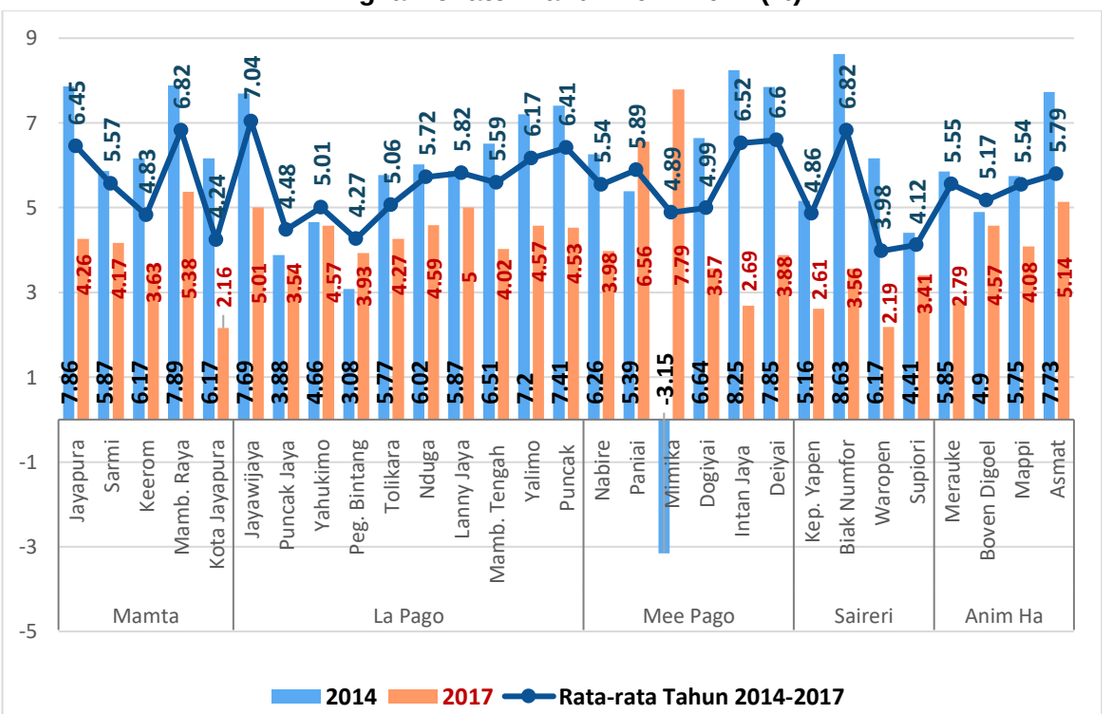

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Selain inflasi, permasalahan harga yang juga signifikan mempengaruhi kemiskinan di Papua selama ini adalah Tingkat Kemahalan Harga. Dalam Gambar 2.19 terlihat bahwa tingkat kemahalan harga yang direpresentasikan dengan IKK (Indeks

Kemahalan Kontruksi) sangat tinggi. Ada 15 kabupaten yang mempunyai IKK di atas 200%.

Gambar 2.19 Tingkat Kemahalan Konstruksi di Provinsi Papua

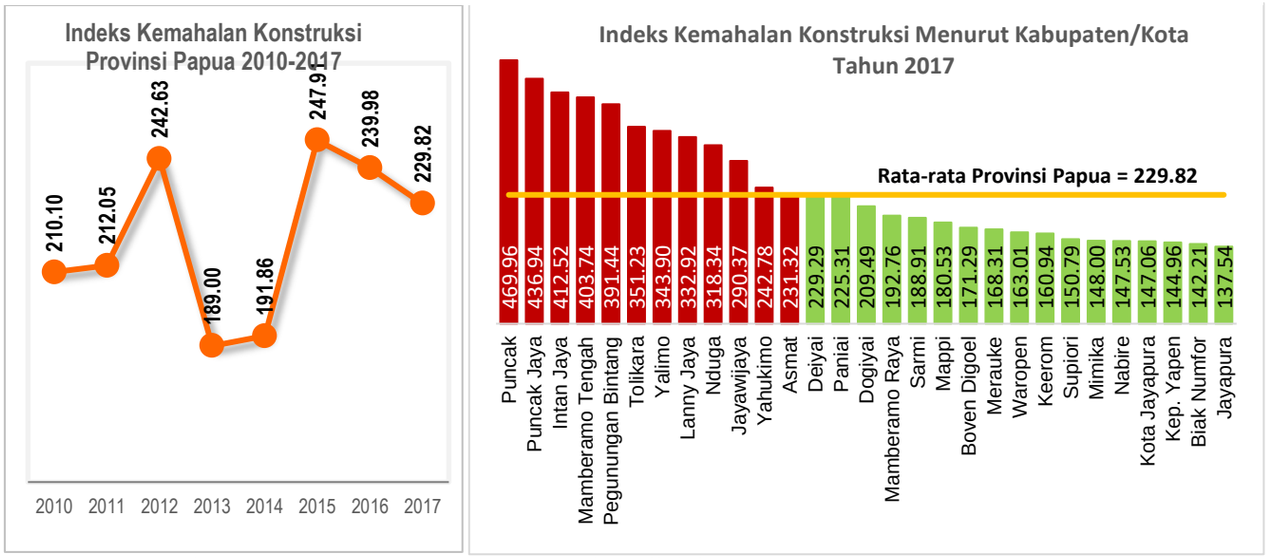

Sumber: BPS RI dan BPS Papua, 2018 (data diolah)

Sebagian besar daerah kabupaten yang ada wilayah Papua, tampaknya belum begitu optimal untuk menekan tingkat kemahalan harga. Indikasinya dapat diperhatikan pada IKK (Indeks Kemahalan Kontruksi) setiap daerah di Papua yang semuanya di atas 100 poin, dimana ada 15 kabupaten yang mempunyai IKK di atas 200 poin, dengan IKK yang tertinggi karena sudah di atas 300 point yaitu Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Mamberamo Tengah, Pegunungan Bintang, Tolikara, Lanny Jaya, dan Nduga. Kebijakan subsidi untuk menekan tingkat kemahalan harga yang telah dijalankan belum efektif karena berfokus pada sisi konsumsi, yang belum diikuti dengan peningkatan kemampuan daerah untuk menghasilkan sendiri barang-barang produksi dan sekaligus meningkatkan pendapatan produsen lokal.

c. PDRB Per Kapita

Secara makro kinerja ekonomi Provinsi Papua melalui upaya menaikkan PDRB per kapita menunjukkan kecenderungan yang cukup baik. Terlihat bahwa capaian PDRB perkapita provinsi Papua secara umum mengalami peningkatan positif. PDRB perkapita dengan tambang perkembangannya menunjukkan tren positif dari tahun 2013-2017. Secara keseluruhan pertumbuhannya rata-rata mencapai 11,20% per tahun, dimana PDRB per kapita dengan tambang pada

tahun 2013 tercatat sebesar 40,51 juta rupiah menjadi 58,68 juta pada tahun 2017.

Gambar 2.20 Pendapatan Perkapita Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan dengan dan Tanpa Tambang Tahun 2013-2017 (juta Rp)

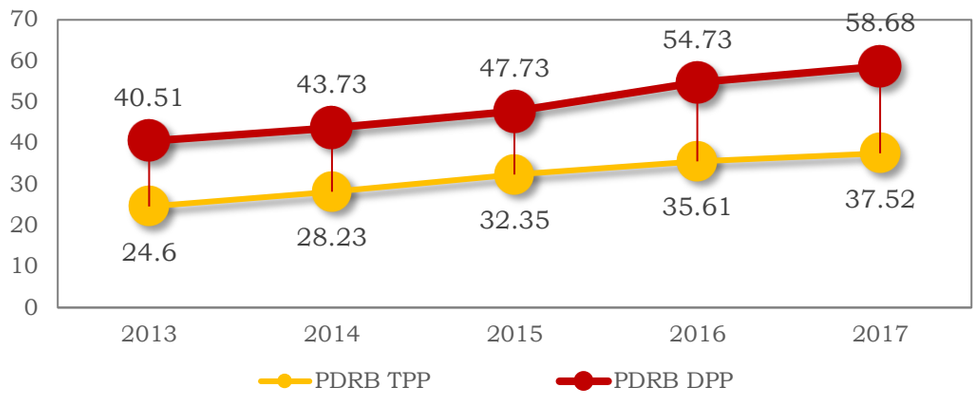

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Perhitungan pendapatan per kapita juga dapat dilakukan tanpa memasukan sektor pertambangan. Dalam hal ini, apabila diamati tanpa sektor pertambangan, tampak jelas PDRB per kapita Provinsi Papua menjadi lebih rendah. Dengan sektor pertambangan rata-rata PDRB per kapita mencapai Rp. 49.08 juta per tahun selama periode 2013-2017, sedangkan tanpa sektor pertambangan hanya sekitar Rp. 31.62 juta per tahun. Meskipun demikian ada kecenderungan pertumbuhan PDRB per kapita tanpa sektor pertambangan jauh lebih cepat yaitu sekitar 17.41% per tahun.

Apabila perkembangan pendapatan per kapita di Provinsi Papua diamati berdasarkan kewilayahan, Kabupaten Mimika pada tahun 2017 berdasarkan PDRB dengan tambang memiliki pendapatan per kapita yang sangat tinggi mencapai Rp. 298,73 juta, dan yang terendah Kabupaten Lanny Jaya sebesar Rp. 7,21 juta untuk tahun yang sama (selengkapnya lihat Gambar 2.23). Terjadi ketimpangan pendapatan per kapita yang sangat mencolok di Provinsi Papua, ketika sektor pertambangan disertakan dalam perhitungan. Akan tetapi, jika perhitungan pendapatan per kapita tanpa menyertakan sektor pertambangan, terlihat deviasi antara nilai tertinggi dengan terendah mengecil (namun tetap dalam kategori timpang), dimana pada tahun 2017 yang tertinggi adalah Kota Jayapura dan Kabupaten Merauke masing-masing sebesar Rp. 80,96 juta dan Rp. 80,02 juta, serta PDRB per kapita terendah adalah Kabupaten Lanny Jaya sebesar Rp. 7,08 juta.

Gambar 2.21 Pendapatan Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Dengan Tambang dan Tanpa Tambang di Provinsi Papua Tahun 2017

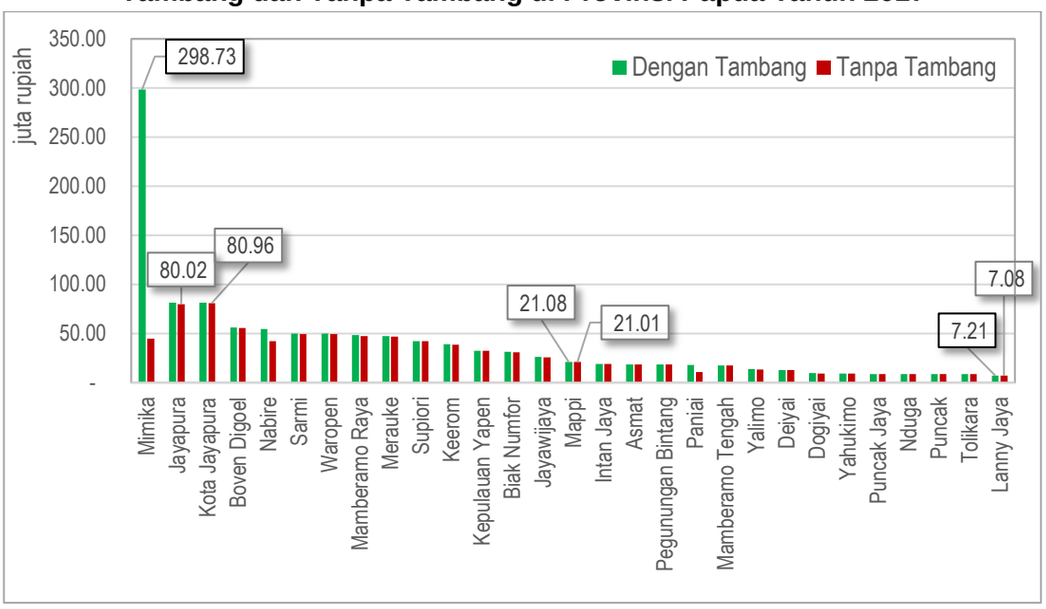

Sumber: BPS Papua, 2018 (data diolah)

d. Ketimpangan Pendapatan

Secara konseptual ukuran ketimpangan pendapatan dapat dipilah menjadi dua bagian yakni ketimpangan antarpersonal, dan ketimpangan antarwilayah. Ketimpangan antarpersonal lazimnya diukur dengan 2 (dua) cara yakni menggunakan Rasio Gini dan Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia. Sementara untuk ketimpangan antarwilayah, ukuran yang sederhana dan biasa digunakan adalah Indeks Williamson.

Untuk ketimpangan pendapatan yang direpresentasikan dengan angka Ratio Gini menunjukan bahwa secara keseluruhan ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi Papua mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2013-2017) dan cenderung mengalami perbaikan, dengan kategori termasuk ketimpangan sedang (lihat Gambar 2.21).

Daerah perkotaan (perdefinisi BPS Provinsi Papua) memiliki distribusi pendapatan yang lebih merata dibandingkan daerah perdesaan. Fenomena ini tercermin pada kecenderungan angka Rasio Gini perkotaan yang terus mengalami penurunan setiap tahunnya, hingga pada tahun 2017 mencapai 0,30 yang masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan (perdefinisi BPS Provinsi Papua), selama tahun 2013-2017 distribusi

pendapatannya menyebar dalam kondisi ketimpangan sedang, dan cenderung mengalami peningkatan, dimana pada bulan september 2017 tercatat angka Rasio Gini untuk wilayah perdesaan sebesar 0,41 naik sekitar 0,06 poin bila dibandingkan september 2013 sebesar 0,35.

Gambar 2.22 Angka Rasio Gini di Provinsi Papua Tahun 2013-2017

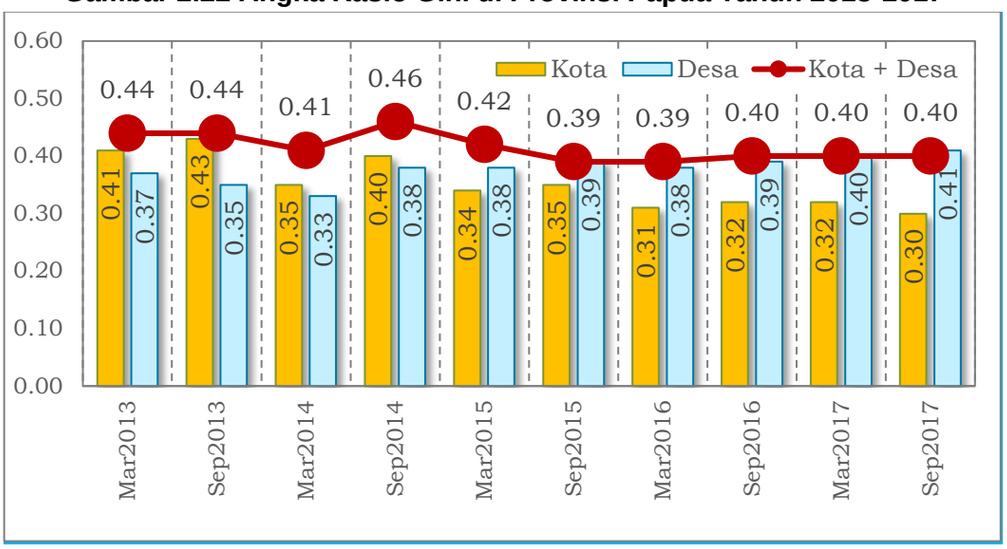

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Keterangan :

Menurut PERKA Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Di Indonesia, dijelaskan bahwa Daerah Perkotaan adalah suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang ***memenuhi*** persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumahtangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, seperti jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya. Sedangkan Daerah Perdesaan adalah suatu wilayah setingkat desa/kelurahan yang ***belum memenuhi*** persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumahtangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, seperti jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya.

Apabila dilihat berdasarkan wilayah adat, Anim Ha merupakan wilayah adat yang cenderung mengalami perbaikan ketimpangan pendapatan sepanjang tahun 2013-2016. Sedangkan wilayah lainnya cenderung mengalami peningkatan ketimpangan pendapatan.

Tabel 2.11 Ketimpangan Distribusi Pendapatan Tahun 2013-2016

Wilayah Adat	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016
Anim Ha	Merauke	0.466	0.451	0.411	0.340
	Boven Digoel	0.299	0.347	0.357	0.330
	Mappi	0.295	0.301	0.338	0.440
	Asmat	0.389	0.387	0.339	0.310
Mamta	Jayapura	0.268	0.323	0.386	0.310
	Sarmi	0.328	0.429	0.352	0.350
	Keerom	0.283	0.311	0.361	0.350
	Kota Jayapura	0.375	0.348	0.347	0.280
	Mamberamo Raya	0.309	0.265	0.234	0.300

Wilayah Adat	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016
Saereri	Biak Numfor	0.416	0.389	0.392	0.360
	KepulauanYapen	0.322	0.360	0.369	0.320
	Supiori	0.280	0.240	0.280	0.310
	Waropen	0.221	0.281	0.329	0.310
La Pago	Jayawijaya	0.367	0.336	0.397	0.340
	Yahukimo	0.271	0.299	0.257	0.250
	Pengunungan Bintang	0.146	0.220	0.268	0.290
	Tolikara	0.198	0.218	0.365	0.380
	Puncak Jaya	0.216	0.266	0.341	0.150
	LannyJaya	0.181	0.224	0.299	0.280
	Mamberamo Tengah	0.234	0.257	0.274	0.270
	Yalimo	0.259	0.212	0.135	0.190
	Puncak	0.183	0.253	0.333	0.190
	Nduga	0.199	0.222	n.a.	0.250
Mee Pago	Nabire	0.326	0.354	0.389	0.300
	Paniai	0.319	0.249	0.320	0.460
	Mimika	0.299	0.340	0.333	0.290
	Dogiyai	0.192	0.248	0.204	0.250
	Intan Jaya	0.225	0.382	0.274	0.290
	Deiyai	0.319	0.262	0.284	0.250
Papua		**0.411**	**0.410**	**0.422**	**0.313**

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2016

Sepanjang tahun 2013-2016 terdapat 25 kabupaten yang memiliki distribusi pendapatan yang relatif rendah berkisar antara 0,19-0,35 di antaranya adalah Kabupaten Yalimo, Dogiyai, Nduga, Pengunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yahukimo, Mamberamo Raya, Supiori, Deiyai, Waropen, Tolikara, Intan Jaya, Mimika, Jayapura, Keerom, Boven Digoel, Paniai, Kota Jayapura, Nabire, Kepulauan Yapen, Mappi dan Asmat.

Selain itu, terdapat juga beberapa daerah dengan kondisi tingkat ketimpangan yang relatif tinggi dan belum merata di antaranya adalah Kabupaten Jayawijaya, Sarmi, Biak Numfor dan Merauke. Pertumbuhan pendapatan per kapita yang begitu tinggi ternyata lebih banyak dinikmati oleh 20% penduduk yang berpendapatan tinggi. Dalam Gambar 2.23 diketahui adanya peningkatan proporsi penduduk yang berpendapatan tinggi, yaitu dari 41,68% di tahun 2013 menjadi 43,26% di tahun 2016. Sementara proporsi penduduk berpendapatan rendah cenderung menurun dari 20,92% pada tahun 2013 menjadi 14,36% pada tahun 2016.

Gambar 2.23 Distribusi Pendapatan Menurut Kategori Bank Dunia

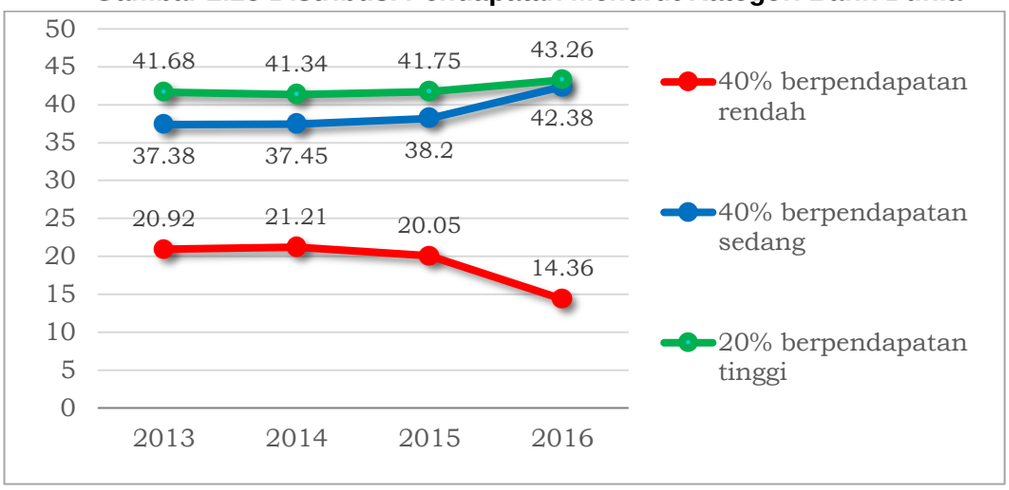

Sumber: BPS Papua, 2017 (data diolah)

Selain antar penduduk, distribusi pendapatan lainnya yang juga penting untuk diperhatikan adalah antar wilayah. Untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah lazim digunakan indikator Williamson Index (WI).

Gambar 2.24 Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah Berdasarkan Angka Williamson Index dengan Menyertakan Sektor Pertambangan

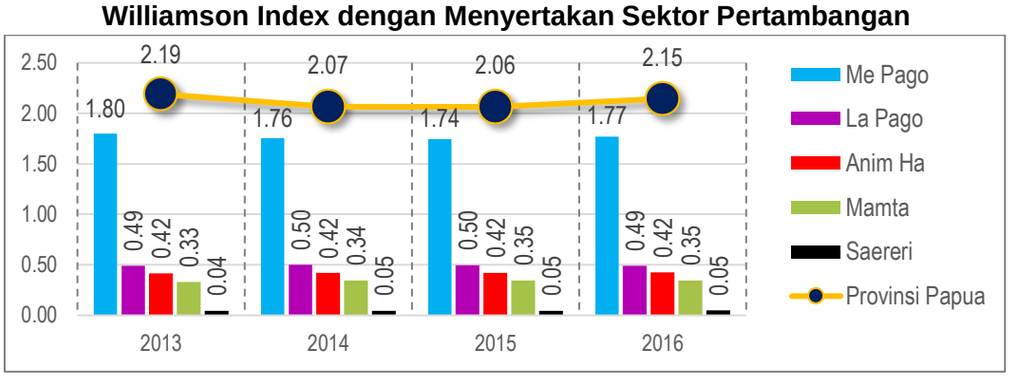

Sumber: BPS Papua, 2018 (data diolah)

Berdasarkan Williamson Index (lihat Gambar 2.24), terindikasi bahwa ketimpangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Papua selama periode 2013-2016 selalu diatas normal karena melampaui batas maksimal nilai WI di atas 1, yakni sebesar 2,19 point pada tahun 2013 sampai dengan 2,15 point di tahun 2016. Hal ini disebabkan adanya kesenjangan yang sangat besar sekali antara PDRB per kapita tertinggi dengan yang terendah saat disertakan sektor pertambangan dalam perhitungan WI. Kabupaten Mimika dengan sektor tambang menjadi *outlier* (data pencilan) dalam pengukuran WI tersebut. Jika ditelusuri berdasarkan wilayah pembangunan berbasis adat, terlihat jelas ketimpangan antar wilayah paling tinggi dengan nilainya di atas

normal hanya terjadi di wilayah Me Pago, oleh karena ada penguasaan pangsa PDRB yang sangat besar oleh Kabupaten Mimika. Sementara untuk wilayah La Pago, Anim Ha, Saereri, dan Mamta ketimpangan pendapatannya masing-masing tidak terlalu mencolok berkisar diantara 0,49 poin yang tertinggi di La Pago dan sebesar 0,05 poin di Saereri.

Kondisi yang berbeda ketika perhitungan WI tanpa menyertakan sektor pertambangan terlihat nilai indeksnya di bawah angka maksimum yaitu sekitar 0,79 point di tahun 2013 kemudian meningkat menjadi 0,82 di tahun 2016 (lihat Gambar 2.25). Kecenderungan ini menandakan bahwa ketimpangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Papua selama periode 2013-2016 belum dapat membaik secara optimal. Dimana ketimpangan tertinggi terjadi di wilayah Me Pago, kemudian La Pago, Anim Ha, Mamta, dan terendah di wilayah Saireri.

Gambar 2.25 Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah Berdasarkan Angka Williamson Index Tanpa Sektor Pertambangan

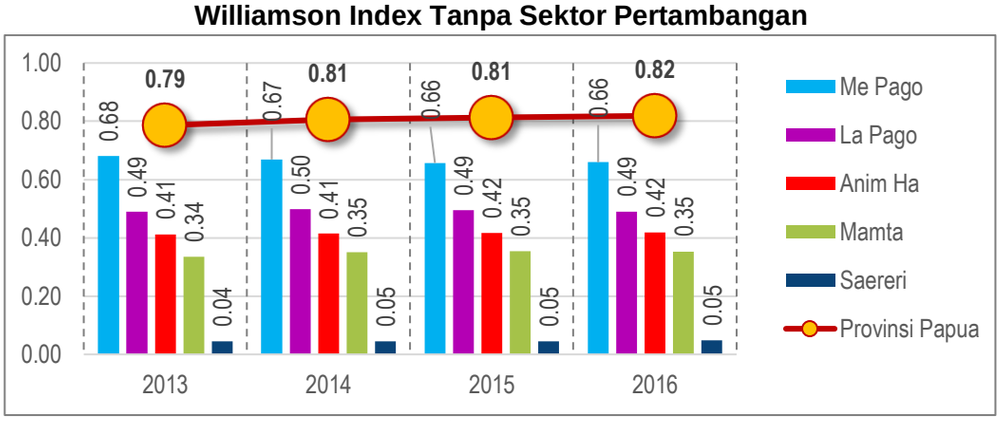

Sumber: BPS Papua, 2018 (data diolah)

Meskipun disadari bahwa pembangunan infrastruktur secara besar-besaran yang dilakukan pemerintah pusat di Provinsi Papua semenjak tahun 2014 hingga sekarang memiliki dampak dalam jangka panjang, namun sebenarnya untuk jangka pendek manfaatnya dapat dirasakan segera oleh masyarakat Papua guna mengurangi ketimpangan antarwilayah. Sebagai misal, pembangunan Trans Papua yang sudah dikerjakan pemerintah pusat hingga mencapai 2.905,75 km atau 89,15% dari total panjang yang direncanakan, dapat dimanfaatkan segera oleh setiap daerah kabupaten/ kota yang dilalui jalur Trans Papua tersebut untuk menciptakan pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi yang baru. Contohnya untuk Kabupaten Yalimo yang menjadi pintu transit penghubung antara Kota Jayapura yang ada di pesisir dengan Kota Wamena yang ada di pegunungan, dapat mengambil manfaat dari beroperasinya trans papua Jayapura-Wamena dengan membangun kawasan ekonomi baru di Distrik Benawa dan Abenaho. Begitu juga dengan Kabupaten Keerom dapat menjadikan Distrik Senggi sebagai pusat pertumbuhan baru, dan Distrik Lereh di Kabupaten Jayapura.

2.1.3.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat dilakukan terhadap kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

a. Kemiskinan

Jika mengamati perkembangan tingkat kemiskinan selama tahun 2013-2017, kemiskinan di Provinsi Papua terus mengalami penurunan, meskipun sempat di tahun 2015 naik 0,6 poin, namun penurunan kemiskinan bisa dipercepat kembali sampai dengan tahun 2017, hingga menjadi 27,76%. (lihat Gambar 2.26). Dengan kata lain Provinsi Papua berhasil mempercepat penurunan kemiskinan kurang lebih -0,94% per tahun selama periode 2013-2017.

Gambar 2.26 Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan di Papua

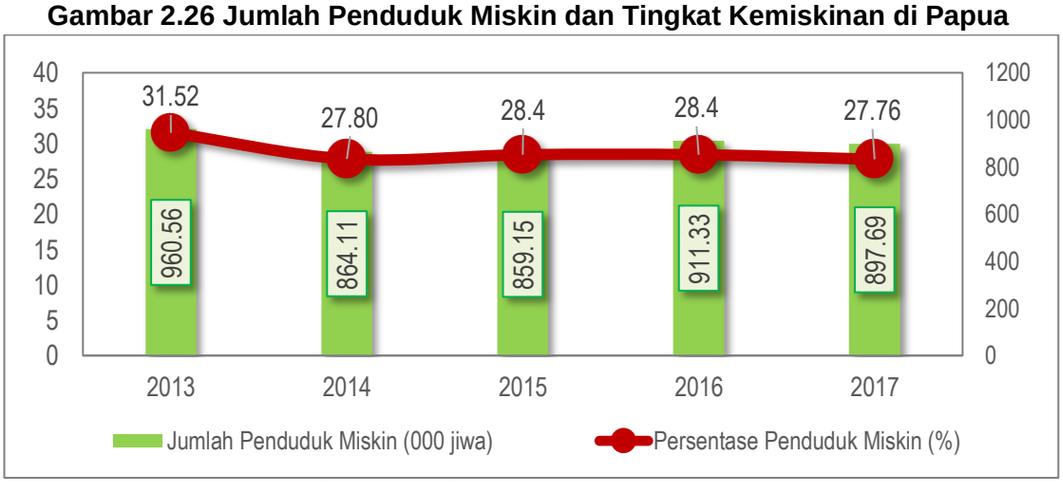

Sumber: BPS Papua, 2017 (data diolah)

Menurut kewilayahan, daerah yang paling miskin selama ini adalah di perdesaan. Sampai tahun 2017 (September) tercatat kemiskinan di perdesaan mencapai 36,56%, atau turun -0,51% dibandingkan tahun 2016. Sedangkan di perkotaan sebesar 4,55% yang juga turun dibandingkan tahun 2016.

Gambar 2.27 Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua (%)

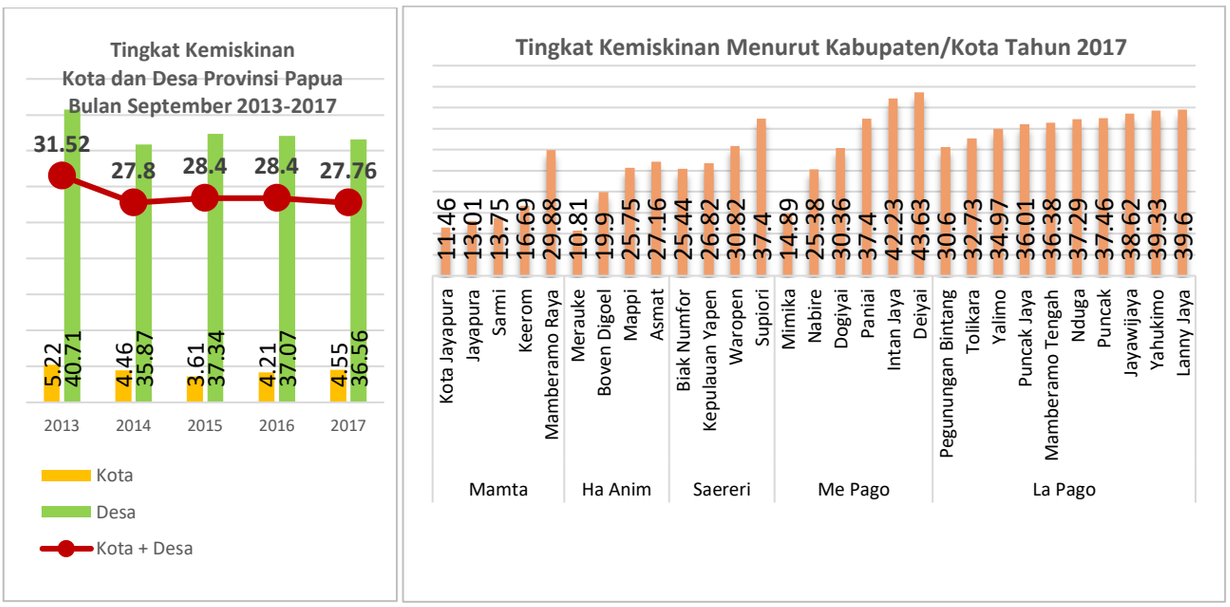

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Secara kumulatif selama tahun 2017, jika dipilah berdasarkan kabupaten/kota, terlihat kabupaten Deiyai sebagai penyumbang terbesar kemiskinan di Provinsi Papua (lihat Gambar 2.27). Tingkat kemiskinan di Kabupaten Deyiai adalah 43,63% yang masuk kawasan pembangunan Mee Pago. Posisi kedua terbesar adalah kabupaten Intan Jaya dengan angka 42,23% yang keduanya masuk kawasan pembangunan La Pago. Sedangkan kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah adalah kabupaten Merauke dengan angka 10,81% yang masuk kawasan pembangunan Mamta, yang diikuti oleh kota Jayapura dengan angka 11,46% dan kabupaten Jayapura dengan angka 13,01% yang keduanya masuk kawasan pembangunan Mamta. Jika diambil rata-ratanya per wilayah adat, dapat dikatakan bahwa wilayah La Pago mempunyai tingkat kemiskinan tertinggi di Papua yaitu sebesar 36,30%, menyusul wilayah Me Pago sebesar 32,32%, Saireri sebesar 30,12%, Ha Anim sebesar 20,91%, dan Mamta sebesar 16,96%.

Gambar 2.28 Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Provinsi Papua (%)

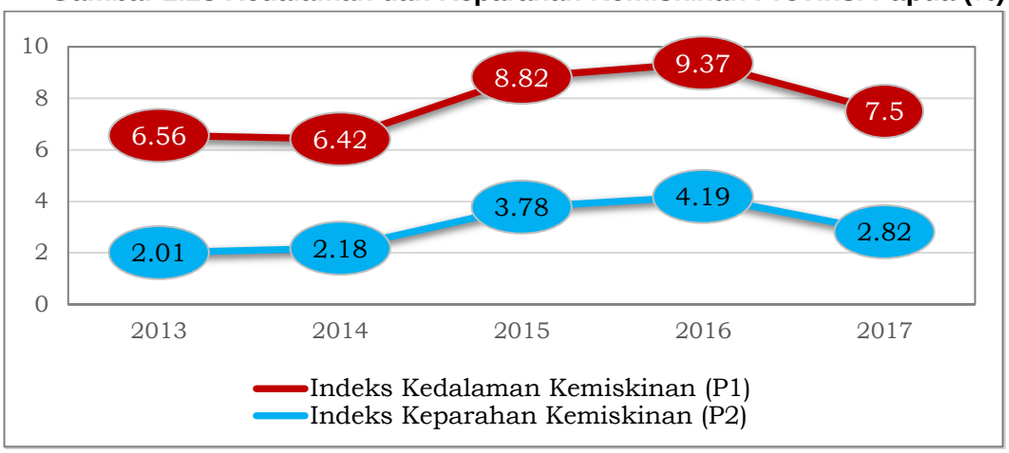

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, tingkat keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan juga perlu diukur dari seberapa besar perubahan yang terjadi pada tingkat kedalaman (P1) dan keparahan (P2) dari kemiskinan. Di mana semakin tinggi nilai indeks P1 ini maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, yang menggambarkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. Berikutnya, semakin tinggi angka indeks P2 maka sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin itu semakin timpang dan sebaliknya.

Tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Papua selama tahun 2013-2016 cenderung mengalami peningkatan yang cukup tinggi, rata-rata naik 2,81% per tahun. Kemudian menurun di tahun 2017 sebesar 1,87% menjadi 7,5%, namun masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2013, sehingga rata-rata tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Papua sepanjang tahun 2013-2017 relatif kelihatan naik sebesar 0,24% per tahun.

b. Indeks Pembangunan Manusia

Kualitas pembangunan manusia di Provinsi Papua yang diindikatorkan oleh IPM cenderung terus mengalami peningkatkan, namun demikian masih dalam kategori IPM rendah, dan juga paling rendah di Indonesia. Dimana komponen pembentuk IPM yang paling cepat tumbuh selama ini adalah Harapan Lama Sekolah. Adapun untuk Angka Harapan Hidup, kontribusinya terhadap pertumbuhan IPM sangat rendah.

Tabel 2.12 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup (thn)	64,76	64,84	65,09	65,12	65,14
Harapan Lama Sekolah (thn)	9,58	9,94	9,95	10,23	10,54
Rata-Rata Lama Sekolah (thn)	5,74	5,76	5,99	6,15	6,27
Pengeluaran (Rp. ribu)	6.394	6.416	6.469	6.637	6.996
IPM	56,25	56,75	57,25	58,05	59,09
Rank IPM Papua Di Indonesia	34	34	34	34	34

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Angka Harapan Hidup (AHH), merupakan salah satu komponen dalam perhitungan IPM yang merefleksikan derajat kesehatan suatu masyarakat. Perkembangan AHH di provinsi Papua menunjukkan adanya peningkatan, namun berjalan lambat dan masih dibawah angka maksimum. Tahun 2013, Angka Harapan Hidup 64,76 tahun meningkat 0,83 poin menjadi 65,14 tahun pada tahun 2017, dan masih belum mencapai angka maksimum 85 tahun.

Berdasarkan data capaian yang ada terlihat bahwa Angka Harapan Lama Sekolah maupun Angka Rata-rata Lama Sekolah masih jauh di bawah angka ideal dan bergerak sangat lambat. Meskipun demikian pergerakan kedua indikator tersebut sepanjang lima tahun ke arah yang lebih baik. Terlihat bahwa selama tahun 2013-2017, kenaikan rata-rata angka harapan lama sekolah mencapai 2.43 poin per tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah sebesar 2.24 poin per tahunnya.

Gambar 2.29 Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Pada Tahun 2017

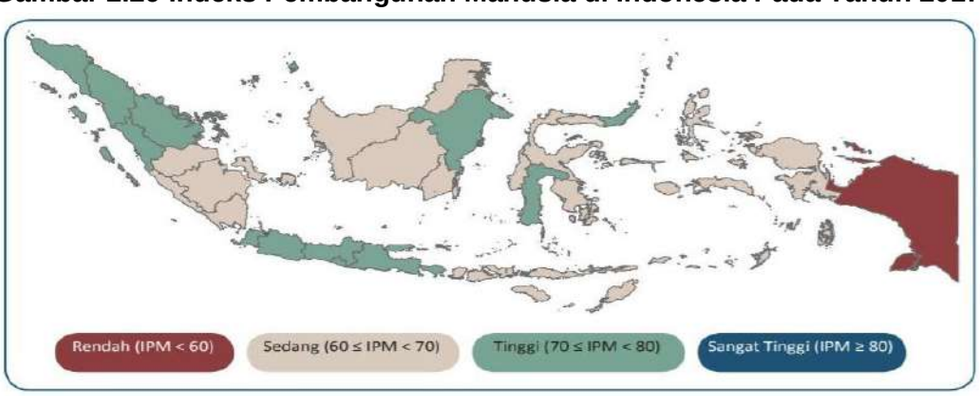

Sumber: BPS RI (2018)

Terakhir untuk komponen pengeluaran per kapita Provinsi Papua sepanjang 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan rata-rata pengeluaran per kapita di Provinsi

Papua adalah sebesar Rp. 6.582,40 per tahun. Berdasarkan capaian dimensi kesehatan, pendidikan dan pengeluaran tersebut terlihat bahwa IPM di provinsi Papua tahun 2013-2017, dikategorikan IPM rendah dengan peningkatan rata-rata mencapai 1.24 point setiap tahunnya dengan capaian 59,09 point pada tahun 2017 dan menduduki ranking ke 34 di Indonesia (lihat Gambar 2.13).

Komponen pembentuk IPM yang paling cepat tumbuh selama ini adalah Harapan Lama Sekolah, yang tercatat selama tahun 2013-2017 mencapai 3,01% per tahun. Sedangkan yang kedua cepat tumbuh adalah angka rata-rata lama sekolah yaitu 1,66% per tahun, kemudian komponen pengeluaran per kapita sekitar 1,64% per tahun, dan yang terendah adalah angka harapan hidup hanya 0,18 per tahun. Secara keseluruhan pertumbuhan IPM Papua kurang lebih 1,18% per tahun.

Gambar 2.30 Tingkat Pertumbuhan IPM Beserta Komponennya di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)

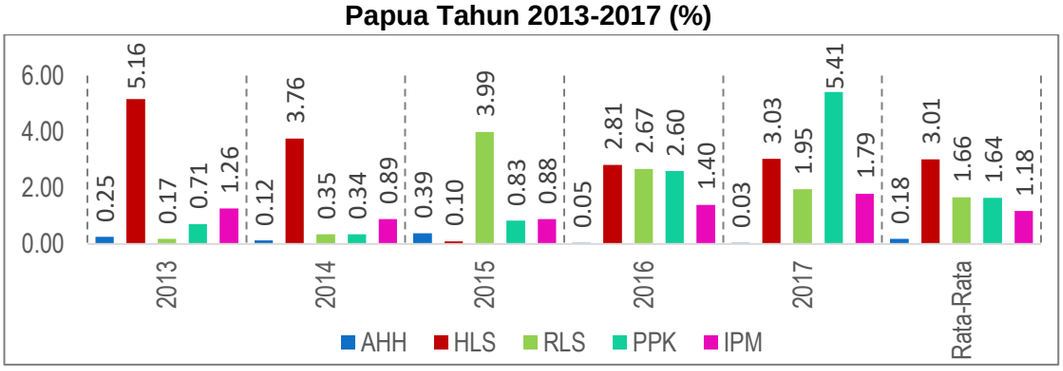

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Dalam 034 diketahui bahwa IPM kabupaten/kota di wilayah Papua sepanjang tahun 2013-2017 sebagian besar masuk dalam kategori IPM rendah. Kota Jayapura selama periode tersebut dapat dikatakan yang paling konsisiten dalam peringkat pertama di Provinsi Papua, dimana sampai dengan tahun 2017 nilai IPM Kota Jayapura telah mencapai 79,23 poin. Kemudian di ikuti dengan Kabupaten Mimika pada urutan ke-2, dan Kabupaten Biak Numfor di urutan ke-3. Adapun pada tahun 2017 daerah dengan IPM terendah di Kabupaten Nduga (urutan ke 29), Puncak (urutan 28) dan Pegunungan Bintang (urutan ke 27).

Gambar 2.31 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2013-2017

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018

Daerah yang mengalami perubahan peringkat IPM sepanjang tahun 2013-2017 adalah sebanyak 10 Kabupaten. Dimana yang memiliki perubahan dalam peringkat IPM yang mengarah pada pergerakan positif (peringkat naik) adalah Kabupaten Jayawijaya, Asmat, Mamberamo Raya dan Lanny Jaya. Sedangkan daerah dengan pergeseran peringkat IPM mengalami perubahan ke arah negatif (peringkat turun) antara lain Kabupaten Paniai, Yahukimo, Tolikara, Yalimo, Intan Jaya dan Deiyai.

Melihat kecenderungan berbagai komponen pembentuk IPM selama ini, terindikasi bahwa sebagian besar pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Papua telah berhasil membangun sektor kesehatan. Namun untuk pembangunan di bidang pendidikan dan ekonomi masih belum maksimal, yang diindikasikan dengan Rata-Rata Lama Sekolah yang masih dibawah Wajib Belajar Sembilan Tahun, dan pengeluaran per kapita yang relatif di bawah garis kemiskinan.

2.1.3.3. Fokus Pendidikan

Terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi prioritas dalam pembangunan pendidikan yaitu akses, mutu dan tata kelola. Secara makro akses pendidikan dapat diindikasikan dengan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Sementara untuk mutu pendidikan, salah satunya dapat digambarkan melalui kecenderungan indikator Angka Melek Huruf. Adapun untuk tata kelola, karena pembahasannya lebih

bersifat mikro, akan dibahas pada konteks pembangunan menurut urusan berikutnya.

a. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur kondisi literasi suatu masyarakat disuatu daerah. Angka melek huruf ini merupakan salah satu komponen penentu tingkat kualitas pembangunan pendidikan di suatu daerah. Oleh karena itu Angka Melek huruf merupakan bagian dari indikator penting pembangunan daerah khususnya di bidang pendidikan. Provinsi Papua tampaknya kurang optimal untuk meningkatkan penduduk yang melek huruf sepanjang tahun 2013-2017.

Dalam Gambar 2.32 terlihat bahwa AMH (Angka Melek Huruf) Provinsi Papua pada tahun 2013 hanya sebesar 75,83% dan menurun menjadi 73,89% pada tahun 2017. Meskipun demikian, untuk periode 2015-2017 ada kecenderungan peningkatan AMH dengan rata-rata 1,02% per tahun. Jika diperhatikan menurut kabupaten/kota, terpetakan cukup banyak daerah kabupaten yang mempunyai AMH di bawah rata-rata provinsi, semuanya di wilayah pegunungan (La Pago dan Mee Pago).

Gambar 2.32 Angka Melek Huruf di Provinsi Papua Tahun 2013-2016 (%)

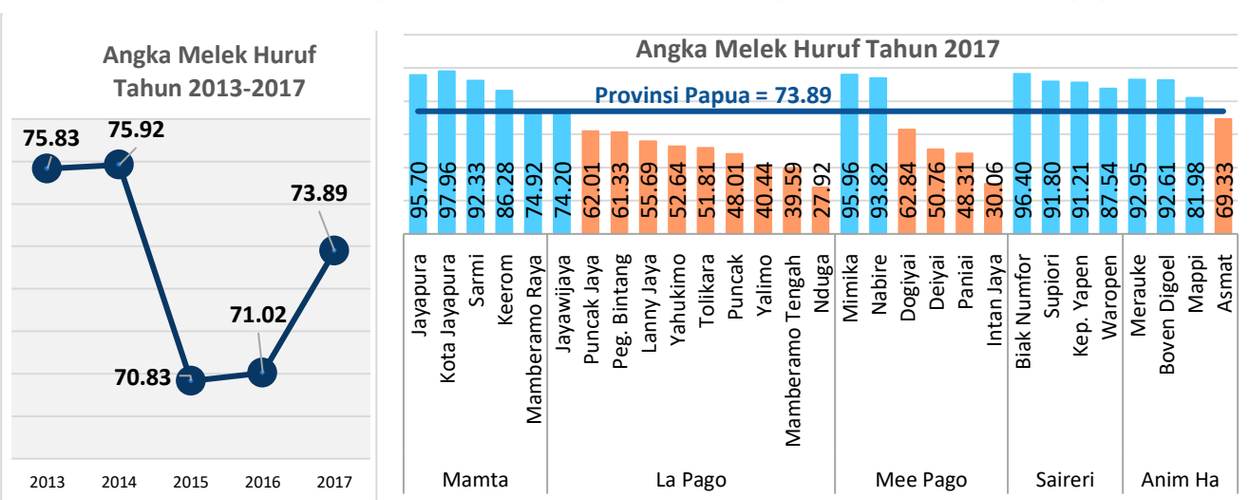

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Dari Gambar 2.32 tampak jelas bahwa masih ada beberapa kabupaten yang mencapai AMH di bawah 70%. Bahkan 6 (enam) diantaranya dibawah 50% yaitu Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Puncak dan Paniai. Dimana Kabupaten

Nduga memiliki AMH yang terendah di Papua hanya sebesar 27,92% pada tahun 2017. Dengan kata lain sekitar 72,08% penduduknya yang berusia diatas 15 tahun mengalami buta huruf.

Di samping itu juga terjadi ketimpangan yang sangat mencolok dalam pengentasan buta huruf melalui peningkatan AMH antar daerah di wilayah Papua. Pada umumnya daerah-daerah yang sulit akses baik itu di dataran rendah maupun pegunungan mempunyai AMH yang rendah, rata-rata dibawah AMH Papua. Sedangkan di daerah yang mudah akses, sebagian besar sudah di atas AMH Papua, dan beberapa diantaranya telah mencapai angka 100% seperti Kabupaten Merauke, Biak Numfor, Mimika, dan Waropen, atau yang mendekati 100% misalkan Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Mamberamo Raya.

b. Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator penting capaian pembangunan pendidikan di daerah dapat dilihat dalam capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi tentang partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, serta tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Data ini digunakan untuk melihat akses penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.

Gambar 2.33 Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Papua (tahun)

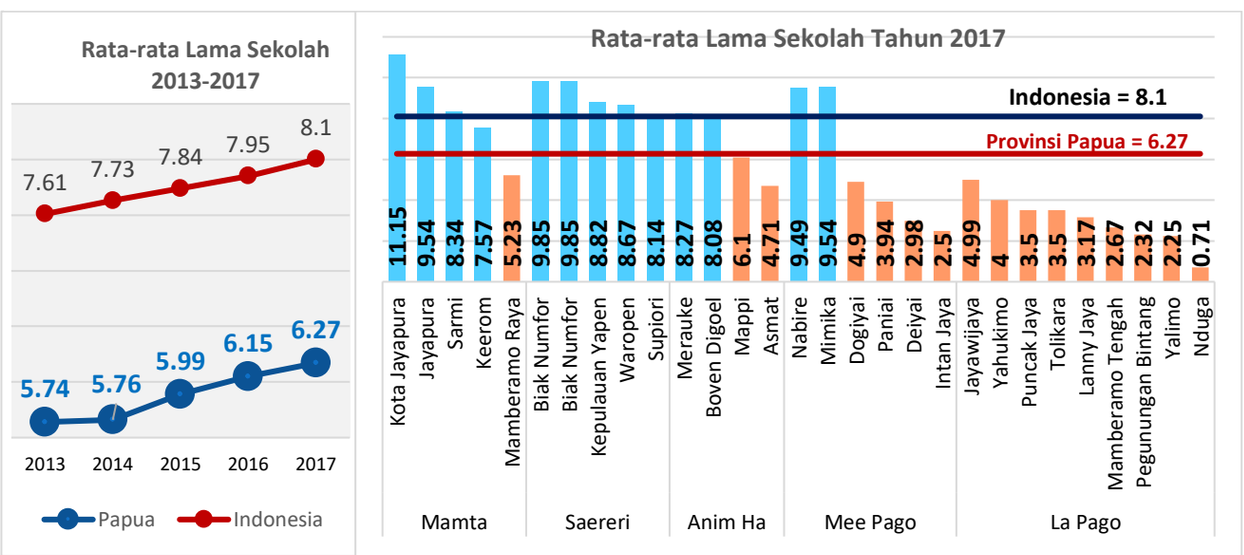

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Secara umum perkembangan RLS Provinsi Papua mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih dibawah target

program pendidikan wajib belajar 9 tahun, dimana hingga tahun 2017 tercatat RLS Provinsi Papua hanya mencapai 6,27 tahun. Kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya kemampuan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua dalam menyerap penduduk usia sekolah. Beberapa daerah di Provinsi Papua telah memiliki capaian RLS yang cukup baik, namun sebagian besar kabupaten di Provinsi Papua masih memiliki capaian RLS yang relatif rendah (lihat Gambar 2.33).

Sebaran capaian RLS kabupaten/kota diatas menunjukkan rata-rata RLS yang paling tinggi di Papua adalah wilayah Mamta dengan capaian tertinggi berada di Kota Jayapura sebesar 11,15 tahun di tahun 2017, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Mamberamo Raya sebesar 5,23 tahun. Adapun untuk wilayah pembangunan yang paling rendah RLS di seluruh Provinsi Papua adalah La Pago dengan nilai rata-rata hanya 2,9 tahun pada tahun 2017, dimana Kabupaten Nduga merupakan yang terendah di wilayah La Pago dan Provinsi Papua yakni 0,71 tahun, yang berarti sebagian besar penduduknya banyak yang tidak dapat mengenyam pendidikan sampai kelas 1 SD.

Untuk wilayah Mee Pago terlihat relatif lebih baik dibandingkan La Pago, meskipun masih dibawah 6 tahun. RLS pada tahun 2017 di wilayah Mepago kurang lebih mencapai 5,56 tahun dengan RLS terendah di Kabupaten Intan Jaya sebesar 2,5 tahun, dan tertinggi di Kabupaten Mimika sebesar 9,54 tahun. Berikutnya di wilayah Anim Ha, pada tahun 2017 secara rata-rata bisa mencapai 6,79 tahun. Dengan RLS tertinggi di Kabupaten Merauke sebesar 8,27 tahun, dan terendah di Kabupaten Asmat sebesar 4,71 tahun. Terakhir untuk wilayah Mamta, karena di topang oleh RLS Kota Jayapura yang paling tinggi yakni 11,15 tahun, akhirnya secara rata-rata capaian RLS di wilayah tersebut dapat mencapai 8,37 tahun. Dimana yang paling rendah di Kabupaten Mamberamo Raya sebesar 5,23 tahun. Semua fakta ini menunjukan adanya ketimpangan kemampuan masyarakat di kelima wilayah adat tersebut dalam mengakses layanan pendidikan, yang disebabkan oleh perbedaan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan sehingga akses dan kualitas pendidikan antar wilayah menjadi berbeda sangat nyata.

c. Harapan Lama Sekolah

Selain Rata-rata Lama Sekolah, keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dalam capaian Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketersediaan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah bagi penduduk usia sekolah. Angka HLS menunjukkan jangka waktu yang diharapkan dapat dimanfaatkan penduduk usia sekolah untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Secara umum, perkembangan HLS Provinsi Papua mengalami sedikit peningkatan. Dalam kurun waktu lima tahun capaian HLS Provinsi Papua rata-rata meningkat sebesar 0,24 poin per tahun, dimana pada tahun 2017 diperkirakan HLS Provinsi Papua mencapai 10,54 tahun, yang mengindikasikan secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2017 memiliki peluang untuk bersekolah selama 10,54 tahun atau setara dengan kelas 1 SLTA, berarti masih dibawah jenjang pendidikan diploma/pendidikan tinggi (lihat Gambar 2.34).

Gambar 2.34 Harapan Lama Sekolah di Provinsi Papua (tahun)

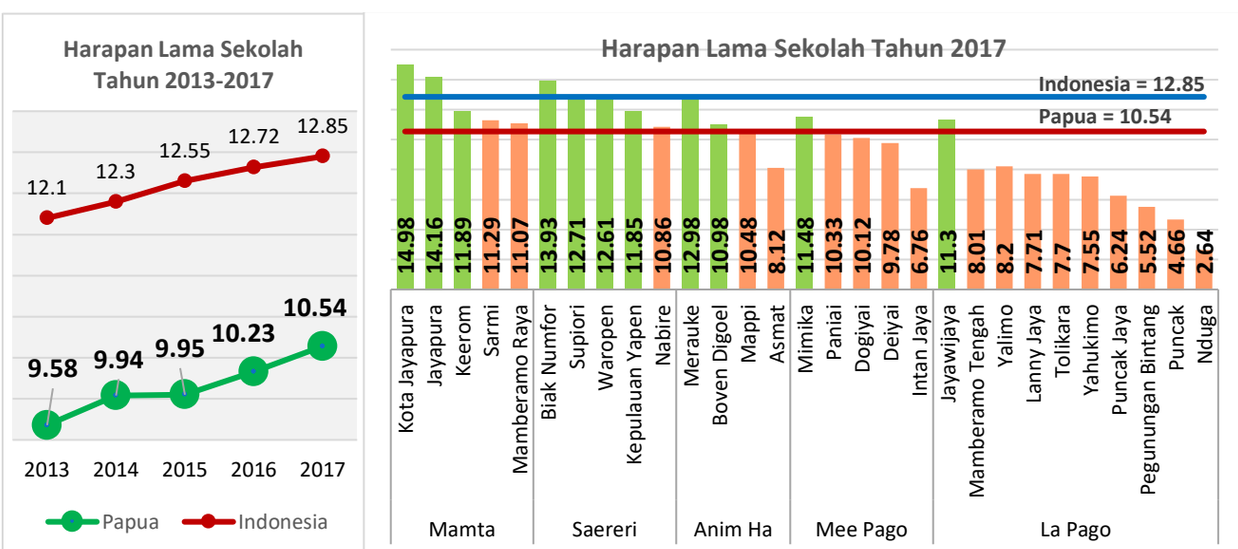

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2018

Secara umum, Mamta merupakan wilayah adat dengan rata-rata HLS tertinggi di Papua, sedangkan untuk yang terendah di wilayah Lapago. Dibandingkan dengan kabupaten/kota di wilayah adat Mamta, Kota Jayapura mempunyai HLS paling tinggi yakni sebesar 14,98 tahun pada akhir tahun 2017, sedangkan Kabupaten

Mamberamo Raya merupakan daerah yang memiliki HLS terendah yakni 11,07 tahun pada tahun yang sama. Selanjutnya, wilayah adat La Pago dengan rata-rata HLS sekitar 6,06 tahun pada tahun 2017, yang mana salah satu kabupaten di wilayah tersebut yaitu Nduga tercatat memiliki HLS yang paling rendah di Provinsi Papua sebesar 2,64 tahun. Kemudian untuk wilayah Mee Pago tercatat Kabupaten Mimika, Paniai dan Dogiyai diestimasi mempunyai HLS yang paling tinggi yakni masing-masing sebesar 11,48 tahun, 10,33 tahun dan 10,12 tahun. Sedangkan untuk wilayah Anim Ha, semua daerah diharapkan memiliki lama sekolah di atas 9 tahun, terkecuali untuk Kabupaten Asmat masih dibawah 9 tahun yakni sebesar 8,12 tahun.

2.1.3.4. Fokus Kesehatan

Pembangunan kesehatan di suatu daerah pada umumnya diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan derajad kesehatan masyarakat, upaya kesehatan masyarakat dan sumber daya kesehatan yang mencakup penyediaan sarana dan prsarana kesehatan yang berkualitas dan memadai. Dalam tataran makro, indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan keberhasilan dalam upaya meningkatkan derajad kesehatan masyarakat adalah Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu dan Bayi, serta persentase balita gizi buruk dan gizi kurang. Sementara untuk upaya kesehatan masyarakat, salah satunya dapat menggunakan indikator cakupan desa siaga aktif. Namun, karena data mengenai Desa Siaga Aktif tidak tersedia, maka sebagai proksi digunakan data jumlah desa yang melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM).

a. Angka Harapan Hidup

Mengenai fokus kesejahteraan sosial yang terkait dengan isu kesehatan, indikator penting yang perlu dianalisis adalah capaian Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan indikator pada level dampak yag mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat secara umum pada suatu waktu tertentu. Berikut ini merupakan perkembangan AHH Provinsi Papua. Secara umum capaian AHH Provinsi Papua mengalami kecenderungan yang relatif meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai angka tertinggi di tahun 2017

sebesar 65,14 tahun, atau naik sebesar 0,4 tahun bila dibandingkan tahun 2013. Meningkatnya AHH menunjukan adanya keberhasilan pembangunan kesehatan di Provinsi Papua.

Upaya mempercepat kenaikan AHH tidak semata hanya urusan bidang kesehatan saja. AHH ini sangat erat berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan kalori, kecukupan gizi, proporsi pengeluaran rumah tangga, aksesbilitas, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Sehingga diperlukan adanya integrasi dan sinkronisasi antarsektor dalam upaya mempercepat kenaikan AHH, yang sekaligus juga dapat mengurangi ketimpangan pembangunan kesehatan antar wilayah yang masih terasa sampai saat ini.

Gambar 2.35 Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Papua

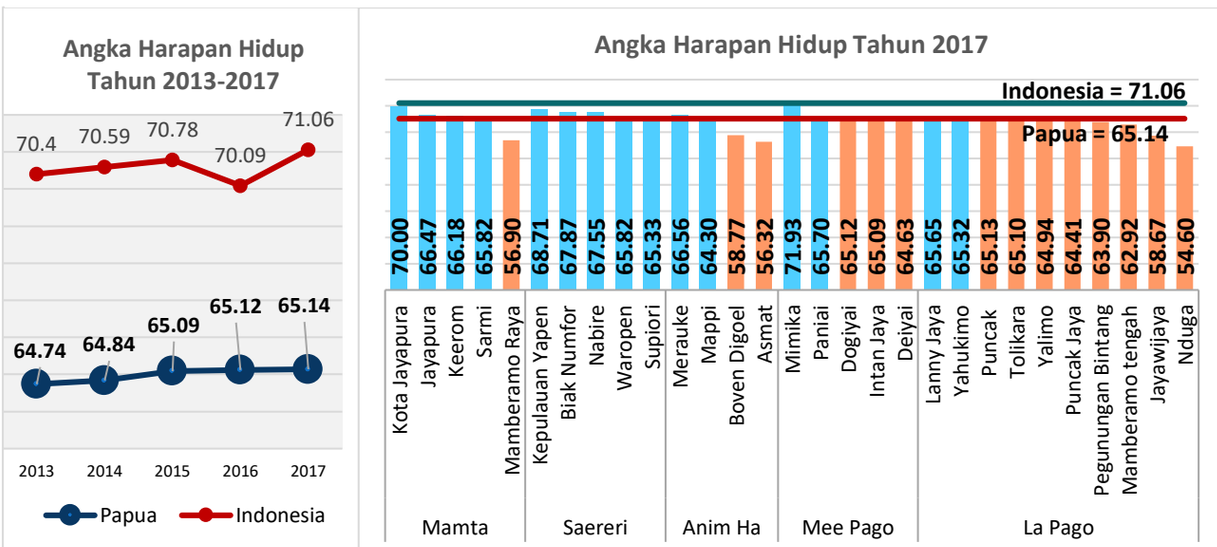

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua 2018

Rata-rata capaian Angka Harapan Hidup (AHH) di 4 wilayah adat masih berada di bawah capaian AHH rata-rata Provinsi Papua. Saireri merupakan satu-satunya wilayah adat yang memiliki capaian rata-rata AHH di atas Provinsi Papua. Hal ini mengindikasikan ketimpangan ketersediaan dan kualitas penyelenggaraan layanan kesehatan diantara kabupaten/kota di Provinsi Papua. Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah dengan capaian AHH tertinggi di wilayah adat Saireri yang mencapai 68,71 tahun pada akhir tahun 2017. Namun, capaian tersebut masih berada di bawah AHH Kabupaten Mimika yang mencapai 71,93 tahun hingga akhir tahun 2017. Capaian AHH Kabupaten Mimika tersebut juga berada jauh di atas rata-rata AHH Provinsi Papua. Hal tersebut mengindikasikan bahwa

ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Mimika relatif jauh lebih optimal dibandingkan dengan kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Papua.

Sebaliknya, wilayah adat La Pago merupakan kawasan dengan rata-rata capaian AHH terendah di Provinsi Papua yaitu, 62,59 pada tahun 2017. Kabupaten Nduga merupakan daerah dengan capaian AHH terendah di wilayah adat Lapago yaitu sebesar 54,6 tahun sedangkan, Kabupaten Kabupaten Lanny Jaya merupakan daerah dengan capaian AHH tertinggi dibandingkan dengan seluruh kabupaten di wilayah adat La Pago.

b. Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang

Pemantauan Status Gizi (PSG) merupakan kegiatan pemantauan perkembangan status gizi balita yang dilaksanakan setiap tahun secara berkesinambungan untuk memberikan gambaran tentang kondisi status gizi balita. Status gizi buruk bayi usia 0-23 bulan di Provinsi Papua cukup memprihatinkan, karena selama tahun 2015-2017 kecenderungannya mengalami peningkatan, yakni dari 5,2% di tahun 2015 menjadi 6,5% di tahun 2017. Padahal untuk jangka waktu yang sama secara keseluruhan gizi buruk di Indonesia mengalami penurunan. Angka gizi buruk di Papua juga terlihat lebih tinggi dibandingkan rata-rata Indonesia yang pada tahun 2017 hanya sebesar 3,5%.

Gambar 2.36 Status Gizi Anak Balita Umur 0 - 23 Bulan Berdasarkan Indeks BB/U di Provinsi Papua dan Indonesia Tahun 2015-2017 (%)

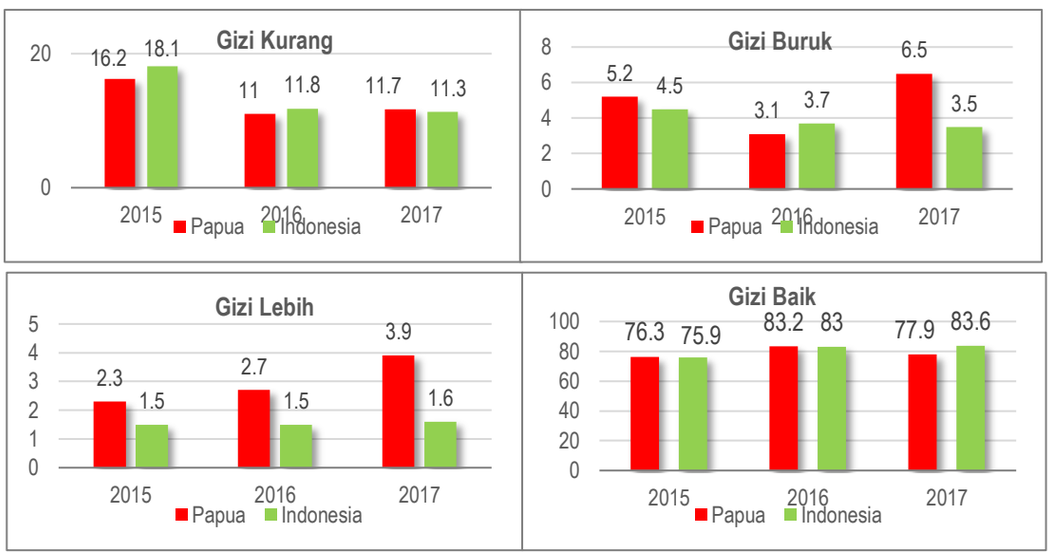

Sumber: Direktorat Gizi Masyarakat Kemenkes RI, 2018 (data diolah)

Stunting merupakan masalah gizi buruk kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Provinsi Papua termasuk paling tinggi memiliki stunting di atas rata-rata Indonesia bersama 19 provinsi lainnya (lihat Gambar 2.37).

Gambar 2.37 Angka Stunting Tertinggi di Indonesia Tahun 2017 (%)

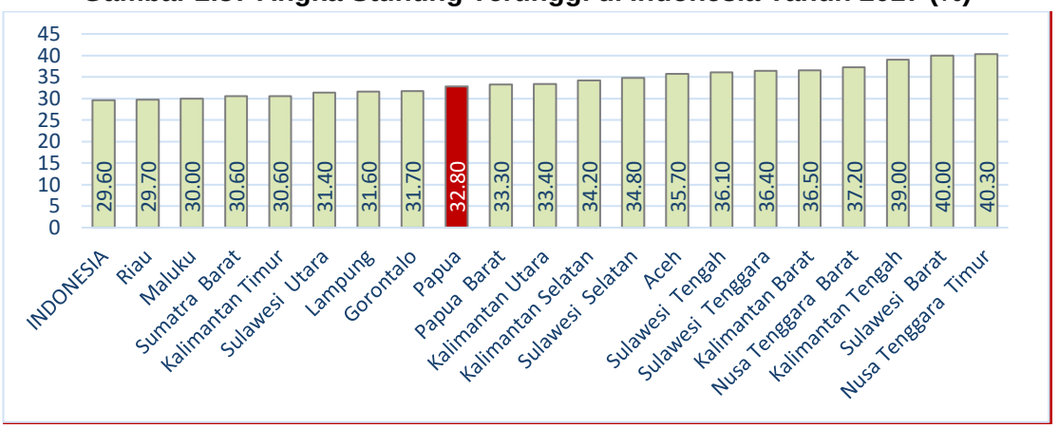

Sumber: Direktorat Gizi Masyarakat Kemenkes RI, 2018 (data diolah)

Keadaan stunting yang terlihat tinggi di Provinsi Papua ini, yaitu mencapai 32,80%, perlu ditangani segera dengan efektif, agar manfaat bonus demografi yang akan diterima selama periode 2020-2030 mendatang dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat Papua.

c. Cakupan Desa yang Melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular

Desa Posbindu PTM (Pos Pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular) yang mulai dikembangkan pada tahun 2011 merupakan wujud peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM utama yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Kegiatan Posbindu PTM juga terintegrasi secara rutin di masyarakat, seperti di lingkungan tempat tinggal dalam wadah desa/kelurahan siaga aktif. Tujuan Posbindu PTM adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor risiko PTM. Sasaran utama kegiatan adalah kelompok masyarakat sehat, berisiko dan penyandang PTM berusia 15 tahun ke atas.

Dalam Gambar 2.38 terlihat bahwa upaya kesehatan masyarakat secara keseluruhan yang dilaksanakan di Provinsi Papua berada dalam kategori paling rendah di Indonesia, dengan cakupan Posbindu PTM hanya sebesar 1,90% dari seluruh total desa/kampung yang ada. Kondisi inilah yang menyebabkan Provinsi Papua selama ini sangat sulit untuk mendeteksi dini dengan cepat dan efektif mengenai potensi risiko penyakit tidak menular di seluruh kampung.

Gambar 2.38 Cakupan Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Posbindu TM di Indonesia sampai dengan Tahun 2017 (%)

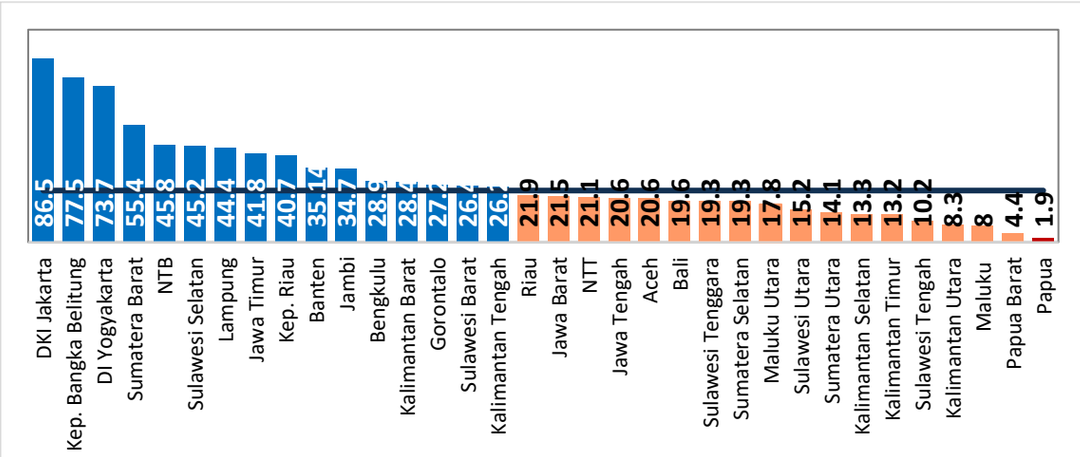

Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2018 (data diolah)

2.1.3.5. Fokus Ketenagakerjaan

Apabila dilihat sepanjang tahun 2013-2017, jumlah angkatan kerja dan jumlah orang yang bekerja di provinsi Papua terlihat meningkat, kecuali tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk jumlah orang yang menganggur, dari tahun 2013-2017 jumlahnya mengalami fluktuasi. Tercatat jumlah angkatan kerja 1.688.876 jiwa pada tahun 2013 dan orang yang bekerja berjumlah 1.634.332 jiwa, sedangkan pengangguran berjumlah 54.544 jiwa.

Tabel 2.13 Indikator Ketenagakerjaan di Provinsi Papua Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas (jiwa)	2.165.070	2.129.404	2.189.230	2.245.462	2.291.111
Angkatan Kerja (jiwa)	1.688.876	1.675.113	1.741.945	1.722.162	1,762,841
1. Bekerja	1.634.332	1.617.437	1.672.480	1.644.485	1,699,071
2. Penganggur	54.544	57.676	69.465	57.677	63,770
Bukan Angkatan Kerja (jiwa)	476.194	454.291	447.285	523.300	528,270
Laju Pertumbuhan yang Bekerja (%)	6,96	-1,03	3,40	-1,67	3.32

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Daya Serap Tenaga Kerja (%)	96,77	96,56	96,01	95,49	96.38
Rasio Orang Bekerja dengan Penduduk +15 (jiwa)	75,49	75,96	76,40	74,13	74,16
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	78,01	78,67	79,57	74,13	77.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT (%)	3,23	3,44	3,99	3,35	3.96

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018

Perkembangan jumlah penduduk yang bekerja cenderung meningkat fluktuatif selama tahun 2013-2017. Dimana untuk TPAK di Provinsi Papua dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tersebut cenderung berkembang stabil dengan rata-rata mencapai 77,53%. Tahun 2013, TPAK provinsi Papua tercatat sebesar 78,01%, yang kemudian naik di tahun 2014 kemudian meningkat di tahun 2015, kemudian turun kembali di tahun 2016 menjadi 74,13%. Sampai dengan tahun 2017 kondisi TPAK Provinsi Papua adalah sebesar 77.30%. Akibat penambahan penduduk usia 15 tahun ke atas yang lebih cepat dibandingkan penduduk yang bekerja, menyebabkan penyerapan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam lapangan kerja semakin menurun yaitu dari 75,49% di tahun 2013 menjadi 74,16% pada tahun 2017. Dengan kata lain mengalami penurunan sekitar -0,33% per tahun selama periode 2013-2017. Dari sisi pengangguran, terlihat bahwa jumlah orang yang menganggur di provinsi Papua dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2013-2017) berfluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan, dengan rata-rata mencapai 60.626 orang setiap tahun. Demikian pula dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami flukstuasi dan cenderung meningkat, dengan rata-rata mencapai 3,59 % pertahun selama dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2013-2017).

Jika diperhatikan menurut kabupaten/kota terlihat tingkat pengangguran tertinggi terjadi di Kota Jayapura yakni sebesar 13,39% di tahun 2017, dengan kontribusinya yang terbesar bila diamati menurut jenis kelamin adalah penduduk yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 13,82% yang menganggur, sedangkan penduduk laki-laki sebanyak 11,72%. Perhatikan Gambar 2.39 di bawah.

Sementara wilayah kabupaten dengan tingkat penganggurannya terendah adalah Asmat, hanya sebesar 0,30% pada tahun 2017.

Walaupun pengangguran terlihat sangat rendah, yang menandakan jumlah orang bekerja lebih banyak, namun bukan berarti hal tersebut mampu mengakselerasi penurunan kemiskinan secara signifikan di Provinsi Papua.

Gambar 2.39 Tingkat Pengangguran di Provinsi Papua Tahun 2017 (%)

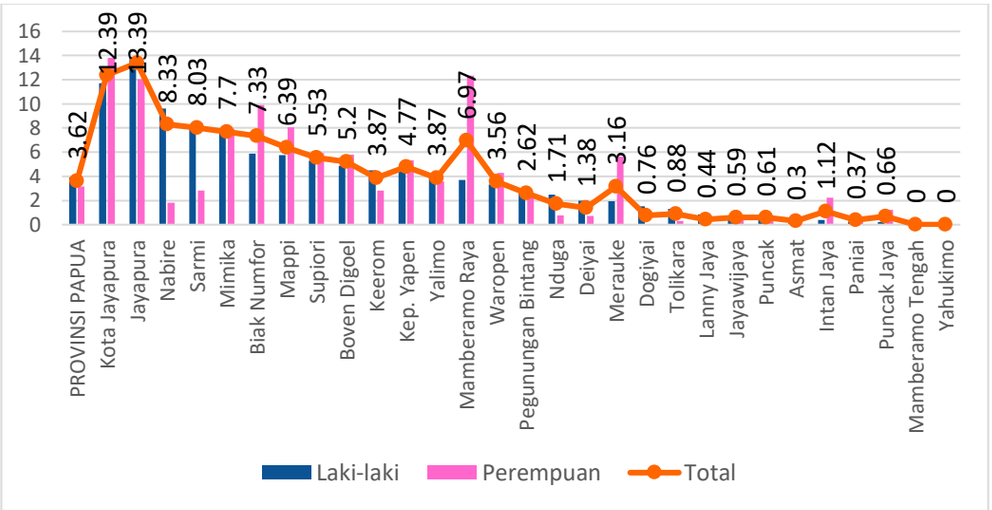

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Dalam 2.40 berikutnya juga terpetakan bahwa daerah-daerah yang rendah tingkat penganggurannnya, seperti di Kawasan La Pago dan Mee Pago ternyata merupakan daerah yang paling banyak kantong kemiskinannya, dengan persentase kemiskinan rata-rata di atas 35%. Kondisi ini menggambarkan belum nampak korelasi yang signifikan antara pengangguran yang rendah dengan kemiskinan yang rendah juga. Hal ini disebabkan tenaga kerja yang ada ternyata lebih banyak terserap di sektor pertanian tradisional dimana tidak membutuhkan tingkat keahlian dan pendidikan yang tinggi, sehingga nilai upah yang diterima tenaga kerja sangat rendah dan belum maksimal mendorong perubahan pendapatan pada rumah tangga di sektor pertanian untuk hidup di atas garis kemiskinan.

Apabila mengamati struktur tenaga kerja menurut sektor di Provinsi Papua, (lihat Gambar 2.40), diketahui bahwa jumlah orang yang bekerja pada sektor pertanian mendominasi struktur tenaga kerja dengan proporsi yang cenderung menurun sepanjang tahun 2013-2017, yaitu rata-rata pertahun mencapai 70,34%. Adapun sektor industri rata-rata mencapai 4,20%, dan sektor jasa-jasa rata-rata mencapai 24,53%.

Gambar 2.40 Komposisi dan Struktur Tenaga Kerja Menurut Sektor

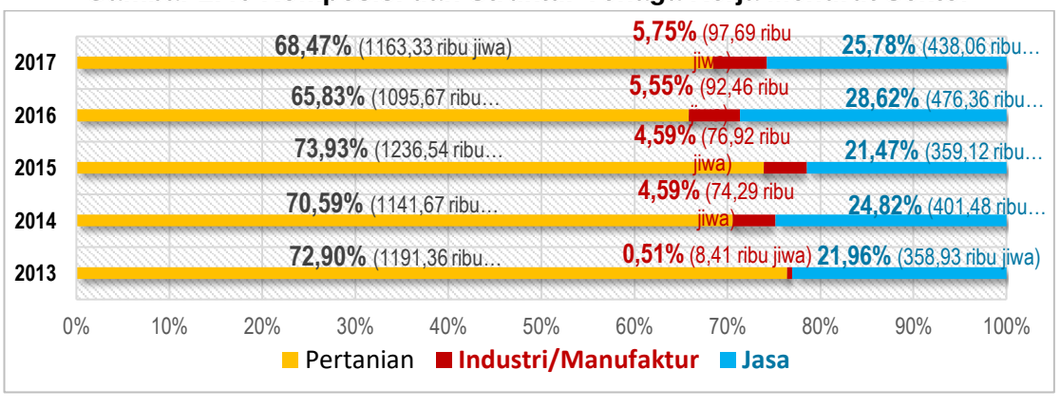

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Peranan tenaga kerja untuk mengatasi kemiskinan sepertinya masih belum optimal. Hal ini disebabkan tenaga kerja yang lebih banyak terserap dalam lapangan kerja merupakan tenaga kerja yang berpendidikan rendah, sehingga *transfer payment* yang dihasilkan belum maksimal mendorong pendapatannya di atas garis kemiskinan. Kondisi faktual tahun 2013-2017 dapat dijadikan sebagai contoh bagaimana selama ini komposisi tenaga kerja di Provinsi Papua lebih dominan pada tenaga kerja yang berpendidikan rendah. Perhatikan Gambar 2.41 dibawah ini.

Gambar 2.41 Struktur Tenaga Kerja Menurut Pendidikan (%)

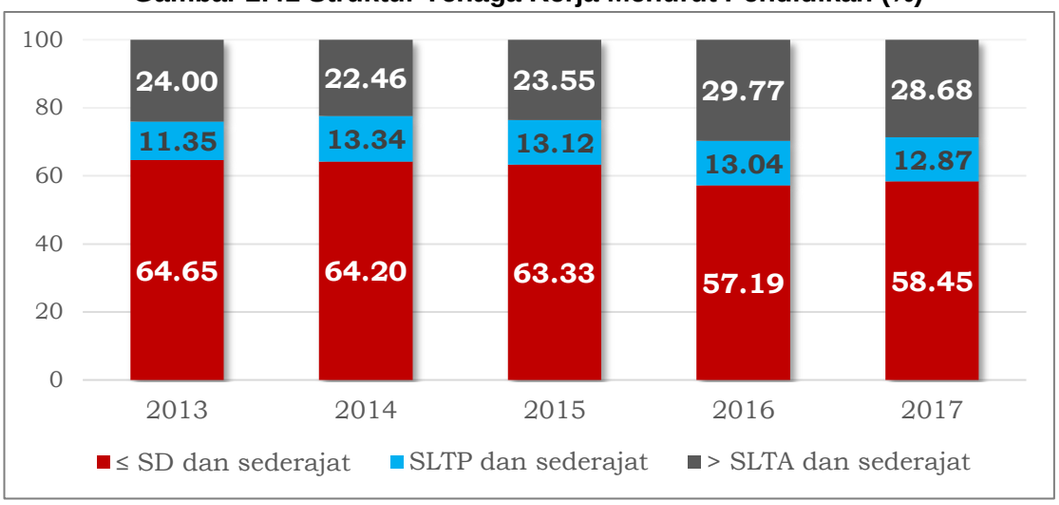

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2018 (diolah)

Berdasarkan Gambar 2.41 diketahui bahwa selama tahun 2013-2017 profil tenaga kerja di Provinsi Papua lebih dominan yang berpendidikan rendah yaitu SD/sederajad dan atau di bawah SD/sederajad, kurang lebih setiap tahunnya sekitar 61,56% dari total tenaga kerja. Sementara yang berpendidikan SLTP/sederajad sebesar

12,79% per tahun, dan yang berpendidikan SLTA/ sederajad/ diatasnya sekitar 25,69% per tahun untuk periode yang sama.

Keadaan tenaga kerja menurut lapangan usaha dan pendidikan berikut ini juga memberikan gambaran bahwa peranan sektor pertanian belum memadai untuk mengatasi kemiskinan di Provinsi Papua. Meskipun sektor pertanian mampu menyerap lapangan kerja paling tinggi, namun tenaga kerja yang paling banyak diserap adalah tenaga kerja yang berpendidikan rendah (SD/sederajad dan tidak sekolah), sekitar 77,15% dari total tenaga kerja di sektor tersebut. (lihat Gambar 2.42)

Gambar 2.42 Struktur Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha dan Tingkat Pendidikan di Provinsi Papua Tahun 2017 (%)

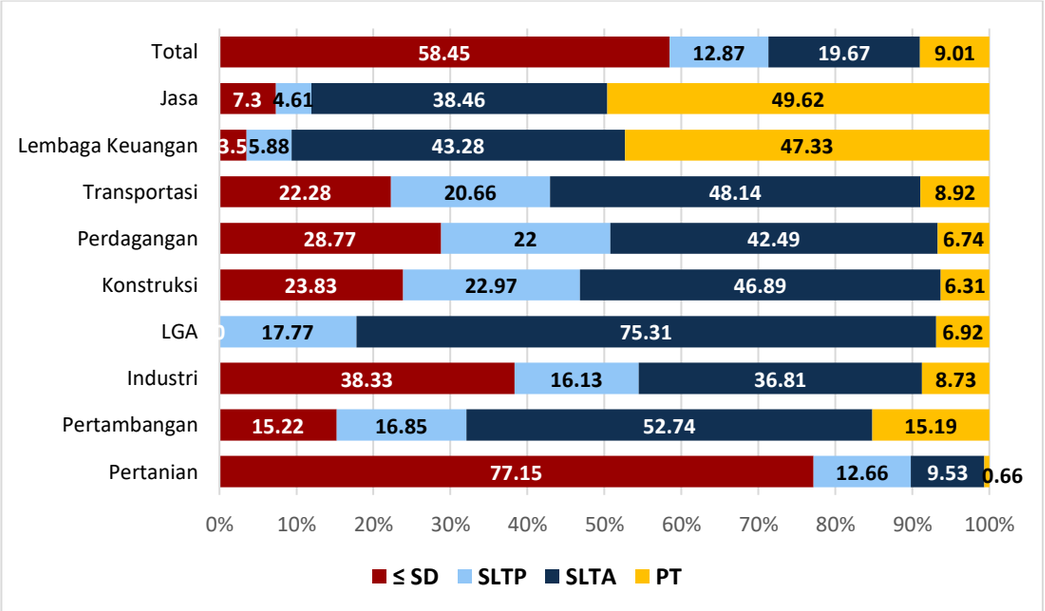

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2018 (diolah)

Termasuk juga di sektor industri, proporsi yang berpendidikan rendah tampak dominan, kurang lebih 38,33%. Tenaga kerja yang berpendidikan SLTA dan PT lebih banyak tersebar di sektor lembaga keuangan dan jasa sekitar 44,67%. Padahal kedua sektor tersebut kurang mampu menyerap lapangan kerja selama ini di Provinsi Papua.

Akibat tenaga kerja yang terserap lebih dominan yang berpendidikan rendah, akhirnya produktifitas regional yang dihasilkan Provinsi Papua selama ini terindikasi rendah (lihat Gambar 2.43). Rata-rata produktifitas tenaga kerja untuk menghasilkan PDRB di Provinsi Papua selama tahun 2013-2017 hanya mencapai 79,53 juta rupiah per tenaga kerja per tahun. Namun demikian cenderung

produktifitas tenaga kerja mengalami kenaikan setiap tahun, sekitar 5,18% per tahun.

Gambar 2.43 Produktifitas Regional (Juta Rupiah Per Tenaga Kerja)

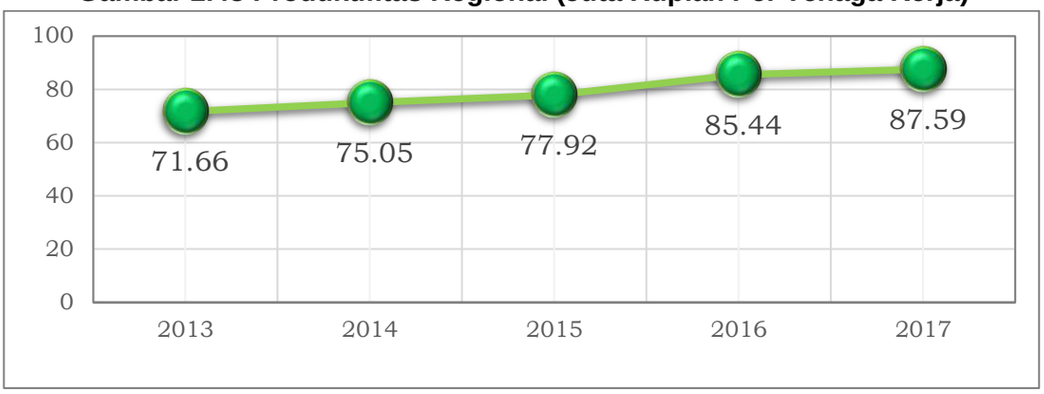

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2018 (diolah)

Untuk meningkatkan produktifitas tenaga regional penting sekali dimasa mendatang mengupayakan peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, seperti pengembangan pendidikan vokasional untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian penduduk pada bidang pertanian, industri dan pertambangan. Serta penguatan pelatihan yang inovatif agar tenaga kerja Papua mampu mentransformasi teknologi untuk menghadapi revolusi industri ke-4 yang ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, editing genetik, maraknya perkembangan neuroteknologi dan internet.

2.1.3.6. Fokus Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi

Dalam perspektif kesejahteraan sosial dan ekonomi, beberapa indikator yang penting dianalisis antara lain perkembangan keluarga sejahtera, tingkat kebahagiaan, ketahanan pangan, kemandirian fiskal dan kontribusi sektoral terhadap PDRB di Provinsi Papua.

a. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*) secara minimal, seperti kebutuhan akan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan KB. Sedangkan Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya. Adapun untuk Keluarga Sejahtera II adalah keluarga yang disamping telah dapat memenuhi

kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Pada keluarga sejahtera II ini kebutuhan fisik dan sosial psikologis telah terpenuhi namun kebutuhan untuk pengembangan belum terpenuhi.

Gambar 2.44 Kondisi Demografi Keluarga di Provinsi Papua Tahun 2017

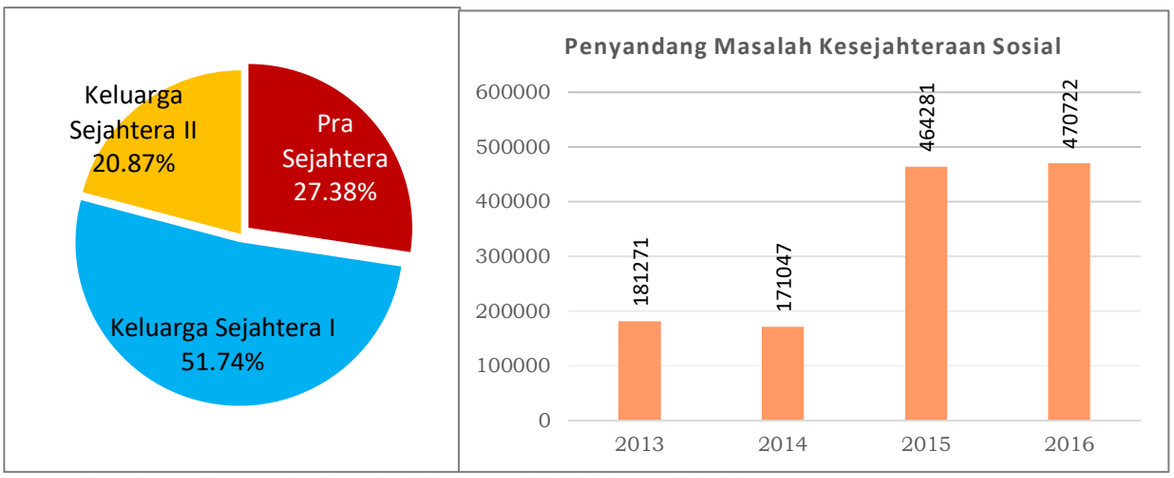

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Berdasarkan pentahapan keluarga sejahtera, kondisi demografi Provinsi Papua cenderung lebih banyak pada Keluarga Sejahtera I dan Pra Sejahtera, masing-masing sebesar 51,74% dan 27,38% dari total keluarga yang tercatat sebanyak 182.514 KK pada tahun 2017 (lihat 0). Fenomena ini menandakan meskipun sebagian besar keluarga di Provinsi Papua sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi kebutuhan sosial psikologinya masih belum maksimal terutama untuk pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, dan interaksi dengan lingkungan. Dimana pada akhirnya hal ini dapat berdampak terhadap meningkatnya PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).

b. Indeks Kebahagiaan

Diantara tahun 2014 dan 2017, terindikadikasi hampir seluruh wilayah provinsi mengalami kenaikan Indeks Kebahagiaan, terkecuali untuk Provinsi Jambi terjadi penurunan (lihat 0). Meskipun Provinsi Papua memiliki nilai Indeks Kebahagian paling rendah di Indonesia, akan tetapi peningkatannya di tahun 2017 paling tinggi yakni 6,55 poin dibandingkan tahun 2014. Tercatat Indeks Kebahagiaan Papua pada tahun 2014 sebesar 60.97 poin, dan tahun 2017 sebesar 67.52 poin. Fakta ini menunjukan bahwa Papua paling berhasil

meningkatkan kebahagiaan masyarakatnya dibandingkan wilayah provinsi lain.

Gambar 2.45 Indeks Kebahagiaan Menurut Provinsi Tahun 2014 dan 2017

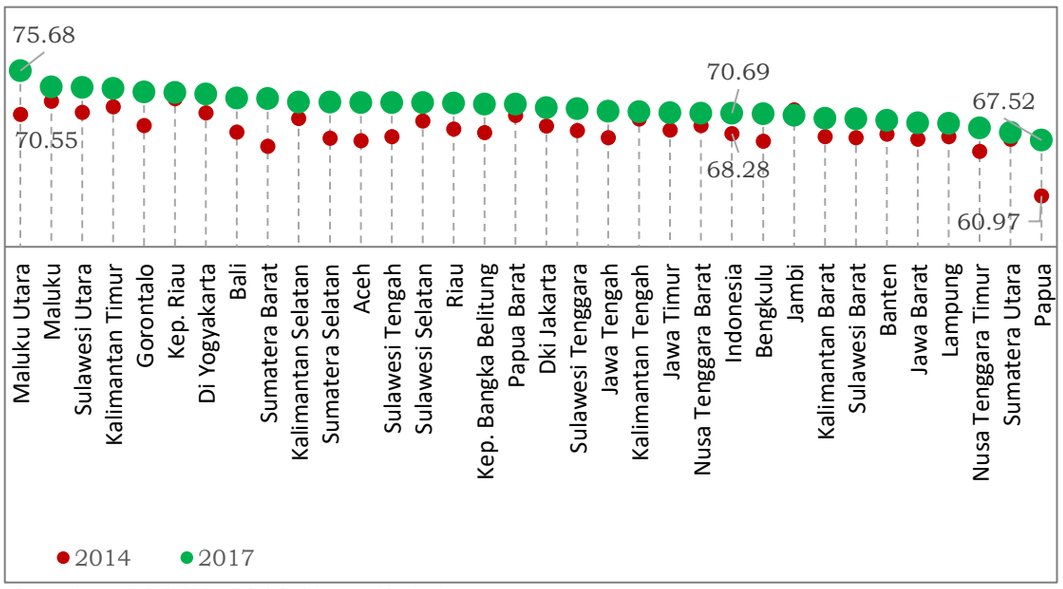

Sumber: BPS RI, 2018 (data diolah)

Merujuk kepada hasil perhitungan BPS Papua (2018) teridentifikasi faktor yang paling besar kontribusinya terhadap Indeks Kebahagiaan adalah Kepuasan terhadap Kondisi Keamanan, dengan nilainya di tahun 2017 sebesar 75,79 poin. Sementara yang terendah adalah faktor Pendidikan dan Keterampilan, dengan nilai sub indeksnya sebesar 53,54 poin. Kedua hal ini menandaskan bahwa diantara tahun 2014 dan 2017 cenderung masyarakat merasa sangat puas dengan kondisi keamaanan yang diwujudkan oleh pemerintah selama itu, namun untuk tingkat pendidikan tampaknya masih jauh dari harapan masyarakat sehingga penilaian terhadap elemen tersebut menjadi sangat rendah (lihat Gambar 2.45).

Apabila diperhatikan seksama pada perbedaan nilai sub indeks pembentuk Indeks Kebahagiaan diantara tahun 2014 dan 2017 terlihat bahwa elemen-elemen keharmonisan keluarga, kondisi keamanan, serta keadaan lingkungan semuanya meningkat lebih tinggi dibandingkan elemen pendidikan, kesehatan dan pendapatan rumah tangga (perhatikan Gambar 2.46).

Gambar 2.46 Perbedaan Nilai Sub Indeks Terpenting Pembentuk Indeks Kebahagiaan di Provinsi Papua Antara Tahun 2014 dan 2017

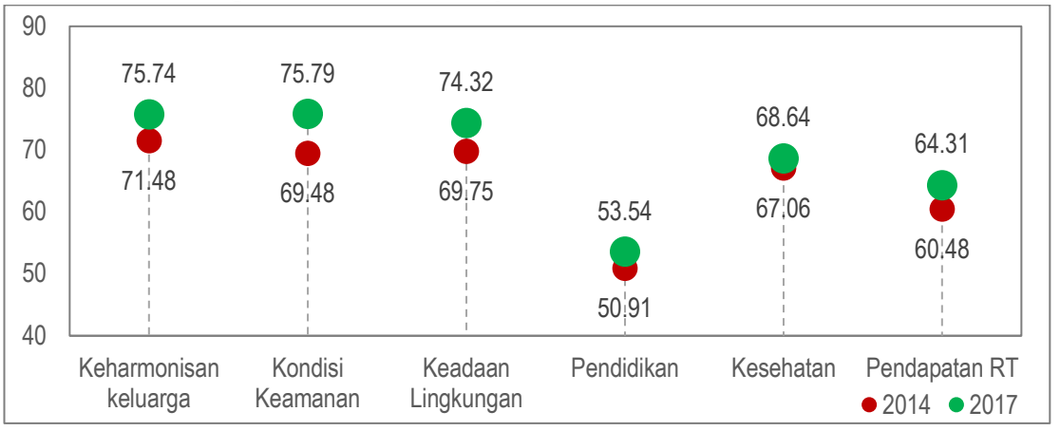

Sumber: BPS Papua, 2018 (data diolah)

Paling tinggi perubahannya adalah sub dimensi Kondisi Keamanan yang naik sekitar 6,31 poin, sedangkan yang terendah sub dimensi kesehatan hanya sebesar 1,58 poin. Dinamika ini kembali menunjukan bahwa masyarakat menilai faktor keamanan di Provinsi Papua yang paling baik dan memuaskan perubahannya, termasuk untuk faktor keluarga dan lingkungan. Sedangkan untuk pendidikan, kesehatan dan pendapatan rumah tangga, walaupun ada peningkatan di tahun 2017 namun kurang begitu memuaskan, sehingga ketiganya dinilai masih tetap rendah dalam komponen Indeks Kebahagiaan.

c. Ketahanan Pangan

(1) Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan atau *Desireable Dietary Pattern* adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan atau kontribusi energi dan kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dan suatu pola ketersediaan atau pola konsumsi pangan. Pola Pangan Harapan berguna sebagai instrumen sederhana menilai situasi ketersediaan dan konsumsi pangan berupa jumlah dan komposisi menurut jenis pangan secara agregat. Disamping itu juga berguna sebagai basis untuk penghitungan skor Pola Pangan Harapan yang digunakan sebagai indikator mutu gizi pangan dan keragaman konsumsi pangan baik pada tingkat ketersediaan maupun tingkat konsumsi (lihat Tabel 2.14).

Sumber energi yang terbesar dikonsumsi penduduk di Papua ternyata paling banyak berasal dari bahan pangan padi-padian, yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Diperkirakan

komoditi padi-padian memberi kontribusi sekitar 32,66% per tahun terhadap pemenuhan kebutuhan energi penduduk Papua sepanjang tahun 2013-2017. Sementara dari umbi-umbian sebesar 29,29% per tahun, serta dari minyak dan lemak sebesar 11,46% per tahun. Secara keseluruhan terlihat ketiga kelompok bahan pangan ini (padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak) menjadi sumber energi yang terbesar bagi penduduk Papua, dengan kontribusinya mencapai 73,41% per tahun. Sisanya, dipenuhi dari konsumsi bahan pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayuran dan buah, dan lain-lainnya.

Tabel 2.14 Pemenuhan Konsumsi Energi dan Protein Berdasarkan Kelompok Bahan Pangan di Provinsi Papua Tahun 2013-2017

Kelompok Bahan Pangan	Konsumsi Enengi (kkal/kap/hari)					Konsumsi Protein (gram protein/kap/hari)				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Padi-padian	764	747	901	368	993	17.7	17.4	20.5	19.8	22.7
Umbi-umbian	589	662	816	615	720	4.3	5.4	7	7.1	6.1
Pangan Hewani	172	187	192	1S5	227	16.7	17.5	17.5	16.6	20
Minyak dan Lemak	228	246	277	290	291	0.1	0.1	0	0	0
Buah/biji berminyak	28	27	34	21	18	0.4	0.4	0,4	0.3	0.3
Kacang-kacangan	59	46	50	49	49	5.1	4	5	5.1	5.1
Gula	98	76	117	101	123	0	0	0	0	0
Sayuran dan buah	123	120	100	96	96	6.3	6.1	4.4	4.4	4.3
Lain-lain	17	17	23	23	26	1	0.8	0.9	1	1.1
Total	2078	2130	2512	2448	2448	51.8	51.7	55.7	54.3	59.7

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kementan RI, 2017 (data diolah)

Kondisi yang sama juga terlihat untuk pemenuhan kebutuhan protein. Bahan pangan padi-padian masih paling besar proporsinya. Menyusul kemudian yang berasal dari pangan hewani. Selama periode 2013-2017, kedua kelompok bahan pangan tersebut memberi kontribusi terhadap pemenuhan protein penduduk di Provinsi Papua sekitar 68,14% per tahun. Sisanya terpenuhi dari sumber bahan pangan lainnya, seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, serta sayur dan buahan.

Ada indikasi telah terjadi pergeseran pola pangan pokok penduduk Papua selama ini, sehingga padi-padian sekarang menjadi sumber energi dan protein utama. Padahal produksi lokal padi di Provinsi Papua sampai sekarang masih sangat rendah dan tidak

mampu mencukupi konsumsi beras lokal, sehingga diperlukan impor beras dalam jumlah yang sangat banyak setiap tahunnya. Hal ini akhirnya membuat Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi lebih rendah dibandingkan skor nasional secara keseluruhan.

Gambar 2.47 Skor Pola Pangan Harapan di Indonesia dan Provinsi Papua

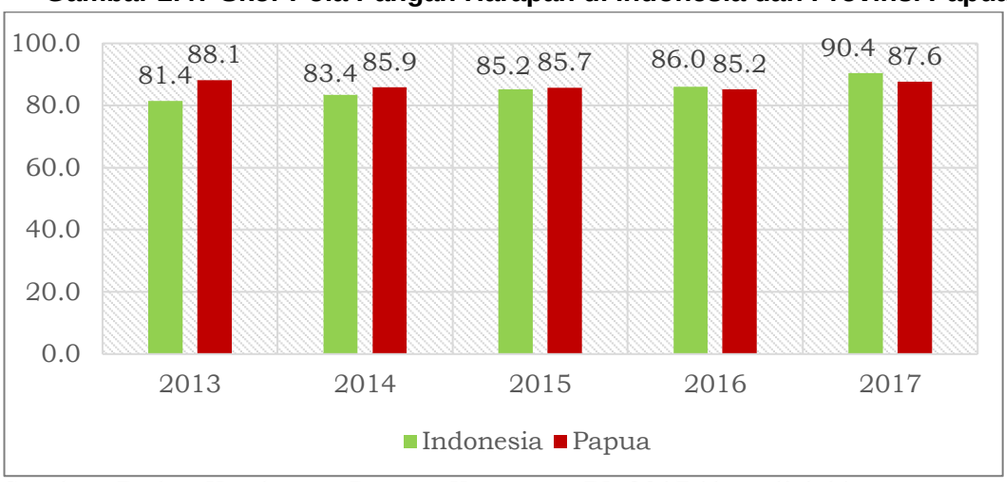

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kementan RI, 2017 (data diolah)

Seperti yang disajikan dalam Gambar 2.47 terlihat jelas Skor PPH Provinsi Papua mengalami penurunan selama periode 2013-2017, dan dibawah skor PPH nasional. Pada tahun 2017, skor PPH Provinsi Papua hanya sebesar 87,60%, sementara skor PPH nasional sebesar 90,40%. Perlu upaya yang lebih keras bagi Provinsi Papua untuk mencapai skor PPH yang ideal sebesar 100%.

(2) Penanganan Daerah Rawan Pangan

Dapat dikatakan Provinsi Papua cukup berhasil menangani daerah rawan pangan selama ini. Seperti yang divisualisasikan dalam 00, tampak jelas bahwa pada tahun 2013 dan 2014 jumlah daerah kabupaten yang terindikasi rawan pangan mencapai lebih dari 20 kabupaten. Begitu masuk di tahun 2015 sampai dengan 2016 jumlah daerah rawan pangan akhirnya dapat ditekan menjadi 13 kabupaten.

Begitu juga dengan jumlah penduduk yang rawan pangan, cenderung mengalami penurunan antara tahun 2013-2016. Seperti yang disajikan dalam Gambar 2.48, pada tahun 2013 jumlah penduduk sangat rawan/rawan pangan di Papua masih sebesar 70,67%%, kemudian menurun terus setiap tahun hingga pada tahun 2016 menjadi 59,96%. Berarti ada penurunan sekitar 3,57% per tahunnya.

Gambar 2.48 Kondisi Ketahanan Pangan di Provinsi Papua

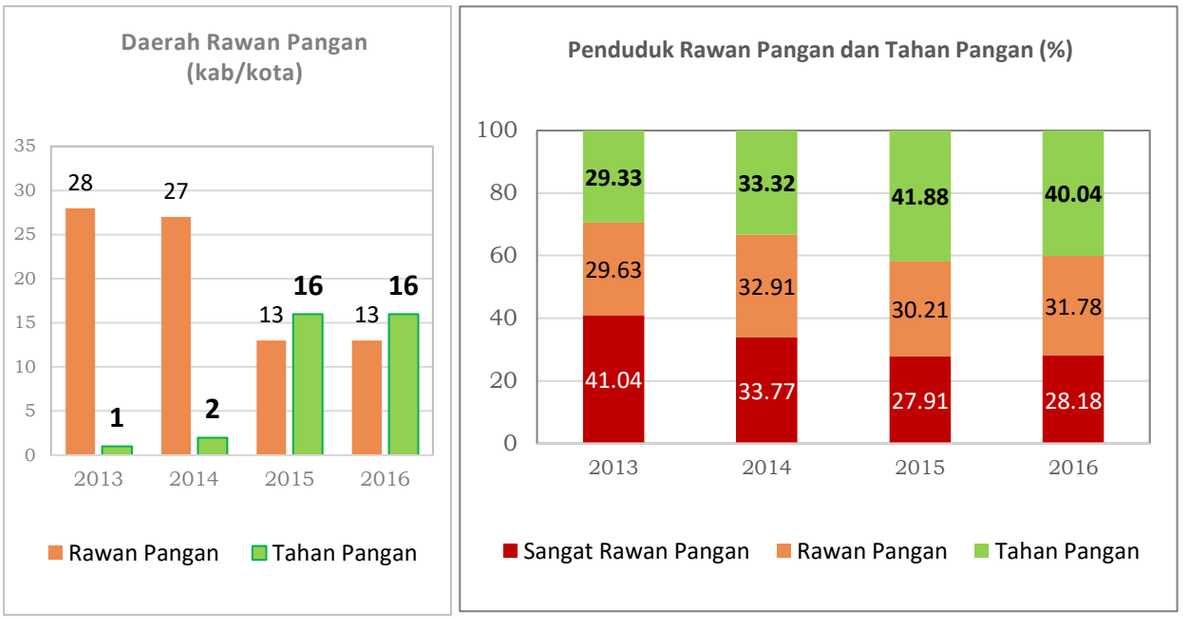

Sumber: Bappeda Papua, 2018 dan Badan Ketahanan Pangan Kementan RI, 2017 (diolah)

Meskipun ada indikasi keberhasilan dalam menekan jumlah daerah dan penduduk yang rawan/sangat rawan pangan, akan tetapi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang menimpa Kabupaten Asmat dan Pegunungan Bintang di awal tahun 2018 patut menjadi perhatian lebih serius dimasa mendatang, untuk mempercepat penuntasan 100% daerah-daerah yang teridentifikasi rawan pangan, oleh karena kerawanan pangan tersebut sangat berkaitan erat dengan kejadian gizi buruk, dan wabah penyakit menular. Terdapat 3 (tiga) elemen dasar yang penting untuk dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan peningkatan ketahanan pangan yaitu (1) konsumsi pangan, (2) produksi pangan, dan (3) distribusi pangan. Ketiganya harus dilakukan secara komprehensif dan holistik, integratif antarsektor, dan spasial.

(3) Cadangan Pangan

Cadangan pangan di Provinsi Papua berupa beras yang tersimpan di Bulog cenderung mengalami peningkatan yang sangat tajam sepanjang tahun 2013-2017. Meskipun sempat mengalami penurunan -10,11% di tahun 2014 bila dibandingkan tahun 2013, namun secara keseluruhan cadangan pangan Provinsi Papua terlihat meningkat rata-rata 45,00% per tahun (lihat Gambar 2.49).

Gambar 2.49 Ketersediaan Cadangan Pangan di Provinsi Papua (ribu ton)

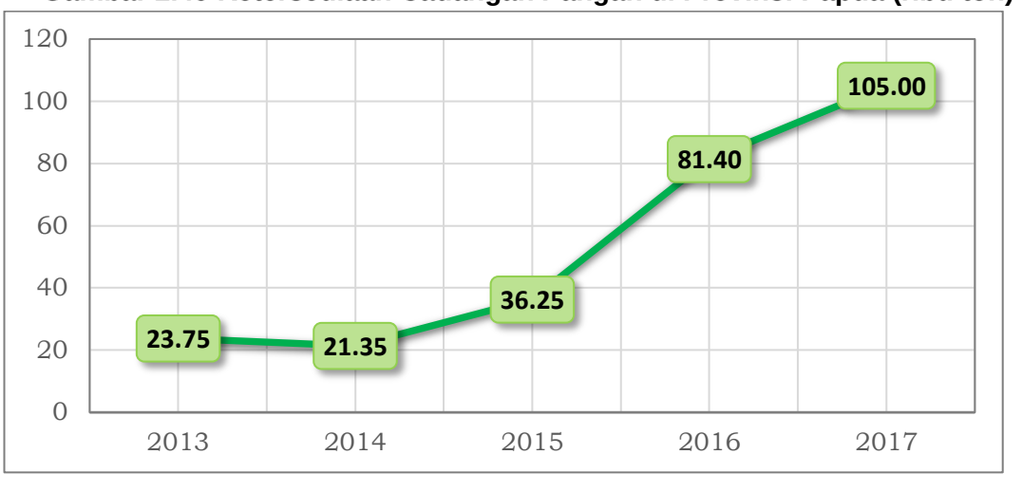

Sumber: Bappeda Papua dan Kementan RI, 2018 (data diolah)

Berdasarkan perkembangan cadangan pangan yang tersedia sepanjang tahun 2013-2017, dapat dikatakan Provinsi Papua selama ini tidak mengalami permasalahan dalam mengantisipasi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya beras. Tetapi untuk penyaluran kontrak beras ditemukan ada masalah, oleh karena umumnya selalu melewati tahun kontrak, yang akhirnya memberikan tambahan beban pemeliharaan beras pada Perum BULOG. Kemudian, terjadinya perubahan Harga Pembelian Pemerintah Beras pada tahun berjalan juga merupakan masalah bagi BKP Provinsi Papua, sehingga perlu penyesuaian harga atau pemotongan kuantum. Agar semua permasalahan ini tidak lagi menjadi penghambat dalam penyediaan stok pangan dimasa mendatang, perlu dibuatkan strategi kebijakan anggaran.

d. Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan dalam Perekonomian

Secara agregat dalam komposisi PDRB Provinsi Papua, sektor pertanian terbagi atas 5 sub sektor mencakup sub sektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian di Provinsi Papua sepanjang tahun 2013-2017 terlihat lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua. Rata-rata pertumbuhan sektor pertanian sekitar 3,80% per tahun, yang dipacu oleh pertumbuhan sub sektor peternakan dan perkebunan, masing-masing mengalami percepatan yang tinggi di atas sektor pertanian secara menyeluruh yakni sebesar 6,17% untuk sektor

perkebunan dan 7,05% per tahun pada sektor peternakan selama tahun 2013-2017 (lihat Tabel 2.15).

Tabel 2.15 Komposisi PDRB Sektor Pertanian dan Perkebunan Menurut Harga Konstan 2010 Tahun 2013-2017 (milyar rupiah)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan(%)
Tanaman Pangan	3,119.76	3,316.05	3,420.24	3,324.63	3,371.14	1.96
Tanaman Hortikultura	1,164.97	1,186.57	1,237.36	1,287.18	1,360.78	3.96
Tanaman Perkebunan	942.03	1,022.16	J072.03	1,130.43	1,197.14	6.17
Peternakan	939.76	1,032.78	1,103.78	1,167.66	1,234.08	7.05
Jasa Pertanian dan Perburuan	109.31	111.35	115.75	117.01	121.37	2.65
Total Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	6,275.83	6,668.91	5,877.13	7,026.91	7,284.51	3.80
PDRB	117,118.82	121,391.23	130,311.60	142,221.09	148,823.63	6.17

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Meskipun pertumbuhan sub sektor tanaman pangan lebih lambat, namun kontribusinya terhadap perekonomian wilayah terlihat lebih baik dibandingkan sub sektor lainnya. Seperti yang ditampilkan dalam Gambar 2.50, kontribusi tanaman pangan kurang lebih mencapai 2,52% per tahun, jauh di atas sub sektor jasa pertanian dan perburuan yang tercatat paling rendah untuk kelompok sektor ini yakni sebesar 0,09% pertahun.

Gambar 2.50 Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)

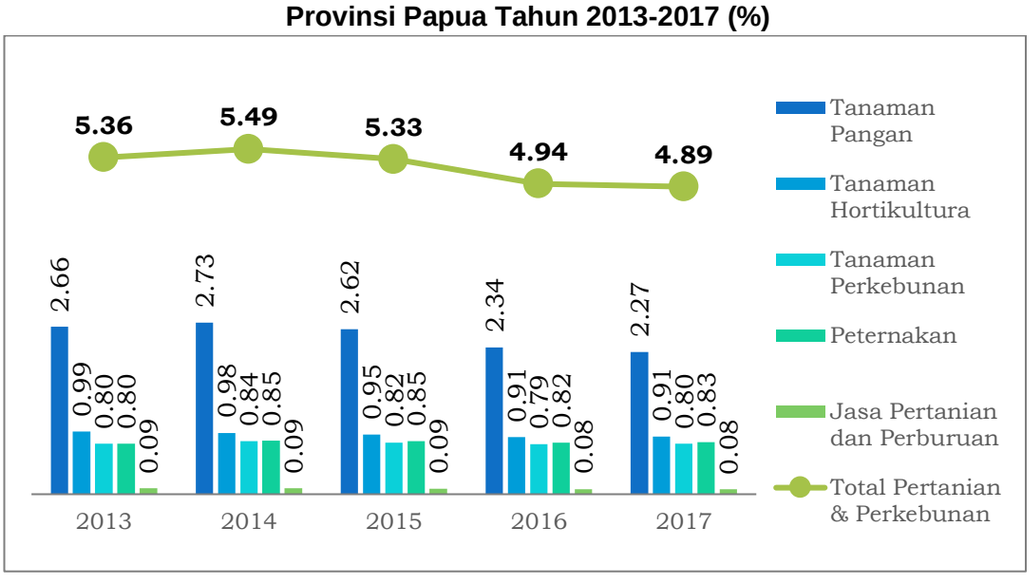

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Apabila diamati secara keseluruhan, peranan sektor pertanian dan perkebunan di Provinsi Papua rata-rata hanya mencapai 5,40% per tahun untuk periode 2013-2017, yang cenderung menurun setiap tahunnya dikarenakan adanya redistribusi nilai tambah ke sektor kontruksi yang mulai menonjol peranannya semenjak tahun 2013. Walaupun demikian, perubahan struktur ekonomi belum terjadi selama ini, kontribusi sektor pertambangan masih dominan.

e. Kontribusi sektor kehutanan terhadap Perekonomian Wilayah

Dalam komponen PDRB, sektor kehutanan meliputi kegiatan-kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk juga jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa {fee) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak. Perkembangan nilai PDRB sektor kehutanan, beserta laju pertumbuhan dan kontribusinya terhadap perekonomian wilayah (lihat Gambar 2.51).

Gambar 2.51 Nilai PDRB, Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)

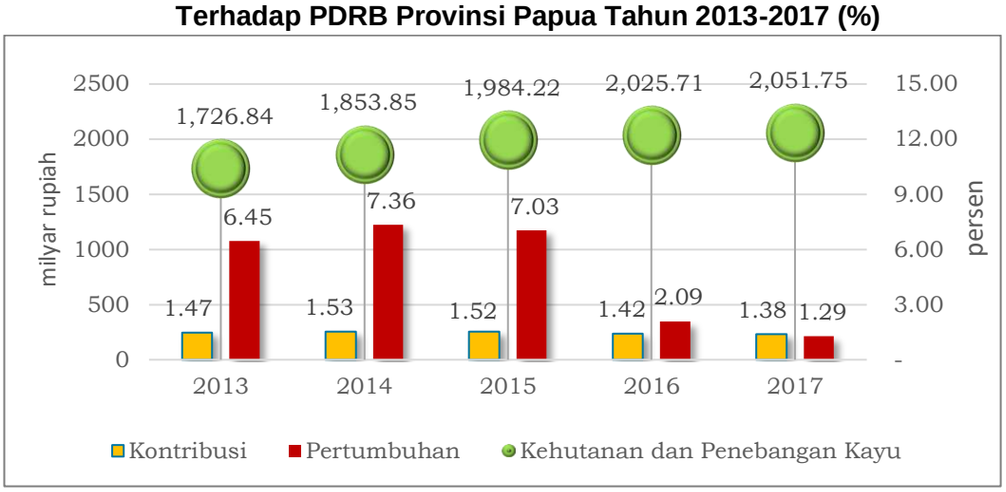

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Ada kecenderungan nilai PDRB sektor kehutanan terus mengalami kenaikan sepanjang tahun 2013-2017, namun dengan

pertumbuhan yang melambat selama tahun 2015-2017, sehingga secara keseluruhan laju kenaikan PDRB sektor kehutanan hanya mencapai 4,84% per tahun. Kondisi ini akhirnya menyebabkan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Provinsi Papua mengalami penurunan yaitu dari 1,47% di tahun 2013 menjadi 1,38% pada tahun 2017, atau rata-rata turun sebesar 0,10% per tahun.

f. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap Perekonomian Wilayah

Sejak periode 1970'an, yaitu ketika mulai diproduksinya tembaga di Kabupaten Mimika oleh PT. Freeport Indonesia (anak perusahaan Freeport-McMoRan Inc), komoditi tembaga mengalami masa kejayaan, sehingga dapat menempatkan nilai tambah sektor pertambangan nonmigas menguasai PDRB Provinsi Papua kurang lebih 60% per tahun. Seiring dengan berkembangnya pembangunan sektor-sektor ekonomi lainnya di Papua, secara perlahan kontribusi sektor pertambangan mengalami penurunan, namun tetap terbesar dan mendominasi struktur perekonomian wilayah.

Gambar 2.52 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)

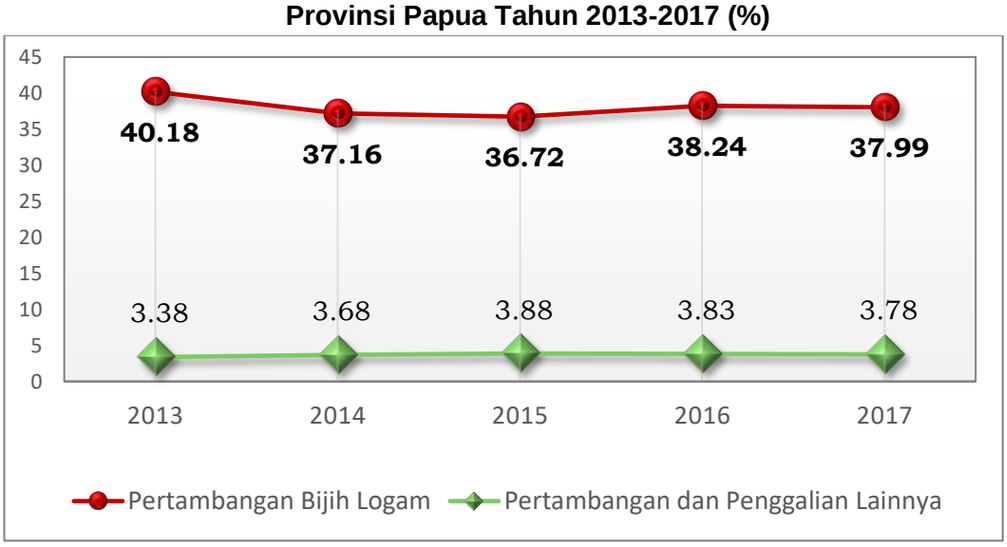

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Porsi sektor pertambangan dalam PDRB wilayah sangat dominan, misalkan untuk periode 2013-2017 rata-rata per tahun bisa mencapai 38,06% kontribusinya, dan berada jauh di atas kontribusi sektor industri manufaktor yang masih dibawah 2% per tahun, atau sektor kontruksi sekitar 10,64% per tahun. Keberadaan sektor

pertambangan yang sangat dominan ini dapat dimanfaatkan guna lebih mensejahterakan masyarakat di wilayah Papua secara keseluruhan, yakni dengan cara meningkatkan potensi sektor pertambangan untuk menghasilkan *trickle down effect* bagi wilayah lain terutama pada Kabupaten Paniai, Intan Jaya dan Puncak Jaya yang terindikasi paling banyak penduduk miskinnya, dan *backward linkage effect* untuk sektor ekonomi lain seperti sektor pertanian yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi namun rendah kontribusinya terhadap PDRB.

g. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Wilayah

Pariwisata bukan merupakan sektor yang berdiri sendiri, tetapi banyak terkait dengan sektor lain. Untuk mengukur peranannya dalam perekonomian tidak bisa dilakukan secara langsung, tetapi melalui identifikasi semua sektor yang terkait dengan kegiatan ini. Beberapa sektor/sub sektor yang termuat dalam PDRB Provinsi Papua yang dapat diasumsikan terkait dengan kegiatan pariwisata antara lain : (1) Angkutan Darat; (2) Angkutan Laut; (3) Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan; (4) Angkutan Udara (5) Informasi dan Komunikasi; (6) Jasa Penunjang Angkutan; (7) Penyediaan Akomodasi; (8) Penyediaan Makan Minum; dan (9) Jasa Pariwisata Lainnya.

Tabel 2.16 Komposisi PDRB Sektor Pariwisata Provinsi Papua (milyar rupiah)

Sektor Terkait Pariwisata	2013	2014	2015	2016	2017
Angkutan Darat	1.811,96	1.995,86	2.197,09	2.375,71	2.513,90
Angkutan Laut	836,73	923,41	994,17	1.076,65	1.143,61
Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	68,93	74,92	80,51	85,99	91,32
Angkutan Udara	1.636,56	1.821,65	2.007,30	2.170,86	2.301,37
Jasa Penunjang Angkutan	164,03	180,26	196,38	211,49	224,58
Penyediaan Akomodasi	429,60	492,55	531,77	567,72	601,92
Penyediaan Makan Minum	303,51	332,73	355,55	377,59	400,48
Jasa Pariwisata Lainnya	44,30	48,27	51,12	54,27	57,35
Total PDRB Sektor Pariwisata	5.295,62	5.869,65	6.413,89	6.920,28	7.334,53

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Jika melihat komposisi nilai PDRB sektor pariwisata yang disajikan pada Tabel 2.16 di atas, terindikasi kelompok sektor

pariwisata yang paling berperan sekali dalam perekonomian wilayah Papua adalah sektor angkutan terutama angkutan laut, darat dan udara. Berikutnya sektor penyediaan akomodasi, dan sektor penyedia makan minum. Semua sektor ini paling dominan membentuk kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Provinsi Papua sekitar 4,81% per tahun selama periode 2014-2017 yang relatif naik sekitar 0,03% per tahun. Dimana sampai pada tahun 2017 kontribusi sektor pariwisata tercatat sebesar 4,93%. Adapun pertumbuhannya cenderung melambat, dimana pada tahun 2014 bisa mencapai 10,84%, namun pada tahun 2017 mengecil menjadi 5,99%.

Gambar 2.53 Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)

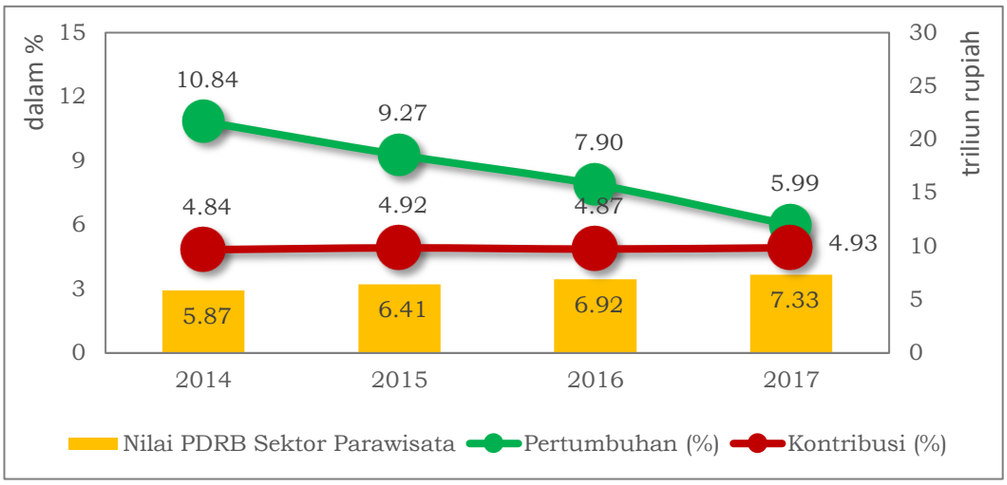

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Potensi sektor pariwisata di Provinsi Papua sangat berpeluang untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi bagi perekonomian wilayah. Hal ini tercermin dari keberadaan subyek pariwisatanya yang sangat potensial. Contohnya bila dilihat dari rata-rata Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel, Provinsi Papua masuk dalam urutan ke-6 terbesar di Indonesia yaitu 47,84% per tahun (BPS RI, 2018). Kemudian untuk *home stay* atau rata-rata lama tamu menginap, Papua urutan ke-3 terbesar setelah Bali dan Papua Barat, yakni rata-rata selama 2,7 hari (BPS RI, 2018). Dengan peluang seperti ini maka potensi ekowisata di Provinsi Papua sangatlah besar. Destinasi pariwisata perlu ditingkatkan baik itu dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitasnya. Dalam hal ini membangun infrastruktur pariwisata merupakan syarat mutlak yang diperlukan dalam pembangunan kepariwisataan di Provinsi Papua dengan tetap

memperhatikan peran serta kelembagaan adat dan lingkungan sosial budaya.

h. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap Perekonomian

Pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh nelayan rakyat maupun perusahaan perikanan (kecil dan menengah) selama ini berhasil menempatkan nilai tambah sektor perikanan pada posisi ke-5 terbesar dalam komposisi PDRB Provinsi Papua. Dimana selama tahun 2013-2017 tercatat rata-rata nilai PDRB sektor perikanan Provinsi Papua sekitar Rp. 6.194,00 milyar per tahun, dengan kecederungannya yang sangat berfluktuatif. Rata-rata pertumbuhan PDRB sektor perikanan kurang lebih 4,46% per tahun, dengan kontribusinya terhadap total PDRB Provinsi Papua mencapai 4,68% per tahun (lihat Gambar 2.54).

Gambar 2.54 Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perikanan dan Kelautan Terhadap PDRB Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)

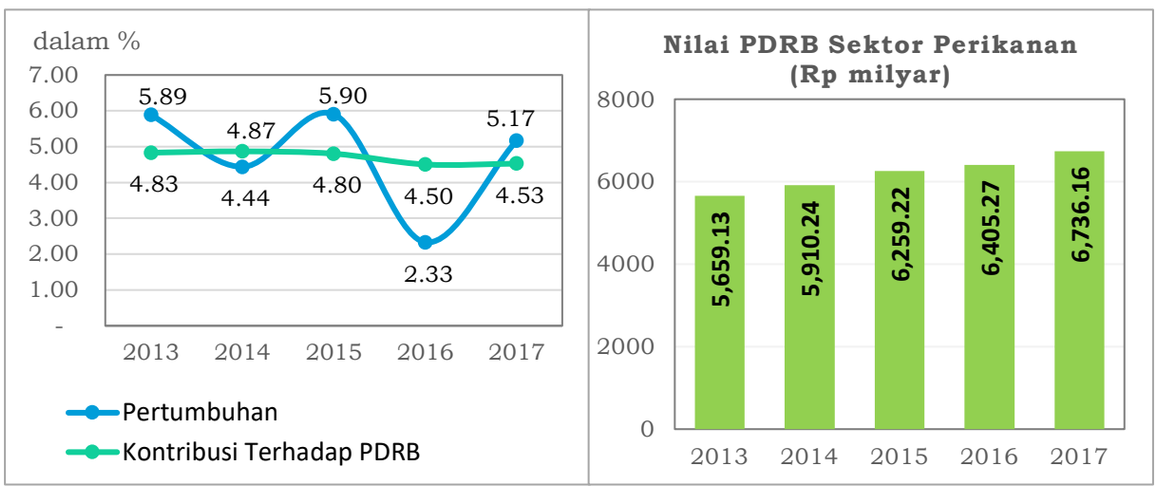

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Nilai tambah yang dihasilkan sektor perikanan ini masih berpeluang untuk ditingkatkan lebih besar setiap tahunnya di masa mendatang. Berdasarkan data yang ada, potensi perikanan yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha perikanan selama ini baru mencapai 15,30% dari potensi perikanan yang ada di WPP Papua. Beberapa kendala yang menjadi tantangan untuk mengoptimalisasi potensi perikanan laut di Provinsi Papua selama ini antara lain : (1) masih banyak nelayan yang menggunakan perahu dayung tanpa bermotor,

(2) daerah penangkapan ikan (*fishing gorund*) tidak jauh, (3) alat penangkapan ikan dan alat pengolahan hasil ikan masih tradisional, (4) kurangnya modal nelayan, dan (5) rendahnya investasi di sektor perikanan.

i. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap Perekonomian Wilayah

Sektor yang dimotori oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran ini selama tahun 2013-2017 rata-rata mampu memberi kontribusi terhadap PDRB Provinsi Papua sekitar 7,92% per tahun, dengan kecenderungannya yang terus meningkat. Kontribusi yang paling besar diberikan oleh perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor, dimana untuk periode 2013-2017 bisa mencapai 6,58% per tahun, yang berada di posisi ke-4 terbesar. Sedangkan kontribusi dari sub sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reperasinya, sangat rendah, dengan rata-rata per tahun sekitar 1,34% (lihat Gambar 2.55).

Sektor perdagangan sangat potensial untuk terus dikembangkan, karena tanpa adanya sektor ini dipastikan perekonomian wilayah Papua tidak akan bergerak. Selain dapat memberikan nilai tambah yang tinggi, daya serapnya terhadap kesempatan berusaha juga sangat potensial.

Gambar 2.55 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)

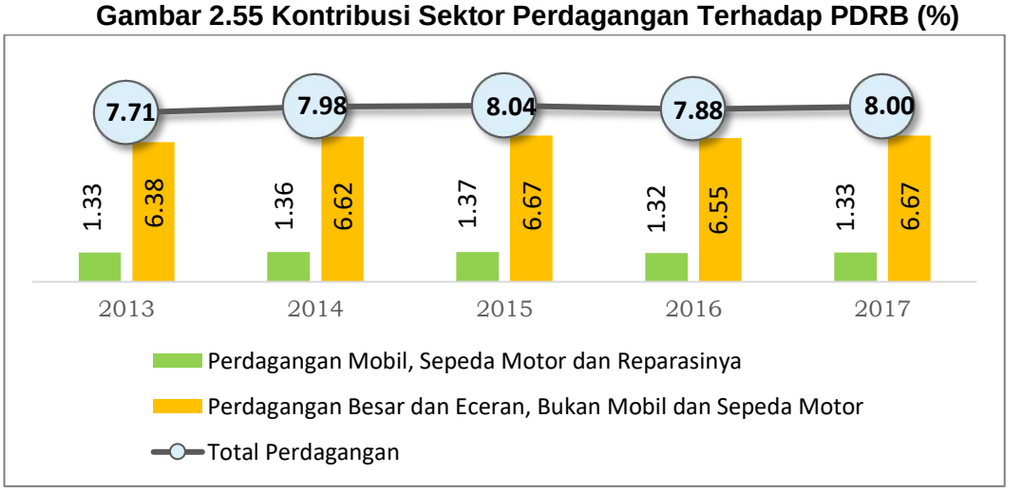

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Sektor ini paling banyak memberikan peluang bergeraknya lapangan usaha informal yang selama ini dilaksanakan pengusaha golongan ekonomi lemah, sehingga upaya untuk mengatasi ketimpangan pendapatan antar penduduk dapat diwujudkan melalui

pengembangan sektor perdagangan. Termasuk juga dapat mendorong sektor-sektor ekonomi lainnya, karena *backward linkage* sektor perdagangan dapat diarahkan ke sektor-sektor lainnya dalam perekonomian wilayah.

j. Kontribusi sektor Industri terhadap Perekonomian Wilayah

Peranan sektor industri dalam perekonomian wilayah Provinsi Papua selama ini masih sangat rendah, tidak lebih dari 2% kontribusinya terhadap PDRB setiap tahun, yang cenderung stagnan sepanjang periode 2013-2017. Hanya ada 2 sub sektor industri yang paling berperan dalam perekonomian wilayah Papua, yakni industri makanan dan minuman, serta industri kayu. Kedua sub sektor tersebut menguasai pangsa industri kurang lebih 83% per tahun sepanjang periode 2013-2017, serta memberi kontribusi terhadap perekonomian wilayah Papua sebesar 1,64% untuk periode yang sama (lihat Tabel 2.17).

Tabel 2.17 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)

Kelompok Industri	2013	2014	2015	2016	2017
Industri Pengolahan	1.96	2.06	1.99	1.91	1.94
Industri Makanan dan minuman	0.79	0.83	0.80	0.77	0.80
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0.85	0.89	0.86	0.80	0.79
Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Industri Barang Galian bukan Logam	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08
Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Industri Alat Angkutan	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Industri Furnitur	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Dalam upaya mengurangi ketergantungan barang-barang produksi dari luar provinsi, terutama Jawa dan Sulawesi, maka strategi industrialisasi subtitusi impor merupakan pilihan yang paling tepat. Khususnya di tahap awal adalah pengembangan industri makanan dan minuman, seperti tepung sagu, pasta ubi, mie instan, ikan kaleng, butiran coklat, beras organik, sirup buah merah, minyak goreng, dan sebagainya. Agar hal ini dapat terlaksana optimal, maka berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pengembangan industri di Provinsi Papua selama ini harus segera dituntaskan antara lain yang paling utama adalah: (1) minimnya sarana dan prasarana pendukung industri, (2) kualitas tenaga kerja yang masih rendah, (3) tingginya biaya transaksi (transportasi, administrasi dan lobi), (4) tingkat kerawanan keamanan yang tinggi, dan (5) rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat Papua. Semua permasalahan ini harus diselesaikan secara holistik-integratif, terfokus dan spasial, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Agar dapat terus berkelanjutan, pengembangan *Eco-Industry* atau industri ramah lingkungan dapat dijadikan sebagai pioner bagi pengembangan agroindustri di Provinsi Papua masa mendatang. Mengadopsi strategi yang dijalankan oleh Kementerian Perindustrian (2017), maka strategi pembangunan industri yang berkelanjutan di Provinsi Papua harus difokuskan pada peningkatan nilai tambah melalui inovasi dan pengembangan teknologi industri, pengembangan pola produksi yang dapat mengurangi pemborosan sumber daya, dan mengintegrasikan industri daerah dalam *Global Value Chain* (GVC) untuk menjamin ketersediaan sumber daya industri dan pasar bagi industri nasional.

k. Kontribusi Sektoral Terhadap Perekonomian Wilayah Kabupaten/Kota

Secara absolut dan spasial, peranan sektoral dalam perekonomian wilayah jika ditelusuri berdasarkan potensi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Papua terpetakan ada 23 daerah yang memiliki kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian wilayahnya di atas 25%, dimana 12 kabupaten diantaranya memiliki peranan sektor pertanian yang sangat dominan yaitu Kabupaten,

Merauke, Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Boven Digoel, Tolikara, Sarmi, Keerom, Waropen, Supiori, Nduga dan Lanny Jaya. Ke-12 kabupaten ini dapat dikatakan mempunyai struktur ekonomi masing-masing berada pada sektor pertanian, karena kontribusinya terhadap perekonomian wilayah rata-rata mencapai 27% (lihat Tabel 2.18).

Tabel 2.18 Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Kabupaten/Kota Se Papua Tahun 2017 (%)

Kabupaten Kota	Lapangan Usaha																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Total
Merauke	27,06	1,68	4,04	0,06	0,14	14,39	13,93	7,86	1,31	7,82	2,33	2,88	1,56	9,47	2,44	1,80	1,23	100,00
Jayawijaya	14,60	1,42	2,18	0,08	0,04	12,49	16,26	16,90	0,68	6,88	1,49	6,35	2,06	12,04	2,89	2,22	1,42	100,00
Jayapura	22,18	2,07	4,91	0,04	0,18	13,83	12,42	15,81	1,37	5,51	1,35	4,61	2,18	8,21	2,13	1,53	1,66	100,00
Nabire	17,90	22,76	1,57	0,06	0,05	11,18	16,81	5,88	0,48	2,83	2,01	2,93	1,04	9,51	2,13	1,61	1,26	100,00
Kepulauan Yapen	23,25	0,58	4,05	0,07	0,14	6,49	17,68	9,35	0,84	3,60	3,19	5,99	1,43	14,72	3,73	2,16	2,73	100,00
Biak Numfor	22,32	0,90	3,78	0,22	0,15	6,37	15,70	10,46	0,79	4,05	5,02	4,71	2,40	17,37	2,85	1,81	1,11	100,00
Paniai	10,39	40,89	0,37	0,00	0,01	25,19	3,28	2,26	0,20	0,58	0,19	1,18	0,32	11,57	1,68	1,23	0,67	100,00
Puncak Jaya	27,16	1,10	0,53	0,01	0,00	28,34	7,27	2,33	0,22	0,78	0,16	1,97	0,20	21,30	3,50	3,83	1,31	100,00
Mimika	1,80	87,00	0,15	0,01	0,01	2,33	2,14	1,12	0,27	1,73	0,44	0,62	0,43	1,39	0,18	0,16	0,23	100,00
Boven Digoel	26,36	1,30	26,38	0,00	0,00	23,09	5,31	1,71	0,22	0,30	0,83	1,30	0,17	8,94	1,95	1,49	0,65	100,00
Mappi	25,45	0,34	0,70	0,01	0,00	32,48	6,66	2,10	0,23	0,53	0,70	1,65	0,10	21,98	3,69	2,45	0,93	100,00
Asmat	22,58	0,02	2,49	0,01	0,05	28,41	6,49	2,34	0,27	0,61	0,21	1,90	0,55	21,36	7,91	3,74	1,07	100,00
Yahukimo	23,44	0,85	0,57	0,01	0,00	21,91	5,28	4,76	0,31	1,02	0,36	3,29	0,27	27,93	6,09	2,54	1,36	100,00
Pegunungan Bintang	22,44	1,05	0,11	0,01	0,00	28,82	4,23	3,18	0,32	0,72	1,16	1,34	0,24	29,66	3,59	2,08	1,05	100,00
Tolikara	27,62	0,47	0,22	0,01	0,00	19,09	5,93	5,54	0,32	1,13	0,14	2,32	0,21	26,29	5,78	3,77	1,15	100,00
Sarmi	34,18	1,61	2,26	0,04	0,07	17,48	9,05	6,10	0,61	2,81	1,12	2,95	0,56	14,31	3,17	2,16	1,54	100,00
Keerom	33,62	1,08	5,53	0,04	0,00	27,03	7,46	0,97	0,91	1,03	1,20	1,54	0,05	13,49	2,79	2,11	1,17	100,00
Waropen	28,27	0,76	1,14	0,03	0,01	28,16	6,23	1,81	0,21	0,48	0,50	5,13	0,26	17,73	6,11	1,40	1,77	100,00
Supiori	29,39	0,35	0,59	0,07	0,00	26,96	3,82	0,30	0,23	0,61	0,95	2,56	0,08	20,90	6,45	3,78	2,96	100,00
Mamberamo Raya	22,68	2,29	0,29	0,00	0,00	19,68	9,89	3,09	0,63	0,00	0,09	1,71	0,17	24,87	7,83	4,21	2,58	100,00

Kabupaten Kota	Lapangan Usaha																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Total
Nduga	26,08	0,36	0,10	0,00	0,00	23,75	11,38	1,05	0,07	0,01	0,00	2,85	0,12	21,95	5,78	4,16	2,36	100,00
Lanny Jaya	22,72	1,85	0,07	0,00	0,00	21,98	9,98	3,27	0,06	0,00	0,00	4,21	0,08	22,65	6,67	5,14	1,31	100,00
Mamberamo Tengah	17,28	1,34	0,09	0,00	0,00	23,84	10,10	5,54	0,02	0,01	0,05	2,05	0,11	28,52	5,32	3,64	2,08	100,00
Yalimo	27,45	0,51	0,11	0,00	0,00	18,20	11,19	2,79	0,08	0,01	0,00	1,10	0,09	28,04	4,76	3,21	2,47	100,00
Puncak	22,14	0,12	0,02	0,01	0,00	28,32	10,79	0,57	0,22	0,14	0,04	2,35	0,18	33,90	0,50	0,45	0,25	100,00
Dogiyai	28,62	2,75	0,06	0,00	0,00	10,40	11,68	0,99	0,29	0,45	0,00	9,81	0,00	31,66	0,68	2,23	0,38	100,00
Intan Jaya	25,22	0,36	0,28	0,00	0,00	33,32	7,06	0,92	0,02	0,01	0,00	0,33	0,08	26,00	3,08	1,88	1,45	100,00
Deiyai	25,13	1,06	0,33	0,02	0,00	31,39	7,86	0,73	0,05	0,04	0,16	1,63	0,07	23,31	3,94	3,28	1,01	100,00
Kota Jayapura	5,59	0,38	2,59	0,06	0,14	20,04	15,94	5,25	2,03	10,31	4,15	5,27	3,32	14,07	4,51	3,93	2,39	100,00
Jumlah Kabupaten & Kota	**10,98**	**41,73**	**1,96**	**0,03**	**0,05**	**10,98**	**7,85**	**4,22**	**0,69**	**3,60**	**1,38**	**2,39**	**1,10**	**8,57**	**1,99**	**1,47**	**1,00**	**100,00**
Papua	**10,80**	**41,78**	**1,94**	**0,03**	**0,05**	**10,90**	**8,00**	**4,24**	**0,67**	**3,56**	**1,39**	**2,36**	**1,11**	**8,56**	**2,06**	**1,51**	**1,03**	**100,00**

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Kode Lapangan Usaha

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estat
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa lainnya

Untuk kabupaten yang lain, meskipun kontribusi sektor pertaniannya diatas 25%, namun bukan yang paling dominan dalam perekonomian wilayah, sehingga struktur ekonomi daerah-daerah tersebut tidak pada sektor pertanian. Sebagai contoh di Kabupaten Puncak Jaya, Mappi, Asmat, Intan Jaya dan Deyiai yang memiliki kontribusi sektor pertanian lebih dari 25%, akan tetapi struktur ekonominya adalah sektor kontruksi, oleh karena peranan sektor kontruksi terlihat yang paling besar, diatas 30%.

Termasuk juga untuk Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Puncak dan Dogiyai, struktur ekonominya bukan pada sektor pertanian, akan tetapi pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

Pada umumnya 3 (tiga) sektor yang telah diidentifikasi di atas, yaitu pertanian, kontruksi, dan adminitrasi pemerintahan mendominasi perekonomian wilayah hampir seluruhan kabupaten di Provinsi Papua, terkecuali di Kabupaten Mimika sektor pertambangan terlihat yang menguasai pangsa PDRB, dan menjadi penyebab adanya ketimpangan sektoral yang begitu tinggi di Kabupaten Mimika, serta di Provinsi Papua secara keseluruhan.

Sektor industri sepertinya belum banyak berperan bagi perekonomian wilayah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua, terkecuali untuk Kabupaten Boven Digoel, sektor industri tampak sudah menjadi *prime mover* ekonomi wilayah, dengan kontribusinya mencapai 26,38% per tahun. Andalan sektor industri Kabupaten Boven Digul selama ini adalah pengolahan kayu dan kelapa sawit, yang tampaknya masih perlu diperbaiki strukturnya, terutama dalam kaitan mendukung pengembangan industri yang berkelanjutan di Provinsi Papua.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Pengeluaran Konsumsi Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Papua, sebagaimana yang ditunjukan pada Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2013-2017 sebesar 2,27%. Dimana pada tahun 2017

tercatat pengeluaran per kapita rumahtangga di Papua kurang lebih sebesar Rp. 7 juta (lihat Gambar 2.56).

Gambar 2.56 Pengeluaran Per Kapita Riil di Provinsi Papua (juta rupiah)

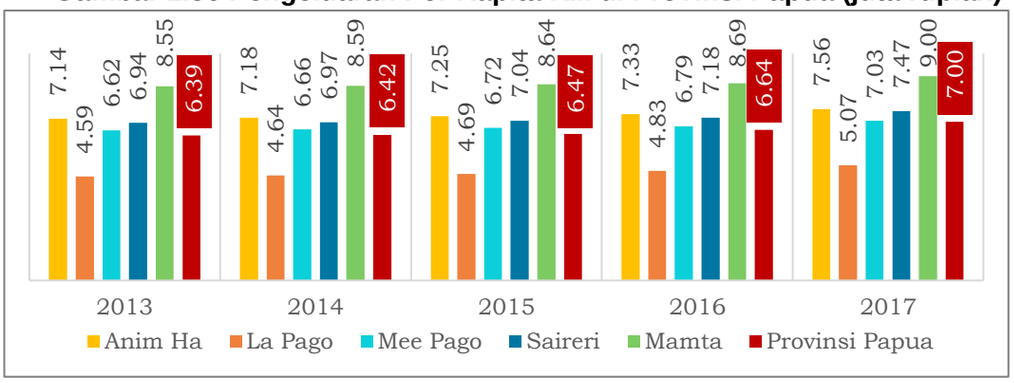

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Sebagian besar pengeluaran rumah tangga di Provinsi Papua dialokasikan pada pengeluaran makanan, dengan porsinya rata-rata sebesar 58,28% per tahun sepanjang periode 2013-2017. Berarti sisanya sebesar 41,72% dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan nonmakanan (lihat Gambar 2.57).

Gambar 2.57 Struktur Pengeluaran Per Kapita di Provinsi Papua

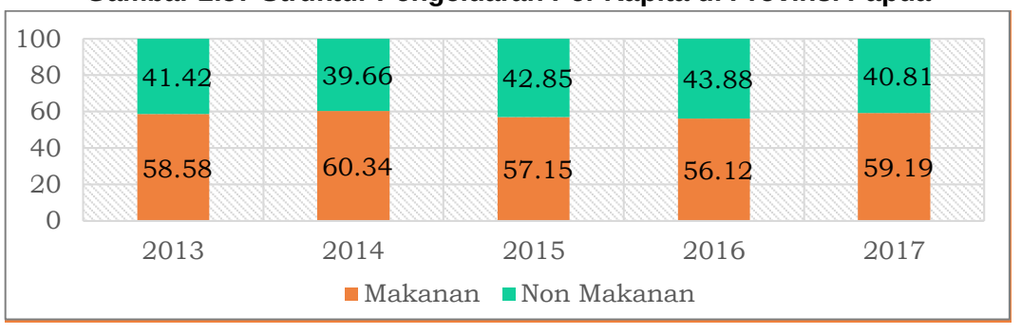

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Pola konsumsi penduduk Papua untuk makanan lebih dominan dibelanjakan pada makanan dan minuman jadi (15,54%). Kemudian untuk memenuhi kebutuhan kalori dan protein lebih besar dialokasikan pada umbi-umbian dan padi-padian, masing-masing sebesar 13,61% dan 10,06%. Serta untuk pemenuhan vitamin, lebih banyak mengkonsumsi sayur-sayuran, dengan alokasi pengeluarannya sebesar 12,68%. Adapun untuk nonmakanan, pengeluaran masyarakat lebih banyak dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan fasilitas rumahtangga, proporsinya bisa mencapai 62,80% dari total pengeluaran. Menyusul kemudian untuk

aneka barang sebesar 21,28%. Paling rendah untuk keperluan pesta dan upacara, sebesar 2,26% (lihat Gambar 2.58).

Gambar 2.58 Komposisi Pengeluaran Per Kapita Papua Tahun 2017 (%)

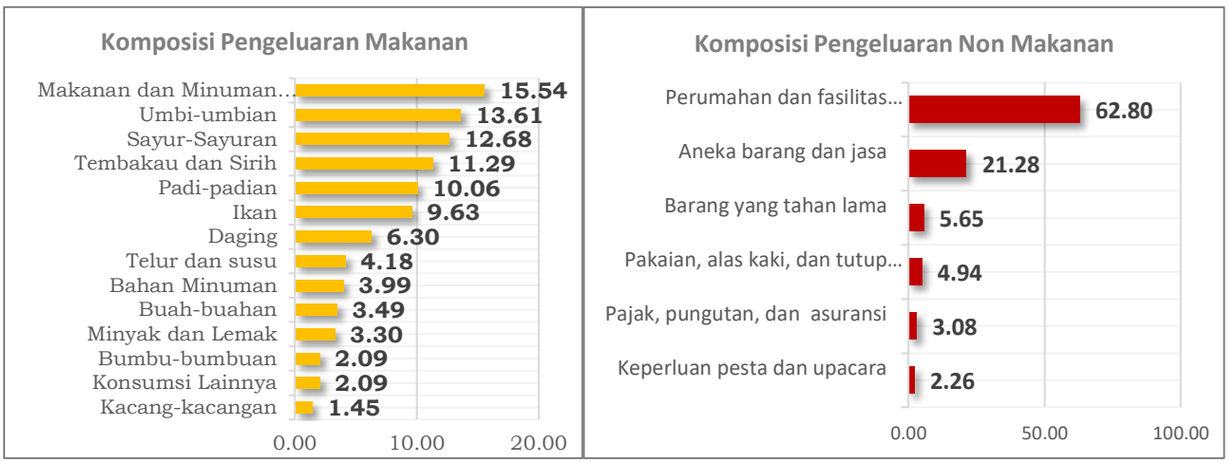

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Selanjutnya bila dilihat menurut kabupaten/kota, sepanjang tahun 2013-2017 ada 2 (dua) wilayah yang terindikasi mempunyai pengeluaran per kapita paling tinggi di Provinsi Papua, yakni Kota Jayapura dengan rata-rata sebesar Rp. 14.322 ribu per tahun, dan Kabupaten Mimika sebesar Rp. 11.087 ribu per tahun. Sedangkan yang terendah selama itu adalah Kabupaten Nduga hanya sebesar Rp. 3.694 ribu per tahun.

Gambar 2.59 Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan di Provinsi Papua Tahun 2013 dan 2017 (ribu rupiah)

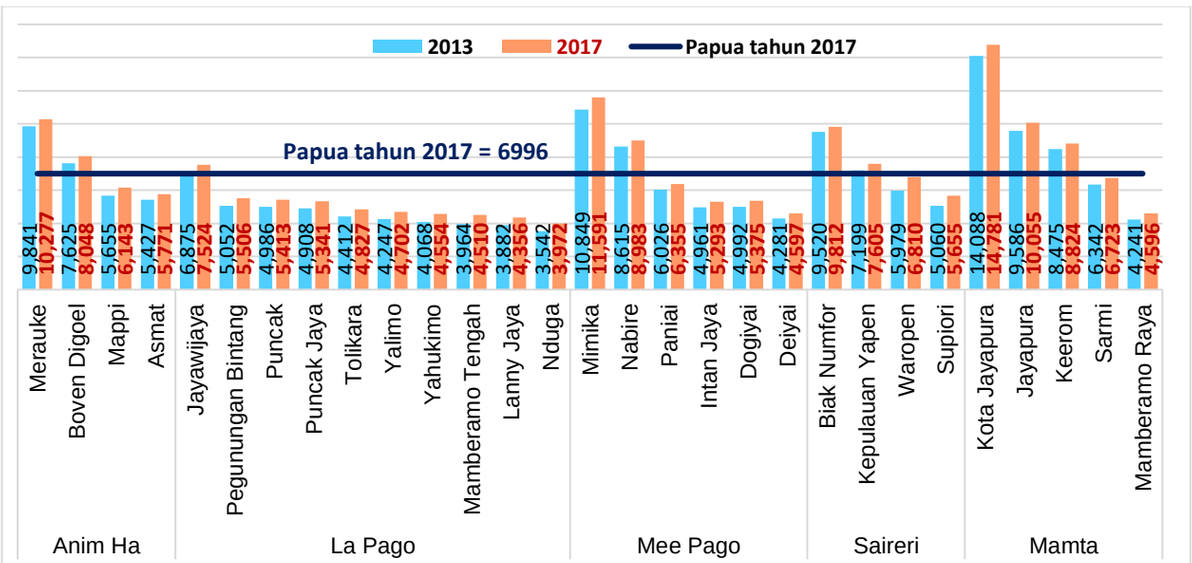

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Sementara jika diamati per wilayah adat, terpetakan pada wilayah adat Anim Ha yang paling tinggi pengeluaran per kapita di tahun 2017 adalah Kabupaten Merauke yakni sebesar Rp. 9.994 ribu,

kemudian untuk La Pago adalah Kabupaten Jayawijaya, sebesar Rp. 7.524 ribu, Mee Pago adalah Kabupaten Mimika sebesar Rp. 11.591 ribu, Saireri adalah Kabupaten Biak Numfor sebesar Rp. 9.812 ribu, dan di Mamta adalah Kota Jayapura sebesar Rp. 14.781 ribu.

2.1.4.2. Nilai Tukar Petani

NTP (Nilai Tukar Pertani) di Provinsi Papua sangat berfluktuasi dari waktu ke waktu tergantung dari perkembangan harga barang yang dijual petani dan barang serta jasa yang dikonsumsi petani. Pada Gambar 2.60 diuraikan perkembangan NTP Provinsi Papua selama tahun 2013–2017.

Dalam kurun waktu 5 tahun tersebut, NTP Papua menunjukkan kecenderungan yang terus menerus turun, hingga sampai Desember 2017 hanya sebesar 93,26%, padahal Januari 2013 bisa mencapai 101,87%. Kecenderungan ini mengindikasikan bahwa kondisi petani di Papua mengalami defisit terus menerus, mulai Agustus 2013, yakni kenaikan harga produksinya lebih rendah dibandingkan kenaikan harga konsumsinya sehingga pendapatan petani mengalami penurunan lebih jauh dari pengeluarannya. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan para petani semakin berkurang dibanding tingkat kesejahteraan sebelumnya.

Gambar 2.60 Nilai Tukar Petani di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (%)

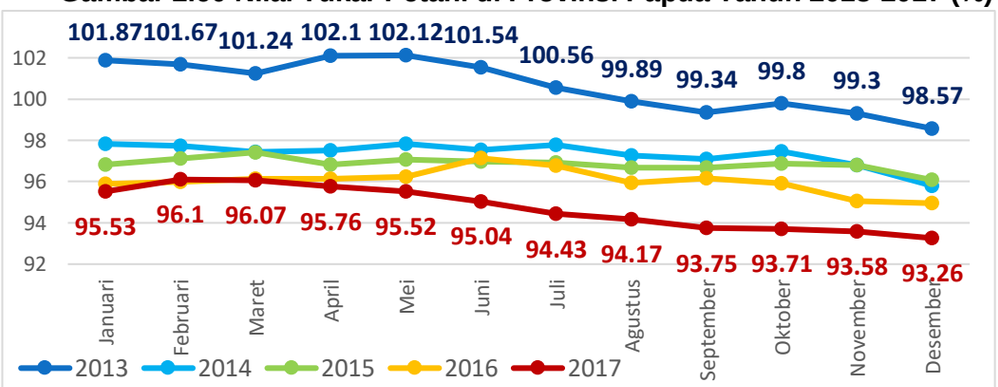

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Permasalahan rendahnya NTP antara lain disebabkan oleh (1) skala usaha budi daya pertanian yang relatif kecil; (2) harga komoditas berfluktuasi, terutama pada saat panen raya; (3) pembangunan infrastruktur yang belum merata sehingga menyebabkan harga jual rendah dan harga kebutuhan lain tinggi; (4) aplikasi teknologi yang belum optimal, hal ini antara lain disebabkan karena terbatasnya

permodalan petani yang mengakibatkan produktivitas rendah (5) daya saing komoditas pertanian relatif rendah; (6) laju pertumbuhan harga konsumsi dan harga sarana produksi lebih tinggi dari laju pertumbuhan harga komoditas; (7) dari sisi konsumsi rumah tangga, pertumbuhan pengeluaran untuk bahan makanan, makanan jadi, perumahan dan sandang lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan. Akibat berbagai masalah ini, membuat NTP di Provinsi Papua selama ini paling rendah di Indonesia bersama Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Aceh.

Gambar 2.61 Nilai Tukar Petani di Indonesia pada Desember 2017 (%)

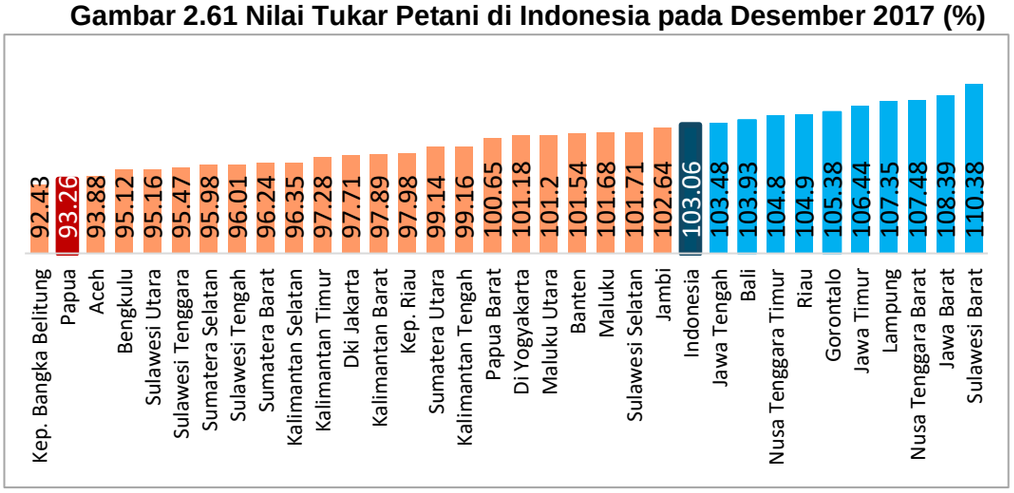

Sumber: BPS RI, 2018 (data diolah)

Apabila diamati berdasarkan sub usaha pertanian dan perikanan, terlihat bahwa nelayan di Provinsi Papua lebih sejahtera dibandingkan petani tanaman pangan, perkebunan, hortikulura, peternakan dan pembudidayaan ikan. Hal ini tergambarkan dari perkembangan NTN (Nilai Tukar Nelayan) yang selalu lebih tinggi dari angka 100 selama tahun 2013-2017, dengan kecenderungannya yang terus meningkat, dimana pada tahun 2017 tercatat NTN Provinsi Papua sebesar 103,75%.

Gambar 2.62 Nilai Tukar Petani dan Nelayan Provinsi Papua (%)

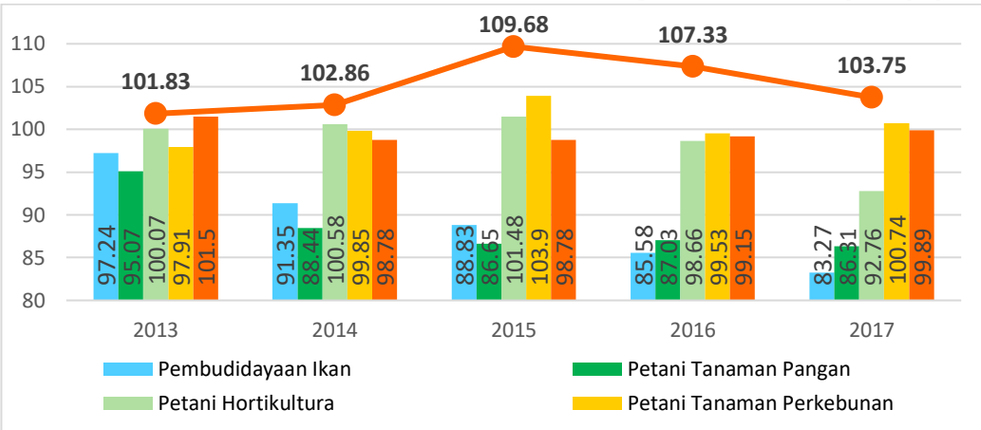

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Hal ini jauh berbeda dengan usaha pembudidayaan ikan, yang dikenal juga dengan sebutan petani tambak ikan, terlihat yang paling rendah tingkat kesejahteraannya diantara semua usaha pertanian dan perikanan. Untuk periode yang sama, NTP petani tambak ikan terus dibawah angka 100, bahkan cenderung menurun, dimana pada tahun 2017 NTP petani tambak hanya 83,27% turun 13,79% dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 97,24%. Hal yang sama juga terjadi untuk petani tanaman pangan, selain mengalami penurunan setiap tahun, juga nilainya paling rendah, serta jauh dibawah 100%, rata-rata NTP tanaman pangan sebesar 88,70%.

2.1.4.3. Produktivitas total daerah

Ukuran produktifitas daerah dapat menvisualisasikan kapasitas dan daya saing tenaga kerja dalam menghasilkan satu satuan nilai tambah atau PDRB. Perkembangan produktivitas daerah Provinsi Papua selama tahun 2013-2017 cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 2,85% per tahun, serta rata-rata produktifitas Rp. 79,53 juta per tenaga kerja per tahun. Lihat Tabel 2.19 di bawah ini.

Tabel 2.19 Produktifitas Total Daerah per Tenaga Kerja (juta rupiah/orang)

Tahun	Pertanian	Industri	Jasa	Produktifitas Total Daerah
2013	11.47	634.28	139.71	71.66
2014	12.64	701.03	136.69	75.05
2015	12.29	722.52	166.00	77.92
2016	14.11	676.55	134.80	85.44
2017	13.82	666.01	154.53	87.59
Rata-rata Produktifitas Per tahun	12.86	680.08	146.35	79.53
Rata-rata Pertumbuhan (%)	4.77	1.23	2.55	2.85

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Oleh karena pendidikan tenaga kerja di sektor pertanian pada umumnya sangat rendah (SD/tidak tamat SD/tidak sekolah) menyebabkan produktifitas daerah di sektor tersebut paling rendah diantara semua sektor. Rata-rata per tahun selama periode 2013-2017 hanya mencapai Rp. 12,86 juta per tenaga kerja per tahun. Beda dengan sektor industri yang mencapai Rp. 680,08 juta per tenaga kerja per tahun, dan sektor jasa sebesar Rp. 146,35 juta per tenaga kerja per tahun. Namun demikian, pertumbuhan produktifitas daerah di sektor pertanian tampak lebih tinggi dibandingkan industri dan jasa. Tingkat pertumbuhan produktifitas daerah sektor pertanian bisa mencapai 4,77% per tahun sepanjang tahun 2013-2017, jauh di atas sektor industri sebesar 1,25% per tahun dan sektor jasa sebesar 2,85% per tahun. Ini mengindikasikan bahwa penerapan teknologi di sektor pertanian lebih cepat dibandingkan sektor industri dan jasa.

2.1.4.4. Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB

Sebagai suatu wilayah yang terbuka, aktifitas perdagangan ekspor dan impor Provinsi Papua terlihat sangat berfluktuatif. Hal ini ditandai dengan variasi perubahan Net Ekspor (selisih ekspor dan impor) yang naik turun selama periode 2013-2017. Sebagaimana yang disajikan dalam Gambar 2.67, net ekspor Provinsi Papua mengalami defisit sebanyak 2 kali, yakni di tahun 2013 sebesar Rp. 11,59 triliun, dan tahun 2015 sebesar Rp. 1,11 triliun. Namun untuk tahun 2014, 2016 dan 2017 semuanya mengalami surplus, dimana yang terbesar terjadi pada tahun 2014 mencapai Rp. 6,02 triliun.

Melalui perbandingan antara net ekspor dengan PDRB dapat ditemukan bagaimana daya saing ekonomi suatu daerah jika

dihadapkan pada kinerja perdagangannya. Terlihat disini daya saing ekonomi Provinsi Papua masih sangat rendah yang diindikasikan rasio net ekspor PDRB selama periode 2013-2017 rata-rata dibawah batas minimum yaitu -0,42%.

Gambar 2.63 Net Ekspor Daerah dan Rasionya Terhadap PDRB

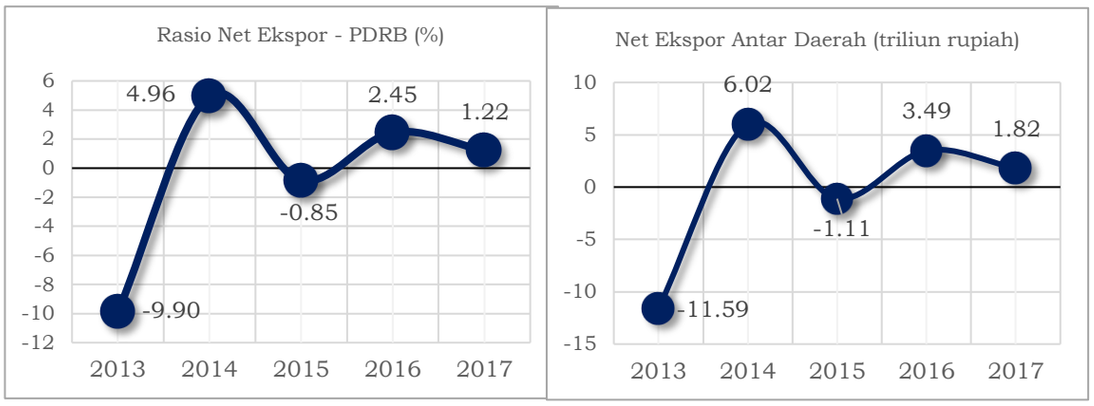

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Ketergantungan perekonomian terhadap satu sektor saja yakni sektor pertambangan membuat perdagangan regional Provinsi Papua belum stabil. Tinggi rendahnya net ekspor sangat bergantung pada kinerja produksi di sektor pertambangan yakni bijih tembaga dan emas yang dikelola oleh PT. Freeport Indonesia. Fenomena yang terjadi di tahun 2013 dan 2015 ketika ada penurunan ekspor tembaga secara drastis oleh PT. Freeport Indonesia membuktikan hal tersebut. Rasio net ekspor PDRB Provinsi Papua langsung turun sampai ke titik nadir -9,90% tahun 2013 dan -0,85% tahun 2015. Untuk itu, memang sudah sepatutnya perekonomian daerah tidak hanya ditopang oleh satu atau dua sektor saja. Membangun dan mengembangkan industri subtitusi impor dan promosi ekspor berbasis pertanian dan berkelanjutan menjadi salah satu jalan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing kinerja perdagangan dimasa mendatang.

2.1.4.5. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum dan BPR

Ketersediaan dana perbankan dalam upaya meningkatkan daya saing investasi regional sangat dibutuhkan. Oleh karena itu kinerja perbankan di suatu daerah perlu dijaga dan ditingkatkan agar tidak kolaps (jatuh). Terkait dengan hal ini, salah satu indikator yang dapat menunjukan dengan baik bagaimana kondisi kinerja perbankan suatu daerah adalah rasio pinjaman terhadap simpanan di bank, atau dalam

konteks perbankan disebut *Loan to Deposi Ratio* disingkat LDR, meskipun mulai tahun 2015 cara perhitungan LDR telah mengalami perubahan. Sebagian kalangkan perbankan mengatakan batas aman LDR adalah 85%, atau toleransinya antara 85% - 100%.

Tabel 2.20 Simpanan dan Kredit yang Disalurkan Sektor Perbankan di Provinsi Papua Tahun 2013-2017

Tahun	Indikator Perbankan	Kelompok Bank			
		Bank Pemerintah	Bank Swasta Nasional	Bank Perkreditan Rakyat	Total Bank
2013	Kredit (juta rupiah)	15,119,851	3,260,913	451,170	18,831,934
	Simpanan (juta rupiah)	21,977,198	6,479,949	224,667	28,681,814
	Rasio Kredit-Simpanan (%)	68.80	50.32	200.82	65.66
2014	Kredit (juta rupiah)	17,318,451	3,210,030	-	20,528,481
	Simpanan (juta rupiah)	26,420,175	7,296,942	251	33,717,117
	Rasio Kredit-Simpanan (%)	65.55	43.99	-	60.88
2015	Kredit (juta rupiah)	18,863,362	3,395,402	778	22,259,542
	Simpanan (juta rupiah)	29,104,180	7,128,072	294	36,232,546
	Rasio Kredit-Simpanan (%)	64.81	47.63	264.63	61.44
2016	Kredit (juta rupiah)	21,145,894	3,171,884	857,702	25,175,480
	Simpanan (juta rupiah)	29,104,180	7,128,072	345,672	36,577,924
	Rasio Kredit-Simpanan (%)	72.66	44.50	248.13	68.83
2017	Kredit (juta rupiah)	23,193,087	3,382,726	976,556	27,552,369
	Simpanan (juta rupiah)	31,099,076	6,846,209	495,431	38,440,716
	Rasio Kredit-Simpanan (%)	74.58	49.41	197.11	71.67

Sumber: Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat, 2018 (data diolah)

Perkembangan LDR di Provinsi Papua jika diperhatikan secara keseluruhan masih sangat aman, karena berada di bawah batas 85%, dengan kecenderungan yang terus mengalami peningkatan, yang menandakan semakin banyak kredit yang disalurkan. Pada tahun 2013, posisi LDR perbankan di Provinsi Papua sebesar 65,66%, kemudian di tahun 2017 naik menjadi 71,67%. Sehingga rata-rata LDR di Provinsi Papua selama periode tahun 2013-2017 adalah 65,70% per tahun.

Jika diperhatikan menurut jenis bank, terpetakan bahwa semua bank pemerintah dan swasta di Provinsi Papua dalam posisi LDR yang sangat aman, rata-rata masih dibawah 60%. Akan tetapi untuk BPR (Bank Perkreditan Rakyat), kondisinya sangat memprihatinkan, karena rasio LDR BPR setiap tahunnya jauh di atas nilai 100, bahkan lebih dari 200% per tahun (sangat tidak aman), yang mengindikasikan jumlah kredit (pinjaman) jauh lebih besar dibandingkan dana pihak ketiga yang disimpan. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut maka

dipastikan dalam lima tahun mendatang banyak BPR yang kolaps. Padahal daya jangkau BPR ini ke pengusaha golongan lemah, dan masyarakat berpendapatan rendah atau miskin di daerah perdesaan sangat tinggi sekali. Oleh karena itu perlu adanya penguatan, pembinaan dan pendampingan dari pemerintah provinsi melalui kebijakan fiskal untuk menjaga dan melindungi BPR agar tidak kolaps dimasa mendatang. Terlebih lagi jika melihat proporsi penyaluran kredit oleh bank di Provinsi Papua selama ini kepada UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) sangat rendah sekali, di bawah 15 triliun rupiah per tahun, dan sekitar 1,4% saja kontribusinya secara nasional (lihat Gambar 2.64), maka BPR menjadi satu-satunya alternatif terbaik untuk meningkatkan pemberian kredit bagi UMKM di Provinsi Papua.

Gambar 2.64 Penyaluran Kredit Pada UMKM di Provinsi Papua

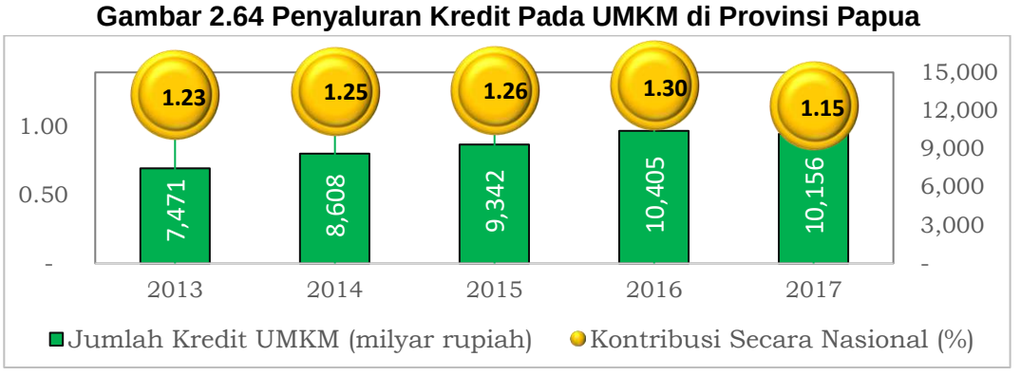

Sumber: Bank Indonesia, 2018 (data diolah)

2.1.4.6. Rasio ketergantungan

Terdapat kecenderungan pertumbuhan penduduk usia produktif di Provinsi Papua lebih cepat dibandingkan penduduk usia non produktif. Jika diamati berdasarkan kelompok usia produktif 15-64 tahun, terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok usia ini proporsinya cenderung meningkat. Tahun 2013 penduduk usia produktif mencapai 66,83% dan tahun 2016 meningkat menjadi 68,23% dari total penduduk Papua, hal ini berarti jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dari jumlah penduduk usia non produktif.

Tabel 2.21 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia (ribu orang)

Kelompok Umur	2013	2014	2015	2016	2017	Rata² Pertumbuhan (% per thn)
0 – 4	328,5	329,3	330,0	331,6	333,1	0,35
5 – 9	318,6	319,8	321,3	321,8	322,5	0,30
10 – 14	315,1	315,4	316,0	316,1	316,1	0,08
15 – 19	309,6	310,9	311,6	312,7	314,0	0,35
20 – 24	300,1	303,9	306,9	309,3	311,3	0,92
25 – 29	282,5	286,9	292,0	297,1	302,1	1,69
30 – 34	271,7	273,6	275,5	278,6	281,7	0,91
35 – 39	261,9	264,8	267,3	268,2	269,5	0,72
40 – 44	224,1	233,6	241,8	249,3	255,2	3,30
45 – 49	167,1	177,9	188,6	199,1	209,3	5,79
50 – 54	110,4	120,3	130,6	140,6	150,9	8,13
55 – 59	64,1	70,9	78,1	86,3	94,9	10,31
60 – 64	35,0	38,4	42,5	47,1	52,2	10,51
65 – 69	19,9	21,0	22,5	24,7	23,8	4,58
70 – 74	13,0	13,4	13,7	13,8	15,6	4,66
75 +	10,9	10,9	11,0	11,1	13,1	4,70
Total	3.032,5	3.091,0	3.149,4	3.207,4	3,265.2	1.87

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Dampak dari semakin meningkatnya jumlah penduduk usia produktif, menyebabkan rasio ketergantungan terlihat mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Jika menggunakan data proyeksi yang bersumber dari BPS, terlihat bahwa rasio ketergantungan yang cenderung menurun dari 53,8% tahun 2010 turun menjadi 42,2% pada tahun 2035, sedangkan berdasarkan estimasi terlihat gap yang cukup besar, yaitu tahun 2010 rasio ketergantungan mencapai 32,1% turun menjadi 23,2% tahun 2035. Semua ini menggambarkan terjadinya bonus demografi di Provinsi Papua antara tahun 2020-2030 (lihat Gambar 2.65).

Gambar 2.65 Proyeksi Bonus Demografi di Provinsi Papua

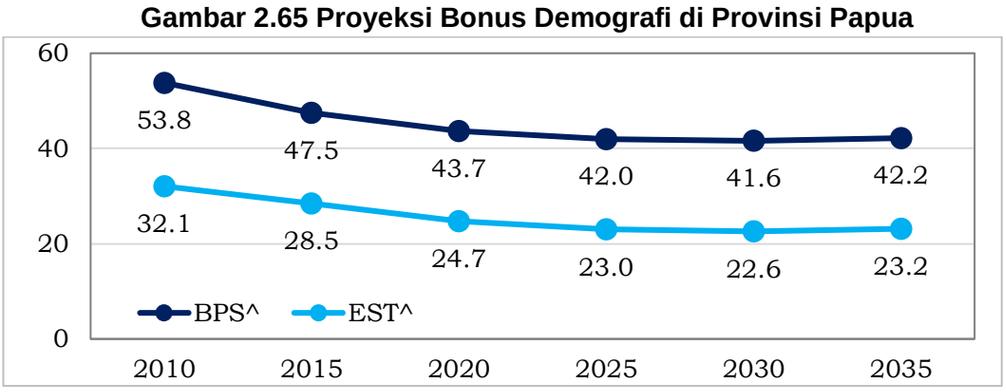

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Bonus demografi yang akan terjadi di Provinsi Papua pada tahun 2020-2030 harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkualitas. Adanya bonus demografi menandakan bahwa penduduk usia produktif (15-64) lebih banyak dibandingkan penduduk yang nonproduktif (0-14 dan lebih dari 64 tahun), sehingga merupakan modal yang sangat besar bagi pemerintah daerah untuk menciptakan pembangunan yang lebih baik dan berkualitas. Akan tetapi mereka ini merupakan penduduk yang produktif untuk bekerja, membutuhkan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, dan pangan lebih banyak, karenanya perluasan lapangan kerja, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang lebih tinggi, serta pemenuhan kebutuhan pangan yang lebih banyak harus diwujudkan pada saat itu.

2.1.4.7. Angka kriminalitas yang Tertangani

Menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para investor merupakan syarat mutlak yang harus ditunjukan oleh pemerintah Provinsi Papua, agar daya saing investasi regional dapat terus meningkat setiap tahun. Salah satu cara untuk mendukung hal tersebut adalah melalui penanganan penyelesaian kejahatan. Meskipun bukan merupakan kewenangan pemerintah provinsi, namun pemerintah daerah Papua dapat memfasilitasinya melalui kebijakan fiskal untuk memperkuat dan mendukung penanganan kejahatan yang dilakukan oleh POLRI (Polisi Republik Indonesia).

Gambar 2.66 Penyelesaian Kejahatan di Provinsi Papua dan Indonesia (%)

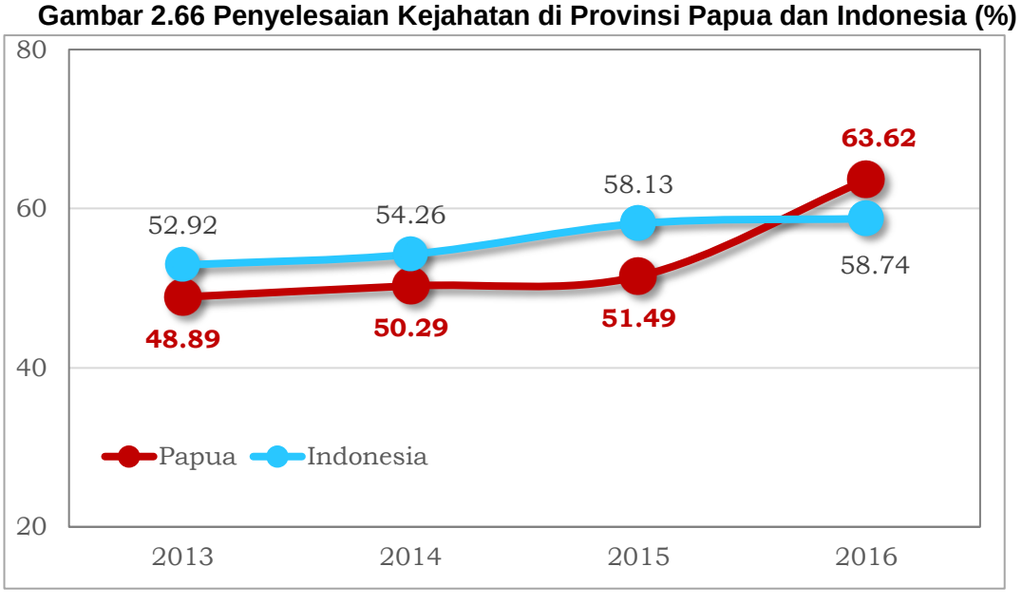

Sumber: BPS RI, 2018 (data diolah)

Berdasarkan indikator keamanan *Clearance Rate* (Persentase Penyelesaian Kejahatan) dalam Gambar 2.66, penyelesaian kejahatan di Provinsi Papua relatif lebih baik dibandingkan tingkat nasional, terutama pada tahun 2016, persentasenya dapat meningkat dan lebih tinggi dibandingkan secara nasional yaitu 63,62%, dengan rata-rata kenaikan sekitar 3,68% per tahun selama periode 2013-2016. Fenomena ini mengindikasikan bahwa tingkat keamanan di Provinsi Papua setiap tahunnya semakin membaik, yang mana hal ini merupakan hasil kesigapan POLRI bersama pemerintahan daerah dalam menangani atau menyelesaikan kejahatan yang selama ini terjadi di wilayah Papua.

2.1.4.8. Daya Saing Investasi

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang merupakan rasio antara tambahan output dengan tambahan modal dapat dijadikan suatu indikator penentu keberhasilan dalam meningkatkan daya saing investasi. Dengan adanya indikator ini, para penyusun rencana pembangunan ekonomi bisa mengetahui berapa investasi yang diperlukan agar ekonomi tumbuh sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pakar ekonomi biasanya menggunakan nilai ICOR moderat antara 2 – 4 poin sebagai indikasi iklim investasi di suatu wilayah dalam kondisi yang menguntungkan.

Gambar 2.67 Daya Saing Investasi Berdasarkan ICOR Tahun 2014 dan 2017

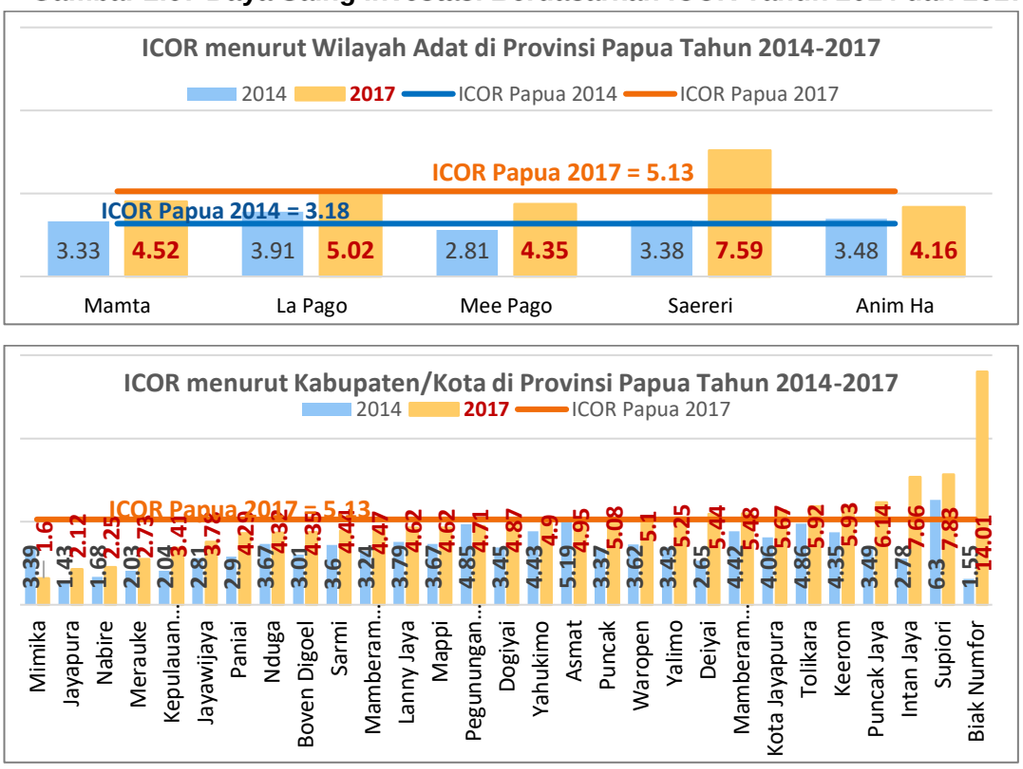

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Sebagian besar pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua belum mampu menciptakan dan mempertahankan iklim investasi yang dapat menguntungkan investor. Fakta ini terekam pada nilai ICOR di setiap daerah yang cenderung lebih besar dari 4 poin, dan mengalami kenaikan rata-rata dalam interval 0,15% - 14% per tahun selama periode 2013-2017. Sehingga secara keseluruhan ICOR Provinsi Papua sebesar 5,13 pada tahun 2017, dan mengalami kenaikan sekitar 0,25% per tahun jika dibandingkan tahun 2014. ICOR sebesar 5,13 mempunyai arti bahwa untuk mencipatakan nilai PDRB sebesar 1 rupiah diperlukan tambahan investasi sebesar 5,13 rupiah.

Dalam konteks kewilayahan, dapat katakan bahwa wilayah adat yang dapat memberikan keuntungan lebih baik bagi para investor adalah wilayah adat Anim Ha. Karena secara rata-rata ICOR untuk wilayah Anim Ha paling rendah, dan mendekati batas tertinggi ICOR moderat yakni sebesar 4,16 poin. Sementara untuk wilayah adat lainnya terlihat belum menguntungkan, terutama di wilayah adat Saireri dan La Pago masing-masing sebesar 7,59 poin dan 5,02 poin. Adapun untuk kabupaten/kota secara terpisah, teridentifikasi 6 kabupaten yang terlihat lebih menguntungkan para investor untuk

berinvestasi yakni Kabupaten Jayawijaya dengan ICOR sebesar 3.78 poin, Kepulauan Yapen sebesar 3.41 poin, Merauke sebesar 2.73 poin, Nabire sebesar 2.25 poin, Jayapura sebesar sebesar 2.12 poin, dan yang paling rendah Mimika sebesar 1.60 poin.

2.1.5. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan aspek krusial dalam pencapaian kesejahtaeraan masyarakat. Pemerintah daerah melalui berbagai bentuk pelayanan umum memegang peranan penting dalam menentukan tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan pembangunan daerah. Dalam hal ini kewajiban pemerintah daerah adalah menyelenggarakan aspek pelayanan umum yang dimaksud berfokus pada: (1) layanan urusan pemerintahan wajib palayanan dasar, (2) urusan pemerintahan wajib bukan palayanan dasar, dan (3) urusan pemerintahan pilihan. Oleh karena itu deskripsi mengenai kondisi pelayanan umum terkini perlu dilakukan untuk menunjukkan permasalahan dan potensi penyelenggaraan pelayananan umum dalam kontribusinya mencapai tujuan pembangunan.

2.1.5.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

Layanan urusan pemerintahan ini sebenarnya hanya meliputi enam urusan, namun keseluruhannya wajib diselenggarakan dengan baik demi memenuhi hak masyarakat yang paling mendasar. Layanan ini difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan, serta jaminan kehidupan sosial yang baik.

2.1.5.1.1. Pendidikan

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk suatu daerah merupakan asset yang potensial dalam upaya pengembangan daya saing daerah dalam berbagai aspek pembangunan. Kualitas penduduk suatu daerah merupakan penentu utama dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan. Namun asset tersebut membutuhkan perhatian khusus, jika potensi tersebut tidak dikekola dengan baik, sebaliknya justru akan menjadi beban suatu daerah dalam mencapai tujuan pembangunan. Oleh karena itu, potensi sumber daya manusia yang besar di Provinsi Papua harus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas secara sistematis salah satunya melalui pendidikan.

1) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Dengan demikian APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

Gambar 2.68 Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Papua

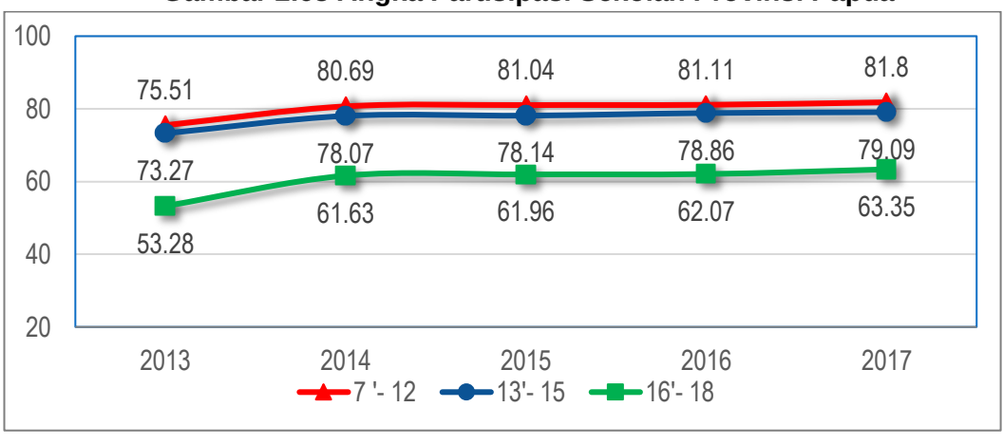

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Papua terlihat mengalami perkembangan yang cukup berarti sepanjang tahun 2013-2017, walaupun dalam perjalanannya sempat turun. Angka partisipasi sekolah Provinsi Papua, memang belum mencapai angka yang ideal, terlihat dari akses penduduk terhadap fasilitas pendidikan 2013 untuk usia 7-12 tahun tercatat 75,514% artinya masih terdapat 24,49% penduduk usia 7-12 yang tidak bersekolah. Tahun 2017, terlihat ada perkembangan positip untuk usia 7-12 tahun angka partisipasi sekolah meningkat menjadi 81,80%. Demikian juga untuk usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun terlihat ada perkembangan angka partisipasi sekolah namun angkanya lebih rendah dari penduduk usia 7-12 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat penduduk usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi.

Angka Partisipasi Kasar provinsi Papua pada setiap jenjang pendidikan terlihat bervariasi. APK jenjang pendidikan Sekolah Dasar sepanjang tahun 2013-2017 terlihat mengalami peningkatan, dengan rata-rata mencapai 91.98%. Kemudian jenjang pendidikan SMP dan SMA juga terlihat meningkat setiap tahunnya, dengan masing-masing

mencapai rata-rata SMP (72.77%) dan SMA/SMK (63.35%), namun untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA/SMK terlihat jauh lebih rendah yaitu sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar 82.2% dan 67.94%. Kondisi ini merefleksikan bahwa daya serap penduduk usia sekolah memanfaatkan fasilitas pendidikan di setiap jenjang pendidikan tanpa melihat batas usia di provinsi Papua masih rendah.

Gambar 2.69 Angka Partisipasi Pendidikan di Provinsi Papua

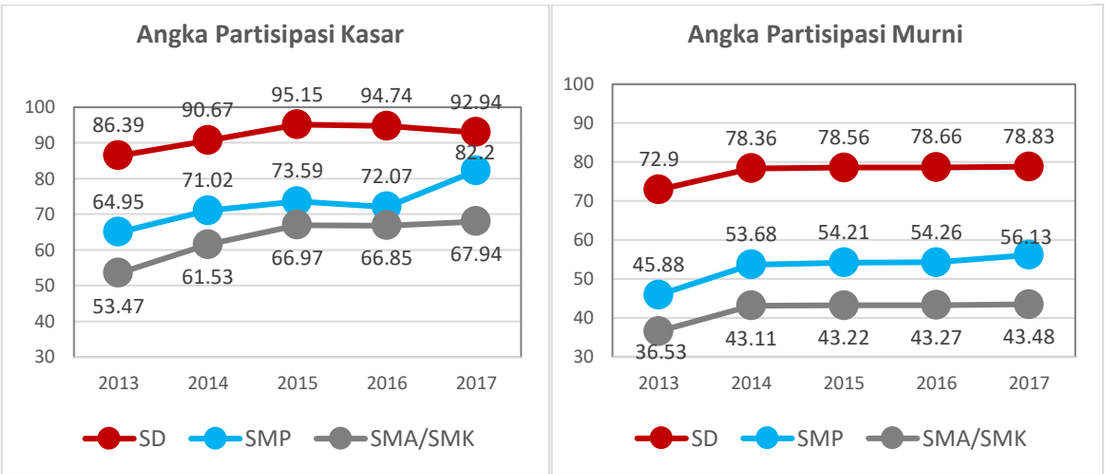

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Selain itu, Angka Partisipasi Murni (APM) yang menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya di provinsi Papua terlihat semakin meningkat angkanya tetapi belum mencapai hasil yang memuaskan. Bisa jadi disebabkan karena ada yang *drop out* atau masih berada di jenjang SMP. Terlihat angka partisipasi murni untuk jenjang pendidikan SD sebesar 72.9% tahun 2013, meningkat menjadi 78,36% pada tahun 2014 dan sampai dengan tahun 2017 meningkat lagi sebesar 78.83%. Angka partisipasi murni ditingkat SMP dan SMA/SMK sampai dengan tahun 2017 juga meningkat masing-masing sebesar 56.13% dan 43.48. meskipun demikian nilai rata-rata capaian APM setiap jenjang pendidikan SD masih mendominasi jika dibandingkat tingkat SMP dan SMA/SMK. Hal ini mengidikasikan bahwa masih rendahnya proporsi penduduk usia sekolah di Provinsi Papua yang sekolah tepat waktu atau sesuai dengan jenjang pendidikan ideal. Masih ada ketimpangan penduduk yang cukup tinggi terhadap akses pendidikan.

Tabel 2.22 Angka Partisipasi Pendidikan di Kabupaten/Kota Tahun 2017

Kabupaten/Kota	7 - 12		13 - 15		16 - 18	
	APK	APM	APK	APM	APK	APM
Merauke	116.99	95.65	94.2	68.2	91.07	67.13
Jayawijaya	97.4	88.09	98.09	71.2	103.4	70.67
Jayapura	110.55	93.94	100.54	71.57	131.83	68.06
Nabire	105.17	89.72	92.18	68.12	92.02	60.89
Kepulauan Yapen	108.91	93.97	94.08	65.55	87.91	56.23
Biak Numfor	115.9	91.64	104.38	71.13	106.17	64.59
Paniai	86.07	72.52	94.08	55.99	39.4	22.73
Puncak Jaya	89.13	73.69	55.89	28.46	47.62	18.18
Mimika	104.14	91.87	125.32	73.15	119.56	68.98
Boven Digoel	100.2	83.48	106.19	67.65	58.96	29.84
Mappi	119.11	85.68	57.44	35.96	26.39	15.16
Asmat	100.35	81.34	58.23	36.45	41.42	18.11
Yahukimo	77.56	60.4	47.98	22.73	28.44	16.03
Pegunungan Bintang	86.86	67.28	53.04	28.24	42.59	26.28
Tolikara	62.87	60.46	73.33	50.85	48.66	32.09
Sarmi	111.46	93.78	93.2	75.79	71.37	48.83
Keerom	101.89	87.68	95.5	69.54	81.1	62.88
Waropen	110.33	91.29	78.19	69.41	109.41	64.97
Supiori	110.56	94.25	101.86	66.32	86.88	57.24
Mamberamo Raya	112.15	97.6	69.17	52.65	54.43	49.38
Nduga	66.45	56.95	47.77	30.67	12.69	6.46
Lanny Jaya	72.87	68.85	87.48	67.74	51.56	43.67
Mamberamo Tengah	88.13	85.85	71.03	70.31	79.18	59.91
Yalimo	91.77	83.34	78.46	53.32	42.4	30.14
Puncak	58.82	48.88	35.71	18.76	19.04	12.41
Dogiyai	102.49	84.24	81.59	64.45	49.06	40.7
Intan Jaya	74.73	61.74	40.84	12.61	25.31	12.01
Deiyai	81.26	59.51	53.91	41.42	45.96	39.86
Kota Jayapura	105.23	93.28	108.69	80.85	105.25	62.75
Papua	92.94	78.83	82.2	56.13	67.94	43.48

Sumber: Indikator Pendidikan Provinsi Papua, 2014-2017

Jika dilihat antar kabupaten/kota, sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 2.22 di atas, terlihat masih terdapat kesenjangan Angka Partisipasi Murni (APM) dan dan Angka Partispasi Kasar (APK) pada semua jenjang pendidikan antar wilayah pembangunan. APK tertinggi untuk jenjang pendidikan SD/MI, diduduki oleh Kabupaten Mappi dengan angka 119.11% kemudian diikuti Kabupaten Merauke sebesar 116.99%, Kabupaten Biak Numfor sebesar 115.9% dan seterusnya.

Sedangkan terdapat 13 Kabupaten/Kota yang memiliki nilai APK di bawah 100% di antaranya adalah Kabupaten Jayawijaya, Yalimo, Puncak Jaya, Mamberamo Tengah, Pegunungan Bintang, Paniai, Deiyai, Yahukimo, Intan Jaya, Lanny Jaya, Nduga, Tolikara dan Puncak. Selain itu, APM tertinggi untuk jenjang pendidikan SD/MI adalah Kabupaten Mamberamo Raya yaitu sebesar 97.6%, kemudian diikuti Kabupaten Merauke dan Supiori masing-masing sebesar 95.65% dan 94.25%. tedapat juga daerah dengan capaian APM terendah di antaranya adalah Kabupaten Deiyai (59.51%), Nduga (56.95%) dan Puncak (48.88).

Terlihat selisih antara APK dan APM pada masing-masing kabupaten. Oleh karena APM menunjukan anak usia sekolah yang bersekolah tepat waktu maka bila semuanya bersekolah tepat waktu maka nilainya mencapai 100. Biasanya angka APM akan lebih rendah dari APK dikarenakan nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang yang bersangkutan. Jadi selisih antara APK dan APM menggambarkan proporsi murid yang terlambat sekolah atau terlalu cepat sekolah.

APK dan APM untuk jenjang SMP/MTS yang tertinggi di Kabupaten Mimika, yang terlihat mencolok dibandingkan daerah kabupaten lainnya di Provinsi Papua. APK dan APM Kabupaten Mimika memiliki nilai masing-masing 125.32% dan 73.15% sedangkan kabupaten Puncak memiliki APK dan APM terendah dengan nilai masing-masing 35.71% dan 18.76%. Pada jenjang SMA/SMK/MA angka partisipasi kasar tertinggi diduduki oleh kabupaten Jayapura dengan angka sebesar 131.83% dan angka partisipasi murni tertinggi diduduki oleh kabupaten Jayawijaya dengan nilai mencapai 70.67%. Sedangkan kabupaten dengan APK dan APM terendah yaitu kabupaten Nduga dengan nilai 12.69% dan 6.46%.

Berdasarkan APK dan APM per wilayah kabupaten/kota, terlihat jelas bahwa Provinsi Papua selama ini mengalami ketimpangan *with in* dan *with out* dalam pembangunan pendidikan. Dikatakan ketimpangan *with in* karena sebagian besar daerah di Papua mempunyai angka APM yang rendah, bahkan diantaranya ada yang dibawah 50, terutama untuk jenjang pendidikan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA, seperti Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Mamberamo

Raya. Dimana kondisi ini disebabkan rasio murid baik itu terhadap sekolah maupun guru masih banyak yang berada di bawah standar nasional. Sedangkan dikatakan *with out* karena ketimpangan pembangunan pendidikan juga terjadi antarwilayah, terutama ketimpangan dalam distribusi guru. Semua faktor ini akhirnya mengakibatkan Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Papua masih belum bisa mencapai program nasional wajib belajar sembilan tahun.

2) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah (APTS) paling tinggi di Provinsi Papua Tahun 2017 adalah APTS SMP yaitu sebesar 1,21% atau sebanyak 1.532 orang, kemudian diikuti APTS SMP sebesar 0,93% atau sebesar 866 orang dan yang paling rendah adalah APTS SD yaitu sebesar 0,56% atau sebanyak 2.521 orang. Jika dilihat berdasarkan kewilayahan APTS per jenjang pendidikan SD di Provinsi Papua, terlihat paling tinggi berada di Kabupaten Mamberamo Raya sebesar 6,06%, Pegunungan Bintang sebesar 2,76%, Lanny Jaya sebesar 2,98%, Membramo Tengah yaitu sebesar 1,91 persen dan Puncak sebesar 1,68 persen. Dari hasil tersebut jika dipetakan dalam wilayah adat maka ada terdapat 2 wilayah yang menjadi sebaran APTS tertinggi yaitu Mamta dan La Pago.

Tabel 2.23 Angka Putus Sekolah (APS) Tahun 2017

Wilayah Adat	Kabupaten/Kota	SD			SMP			SMA/ SMK		
		Siswa	Putus Sekolah	APTS	Siswa	Putus Sekolah	APTS	Siswa	Putus Sekolah	APTS
Mamta	Jayapura	20.068	69	0,34	8.456	92	1,09	7.196	12	0,17
	Sarmi	6.603	43	0,65	2.347	22	0,94	1.571	2	0,13
	Keerom	8.453	40	0,47	2.469	25	1,01	1.954	10	0,51
	Memberamo Raya	6.959	422	6,06	1.617	30	1,86	593	29	4,89
	Kota Jayapura	30.984	70	0,23	13.733	29	0,21	9.966	71	0,71
La Pago	Jaya Wijaya	25.428	48	0,19	7.385	160	2,17	6.570	164	2,50
	Puncak Jaya	4.501	25	0,56	1.001	-	0,00	809	9	1,11
	Yahukimo	43.249	75	0,17	5.451	24	0,44	1.663	23	1,38
	Pegunungan Bintang	871	24	2,76	212	11	5,19	658	5	0,76
	Tolikara	1.607	-	0,00	3.638	8	0,22	1.094	-	0,00
	Nduga	5.069	14	0,28	570	14	2,46	148	-	0,00
	Lanny Jaya	15.341	457	2,98	3.995	239	5,98	1.888	36	1,91
	Membramo Tengah	4.825	92	1,91	834	29	3,48	334	2	0,60
	Yalimo	7.769	45	0,58	2.611	1	0,04	801	19	2,37
	Puncak	3.698	62	1,68	868	2	0,23	332	-	0,00

Wilayah Adat	Kabupaten/Kota	SD			SMP			SMA/ SMK		
		Siswa	Putus Sekolah	APTS	Siswa	Putus Sekolah	APTS	Siswa	Putus Sekolah	APTS
Mee Pago	Nabire	22.493	103	0,46	8.305	54	0,65	7.525	93	1,24
	Paniai	21.003	34	0,16	3.944	441	11,18	1.070	3	0,28
	Mimika	35.441	75	0,21	11.479	14	0,12	8.622	80	0,93
	Dogiyai	17.011	99	0,58	1.996	2	0,10	884	-	0,00
	Deiyai	7.086	41	0,58	1.562	24	1,54	924	5	0,54
	Intan Jaya	4.486	14	0,31	659	2	0,30	50	13	26,00
Saereri	Biak Numfor	23.286	16	0,07	9.674	28	0,29	7.825	39	0,50
	Kepulauan Yapen	15.021	68	0,45	5.953	38	0,64	3.651	92	2,52
	Waropen	4.492	12	0,27	1.705	9	0,53	1.168	27	2,31
	Supiori	4.093	3	0,07	1.594	9	0,56	1.261	8	0,63
Anim Ha	Merauke	30.573	101	0,33	1.163	122	10,49	675	104	15,41
	Boven Digoel	11.781	25	0,21	3.144	12	0,38	1.922	2	0,10
	Mappi	25.298	389	1,54	5.144	75	1,46	3.180	13	0,41
	Asmat	18.692	55	0,29	2.593	16	0,62	1.261	5	0,40
Papua		**448.483**	**2.521**	**0,56**	**126.477**	**1.532**	**1,21**	**93.127**	**866**	**0,93**

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2014-2017 (data diolah)

Kemudian, APTS SMP untuk jenjang pendidikan SMP tercatat paling tinggi terdapat di Kabupaten Paniai (11,18%), Merauke (10,49%), Pegunungan Bintang (5,19%), Lanny Jaya (5,98%) dan Mamberamo Tengah (3,48%). Adapun masing-masing kabupaten tersebut tersebar di beberapa wilayah adat aitu Mee Pago, Anim Ha dan La Pago. Selain itu, pada jenjang pendidikan menengah jika dilihat menurut kewilayahan Kabupaten Intan Jaya (Mee Pago) memiliki nilai APTS tertinggi bahkan di atas 20%. Kemudian diikuti dengan Kabupaten Merauke (Anim Ha) sebesar 15,41%, Mamberamo Raya (Mamta) sebesar 4,89% dan kabupaten lainnya yang berada di bawah 3%.

3) Angka Melanjutkan Sekolah

Melanjutkan dari APTS di atas, angka melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan SMP dan SMA/SMK terlihat cukup baik, namun perlu ditingkatkan lebih optimal lagi. Dari data yang tersaji di bawah ini tercatat sepanjang tahun 2015-2017 angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP terlihat sudah cukup baik dan cenderung terjadi peningkatan setiap tahunnya, sampai dengan tahun 2017 angka melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan SMP sebesar 86,17% yang pada tahun sebelumnya sebesar 83,33% (2016).

Tabel 2.24 Angka Melanjutkan SD ke SMP dan SMP ke SMA/SMK

URAIAN	2015	2016	2017
Lulusan SD	52.658	48.828	54.891
Siswa Baru SMP	39.550	40.690	42.685
ANGKA MELANJUTKAN SD KE SMP	75,11	83,33	86,17
Lulusan SMP	30.881	33.792	36.480
Siswa Baru SMA/SMK	26.503	31.054	32.295
ANGKA MELANJUTKAN SMP KE SMA/SMK	85,82	91,9	88,53

Sumber: Indikator Pendidikan Provinsi Papua, 2014-2017

Selanjutnya jika dilihat berdasarkan angka melanjutkan sekolah SMP ke SMA/SMK terlihat mengalami flkutuatif, namun cenderung meningkat. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2016-2017 sebesar 3%, namun secara keseluruhan masih terlihat cukup baik dalam rentan waktu tiga tahun terakhir.

4) Perkembangan Fasilitas Pendidikan

Berdasarkan Tabel 2.25 di bawah ini, terlihat bahwa jumlah sekolah jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK di Provinsi Papua terjadi peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan peningkatan jumlah sekolah bernilai positif. Artinya, penambahan sekolah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang cenderung semakin melek terhadap pendidikan. Sedangkan pada pendidikan sekolah dasar sepanjang tahun 2013-2017 terlihat cenderung berkurang sampai dengan tahun 2017 (lihat Tabel 2.25).

Tabel 2.25 Jumlah Gedung Sekolah Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (unit)

Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
Sekolah Dasar	2.829	2.982	2.415	2.277	2.474
Sekolah Menengah Pertama	540	582	582	587	645
Sekolah Menengah Atas	197	202	212	211	225
Sekolah Menengah Kejuruan	93	94	117	130	131
Jumlah	3.659	3.860	3.326	3.205	

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018

Secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan perkembangan jumlah sekolah di Provinsi Papua selama lima tahun terakhir terlihat semakin menurun (bernilai negatif). Adapun Menurunnya jumlah sekolah yang paling dominan adalah sekolah dasar yaitu pada tahun 2013 adalah sebanyak 2.829 unit dan terus menurun hingga tahun 2017 berjumlah 2.474 unit.

Persebaran sekolah baik pada semua jenjang pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan di setiap daerah di Provinsi Papua. Jika dicermati pada 0, tercatat sangat bervariasi jumlah sekolah di masing-masing daerah di Provinsi Papua. Distribusi sekolah dasar di Provinsi Papua jika diperhatikan paling banyak terdapat di Kabupaten Merauke (197 unit) dan daerah dengan jumlah sekolah dasar paling sedikit adalah Kabupaten Nduga (22 unit). Untuk jenjang pendidikan SMP, paling banyak terdapat di Kabupaten Mimika (53 unit), dan paling sedikit terdapat di Kabupaten Puncak (6 unit). Sedangkan untuk jenjang pendidikan menengah terdistribusi terbanyak ada di Kabupaten Mimika (40 Unit) dan yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Intan Jaya (1 unit).

Gambar 2.70 Jumlah Sekolah pendidikan SD, SMP dan SMA Tahun 2017

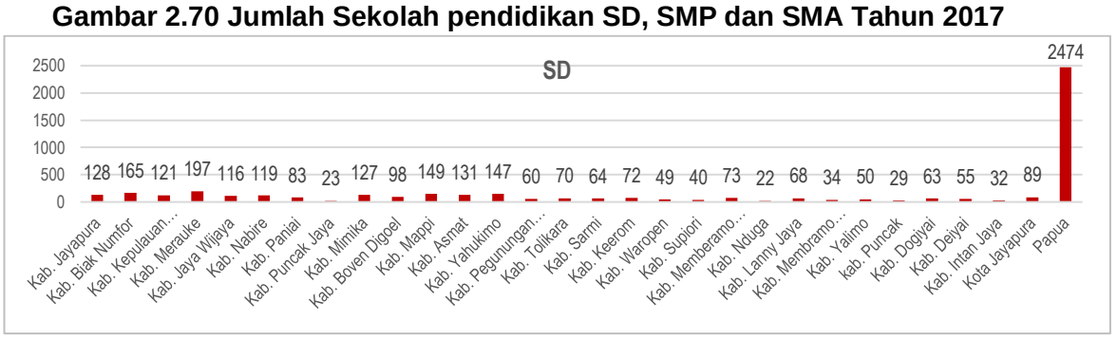

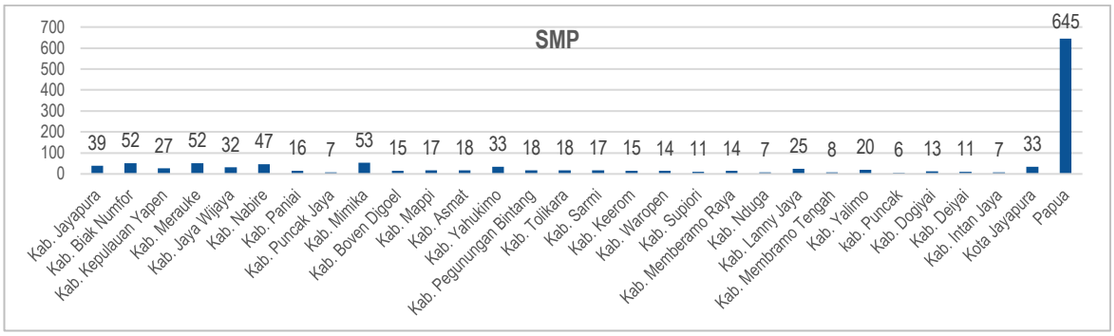

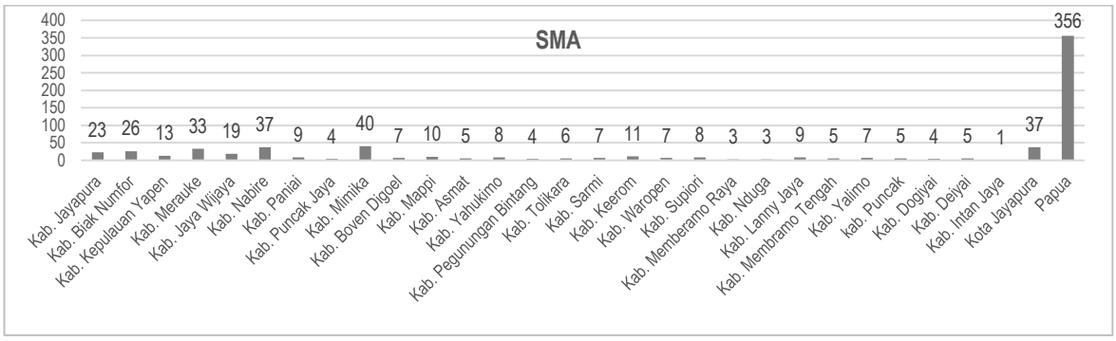

Sumber: DAPODIK 2017 (data diolah)

5) Perkembangan Guru dan Murid

Selain itu, dengan samakin banyaknya jumlah sekolah sehingga kebutuhan guru juga semakin bertambah untuk semua jenjang pendidikan. Berbeda dengan kondisi jumlah sekolah pada tabel di atas, pertumbuhan perkembangan jumlah guru terlihat mencapai angka 17,69% dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pendidikan sekolah dasar memiliki jumlah guru sampai dengan tahun 2017 mencapai 16.208 orang, kemudian untuk SMP mencapai 7.547 orang, pendidikan SMA sebesar 4.203 orang dan SMK mencapai 2.860 orang (lihat Tabel 2.27). Untuk tenaga guru di provinsi Papua, terlihat mengalami perkembangan yang pesat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 16.23 % pertahun. Rata-rata pertumbuhan tertinggi dicapai oleh tenaga guru SD yaitu sebesar 26.34 % yang diikuti oleh tenaga guru SMA (18.88%), SMP (16.12%) dan SMK (11.65%).

Tabel 2.26 Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Papua

Jenjang Pendidikan	2013 (org)	2014 (org)	2015 (org)	2016 (org)	2017 (org)	Rata² growth (%)
Sekolah Dasar	12.348	11.997	8.310	17.667	16.208	17,69
Sekolah Menengah Pertama	5.060	7.089	7.331	7.687	7.547	11,64
Sekolah Menengah Atas	2.586	3.671	3.971	4.230	4.234	14,19
Sekolah Menengah Kejuruan	2.214	3.077	2.502	2.869	2.860	8,66
Jumlah	22.208	25.834	22.114	32.453	30.849	10,93

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018

Dengan semakin meleknya masyarakat terhadap di bidang pendidikan berdampak juga terhadap penambahan jumlah murid sepanjang tahun 2013-2017. Jika dilihat pada Tabel 2.28 di bawah ini perkembangan jumlah murid per jenjang pendidikan secara keseluruhan semakin bertambah pesat, hal tersebut dpat dilihat dari nilai rata-rata pertumbuhan yang mencapai angka 3,69%. Dalam Tabel 2.27, terlihat bawah di semua jenjang pendidikan terjadi penambahan murid setiap tahunnya. Rata-rata penambahan jumlah murid paling banyak terlihat pada rata-rata pertumbuhan jenjang pendidikan SMA dan SMK yaitu masing-masing sebesar 5,95 persen dan 5,73 persen. Sedangkan jenjang pendidikan sekolah dasar dan menengah pertama masing-masing mencapai 3,07 dan 4,62 persen. Meskipun pertumbuhan sekolah dasar hanya mencapai 3,07 persen, namun dari sisi jumlah murid pendidikan sekolah dasar paling dominan jumlah muridnya yaitu mencapai 448.483 orang sampai dengan tahun 2017. Kemudian diikuti dengan SMP sebesar 126.477 orang, lalu 61.786 orang untuk SMA, serta 31.341 orang untuk SMK.

Tabel 2.27 Jumlah Murid di Provinsi Papua Tahun 2013-2017

Jenjang Pendidikan	2013 (org)	2014 (org)	2015 (org)	2016 (org)	2017 (org)	Rata2 growth (%)
Sekolah Dasar	399.444	382.292	412.187	445.243	448.483	3,07
Sekolah Menengah Pertama	106.482	101.392	115.296	123.823	126.477	4,62
Sekolah Menengah Atas	49.252	48.514	53.851	59.126	61.786	5,95
Sekolah Menengah Kejuruan	25.892	26.174	25.588	33.144	31.341	5,73
Jumlah	581.070	558.372	606.922	661.336	668.087	3,69

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018

Seiring dengan adanya peningkatan jumlah guru dan murid di Provinsi Papua pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) juga sangat berdampak terhadap ketersediaan guru dan persebarannya selama ini. Sepanjang tahun 2013-2017, terlihat bahwa rasio ketersediaan guru terhadap murid untuk pendidikan dasar rata-rata sudah sesuai dan memenuhi aturan. Sampai dengan tahun 2017 rata-rata satu orang guru dapat memberikan pelajaran hingga mencapai 24 orang untuk satu kelasnya, sedangkan ketentuan yang berlaku efektifnya satu orang guru paling banyak memberikan pelajaran yaitu sebanyak 25 orang per kelas.

Jika dilihat berdasarkan kewilayahan di Provinsi Papua, rata-rata rasio guru terhadap murid dikabupaten/kota nilainya sangat bervariasi. Rata-rata wilayah adat Mamta, Saereri dan Anim Ha memiliki rasio guru terhadap murid cukup ideal, meskipun di antara ketiganya masih terdapat daerah dengan rasio yang cukup tinggi di antaranya Mamberamo Raya, Mappi dan Asmat. Sedangkan pada wilayah adat La Pago dan Mee Pago didominasi oleh daerah yang memiliki rasio guru terhadap murid dapat dikatakan cukup tinggi, meskipun tidak semua masuk dalam kategori belum ideal. Adapun daerah dengan rasio guru terhadap murid cukup tinggi di antaranya adalah Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Nduga, Lanny Jaya, Paniai, Dogiyai dan Deiyai.

Tabel 2.28 Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Wilayah Adat	Kabupaten/kota	2014	2015	2016	2017
Provinsi Papua		23,87	21,84	22,44	24,20
Mamta	Jayapura	17,28	15,10	15,03	16,30
	Sarmi	20,79	14,10	14,18	15,27
	Keerom	13,14	13,17	13,62	14,47
	Mamberamo Raya	30,26	22,94	26,84	30,85
	Kota Jayapura	22,63	19,87	19,52	19,80
La Pago	Jayawijaya	20,51	27,81	27,26	29,97
	Puncak Jaya	15,79	26,06	25,57	26,97
	Yahukimo	48,12	59,88	60,22	62,44
	Pegunungan Bintang	8,64	23,12	33,80	46,88
	Tolikara	51,10	41,59	39,63	37,54
	Nduga	31,39	33,44	27,05	32,04
	Lanny Jaya	34,18	39,64	37,02	35,54
	Mamberamo Tengah	41,56	36,08	25,95	26,69
	Yalimo	90,25	28,15	27,05	29,57
	Puncak	20,26	21,18	20,11	23,91
Mee Pago	Nabire	21,85	16,93	17,12	17,91
	Paniai	20,16	30,10	31,84	37,51
	Mimika	26,97	19,31	19,23	20,41
	Dogiyai	43,95	30,18	35,85	39,43
	Intan Jaya	25,09	31,50	29,20	20,99
	Deiyai	34,18	14,89	17,28	31,18
Saereri	Kepulauan Yapen	22,51	18,25	19,29	21,71
	Biak Numfor	21,52	17,56	17,85	19,95
	Waropen	7,30	11,39	11,98	12,78
	Supiori	15,95	13,65	14,41	17,50
Anim Ha	Merauke	20,89	17,37	17,75	18,69
	Boven Digoel	26,64	18,19	19,00	18,89
	Mappi	39,10	29,58	29,70	32,87
	Asmat	33,26	28,17	27,68	31,58

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018

Selanjutnya, pada pendidikan menengah di Provinsi Papua dalam kurun waktu lima tahun terakhir, rasio guru terhadap murid sudah cukup ideal meskipun terbilang cukup rendah. Dalam rentan waktu lima tahun terakhir, rata-rata rasio guru terhadap murid terbilang cukup rendah, rata-rata guru dapat mengajar mencapai 12 siswa setiap tahunnya. Paling tinggi rasio guru terhadap murid yaitu pada tahun 2016 yaitu satu orang guru dapat mengajar 13 siswa.

Tabel 2.29 Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah

	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017
Provinsi Papua		11,07	12,27	13,22	13,13
Mamta	Jayapura	11,88	13,38	13,95	14,19
	Sarmi	7,90	9,88	12,63	12,77
	Keerom	5,01	8,88	9,63	10,23
	Mamberamo Raya	21,22	9,86	13,88	16,03
	Kota Jayapura	7,82	12,33	13,13	8,62
La Pago	Jayawijaya	26,61	17,49	18,82	18,35
	Puncak Jaya	11,70	13,73	16,68	15,26
	Yahukimo	9,43	13,97	11,69	12,99
	Pegunungan Bintang	6,77	7,59	10,89	11,15
	Tolikara	8,73	14,83	14,80	17,93
	Nduga	3,46	3,00	5,31	6,17
	Lanny Jaya	16,29	24,64	21,47	21,70
	Mamberamo Tengah	4,05	7,36	4,42	6,19
	Yalimo	51,89	14,08	11,54	13,35
	Puncak	3,35	5,02	4,56	6,04
Mee Pago	Nabire	16,01	12,02	12,23	10,97
	Paniai	10,68	14,51	21,57	15,63
	Mimika	13,00	10,44	12,08	10,86
	Dogiyai	7,72	11,89	11,63	10,78
	Intan Jaya	4,50	5,00	4,13	9,63
	Deiyai	11,96	5,06	7,39	9,47
Saereri	Kepulauan Yapen	9,81	15,29	15,98	16,07
	Biak Numfor	14,59	13,41	14,26	14,54
	Waropen	6,07	7,48	8,63	9,42
	Supiori	4,90	8,16	8,06	10,78
Anim Ha	Merauke	12,36	12,32	13,45	13,48
	Boven Digoel	6,98	10,20	9,76	10,22
	Mappi	16,49	15,33	18,53	16,48
	Asmat	21,67	10,63	10,41	10,60

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018

Berdasarkan data kewilayahan di Provinsi Papua sepanjang tahun 2014-2017 tercatat bahwa rata-rata sudah memenuhi peraturan yang berlaku, meskipun terlihat masih cukup rendah baik pada wilayah Mamta (12 siswa/guru), La Pago (13 siswa/guru), Mee Pago (11 siswa/guru), Saereri (11 siswa/guru) dan Anim Ha (13 siswa/guru). Untuk sebaran guru berkualifikasi pendidikan DIV dan

S1 di Provinsi Papua terbilang masih cukup rendah. Dari data pada tabel di bawah ini, terilihat untuk sekolah dasar sebarannya masih di bawah 60%, SMP sudah cukup baik berkisar antara 84-87% dan pendidikan menengah yang memiliki sebaran cukup rendah meskipun pada tahun 2016 telah mencapai 95% namun turun di tahun 2017 sebesar 60%.

Tabel 2.30 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Tahun 2017

Kabupaten/Kota	SD		SMP		SMA	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Papua	54,94	58,89	84,36	87,21	94,71	59,68
Jayapura	65,73	73,77	89,35	91,90	96,91	61,14
Sarmi	77,04	71,92	89,10	91,67	97,06	69,92
Keerom	73,98	75,96	85,57	84,95	96,81	69,11
Memberamo Raya	18,56	20,67	82,50	85,86	94,59	100,00
Kota Jayapura	79,11	83,10	91,87	93,01	96,70	55,93
Jaya Wijaya	45,92	53,89	82,26	86,82	95,33	64,80
Puncak Jaya	28,03	55,24	86,57	90,16	97,62	58,49
Yahukimo	26,25	38,70	76,97	75,00	97,67	76,56
Pegunungan Bintang	54,35	48,25	95,65	92,05	100,00	59,32
Tolikara	44,17	47,34	54,35	63,09	94,92	81,97
Nduga	34,02	41,12	52,94	62,32	84,62	75,00
Lanny Jaya	20,71	29,71	42,86	69,12	90,00	93,10
Membramo Tengah	23,40	26,35	50,88	68,75	92,31	100,00
Yalimo	28,74	43,00	56,73	68,75	92,11	61,67
Puncak	36,76	40,31	86,05	91,94	96,36	70,91
Nabire	55,00	58,84	88,26	90,28	96,29	57,00
Paniai	45,90	46,61	81,58	82,21	86,89	57,38
Mimika	69,63	72,98	92,98	94,09	94,33	38,92
Dogiyai	44,41	37,57	83,59	86,03	95,24	53,66
Deiyai	25,07	28,35	75,47	79,12	92,31	55,06
Intan Jaya	53,57	67,00	87,50	95,38	100,00	100,00
Biak Numfor	42,44	54,32	75,00	82,45	89,57	67,47
Kepulauan Yapen	58,96	60,22	85,15	86,15	95,73	64,33
Waropen	51,42	53,18	85,28	85,96	88,46	62,10
Supiori	74,81	83,71	86,78	92,31	91,06	85,47
Merauke	57,36	62,70	90,91	92,71	93,43	52,04
Boven Digoel	59,82	55,61	84,95	89,52	93,24	48,94
Mappi	34,90	34,34	86,91	84,78	97,86	68,39
Asmat	47,54	50,87	92,50	88,32	97,22	90,76

Sumber: Kemendikbud RI (2017) dan Bappeda Papua (2018)

Secara kewilayahan, pada jenjang pendidikan sekolah dasar terlihat bahwa sebaran guru berpendidikan DIV dan S1 belum merata. Sedangkan pada tingkat sekolah menengah pertama sebaran guru berpendidikan tinggi sudah cukup baik meskipun masih terdapat beberapa daerah yang sebarannya masih terbilang cukup rendah. Sedangkan, pendidikan menengah tercatat terdapat beberapa daerah dengan sebaran mencapai angka sempurna sampai tahun 2017 di

antaranya adalah Kabupaten Intan Jaya, Membramo Tengah dan Memberamo Raya. Namun masih terdapat juga daerah yang memiliki kualifikasi guru berpendidikan tinggi bahkan sangat rendah di Provinsi papua. Secara keseluruhan, sebaran kualifikasi guru berpendidikan tinggi baik pada pendidikan dasar dan menengah masih perlu diperhatikan. Rata-rata sebaran guru berpendidikan DIV dan S1 yang cukup rendah paling banyak terdapat pada daerah yang sulit akses tepatnya pada beberapa wilayah pegunungan tengah.

6) Angka Melek Huruf

Berdasarkan data yang diperoleh, angka melek huruf untuk penduduk usia > 15 tahun di Provinsi Papua cenderung meningkat setiap tahunnya, namun perlu upaya yang optimal dalam memberantas buta aksara di Provinsi Papua. Dengan rata-rata cenderung meningkat setiap tahunnya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Jika dilihat lebih jauh lagi, masih terdapat beberapa daerah dengan angka melek huruf untuk penduduk usia 15 tahun ke atas masih di bawah 50% yang kebanyakan tersebar di wilayah adata La Pago dan Mee Pago (lihat Gambar 2.71).

Gambar 2.71 Angka Melek Huruf Penduduk Usia > 15 Tahun (%)

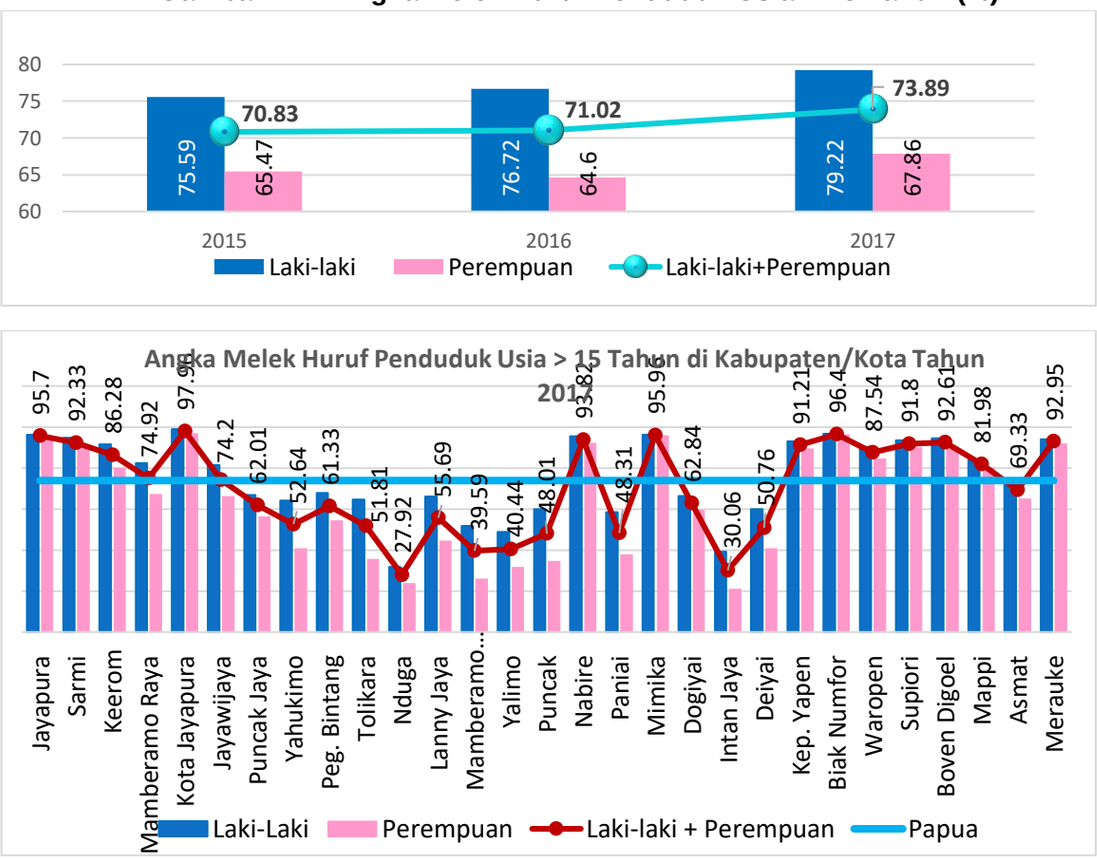

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Jika dilihat berdasarkan data kewilayahan di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2017 terdapat 13 kabupaten/kota dengan capaian > 90%. Di antaranya adalah Kabupaten Merauke, Jayapura, Sarmi, Keerom, Kota Jayapura, Lanny Jaya, Nabire, Mimika, Deiyai, Kep. Yapen, Biak Numfor, Supiori dan Boven Digoel. Sedangkan daerah lainnya masih capaiannya masih di bawah 90%. Selain itu, terdapat juga daerah dengan angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun yang capaiannya di bawah 60% yang rata-rata tersebar di wilayah adat La Pago dan Mee Pago.

2.1.5.1.2. Kesehatan

1) Angka kematian Bayi (AKB)

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Berdasarkan Gambar 2.72, diketahui bahwa Provinsi Papua memiliki kasus AKB yang cukup tinggi, namun cenderung menurun cukup pesat hingga tahun 2017. Kasus AKB yang terjadi di Provinsi Papua merupakan akumulasi dari 29 kabupaten/kota yang tersebar di 5 wilayah adat. Tercatat pada tahun 2013 kasus AKB mencapai hingga 54 kasus AKB, kemudian turun di tahun 2014 sebanyak 8 kasus namun kembali mengalami kenaikan yang cukup pesat di tahun 2015 sebesar 44 kasus. Namun dalam dua tahun terakhir kasus AKB mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 8 kasus tahun 2016 dan 7 kasus di tahun 2017.

Gambar 2.72 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

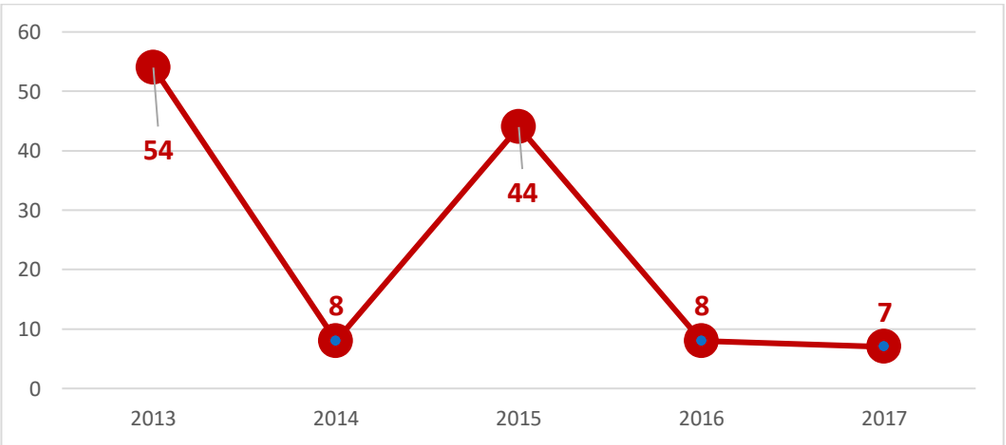

Sumber: Provinsi Papua

2) Angka Kematian Ibu (AKI)

Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll.

Gambar 2.73 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup

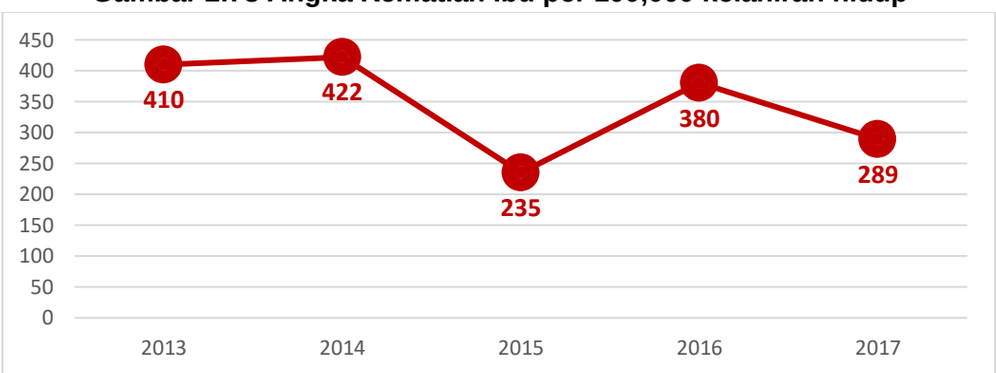

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2018 (diolah)

Kasus angka kematian ibu (AKI) Provinsi Papua per 100.000 penduduk selama ini dapat dikatakan cukup tinggi dan cenderung mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Tercatat pada tahun 2013 kasus AKI mencapai 410 kasus, sampai dengan tahun 2017 kasus AKI menurun hingga tersisa 289 kasus (lihat Gambar 2.73). Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mengurangi kasus AKI di Provinsi Papua untuk tahun-tahun yang akan datang.

Gambar 2.74 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%)

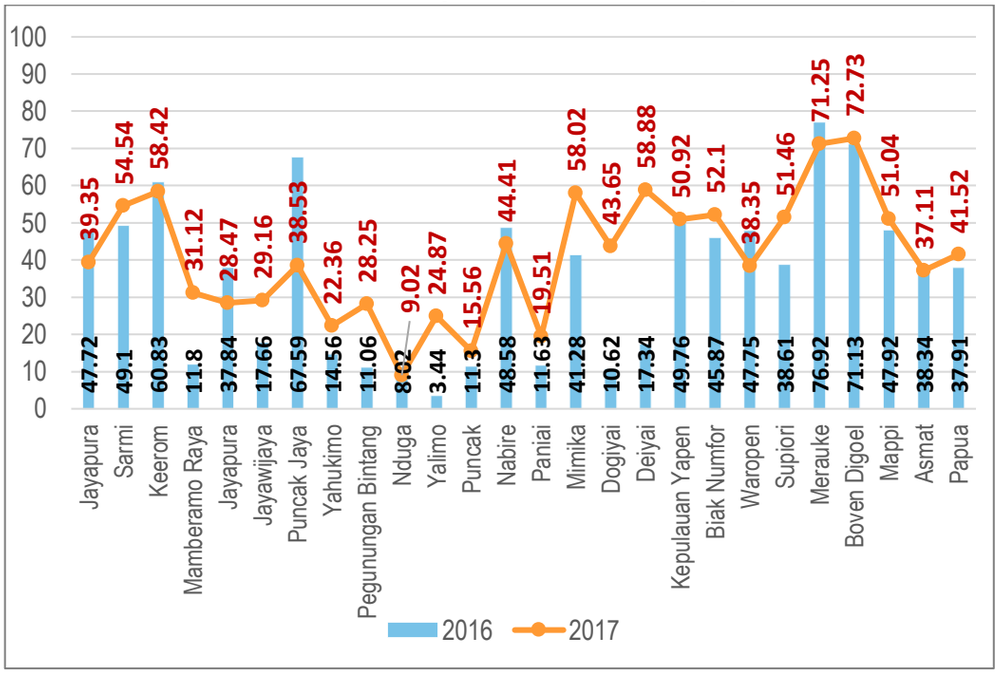

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2017 – 2018 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 2.74, diketahui bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Provinsi Papua secara keseluruhan dapat dikatakan masih cukup rendah untuk kondisi dua tahun terakhir. Capaian pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Provinsi Papua pada dua tahun berturut-turut masih di bawah 50 persen. Berdasarkan akumulasi dari 29 kabupaten/kota, cakupan pertolonah persalinan oleh tenaga kesehatan terbilang masih rendah. Adapun cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di masing-masing wilayah adat masih terbilang cukup rendah, bahkan ada beberapa daerah dengan persentase di bawah 20 persen pada kondisi di tahun 2017.

3) Fasilitas dan Layanan Kesehatan

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan menjadi hal yang mutlak untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Papua. Sampai dengan tahun 2016 cakupan puskesmas per 10.000 penduduk sebesar 16 unit untuk 10.000 penduduk di Papua. Berdasarkan pada tabel di atas, banyak terjadi perubahan-perubahan terhadap penambahan unit puskesmas di hampir semua daerah di Provinsi Papua. Hal tersebut terlihat dari selisih kondisi pada tahun 2012 dengan kodisi di tahun 2016 dan

perubahan tersebut terlihat di setiap masing-masing wilayah adat baik Mamta, Saereri, La Pago, Mee Pago maupun Anim Ha.

Gambar 2.75 Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Tahun 2016

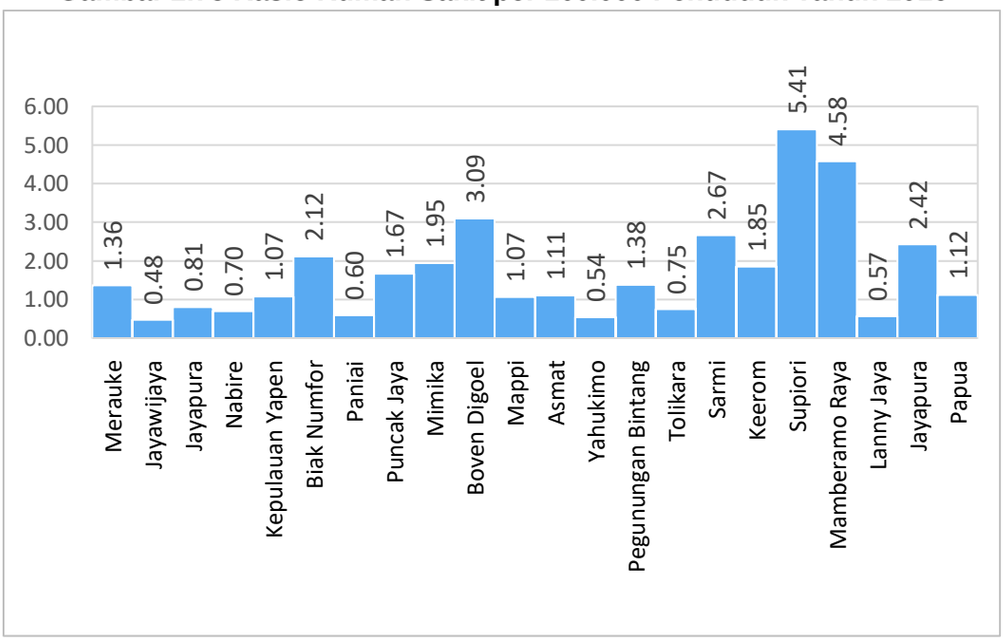

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (diolah)

Sebaran puskesmas di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2016 dapat dikatakan belum terdistribusi secara merata ke 29 kabupaten/kota. Terdapat ketimpangan distribusi ketersediaan puskesmas di 29 kabupaten/kota di Papua, khususunya di wilayah adat La Pago dan Mee Pago yang tercatat rata-rata dalam pelayanan kesehatan 10.000 penduduk adalah sebanyak 2-18 unit puskesmas saja. Meskipun tidak semua kabupaten memiliki ketersediaan puskesmas yang terbilang cukup rendah di dua wilayah adat tersebut.

Gambar 2.76 Cakupan Puskesmas per 10.000 Penduduk di Provinsi Papua

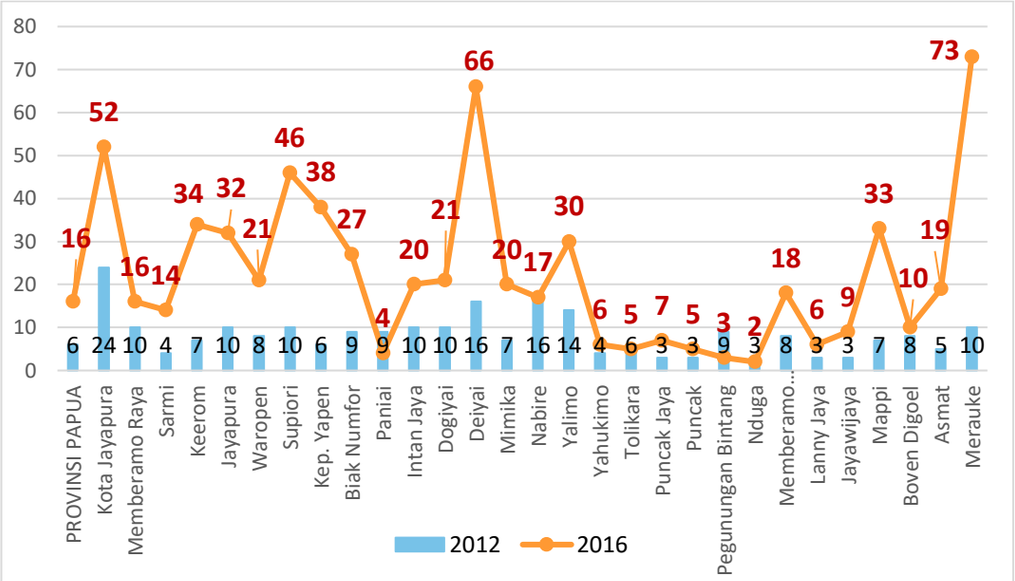

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Gambar 2.77 Rasio Dokter dan Tenaga Medis per 100.000 Penduduk

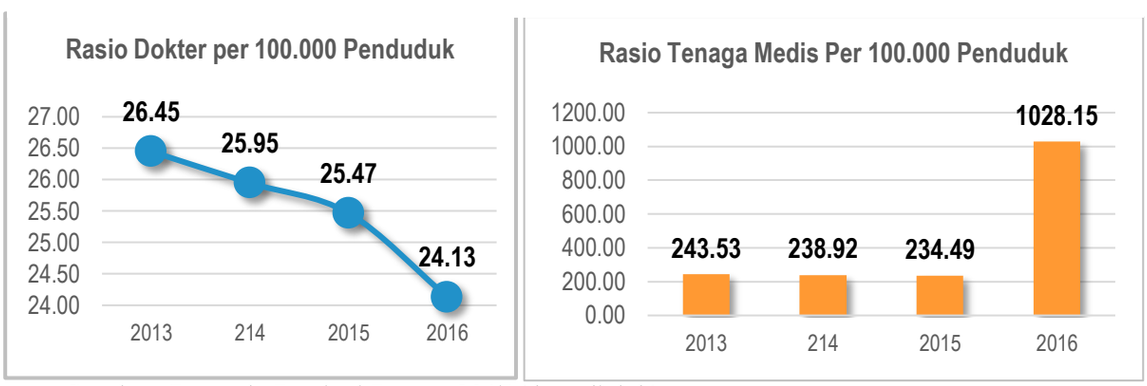

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Dari Gambar 2.77, diketahui bahwa ketersediaan tenaga dokter di Provinsi Papua terlihat memiliki tren yang terus mengalami penurunan yang tidak signifikan hingga di tahun 2016 yaitu sebesar 24,13 dokter per 100.000 penduduk di seluruh Papua. Pada tahun 2013 tercatat rasio dokter per 100.000 penduduk adalah sebesar 26 dokter per 100.000 penduduk, kemudian tahun 2014 tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan sampai dengan tahun 2016.

Ketersediaan tenaga medis juga merupakan salah satu pelengkap dari berjalannya sektor kesehatan yang optimal. Dari 081, diketahui bahwa perkembangan ketersediaan tenaga medis di Provinsi Papua terlihat terus mengalami peningkatan. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2013-2015, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2015-2016. Sampai dengan tahun 2016, rasio ketersediaan mencpai 1.028 orang untuk 100.000 penduduk.

4) Perkembangan Penanganan Penyakit Malaria

Malaria merupakan salah satu penyakit endemis di Provinsi Papua, meskipun nilainya tidak terlalu signifikan di semua wilayah di 29 kabupaten/kota di Papua. Dari gambar yang terlihat di bawah ini, situasi penyakit malaria di Provinsi Papua terbilang cukup tinggi bahkan tercatat paling tinggi pada tingkat nasional. Selain itu, penyakit malaria di Provinsi Papua cenderung meningkat sepanjang tahun 2013-2017.

Gambar 2.78 Angka Penderita Malaria di Provinsi Papua Dan Indonesia Tahun 2013-2017

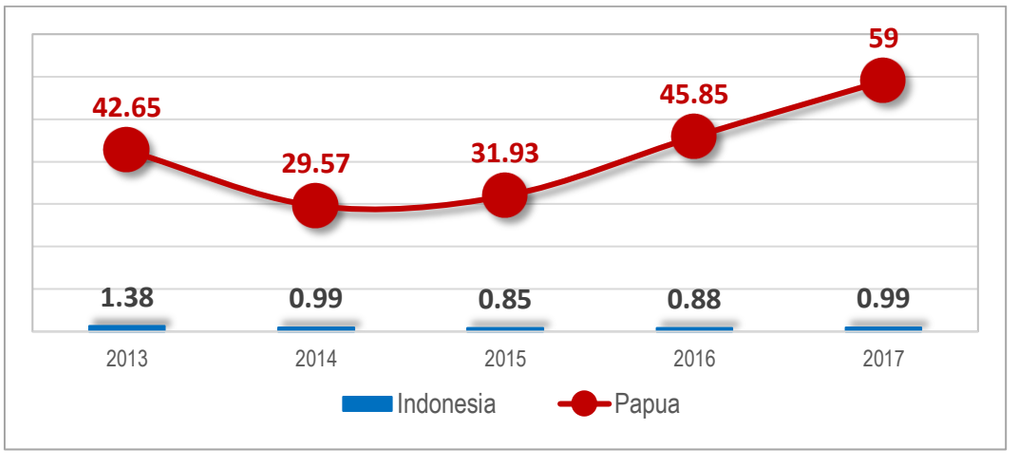

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2017
Keterangan: Annual Parasite Incidence (API) atau angka penderita malaria per 1.000 penduduk.

Pada tahun 2013 tercatat kasus penderita penyakit malaria mencapai 43 kasus per 1.000 penduduk, meskipun pada tahuan 2013-2014 sempat mengalami penurunan, namun kembali terjadi paningkatan hingga tahun 2017 yaitu sebesar 59 kasus penyakit malaria per 1.000 penduduk di Provinsi Papua. Angka Penderita Malaria tertinggi di papua terdapat pada beberapa daerah seperti Merauke, Mappi,Asmat dan Boven Digoel, Supiori, Waropen, Kepulauan Yapen, Intan Jaya, Paniai, Nabire, Deiyai, Mimika, Puncak Jaya, Yalimo Pegunungan Bintang, Yahukimo, Kota Jayapura, Jayapura, Mamberamo Raya, Keerom dan Sarmi dengan kisaran 6,60-404,65%. Sedangkan daerah dengan angka penderita malaria terendah adalah Lanny Jaya, Tolikara dan Puncak dengan kisaran API sebesar 0,23 sampai dengan 0,59%.

Gambar 2.79 Angka Penderita Malaria DI Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua Tahun 2013-2017

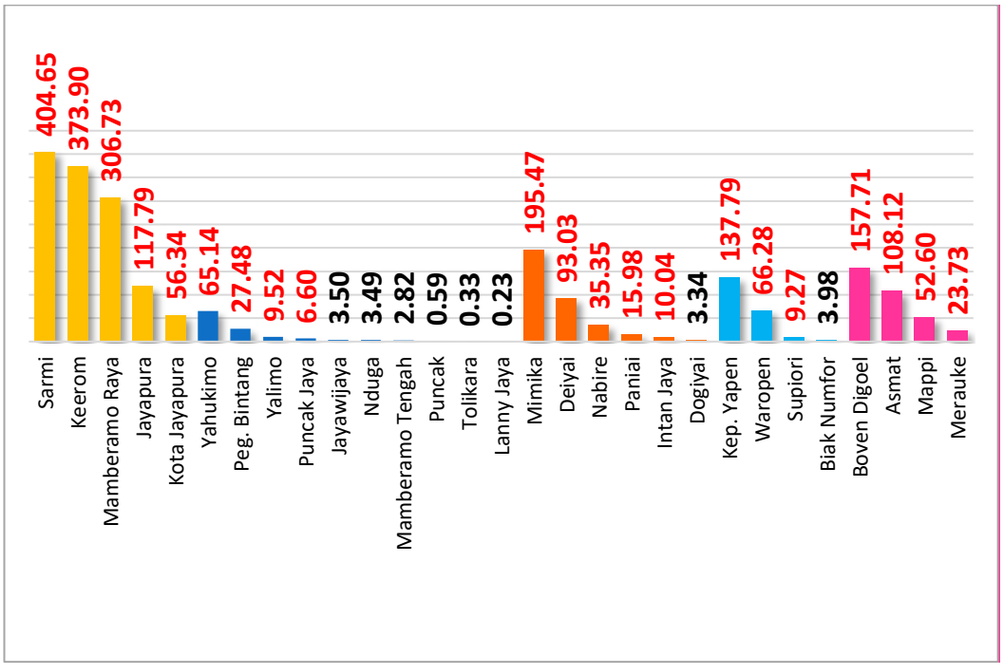

Sumber: Balai Penanggulangan dan Pengendalian AIDS, Tuberkulosis dan Malaria, Dinas Kesehatan Provinsi Papua 2018 (data diolah)

5) Perkembangan Penanganan Penyakit HIV/AIDS

Perkembangan HIV/AIDS di Provinsi Papua terlihat terus mengalami peningkatan baik penderita HIV, AIDS bahkan kasus kematian. Tercatat sampai dengan tahun 2016 triwulan ke IV terdapat 9.969 kasus pengidap HIV, 17.004 pengidap AIDS dengan 1.883 kasus kematian (lihat Gambar 2.80).

Gambar 2.80 HIV/AIDS di Provinsi Papua (orang)

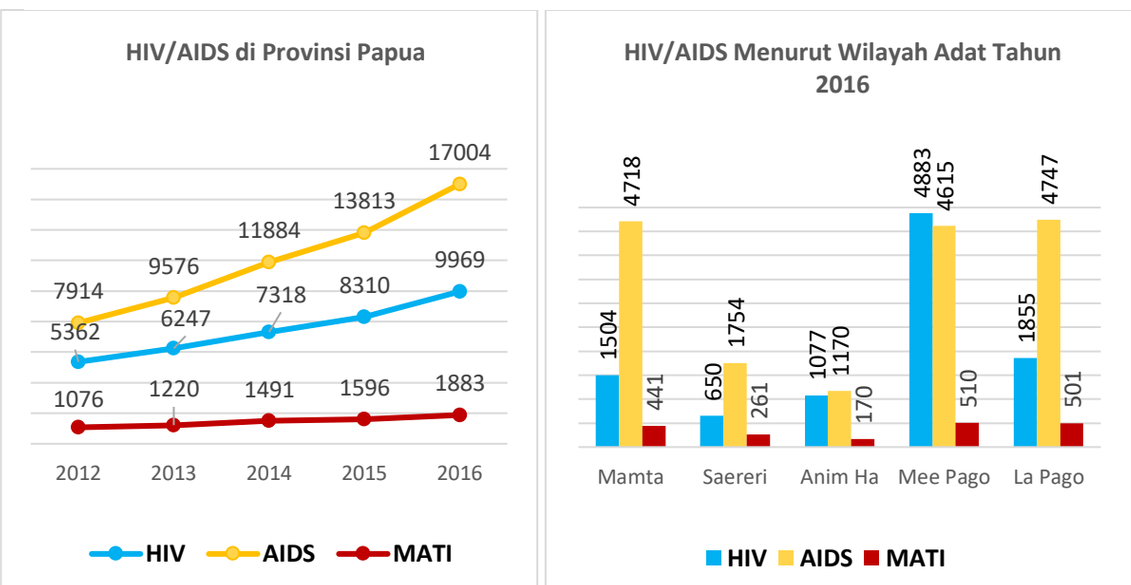

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Gambar 2.81 HIV/AIDS Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016

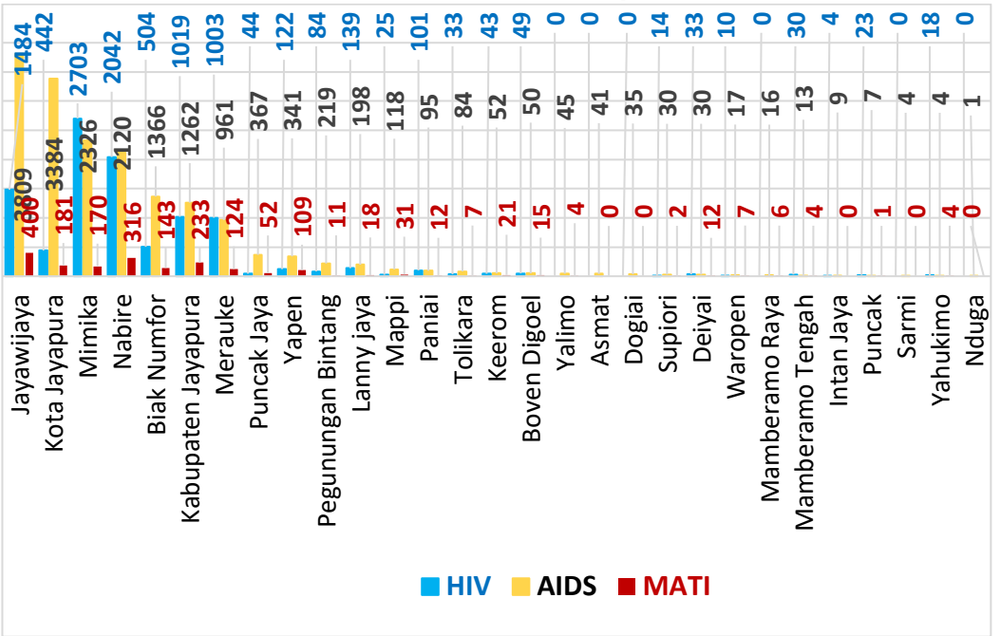

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Secara keseluruhan, kasus pengidap HIV/AIDS dan kematian atas penyakit tersebut ada tersebar di 29 kabupaten/kota dengan jumah yang bervariasi. Sedangkan daerah dengan kasus pengidap HIV terbanyak sampai dengan tahun 2016 adalah wilayah Mee Pago yaitu sebesar 9.766 kasus, kemudian pengidap AIDS terbanyak adalah wilayah La Pago adalah sebesar 9.494 kasus dan kasus kematian HIV/AIDS adalah wilayah Mee Pago adalah sebanyak 1.020 kasus.

6) Perkembangan Penanganan Ibu Hamil

Cakupan kunjungan K4 merupakan indikator penting yang dapat menggambarkan tingkat pemeriksaan yang didapatkan oleh ibu saat masa kehamilan. Untuk cakupan K4 di Provinsi Papua dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.82 Cakupan Kunjungan K4 di Provinsi Papua

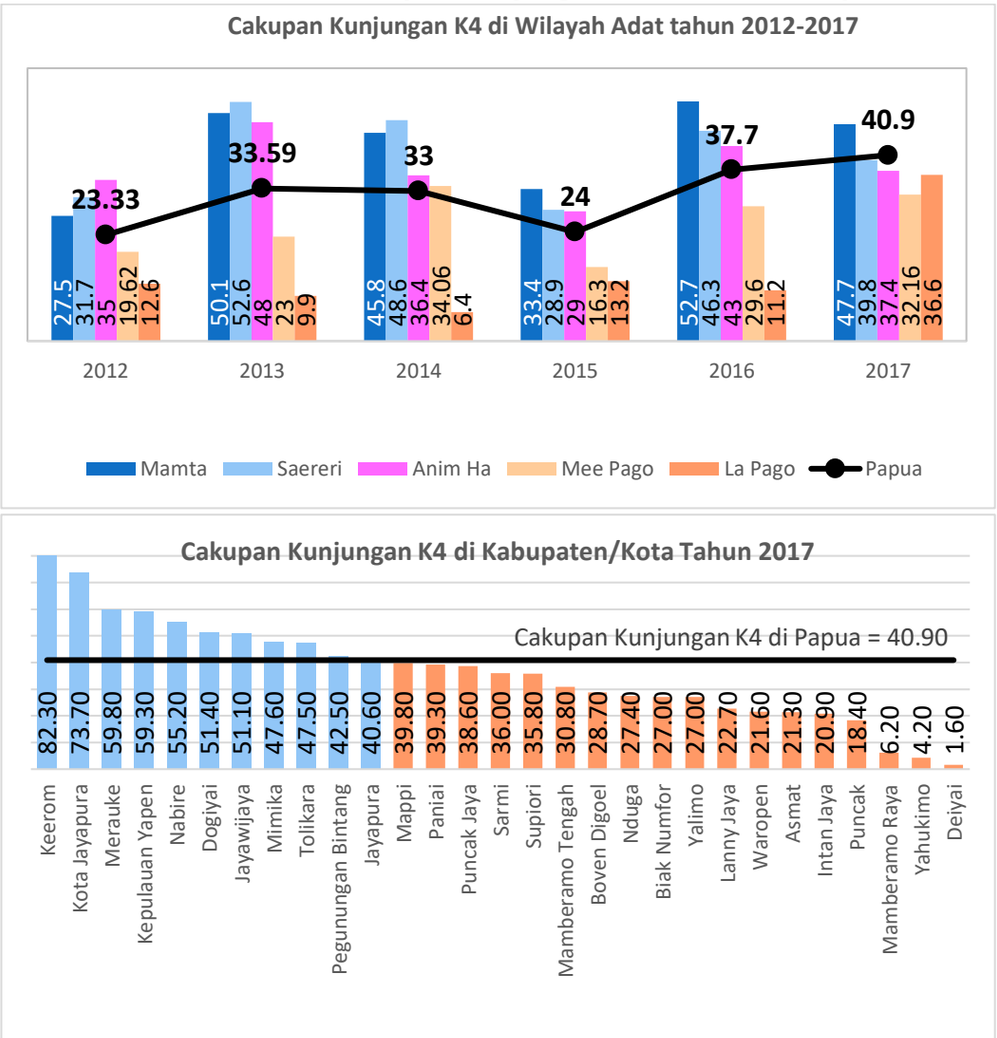

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2017

Secara umum, cakupan kunjungan K4 di Provinsi Papua mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2012-2017. Namun demikian, terdapat 4 dari 5 wilayah adat dengan rata-rata cakupan K4 di bawah rata-rata provinsi. Meskipun demikian, persebaran capaian Kunjungan K4 di Mamta sangat timpang. Capaian Kunjungan K4 tertinggi dimiliki oleh Kota Jayapura dengan persentase mencapai 73,7% pada akhir tahun 2017. Persentase tersebut sepuluh kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan persentase Kunjungan K4 di Mamberamo Raya sebagai yang terendah.

2.1.5.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Aksesibiltas dan Mobilitas Daerah

Lima kabupaten/kota dengan jalan provinsi terpanjang di Papua terdapat di Kabupaten Merauke 419,10 km (14,17%), Kabupaten Jayapura 384,10 km (12,99%), Kabupaten Kepulauan Yapen 175,01

km (5,92%), Kabupaten Biak Numfor 172 km (5,82%), dan Kabupaten Mimika 162,10 km (5,48%).

Gambar 2.83 Panjang Jalan Provinsi Menurut Jenis Permukaan Tahun 2016

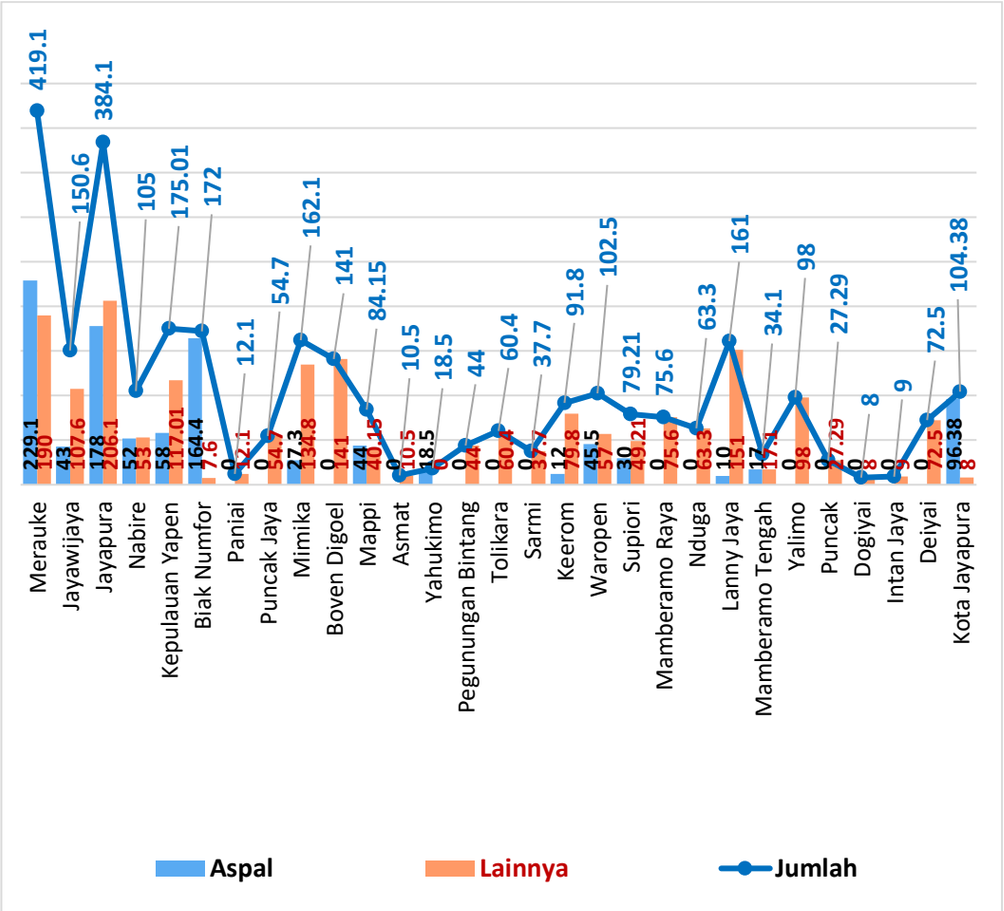

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Berdasarkan jenis permukaannya, panjang jalan di Papua yang sudah dilapisi aspal sepanjang 1.025,18 km (34,66%) dan yang belum dilapisi aspal atau jalan lainnya sepanjang 1.932,46 km (65,34%). Jalan aspal terpanjang terdapat di Kabupaten Merauke 229,10 km (22,35%), Kabupaten Jayapura 178 km (17,36%), Kabupaten Biak Numfor 164,40 km (16,04%), Kota Jayapura 96,38 km (9,40%), dan Kabupaten Kepulauan Yapen 58 km (5,66%).

Gambar 2.84 Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/kota dan Kondisi Jalan di Provinsi Papua Tahun 2016 (km)

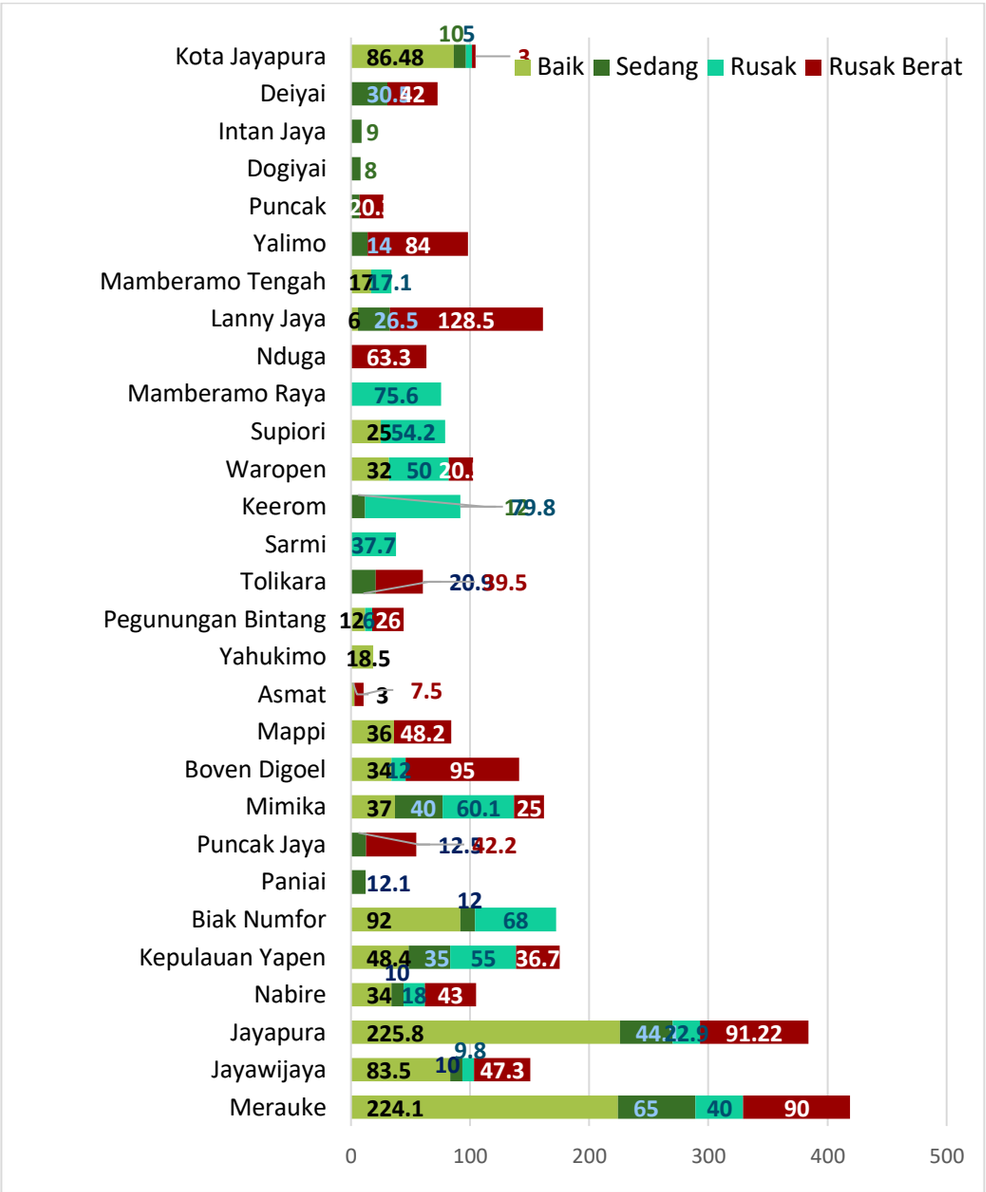

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Pada tahun 2016, sepertiga dari panjang jalan provinsi di Papua berada dalam kondisi baik yaitu sepanjang 1.014,78 km (34,31%), kondisi sedang sepanjang 378,60 km (12,80%), sisanya dengan persentase yang cukup besar (52,89%) berada dalam kondisi rusak dan rusak berat. Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Yahukimo, dan Kota Jayapura merupakan kabupaten yang kondisi jalan provinsinya sudah baik secara umum, dimana persentase panjang jalan kondisi baik lebih besar dari jalan kondisi sedang, rusak, dan rusak berat. Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Lanny Jaya, dan

Kabupaten Yalimo merupakan kabupaten yang lebih dari 75% jalannya berada dalam kondisi rusak dan rusak berat.

Dari data yang diperoleh diketahui bahwa pembangunan infrastruktur jalan selama ini belum mampu menaikan rasio mobilitas penduduk secara maksimal di Provinsi Papua. Peningkatan jalan dari tahun 2013-2016 tidak sebanding dengan penambahan jumlah penduduk, sehingga tidak dapat menaikan rasio mobilitas terutama dalam empat tahun terakhir. Rasio mobilitas tahun 2013 sebesar 0.00118 km/jiwa turun menjadi 0.00047 km/jiwa di tahun 2014 kemudian terlihat menurun lagi di tahun 2015 yaitu dari 0.00094 km/jiwa menjadi 0.00092 km/jiwa di tahun 2016 dengan rata-rata penduduk dapat mengakses jalan sebesar 0,00088 km/jiwa.

Gambar 2.85 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

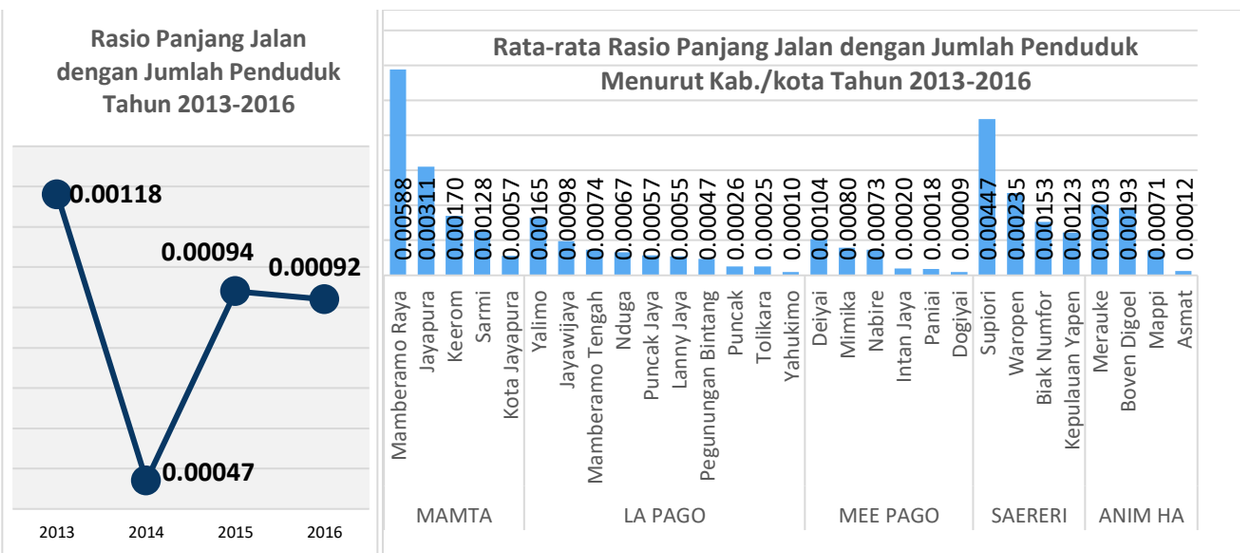

Sumber: Papua Dalam Angka 2018

Berdasarkan kabupaten/kota maka posisi pertama mobilitas penduduk terhadap panjang jalan di Papua yaitu di Kabupaten Mamberamo Raya (Mamta) dengan nilai rata-rata sebesar 0,00588 km/jiwa, selanjutnya adalah Kabupaten Supiori (Saereri) 0,00447 km/jiwa, Kabupaten Jayapura (Mamta) sebesar 0,00311 km/jiwa. Adapun daerah yang memiliki aksesibilitas penduduk paling rendah adalah Kabupaten Dogiyai (Mee Pago), Yahukimo (La Pago) dan Asmat (Anim Ha) yang masing-masing memiliki rasio mobilitas di bawah 0,00015 km/jiwa.

Gambar 2.86 Akses terhadap Sarana Pendidikan dan Kesehatan

Sumber : data diolah (2018)

Penyediakan akses yang baik diperlukan untuk membuat masyarakat di setiap distrik dapat mengakses pelayanan dasar, berupa pelayanan pendidikan dan kesehatan, yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), tempat praktik dokter, puskesmas dan rumah sakit. Berdasarkan data Podes tahun 2014, diketahui bahwa jarak rata- rata yang harus ditempuh oleh setiap desa di Provinsi Papua cukup beragam untuk setiap jenis sarananya. Rata-rata jarak untuk menempuh sarana pendidikaan berupa sekolah dasar (SD) adalah 20,12 km. Jarak ini cukuplah jauh untuk ditempuh dengan berjalan kaki. Begitu pun jarak yang harus ditempuh untuk mengakses Sekolah Menengah Atas (SMA), yaitu rata- rata 48,75 km. Berbeda dengan jarak yang harus ditempuh untuk mencapai SMP, relative lebih dekat yaitu sektiar 0,04 km. Hal ini menunjukkan bahwa akses yang ada masih perlu diperbaiki.Tidak jauh berbeda dengan sarana pendidikan, akses menuju sarana kesehatan pun harus ditempuh dengan jarak yang relative jauh. Untuk mencapai rumah sakit, jarak yang harus ditempuh dari setiap distrik rata- rata adalah sekitr 66,33 km.

Berdasarkan data yang tercantum pada tahun 2014 di dalam Potensi Desa, bukan hanya jarak yang di tempuh relatif jauh dibandingkan dengan wilayah lainnya, akan tetapi diketahui pula bahwa masih terdapat beberapa distrik yang masih belum dapat mengakses sarana pendidikan dan juga kesehatan. Terdapat 20% distrik yang masih belum memiliki akses berupa jaringan jalan yang memadai untuk mencapai SD, 31,37% yang belum memiliki akses ke SMP. Sedangkan untuk akses ke SMA, 96,1% sudah memiliki akses meskipun masih beragam jaraknya. Berbeda dengan sarana

pendidikan, distrik yang ada di Provinsi Papua sudah relative memiliki akses yang lebih baik ke sarana kesehatan. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa ternyata 96% distrik sudah memiliki akses ke tempat praktik dokter, 88,7% memiliki akses ke Puskesmas dan 96,5% sudah memiliki akses ke Rumah sakit.

Dalam meningkatkan konektivitas di daerah jembatan juga merupakan salah satu penujang utama dalam dalam memudahkan adanya aksesibilitas dan mobilisasi daerah. Berdasarkan kondisi jembatan Gambar 2.87 menunjukan jembatan dalam kondisi baik (28,45%), sedang (18,16%), rusak ringan (21,55%), rusak berat (19,58%), kritis (10,61%) dan runtuh/putus (1,64%).

Gambar 2.87 Jumlah Jembatan berdasarkan Kondisi Tahun 2016

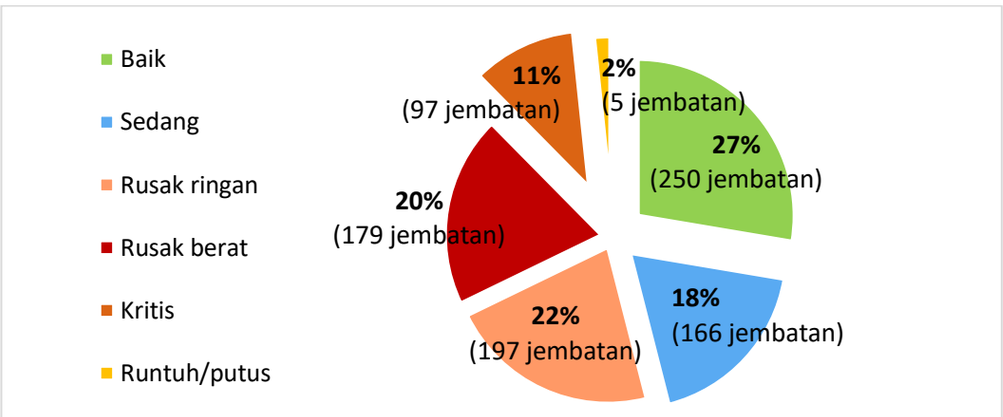

Sumber: Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, 2017 (data diolah)

2) Akses Terhadap Air Bersih dan Air Minum

Secara keseluruhan persentase penduduk berakses air bersih di Provinsi Papua selama tahun 2013-2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Yang dimaksud akses air bersih meliputi air minum yang berasal dari air mineral, air leding/PAM, pompa air, sumur, atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal. Terlihat bahwa sampai dengan tahun 2016 penduduk yang memiliki akses air bersih sebesar 38,47%, yang artinya masih terdapat 61,53% lebih penduduk yang belum memiliki akses terhadap air bersih.

Dari kewilayahan di Provinsi Papua tercatat terdapat 4 (empat) daerah dengan persentase penduduk berakses air bersih cukup tinggi di antaranya adalah Kabupaten Puncak Jaya (La Pago), Mimika (Mee Pago), Kepulauan Yapen (Saereri) dan Kota Jayapura (Mamta) yang

memiliki nilai di atas 70% (lihat Gambar 2.88). Sedangkan beberapa daerah lainnya memiliki penduduk berakses air minum masih di bawah 70%, bahkan terdapat beberapa daerah yang penduduknya berakses air bersih cukup rendah yang rata-rata didominasi oleh daerah di wilayah adat La Pago.

Selanjutnya jika dilihat pada Gambar 2.88, persentase penduduk yang berakses air minum pada tahun 2013-2016 terus mengalami peningkatan yang lebih baik, meskipun terbilang masih cukup rendah. Pada tahun 2013 tercatat penduduk yang dapat berakses air minum adalah sebesar 24,75%, kemudian meningkat sampai dengan tahun 2017 sebesar 28,34%. Dari 29 kabupaten/kota terdapat beberapa daerah yang persentase penduduk berakses air minum cukup tinggi di ataranya adalah Kota Jayapura (Mamta) dan Kabupaten Mimika (Mee Pago) yaitu masing-masing sebesar 89,85 dan 90,12%. Sedangkan daerah lain khususnya di wilayah La Pago memiliki persentase akses air minum bisa dibilang sangat rendah dan beberapa terdapat di daerah Mee Pago.

Gambar 2.88 Penduduk Berakses Air Bersih di Provinsi Papua

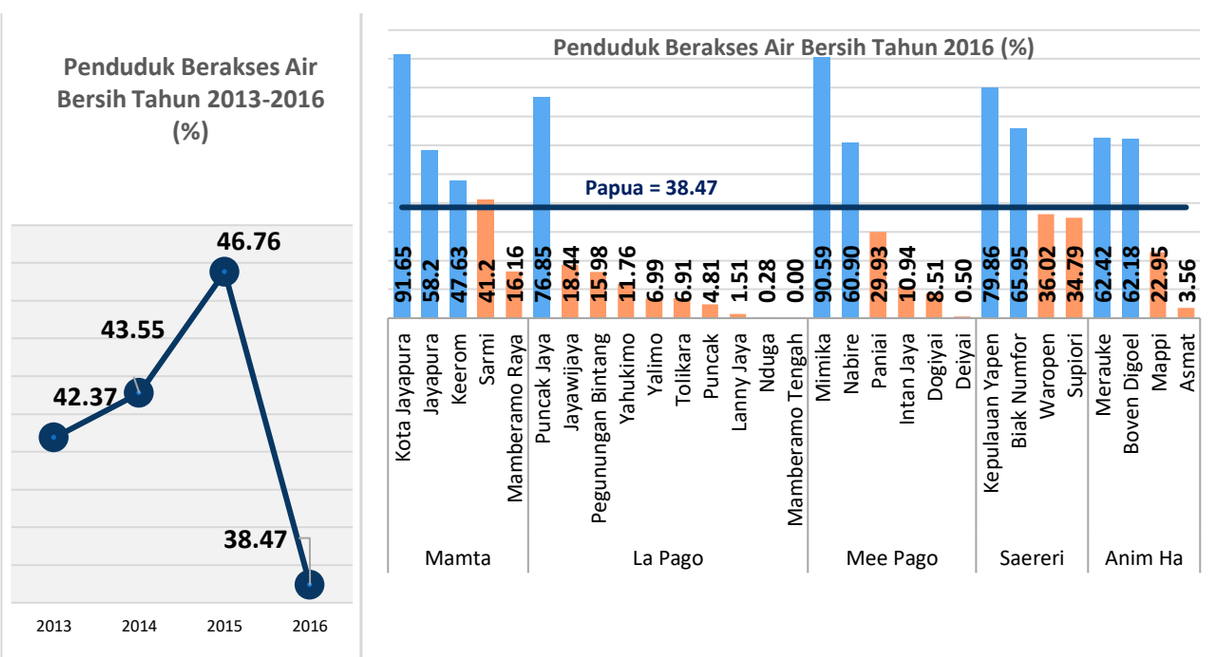

Sumber: IKP, 2017 (data diolah)

Gambar 2.89 Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Provinsi Papua

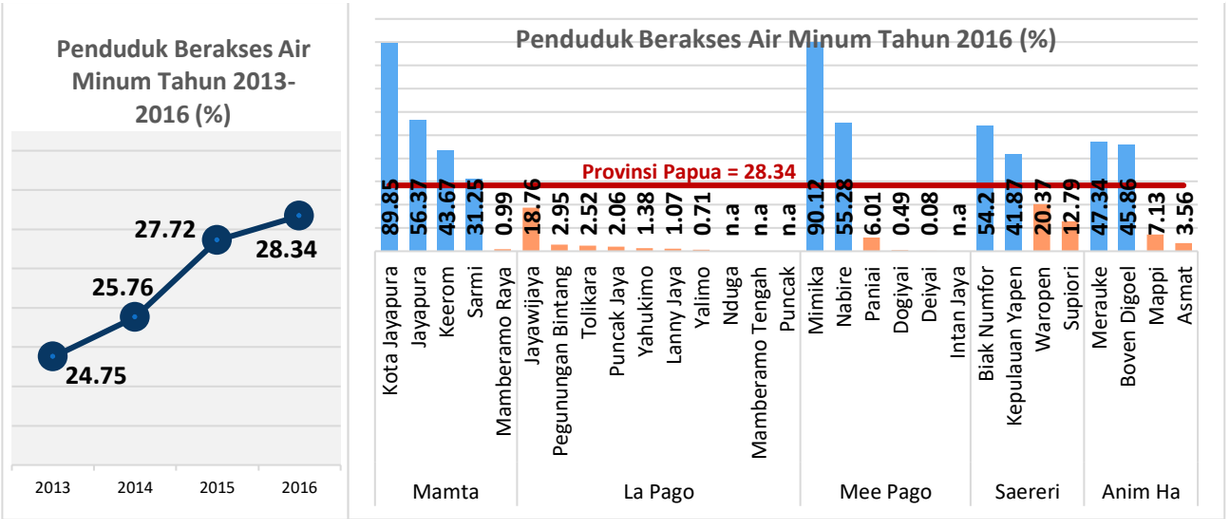

Sumber: IKP, 2017

Berdasarkan Gambar 2.90 juga diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Papua memperoleh sumber air minum yang berasal dari mata air terlindung/tak terlindung (53,12%) serta air hujan (21,94%). Terdapat pula sumber-sumber lainnya seperti air sumur timba, sungai, danau, dan kolam namun tidak menjadi dominasi untuk sumber air minum di Provinsi Papua. Berbeda dengan air minum, untuk kebutuhan memasak/ mencuci/ mandi dan sebagainya, dominasi masyarakat Papua memanfaatkan sumber air sungai/danau/kolam (50,91%), dan mata air (29,41%).

Gambar 2.90 Sumber Air Minum, Mandi, dan Cuci Dominan

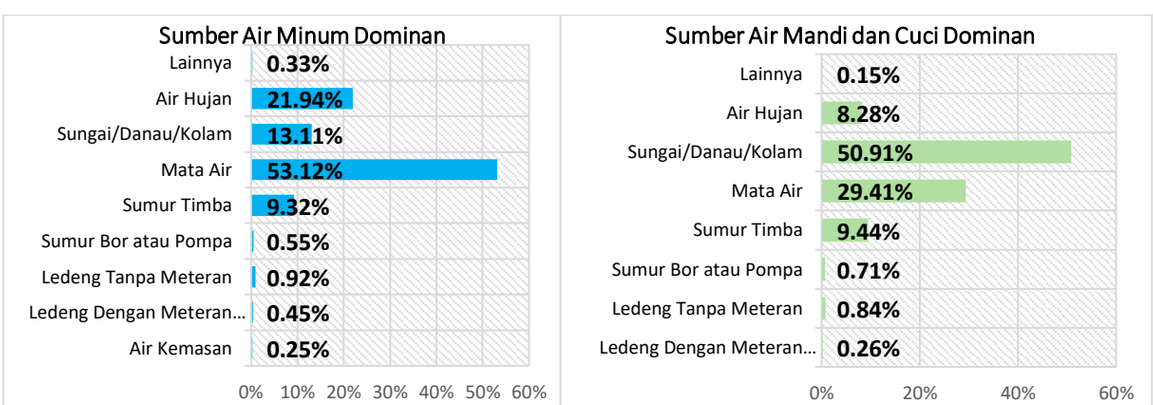

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2014 (data diolah)

Jumlah perusahaan air bersih di Provinsi Papua pada tahun 2014 tercatat menurun bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 8 perusahaan yang tersebar di 8 kabupaten dan 1 kota.

Kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih pada tahun 2014 dibandingkan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 19 liter per detik (1,15%) yaitu dari 1.642 liter per detik menjadi 1.661 liter per detik. Sedangkan untuk kapasitas produksi efektif pada periode yang sama mengalami penurunan sebesar 119 liter per detik (10,79%) yaitu dari 1.102 liter per detik menjadi 983 liter per detik.

Jumlah pelanggan air bersih di Provinsi Papua mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 perusahaan air bersih mempunyai pelanggan sebanyak 42.547 pelanggan dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 65.265 pelanggan. Pelanggan non niaga (rumah tangga dan pemerintah) merupakan pengguna dengan jumlah terbesar yaitu sebanyak 59.747 pelanggan atau sebesar 91,55 persen dari total pelanggan pada tahun 2014. Kabupaten Nabire (30,87%) dan Kota Jayapura (43,65%) merupakan wilayah dengan jumlah pelanggan PDAM terbesar di Provinsi Papua.

Gambar 2.91 Persentase Pelanggan PDAM di Provinsi Papua Tahun 2014

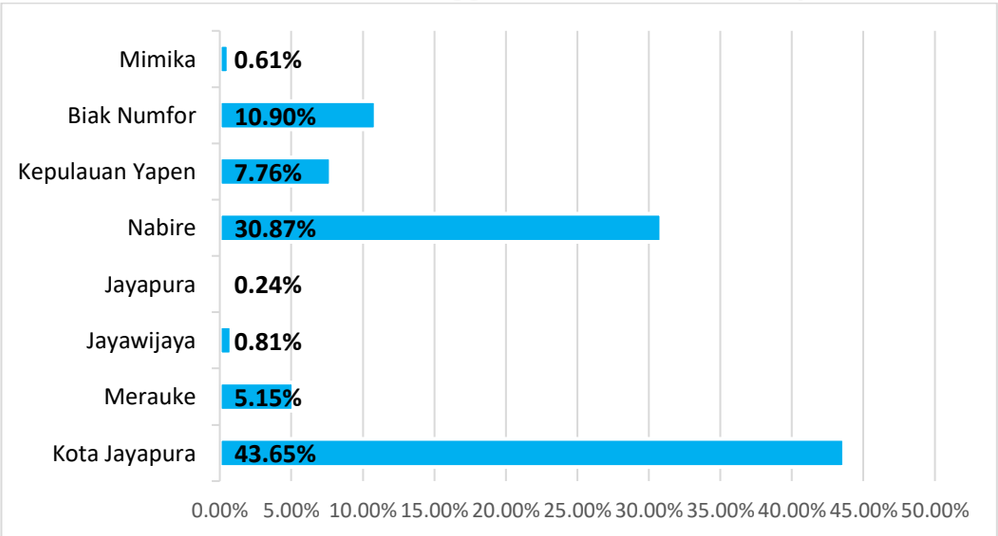

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2014 (data diolah)

Volume air bersih yang disalurkan kepada pelanggan pada tahun 2014 adalah sebesar 15,41 juta meter kubik, sedangkan pada tahun 2013 volume air bersih yang disalurkan adalah sebesar 14,40 juta meter kubik. Ini berarti selama periode 2013 sampai dengan 2014 air bersih yang disalurkan mengalami pertumbuhan sebesar 7,04%. Berdasarkan kelompok pengguna, pelanggan non niaga (rumah tangga dan pemerintah) merupakan pengguna air bersih terbesar selama tahun 2014 yaitu sebesar 12,6 juta meter kubik.

3) Akses Terhadap Infrastruktur Air Limbah

Pada tahun 2015, Provinsi Papua beserta beberapa provinsi di Indonesia tergolong pada kategori tinggi untuk persentase rumah tangga yang tidak memiliki jamban layak, yakni >50%. Persentase ini tergolong cukup tinggi ika dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat yang berkisar 45-49% (lihat Gambar 2.92).

Gambar 2.92 Persentase Rumah Tangga dengan Jamban Tidak Layak Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2015

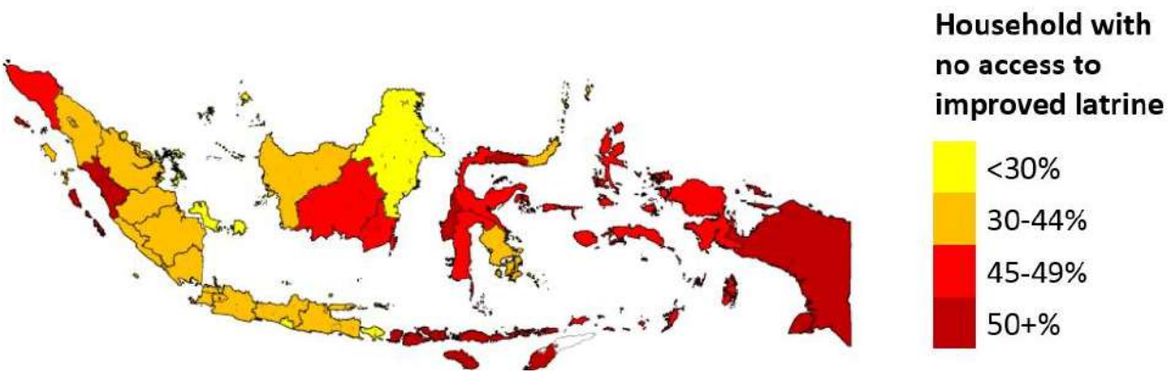

Sumber: *Millenium Challenge Account* Indonesia, 2018

Persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar setiap tahun terlihat meningkat. Pada tahun 2013 untuk rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri sebanyak 45,07% dan meningkat hingga 55,73% pada tahun 2017. Peningkatan tersebut menunjukkan salah satu keberhasilan pemerintah dalam memberikan kesadaran akan pentingnya fasilitas buang air besar bagi masyarakat guna peningkatan kesehatan masyarakat.

Tabel 2.31 Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Sendiri	45,07	46,16	56,18	56,09	55,73
Bersama	13,94	11,63	12,52	7,33	8,19
Umum	3,15	2,94	3,23	3,12	4,87
Ada, ART Tidak Menggunakan	n.a	n.a	n.a	0,36	0,37
Tidak Ada	37,84	39,27	28,07	33,10	30,84

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat dan Statistik Kesejahteraan Rakyat (2013-2017)

Pada tahun 2017, sebagian besar atau 56% penduduk telah memiiki fasulitas buang air besar yang hanya digunakan untuk 1

rumah tangga sendiri. Namun demikian, pada tahun 2017 masih juga terdapat 31% rumah tangga yang tidak memiliki akses ke fasilitas buang air besar. Di samping itu, terdapat pula sebagian kecil fasilitas buang air besar yang digunakan secara bersama dengan sistem komunal baik dalam bentuk MCK umum ataupun digunakan bersama dengan rumah tangga lain. Berdasarkan jenis kloset yang digunakan, 62% penduduk menggunakan jenis kloset leher angsa. Penggunaan lengsengan dengan/tanpa tutup menunjukkan prosentase yang cukup kecil yakni hanya sekitar 13% saja untuk digunakan sebagai kloset. Terdapat pula penggunaan cemplung/cubluk (25%) untuk jenis kloset lainnya di tahun 2017. Adapun berdasarkan jenis tempat pembuangan akhir tinja yang digunakan, 51% penduduk telah memiliki tangka septik sebagai tempat pembuangan akhir tinja. Penduduk yang membuang tinja ke IPAL hanya berkisar 2% saja. Terdapat 37% penduduk, yang membuang akhir tinja ke lubang tanah, pantai, kebun, lapang, kolam, sawah, sungai, danau, laut, maupun di tempat terbuka lainnya sehingga mencemari lingkungan.

Gambar 2.93 Kondisi Ketersediaan Infrastruktur Air Limbah Domestik di Provinsi Papua Tahun 2017

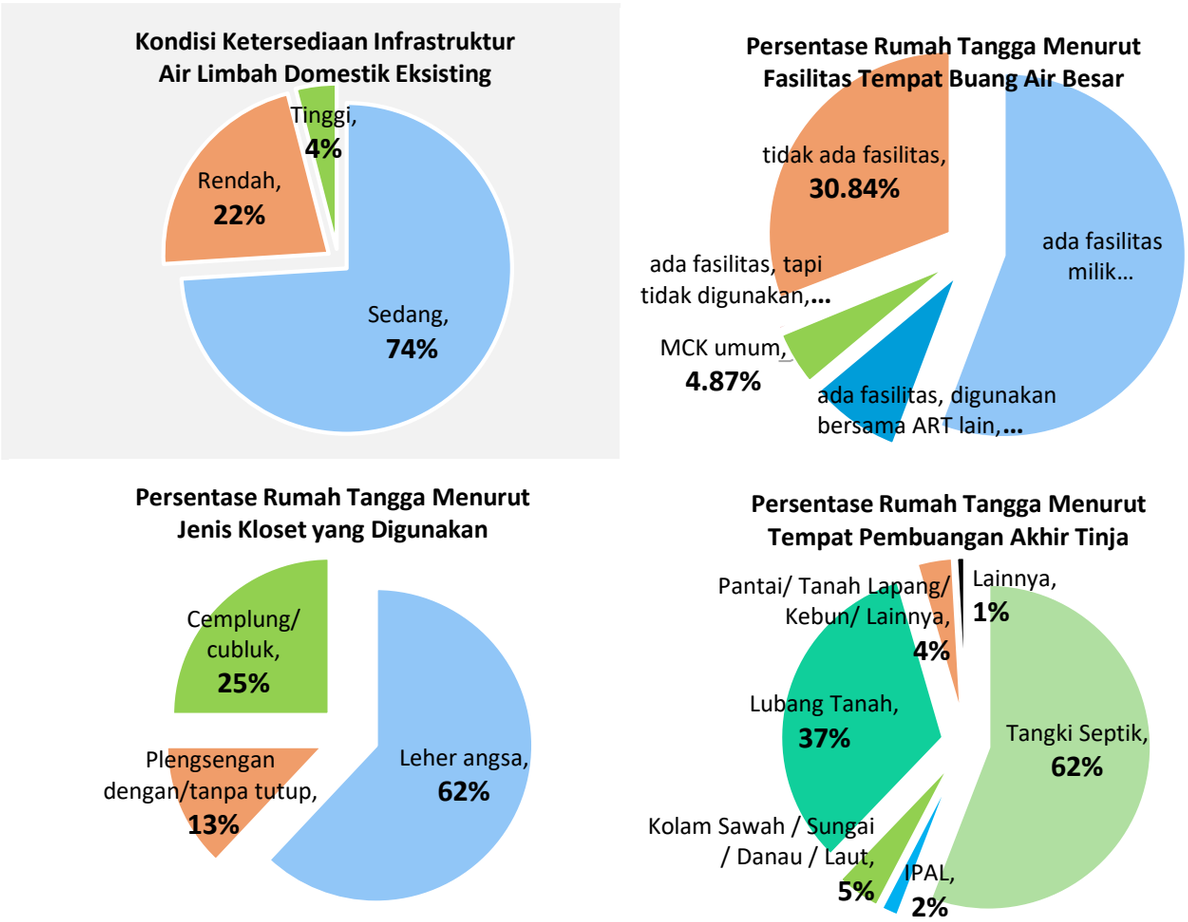

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

4) Persampahan

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Tahun 2005-2025, pembangunan infrastruktur persampahan sejalan dalam mendukung misi ke-III pembangunan jangka panjang Provinsi Papua, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dan pengembangan wilayah. Pengembangan infrastruktur persampahan, pembangunan jangka panjang Provinsi Papua diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang terintegrasi antar wilayah yang didukung sistem pengelolaan berbasis masyarakat untuk mempertahankan kualitas lingkungan.

Masih rendahnya implementasi dari 3R (*Reuse, Recycle* dan *Reduce*) terhadap sumber sampah baik di sumber maupun di tempat pengumpulan sampah menjadi salah satu indikasi pengelolaan sampah yang belum baik. Di samping itu terbatasnya sarana persampahan di masing-masing distrik menjadi salah satu kendala

yang cukup besar. Provinsi Papua mengalami tren penurunan keterangkutan sampah ke TPA dari tahun 2013 yang semula sebesar 12,33% menjadi 9,38% pada tahun 2018. Hal tersebut meningkatkan ketidakterolahan sampah domestik dari 74% pada tahun 2013 menjadi 80% pada tahun 2018 (lihat Gambar 2.94).

Gambar 2.94 Kondisi Penanganan Sampah di Provinsi Papua 2013-2018

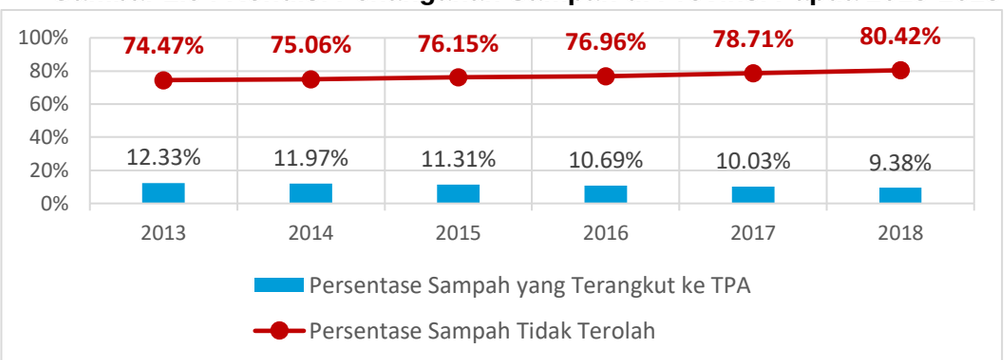

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Pengelolaan sampah di Provinsi Papua saat ini masih mengandalkan sistem swadaya atau tidak tersentralisasi. Hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan TPS yang hanya tersebar di 1% dari total distrik saja di Provinsi Papua. Oleh karena keterbatasan pelayanan persampahan tersebut, maka hanya 0,65% kampung saja yang membuang sampah ke tempat sampah lalu diangkut. Sebanyak 22,1% kampung mengelola sampah secara dominan di dalam lubang atau dibakar, dan masih terdapat 6,85% desa lainnya yang membuang sampah ke badan air. Namun demikian, sampah yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat di sumber sangatlah kecil. Pada tahun 2018 hanya 0,40% saja sampah yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat di sumber, sebagaimana yang ditampilkan dalam (Gambar 2.95).

Gambar 2.95 Tempat Buang Sampah Dominan (Kiri); Persentase Sampah yang Dikelola secara Mandiri oleh Masyarakat di Sumber (Kanan)

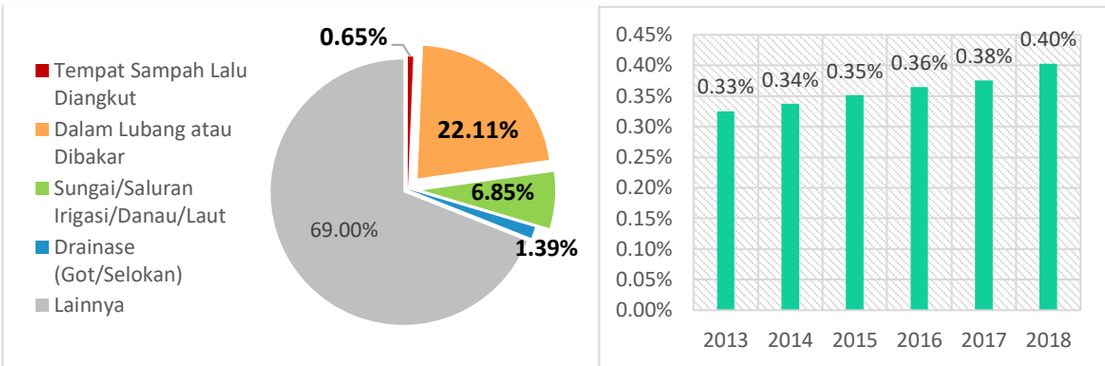

Sumber: Podes Provinsi Papua, 2014 (data diolah)

Gambar 2.96 Ketersediaan Infrastruktur Persampahan Domestik Papua

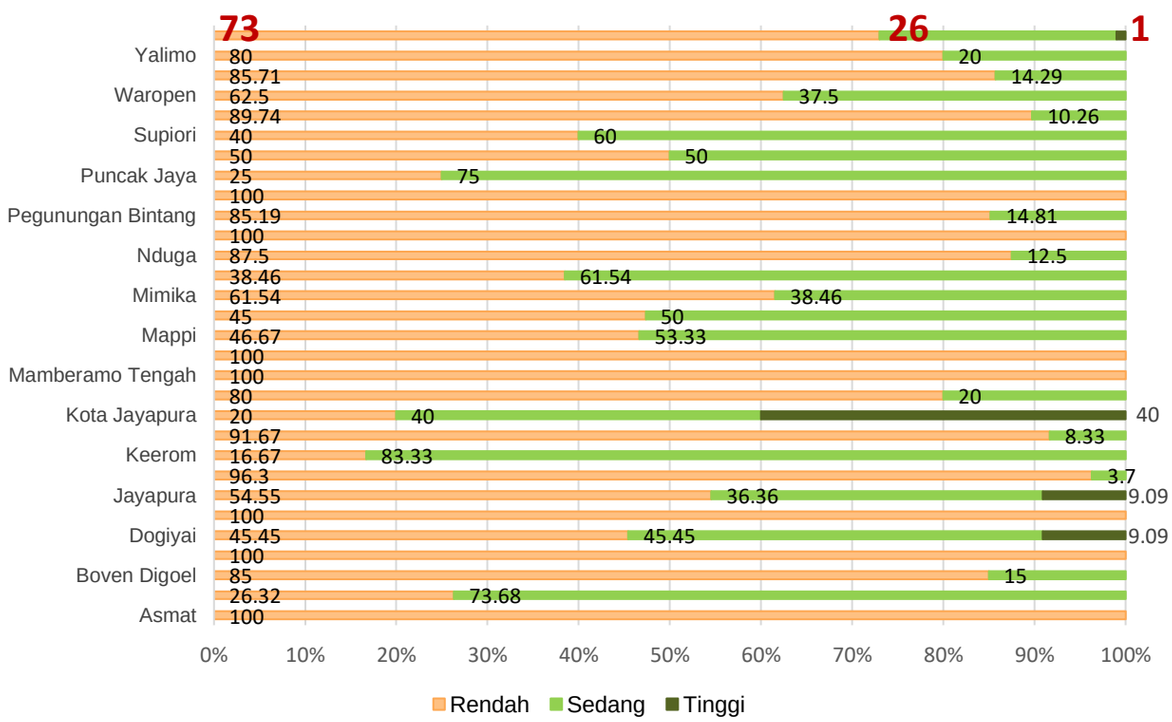

Sumber: Podes Provinsi Papua, 2014 (data diolah)

Sebagaimana yang ditampilkan dalam Gambar 2.96, sebagian besar distrik di Provinsi Papua (73%) memiliki status “rendah” dalam penyediaan infrastruktur persampahan domestik. Namun demikian, perlu dipikirkan pula upaya peningkatan pada 26% distrik dengan status penyediaan eksisting “sedang” dan upaya pemeliharaan status “tinggi” bagi distrik-distrik yang telah memiliki kategori cukup baik dalam penyediaan persampahan domestik eksisting. A

dapun kabupaten dengan jumlah distrik lebih dari 50% yang berstatus "rendah" berada di hampir semua kabupaten kecuali Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke, Kabupaten Nabire, Kota Jayapura, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Supirori. Penilaian rendah tersebut disebabkan karena masih banyaknya penggunaan drainase (got/selokan) dan sungai/saluran irigasi/danau/laut sebagai tempat buang sampah bagi sebagian besar keluarga di masing-masing distrik. Pembuangan sampah ke badan air merupakan tindakan yang akan mencemarkan badan air yang akan berpengaruh ke ekosistem secara keseluruhan.

5) Tempat Ibadah

Perkembangan rasio penduduk terhadap rumah ibadah di Papua cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3,93% pertahun. Tercatat sampai dengan tahun 2017 rasio tempat ibadah per 10.000 penduduk adalah sebesar 27 unit. Artinya untuk 10.000 penduduk dapat dilayani oleh 27 unit tempat ibadah. Jika dilihat berdasarkan kewilayahan, terdapat beberapa daerah dengan perbandingan yang cukup tinggi terhadap 10.000 penduduk dan sebaran rumah ibadah di 29 kabupaten/kota sepanjang tahun 2013-2017 sangat bervariasi.

Tabel 2.32 Rasio Tempat Ibadah per 10.000 penduduk

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Provinsi Papua	22,45	22,02	24,65	23,76	26,63
MAMTA					
Jayapura	41,62	40,78	49,01	39,52	47,95
Sarmi	32,71	31,74	31,34	34,72	51,30
Keerom	40,06	39,33	37,39	36,78	70,16
Mamberamo Raya	21,81	21,45	22,85	24,04	0,90
Kota Jayapura	22,65	22,53	22,13	28,21	18,39
LA PAGO					
Jayawijaya	26,79	26,65	26,37	26,11	19,45
Puncak Jaya	20,89	20,66	29,83	28,39	19,01
Yahukimo	24,16	23,74	29,89	29,42	29,57
Pegunungan Bintang	29,15	28,57	30,12	29,79	27,90
Tolikara	27,53	27,05	26,35	25,11	25,26
Nduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Lanny Jaya	13,78	13,01	12,86	0,00	14,04
Mamberamo Tengah	0,00	0,00	0,00	19,49	18,53
Yalimo	23,31	22,23	21,74	0,00	20,06
Puncak	0,00	0,00	0,00	24,64	24,95
MEE PAGO					
Nabire	33,07	32,95	35,53	40,69	36,66
Paniai	29,26	29,05	28,73	14,10	9,81
Mimika	36,81	36,27	35,85	35,75	26,33
Dogiyai	12,54	12,33	12,15	14,71	113,58
Intan Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38
Deiyai	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31
SAERERI					
Kepulauan Yapen	27,29	26,79	27,32	22,92	36,73
Biak Numfor	19,70	19,42	24,28	27,68	19,77
Waropen	17,76	17,56	17,07	18,18	43,08
Supiori	26,48	25,95	25,36	22,76	35,59
ANIM HA					
Merauke	18,44	18,34	52,30	34,82	22,79
Boven Digoel	31,82	31,58	53,81	51,45	41,54
Mappi	50,61	49,43	48,80	70,94	22,39
Asmat	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

2.1.5.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kondisi perumahan di Provinsi Papua sepanjang tahun 2013-2017 memiliki trend yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Peningkatan jumlah rumah layak huni terjadi pada tahun 2013-2015 yaitu sebesar 4.025 unit (2015), namun terjadi penurunan jumlah unit sampai dengan tahun 2017 (1.878 unit). Secara kumulatif total rumah layak huni yang terbangun hingga tahun 2017 sebanyak 13.685 unit (lihat Gambar 2.97). Perbandingan ketersediaan rumah layak huni untuk 100.000 penduduk di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2017 adalah 58 unit/100.000 penduduk.

Gambar 2.97 Kondisi Rumah Layak Huni di Provinsi Papua

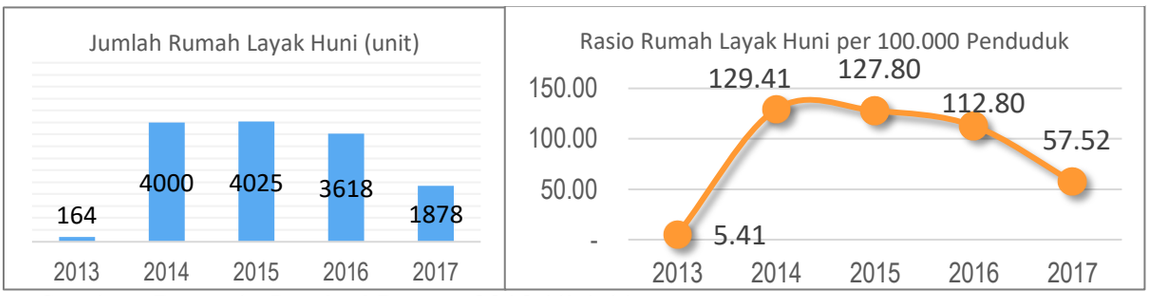

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2018 (diolah)

2.1.5.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketertiban dan ketentraman masyarakat merupakan keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur. Perlindungan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentraman dan ketertiban umum, karena mencakup persiapan dan pembekalan masyarakat dalam penangangan bencana, maupun keikutsertaan dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Gambar 2.98 Kondisi Penyenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Papua

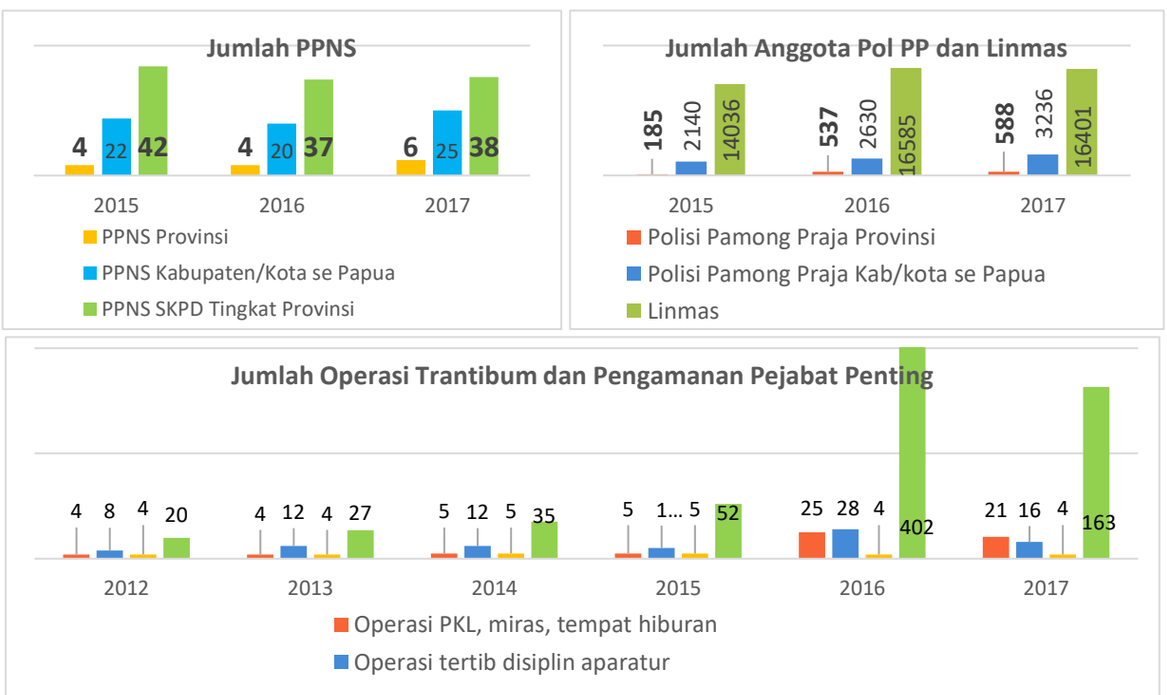

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2018 (diolah)

Berdasarkan Gambar 2.98 diketahui bahwa terdapat peningkatan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Provinsi Papua pada rentang tahun 2012-2017. Hal ini terindikasi berdasarkan peningkatan jumlah PPNS, peningkatan anggota Polisi Pamong Praja, peningkatan jumlah operasi trantibum, serta peningkatan pengamanan pejabat penting.

2.1.5.1.6. Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial Provinsi Papua merupakan salah satu isu pembangunan yang strategis seiring dengan berkembangnya kompleksitas masalah keterlantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial di Provinsi Papua. Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah belum secara optimal mengatasi masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Papua. Hal ini terindikasi melalui tingginya jumlah fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, wanita tuna susila, mantan narapidana, dan pecandu narkoba pada rentang tahun 2013-2017 (lihat Gambar 2.99).

Gambar 2.99 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Papua Tahun 2017 (orang)

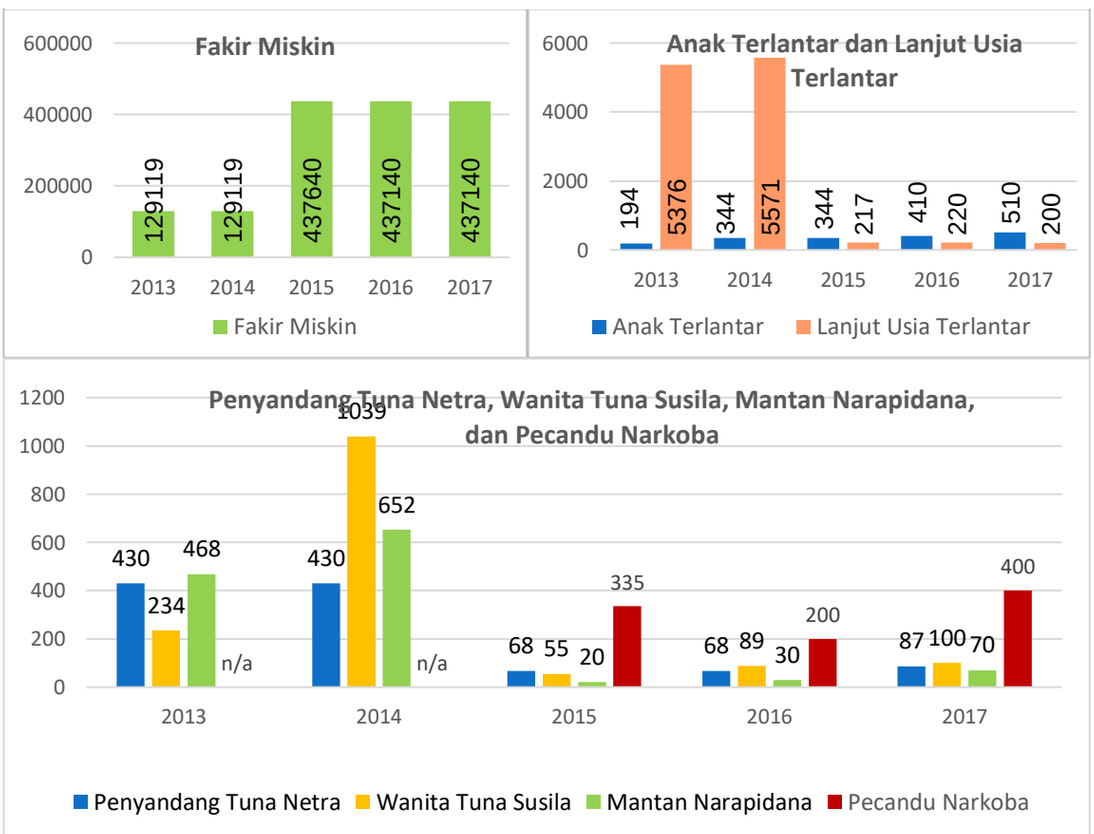

Sumber: Bappeda Papua 2018

Pada lima tahun terakhir, jumlah anak terlantar mengalami peningkatan dari 194 anak (tahun 2013) menjadi 510 anak (tahun 2017). Peningkatan juga terjadi pada jumlah fakir miskin dari 129.119 orang (tahun 2013) menjadi 437.140 orang (tahun 2017). Peningkatan ini tergolong tinggi karena secara agregat meningkat 3 kali lipat dalam rentang waktu 5 tahun. Trend yang relatif menurun terjadi pada lanjut usia terlantar, yaitu 5376 orang (tahun 2013) menjadi 200 orang (tahun 2017).

Kondisi yang fluktuatif namun cenderung meningkat terjadi pada penyandang tuna netra, wanita tuna susila, mantan narapidana, dan pecandu narkoba. Jumlah wanita tuna susila pada tahun 2014 sebanyak 1.039 orang dan berkurang menjadi 55 orang pada tahun 2015. Namun, mengalami peningkatan kembali pada tahun 2017 menjadi 100 orang. Berkurangnya jumlah wanita tuna susila pada tahun 2015 dikarenakan peraturan Bupati Kabupaten Jayapura untuk menutup lokasi prostitusi Tanjung Elmo.

Jumlah mantan narapidana di Provinsi Papua pada tahun 2013 sebanyak 468 jiwa meningkat menjadi 652 jwa pada tahun 2014. Namun terjadi penurunan pada tahun 2015 sebesar 20 jiwa dan pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 70 jiwa. Adapun jumlah pecandu narkoba yang teridentifikasi pada tahun 2015 sebanyak 335 orang, kemudian pada tahun 2016 turun menjadi 200 orang namun pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 400 orang. Kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan penyalahgunaan Napza di Papua karena masih banyak para pecandu narkoba yang belum teridentifikasi.

2.1.5.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.1.5.2.1. Tenaga Kerja

Angka perselisihan pengusaha dengan pekerja pada tahun 2013 sebesar 69% meningkat pada tahun 2015 menjadi 139%. Namun pada tahun 2017 angka perselisihan pengusaha dengan pekerja menurun hingga 24%. Penurunan perselisihan pengusaha dan kerja ini dapat disebabkan karena peningkatan kompetensi atau *capacity building* yang dilakukan terhadap tenaga kerja di Provinsi Papua (lihat Gambar 2.100).

Gambar 2.100 Angka Perselisihan Pengusaha-Pekerja Per Tahun (%)

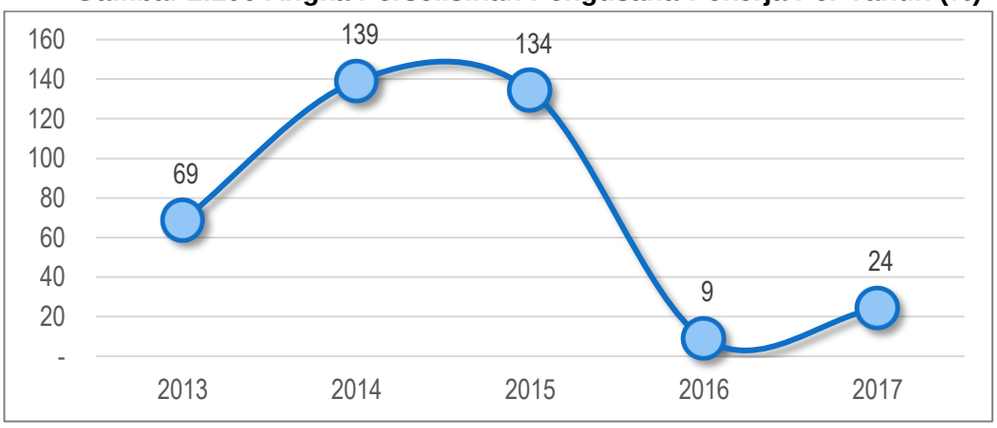

Sumber: Bappeda Papua 2018

Pada Gambar 2.101 dapat terlihat bahwa Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi mengalami fluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja yang dilatih sebanyak 940 jiwa dan menurun hingga 100 jiwa pada tahun 2016, namun kembali meningkat menjadi 1.487 jiwa pada tahun 2017.

Gambar 2.101 Kondisi Pengembangan Kapasitas Tenaga Kerja

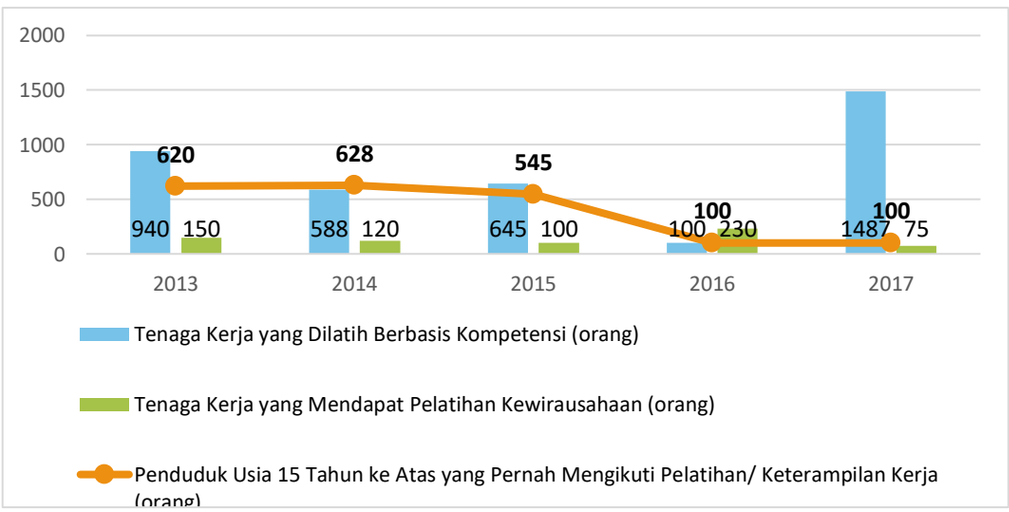

Sumber: Bappeda Papua 2018

Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan pada tahun 2013 sebanyak 150 orang kemudian meningkat pada tahun 2016 sebanyak 230 orang. Namun pada tahun 2017 menurun menjadi 75 orang tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan. Penurunan tersebut mungkin dikarenakan banyak tenaga kerja pada tahun sebelumnya yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan. Adapun penduduk usia 15 tahun keatas yang pernah mengikuti pelatihan/ keterampilan kerja pada tahun

2013 sebanyak 620 orang namun terus menurun dari tahun 2015 hingga tahun 2017 berjumlah sebanyak 100 orang. Penurunan tersebut kemungkinan disebabkan kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti pelatihan atau keterampilan kerja, sehingga pemerintah bersama lembaga pelatihan perlu melakukan invasi pelatihan keterampilan kerja.

2.1.5.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Pemberdayaan dan Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan gender (IPG) yang dihitung dengan menggunakan harapan hidup, harapan pendidikan dan indeks disribusi pendapatan merupakan indeks kemampuan pencapaian dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks pemberdayaan gender tercatat memiliki nilai cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Meskipun pada tahun 2014-2015 terlihat menurun sebesar 1%, namun kembali terjadi kenaikan bahkan sampai dengan tahun 2017. Selanjutnya, pada indeks pembangunan gender juga terlihat cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Meskipun pada tahun 2014-2015 terlihat menurun walaupun tidak signifikan perubahnnya, namun kembali terjadi kenaikan bahkan sampai dengan tahun 2017 (lihat Gambar 102).

Gambar 2.102 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Papua Tahun 2013-2017

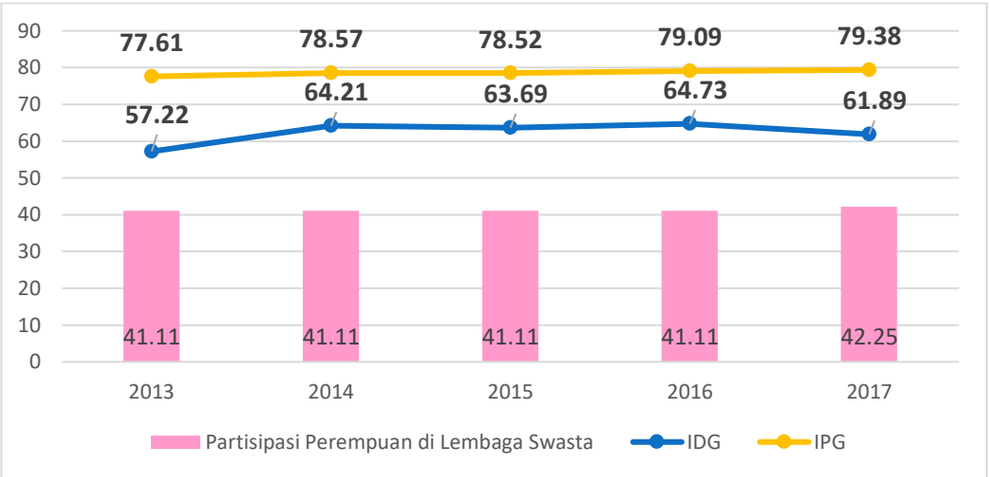

Sumber: BPS RI, 2018 (data diolah)

Membangun daerah tidak terlepas dari tiga pilar utama yaitu pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Strategi pembangunan selama ini sudah diarahkan dalam memberdayakan masyarakat secara umum dan peningkatan peran swasta terhadap urusan-urusan masyarakat yang belum optimal dilakukan pemerintah daerah. Peran lembaga swasta dalam menyerap lapangan tenaga kerja perempuan di Provinsi Papua selama ini terbilang cukup tinggi. Meskipun peningkatannya belum begitu signifikan, namun terlihat partisipasi perempuan terlihat sudah tinggi. Sampai dengan tahun 2017 partisipasi perempuan pada sektor swasta mencapai 42,25%. Selain variabel di atas, berikut ini adalah variabel partisipasi angkatan kerja khusus perempuan pada semua sektor lapangan usaha di Provinsi Papua yang akan disajikan perbandingan data tahun 2013 dengan kondisi pada tahun 2017.

2) Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Provinsi Papua untuk perbandingan tahun 2013 dan tahun 2017 mengalami peningkatan pada masing-masing daerah di 29 kabupaten/kota. Tercatat Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Papua secara keseluruhan meningkat dari 696,618 orang di tahun 2013 menjadi 722,644 orang pada tahun 2017 atau meningkat sebesar sebesar 3,60 persen. Secara kewilayahan, terdapat beberapa daerah yang juga mengalami peningkatan di antaranya terdapat 18 kabupaten/kota, sedangkan 11 daerah lainnya mengalami penurunan meskipun tidak begitu signifikan perubahannya.

Gambar 2.103 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Papua

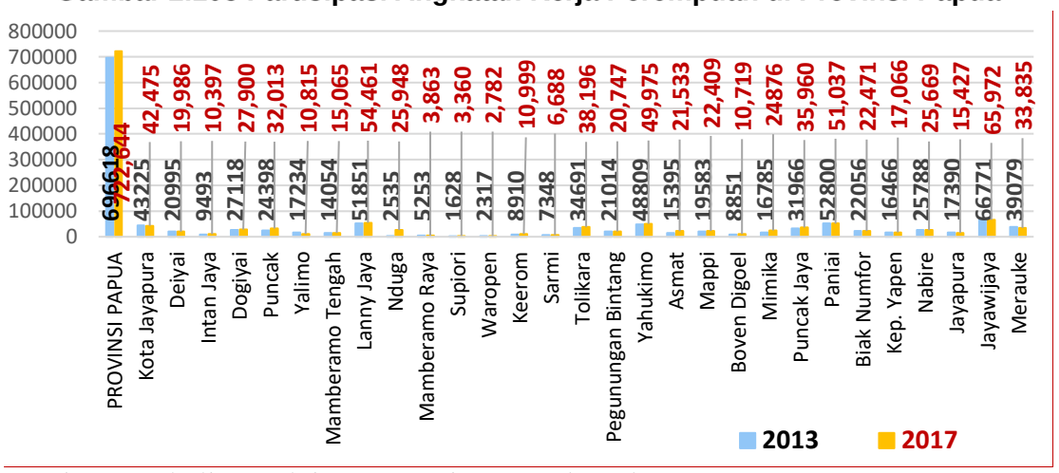

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat 2015-2017

3) Tingkat Pendidikan Perempuan

Partisipasi perempuan dalam jenjang pendidikan yang tergambarkan melalui Angka Partisipasi Purni (APM) Perempuan yang terlihat bervariasi. Tercatat sampai dengan tahun 2017 APM perempuan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar adalah sebesar 78,36%, ini berarti masih terdapat 21.64% perempuan yang belum mengenyam pendidikan sekolah dasar. Sedangkan APM perempuan pada pendidikan menengah pertama sebesar 58,71%, kemudian pendidikan menengah sebesar 40,91%.

Tabel 2.33 APM Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2017

Kabupaten/Kota	APM SD			APM SMP			APM SMA		
	L	P	APM=L+P	L	P	APM=L+P	L	P	APM=L+P
MAMTA									
Jayapura	94,24	94,39	94,30	66,72	70,18	68,65	69,52	77,56	73,22
Sarmi	95,14	100,00	97,34	68,74	89,91	79,44	38,79	57,37	47,15
Keerom	85,29	89,05	87,16	58,81	73,56	65,99	71,25	54,55	63,37
Mamberamo Raya	97,37	96,73	97,07	33,38	46,65	40,34	61,36	51,69	57,01
Kota Jayapura	92,80	92,78	92,79	74,57	90,99	82,96	61,84	61,79	61,82
LA PAGO									
Jayawijaya	81,91	93,24	87,28	71,94	84,94	78,82	78,69	52,48	66,90
Puncak Jaya	66,10	71,54	68,83	25,85	19,86	23,13	10,38	0,00	6,60
Yahukimo	69,26	60,72	64,78	16,99	20,10	18,36	11,61	9,73	10,67
Pegunungan Bintang	59,43	64,92	62,10	21,86	25,08	23,01	24,29	23,13	23,68
Tolikara	60,54	58,35	59,50	44,41	51,58	47,22	37,64	13,31	28,77
Nduga	59,69	48,44	55,06	29,33	17,66	24,84	1,70	0,00	1,13
Lanny Jaya	69,89	56,97	64,81	67,79	70,83	69,38	38,61	58,14	44,71
Mamberamo Tengah	88,67	84,89	87,30	72,71	58,34	66,16	53,85	78,37	65,20
Yalimo	89,20	70,53	81,33	36,69	63,42	48,71	25,75	20,26	22,75
Puncak	48,88	37,36	43,14	12,17	16,69	13,96	16,71	11,39	13,82

Kabupaten/Kota	APM SD			APM SMP			APM SMA		
	L	P	APM=L+P	L	P	APM=L+P	L	P	APM=L+P
Nabire	89,69	89,20	89,44	65,61	76,95	70,36	53,34	76,89	65,05
Paniai	64,06	77,65	69,97	55,77	55,91	55,81	23,86	12,85	17,99
MEE PAGO									
Mimika	94,00	90,80	92,39	70,36	79,18	74,82	84,49	58,02	70,92
Dogiyai	86,40	85,60	86,02	66,78	57,43	61,89	43,82	42,03	42,86
Intan Jaya	72,37	46,20	63,16	12,64	11,47	12,08	18,65	5,47	9,84
Deiyai	73,27	40,89	54,29	21,71	17,63	20,93	45,23	0,00	33,31
SAERERI									
Kepulauan Yapen	92,21	95,44	93,88	65,99	62,21	64,13	63,73	50,26	56,75
Biak Numfor	86,02	91,63	88,76	80,57	68,81	74,86	60,51	68,78	64,19
Waropen	94,63	88,57	91,39	66,90	73,67	69,99	67,58	62,55	64,94
Supiori	95,34	87,95	91,61	67,10	73,37	71,26	30,10	36,48	33,08
ANIM HA									
Merauke	96,66	97,93	97,34	74,32	71,90	73,16	78,88	66,34	72,89
Boven Digoel	78,02	83,10	80,44	43,38	83,35	64,96	18,41	28,17	23,94
Mappi	87,28	91,54	89,33	30,43	39,17	35,26	11,24	19,93	15,91
Asmat	77,08	82,74	79,91	34,90	45,40	38,50	24,25	18,94	21,34
Papua	**78,93**	**78,36**	**78,66**	**50,45**	**58,71**	**54,26**	**45,32**	**40,91**	**43,27**

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat BPS Provinsi Papua, 2016 (data diolah)

4) Tingkat Kekerasan Terhadap Perempuan

Kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari aspek ekonomi saja melainkan ditentukan juga oleh terwujudnya kerukunan yang aman dan damai yang dimulai dari lingkungan keluarga masyarakat. Sepanjang tahun 2013-2016 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Provinsi Papua masih terjadi. Meskipun kondisi KDRT di Provinsi Papua memiliki trend menurun, namun angkanya masih terbilang cukup tinggi. Dalam Gambar 2.104, diketahui bahwa pada rentang waktu empat tahun terakhir rata-rata pertumbuhannya menurun hingga 7,54% per tahun. Pada tahun 2013 jumlah KDRT adalah sebesar 604 kasus dan terus menurun hingga 492 kasus di tahun 2016.

Gambar 2.104 Jumlah KDRT Provinsi Papua Tahun 2013-2016

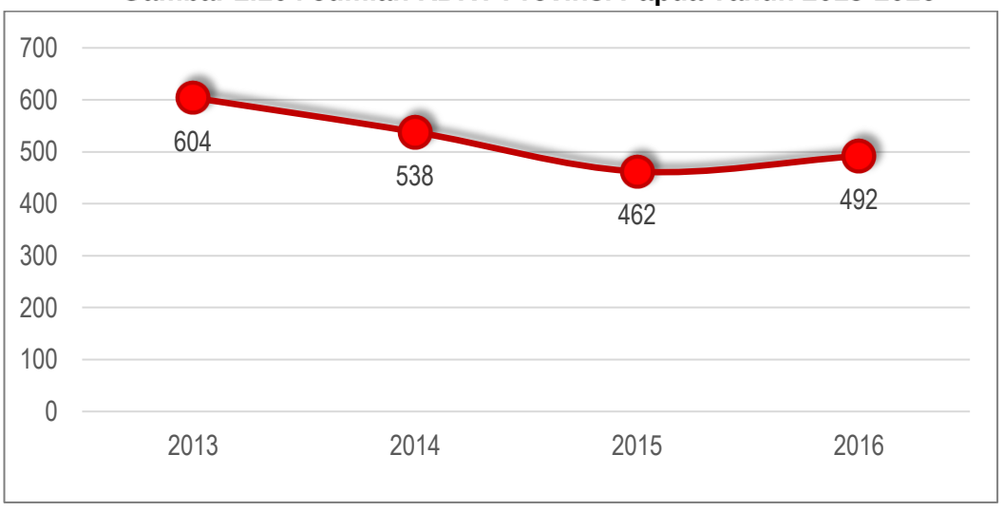

Sumber: Statistik Kriminal BPS RI, 2017 (data diolah)

2.1.5.2.3. Pangan

1) Tingkat Konsumsi Pangan

Konsumi kalori atau protein adalah banyaknya kalori atau protein yang benar-benar dikonsumsi per orang per hari. Rata-rata wanita memerlukan asupan sebanyak 2000 kalori per harinya, sedangkan pria rata-rata membutuhkan asupan sebanyak 2500 kalori perhari.

Gambar 2.105 Proporsi Penduduk Di Provinsi Papua dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar = 2.100 Kkal/kapita/hari)

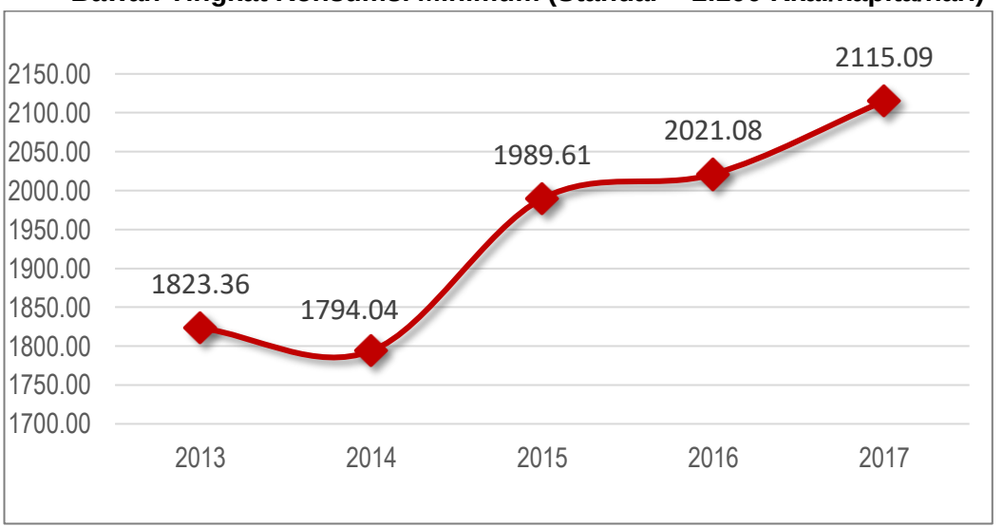

Sumber: BPS RI, 2018 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 2.105, asupan kalori Provinsi Papua dalam rentang waktu 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2013 asupan kalori mencapai 1.823 kkal/kapita/hari dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2017 menjadi 2.115 kkal/kapita/hari. Kondisi ini

mengindikasikan bahwa asupan kalori di Provinsi Papua telah memenuhi standar yang ditentukan.

2.1.5.2.4. Pertanahan

Kondisi pertanahan khususnya di Provinsi papua sering menjadi masalah yang serius, sehingga perlu adanya perhatian khusus dalam menindaklanjuti permasalahan-permasalahan pertanahan. Berdasarkan data Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, terdapat penurunan peralihan tanah di Provinsi Papua dari 7.057 hektar pada tahun 2016 menjadi 5.887 hektar pada tahun 2017. Adapun proporsi luas peralihan tanah dengan jual-beli mengalami peningkatan dari 87,96% pada tahun 2016, menjadi 88,51% pada tahun 2017 (lihat Tabel 2.34).

Tabel 2.34 Data Peralihan Tanah di Provinsi Papua Tahun 2016-2017 (ha)

Tahun	Jual beli	Pewarisan	Hibah	Tukar menukar	Lelang	Total
2016	6.208	559	254	6	30	7057
2017	5.211	451	197	3	25	5887

Sumber: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2017

Berdasarkan Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) nomor : SK.6979/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/12/2017 target alokasi untuk Provinsi Papua seluas ±729.116 hektar, yang berasal dari :

1. Alokasi 20% untuk kebun masyarakat dari Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan seluas ± 190.119 hektar
2. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif seluas ± 362.336 hektar
3. Program pemerintah untuk pencadangan percetakan sawah baru seluas ± 9.053 hektar
4. Pemukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah memperoleh persetujuan prinsip seluas ± 97.421 hektar
5. Pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum seluas ± 57.219 hektar
6. Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat seluas ± 1.666 hektar
7. Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat seluas ±11.302 hektar

2.1.5.2.5. Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu isu penting di Provinsi Papua ditengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Papua, yang merupakan komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Tabel 2.35 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Papua

Tahun	IKU	IKA	IKTL	IKLH
2013	88.67	58.00	97.28	82.91
2014	84.24	54.67	97.44	80.65
2015	84.24	80.00	79.35	81.01
2016	89.60	76.00	79.17	81.35
2017	90.91	77.33	78.18	81.47
Rata2 Pertumbuhan Provinsi Papua	**0.54**	**5.51**	**- 6.03**	**- 0.45**
Kontribusi Terhadap Nasional Tahun 2017	**1.12**	**6.32**	**- 9.22**	**2.07**

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017

Dalam Tabel 2.35 diketahui bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Papua memiliki trend dengan pertumbuhan yang negatif (-0,45%). Sementara dua dari tiga indikator pembentuk IKLH Provinsi papua yaitu IKU dan Indeks Kualitas Air (IKA) memiliki pertumbuhan yang positif dan cenderung meningkat. Adapun Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) memiliki trend yang cenderung menurun dengan rata-rata sebesar 6,03% setiap tahunnya. Selanjutnya kontribusi IKLH Provinsi Papua untuk tahun 2017 tercatat untuk IKU sebesar 1,12%, IKA sebesar 6,32%, IKTL sebesar -9,22% dan secara keseluruhan kontribusi IKLH Provinsi Papua terhadap Nasional yaitu sebesar 2,07%.

2.1.5.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Persentase anak yang memiliki akte lahir di beberapa kabupaten sampai saat ini terbilang masih cukup rendah. Sampai dengan tahun

2017, terdapat 6 kabupaten dengan jumlah anak yang memiliki akte lahir mencapai 2% sampai dengan 6,9%. Secara kewilayahan hampir sebagian besar daerah di Provinsi Papua, persentase anak yang memiliki akte lahir masih rendah. Berdasarkan Tabel 2.36, terdapat 3 (tiga) wilayah yang rata-rata persentase anak berakte di atas 50% di antaranya ialah wilayah Mamta, Saereri dan Anim Ha.

Tabel 2.36 Persentase Anak, Bayi dan Balita Berakte Kelahiran Tahun 2017

Wilayah Adat	Kabupaten/Kota	Kapamilikan Akta Kelahiran		
		Semua anak	Anak < 5 tahun	Anak< 1 tahun
Mamta	Jayapura	75,00	53,90	41,10
	Keerom	81,80	63,20	45,60
	Mamberamo Raya	6,70		
	Sarmi	64,10	43,10	38,10
	Kota Jayapura	88,80	67,80	47,40
La Pago	Jayawijaya	33,40	31,10	17,10
	Lanny Jaya	22,60	27,90	24,90
	Mamberamo Tengah	4,10	6,90	n.a
	Nduga	n.a	n.a	n.a
	Pegunungan Bintang	32,30	33,60	32,80
	Puncak	74,30	67,00	66,20
	Puncak Jaya	45,50	50,00	74,00
	Tolikara	38,50	29,60	n.a
	Yahukimo	3,10	4,00	23,00
	Yalimo	3,00	2,80	0,00
Mee Pago	Deiyai	2,00	3,60	n.a
	Dogiyai	37,50	12,90	n.a
	Intan Jaya	6,90		n.a
	Mimika	70,00	48,40	23,00
	Nabire	80,30	65,50	38,40
	Paniai	16,00	20,80	12,90
Saereri	Biak Numfor	53,70	40,80	46,20
	Supiori	70,40	46,50	51,50
	Waropen	64,98	52,96	48,99
Anim Ha	Asmat	24,00	20,00	n.a
	Boven Digoel	66,80	58,60	37,90
	Mappi	40,70	20,80	17,80
	Merauke	83,26	72,36	69,63

Sumber: SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2017 – BPS`

Persentasae penduduk berbasis NIK di beberapa kabupaten terlihat masih rendah pada tahun 2017. Terlihat persentase penduduk

yang memiliki NIK terendah sebesar 0,50% di kabupaten Nduga dan 4,50% di kabupaten Mamberamo Tengah, juga untuk kepemilikan NIK semua anak terlihat masih sangat rendah pada beberapa kabupaten yang diantaranya adalah kabupaten Puncak sebesar 3,40%, Mamberamo Tengah sebesar 4,10%, Deiyai sebesar 5,20% dan Yahukimo sebesar 5,80%. Apabila dilihat berdasarkan kewilayahan di Provinsi Papua tercatat sebanyak 4 (empat) wilayah yang memiliki persentase penduduk dan anak memiliki NIK mencapai 50% yaitu, Mamta, Mee Pago, Saereri dan Anim Ha.

Tabel 2.37 Persentase Penduduk dan Anak yang Memiliki KTP Berbasis NIK Tahun 2017

Wilayah Adat	Kabupaten/Kota	Kepemilikan NIK			
		Semua Orang	Semua Anak	Anak di Bawah 5 Tahun	Anak di Bawah 1 Tahun
Mamta	Jayapura	93,70	87,80	74,80	61,50
	Keerom	90,90	80,60	62,10	34,00
	Mamberamo Raya	75,90	53,70	34,60	39,60
	Sarmi	90,00	79,20	59,70	49,40
	Kota Jayapura	96,30	91,00	78,70	63,10
La Pago	Jayawijaya	70,90	66,90	55,20	17,60
	Lanny Jaya	51,90	56,20	67,60	0,00
	Mamberamo Tengah	4,50	4,10	6,90	27,80
	Nduga	0,50			
	Pegunungan Bintang	65,40	54,00	49,90	41,50
	Puncak	52,30	3,40	3,10	0,00
	Puncak Jaya	64,90	58,40	51,60	59,50
	Tolikara	33,30	16,80	15,80	
	Yahukimo	13,20	5,80	5,30	0,70
	Yalimo	25,80	22,10	32,90	34,20
Mee Pago	Deiyai	44,70	5,20	9,00	10,70
	Dogiyai	46,10	42,90	35,10	22,60
	Intan Jaya	43,00	23,70	16,80	
	Mimika	91,20	79,30	59,00	43,90
	Nabire	87,50	78,20	65,10	35,00
	Paniai	45,70	19,40	20,30	4,90
Saereri	**Biak Numfor**	82,40	64,30	43,30	16,00
	Supiori	86,40	74,40	58,80	47,50
	Waropen	93,08	89,03	71,95	50,38

Wilayah Adat	Kabupaten/Kota	Kepemilikan NIK			
		Semua Orang	Semua Anak	Anak di Bawah 5 Tahun	Anak di Bawah 1 Tahun
Anim Ha	**Asmat**	75,10	54,00	37,30	28,90
	Boven Digoel	93,60	92,70	85,60	62,40
	Mappi	86,10	74,00	47,40	37,10
	Merauke	94,64	88,88	74,35	56,67

Sumber: SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2017 - BPS

2.1.5.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kampung di Provinsi Papua dapat tercermin dalam pelayanan pemerintah kampung yang mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2013 tingkat pelayaan pemerintah kampung kepada masyarakat mencapai 45%, dan mengalami peningkatan menjadi 70% pada tahun 2017. Peningkatan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam peningkatan pelayanannya kepada masyarakat, yang juga dapat ditinjau berdasarkan peningkatan kelengkapan sarana prasarana perkantoran pemerintah kampung, peningkatan tertib pengelolaan dokumen administrasi pemerintah kampung, dan penyediaan infrastruktur perdesaan (lihat Gambar 2.106).

Gambar 2.106 Kondisi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

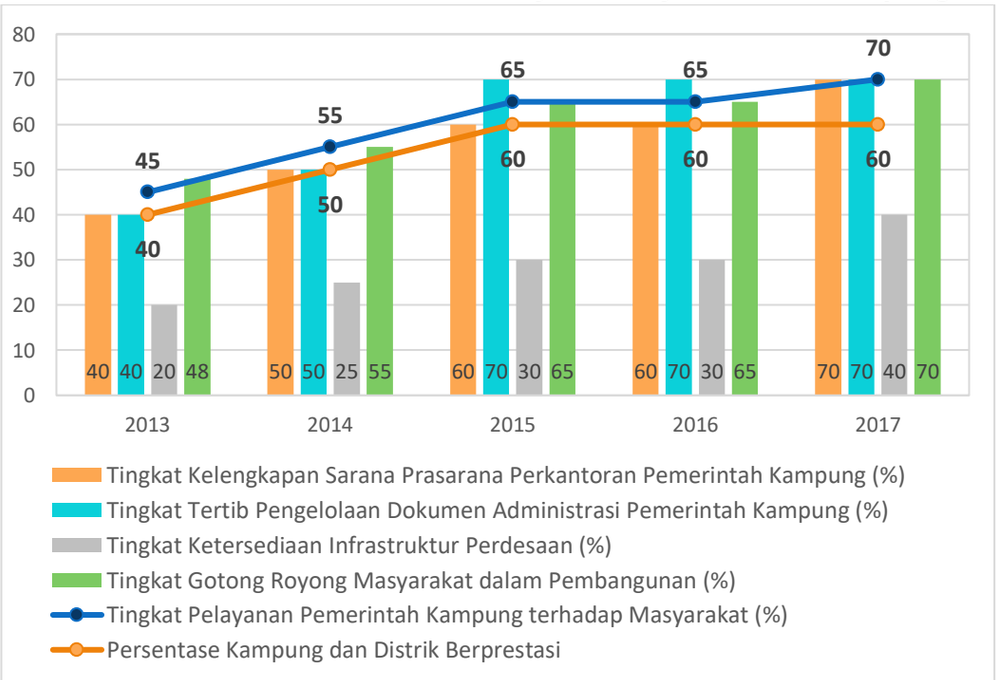

Sumber: Bappeda Papua 2018

Sebagai *outcome* peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kampung tersebut, terdapat trend peningkatan persentase kampung dan distrik berprestasi dari 40% pada tahun 2013 menjadi 60% pada tahun 2017. Selain itu, tingkat gotong royong masyarakat dalam pembangunan juga mengalami peningkatan dari 48% pada tahun 2013 menjadi 70% pada tahun 2017. Semangat masyarakat membantu pemerintah dalam pembangunan perlu mendapatkan apresiasi yang tinggi. Hal tersebut kiranya dapat memacu pemerintah untuk bekerja lebih giat lagi dalam pembangunan, sehingga seluruh masarakat yang berada dipelosok dapat menikmati pembangunan yang sama.

Dalam Gambar 2.107 dapat terlihat bahwa jumlah swadaya masyarakat untuk mendukung program pemerintah khususnya program pemberdayaan masyarakat, menunjukkan angka yang sangat baik. Pada tahun 2013 jumlah swadaya masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat mencapai 70 program kemudian meningkat hingga 90 program pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Peran masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah dengan swadaya masyarakat dalam mendukung program pemerintah, kiranya dapat mempercapat pembangunan di daerah, sehingga permasalahan kesenjangan dapat menurun.

Gambar 2.107 Jumlah Swadaya Masyarakat yang Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013-2017 (program)

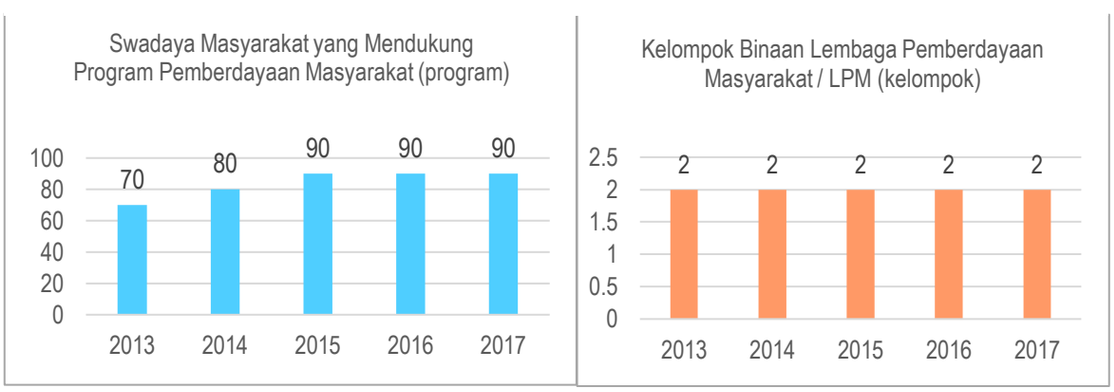

Sumber: Bappeda Papua 2018

Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 baru mancapai 2 kelompok. Kiranya di tahun-tahun kedepan lembaga pemberdayaan masyarakat kampug menambah lagi kelompok-kelompok binaan sehingga

keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah baik di sektor ekonomi dan sektor lainnya lebih banyak lagi.

Jumlah kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan jumlah kelompok binaan PKK pada tahun 2013 sebanyak 5.615 kelompok PKK mampu membentuk 2.529 kelompok binaan. Pada tahun 2017 jumlah kelompok PKK meningkat menjadi 7.724 kelompok dan menbinan 5.419 kelompok binaan (lihat Gambar 2.108). Peningkatan tersebut menunjukkan nilai yang positif, dengan meningkatnya jumlah kelompok PKK dan binaannya kiranya dapat melibatkan banyak masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas masyarakat terutama perempuan dalam meningkatkan peran perempuan melalui PKK.

Gambar 2.108 Jumlah kelompok PKK dan binaan PKK

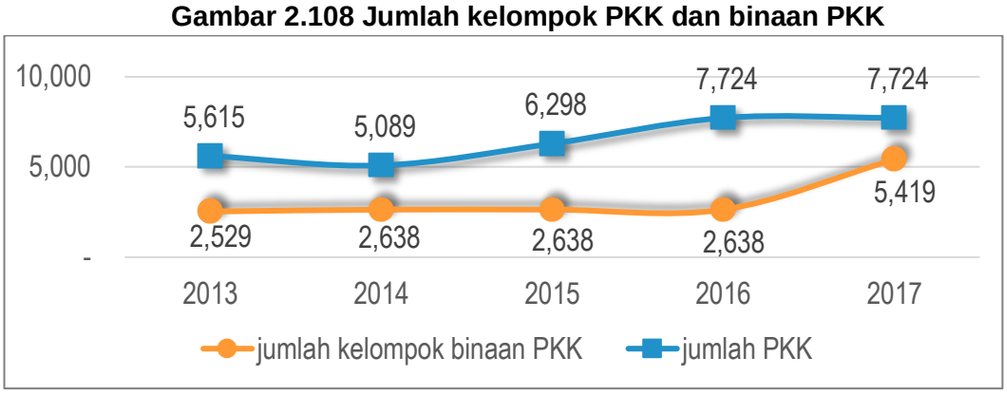

Sumber: Bappeda Papua, 2018

Melalui PKK kita dapat meningkatkan peran perempuan serta dapat menggali dan menggerakkan serta mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pembinaan ini diharapkan dapat memberikan solusi dari berbagai permasalahan perempuan dan anak serta perbaikan kesejahteraan keluarga dan mampu memotifasi orang lain dan memberikan harapan bagi terbentuknya keluarga mandiri serta bermasyarakat dan menunjang program pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat dan kampung di Provinsi Papua tidak luput dari peran Dana Desa sebagai wujud komitmen Pemerintah Pusat. UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memandatkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran APBN ke Desa sebesar 10% *(on top)* dari dana transfer daerah secara bertahap. Alokasi anggaran tersebut kemudian diberi nama Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 Tentang

Dana Desa yang bersumber dari APBN -yang telah diubah dua kali, terakhir PP Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN-, Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk disalurkan kembali ke Rekening Kas Desa (RKD). Untuk mendapatkan penyaluran tersebut Desa harus telah menetapkan dokumen APBD dan laporan realisasi keuangan sebelumnya. Sedangkan daerah telah melaporkan konsolidasi laporan realisasi keuangan Desa tahun sebelumnya.

Tabel 2.38 Alokasi Dana Desa di Provinsi Papua

	2015	2016	2017
APBD Provinsi	11.805.767.000	12.567.840.000	13.006.813.000
Dana Otsus	4.940.430.000	5.395.052.000	5.580.152.000
APBK	**2.442.885.205**	**3.776.642.791**	**4.629.699.579**
DD	**1.433.226.742**	**3.385.116.457**	**3.563.722.683**
Kampung	4.293	4.635	5.163
Penduduk	3.149.375	3.207.444	3.265.202
DD/kampung	333.852,02	730.337,96	690.242,63
DD/kapita	455,08	1.055,39	1.091,42
%DD terhadap APBK	59	90	77
%DD terhadap APBD provinsi	0,12	26,93	27,40
%DD terhadap Dana Otsus	29,01	62,74	63,86
%APBK terhadap APBD provinsi	20,69	30,05	35,59
%APBK terhadap dana otsus	49,45	70,00	82,97

Sumber: Data Dana Desa diolah dari DJPK Kementrian Keuangan dan APBDesa dari BPS Pemerintahan Desa tahun 2015, 2016 dan 2017

Sejak diimplemantasikan tahun 2015, Dana Desa memiliki komposisi -bauran dana- yang signifikan baik di tingkat Desa, kabupaten, maupun provinsi. Pada Tabel 2.38 dapat dilihat bahwa seiring dengan komitmen pemerintah untuk memenuhi mandate UU Desa agar alokasi Dana Desa secara bertahap mencapai 10% dari dana transfer daerah- jumlah alokasi Dana Desa di PRovinsi Papua terus meningkat, terakhir tahun 2017 mencapai 3,56 Trilyun Rupiah atau 63,86% terhadap total Dana Otsus dan 27,40 terhadap total APBD Provinsi Papua. Peningkatan DD juga diikuti oleh APB Kampung

karena UU Desa juga mengamanatkan Kabupaten/Kota mengalokasikan 10% dari DAU, DBH dan Pajak Daerah untuk Desa.

Pada Gambar 109, Gambar 110, dan Gambar 111, dapat dilihat perkembangan APB Kampung dari tahun 2015 sampai tahun 2017, dimana pada tahun 2017 APBKampung mencapai 4,63 Trilyun atau 82,97% dari Dana Otsus dan 35,59,4% dari APBD Provinsi. Meskipun lokasi ADD juga meningkat, tetapi proporsi DD terhadap APBKampung tetap tinggi sebesar 76,98% pada tahun 2017.

Gambar 2.109 Perkembangan APBK, APBD Provinsi, dan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Tahun 2015-2017 (Ribu Rupiah)

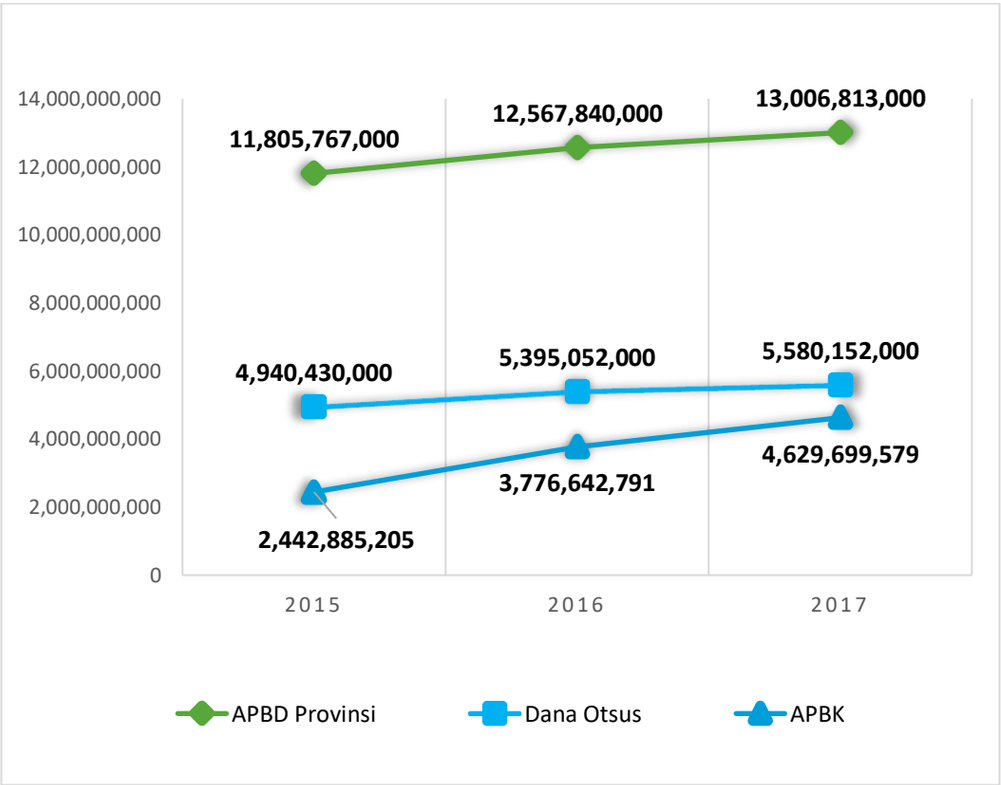

Gambar 2.110 Persentase Dana Desa terhadap APBD Provinsi, Dana Otonomi Khusus, dan APBK di Provinsi Papua Tahun 2015-2017 (%)

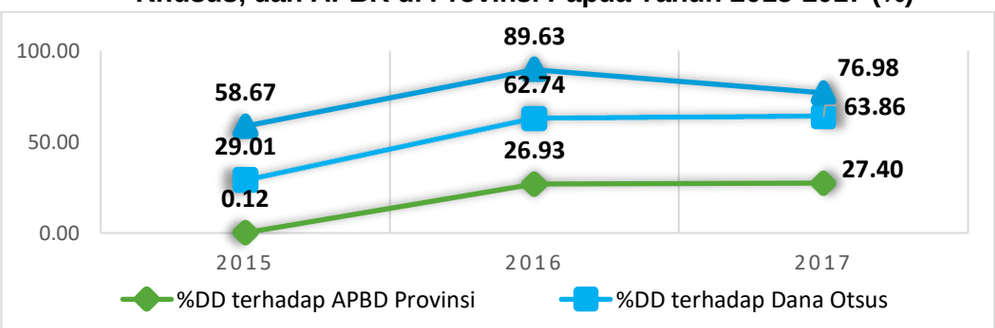

Dari uraian di atas, nampak bahwa kebijakan UU Desa dengan Dana Desa memberikan kontribusi terhadap alokasi sumber daya keuangan langsung ke kampung. Dengan kata lain, idealnya kampung perlu memiliki sumber daya keuangan untuk mendanai untuk mendanai kewenangan lokal kampung sesuai dengan prinsip susidiaritas.

Gambar 2.111 Persentase APBK terhadap APBD Provinsi, dan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Tahun 2015-2017 (%)

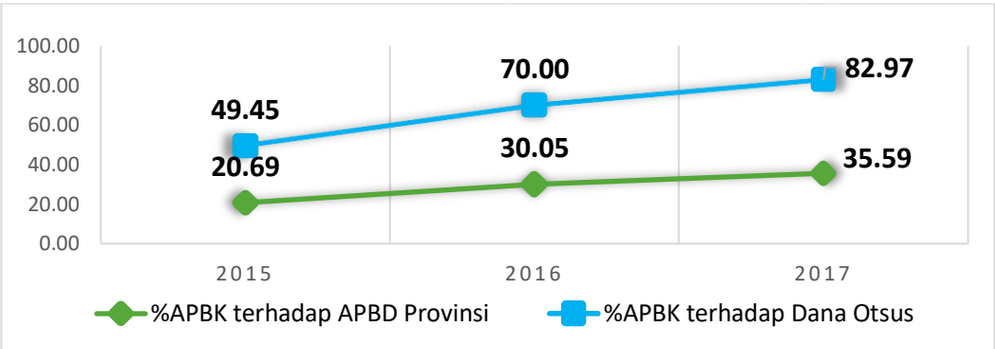

2.1.5.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Laju Pertumbuhan Penduduk

Secara keseluruhan pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua Terlihat rata-rata pertumbuhan penduduk yang tersebar di 29 kabupaten/kota bertumbuh sebesar 1%. Rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Papua cukup terkendali dan tidak mengalami perubahan yang cukup besar (lihat Tabel 2.39). Secara kewilayahan di Provinsi Papua, terdapat beberapa daerah dengan pertumbuhan paling tinggi di antaranya adalah Kabupaten Puncak Jaya (La Pago) dan Supiori (Saereri) yang mampu bertumbuh sebesar 3 (tiga) persen. Sedangkan daerah lainnya stabil memiliki pertumbuhan berkisar antara 1-2 persen setiap tahunnya.

Tabel 2.39 Laju pertumbuhan penduduk (LPP)

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Provinsi Papua	1,97	1,93	1,89	1,84	1,8
Jayapura	1,97	0,5	1,7	1,95	1,77
Sarmi	2,01	0,79	2,82	1,94	1,86
Keerom	2,14	2,38	1,31	0,81	1,64
Mamberamo Raya	1,39	3,73	4,92	1,38	2,25
Kota Jayapura	1,59	1,16	2,83	1,87	1,7
Jayawijaya	0,99	0,51	1,08	1,89	1,23
Puncak Jaya	3,92	1,13	1,79	3,88	3,18
Yahukimo	2,02	1,77	1,76	1,59	1,52
Peg. Bintang	2,04	2,01	1,43	1,12	1,33

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Tolikara	1,98	1,76	2,98	1,88	2,09
Nduga	1,9	7,73	1,78	1,82	1,18
Lanny Jaya	2	5,91	1,19	1,25	1,09
Mamberamo Tengah	1,9	6,35	2,03	0,81	1,69
Yalimo	2,09	4,87	2,27	1,51	1,75
Puncak	1,96	1,59	2,08	1,83	2,18
Nabire	1,99	0,36	1,74	1,87	1,61
Paniai	2,03	0,72	1,1	1,85	1,71
Mimika	2,5	1,48	1,19	1,94	2,35
Dogiyai	1,85	1,67	1,51	1,76	1,27
Intan Jaya	1,9	3,24	2,47	3,01	2,15
Deiyai	1,98	2,27	1,99	1,79	2,25
Kepulauan Yapen	1,81	2,05	1,57	1,87	2,03
Biak Numfor	2,04	0,56	2,46	1,89	2,04
Waropen	1,84	3,04	2,42	1,44	2,35
Supiori	1,79	1,84	5,19	1,65	3,34
Merauke	1,99	1,67	1,45	1,58	1,54
Boven Digoel	1,88	1,46	2,83	2,62	2,37
Mappi	1,84	2,03	2,32	1,87	1,15
Asmat	2,02	1,9	2,27	1,96	2,87

Sumber: BPS Provinsi Papua (diolah)

Secara demografis, tujuan berencana adalah untuk menurunkan angka kelahiran sehingga dapat menekan pertumbuhan jumlah penduduk, dengan jumlah anak yang dianjurkan pemerintah sebanyak 2 (dua) orang sehingga anggota keluarga sebanyak 4 (empat) orang. Secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Secara keseluruhan, rata-rata jumlah anggota keluarga di Provinsi Papua juga tidak memiliki perubahan yang cukup pesat. Rata-rata jumlah anggota keluarga adalah sebesar 4 (empat) orang dalam setiap rumah tangga.

Gambar 2.112 Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga

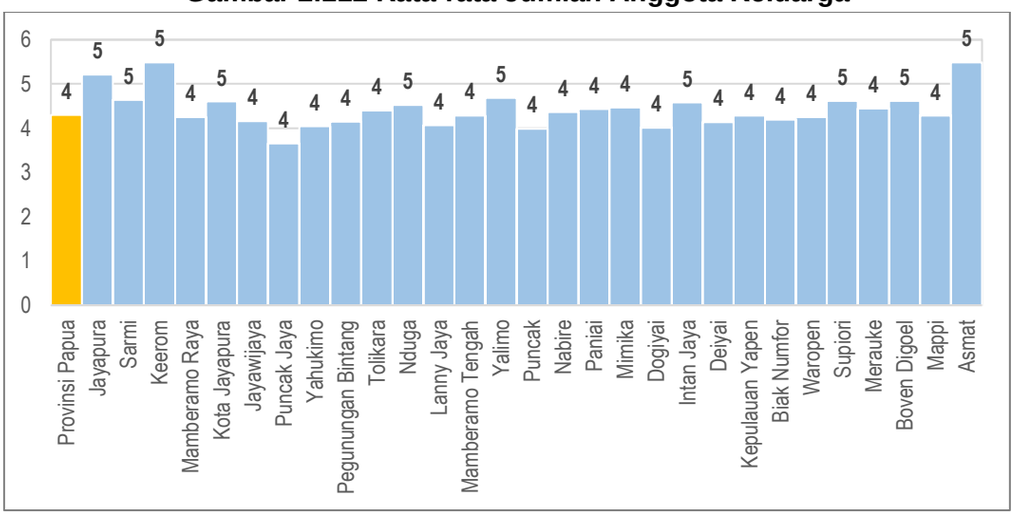

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Berdasarkan kabupaten/kota di Papua, terdapat 11 daerah yang memiliki rata-rata jumlah anggota keluarga di atas rata-rata provinsi di antaranya ialah Kabupaten Jayapura, Sarmi, Keerom, Kota Jayapura, Nduga, Yalimo, Intan Jaya, Supiori, Boven Digoel dan Asmat yaitu rata-rata 5 (lima) orang. Sedangkan daerah lainnya memiliki rata-rata jumlah anggora keluarga di bawa rata-rata provinsi.

2) Keluarga Berencana

Persentase pasangan usia subur (PUS) dalam menyukseskan program keluarga berencana dapat terdeteksi melalui partisipasinya menjadi akseptor KB. Tinggi rendahnya tingkat kesadaran PUS selain bersumber dari kesadarannya sendiri juga dipengaruhi oleh kemampuan layanan pemerintah khususnya para aparatur yang berperan di dalam pelaksanaan program tersebut.

Tabel 2.40 Rasio Akseptor KB

Wilayah Adat	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Mamta	Jayapura	95,46	51,63	22,08	37,55	86,33
	Sarmi		131,70	123,24	51,51	20,96
	Keerom	53,80	45,63	45,63	31,68	100,00
	Mamberamo Raya	100,00	33,41	33,41	100,00	100,00
	Kota Jayapura	87,84	95,16	95,16	85,35	98,34
La Pago	Jayawijaya	5,73	8,62	5,45	92,02	84,34
	Puncak Jaya	100,00	19,19	19,19	72,71	42,86
	Yahukimo		31,06	31,06	15,46	7,55
	Pegunungan Bintang	100,00	80,14	75,11	45,03	37,81
	Tolikara		10,13	10,13	100,00	100,00
	Nduga	100,00	65,05	65,05	100,00	100,00
	Lanny Jaya	100,00	45,35	45,35	9,78	68,14
	Mamberamo Tengah		80,74	80,74	55,42	100,00
	Yalimo	100,00	97,31	97,31	38,40	58,99
	Puncak		81,43	81,43	41,87	86,11
Mee Pago	Nabire	51,17	52,88	52,88	41,35	100,00
	Paniai	100,00	94,18	94,22	62,15	100,00
	Mimika	90,52	21,00	21,00	75,09	100,00
	Dogiyai	100,00	96,59	96,59	20,88	100,00
	Intan Jaya		23,71	23,71	27,14	100,00
	Deiyai		29,36	29,36	14,53	100,00
Saereri	Kepulauan Yapen	100,00	35,62	35,62	68,97	65,21
	Biak Numfor	57,16	19,49	19,47	63,13	53,92
	Waropen	100,00	11,21	11,21	44,93	50,70
	Supiori	44,37	15,42	15,42	22,33	82,24
	Merauke	100,00	9,84	9,84	54,60	61,56

Wilayah Adat	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Anim Ha	Boven Digoel		13,34	13,34	32,91	38,63
	Mappi	100,00	31,49	31,49	100,00	100,00
	Asmat		49,85	49,85	82,03	65,52
	Papua	**82,94**	**37,03**	**33,38**	**55,32**	**79,37**

Sumber: Papua Dalam Angka 2014-2018

Pada Tabel 2.40 tercatat rasio akseptor KB di Provinsi Papua menunjukkan kondisi yang cenderung semakin meningkat. Secara keseluruhan di Provinsi Papua terdapat 18 daerah yang menunjukkan rasio akseptor KB cenderung semakin meningkat. Sedangkan 11 daerah lainnya terlihat memiliki nilai yang cenderung mengalami penurunan.

Tabel 2.41 Jumlah PUS yang Tidak ber-KB

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Papua	40.608	218.477	231.160	181.876	41.122
Jayapura	1.334	18.990	30.590	40.304	3.600
Sarmi		-292	-214	1.941	1.938
Keerom	4.357	6.246	6.246	13.446	0
Mamberamo Raya	0	2.077	2.077	0	0
Jayapura	3.865	1.705	1.703	4.911	1.016
Jayawijaya	856	24.673	25.528	1.319	683
Puncak Jaya	0	11.362	11.362	524	424
Yahukimo		5.214	5.214	4.058	2.840
Pegunungan Bintang	0	600	752	1.311	875
Tolikara		17.441	17.441	0	0
Nduga	0	866	866	0	0
Lanny Jaya	0	2.005	2.005	14.633	582
Mamberamo Tengah		251	251	794	0
Yalimo	0	36	36	2.294	269
Puncak		179	179	1.645	71
Nabire	10.555	10.994	10.994	24.812	0
Paniai	0	640	636	2.485	0
Mimika	7.777	16.520	16.680	14.069	0
Dogiyai	0	46	46	4.484	0
Intan Jaya		4.113	4.113	145	0
Deiyai		2.394	2.394	4.224	0
Kepulauan Yapen	0	5.500	5.500	2.786	2.728
Biak Numfor	10.926	20.866	20.870	11.508	11.434
Waropen	0	6.433	6.433	1.663	841
Supiori	938	2.233	2.233	2.021	100
Merauke	0	44.578	44.578	21.718	10.999
Boven Digoel		7.916	7.916	4.020	2.380
Mappi	0	3.513	3.513	0	0
Asmat		1.378	1.378	761	342

Sumber: Papua dalam angka 2015-2018

2.1.5.2.9. Perhubungan

1) Transportasi Darat

Ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan di Provinsi Papua pada tahun 2016 mencapai 1:214 yang berarti bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 km dapat diakses kendaraan sebanyak 214 unit kedaraaan. Hal ini berbeda dengan tahun 2013, yaitu sepanjang 1 km dapat diakses oleh 391 unit kendaraan baik roda empat, roda dua dan kendaraan lainnya.

Gambar 2.113 menunjukkan adanya perubahan di masing-masing wilayah di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2016. Dari data statistik yang diperoleh Kota Jayapura memiliki perbandingan yang paling besar di antara beberapa kabupaten lainnya yaitu mencapai 1;1,896 yang berarti bahwa dalam 1 km diakses oleh 1,896 unit kendaraan, jika dibandingkan dengan tahun 2014 berarti terjadi penambahan unit kendaraan baik roda empat, dua dan lainnya. Selain itu, terdapat juga kabupaten lain yangt ercatat secara statistik memiliki rasio panjang jalan terhadap kendaraan meningkat di antaranya adalah Kabupaten Sarmi, Yahukimo, Kepulauan Yapen, Jayawijaya dan Merauke yang menandakan adanya peningkatan unit kendaraan. Sedangkan daerah lainnya seperti Kabupaten Waropen, Keerom, Mappi, Paniai, Biak Numfor, dan Kabupaten Jayapura memiliki nilai rasio yang menurun. Hal tersebut mengindikasikan adanya penambahan ruas jalan selama ini.

Gambar 2.113 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

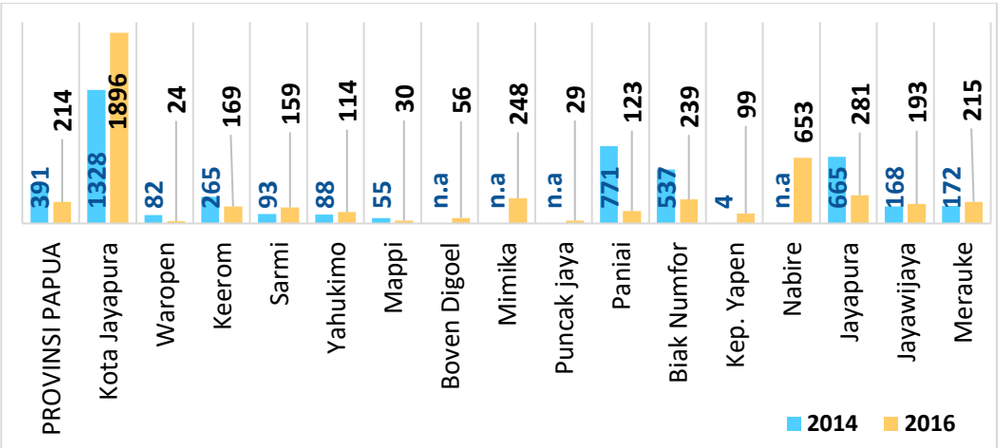

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2015-2018 (data diolah)

Dalam pelayanan transportasi darat di Provinsi Papua, terdapat 5 terminal tipe C, yaitu:

- Entrop di Kota Jayapura;

- Wamena di Kabupaten Jayawijaya;
- Oyehe di Kabupaten Paniai;
- Merauke di Kabupaten Merauke; dan
- Biak di Kabupaten Biak Numfor.

2.1.5.2.10. Komunikasi dan Informatika

Hingga awal 2018, total BTS yang telah didirikan tiga operator di seluruh wilayah Papua sebanyak 4.644 unit. Dengan jumlah terbanyak dibangun oleh Telkomsel. Anak perusahaan Telkom itu mengoperasikan 4.461 unit BTS. Jumlah tersebut sangat berbeda jika dibandingkan dengan BTS milik Indosat 137 unit BTS, dan XL 46 unit BTS. Dengan jumlah BTS seperti itu, Telkomsel menjadi perusahaan yang mendominasi, yakni 96,06%. Bandingkan dengan Indosat Ooredoo 2,95% dan XL Axiata 0,99%.

Gambar 2.114 Individu yang Menggunakan Telepon Genggam dan Internet

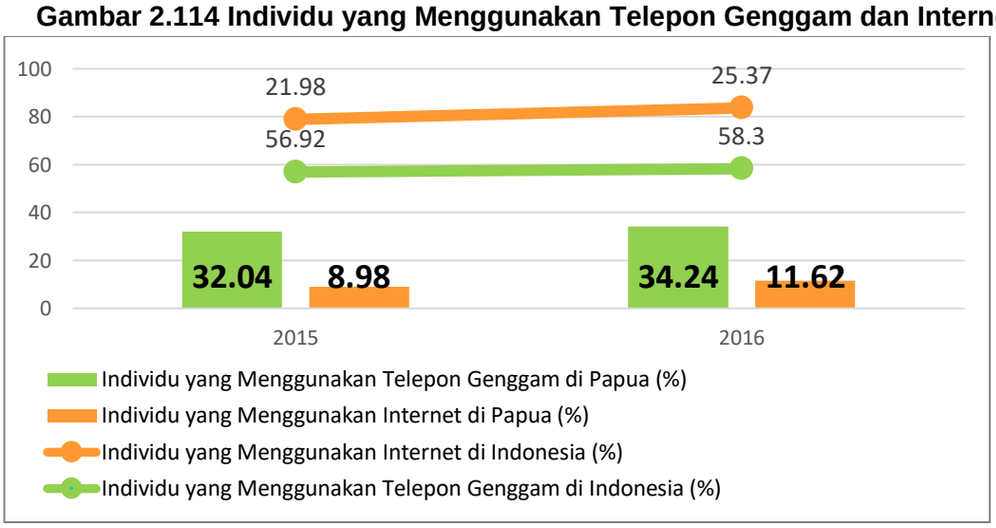

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2015-2016 (data diolah)

Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam di Indonesia mencapai 56,92% pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 mencapai 58,3%. Sedangkan di wilayah Provinsi Papua mencapai 32,04% dan meningkat menjadi 34,24%. Sementara proporsi individu yang menggunakan internet di Indonesia mencapai 21,96% pada tahun 2015, meningkat menjadi 25,37% pada tahun 2016. Di Provinsi Papua proporsi individu yang menggunakan internet sebesar 8,98% pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi 11,62% pada tahun 2016.

2.1.5.2.11. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

Berdasarkan data stitistik koperasi yang diperoleh di Provinsi Papua tercatat sampai dengan tahun 2016 koperasi yang aktif adalah sebesar 52,48% yang tersebar di 29 kabupaten/kota. Secara kewilayahan tercatat 4 Kabupaten dengan koperasi yang masih aktif di atas 80 persen di antaranya adalah Kabupaten Supiori (85,19%), Mimika (81,41%), Pegunungan Bintang (96,26%) dan Kabupaten Yahukimo (98,31%). Sedangkan daerah lainnya memiliki koperasi aktif berada pada kisaran 20-75%.

Gambar 2.115 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016

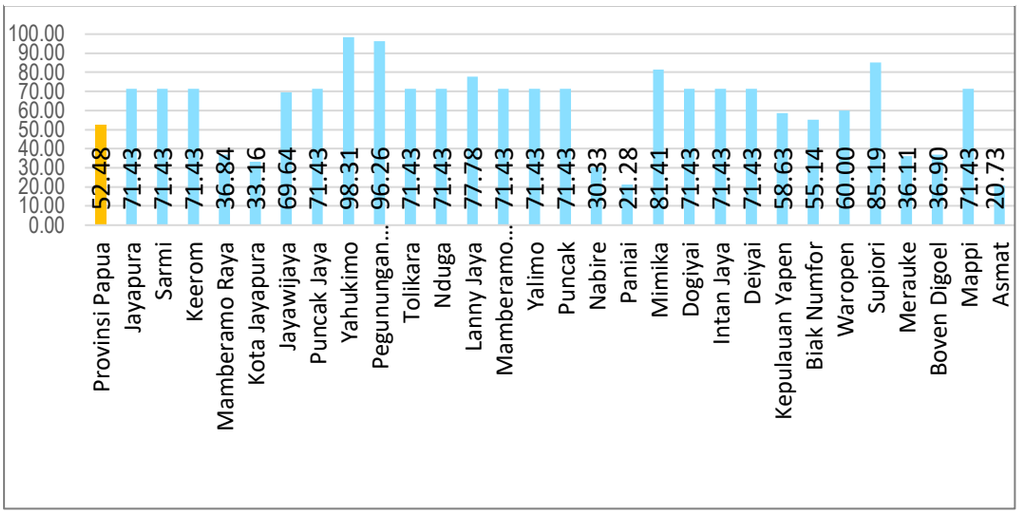

Sumber: Dinas Koperasi Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

2.1.5.2.12. Penanaman Modal

Dalam mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, maka Provinsi Papua masih memerlukan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Data di atas menunjukkan sepanjang tahun 2013-2016 jumlah investor baik PMDN maupun PMA di Provinsi Papua memiliki nilai rata-rata pertumbuhan terlihat semakin menurun hingga 37,74% setiap tahunnya. Meskipun demikian nilai investasi memiliki baik PMDN dan PMA terlihat cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Walaupun tidak konsisten mengalami peningkatan, namun tercatat hingga tahun 2016 nilai investasi mencapai Rp. 122,55 triliun. Jika dipilah berdasarkan kewilayahan, terdapat 2 (dua) kabupaten dengan jumlah investor terbanyak yaitu Kabupaten Jayapura (Mamta) dan Kabupaten Merauke (Anim Ha).

Tabel 2.42 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN dan PMA)

Kabupaten/ Kota	2013		2014		2015		2016	
	Investor (unit)	Nilai Investasi (Rp juta)	Investor (unit)	Nilai Investasi (Rp juta)	Investor (unit)	Nilai Investasi (Rp juta)	Investor (unit)	Nilai Investasi (Rp juta)
Papua	168	109.304.355	186	38.874.752	200	94.044.386	87	122.549.122
Jayapura	17	1.281.963	17	15.650.852	18	11.942.907	13	14.636.407
Sarmi	3	573.49	6	726.00	7	578.34	4	578.34
Keerom	9	5.208.126	11	3.384.978	11	5.903.366	9	5.903.366
Mamb. Raya	3	347.66	3	695.32	3	347.66	3	347.66
Jayapura	11	1.589.534	12	1.000.000	12	9.924.848	2	10.167.243
Jayawijaya	2	1.65	2	-	2	1.65	-	1.65
Yahukimo	3	-	3	-	3	-	3	-
Peg. Bintang	1	-	1	-	1	-	1	-
Nabire	3	-	22	221.94	24	1.585.245	4	2.689.474
Paniai	39	91.76	3	1.762.067	5	12.284.190	1	10.400.867
Mimika	5	25.02	40	1.540.124	42	29.145.320	6	44.786.011
Deiyai	-	-	-	-	-	-	1	-
Kep. Yapen	-	105.92	-	-	1	50.00	1	291.61
Biak Numfor	18	7.978.398	5	-	5	101.51	1	124.67
Waropen	6	-	6	-	5	-	4	-
Merauke	30	91.462.088	33	11.138.252	39	14.548.865	20	23.773.819
Boven Digoel	12	537.24	13	2.630.218	13	7.505.484	6	8.723.005
Mappi	4	-	7	125.00	7	125.00	7	125.00
Asmat	1	-	1	-	1	-	1	-

Sumber: Papua dalam angka 2015-2017

Rasio daya serap tenaga kerja dari perusahaan PMA dan PMDN di Provinsi Papua setiap tahunnya mengalami penurunan. Tahun 2013 dari rata-rata satu perusahaan menyerap 250 tenaga kerja menurun hingga tahun 2017 sebesar satu perusahaan menyerap 78 tenaga kerja. Hal tersebut disebabkan bertambahnya jumlah perusahaan dan penurunan jumlah tenaga kerja di Provinsi Papua sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 tidak proporsional.

Tabel 2.43 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Dari Perusahaan PMA Dan PMDN

Indikator	2013	2014	2015	2016
Perusahaan				
PMDN	66	78	78	87
PMA	102	108	122	126
Jumlah Perusahaan	**168**	**186**	**200**	**213**
Tenaga Kerja				
PMDN	41.031	42.154	14.805	14.881
PMA	971	1.028	1.033	1.701
Jumlah Tenaga Kerja	**42.002**	**43.182**	**15.838**	**16.582**
Rasio	**250**	**232**	**79**	**78**

Sumber: Papua dalam angka 2015-2017 (diolah)

2.1.5.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental). Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku beresiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipasif dan keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio-ekonomi dan politik.

1) Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan

Dengan semakin banyaknya event olahraga baik pada tingkat kabupaten, nasional maupun internasional dalam beberapa tahun terakhir tercatat klub olahraga di Provinsi Papua juga kian bertambah setiap tahunnya. Pertumbuhan klub-klub olahraga berbagai cabang olaharaga sepanjang tahun 2013-2017 rata-rata bertumbuh sebesar 4,98% per tahunnya.

Gambar 2.116 Capaian Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga

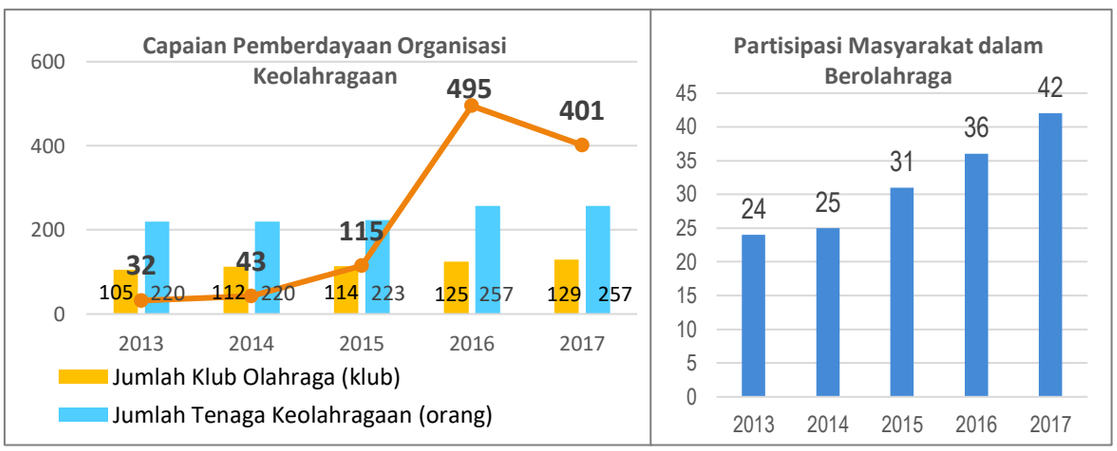

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2018 (diolah)

Sampai dengan tahun tahun 2017 secara keseluruhan tercatat klub olahraga di Provinsi Papua ada 129 klub dengan berbagai macam cabor. Jumlah tenaga dan keolahragaan yang berkualitas Provinsi Papua secara konsisten juga terus mengalami peningkatan dari tahun

ke tahun. Pada tahun 2013 tercatat ada sebanyak 220 orang tenaga keolahragaan dan terus meningkat sampai dengan tahun 2017 yaitu sebanyak 257 orang. Bertambahnya klub-klub olahraga tersebut diikuti dengan semakin bertambahnya atlet-atlet yang berprestasi di bidang olahraga baik pada ajang kabupaten, nasional maupun internasional dalam waktu beberapa tahun terakhir ini.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlah atlet berprestasi di Provinsi Papua maningkat sangat pesat. Tercatat rata-rata pertumbuhan atlet yang berprestasi hingga mencapai 35,38% setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2017 jumlah atlet yang berprestasi tercatat sebanyak 401 orang, meskipun sempat menurun dari tahun sebelumnya yang mencatata sebanyak 495 orang. Selanjutnya, partisipasi masyarakat di Provinsi Papua selama ini juga terus mengalami peningkatan dalam bidang olahraga. Adanya partisipasi masyarakat dalam berolahraga di Provinsi Papua terlihat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (lihat Gambar 2.116).

2) Organisasi Kepemudaan

Dalam meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan di Provinsi Papua selama ini, terdapat beberapa indikator dalam peningkatan peran serta kepemudaan di antaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.44 Pemberdayaan Pemuda Provinsi Papua tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Organisasi Pemuda	43	43	44	47	47
Jumlah Lembaga dan Organisasi Kepemudaan Terbina	32	32	32	30	33
Organisasi pemuda yang aktif	32	32	32	32	32
Jumlah Pelatihan Kewirausahaan untuk Kelompok Pemuda	45	45	45	30	115

Sumber: Provinsi Papua

Dari beberapa indikator di atas terlihat semuanya mengalami peningkatan yang positif. Tercatat organisasi pemuda di Provinsi Papua terus bertambah dari tahun-ke tahun, sampai dengan tahun 2017 ada sebanyak 47 oraganisasi pemuda yang tersebar di 29 kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah juga konsisten melakukan pembinaan maupun kegiatan pelatihan lainnya terhadap lembaga maupun organisasi kepemudaan, pada tahun 2017 sudah ada 33

lembaga/oraganisasi yang terbina dan 115 kelompok usaha yang diberdayakan.

3) Sarana dan Prasarana Olahraga

Dalam menunjang capaian olahraga terus konsisten, perlu juga didukung dengan sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Provinsi Papua saat ini memiliki sarana dan prasarana olahraga terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2017. Tercatat sarana olahraga masyarakat dan ruang publik bermutu sampai dengan tahun 2017 ada sebanyak 186 unit, kemudian gedung olaraga 15 unit dan sarana olahraga untuk pusat pertandingan sebanyak 176 unit

Tabel 2.45 Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Papua tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah sarana olahraga masyarakat, olahraga, pendidikan dan ruang publik bermutu	175	175	175	186	186
Jumlah Gedung olahraga	8	10	10	15	15
Jumlah sarana olahraga untuk pusat pertandingan	175	175	175	175	176

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2017

2.1.5.2.14. Statistik

Kondisi daerah terkait dengan kondisi statistik dapat dilihat dari ketersediaan dokumen statistik daerah. Dokumen statistik tersebut sangat diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan perencanaan, perumusan kebijakan strategis daerah, serta bahan untuk evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah. Di Provinsi Papua selain didukung dengan adanya instansi BPS, Provinsi Papua juga saat ini memiliki pusat data pembangunan yang merupakan salah satu unit di bawah Bappeda yaitu Pusat Data Dan Analisis Pembangunan Provinsi Papua, yang disingkat PUSDALISBANG.

PUSDALIBANG Provinsi Papua adalah Wadah yang berfungsi sebagai pengelola data dan informasi pembangunan daerah. Selain itu Pusat Data dan Analisa Pembangunan berfungsi untuk : (1) menjembatani jaringan-jaringan dengan pemangku kepentingan pembangunan, (2) mendukung dipergunakannya data dan informasi tersebut oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah, (3) mendorong pengembangan kapasitas dan secara proaktif menyebarkan data dan informasi

(terutama dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran) kepada publik dan pemerintah.

Muatan utama dari produk PUSDALISBANG adalah statistik hasil-hasil pembangunan dari penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua, penyediaan data SIPD, analisis data statistik kinerja pembangunan, dan penyajian data statistik secara tematik, holistik, integratif dan spasial. Selama tahun 2016-2018, PUSDALISBANG Provinsi Papua telah menghasilkan beberapa dokumen statistik dan analisis pembangunan, antara lain : (1) Infografis Potret Capaian Pembangunan Papua, (2) Indeks Kinerja Pembangunan Provinsi Papua, (3) Capaian Kinerja Pembangunan Provinsi Papua, (4) Pencapaian Indikator Makro Provinsi Papua, (5) Analisis Pembangunan Manusia Provinsi Papua. Dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan, PUSDALISBANG Provinsi Papua juga telah mengembangkan *e-Government* yang dapat diakses melalui website : https:// pusdalisbang.papua.go.id/ pusdalisbang_devel.

2.1.5.2.15. Kebudayaan

Untuk menjaga dan melestarikan seni budaya Papua, saat ini telah tersedia sarana dan prasarana penunjang seni dan budaya berupa museum dan gedung-gedung kesenian. Dimana museum yang terbesar ada 2 (dua) gedung yang berlokasi di Kota Jayapura yaitu Museum Negeri Papua yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua, dan Museum Loka Budaya yang dikelola oleh Universitas Cenderawasih.

Koleksi seni budaya Papua pada Museum Negeri Papua kurang lebih sebanyak 3.447 koleksi yang meliputi benda geologi, biologi, etnografi, arkeologi, sejarah, numismatik, fisiologi, keramik, seni rupa, profil manusia, peta, dan diorama. Museum ini dilengkapi fasilitas sebagai berikut, ruang Pameran Tetap, ruang Pameran Temporer, ruang Auditorium, ruang Perpustakaan, ruang laboratorium, ruang Penyimpanan Koleksi, ruang Bengkel/ Preparasi, dan ruang Administrasi. Sedangkan koleksi utama dari Museum Loka Budaya adalah benda-benda etnografi yang berasal dari 270-an suku di Papua yang terdiri atas: peralatan dapur; peralatan yang berhubungan dengan mata pencaharian hidup seperti peralatan bercocok tanam,

berburu dan menangkap ikan; busana dan perhiasan tubuh; peralatan perang; peralatan membayar harta (mas kawin, denda,dll); benda-benda sakral; alat transportasi dan alat-alat musik.

Dalam Dokumen Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia yang dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, tercatat sudah ada 17 Karya Budaya yang merupakan warisan suku-suku asli Papua. Mulai dari Yosim Pancar, Ukiran Asmat, hingga Pokem yang merupakan salah satu kemahiran dan kerajinan tradisional Papua. Selengkapnya perkembangan WBTB Papua dapat dilihat pada Tabel 2.47 berikut.

Tabel 2.46 Perkembangan Warisan Budaya Tak Benda Papua

Tahun	No	Nama Karya Budaya	Asal Daerah	Kategori
2013	67	Yosim Pancar	Papua	Seni Pertunjukan
2013	68	Ukiran Asmat	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2013	69	Barappen	Papua	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan
2013	70	Tifa	Papua	Seni Pertunjukan
2013	77	Noken	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2015	119	Papeda	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2015	120	Tomako Batu	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2015	121	Koteka	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2016	141	Wor Biak	Papua	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
2016	142	Elha	Papua	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
2016	143	Aker	Papua	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
2016	144	Honai	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2016	145	Khombow	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2016	146	Terfo	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2017	142	Ndambu	Papua	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
2017	143	Yu	Papua	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
2017	144	Pokem	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2018

Salah satu keberhasilan pemerintah provinsi dalam mempromosikan dan menjaga kelestarian budaya Papua adalah mempatenkan Noken sebagai salah satu warisan dunia. Dimana pada tahun 2011 Noken Papua telah dinobatkan oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda dari Indonesia yang membutuhkan pelindungan mendesak. Noken Papua adalah hasil daya cipta, rasa dan karsa yang dimiliki manusia berbudaya dan beradat. Walaupun Noken berbentuk seperti halnya tas yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan berbagai macam benda dan peralatan, namun masyarakat Papua sendiri tidak menyebut noken sebagai tas. Bagi masyarakat Papua, Noken memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan tas yang diproduksi pabrik, baik secara bahan, jenis, model maupun bentuk Noken.

Tingkat apresiasi terhadap seni dan budaya daerah di Provinsi Papua dinilai cukup tinggi yaitu sebesar 75 persen dalam rentang waktu empat tahun terakhir. Tercatat pada tahun 2013 tingkat apresiasi terhadap seni dan budaya adalah sebesar 80 persen, namun mengalami penurunan di tahun 2014 sebesar 75 persen dan terus bertahan sampai dengan tahun 2017. Hal tersebut bisa terjadi disebabkan salah satunya oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang seni dan budaya daerah Papua yang sudah mulai berkurang.

Gambar 2.117 Tingkat Apresiasi Seni dan Budaya Daerah di Kalangan Pemerintah, Masyarakat dan Swasta

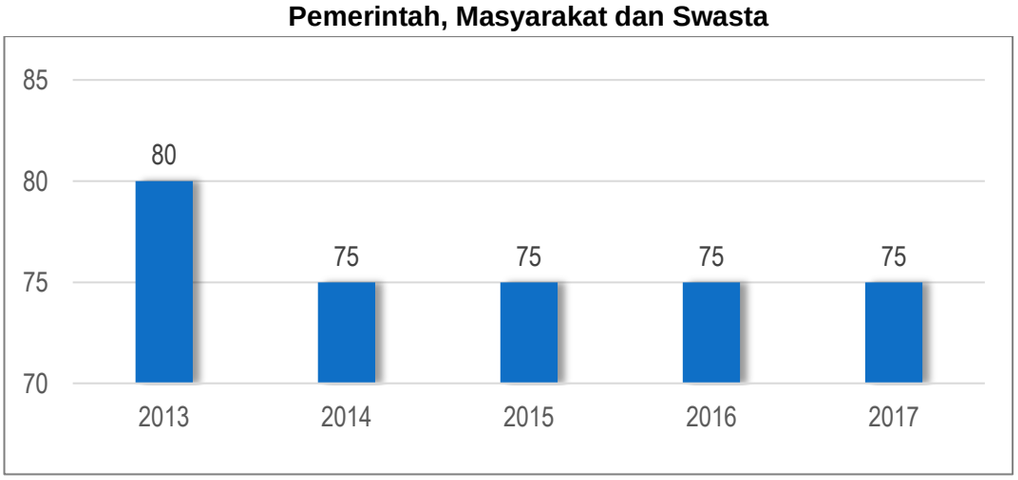

Sumber: Pemerintah Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

2.1.5.2.16. Perpustakaan

Sepanjang tahun 2013-2016 gedung perpustakaan di Provinsi Papua mengalami peningkatan dan tersebar di 29 kabupaten/kota. Tercatat peningkatan jumlah gedung perpustakaan dimulai dari tahun 2013 sebanyak 23 unit kemudian meningkat sampai dengan tahun 2017 sebesar 321 unit. Hal tersebut menunjukan bahwa dengan semakin meningkatnya perpustakaan di Provinsi Papua dapat memberikan ruang kepada siapa saja untuk mendapatkan pelayanan tersebut.

Gambar 2.118 Kondisi Perpustakaan di Provinsi Papua

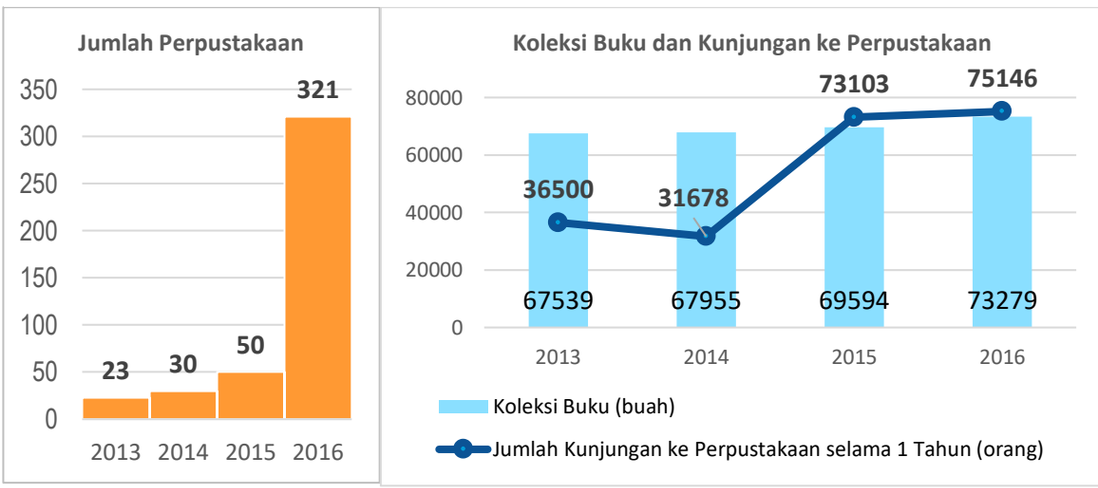

Sumber: Provinsi Papua

Selain itu, koleksi buku yang tersedia juga mengalami peningkatan dalam rentan waktu empat tahun terakhir. Tercatat rata-rata peningkatan koleksi buku di Provinsi Papua meningkat sebesar 5,24% setiap tahunnya, meskipun terlihat ada penurunan jumlah koleksi buku 11,70 persen dari tahun 2013-2014 dan 27,88 persen di tahun 2015-2016. Selanjutnya, dengan semakin banyaknya perpustakaan yang dibuka ini membuat jumlah kunjungan ke perpustakaan juga terlihat terus mengalami peningkatan. Tercatat sampai dengan tahun 2016 jumlah pengunjung perpustakaan mencapai 75,146 pengunjung. Dengan rata-rata pertahun meningkat sebesar 14,72%.

2.1.5.2.17. Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya

manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Perangkat daerah (PD) yang menerapkan arsip secara baku merupakan perangkat yang memiliki tenaga arsip dan telah mengikuti pembekalan serta pelatihan sistem kearsipan pola baru, menggunakan kartu kendali dengan sistem dosir (berdasarkan per kegiatan), sistem rubrik (berdasarkan permasalahan), sistem seri (berdasarkan kesamaan jenis), penataan arsipnya telah berdasarkan kode klasifikasi, memiliki sarana dan prasarana antara lain meliputi: almari katalog, filling cabinet, map gantung, lembar disposisi, lembar pengantar, daftar pengendali, kartu kendali masuk dan keluar. Berdasarkan Gambar 2.119, diketahui bahwa perangkat daerah (PD) yang telah menenrapkan arsip secara baku baru mencapai 24 PD, dengan kata lain masih terdapat beberapa OPD yang belum menerapkan arsip masing-masing PD secara baku.

Gambar 2.119 Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip secara Baku

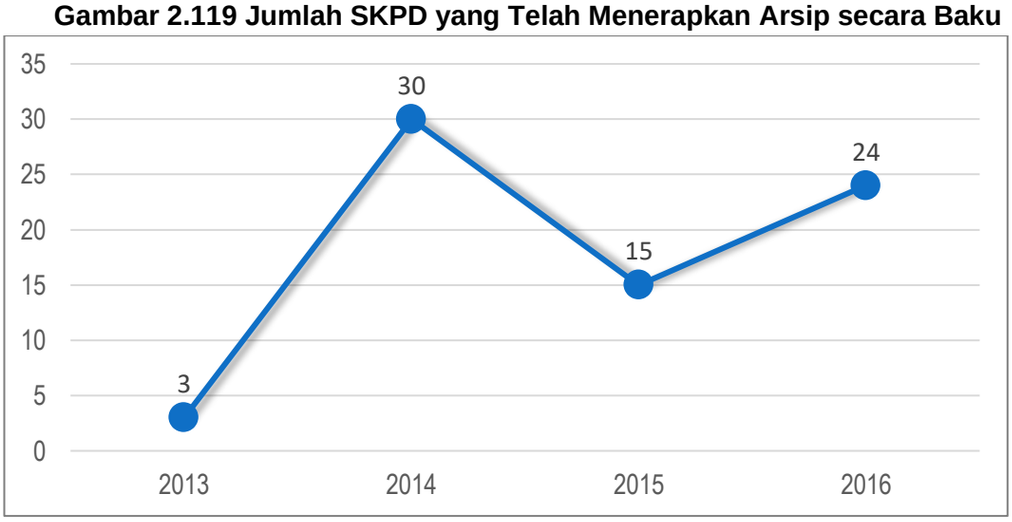

Sumber: Pemerintah Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

2.1.5.3. Layanan Urusan Pilihan

2.1.5.3.1. Pariwisata

Potensi pariwisata di Provinsi Papua sangat beragam jenisnya yang tersebar di 29 kabupaten/kota. Objek wisata di Papua terbagi atas dua kelompok yaitu wisata alam dan wisata buatan. Tercatat objek wisata alam di Provinsi Papua terdiri dari 120 objek, dan objek wisata buatan sebanyak 13 objek (lihat Gambar 2.120).

Gambar 2.120 Jumlah Objek Wisata dan Kunjungan Tamu di Provinsi Papua

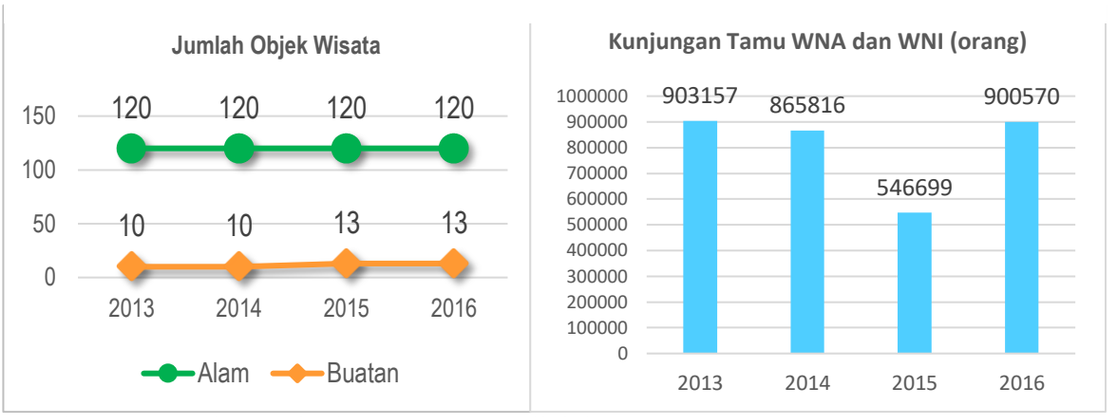

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2018 (diolah)

Berdasarkan Gambar 2.120, diketahui bahwa kunjungan wisata di Provinsi Papua cenderung mengalami penurunan baik wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Sebaran kunjungan wisatawan di Papua tidak terlepas dari adanya event-event yang dilaksanakan hampir ada di setiap tahun di berbagai daerah di Papua. Tercatat sampai dengan tahun 2016 jumlah wisatawan dalam negeri maupun mancanegara mencapai 900,570 orang atau meningkat sebesar 39,29% dari tahun sebelumnya. Selain itu, lama kunjungan wisatawan di papua sangat beragam dalam rentan waktu empat tahun terakhir, tercatat rata-rata lama kunjungan berkisar antara 2-6 hari setiap tahunnya.

Gambar 2.121 Jumlah Tamu WNA dan WNI Tahun 2016 (orang)

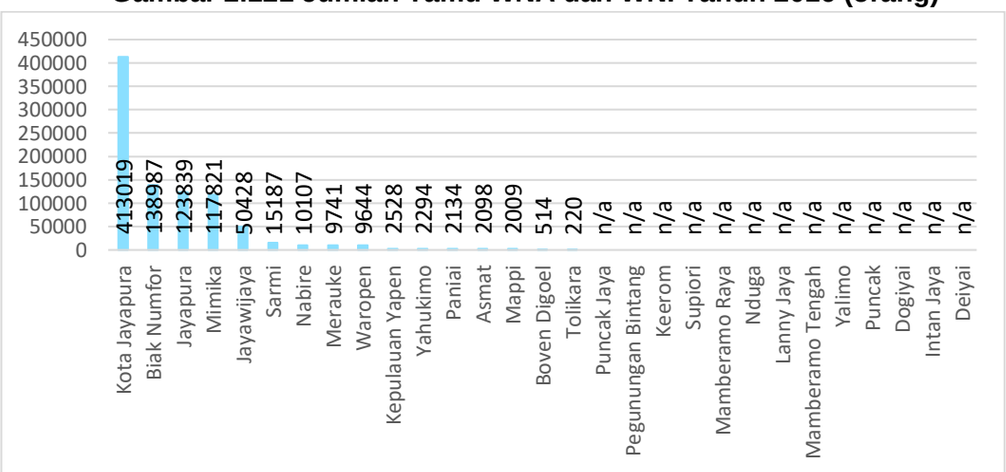

Sumber: Statistik BPS

2.1.5.3.2. Pertanian

Perkembangan pertanian di Provinsi Papua dapat dilihat dari kontribusi sub kategori pertanian terhadap perekonomian Papua dan

produktivitas serta hasil produksi pertanian di Papua. Berdasarkan Tabel 2.47, diketahui bahwa rata-rata produktifitas pertanian terus mengalami penurunan. Hal tersebut terlihat pada produktifitas total di Papua terus menurun dari 9,82 ton/ha di tahun 2013 menjadi 7,37 ton/ha di tahun 2016 dan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Rata-rata setiap tahunnya produktifitas berkurang hingga mencapai 8,65%. Hal ini disebabkan juga oleh produksi total pertanian yang terus mengalami penurunan hingga mencapai 0,16% khususunya pada tanaman padi sawah yang setiap tahunnya memiliki jumlah produksi menurun paling tinggi yaitu sebesar 12,32% per tahunnya.

Tabel 2.47 Luas Panen, Produksi Dan Produktifitas Komoditas Utama Pertanian Di Provinsi Papua Tahun 2013-2017

Komoditi	2013	2014	2015	2016	2017	Rata²
Luas Panen (Hektar)						
Padi Sawah	38.338	40.138	38.977	51.730	55.004	44.837
Jagung	3.002	2.951	2.736	3.342	3.464	3.099
Kacang Kedelai	3.750	3.258	2.761	5.723	6.282	4.355
Kacang Tanah	1.951	1.994	2.268	2.902	3.187	2.460
Ubi Kayu	3.171	3.729	3.822	3.463	3.559	3.549
Ubi Jalar	30.980	33.041	36.091	35.863	37.656	34.726
Total	81.192	85.111	86.655	103.023	109.152	93.027
Produksi (Ton)						
Padi Sawah	338.988	356.515	374.949	224.945	243.328	307.745
Jagung	7.034	6.948	6.666	8.143	8.550	7.468
Kacang Kedelai	4.609	3.821	3.523	7.964	9.082	5.800
Kacang Tanah	2.045	2.043	2.498	3.308	3.729	2.725
Ubi Kayu	38.900	45.512	46.388	45.059	47.112	44.594
Ubi Jalar	405.521	411.893	446.952	469.441	492.913	445.344
Produktifitas (Ton/Hektar)						
Padi Sawah	8,84	8,88	9,62	4,35	4,42	7,22
Jagung	2,34	2,35	2,44	2,44	2,47	2,41
Kacang Kedelai	1,23	1,17	1,28	1,39	1,45	1,30
Kacang Tanah	1,05	1,02	1,10	1,14	1,17	1,10
Ubi Kayu	12,27	12,20	12,14	13,01	13,24	12,57
Ubi Jalar	13,09	12,47	12,38	13,09	13,09	12,82

Sumber: Bappeda Papua, 2018 (data diolah)

Secara keseluruhan terdapat empat komoditi dengan produktifitas mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu Jagung, Kacang Kedelai, Kacang Tanah dan Ubi Kayu. Sedangkan padi sawah

dan ubi jalar mengalami penurunan hingga mencapai masing-masing sebesar 27,86 dan 0,07%. Namun secara nilai produksi terlihat bahwa hampir semua jenis komoditi ini terus menglami perbaikan, kecuali padi sawah.

Tabel 2.48 Luas Panen, Produksi Dan Produktifitas Komoditas Utama Perkebunan Di Provinsi Papua Tahun 2013-2017

Komoditi	2013	2014	2015	2016	2017	Rata²
Luas Panen (Hektar)						
Kakao	32.491	33.590	34.950	35.223	34.130	34.077
Kopi	7.852	9.765	10.067	11.839	10.906	10.086
Kelapa	23.576	31.416	27.305	125.486	25.063	46.569
Karet	4.158	4.297	4.387	6.707	8.659	5.642
Karet	14.244	17.795	14.244	14.244	14.244	14.954
Sagu	7.014	12.716	13.516	35.486	155.675	44.881
Pinang	2.999	3.304	3.882	4.435	4.245	3.773
Mente	4.831	4.831	4.796	5.100	2.351	4.382
Cengkeh	575	576	576	30	323	416
Lada	47	45	45	45	42	45
Kapuk Randu	741	799	799	816	853	802
Jarak Pagar	654	658	664	605	568	630
Total	99.182	119.792	115.231	240.016	257.059	166.256
Produksi (ton)						
Kakao	9.757	9.639	10.133	10.297	10.732	10.112
Kopi	1.472	1.771	2.009	3.101	2.503	2.171
Kelapa	15.583	14.157	15.320	15.993	16.136	15.438
Karet	3.285	3.285	3.342	3.342	6.990	4.049
Karet	812	13.802	8.121	8.121	8.121	7.795
Sagu	7.319	42.793	24.959	26.618	66.593	33.656
Pinang	457	921	602	1.107	1.117	841
Mente	573	574	584	593	709	607
Cengkeh	5	3	3	3	47	12
Lada	11	6	6	6	7	7
Kapuk Randu	86	35	35	35	110	60
Jarak Pagar	281	278	278	278	276	278
Produktifitas (Kilogram/Hektar)						
Kakao	300,30	286,96	289,93	292,34	314,44	296,79
Kopi	187,47	181,36	199,56	261,93	229,51	211,97
Kelapa	660,97	450,63	561,07	127,45	643,82	488,79
Karet	790,04	764,49	761,80	498,29	807,25	724,37
Karet	57,01	775,61	570,13	570,13	570,13	508,60
Sagu	1043,48	3365,29	1846,63	750,10	427,77	1486,65
Pinang	152,38	278,75	155,07	249,61	263,13	219,79
Mente	118,61	118,82	121,77	116,27	301,57	155,41
Cengkeh	8,70	5,21	5,21	100,00	145,51	52,92
Lada	234,04	133,33	133,33	133,33	166,67	160,14
Kapuk Randu	116,06	43,80	43,80	42,89	128,96	75,10
Jarak Pagar	429,66	422,49	418,67	459,50	485,92	443,25

Sumber: Bappeda Papua, 2018 (data diolah)

Dalam bidang perkebunan, secara keseluruhan luas panen untuk 12 komoditi di Provinsi Papua tercatat pada tahun 2013 sebesar

99.182 ha dan terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2017 sebesar 257,059 ha atau meningkat sebesar 61.42%. Produktivitas tanaman perkebunan di Provinsi Papua secara keseluruhan terus mengalami peningkatan, tercatat pada tahun 2013 adalah sebesar 400 ton/ha naik menjadi 441 ton/ha atau meningkat sebesar 9,35%. Jika dilihat per komoditi, tanaman cengkeh dan karet memiliki produktivitas tertinggi yaitu bisa mencapai di atas 90-95% yaitu pada tahun 2013 ke tahun 2017. Kemudian diikuti oleh komoditi pinang dan mente yang memiliki produktivitas berkisar antara 40-60% untuk tahun 2013 ke tahun 2017. Sedangkan komoditi lainnya hanya mampu meningkat di bawah 20% untuk tahun 2013-2017 (lihat Tabel 2.48).

2.1.5.3.3. Kehutanan

Secara keseluruhan total luas kawasan di Provinsi Papua adalah sebesar 32.757.059 Ha yang terdiri atas hutan produksi (terbatas), hutan produksi (tetap), hutan produksi (dapat dikonversi), hutan lindung, suaka alam dan pelestarian alam, areal lainnya dan kawasan perairan (lihat Gambar 2.122).

Gambar 2.122 Distribusi Penyebaran Luas Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Papua Tahun 2016

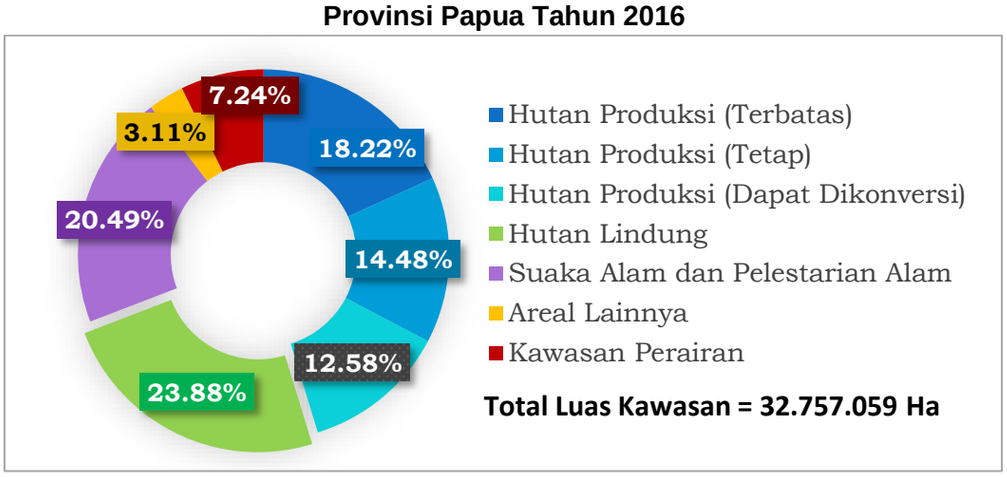

Sumber: Bappeda Papua, 2018 (data diolah)

Dengan luas kawasan hutan yang cukup luas, di dalamnya terdapat beberapa potensi hasil hutan yang cukup banyak di antaranya ialah produksi kayu bulat, kayu gergajian, kayu kapis dan verner dengan jumlah produksi yang berbeda-beda setiap jenisnya sepanjang tahun 2013-2017 (lihat Tabel 2.49). Produksi kayu bulat dalam kurun waktu 2013-2017 cenderung mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2014-2015 sempat mengalami peningkatan

sebesar 58,79% dan kemudian kembali terjadi penurunan hingga di tahun 2017 yaitu dengan nilai produksi sebesar 439,11 m^3. Selain itu, produksi kayu gergajian dan kayu lapis juga tercatat mengalami penurunan jumlah produksi terkecuali untuk verner yang terlihat mengalami peningkatan di tahun 2016-2017 sebesar 48,29% atau sebesar 302,85 m^3.

Tabel 2.49 Produksi Kayu Hutan Menurut Jenisnya di Provinsi Papua (m3)

Tahun	Kayu Bulat	Kayu Gergajian	Kayu Lapis	Verner
2013	578.440.360	465.516.793	213.840.594	-
2014	479.582.120	471.751.917	243.660.310	-
2015	1.163.665.550	526.274.724	279.573.630	-
2016	949.705.300	443.587.206	124.145.276	156.601.043
2017	439.119.900	124.022.400	-	302.848.336

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

2.1.5.3.4. Energi dan Sumber Daya Mineral

1) Luas Areal Pertambangan

Luas lahan pertambangan secara keseluruhan sampai dengan tahun 2016 tercatat adalah sebesar 3,35 juta ha yang terdiri atas kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan penambangan liar. Sepnjang tahun 2013-2016 luas areal penambangan terus meningkat dengan rata-rata 33,55% setiap tahunnya. Meningkatnya luas areal pertambangan di Provinsi Papua didominasi oleh kegiatan eksplorasi yang meningkat pesat pada tahun 2015-2016.

Tabel 2.50 Luas Areal Pengunaan Lahan Pertambangan (ha)

Uraian	2013	2014	2015	2016
Eksplorasi	100,204	100,204	3,023,359	3,257,179
Eksploitasi	100,204	100,402	100,402	100,402
Area Penambangan Liar	789	789	`789	789
Total	201,197	201,395	3,123,761	3,358,370

Sumber: Bappeda Papua, 2018

2) Potensi Sumber Daya Mineral

Jumlah cadangan berubara yang terdata di Provinsi Papua pada tahun 2013 mencapai 185,9 juta ton dan pada tahun 2016 meningkat mencapai 455,9 juta ton. Peningkatan tersebut disebabkan karena bertambahnya daerah yang ditemukan potensi sumber daya batubara di wilayah Papua. Perlu adanya perhatian dari permerintah Provinsi

Papua untuk mengeksplorasi sumber daya batubara yang ada sehingga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Adapun persentase pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Provinsi Papua hingga tahun 2016 baru mencapai 19% (lihat Gambar 2.123). Ekplorasi yang lebih mendalam perlu dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan sumberdaya sebagaimana kegunaannya. Namun pemerintah perlu memperhatikan keberlangsungan sumberdaya yang ada dan tidak merusak lingkungan.

Gambar 2.123 Jumlah Cadangan (Reserve) yang Terdata dan Tingkat Pengelolaan Sumber Daya Batubara di Provinsi Papua

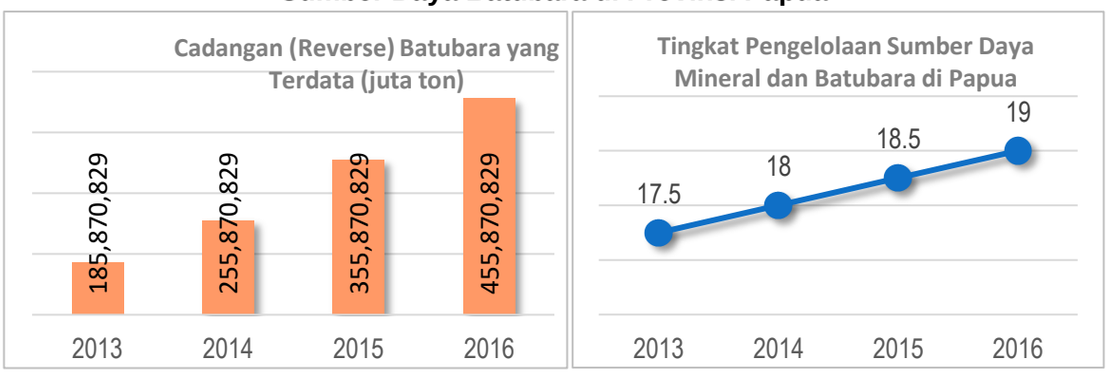

Sumber: Bappeda Papua, 2018

Jumlah cadangan tembaga dan emas yang telah diketahui di Provinsi Papua sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 terus menurun dari 1.651 juta ton biji tembaga pada tahun 2013 menurun hingga 1.498 juta ton tembaga pada tahun 2016. dan 27,21 juta ton bijih emas pada tahun 2013 menurun menjadi 25,29 juta ton bijih emas pada tahun 2016 (lihat Gambar 2.124).

Gambar 2.124 Potensi dan Jumlah Cadangan Tembaga dan Emas yang Sudah Diketahui (Juta Ton Bijih)

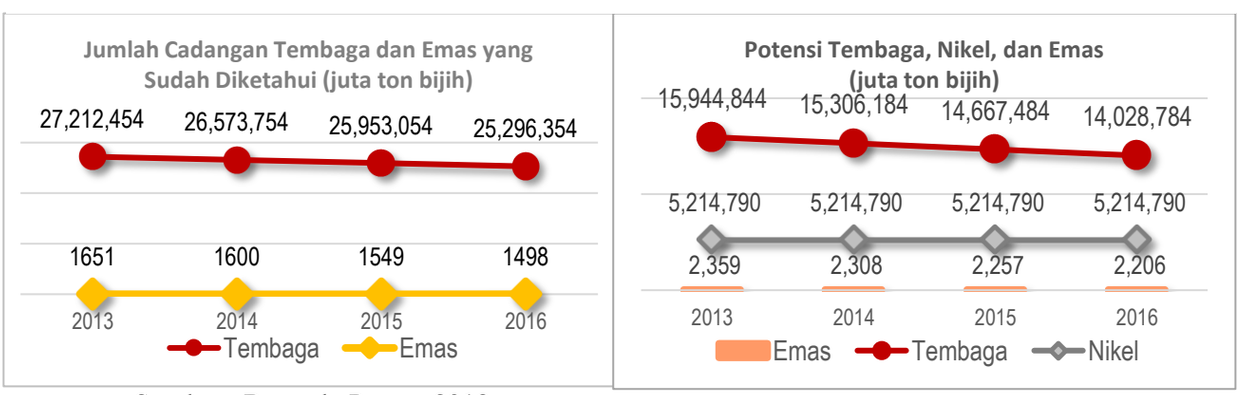

Sumber: Bappeda Papua, 2018

Potensi tembaga dan emas di Provinsi Papua menunjukkan penurunan sejak tahun 2013 sebanyak 15,94 juta ton bijih emas dan

2,36 juta ton bijih tembaga menurun menjadi 14,03 juta ton bijih tembaga pada tahun 2016 dan 2,20 juta ton bijih emas pada tahun 2016. Namun tidak untuk nikel yang angkanya sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 masih tetap sebanyak 5,21 juta ton bijih nikel. Hal ini menunjukkan untuk sumberdaya mineral seperti bijih nikel belum adanya kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan untuk dilakukan eksplorasi yang lebih mendalam.

Gambar 2.125 Total Produksi Tembaga dan Emas (Juta Ton Bijih)

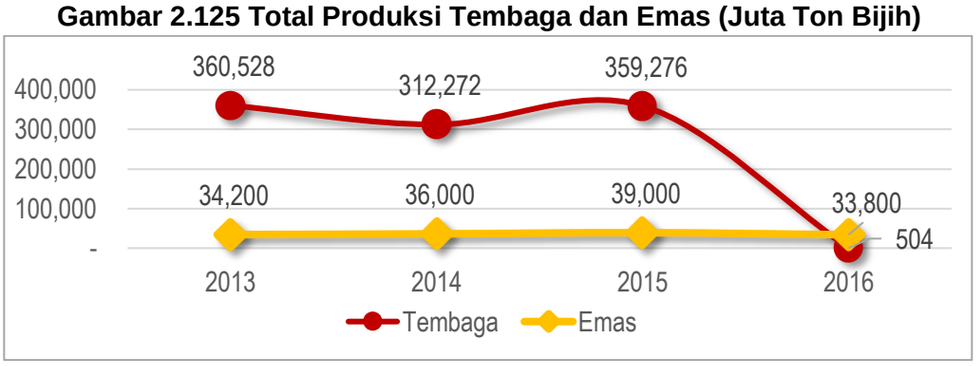

Sumber: Bappeda Papua, 2018 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 2.124, diketahui bahwa produksi sektor pertambangan seperti tembaga dan emas mengalami fluktuasi sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 dari 360,52 juta ton bijih emas sempat menurun menjadi 312,27 juta ton emas per tahun pada tahun 2014 kemudian naik kembali pada tahun 2015 menjadi 359,27 juta ton bijih emas dan produksi kembali menurun hingga 504 juta ton bijih emas pada tahun 2016.

Penurunan produksi bijih emas dan tembaga pada tahun 2014 disebabkan adanya negosiasi ulang kontrak sumber daya alam antara pemerintah Indonesia dengan PT. Feeport, kemudian pada tahun 2016 karyawan PT. Freeport melakukan mogok kerja yang mengakibatkan Produksi emas, dan temabga kembali menurun. Sedangkan produksi temabga terlihat sejak tahun 2013 hingga tahun 2015 terus meningkat dari 34,2 juta ton bijih pada tahun 2013, namun pada tahun 2016 menurun hingga 33,8 juta ton bijih tembaga.

1. Ketersediaan dan Sumber Penerangan

Persentase rumah tangga di Provinsi Papua yang telah menggunakan listrik terlihat cukup rendah. Pada tahun 2013 rumah tangga yang menggunakan listrik baru mencapai 45,52% kemudian meningkat menjadi 55,82% pada tahun 2017. Dari data BPS terlihat rumah tangga menurut sumber penerangan yang paling rendah pada tahun 2013 terdapat di kabupaten Yahukimo, Tolikara, Lanny Jaya, Puncak, Intan Jaya dan Asmat. Pada tahun 2017 kabupaten dengan sumber penerangan listrik palinga rendah adalah Yahukimo, Tolikara, Nduga, Lanny Jaya, Puncak, Dogiyai dan Intan Jaya.

Tabel 2.51 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Listrik PLN Tahun 2013-2017

Kabupaten/Kota	2013		2014		2015		2016		2017	
	Listrik PLN & Non PLN	Lainnya	Listrik PLN & Non PLN	Lainnya	Listrik PLN & Non PLN	Lainnya	Listrik PLN & Non PLN	Lainnya	Listrik PLN & Non PLN	Lainnya
MAMTA										
Jayapura	93,81	6,19	88,81	11,19	96,01	3,99	99,78	0,22	97,07	2,93
Sarmi	77,70	22,30	74,92	25,08	88,60	11,40	79,14	20,86	81,85	18,15
Keerom	86,48	13,52	82,56	17,44	85,53	14,47	92,11	7,89	95,54	4,46
Mamberamo Raya	25,91	74,09	20,52	79,48	58,53	41,47	51,74	48,26	43,88	56,12
Kota Jayapura	100,00	0,00	100,00	0,00	96,23	3,77	99,48	0,52	99,88	0,12
LA PAGO										
Jayawijaya	30,63	69,37	37,18	62,82	50,69	49,31	48,71	51,29	57,93	42,07
Puncak Jaya	6,65	93,35	13,64	86,36	11,16	88,84	12,16	87,84	14,91	85,09
Yahukimo	2,78	97,22	7,57	92,43	3,76	96,24	5,79	94,21	2,90	97,10
Pegunungan Bintang	8,99	91,01	12,71	87,29	28,45	71,55	19,01	80,99	34,22	65,78
Tolikara	2,32	97,68	5,26	94,74	7,33	92,67	7,56	92,44	11,07	88,93
Nduga	1,86	98,14	5,71	94,29	n.a	n.a	11,18	88,82	6,49	93,51
Lanny Jaya	2,01	97,99	6,10	93,90	5,83	94,17	9,49	90,51	3,09	96,91
Mamberamo Tengah	14,36	85,64	11,69	88,31	8,02	91,98	86,93	13,07	38,92	61,08
Yalimo	30,40	69,60	49,57	50,43	48,76	51,24	37,02	62,98	85,83	14,17
Puncak	2,36	97,64	7,43	92,57	73,78	26,22	5,27	94,73	15,15	84,85
MEE PAGO										
Nabire	91,12	8,88	88,88	11,12	84,89	15,11	82,58	17,42	92,65	7,35
Paniai	26,87	73,13	25,18	74,82	13,97	86,03	22,92	77,08	31,97	68,03
Mimika	88,72	11,28	93,56	6,44	93,69	6,31	96,12	3,88	98,14	1,86
Dogiyai	31,62	68,38	14,20	85,80	19,07	80,93	18,58	81,42	3,61	96,39
Intan Jaya	1,30	98,70	6,01	93,99	10,55	89,45	9,87	90,13	11,06	88,94
Deiyai	41,86	58,14	52,31	47,69	49,33	50,67	49,70	50,30	44,65	55,35
SAERERI										
Kepulauan Yapen	59,66	40,34	57,93	42,07	75,65	24,35	65,49	34,51	70,40	29,60
Biak Numfor	95,25	4,75	95,32	4,68	98,78	1,22	98,65	1,35	98,64	1,36
Waropen	62,45	37,55	61,12	38,88	73,50	26,50	87,72	12,28	93,03	6,97
Supiori	39,97	60,03	48,86	51,14	45,60	54,40	59,91	40,09	74,21	25,79
ANIM HA										
Merauke	89,54	10,46	86,67	13,33	94,37	5,63	93,89	6,11	94,70	5,30
Boven Digoel	73,99	26,01	77,63	22,37	73,41	26,59	69,60	30,40	91,64	8,36
Mappi	18,69	81,31	18,30	81,70	20,78	79,22	23,67	76,33	26,86	73,14

Kabupaten/Kota	2013		2014		2015		2016		2017	
	Listrik PLN & Non PLN	Lainnya	Listrik PLN & Non PLN	Lainnya	Listrik PLN & Non PLN	Lainnya	Listrik PLN & Non PLN	Lainnya	Listrik PLN & Non PLN	Lainnya
Asmat	9,57	90,43	17,72	82,28	21,97	78,03	18,18	81,82	81,29	18,71
Papua	**45,52**	**54,48**	**47,32**	**52,68**	**53,17**	**46,83**	**50,90**	**49,10**	**55,82**	**44,18**

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat 2013-2017

2.1.5.3.5. Perdagangan

Volume ekspor menurut negara tujuan pada tahun 2013 mencapai 1.364 ton dengan jumlah volume ekspor paling tinggi benua wilayah Asia sebesar 1.115 ton. Pada tahun 2016 ekspor mencapai 1.259 juta ton.dengan benua tujuan ekspor terbesar adalah Asia sejumlah 1.144 juta ton.

Tabel 2.52 Volume Ekspor dan Impor Menurut Negara Tujuan (ton)

Negara Tujuan Ekspor	Volume Ekspor Menurut Negara Tujuan (Ton)				Volume Impor Menurut Negara Asal (Ton)			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
ASIA	**1.115**	**457.842**	**1.009.511**	**1.144.285**	**111.986**	**333.544**	**308.394**	**312.286**
Jepang	302	107.261	220.900	280.200	2.915	32	4	760
Korea Selatan	137	35.031	75.721	137.289	61.350	5.547	2.590	3.587
Filipina	100	9.152	111.000	163.200	-	3	171	1.469
Tiongkok	247	179.629	167.000	263.000	2.770	20.288	96	7.279
India	326	123.000	429.440	270.000				
Malaysia					30	54	36	44
Asia Lainnya	3	3.769	5.450	30.597	44.920	307.621	305.498	299.148
EROPA	**144**	**133.446**	**32.000**	**38.000**	**75**	**2.846**	**1.878**	**2.115**
Spanyol	144	113.446	32.000	38.000				
Inggris	15	-	15	-	32	240	74	86
Jerman	15	-	-	-	3	6	3	6
Swiss	15	-	-	-	27	199	142	194
Italia					3	601	217	395
Eropa Lainnya	15	20.000	-	-	9	1.799	1.442	1.434
AMERIKA	**-**	**1.108**	**11.655**	**12.551**	**11.453**	**14.545**	**10.435**	**11.085**
Amerika Serikat	-	1.108	11.655	12.551	11.330	13.324	9.548	9.442
Kanada	-	-	-	-	78	957	753	1.461
Amerika Lainnya	-	-	-	-	46	264	135	182
OCEANIA	-	538	509	625	37.843	52.824	46.957	54.262
Australia	15	137	23	9	37.839	52.789	46.905	54.210
Selandia Baru	15	-	-	-	1	2	-	1
Oseania Lainnya	-	400	486	617	3	33	52	51
TIMUR TENGAH	**105**	**124.630**	**114.532**	**64.077**				
Saudi Arabia	85	83.074	93.225	39.081				
Uni Emirat Arab	8	18.416	11.562	12.510				

Negara Tujuan Ekspor	Volume Ekspor Menurut Negara Tujuan (Ton)				Volume Impor Menurut Negara Asal (Ton)			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Timur Tengah Lainnya	12	23.140	9.745	12.485				
Negara Lainnya	-	-	-	-	-	26	5	15
Jumlah	**1.364**	**717.565**	**1.168.206**	**1.259.539**	**161.357**	**403.785**	**367.670**	**379.763**

Sumber: Statistik Ekspor Impor Provinsi Papua Tahun 2016, BPS Provinsi Papua (data diolah)

Sedangkan volume impor menurut negara asal pada tahun 2013 mencapai 161.357 ton dengan jumlah volume impor paling tinggi benua wilayah Asia sebesar 111.986 ton. Dan pada tahun 2016 impor mencapai 379.763 ton.dengan benua tujuan impor terbesar adalah Asia sejumlah 312.286 ton.

Tabel 2.53 Volume Ekspor dan Impor Menurut Pelabuhan (ton)

Pelabuhan Ekspor	Volume Ekspor Menurut Pelabuhan (Ton)				Volume Impor Menurut Pelabuhan (Ton)			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Frans Kaisepo	5	18	4	365	15	15	-	-
Jayapura	236	18	662	68	1	15	10.225	9.233
Serui	20.750	44.017	40.408	30.894				
Merauke	30.351	27.551	41.609	45.245	690	44	417	-
Amamapare	1.850.274	1.051.376	782.958	1.179.368	160.649	391.197	356.982	370.483
Sentani	27.367	361	1	164	12	12.544	38	46
Bade	177.862	109.769	79.528	70.562	15	15	-	-
Kimaam	96.874	40.844	26.049	36.665	5	15	-	-
Ubrub					-	-	7	-
Nabire	15	15	15	15				
Wamena	4	7	15	15				
Numfoor	15	15	15	789				
Jumlah	**2.203.723**	**1.273.961**	**971.218**	**1.364.120**	**161.357**	**403.785**	**367.669**	**379.762**

Sumber: Statistik Ekspor Impor Provinsi Papua Tahun 2016, BPS Provinsi Papua (data diolah)

Nilai ekspor menurut golongan barang yang paling tinggi pada tahun 2013 adalah bujuh tembaga dan koncentrat (HS26) senilai 2.608 miliyar US$ dan pada tahun 2016 jumlah nilai ekspor tertinggi menurut golongan barang adalah bijih tembaga dan konsetrat.

Tabel 2.54 Volume dan Nilai Ekspor Menurut Golongan Barang HS 2 Digit Provinsi Papua Tahun 2013 – 2016 (ton/US$)

Golongan Barang	Satuan	2013	2014	2015	2016
Bijih Tembaga dan Konsentrat (HS26)	Volume (kg)	1.179.327	525.741	1.015.240	1.114.400
	Nilai (US$)	2.608.595.385	1.376.498.241	1.831.814.111	1.907.955.250
Kayu dan Barang dari Kayu (HS44)	Volume (kg)	145.135	139.720	152.036	144.500
	Nilai (US$)	96.413.984	115.703.724	123.336.544	96.181.410
Ikan dan Hewan Air Lainnya (HS03)	Volume (kg)	39.415	51.511	1	6
	Nilai (US$)	21.953.394	33.762.797	713	59.166
Lemak Nabati & Hewani (HS15)	Volume (kg)	1	12	6	48
	Nilai (US$)	5.947	30.823	20.449	79.907
Lainnya	Volume (kg)	241	581	924	584
	Nilai (US$)	1.364.119.831	717.564.989	1.168.206.165	1.259.538.627
Jumlah	**Volume (kg)**	**1.364.120**	**717.565**	**1.168.206**	**1.259.539**
	Nilai (US$)	**2.728.043.282**	**1.529.674.059**	**2.007.516.930**	**2.008.078.061**

Sumber: Statistik Ekspor Impor Provinsi Papua Tahun 2016, BPS Provinsi Papua (data diolah)

Andil ekspor Provinsi papua terhadap nilai ekspor Indonesia sebesar 1,49% dan pada tahun 2016 andil provinsi papua sebesar 1,38 persen dari nilai ekspor Indonesia. Sedangkan andil nilai impor papua sebesar 0,27 dari nilai impor Indonesia dan pada tahun 2016 andil Provinsi Papua 0,53 persen dari nilai impor Indonesia.

Tabel 2.55 Nilai Ekspor-Impor Provinsi Papua dan Indonesia (Juta US$) Tahun 2013-2016 (US$/%)

Tahun	Ekspor			Impor		
	Papua	Indonesia	Andil	Papua	Indonesia	Andil
2013	2.728,00	182.551,80	**1,49**	506,4	186.628,70	**0,27**
2014	1.529,70	176.292,50	**0,87**	1.014,50	178.178,80	**0,57**
2015	2.007,50	150.283,70	**1,34**	746,7	142.694,80	**0,52**
2016	2.008,10	145.186,20	**1,38**	721,3	135.652,90	**0,53**

Sumber: Statistik Ekspor Impor Provinsi Papua Tahun 2016, BPS Provinsi Papua (data diolah)

2.1.5.3.6. Perindustrian

Jumlah unit usaha industri kecil menengah Provinsi Papua mencapai 2.290 unit pada tahun 2013 dan meningkat hingga 3.428 unit pada tahun 2015. Peningkatan jumlah industri kecil dan menengah tersebut diiringi dengan peningkatan produktivitas industri pada tahun 2013 sebesar 91,89%, kemudian meningkat hingga 99,25% pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 persentase peningkatan produktivitas industri mencapai 92,94%.

Gambar 2.126 Kondisi Perindustrian di Provinsi Papua

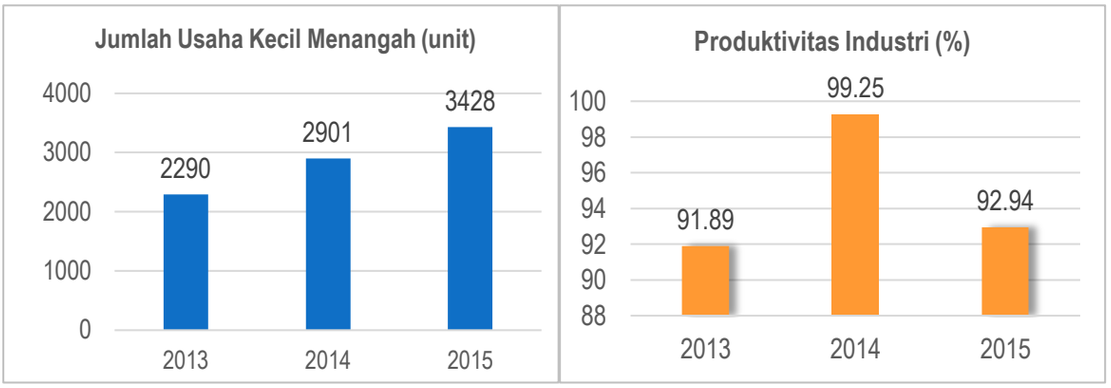

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2018 (diolah)

2.1.5.3.7. Kelautan dan Perikanan

Perahu/Kapal tangkap ikan terbagi 3 yaitu, kapal motor, perahu tak bermotor dan perahu motor tempel. Pada tahun 2013 jumlah perahu/kapal tangkap ikan sebanyak 6.953, pada tahun 2015 meningkat hingga 10.997 dan pada tahun 2011 sebanyak 11.356, namun pada tahun 2016 jumlah perahu/kapal tangkap ikan menurun menjadi 4.595.

Tabel 2.56 Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan

Kabupaten /Kota	Kapal Motor				Perahu Tak Bermotor				Perahu Motor Tempel				Jumlah			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Merauke	747		83	171		417	574	-	462	661	114	132	1.209	1.078	771	303
Jayawijaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jayapura	7		3	-		515	408		483	9	156	44	490	524	567	44
Nabire	5	813	-	-		811	425	425		6	200	200	5	1.630	625	625
Kepulauan Yapen	15		-	-		875	1.965		872	19	764	764	887	894	2.729	764
Biak Numfor	201		1	-			2.981	-		206	32	60	201	206	3.014	60
Paniai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puncak Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mimika	84	863	-	-		650	-	517	648	83	62	98	732	1.596	62	615
Boven Digoel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mappi	135	898	-	-			125	376		160	27	52	135	1.058	152	428
Asmat	32		-	-		625	499	499	620	42	-	-	652	667	499	499
Yahukimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pegunungan Bintang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tolikara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarmi	26	495	-	-	482	175	195	216	168	30	25	25	676	700	220	241
Keerom	-		-	-	-	620	-	-	-	32	-	-	-	652	-	-
Waropen	-		-	-		180	363		175	-	48	53	175	180	411	53
Supiori	-		-	-		425	622	222	421	-	20	39	421	425	642	261
Mamberamo Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kabupaten /Kota	Kapal Motor				Perahu Tak Bermotor				Perahu Motor Tempel				Jumlah			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Lanny Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mamberamo Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yalimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puncak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dogiyai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intan Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deiyai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Jayapura	63	803	-	-	798	515	1.563	644	509	69	101	58	1.370	1.387	1.664	702
Provinsi Papua	**1.315**	**3.872**	**87**	**171**	**1.280**	**5.808**	**9.720**	**2.899**	**4.358**	**1.317**	**1.549**	**1.525**	**6.953**	**10.997**	**11.356**	**4.595**

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Jumlah rumah tangga perikanan di Provinsi Papua sejak tahun 2015 hingga tahun 2016 meningkat. Pada tahun 2015 sebanyak 232.157 rumah tangga perikanan yang terdiri dari perikanan laut dan perairan umum, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 233.563 rumah tangga perikanan.

Tabel 2.57 Jumlah Rumah Tangga Perikanan

Kabupaten/Kota	Perikanan Laut		Perairan Umum		Jumlah	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Merauke	55.664	50.425	2.028	2.059	57.691	52.484
Jayawijaya	-	-	707	721	707	721
Jayapura	15.364	18.025	1.411	1.439	16.775	19.463
Nabire	10.678	13.248	61	63	10.738	13.310
Kepulauan Yapen	5.508	8.370	-	-	5.508	8.370
Biak Numfor	38.569	31.266	-	-	38.569	31.266
Paniai	-	-	205	211	205	211
Puncak Jaya	-	-	-	-	-	-
Mimika	21.561	20.661	75	96	21.636	20.757
Boven Digoel	-	-	62	63	62	63
Mappi	20.641	21.431	4.946	5.095	25.587	26.526
Asmat	5.818	6.443	99	104	5.917	6.547
Yahukimo	-	-	148	157	148	157
Pegunungan Bintang	-	-	-	-	-	-
Tolikara	-	-	-	-	-	-
Sarmi	1.156	1.216	-	-	1.156	1.216
Keerom			-	-	-	-
Waropen	13.141	18.052	941	955	14.082	19.007
Supiori	10.544	13.571	-	-	10.544	13.571
Mamberamo Raya	-	-	-	-	-	-
Nduga	-	-	-	-	-	-
Lanny Jaya	-	-	-	-	-	-
Mamberamo Tengah	-	-	-	-	-	-
Yalimo	-	-	-	-	-	-
Puncak	-	-	-	-	-	-
Dogiyai	-	-	-	-	-	-
Intan Jaya	-	-	-	-	-	-
Deiyai	-	-	-	-	-	-
Kota Jayapura	22.760	19.820	72	76	22.832	19.895
Provinsi Papua	**221.403**	**222.527**	**10.754**	**11.037**	**232.157**	**233.563**

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (diolah)

Pada tahun 2015 hingga tahun 2016 produksi perikanan tangkap di Provinsi Papua mengalami penurunan dari 11.091 ton menurun manjadi 7.403 ton.

Tabel 2.58 Produksi Perikanan Tangkap (Ton)

Kab/Kota	Budidaya Laut		Tambak		Kolam		Keramba		Jaring Apung		Sawah		Jumlah	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Merauke	1	-	21	21	77	19	-	-	1	-	-	-	100	40
Jayawijaya	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	37	-
Jayapura	-	-	7	7	39	-	-	-	1.361	1.361	-	-	1.408	1.369
Nabire	-	-	600	600	342	356	-	-	-	-	-	-	942	956
Kepulauan Yapen	96	85	-	-	26	26	-	-	12	13	-	-	134	124
Biak Numfor	22	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	10
Paniai	-	-	-	-	250	260	-	-	-	-	-	-	250	260
Puncak Jaya	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	39	-
Mimika	-	-	-	-	61	40	-	-	-	-	-	-	61	40
Boven Digoel	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	63
Mappi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asmat	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	46	-
Yahukimo	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	71
Pegunungan Bintang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tolikara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarmi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keerom	-	-	-	-	253	203	-	-	-	-	-	-	253	203
Waropen	-	-	-	-	122	123	-	-	-	-	-	-	122	123
Supiori	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5
Mamberamo Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lanny Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mamberamo Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yalimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puncak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dogiyai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intan Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deiyai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Jayapura	-	13	918	918	6.568	3.052	-	-	186	157	-	-	7.672	4.139
Provinsi Papua	**125**	**113**	**1.546**	**1.546**	**7.859**	**4.213**	**-**	**-**	**1.561**	**1.531**	**-**	**-**	**11.091**	**7.403**

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018

Seluruh indikator kinerja hasil pembangunan yang disajikan dalam sub bab ini dalam bentuk rekapitulasi dapat dilihat dalam Tabel 2.83 di Bab 2 terakhir ini.

2.1.6. Aspek Otonomi Khusus Provinsi Papua

2.1.6.1. Kerangka Regulasi Otonomi Khusus Provinsi Papua

Undang-undang Otsus merupakan langkah maju bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena melalui Undang-undang ini Pemerintah mengakui bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua berbeda dengan provinsi yang lain. Melalui UU Otsus Papua di Provinsi Papua diberlakukan dua bentuk Peraturan Daerah, yakni: Peraturan Daerah Khusus yang disingkat Perdasus dibuat oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur yang dalam penetapannya harus mendapat pertimbangan dan persetujuan dari MRP dan Peraturan Daerah Provinsi yang disingkat Perdasi dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur. Perdasus dan Perdasi mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Untuk menindaklanjuti ketentuan-ketentuan dalam Perdasus dan Perdasi pada tahapan implementasi, maka dibentuk Peraturan Gubernur.

Dalam rangka implementasi UU Otsus, setidaknya dibutuhkan penyusunan dan penetapan 11 (sebelas) Perdasus dan 18 (delapan belas) Perdasi. Kesebelas Perdasus dan Delapan belas Perdasi sebagai amanat langsung dari UU Otsus sebagaimana disebutkan di atas, dapat dilihat pada Tabel 2.59 dan Tabel 2.60.

Tabel 2.59 Perdasus Perintah Undang-Undang No. 21 Tahun 2001

NO.	PASAL	ASPEK YANG DIATUR
1.	Pasal 2 ayat (3)	Pengaturan lambang daerah.
2.	Pasal 4 ayat (9)	Tata cara pemberian pertimbangan oleh Gubernur dalam pembuatan perjanjian internasional oleh Pemerintah.
3.	Pasal 11 ayat (3)	Tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
4.	Pasal 19 ayat (3	Keanggotaan dan jumlah anggota MRP
5.	Pasal 20 ayat (2)	Pelaksanaan tugas dan wewenang MRP
6.	Pasal 21 ayat (2)	Pelaksanaan hak MRP.
7.	Pasal 23 ayat (2)	Tata cara pelaksanaan kewajiban MRP.
8.	Pasal 34 ayat (7)	Pembagian lebih lanjut penerimaan bagi hasil bidang pertambangan minyak bumi, gas alam serta penerimaan khusus untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan
9.	Pasal 38	Usaha perekonomian yang memanfaatkan sumber daya alam
10.	Pasal 66 ayat (2)	Penanganan khusus bagi pengembangan suku-suku terisolasi, terpencil dan terabaikan
11.	Pasal 67.	Pelaksanaan pengawasan sosial dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang layak

Sumber: Hasil Elaborasi Tim Uncen, 2010

Tabel 2.60 Perdasi yang diamanatkan oleh UU No. 21 Tahun 2001

NO	PASAL	ASPEK YANG DIATUR
1.	Pasal 24 ayat (2)	Tata cara pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua.
2.	Pasal 26 ayat (3)	Perangkat Pemerintah Provinsi
3.	Pasal 27 ayat (3)	Kewenangan Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan kebijakan kepegawaian sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah setempat
4.	Pasal 29 ayat (3)	Tata cara pemberian pertimbangan dan persetujuan MRP dalam pembentukan Perdasus,
5.	Pasal 32 ayat (2)	Fungsi, tugas, wewenang, bentuk dan susunan keanggotaan Komisi Hukum Ad Hoc,
6.	Pasal 35 ayat (6)	Pelaksanaan bantuan dari dalam dan luar negeri.
7.	Pasal 36 ayat (1)	Perubahan dan perhitungan APBD Provinsi Papua
8.	Pasal 36 ayat (3)	Tata cara penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, perubahan dan perhitungannya serta pertanggungjawaban dan pengawasannya
9.	Pasal 41 ayat (2)	Tata cara penyertaan modal Pemprov. Papua
10.	Pasal 48 ayat (3)	Hal tertentu mengenai tugas kepolisian di Provinsi Papua
11.	Pasal 56 ayat (6)	Pelaksanaan pemberian bantuan dan/atau subsidi Pemprov dan Pemkab/Kota dalam bidang pendidikan
12.	Pasal 57 ayat (4)	Perlindungan dan pengembangan kebudayaan asli Papua oleh Pemprov.
13.	Pasal 59 ayat (5)	Kewajiban penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh Pemprov.
14.	Pasal 60 ayat (2)	Perencanaan dan pelaksanaan program perbaikan dan peningkatan gizi oleh Pemprov Papua & Pemkab/Kota
15.	Pasal 61 ayat (4)	Masalah kependudukan termasuk penempatan penduduk dalam rangka transmigrasi nasional,
16.	Pasal 62 ayat (4)	Masalah ketenagakerjaan
17.	Pasal 64 ayat (5)	Masalah pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkelanjutan,
18.	Pasal 65 ayat (3)	Kewajiban Pemprov. di bidang social

Sumber: Hasil Elaborasi Tim DC Uncen, 2010

Sampai dengan tahun 2018, menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Papua telah merumuskan dan menetapkan perdasus dan perdasi sebagaimana yang diamanatkan UU Otsus. Bahkan ada beberapa Perdasus yang walaupun tidak diamanatkan secara

langsung dalam UU Otsus, tapi karena itu dianggap penting karena berkaitan langsung dengan hak-hak dasar orang asli Papua, sehingga dirumuskan dan ditetapkan. Perdasus yang ditetapkan diluar amanat UU Otsus tapi berkaitan dengan hak-hak dasar orang asli Papua antara lain:

1. Perdasus Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan adat Di Papua;
2. Perdasus Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Di Provinsi Papua;
3. Perdasus Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua;
4. Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga masyarakat Adat Atas Tanah;
5. Perdasus Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil; Perdasus Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus; dan
6. Perdasus Nomor 10 Tahun 2014 tentang Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung.

Untuk melaksanakan Perdasus dan Perdasi, perlu diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaanya berupa Peraturan Gubernur. Dalam pelaksanaannya sampai saat ini adanya beberapa Perdasus dan Perdasi yang yang penting bagi penyelenggaraan otonomi khusus di Papua, namun belum ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Gubernur. Sebagai ilustrasi, dapat diberikan beberapa masalah dalam implementasi UU Otsus, yaitu:

1. Perdasus tentang Lambang Daerah
2. Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Adat Atas Tanah. Bagi masyarakat hukum adat, pemerintah dan swasta dirasakan bahwa perdasus ini sangat penting karena berkaitan dengan pemetaan dan penetapan batas-batas wilayah masyarakat hukum adat, sehingga dapat diketahui kepemilikan hak ulayat dari wilayah-wilayah adat tersebut. Hal ini sangat penting bagi para Investor yang mau menanamkan modalnya di Papua karena kepemilikan hak ulayat jelas, bukan seperti yang terjadi selama ini

dimana pihak investor kesulitan dalam melakukan hubungan dengan masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat. Namun demikian, pemerintah provinsi belum juga membuat peraturan pelaksanaannya dengan instrumen hukum peraturan gubernur sehingga peraturan ini belum dapat dilaksanakan, bahkan oleh pemerintah provinsi sedang dilakukan perubahan terhadap Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 tersebut.

3. Perdasus Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil yang merupakan perda payung mengenai model pendidikan khusus bagi orang asli Papua yang secara personal maupun secara komunitas, diperlukan suatu perlakuan afirmatif yang tepat sasaran, sehingga orang asli Papua yang berada di daerah terpencil, terisolasi dan terpinggirkan dan mengalami masalah pendidikan memperoleh kesempatan yang layak untuk menjadi manusia Indonesia yang cerdas, bermartabat. Oleh karena sasaran Perdasus adalah orang asli Papua yang berada di daerah terpencil, maka orang asli yang dalam implementasinya harus ditindaklanjuti dengan pembentukan perda di tingkat kabupaten/kota sehingga dapat dilaksanakan di kabupaten/kota. Namun demikian hal tersebut belum dilaksanakan, pemerintah kabupaten/kota sendiri belum mengetahui keberadaan Perdasus Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil, karena pemerintah provinsi (dalam hal ini Dinas Pendidikan) belum melakukak sosialisasi tentang adanya perdasus tersebut. Selain dari itu, pemerintah provinsi sendiri juga belum membuat peraturan gubernur sebagai penjabaran dari perdasus tersebut.
4. Perdasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Usaha Perikanan.
5. Perdasi Pertambangan

Uraian pada bagian-bagian terdahulu menunjukan bahwa implementasi Otsus Papua sebagai instrumen akselerasi pembangunan di Papua masih memerlukan pembenahan dan atau peningkatan. Perlu dibangun komunikasi politik yang harmonis atas dasar saling membutuhkan dan saling percaya antara Pusat dan Daerah dan antara unsur Provinsi (DPRP – Gubernur – MRP), maupun antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Perlu dilakukan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional

maupun lokal dengan menjadikan Undang-undang Otsus sebagai acuan utama (setelah disempurnakan sesuai tuntutan perubahan).

2.1.6.2. Kelembagaan Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang berimplikasi terhadap penamaan kelembagaan pemerintahan daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Pemerintah Daerah (Gubernur beserta perangkat daerah), dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Ketiga lembaga ini merupakan lembaga suprastruktur politik di tingkat provinsi yaitu DPRP disebut sebagai badan legislatif, Pemerintah Provinsi disebut sebagai badan eksekutif, sementara MRP sesuai rumusan awal yang diajukan Provinsi Papua dimaksudkan sebagai bagian dari DPRP dengan menggunakan sistem dua kamar (bikameral).

DPRP sebagai badan legislatif berwenang dalam melaksanakan fungsi di bidang legislatif, yang mencakup: (1) legislasi; (2) budgeting (penganggaran); dan (3) pengawasan. Pemerintah Provinsi sebagai badan eksekutif berwenang dalam melaksanakan fungsi pemberian pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan. Di samping itu sebagai wakil Pemerintah Pusat, Gubernur juga memiliki kewenangan melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Papua. Sedangkan MRP memiliki kewenangan melaksanakan fungsi tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Pola dan mekanisme hubungan sinergis dengan tugas dan wewenang berbeda dalam rangka implementasi UU Nomor 21 Tahun 2001 oleh ketiga lembaga ini dapat digambarkan secara sederhana dalam Gambar 2.127.

Gambar 2.127 Mekanisme Hubungan Gubernur, DPRP dan MRP

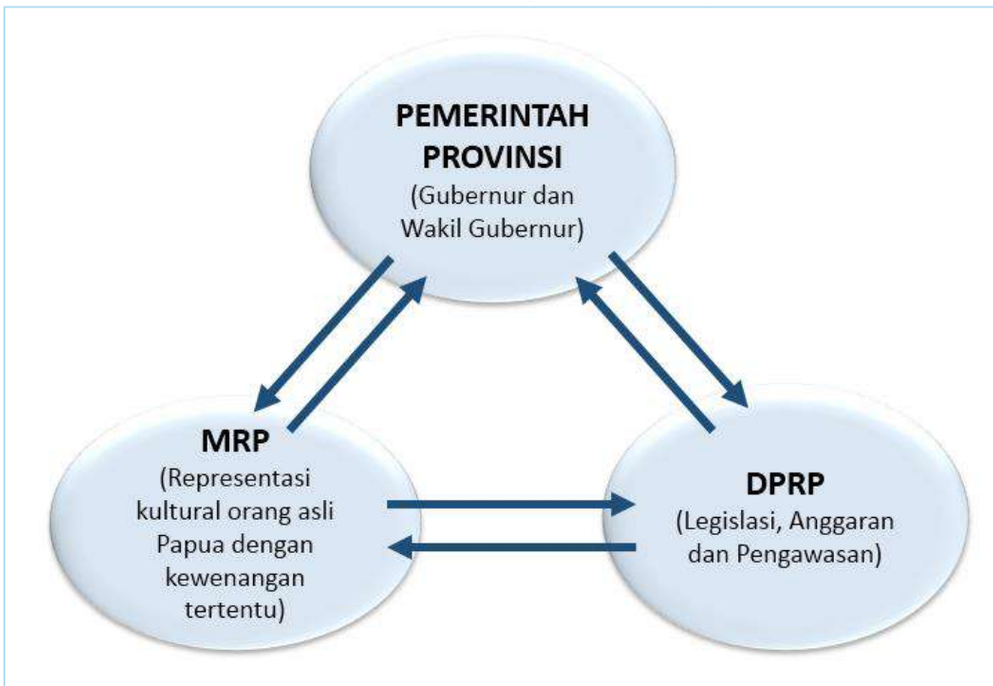

1) Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)

Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Irian Jaya. Perubahan nomenklatur DPRD Provinsi menjadi DPRP sebagaimana tersebut di atas, diikuti pula dengan penambahan jumlah anggota, yaitu sesuai UU Nomor 21 Tahun 2001 jumlah anggota DPRP adalah 1¼ (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penambahan 1¼ (satu seperempat) keanggotaan DPRP dimaksudkan untuk mengakomodir keterwakilan orang asli Papua sekaligus dalam rangka peningkatan kinerja lembaga perwakilan tersebut. yaitu diharapkan dengan adanya penambahan jumlah keanggotaan akan semakin menambah bobot lembaga DPRP dalam memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi rakyat, khususnya orang asli Papua.

Penambahan jumlah anggota DPRP dilakukan pertama kalinya dalam pemilihan umum tahun 2004. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum jumlah kursi DPRP dalam pemilihan umum tahun 2004, ditetapkan 56 (lima puluh enam) kursi yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 23 Ayat (2) huruf b, bahwa provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa

sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa memperoleh 45 (empat puluh lima) kursi. Merujuk pada ketentuan tersebut, maka jumlah anggota DPRP adalah 45 orang. Jumlah ini selanjutnya ditambah dengan 1¼ (satu seperempat) dari jumlah tersebut menjadi 56 orang. Dengan demikian maka seharusnya jumlah anggota DPRP yang dipilih adalah sebanyak 45 orang dan yang diangkat sebanyak 11 orang. Akan tetapi Komisi Pemilihan Umum saat itu secara langsung menambah kursi bagi DPRP dari unsur partai politik.

Kondisi ini berlangsung selama 3 (tiga) kali pemilihan umum legislatif yaitu tahun 2004, 2009, dan 2014. Pengisian alokasi kursi yang seharusnya diisi melalui jalur pengangkatan justru dilakukan melalui pemilihan umum, artinya kursi tersebut diperebutkan oleh partai politik peserta pemilihan umum secara bebas. Permasalahan ini akhirnya merambah sampai ke Mahkamah Konstitusi. Penetapan Komisi Pemilihan Umum mengenai proses rekrutmen anggota DPRP untuk pengisian 11 (sebelas) kursi tambahan tersebut tidak memperhatikan filosofi dan pertimbangan penambahan kursi bagi DPRP sebagaimana yang terungkap dalam persidangan-persidangan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang otonomi khusus Papua dan tercatat dalam Risalah sidang-sidang dimaksud.

Sekalipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009, akan tetapi jumlah anggota DPRP yang diangkat baru dapat terealisasi pada tahun 2017, dan berdasarkan pada putusan tersebut maka jumlah alokasi kursi DPRP bertambah dengan adanya anggota DPRP yang diangkat. Oleh karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan "keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua periode 2009-2014 sebanyak 56 (lima puluh enam), ditambah 11 (sebelas) anggota yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Khusus pada tahun 2009. Dengan demikian alokasi kursi anggota DPRP meningkat menjadi 70 kursi, yaitu: 1¼ x 56 = 70 (tujuh puluh). Ke depan DPRP dari unsur yang diangkat harus diperkuat kewenangannya agar peran DPRP dalam perlindungan hak-hak orang asli Papua lebih optimal, salah satunya dengan memperkuat tugas dan wewenang dalam mengajukan usulan Perdasus.

2) Pemerintah Provinsi Papua

Pemerintah Provinsi Papua dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekutif yang disebut Gubernur. Gubernur dibantu oleh Wakil Kepala Daerah yang disebut Wakil Gubernur. Tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dengan Perdasus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Eksistensi orang asli Papua dalam wilayah Provinsi Papua diberikan ruang di dalam UU Nomor 21 Tahun 2001, oleh karenanya syarat utama untuk dapat dicalonkan menjadi Gubernur di Provinsi Papua adalah Warga Negara Republik Indonesia dari orang asli Papua.

Sesuai Pasal 26 UU Nomor 21 Tahun 2001, perangkat daerah di Provinsi diatur dengan Perdasi, artinya berdasarkan kewenangan sebagaimana diarahkan dalam Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2001 maka seluruh bidang pemerintahan yang menjadi urusan Provinsi Papua dapat dijabarkan dalam bentuk perangkat Daerah sesuai kemampuannya. Akan tetapi selama kurun waktu berlakunya UU No. 21 Tahun 2001 pembentukan perangkat daerah berpedoman pada undang-undang pemerintahan daerah yang umum yaitu dimulai sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sampai dengan yang terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Perangkat daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat termasuk kabupaten/kota dalam wilayahnya perlu diberikan penguatan melalui pengaturan perangkat daerah secara berbeda dan dalam jangka waktu tertentu. Idealnya pengaturan perangkat daerah diserahkan kepada Daerah Provinsi, selanjutnya Daerah Provinsi yang akan mengatur lebih lanjut perangkat daerah kabupaten/koa berdasarkan pada kewenangan Daerah Provinsi yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri.

3) Majelis Rakyat Papua (MRP)

MRP merupakan lembaga representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Ini berarti bahwa MRP memiliki kewenangan yang terbatas. MRP beranggotakan orang-orang

asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP dengan masa keanggotaan MRP adalah 5 (lima) tahun.

MRP harus diperkuat kewenangannya, yaitu diposisikan sebagai lembaga legislatif sebagaimana halnya DPR Provinsi, hanya dibedakan berdasarkan ruang lingkup kewenangannya, yaitu ruang lingkup kewenangan DPRP meliputi aspek yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak penduduk, sedangkan kewenangan MRP hanya meliputi aspek yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua. Dengan demikian badan legislatif di tingkat provinsi sebaiknya terdiri dari 2 (dua) kamar, yaitu DPR Provinsi yang merepresentasekan penduduk, dan MRP yang merepresentasekan orang asli Papua.

2.1.6.3. Kewenangan Otonomi Khusus Provinsi Papua

UU Nomor 21 Tahun 2001, secara umum dapat dikatakan memiliki bobot desentralisasi yang tinggi, namun dalam tataran implementasinya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh masih adanya kelemahan undang-undang tersebut yang berimplikasi pada tumpang tindihnya kewenangan Provinsi Papua dengan Pemerintah, dan tumpang tindih kewenangan Provinsi Papua dengan kabupaten/Kota. Artinya selama kurun waktu berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2001, kewenangan Provinsi Papua sama dengan provinsi/ kabupaten/kota lainnya di Indonesia, yang berbeda hanya dalam penerimaan dana otonomi khusus.

Overlapping dengan kewenangan Pemerintah, disebabkan rumusan kewenangan Pemerintah dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu pada kalimat: “kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sesuai Pasal 11 UU Nomor 23 Tahun 2014, mengatur bahwa: “penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan”. Artinya kewenangan Provinsi Papua berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2001 dilaksanakan berdasarkan ke-3 kriteria tersebut.

Dalam konteks ini, maka sesuai amanah Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 21 Tahun 2001, kewenangan Provinsi Papua harus dijabarkan dengan instrumen hukum yang berbentuk Perdasus/Perdasi. Hal yang terjadi adalah ketika Perdasi/Perdasus tersebut diimplementasikan, ternyata bertentangan dengan undang-undang sektoral. Terjadinya pertentangan ini disebabkan rumusan norma yang kabur tersebut, sehingga norma, standar, prosedur dan kriteria terkait setiap bidang kewenangan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan undang-undang yakni undang-undang sektoral.

Terjadi perbedaan penggunaan istilah kewenangan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001, dan istilah urusan atau wewenang berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 mau pun UU Nomor 23 Tahun 2014. Jika menggunakan istilah kewenangan maka Provinsi Papua memiliki kewenangan secara bulat atas urusan bidang pemerintahan tertentu, sedangkan menggunakan istilah urusan atau wewenang, maka kewenangan Provinsi Papua dibatasi oleh norma, standar, prosedur dan kriteria yang tertuang dalam undang-undang sektoral.

Disisi lain, terjadi juga tumpang tindih kewenangan Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan rumusan Pasal 4 ayat (4) UU Nomor 21 Tahun 2001, menyebutkan bahwa: “kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota mencakup kewenangan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014, oleh kerena UU Nomor 23 Tahun 2014 menitikberatkan kewenangan pada Kabupaten/Kota, sementara UU Nomor 21 Tahun 2001 menitikberatkan kewenangan pada Provinsi. Penyelesaian persoalan kewenangan harus menjadi prioritas dalam rencana pembangunan ke depan.

2.1.6.4. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua

Pemberlakuan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, adalah sebuah hasil kompromi politik antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik multidimensi yang berkepanjangan sejak tahun 1962. Kehadiran UU Otsus bagi Provinsi Papua menjadi

landasan legal yang kuat bagi pemerintah pusat dan Provinsi Papua, antara lain untuk:

1. Menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua secara adil dalam upaya mencapai kesejahteraan Orang Asli Papua, serta mendukung terwujudnya penegakan hukum dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua;
2. Menyelenggarakan pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Orang Asli Papua, agar dapat sejajar dengan daerah lain;
3. Menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua dengan memperhatikan dan menjunjung tinggi hak-hak dasar penduduk asli Papua;
4. Mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua.

Keempat poin di atas merupakan cita-cita dari pelaksanaan Otsus di Provinsi Papua yang harus diwujudkan bersama dengan masyarakat Orang Asli Papua. Untuk mewujudkan ke-4 cita-cita Otsus tersebut, semenjak tahun 2002 pemerintah Provinsi Papua diberi dana transfer dari pemerintah pusat yang setara 2% dari DAU nasional yang disebut sebagai Dana Otonomi Khusus (DOK) Papua. Dimana jika dikalkulasi sampai dengan tahun 2016, secara kumulatif DOK tersebut kurang lebih sudah mencapai Rp. 47,905.38 juta. Dalam hal ini, pengelolaan DOK tersebut diatur sendiri oleh Pemerintah Provinsi Papua.

Secara garis besarnya, pengaturan pengelolaan DOK yang dijalankan oleh pemerintah provinsi selama tahun 2002 - 2016 dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu : (1) penggunaan DOK untuk kepentingan bersama yang disebut program strategis lintas kabupaten/kota atau Urusan Bersama, (2) penggunaan DOK yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dengan alokasinya yang mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu periode 2003-2005 dengan pembagian 60%-40% untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kemudian periode 2006-

2012 dibagi 40%-60% untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota, dan yang terakhir periode 2013-2016 dibagi sebesar 20%-80% untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pembagian ke pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota dilakukan setelah disisihkan dahulu dari total penerimaan DOK setara 2% DAU Nasional tersebut untuk penggunaan program strategis lintas kabupaten/kota (Urusan Bersama). Selengkapnya penerimaan DOK dan pembagiannya selama periode 2002-2016 dapat dilihat pada Gambar 2.128.

Gambar 2.128 Alokasi Dana Otsus Provinsi Papua Tahun 2002-2016

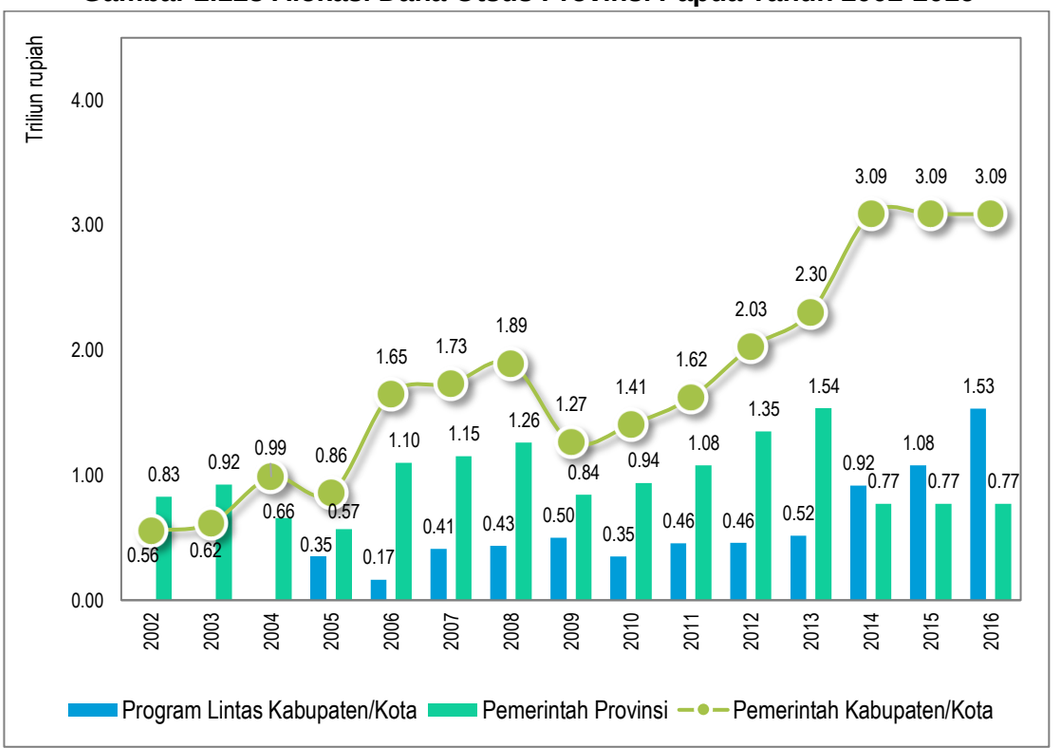

Sumber: BPKAD Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Keterangan: Pembagian Dana Otsus sudah dikeluarkan bagian dari Provinsi Papua Barat

Dari Gambar 2.128 di atas terlihat bahwa secara keseluruhan pembagian DOK ke pemerintah kabupaten/kota jauh lebih besar dibandingkan ke pemerintah provinsi maupun untuk UB (Urusan Bersama). Selama tahun 2002-2016 total DOK yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota kurang lebih sebanyak Rp. 26,18 triliun, dengan tingkat pertumbuhannya sebesar 15,74% per tahun. Setelah itu untuk pemerintah provinsi dengan total peneriman sekitar Rp. 14,56 triliun pada periode yang sama, dan pertumbuhannya sebesar 8,13% per tahun. Kemudian untuk program strategis lintas kabupaten/kota sebanyak Rp. 7,17 triliun, dengan pertumbuhannya

mencapai 24,37% per tahun. Pertumbuhan total penerimaan DOK yang setara 2% DAU nasional adalah 12,42% per tahun sepanjang periode 2002-2016.

Tabel 2.61 Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua

Alokasi Dana Otsus Papua	Total 2002-2016 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan 2002-2016 (%)
Program Strategis Lintas Kabupaten/Kota	7.168.140.478.400	24,37
Pemerintah Provinsi	14.561.495.136.220	8,13
Pemerintah Kabupaten/Kota	26.175.254.388.330	15,74
Total Dana Otsus Setara DAU 2%	47.904.890.002.950	12,42

Sumber: BPKAD Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

2.1.6.5. Dampak Otonomi Khusus Terhadap Kemiskinan

Dalam penggunaannya, ada 4 sektor pembangunan yang menjadi sasaran utama dari pengelolaan dana Otsus yakni sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur dasar. Keempat sektor tersebut merupakan akar penyebab dari rendahnya kesejahteraan masyarakat Orang Asli Papua (OAP), tingginya tingkat kemiskinan pada OAP, rendahnya kualitas SDM OAP, dan tingginya kesenjangan pembangunan antara Provinsi Papua dengan provinsi lainnya di Indonesia. Beranjak pada konsep berpikir tersebut, berikut ini disampaikan dinamika historis tingkat kemiskinan, struktur ekonomi, tingkat pengangguran dan orang bekerja, serta kualitas pembangunan manusia. Semuanya disajikan dalam rentang waktu sebelum dan saat dilaksanakan Otonomi Khusus di Provinsi Papua, perhatikan Gambar 2.129.

Gambar 2.129 Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Papua dan Indonesia

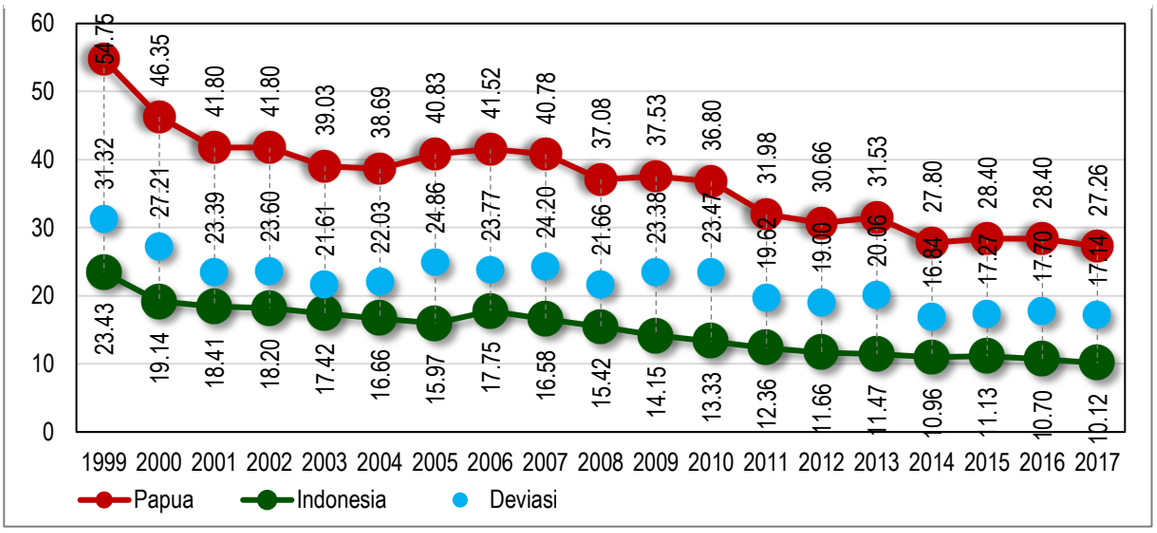

Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Papua, 1999-2017 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 2.129, pada tahun 1999 masa sebelum Otonomi Khusus, Provinsi Papua (waktu itu masih bernama Irian Jaya) membukukan tingkat kemiskinan yang paling tinggi sekali di Indonesia yakni 54,75%. Pada tahun 2001, ketika dimulai pelaksanan Otonomi Khusus di Provinsi Papua, tercatat tingkat kemiskinan dapat diturunkan hingga mencapai 41,80%, atau turun sekitar 12,95%, dan tetap paling tinggi di Indonesia. Kemudian saat diberlakukan Otonomi Khusus tahun 2001 sampai dengan tahun 2017, tingkat kemiskinan di Provinsi Papua dapat diturunkan dengan sangat drastis sebesar -27,49% bila dibandingkan tahun 1999, dimana pada tahun 2017 tingkat kemiskinan di Provinsi Papua menjadi 27,26%. Dengan demikian pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dapat dinyatakan berhasil dan mampu menurunkan tingkat kemiskinan.

Selain itu juga berhasil mengurangi kesenjangan persentase kemiskinan dengan tingkat nasional yakni dari periode 1999-2001 rata-rata sebesar 27,31% per tahun, menjadi 23,10% per tahun pada periode 2001-2005, kemudian sebesar 22,50% per tahun pada periode 2005-2012, dan semakin kecil pada periode 2013-2017 sebesar 17,80% per tahun. Atau dengan kata lain, secara keseluruhan untuk periode 2001-2017 pelaksanaan Otonomi Khusus berhasil memperkecil kesenjangan kemiskinan dengan tingkat nasional kurang lebih sekitar 21% per tahun. Fakta ini mengindikasikan bahwa Otonomi Khusus mampu mengakselerasi penurunan kemiskinan di

Provinsi Papua yang lebih cepat dibandingkan daerah lainnya di Indonesia, khususnya selama periode 2013-2017 yang mampu mengurangi kesenjangan lebih cepat dibandingkan periode-periode masa Otonomi Khusus lainnya. Namun demikian perlu dicatat bahwa sampai sekarang kemiskinan di Provinsi Papua masih paling tinggi di Indonesia. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan yang lebih inovatif untuk lebih mempercepat penurunan kemiskinan dimasa mendatang.

2.1.6.6. Dampak Otonomi Khusus Terhadap Perekonomian Wilayah

Salah satu keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi adalah mengubah struktur ekonominya dari ekonomi yang ekstratif ke ekonomi manufaktur (pengolahan barang setengah jadi dan atau barang jadi). Ekonomi ekstratif merupakan perilaku ekonomi yang melakukan usaha penggalian, pengambilan atau pengolahan kekayaan yang disediakan alam, dimana hasil yang diambil dari alam tidak diolah atau tidak diusahakan kembali. Ekonomi yang ekstraktif ini lebih peduli pada keuntungan maksimal perusahaan tanpa memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan.

Gambar 2.130 Struktur Ekonomi Provinsi Papua Tahun 1995-2017 (%)

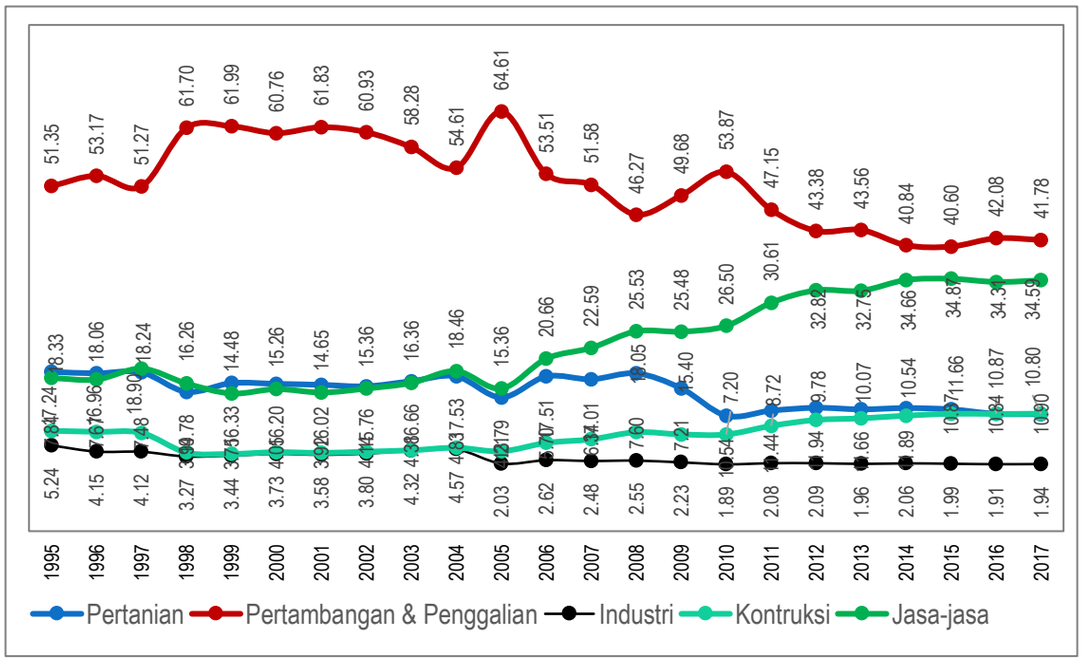

Sumber: BPS Provinsi Papua, 1997-2017 (data diolah)

Mengubah struktur ekonomi ekstratif ke ekonomi pengolahan terutama industri berbasis pertanian dan berkelanjutan dapat memberi dampak kesejahteraan kepada masyarakat yang lebih tinggi yang ditandai dengan menurunnya kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang lebih cepat, meningkatnya pendapatan per kapita diluar sektor ekstratif, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan berkurangnya kerusakan lingkungan akibat pengurasan sumber daya yang berlebihan dari ekonomi ekstratif. Sebagaimana yang divisualisasikan pada Gambra2.130 terlihat selama 22 tahun masa pembangunan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian yang bersifat ekstratif masih mendominasi struktur ekonomi Provinsi Papua, rata-rata di atas 40%, namun dengan kecenderungan yang terus menurun.

Pelaksanaan Otonomi Khusus yang dimulai tahun 2001 sampai sekarang ini (tahun 2017), belum maksimal meningkatkan kontribusi sektor industri manufaktur dalam perekonomian wilayah, bahkan termasuk juga dalam mengangkat sektor pertanian yang lebih banyak menyerap lapangan usaha dan pekerjaan bagi penduduk miskin Orang Asli Papua. Kecenderungan kontribusi sektor industri manufaktur dan pertanian mengalami penurunan sejak tahun 2006 hingga tahun 2017, akibat terjadi redistribusi nilai tambah ke sektor jasa-jasa dan kontruksi. Kedua sektor tersebut selama periode 2006-2017 menguasai pangsa PDRB Provinsi Papua sekitar 19,21% per tahun, sementara sektor pertanian turun menjadi 13,23% per tahun dan industri manufaktur hanya 2,15% per tahun untuk periode yang sama.

Adanya penambahan APBD Provinsi Papua sejak diberlakukan Otonomi Khusus menyebabkan konsumsi pemerintah bertambah sangat tinggi, dimana penambahan tersebut lebih banyak difokuskan pada sektor-sektor jasa pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dimasa mendatang diperlukan adanya integrasi yang kuat, antara ketiga sektor strategis tersebut dengan sektor pertanian dan industri manufaktur, agar efek multiplier dari meningkatnya konsumsi pemerintah terhadap ketiga sektor strategis tersebut lebih berdampak nyata terhadap pembangunan pertanian dan industri manufaktur.

2.1.6.7. Dampak Otonomi Khusus Terhadap Tenaga Kerja dan Pengangguran

Keberhasilan Otonomi Khusus lainnya dalam pembangunan wilayah Papua dapat diamati juga pada peningkatan lapangan kerja dan penurunan tingkat pengangguran. Disini terbukti bahwa selama masa Otonomi Khusus (2001-2017) jumlah orang bekerja di Provinsi Papua terus mengalami peningkatan, dan pengangguran dapat diturunkan lebih cepat. Seperti yang disajikan pada Gambar 2.134 dan Tabel 2.63, saat Otonomi Khusus belum dilaksanakan jumlah orang yang terserap dalam lapangan kerja hanya mencapai 961.300 orang per tahun dengan pengangguran terbuka sekitar 4,49% per tahun. Kemudian di masa pelaksanaan Otonomi Khusus periode 2002-2005, jumlah orang bekerja meningkat menjadi 1.035.218 orang per tahun namun dengan pengangguran terbuka yang lebih tinggi sebesar 6,88% per tahun. Selanjutnya pada periode 2006-2012 jumlah orang bekerja bertambah menjadi 1.199.529 orang per tahun, serta pengangguran dapat diturunkan hingga 4,35% per tahun. Terakhir di periode 2013-2017, jumlah yang bekerja naik lebih besar menjadi 1.657.561 orang per tahun, dan tingkat pengangguran semakin direduksi hingga menjadi 3,59% per tahun.

Gambar 2.131 Jumlah Orang Bekerja dan Tingkat Pengangguran di Papua

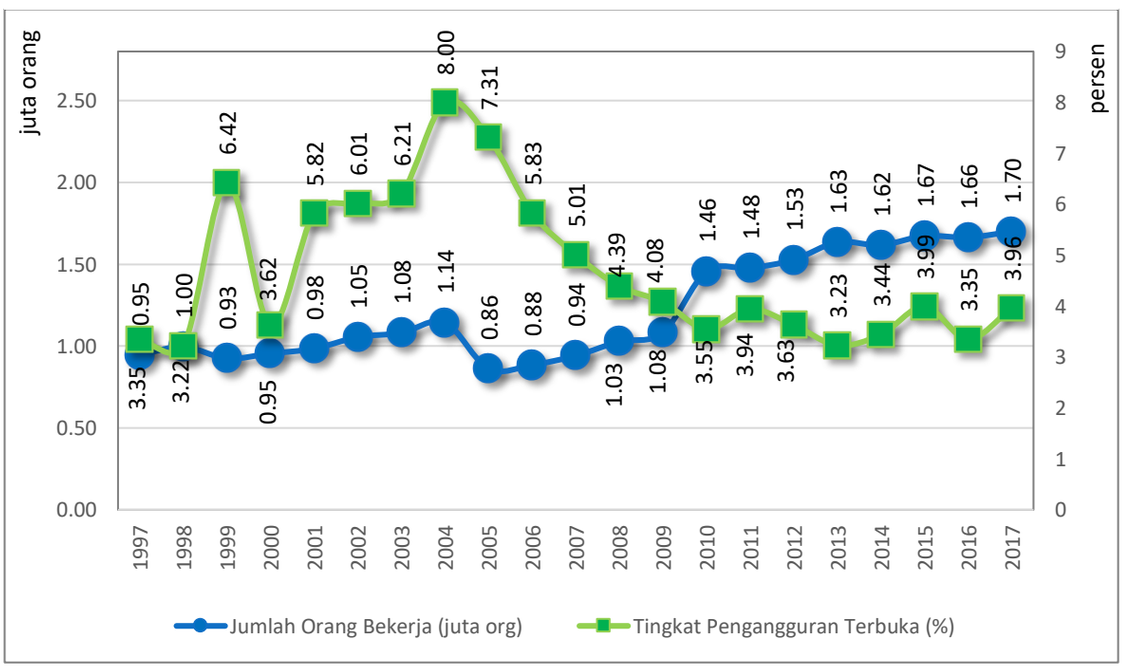

Sumber: BPS Provinsi Papua, 1997-2017 (data diolah)

Berdasarkan kedua data di atas terindikasi bahwa keberhasilan Otonomi Khusus dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan di Provinsi Papua mulai terasa pada periode 2006-2012, kemudian lebih meningkat lagi dampaknya selama periode 2013-2017. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa jumlah orang yang bekerja selama masa Otonomi Khusus ini masih lebih dominan pada tenaga kerja yang berpendidikan rendah sederajad SD, tidak tamat SD dan tidak pernah sekolah (lihat kembali Gambar 2.34 dan Tabel 2.24 sebelumnya).

Tabel 2.62 Rata-Rata Orang Bekerja Dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Periode Pembangunan	Jumlah Orang Bekerja (orang/tahun)	Pengangguran (persen/tahun)
1997-2001	961.300	4,49
2002-2005	1.035.218	6,88
2006-2012	1.199.529	4,35
2013-2017	1.657.561	3,59

Sumber: BPS Provinsi Papua, 1997-2017 (data diolah)

2.1.6.8. Dampak Otonomi Khusus Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia

Pada berbagai pembahasan sebelumnya telah diulas bagaimana begitu gencarnya pemerintah provinsi dan pusat selama ini membangun sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur di Papua. Dengan maksud agar kesejahteraan masyarakat Papua dapat ditingkatkan, dan kesenjangan pembangunan dengan wilayah lain di Indonesia dapat dikurangi. Dengan menggunakan kecenderungan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM selama masa sebelum dan sesudah dijalankan Otonomi Khusus di Provinsi Papua, dapat digambarkan mengenai dampak dari kebijakan Otonomi Khusus tersebut terhadap peningkatan kualitas pembangunan di Provinsi Papua.

Dalam Gambar 2.132 berikut ini terlihat jelas bahwa sepanjang tahun 1996-2001 masa sebelum Otonomi Khusus, maupun periode 2002-2017 masa pelaksanan Otonomi Khusus, kualitas pembangunan manusia di Provinsi Papua selalu lebih rendah dibandingkan tingkat nasional. Kecenderungan ini terlihat dari IPM Provinsi Papua yang terus di bawah IPM nasional, dengan kesenjangannya yang relatif tidak berubah, yakni rata-rata sekitar 16,04 poin per tahun. Tetapi jika diperhatikan dari akselerasinya, terindikasi di masa Otonomi Khusus

peningkatan IPM di Provinsi Papua lebih cepat dibandingkan periode sebelum Otonomi Khusus yang malah cenderung mengalami penurunan.

Gambar 2.132 IPM di Provinsi Papua dan Indonesia

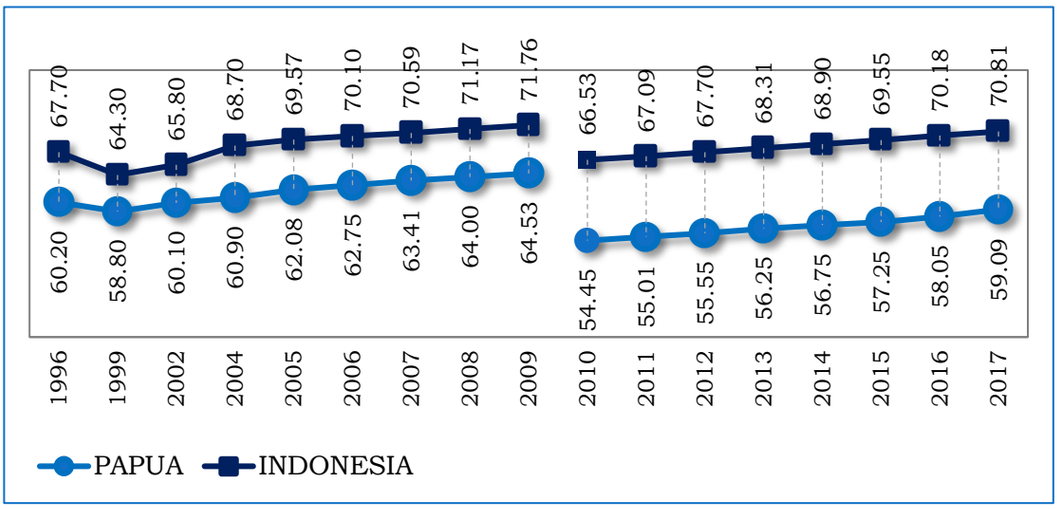

Sumber: BPS RI dan Provinsi Papua, 1999-2017 (data diolah)

Sepanjang periode 2002-2017, rata-rata kenaikan IPM sekitar 1,18% per tahun, sedangkan sebelum masa otonomi khusus yaitu tahun 1996-2002 IPM Provinsi Papua mengalami penurunan sekitar -0,03% per tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwa pelaksanaan Otonomi Khusus mampu memperbaiki percepatan IPM Provinsi Papua, terutama di era tahun 2013-2017 yang tumbuh lebih cepat dibandingkan periode lainnya sebesar 1,24% per tahun (lihat Tabel 2.63).

Tabel 2.63 Rata-Rata Percepatan IPM Di Provinsi Papua Dan Indonesia

Periode	Papua	Indonesia
1996-2002	-0.03	-0.56
2003-2009	1.19	1.46
2010-2012	1.01	0.88
2013-2017	1.24	0.90
2002-2017	1.18	1.16

Sumber: BPS RI dan Provinsi Papua, 1999-2017 (data diolah)

2.1.6.9. Efektifitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus

Seperti pada pengelolaan keuangan daerah lainnya, pengelolaan dana Otonomi Khusus juga diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, hingga monitoring dan evaluasi. Secara makro, seluruh aspek pengelolaan dana Otonomi Khusus tersebut dapat diamati efektifitasnya melalui

pengukuran elastisitas belanja terhadap indikator-indikator pembangunan yang dianggap merupakan hasil dampak dari pengelolaan dana Otonomi Khusus. Dan sesuai data hasil pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dihitung elastisitas belanja dari dana Otonomi Khusus Papua, khususnya terhadap tingkat kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi, dan IPM yang dibagi berdasarkan 3 periode pengamatan mengikuti pola pembagian dana Otonomi Khusus yang dijalankan selama ini di Provinsi Papua (lihat Tabel 2.64)

Tabel 2.64 Efektifitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Papua

Pola Pembagian Provinsi - Kabupaten/Kota	Periode	Kemiskinan	LPE	IPM
Pola 60%-40%	2002-2005	-0.0112	**0.5530**	0.1462
Pola 40%-60%	2006-2012	**-0.1106**	-0.0303	0.0395
Pola 20%-80%	2013-2016	-0.0788	-0.1290	**0.1671**
Keseluruhan	2002-2016	-0.0701	0.0735	0.0935

Sumber: BPS RI dan Provinsi Papua, 1999-2017 (data diolah)

Jika diperhatikan pada dampaknya terhadap kemiskinan, pengelolaan dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua telah mengarah pada tanda yang sesuai yaitu negatif, dengan besaran elastisitasnya secara keseluruhan (2002-2016) sebesar -0,0701. Angka ini mengindikasikan bahwa setiap terjadi kenaikan belanja dana Otonomi Khusus sebesar 1% mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,0701% dengan asumsi variabel yang lain konstan. Selanjutnya bila diperhatikan pada periode pembagian alokasi dana Otonomi Khusus, teridentifikasi bahwa pengelolaan dana Otonomi Khusus lebih efektif menurunkan kemiskinan pada periode 2006-2012 (pola 40%-60%) dibandingkan periode lainnya. Dimana terlihat nilai elastisitas belanja pada periode tersebut paling besar secara negatif yaitu -0,1106 yang bermakna bahwa pada masa itu setiap ada kenaikan belanja dana Otonomi Khusus sebesar 1% akan berdampak terhadap penurunan kemiskinan sebesar 0,1106%. Sementara di periode 2013-2016, dampaknya terhadap kemiskinan sebesar elastisitas -0,0788, dan periode 2002-2005 sebesar -0,0112.

Berbeda dengan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, ternyata pengelolaan dana Otonomi Khusus di periode 2003-2005

lebih efektif dibandingkan periode lainnya, oleh karena nilai elastisitas belanjanya lebih tinggi yakni 0,5530, yang berarti pada masa tersebut setiap ada kenaikan belanja dana Otonomi Khusus sebesar 1% memberi dampak terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua sebesar 0,5530%. Secara keseluruhan (2002-2016) nilai elastisitas belanja Otonomi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua adalah 0,0735.

Terakhir, untuk dampaknya terhadap kenaikan IPM, terindikasi bahwa pengelolaan dana Otonomi Khusus di periode 2013-2016 yang paling efektif dibandingkan periode yang lain. Dalam hal ini, berdasarkan nilai elastisitasnya sebesar 0,1671 menandakan bahwa setiap terjadi kenaikan belanja Otonomi Khusus sebesar 1% akan direspon dengan kenaikan IPM sekitar 0,1671%, yang nyatanya jauh lebih tinggi jika dibandingkan secara menyeluruh untuk periode 2002-2016 yang memiliki elastisitas sebesar 0,0935. Terjadinya perbedaan efektifitas pengelolaan dana Otonomi Khusus tersebut menunjukan bahwa selama ini belum ditemukan pola pengelolaan keuangan dana Otonomi Khusus yang lebih tepat sasaran ke arah percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan IPM sekaligus secara serentak dan simultan.

Perlu diperhatikan juga bahwa nilai elastisitas dari belanja Otonomi Khusus selama ini lebih kecil dari 1, atau bersifat inelastis yang berarti variasi perubahan input masih lebih besar dibandingkan perubahan output, tersirat disini ada inefisiensi dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus. Beberapa masalah yang membuat kondisi ini terjadi sebagian telah diungkap dari hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dana Otonomi Khusus Papua yang dilakukan pada tahun 2016. Permasalahan yang dimaksud antara lain:

1. Data usulan kegiatan Otonomi Khusus kabupaten/kota dalam bentuk URD/RD, masih kurang memperhatikan kegiatan-kegiatan yang memberi manfaat langsung pada penduduk OAP (Orang Asli Papua). Fakta ini menandakan bahwa kabupaten/kota belum begitu optimal menterjemahkan amanat Otonomi Khusus. Hasil evaluasi juga mencatat bahwa kelemahan ini antara lain karena kurangnya pengarahan dan kendali program/kegiatan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota;

2. Salah satu kendala dalam menilai program/kegiatan yang dibiayai dana Otsus karena sebagian besar pemerintah daerah di wilayah Papua belum memperhatikan indikator kinerja *outcome* dan *impact* dalam perencanaan dan penganggaran. Pemerintah daerah baru sebatas mengukur kinerja input dan output, dan masih kurang termotivasi merumuskan bagaimana pemanfaatan dan dampak kegiatan terhadap layanan yang disiapkan pemerintah. Sebagai akibatnya banyak suara OAP yang menyatakan belum melihat dampak Otsus;
3. Banyak kegiatan yang kurang mengungkapkan lokasi yang tepat. Fenomena ini banyak ditemukan dalam URD/RD dan dokumen RKA/DPA. Penyebabnya, karena belum optimalnya persiapan saat perencanaan seperti belum ada pembahasan lokasi, kurangnya data lapangan, kurangnya pengendalian, dan sebagainya.

Banyak rumah tangga OAP yang belum mengetahui adanya kegiatan-kegiatan yang bersumber pada dana Otonomi Khusus. Sebagian besar beranggapan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dijalankan selama ini bersumber dari dana desa atau APBD kabupaten/kota. Namun, ada kecenderungan rumah tangga OAP lebih mengetahui bahwa kegiatan-kegiatan Prospek, Gerbang Mas, KPS dan perumahan rakyat berasal dari dana Otonomi Khusus.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

Evaluasi kinerja RKPD tahun 2019 dilakukan mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pembagian kewenangan didasarkan pada urusan wajib yang terbagi atas urusan wajib terkait pelayanan dasar dan tidak terkait serta urusan pilihan. Terkait pelayan dasar terbagi: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, (5) Ketentraman, Ketertiban Umum dab Perlindungan Masyarakat, dan (7) Sosial. Tidak terkait pelayanan dasar, meliputi: (1) Tenaga Kerja, (2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelayanan Anak, (3) Pangan, (4) Pertahanan, (5) Lingkungan Hidup, (6) Adminsitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (7) Pemberdayaan Masyarakat dan desa, (8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, (9) Perhubungan, (10) Komunikasi dan Informasi, (11) Koperasi dan UKM, (12) Penanaman Modal, (13) Kepermudaan dan Olahraga, (14)

Statistik, (15) Persandian, (16) Kebudayaan, (17) Perpustakaan, dan (18) Kearsipan. Kemudian Urusan Pilihan meliputi: (1) Kelautan dan Perikanan, (2) Pariwisata, (3) Pertanian, (4) Kehutanan, (5) Energi dan Sumber Daya Mineral, (6) Perdagangan, (7) Perindustrian, dan (8) Transmigrasi.

Adapun untuk perhitungan peringkat kinerja, sebagaimana yang dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menggunakan formula berikut :

a. Rata-rata kinerja (%) diisi dengan rata-rata capaian kinerja;
b. Baris rata-rata capaian kinerja (%) diisi dengan rata-rata capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) setiap program, dengan menjumlahkan persentase realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai seluruh kegiatan dibagi dengan jumlah kegiatan dalam program dimaksud;
c. Baris predikat kinerja diisi dengan gradasi nilai (skala intensitas) berdasarkan kinerja yang dicapai pada baris rata-rata capaian kinerja dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.65 Kriteria Penilaian Berdasarkan Rasio Pencapaian Kinerja

No.	Interval	Kriteria Penilaian	Notasi
1.	91 % ≤ 100%	Sangat Tinggi	ST
2.	76 % ≤ 90%	Tinggi	T
3.	66 % ≤ 75%	Sedang	S
4.	51% ≤ 65%	Rendah	R
5.	≤ 51%	Sangat Rendah	SR

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah)

Apabila dianalisis secara parsial (masing-masing indikator), maka untuk kriteria penilaian yang Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T) baik itu pada capaian kinerja maupun penyerapan anggaran dapat diinterpretasikan bahwa capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Hasil evaluasi kinerja dan anggaran seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua tahun 2018 terdiri atas 207 program dan 2,091 kegiatan. Dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 96,45 persen dan capaian kinerja anggaran mencapai

87,30 persen. Adapun capaian dari masing-masing OPD dapat dilihat pada uraian berikut ini:

2.2.1. Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan

Prestasi kinerja pada Dinas Pendidikan sampai dengan tahun 2018 yang terdiri atas 14 program dan 94 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Pendidikan tergolong Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 92,62 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 92,20 persen sampai dengan tahun 2018. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.66 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran (%)
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik (%)	
Dinas Pendidikan	**94**	**92.62**	**92.20**
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	18	92.50	97.18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	92.18	86.41
Program Pendidikan Anak Usia Dini	1	90.66	93.18
Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	8	92.15	97.55
Program Pendidikan Luar Biasa	5	92.69	98.82
Program Pendidikan Menengah Atas	10	93.33	94.27
Program Pendidikan Menengah Kejuruan	13	92.15	97.63
Program Pendidikan Non Formal	1	93.63	100.00
Program peningkatan disiplin aparatur	3	93.49	99.92
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	94.89	94.20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	8	93.09	97.07
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4	93.00	88.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	7	92.24	84.63
Program Peningkatan SDM Pendidikan Tinggi	2	94.50	0.00

Sumber : Lampiran 1

Pada tahun 2018, dari 14 program yang ada pada Dinas Pendidikan terdapat 4 program rutin yang masuk kategori ST dan 10 program lainnya dengan capaian kinerja Sangat Tinggi (ST) yaitu di antaranya adalah Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Program Pendidikan Luar Biasa, Program Pendidikan Menengah Atas, Program Pendidikan Menengah Kejuruan, Program Pendidikan Non Formal, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Program Peningkatan SDM Pendidikan Tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/ realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Pendidikan sudah cukup memenuhi target.

2.2.2. Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan

Prestasi kinerja pada Dinas Kesehatan sampai dengan tahun 2018 yang terdiri atas 20 program dan 80 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Kesehatan tergolong Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 92,61 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 79,62 persen sampai dengan tahun 2018. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.67 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Dinas Kesehatan	**85**	**92.61**	**79.62**
Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	4	92.54	95.51
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	1	93.89	93.34
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	10	92.98	89.69
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	92.38	78.68
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	11	92.42	92.30
Program Pengembangan Data/Informasi	3	92.17	91.04
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	2	92.10	27.88
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	6	93.13	71.66
Program peningkatan disiplin aparatur	1	90.04	97.95
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2	91.77	82.20
Program Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat	1	94.42	85.20
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1	92.46	0.00
Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium	3	92.16	88.88
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4	94.69	99.61
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4	92.53	56.75
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1	90.48	0.00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	2	91.43	81.76
Program Sumber Daya Kesehatan	10	92.34	74.58
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2	91.88	45.12
Program upaya kesehatan perorangan	5	93.50	85.55

Sumber : Lampiran 1

Pada tahun 2018, dari 20 program yang ada pada Dinas Kesehatan terdapat 5 program rutin yang masuk kategori ST dan 15 program lainnya dengan capaian kinerja Sangat Tinggi (ST) yaitu di antaranya adalah Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehata, Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan,

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Pengembangan Data/Informasi, Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Program Pengembangan Obat Asli Indonesia, Program Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat, Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat, Program Sumber Daya Kesehatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program upaya kesehatan perorangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/ realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Kesehatan sudah cukup memenuhi target.

2.2.3. Evaluasi Kinerja Rumah Sakit

Prestasi kinerja pada Rumah Sakit Jiwa sampai dengan tahun 2018 yang terdiri atas 10 program dan 32 kegiatan, Rumah Sakit Umum Daerah Abepura terdiri dari 8 program dan 28 kegiatan, setelah itu Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura terdiri atas 11 program dan 42 kegiatan. Secara keseluruhan capaian kinerja fisik Rumah Sakit tergolong Sangat Tinggi (ST) dengan serapan anggaran 84,18 persen. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.68 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Rumah Sakit Jiwa	**32**	**100.00**	**88.83**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9	100.00	91.19
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1	100.00	93.97
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	1	100.00	30.75
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	7	100.00	89.05
Program peningkatan disiplin aparatur	1	100.00	99.39
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	100.00	99.13

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Program Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat	5	100.00	92.52
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	100.00	100.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	100.00	97.70
Program upaya kesehatan perorangan	2	100.00	58.70
Rumah Sakit Umum Daerah Abepura	**28**	**100.00**	**88.53**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	100.00	85.24
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	2	100.00	99.95
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	7	100.00	93.28
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	100.00	95.35
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2	100.00	100.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	100.00	89.33
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1	100.00	94.57
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2	100.00	61.91
Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura	**42**	**100.00**	**75.17**
Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	1	100.00	0.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	100.00	70.53
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	3	100.00	91.97
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	12	100.00	76.08
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2	100.00	84.62
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4	100.00	89.58
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	100.00	90.04

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	3	100.00	60.23
Program Sumber Daya Kesehatan	1	100.00	58.00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2	100.00	87.57
Program upaya kesehatan perorangan	2	100.00	70.66

Sumber : Lampiran 1

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan capaian kinerja fisik baik pada Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, dan Rumah Sakit Umum Jayapura tergolong Sangat Tinggi (ST) dengan capaian kinerja anggaran sebesar 88,83 persen (Tinggi), 88,53 persen (Tinggi) dan 75,17 persen (sedang).

2.2.4. Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Prestasi kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sampai dengan tahun 2018 yang terdiri atas 17 program dan 96 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tergolong Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 100 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 69,29 persen sampai dengan tahun 2018. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.69 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**96**	**100.00**	**69.29**
Peningkatan Jalan dan Jembatan	7	100.00	51.28
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	100.00	91.71
Program pembangunan infrastruktur pedesaaan	1	100.00	25.59
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	18	100.00	60.03
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1	100.00	48.70

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Program Pembinaan dan Pengembangan Konstruksi	17	100.00	93.92
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	5	100.00	4.46
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	6	100.00	40.90
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	2	100.00	94.57
Program pengendalian banjir	6	100.00	49.58
Program peningkatan disiplin aparatur	1	100.00	95.67
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	100.00	73.28
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	100.00	89.13
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	7	100.00	93.80
Program penyediaan dan pengolahan air baku	4	100.00	52.35
Program Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	2	100.00	83.00
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1	100.00	40.32

Sumber : Lampiran 1

Pada tahun 2018, dari 17 program yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang terdapat 5 program rutin yang masuk kategori ST dan 12 program lainnya dengan capaian kinerja Sangat Tinggi (ST) yaitu di antaranya adalah Peningkatan Jalan dan Jembatan, Program pembangunan infrastruktur pedesaaan, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, Program Pembinaan dan Pengembangan Konstruksi, Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, Program pengendalian banjir, Program penyediaan dan pengolahan air baku, Program Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan dan Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/

realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah cukup memenuhi target.

2.2.5. Evaluasi Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Prestasi kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan tahun 2018 yang terdiri atas 14 program dan 45 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tergolong Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 92,93 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 56,66 persen sampai dengan tahun 2018. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.70 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	**45**	**92.93**	**56.66**
Pengembangan & Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	17	92.59	0.00
Program evaluasi dan koordinasi perencanaan program pembangunan	1	93.31	98.98
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9	93.98	97.42
Program Pelayanan Air Bersih	1	90.76	98.79
Program pembinaan dan pemutakhiran sistem data dan informasi energi dan sumber daya mineral	1	93.71	94.80
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	1	91.89	86.88
Program Pembinaan, Pengawasan, Pengusahaan Mineral dan Batubara	1	90.96	96.01
Program Penelitian dan Pengembangan Balai Latihan dan Laboratorium Pertambangan	2	94.07	99.37
Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	1	90.10	68.25
Program pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG)	2	93.34	97.61
Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	2	92.15	49.28
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	92.78	91.81
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	93.13	99.66
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	93.94	46.69

Sumber : Lampiran 1

Pada tahun 2018, dari 14 program yang ada pada Dinas Energid an Sumber Daya Mineral terdapat 4 program rutin yang masuk kategori ST dan 10 program lainnya dengan capaian kinerja Sangat Tinggi (ST) yaitu di antaranya adalah Pengembangan & Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan, Program evaluasi dan koordinasi perencanaan program pembangunan, Program Pelayanan Air Bersih, Program pembinaan dan pemutakhiran sistem data dan informasi energi dan sumber daya mineral, Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan, Program Pembinaan, Pengawasan, Pengusahaan Mineral dan Batubara, Program Penelitian dan Pengembangan Balai Latihan dan Laboratorium Pertambangan, Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi, Program pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG) dan Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/ realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Energid an Sumber Daya Mineral sudah memenuhi target.

2.2.6. Evaluasi Kinerja Dinas Kebudayaan

Prestasi kinerja pada Dinas Kebudayaan sampai dengan tahun 2018 yang terdiri atas 9 program dan 37 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Kebudayaan tergolong Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 92,13 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 92,70 persen sampai dengan tahun 2018. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.71 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Kebudayaan Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Dinas Kebudayaan	**37**	**92.13**	**92.70**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7	91.94	95.43
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	4	91.47	74.98
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	6	92.78	99.42
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	2	93.77	99.92
Program Pengembangan Nilai Budaya	3	91.76	66.67
Program peningkatan disiplin aparatur	2	92.38	99.91
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2	92.06	99.55
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	92.38	100.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6	91.53	94.44

Sumber : Lampiran 1

Pada tahun 2018, dari 9 program yang ada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdapat 5 program rutin yang masuk kategori ST dan 4 program lainnya dengan capaian kinerja Sangat Tinggi (ST) yaitu di antaranya adalah Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya dan Program Pengembangan Nilai Budaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/ realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Kebudayaan sudah cukup memenuhi target.

2.2.7. Evaluasi Kinerja Dinas Olah Raga dan Pemuda

Prestasi kinerja pada Dinas Olah Raga dan Pemuda sampai dengan tahun 2018 yang terdiri atas 10 program dan 36 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Kebudayaan tergolong Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 99,75 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 76,49 persen sampai dengan tahun 2018. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.72 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Olah Raga dan Pemuda Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Dinas Olah Raga dan Pemuda	**36**	**99.75**	**76.49**
Pengembangan Prasarana PON	1	100.00	99.98
Porgram Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	3	100.00	98.92
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	100.00	74.37
Program Pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional dan Internasional	4	97.75	46.28
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	3	100.00	96.90
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6	100.00	79.38
Program peningkatan peran serta kepemudaan	2	100.00	82.53
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	5	100.00	59.26
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	1	100.00	100.00
Program Penyelenggaraan Kompetisi/Pekan Olahraga/Kejuaraan OLahraga	1	100.00	99.71

Sumber : Lampiran 1

Pada tahun 2018, dari 10 program yang ada pada Dinas Kebudayaan terdapat 2 program rutin yang masuk kategori ST dan 8 program lainnya dengan capaian kinerja Sangat Tinggi (ST) yaitu di antaranya adalah Pengembangan Prasarana PON, Porgram Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga, Program Pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional dan Internasional, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, Program peningkatan peran serta kepemudaan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda dan Program Penyelenggaraan Kompetisi/ Pekan Olahraga/ Kejuaraan OLahraga. Kondisi ini menunjukkan

bahwa pencapaian/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Olah Raga dan Pemuda sudah cukup memenuhi target.

2.2.8. Evaluasi Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Prestasi kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sampai dengan tahun 2018 yang terdiri atas 10 program dan 66 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan tergolong Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 94,93 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 78,04 persen sampai dengan tahun 2018. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.73 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	**66**	**94.93**	**78.04**
Program Lingkungan Sehat Perumahan	2	96.93	48.23
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	96.19	88.75
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2	100.00	76.44
Program Pengembangan Perumahan	37	94.79	74.64
Program peningkatan disiplin aparatur	1	90.26	98.24
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2	91.89	96.79
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6	95.60	61.39
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4	92.53	99.03
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	1	90.52	99.75
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	1	94.28	96.16

Sumber : Lampiran 1

Pada tahun 2018, dari 10 program yang ada pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan terdapat 5 program rutin yang masuk kategori ST dan 5 program lainnya dengan capaian kinerja Sangat Tinggi (ST) yaitu di antaranya adalah Program

Lingkungan Sehat Perumahan,Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, Program Pengembangan Perumahan, Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan dan Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sudah cukup memenuhi target.

2.2.9. Evaluasi Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Prestasi kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sampai dengan tahun 2018 yang terdiri atas 9 program dan 36 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah tergolong Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 98,55 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 94,89 persen sampai dengan tahun 2018. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.74 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	**36**	**98.55**	**94.89**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	99.09	94.92
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	6	97.37	99.88
Program peningkatan disiplin aparatur	1	100.00	99.45
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2	96.55	99.13
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	1	100.00	100.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	100.00	99.87
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5	96.47	79.49
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	2	100.00	99.92
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	1	100.00	88.39

Sumber : Lampiran 1

Pada tahun 2018, dari 9 program yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah terdapat 5 program rutin yang masuk kategori ST dan 4 program lainnya dengan capaian kinerja Sangat Tinggi (ST) yaitu di antaranya adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah dan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sudah cukup memenuhi target.

2.2.10. Evaluasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan

Prestasi kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan sampai dengan tahun 2018 yang terdiri atas 6 program dan 33 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan tergolong Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 97,36 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 98,94 persen sampai dengan tahun 2018. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.75 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Dinas Ketahanan Pangan	**33**	**97.36**	**98.94**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7	100.00	97.43
Program peningkatan disiplin aparatur	1	100.00	99.29
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	100.00	90.07
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	16	95.10	99.75
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4	100.00	100.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4	97.82	99.40

Sumber : Lampiran 1

Pada tahun 2018, dari 6 program yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan terdapat 5 program rutin yang masuk kategori ST

dan 1 program lainnya dengan capaian kinerja Sangat Tinggi (ST) yaitu di antaranya adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan). Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Ketahanan Pangan sudah cukup memenuhi target.

2.2.11. Evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Prestasi kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2018 yang terdiri atas 8 program dan 37 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika tergolong Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 99,54 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 90,96 persen sampai dengan tahun 2018. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.76 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Dinas Komunikasi dan Informatika	**37**	**99.54**	**90.96**
Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	100.00	99.55
Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	1	100.00	98.80
Program kerjasama informasi dengan mas media	6	98.48	97.76
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	99.21	86.19
Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	1	100.00	99.50
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	12	100.00	85.02
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2	100.00	99.82
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4	100.00	99.83

Sumber : Lampiran 1

Pada tahun 2018, dari 8 program yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat 3 program rutin yang masuk kategori ST dan 5 program lainnya dengan capaian kinerja Sangat Tinggi (ST) yaitu di antaranya adalah Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program fasilitasi peningkatan SDM bidang

komunikasi dan informasi, Program kerjasama informasi dengan mas media, Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah dan Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sudah cukup memenuhi target.

2.2.12. Evaluasi Kinerja Dinas Pariwisata

Prestasi kinerja pada Dinas Pariwisata sampai dengan tahun 2018 yang terdiri atas 9 program dan 39 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Pariwisata tergolong Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 92,20 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 95,82 persen sampai dengan tahun 2018. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.77 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Pariwisata Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Dinas Pariwisata	**39**	**92.20**	**95.82**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7	91.89	93.12
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	5	92.49	84.26
Program pengembangan kapasitas	2	92.25	99.72
Program Pengembangan Kemitraan	5	91.43	99.60
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	6	92.99	98.30
Program peningkatan disiplin aparatur	1	90.39	98.11
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2	93.67	92.05
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7	91.98	99.67
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4	92.21	99.17

Sumber : Lampiran 1

Pada tahun 2018, dari 9 program yang ada pada Dinas Pariwisata terdapat 5 program rutin yang masuk kategori ST dan 4 program lainnya dengan capaian kinerja Sangat Tinggi (ST) yaitu di

antaranya adalah Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Program pengembangan kapasitas, Program Pengembangan Kemitraan dan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Pariwisata sudah cukup memenuhi target.

2.2.13. Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyakat dan Kampung

Prestasi kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyakat dan Kampung sampai dengan tahun 2018 yang terdiri atas 10 program dan 35 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyakat dan Kampung tergolong Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 100 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 93,58 persen sampai dengan tahun 2018. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.78 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyakat dan Kampung Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Dinas Pemberdayaan Masyakat dan Kampung	**35**	**100.00**	**93.58**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9	100.00	97.73
Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung	3	100.00	99.81
Program Pengembangan Data/Informasi	4	100.00	79.99
Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Distrik dan Kampung	3	100.00	90.98
Program peningkatan disiplin aparatur	1	100.00	99.81
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	100.00	63.46
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1	100.00	100.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7	100.00	99.77
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	2	100.00	100.00

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4	100.00	85.46

Sumber : Lampiran 1

Pada tahun 2018, dari 10 program yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung terdapat 5 program rutin yang masuk kategori ST dan 5 program lainnya dengan capaian kinerja Sangat Tinggi (ST) yaitu di antaranya adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Program Pengembangan Data/Informasi, Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Distrik dan Kampung, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sudah cukup memenuhi target.

2.2.14. Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Prestasi kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sampai dengan tahun 2018 yang terdiri atas 6 program dan 27 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tergolong Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 100 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 97,25 persen sampai dengan tahun 2018. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.79 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**27**	**100.00**	**97.25**

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	5	100.00	99.31
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9	100.00	92.73
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	5	100.00	99.77
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	100.00	100.00
Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	5	100.00	99.15
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	100.00	100.00

Sumber : Lampiran 1

Pada tahun 2018, dari 10 program yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdapat 3 program rutin yang masuk kategori ST dan 3 program lainnya dengan capaian kinerja Sangat Tinggi (ST) yaitu di antaranya adalah Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dan Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sudah cukup memenuhi target.

2.2.15. Evaluasi Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Prestasi kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan tahun 2018 yang terdiri atas 8 program dan 37 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tergolong Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 95,54 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 97,52 persen sampai dengan tahun 2018. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.80 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	**37**	**95.54**	**97.52**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	92.55	99.62
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	3	95.01	99.49
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	3	96.67	91.73
Program peningkatan disiplin aparatur	1	100.00	100.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	93.77	89.50
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	10	99.00	96.85
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6	94.72	98.65
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3	94.07	96.25

Sumber : Lampiran 1

Pada tahun 2018, dari 8 program yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdapat 5 program rutin yang masuk kategori ST dan 3 program lainnya dengan capaian kinerja Sangat Tinggi (ST) yaitu di antaranya adalah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sudah cukup memenuhi target.

2.2.16. Evaluasi Kinerja Dinas Kehutanan

Prestasi kinerja pada Dinas Kehutanan sampai dengan tahun 2018 yang terdiri atas 10 program dan 78 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Kehutanan tergolong Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 92,31 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 94,10 persen

sampai dengan tahun 2018. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.81 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Kehutanan Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Dinas Kehutanan	**78**	**92.31**	**94.10**
Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	5	91.71	91.82
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	92.37	90.27
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	6	92.78	90.39
Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	1	94.12	96.83
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	91.68	99.55
Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi	1	91.75	98.12
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4	91.82	98.77
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3	93.53	83.82
Program perencanaan dan pengembangan hutan	38	92.32	95.89
Program rehabilitasi hutan dan lahan	7	91.86	95.73

Sumber : Lampiran 1

Pada tahun 2018, dari 10 program yang ada pada Dinas Kehutanan terdapat 4 program rutin yang masuk kategori ST dan 6 program lainnya dengan capaian kinerja Sangat Tinggi (ST) yaitu di antaranya adalah Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan, Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan, Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi, Program perencanaan dan pengembangan hutan dan Program rehabilitasi hutan dan lahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Kehutanan sudah cukup memenuhi target.

2.2.17. Evaluasi Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan

Prestasi kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan sampai dengan tahun 2018 yang terdiri atas 12 program dan 47 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan tergolong Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 92,31 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 94,41 persen sampai dengan tahun 2018. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.82 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Dinas Kelautan dan Perikanan	**47**	**92.31**	**94.41**
Program Optimalisasi dan Pembangunan Prasarana Perikanan Tangkap	1	94.30	68.18
Program Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)	6	92.82	96.23
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9	91.60	99.89
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	4	93.40	77.28
Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	5	92.46	99.93
Program pengembangan budidaya perikanan	6	92.10	99.93
Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	5	91.59	100.00
Program peningkatan disiplin aparatur	1	90.81	0.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	90.45	87.80
Program Peningkatan Mutu Produksi Nelayan, Pengelolaan dan Pemasaran	5	92.47	99.32
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2	92.18	99.94
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	94.27	99.97

Sumber : Lampiran 1

Pada tahun 2018, dari 12 program yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan terdapat 5 program rutin yang masuk kategori ST dan 7 program lainnya dengan capaian kinerja Sangat Tinggi (ST) yaitu di antaranya adalah Program Optimalisasi dan Pembangunan Prasarana Perikanan Tangkap, Program Optimalisasi Fungsi dan

Pelayanan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD), Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan, Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Program pengembangan budidaya perikanan, Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Program Peningkatan Mutu Produksi Nelayan, Pengelolaan dan Pemasaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sudah cukup memenuhi target.

2.2.18. Evaluasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Prestasi kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan tahun 2018 yang terdiri atas 8 program dan 32 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tergolong Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 100 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 95,15 persen sampai dengan tahun 2018. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.83 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**32**	**100.00**	**95.15**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	100.00	90.30
Program peningkatan disiplin aparatur	1	100.00	99.41
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	100.00	97.97
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	3	100.00	97.43
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	100.00	96.87
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	2	100.00	95.63
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	8	100.00	99.12

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal	3	100.00	95.70

Sumber : Lampiran 1

Pada tahun 2018, dari 8 program yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat 5 program rutin yang masuk kategori ST dan 3 program lainnya dengan capaian kinerja Sangat Tinggi (ST) yaitu di antaranya adalah Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah cukup memenuhi target.

2.2.19. Evaluasi Kinerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Prestasi kinerja pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup sampai dengan tahun 2018 yang terdiri atas 11 program dan 41 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup tergolong Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 95,24 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 93,05 persen sampai dengan tahun 2018. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.84 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	**41**	**95.24**	**93.05**
Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	2	97.11	99.84
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	94.74	93.34
Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	2	96.91	79.10

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH	5	95.06	99.75
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	8	96.05	99.40
Program peningkatan disiplin aparatur	1	90.88	100.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	90.10	97.79
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	2	95.09	100.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	94.05	88.60
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6	96.76	83.76
Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	93.33	73.03

Sumber : Lampiran 1

Pada tahun 2018, dari 11 program yang ada pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat 5 program rutin yang masuk kategori ST dan 6 program lainnya dengan capaian kinerja Sangat Tinggi (ST) yaitu di antaranya adalah Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim, Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan, Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah cukup memenuhi target.

2.2.20. Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan

Prestasi kinerja pada Dinas Perhubungan sampai dengan tahun 2018 yang terdiri atas 8 program dan 48 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Perhubungan tergolong Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 95,80 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 64,29 persen sampai

dengan tahun 2018. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.85 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Dinas Perhubungan	**48**	**95.80**	**64.29**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	94.40	84.54
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	3	95.29	35.33
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	22	97.55	48.98
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1	90.32	23.98
Program peningkatan disiplin aparatur	2	95.21	96.66
Program peningkatan pelayanan angkutan	2	100.00	81.52
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	92.32	38.10
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4	91.62	96.22

Sumber : Lampiran 1

Pada tahun 2018, dari 8 program yang ada pada Dinas Perhubungan terdapat 4 program rutin yang masuk kategori ST dan 4 program lainnya dengan capaian kinerja Sangat Tinggi (ST) yaitu di antaranya adalah Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas dan Program peningkatan pelayanan angkutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Perhubungan sudah cukup memenuhi target.

2.2.21. Evaluasi Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Prestasi kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan tahun 2018 yang terdiri atas 8 program dan 39 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

tergolong Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 92,47 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 93,96 persen sampai dengan tahun 2018. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.86 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	**39**	**92.47**	**93.96**
Penataan Struktur Industri	1	94.41	92.27
Pengembangan industri kecil dan menengah	11	92.42	95.48
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	92.30	95.69
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	4	92.81	82.67
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	5	92.03	99.29
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	94.06	99.59
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	91.25	99.81
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	4	92.75	86.79

Sumber : Lampiran 1

Pada tahun 2018, dari 8 program yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdapat 3 program rutin yang masuk kategori ST dan 5 program lainnya dengan capaian kinerja Sangat Tinggi (ST) yaitu di antaranya adalah Penataan Struktur Industri, Pengembangan industri kecil dan menengah, Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri dan Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah cukup memenuhi target.

2.2.22. Evaluasi Kinerja Dinas Perkebunan

Prestasi kinerja pada Dinas Perkebunan sampai dengan tahun 2018 yang terdiri atas 10 program dan 49 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan

kegiatan Dinas Perkebunan tergolong Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 99,07 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 82,34 persen sampai dengan tahun 2018. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.87 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Perkebunan Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Dinas Perkebunan	**49**	**99.07**	**82.34**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	100.00	93.20
Program peningkatan disiplin aparatur	1	100.00	100.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	92.03	85.83
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	2	100.00	45.06
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	7	99.20	67.33
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1	100.00	64.28
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6	100.00	100.00
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	11	97.76	84.28
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3	97.60	100.00
Program Perencanaan Pembangunan	5	100.00	55.52

Sumber : Lampiran 1

Pada tahun 2018, dari 10 program yang ada pada Dinas Perkebunan terdapat 5 program rutin yang masuk kategori ST dan 5 program lainnya dengan capaian kinerja Sangat Tinggi (ST) yaitu di antaranya adalah Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan, Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan, Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan dan Program Perencanaan Pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja pelaksanaan program

pembangunan pada Dinas Perkebunan sudah cukup memenuhi target.

2.2.23. Evaluasi Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Prestasi kinerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sampai dengan tahun 2018 yang terdiri atas 11 program dan 40 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tergolong Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 100 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 98,70 persen sampai dengan tahun 2018. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.88 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	**40**	**100.00**	**98.70**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9	100.00	99.75
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	4	100.00	99.39
Program peningkatan disiplin aparatur	1	100.00	99.93
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	100.00	100.00
Program Peningkatan kemananan pangan dan ketahanan pangan asal hewan	3	100.00	100.00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	3	100.00	100.00
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	1	100.00	99.97
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4	100.00	100.00
Program peningkatan produksi hasil peternakan	7	100.00	93.82
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3	100.00	100.00
Program Perencanaan Pembangunan	4	100.00	99.01

Sumber : Lampiran 1

Pada tahun 2018, dari 11 program yang ada pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat 5 program rutin yang

masuk kategori ST dan 6 program lainnya dengan capaian kinerja Sangat Tinggi (ST) yaitu di antaranya adalah Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, Program Peningkatan kemananan pangan dan ketahanan pangan asal hewan, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan, Program peningkatan produksi hasil peternakan dan Program Perencanaan Pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah cukup memenuhi target.

2.2.24. Evaluasi Kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil

Prestasi kinerja pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil sampai dengan tahun 2018 yang terdiri atas 11 program dan 34 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil tergolong Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 92,76 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 89,62 persen sampai dengan tahun 2018. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.89 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil	**34**	**92.76**	**89.62**
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti	4	92.96	98.88
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Kesejahteraan Sosial	1	94.39	98.68
Perlindungan dan Jaminan Sosial	3	94.19	98.48
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	92.52	91.93
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2	92.46	48.13
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	3	92.63	96.62
Program Penataan Administrasi Kependudukan	2	93.20	97.81
Program peningkatan disiplin aparatur	1	90.53	99.70
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	91.04	50.00

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	92.38	46.87
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4	92.86	93.97

Sumber : Lampiran 1

Pada tahun 2018, dari 11 program yang ada pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil terdapat 5 program rutin yang masuk kategori ST dan 6 program lainnya dengan capaian kinerja Sangat Tinggi (ST) yaitu di antaranya adalah Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti, Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Kesejahteraan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dan Program Penataan Administrasi Kependudukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil sudah cukup memenuhi target.

2.2.25. Evaluasi Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Prestasi kinerja pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sampai dengan tahun 2018 yang terdiri atas 13 program dan 44 kegiatan. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja fisik dari semua program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tergolong Sangat Tinggi (ST) atau sebesar 100 persen dengan capaian kinerja anggaran mencapai 97,43 persen sampai dengan tahun 2018. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.90 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	**44**	**100.00**	**97.43**

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal	2	100.00	97.84
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7	100.00	99.36
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	1	100.00	99.72
Program Pengembangan Agribisnis	2	100.00	98.42
Program peningkatan disiplin aparatur	1	100.00	99.87
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	100.00	99.68
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	13	100.00	97.71
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	3	100.00	98.31
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1	100.00	100.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	100.00	99.97
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3	100.00	99.83
Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian	5	100.00	89.20
Program Perencanaan Pembangunan	4	100.00	97.25

Sumber : Lampiran 1

Pada tahun 2018, dari 13 program yang ada pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terdapat 5 program rutin yang masuk kategori ST dan 8 program lainnya dengan capaian kinerja Sangat Tinggi (ST) yaitu di antaranya adalah Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal, Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan, Program Pengembangan Agribisnis, Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan), Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian dan Program Perencanaan Pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian/realisasi kinerja pelaksanaan program pembangunan

pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sudah cukup memenuhi target.

2.2.26. Evaluasi Kinerja Dinas Tenaga Kerja

Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan 12 program dimana 4 program merupakan rutin kantor dan 8 program merupakan prioritas daerah dan SKPD dengan total keseluruhan kegiatan sebanyak 44. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program rata-rata sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan rata-rata capaian kinerja anggaran sebesar 97,96% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi.

Tabel 2.91 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Dinas Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Dinas Tenaga Kerja	**44**	**100.00**	**97.96**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	100.00	96.19
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	4	100.00	98.52
Program Pengembangan Produktivitas Kerja	1	100.00	100.00
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	1	100.00	100.00
Program peningkatan disiplin aparatur	1	100.00	100.00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2	100.00	94.24
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	2	100.00	99.67
Program Peningkatan Kinerja Organisasi	1	100.00	94.92
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	8	100.00	98.78
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6	100.00	99.89
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5	100.00	96.42
Program Transmigrasi Lokal	3	100.00	100.00

Sumber : Lampiran 1

Terdapat 8 Program yang menjadi prioritas daerah dan SKPD yaitu, Program Pengawasan Ketenagakerjaan memiliki 4 Kegiatan

dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 98,52% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi, Program Pengembangan Produktivitas Kerja memiliki 1 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi, Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi memiliki 1 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi, Program Peningkatan Kesempatan Kerja memiliki 2 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 99,67% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja memiliki 8 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 98,78% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi, Program Transmigrasi Lokal Kerja memiliki 3 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi

2.2.27. Evaluasi Kinerja Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan 7 program dimana 4 program merupakan rutin kantor dan 3 program merupakan prioritas daerah dan SKPD dengan total keseluruhan kegiatan sebanyak 24. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program rata-rata sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan rata-rata capaian kinerja anggaran sebesar 91,73% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi.

Tabel 2.92 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Badan Kepegawaian Daerah	**24**	**100.00**	**91.73**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	100.00	93.74
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3	100.00	90.53
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	2	100.00	90.85
Program Pengembangan Data dan Informasi	1	100.00	82.91
Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda	2	100.00	90.03
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4	100.00	100.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4	100.00	94.03

Sumber : Lampiran 1

Terdapat 3 Program yang menjadi prioritas daerah dan SKPD yaitu, Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan memiliki 2 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 90,85% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi, Program Pengembangan Data dan Informasi memiliki 1 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 82,91% dengan kata lain memiliki kriteria tinggi, Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda memiliki 2 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 90,03% dengan kata lain memiliki kriteria tinggi.

2.2.28. Evaluasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik melaksanakan 10 program dimana 5 program merupakan rutin kantor dan 5 program merupakan prioritas daerah dan SKPD dengan total keseluruhan kegiatan sebanyak 32. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi capaian

kinerja program rata-rata sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan rata-rata capaian kinerja anggaran sebesar 90,84% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi.

Tabel 2.93 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	**32**	**100.00**	**90.84**
Program Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan	1	100.00	99.46
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	100.00	88.43
Program Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2	100.00	99.83
Program Pendidikan Politik Masyarakat	3	100.00	99.72
Program pengembangan wawasan kebangsaan	4	100.00	62.43
Program peningkatan disiplin aparatur	1	100.00	99.88
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	3	100.00	88.79
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	1	100.00	98.76
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	100.00	96.14
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	100.00	74.94

Sumber : Lampiran 1

Terdapat 5 Program yang menjadi prioritas daerah dan SKPD yaitu, Program Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan memiliki 1 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 99,46% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi, Program Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal memiliki 2 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 99,83% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi, Program Pendidikan Politik Masyarakat memiliki 3 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria

sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 99,72% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi, Program pengembangan wawasan kebangsaan memiliki 4 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 62,43% dengan kata lain memiliki kriteria rendah, Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) memiliki 1 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 98,76% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi.

2.2.29. Evaluasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 5 program dimana 4 program merupakan rutin kantor dan 1 program merupakan prioritas daerah dan SKPD dengan total keseluruhan kegiatan sebanyak 39. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program rata-rata sebesar 92,01% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan rata-rata capaian kinerja anggaran sebesar 97,07% dengan kata lain memiliki kriteria tinggi.

Tabel 2.94 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**39**	**92.01**	**97.07**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	91.63	99.97
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	14	92.31	99.94
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	91.42	85.47
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7	92.20	100.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	7	92.51	99.96

Sumber : Lampiran 1

Terdapat 1 Program yang menjadi prioritas daerah dan SKPD yaitu, Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam memiliki 14 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 92,31% dan capaian kinerja anggaran sebesar 99,94%.

2.2.30. Evaluasi Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan

Badan Penelitian dan Pengembangan melaksanakan 8 program dimana 5 program merupakan rutin kantor dan 3 program merupakan prioritas daerah dan SKPD dengan total keseluruhan kegiatan sebanyak 31. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program rata-rata sebesar 98,21% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan rata-rata capaian kinerja anggaran sebesar 96,71% dengan kata lain memiliki kriteria tinggi.

Tabel 2.95 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Badan Penelitian dan Pengembangan	**31**	**98.21**	**96.71**
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1	100.00	99.41
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	100.00	95.11
Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	1	100.00	99.79
Program Pengembangan Mutu Penelitian dan Pengembangan	6	100.00	95.79
Program peningkatan disiplin aparatur	1	93.55	99.65
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	92.12	99.09
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4	100.00	98.29
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	7	100.00	86.54

Sumber : Lampiran 1

Terdapat 3 Program yang menjadi prioritas daerah dan SKPD yaitu, Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki 1 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan

capaian kinerja anggaran sebesar 99,41%, Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK memiliki 1 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja anggaran sebesar 99,79%, Program Pengembangan Mutu Penelitian dan Pengembangan memiliki 6 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja anggaran sebesar 95,79%.

2.2.31. Evaluasi Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah melaksanakan 7 program dimana 5 program merupakan rutin kantor dan 2 program merupakan prioritas daerah dan SKPD dengan total keseluruhan kegiatan sebanyak 67. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program rata-rata sebesar 92,67% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan rata-rata capaian kinerja anggaran sebesar 82,84% dengan kata lain memiliki kriteria tinggi.

Tabel 2.96 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah	**67**	**92,67**	**82,84**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	92,51	81,50
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	4	93,39	92,15
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	36	92,36	75,77
Program peningkatan disiplin aparatur	2	93,06	99,33
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2	92,09	72,29
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	91,65	71,38
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	7	93,64	87,49

Sumber : Lampiran 1

Terdapat 2 Program yang menjadi prioritas daerah dan SKPD yaitu, Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota memiliki 4 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 93,39% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 92,15% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi, Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah memiliki 36 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 92,36% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 75,77% dengan kata lain memiliki kriteria tinggi.

2.2.32. Evaluasi Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Badan Pengelola Pendapatan Daerah melaksanakan 9 program dimana 6 program merupakan rutin kantor dan 3 program merupakan prioritas daerah dan SKPD dengan total keseluruhan kegiatan sebanyak 35. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program rata-rata sebesar 99,72% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan rata-rata capaian kinerja anggaran sebesar 82,03% dengan kata lain memiliki tinggi.

Tabel 2.97 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	**35**	**99,72**	**82,03**
Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	1	100,00	50,78
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	100,00	96,51
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	3	100,00	96,13
Program peningkatan disiplin aparatur	2	100,00	91,28
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	100,00	59,26
Program Peningkatan Pendapatan Daerah	3	100,00	83,53

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4	100,00	83,96
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	9	97,50	83,36
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1	100,00	93,42

Sumber : Lampiran 1

Terdapat 3 Program yang menjadi prioritas daerah dan SKPD yaitu, Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah memiliki 3 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 96,13% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi, Program Peningkatan Pendapatan Daerah memiliki 3 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 83,53% dengan kata lain memiliki kriteria tinggi.

2.2.33. Evaluasi Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan 6 program dimana 4 program merupakan rutin kantor dan 2 program merupakan prioritas daerah dan SKPD dengan total keseluruhan kegiatan sebanyak 32. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program rata-rata sebesar 99,01% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan rata-rata capaian kinerja anggaran sebesar 89,44% dengan kata lain memiliki kriteria tinggi.

Tabel 2.98 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**32**	**99,01**	**89,44**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7	98,70	98,98

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	13	99,58	97,52
Program Pendidikan Kedinasan	5	98,28	85,79
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	100,00	75,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4	100,00	98,52
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	97,47	80,81

Sumber : Lampiran 1

Terdapat 2 Program yang menjadi prioritas daerah dan SKPD yaitu, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur memiliki 13 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 99,58% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 97,52% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi, Program Pendidikan Kedinasan memiliki 5 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 98,28% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 85,79% dengan kata lain memiliki kriteria tinggi.

2.2.34. Evaluasi Kinerja Badan Penghubung Daerah

Badan Penghubung Daerah melaksanakan 8 program dimana 5 program merupakan rutin kantor dan 3 program merupakan prioritas daerah dan SKPD dengan total keseluruhan kegiatan sebanyak 29. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program rata-rata sebesar 99,90% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan rata-rata capaian kinerja anggaran sebesar 82,84% dengan kata lain memiliki kriteria tinggi.

Tabel 2.99 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Badan Penghubung Daerah Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Badan Penghubung Daerah	**29**	**99,90**	**82,84**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	100,00	95,39
Program Pelayanan Informasi	1	100,00	88,17
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1	100,00	97,09
Program Pembinaan Kemasyarakatan dan Kemahasiswaan	2	100,00	78,00
Program peningkatan disiplin aparatur	2	100,00	98,97
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2	100,00	15,23
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7	99,21	96,03
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4	100,00	93,86

Sumber : Lampiran 1

Terdapat 3 Program yang menjadi prioritas daerah dan SKPD yaitu, Program Pelayanan Informasi memiliki 1 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 88,17% dengan kata lain memiliki kriteria tinggi, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur memiliki 1 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 97,09% dengan kata lain memiliki kriteria tinggi, Program Pembinaan Kemasyarakatan dan Kemahasiswaan memiliki 2 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 78 dengan kata lain memiliki kriteria tinggi.

2.2.35. Evaluasi Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan 13 program dimana 5 program merupakan rutin kantor dan 8 program merupakan prioritas daerah dan SKPD dengan total keseluruhan

kegiatan sebanyak 64. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program rata-rata sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan rata-rata capaian kinerja anggaran sebesar 88,25% dengan kata lain memiliki kriteria tinggi.

Tabel 2.100 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	**64**	**100,00**	**88,25**
Program Kerjasama Pembangunan	1	100,00	98,16
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7	100,00	75,34
Program Pengembangan Data/Informasi	6	100,00	83,58
Program peningkatan disiplin aparatur	1	100,00	99,92
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	100,00	45,02
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2	100,00	100,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3	100,00	99,95
Program perencanaan pembangunan daerah	19	100,00	89,65
Program perencanaan pembangunan ekonomi	5	100,00	89,38
Program Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana dan Lingkungan Hidup	8	100,00	96,57
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	3	100,00	93,87
Program perencanaan sosial dan budaya	5	100,00	91,73
Program Perencanaan Tata Ruang	3	100,00	84,12

Sumber : Lampiran 1

Terdapat 8 Program yang menjadi prioritas daerah dan SKPD yaitu, Program Kerjasama Pembangunan memiliki 1 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 98,16% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi, Program Pengembangan Data/Informasi memiliki 6 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik

sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 83,58% dengan kata lain memiliki kriteria tinggi, Program perencanaan pembangunan daerah memiliki 19 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 89,65 dengan kata lain memiliki kriteria tinggi. Program perencanaan pembangunan ekonomi memiliki 5 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 89,38 dengan kata lain memiliki kriteria tinggi, Program Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana dan Lingkungan Hidup memiliki 8 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 96,57 dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi, Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh memiliki 3 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 93,87 dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi, Program perencanaan sosial dan budaya memiliki 5 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 91,73 dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi, Program Perencanaan Tata Ruang memiliki 3 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 84,12 dengan kata lain memiliki kriteria tinggi.

2.2.36. Evaluasi Kinerja Biro Hukum

Biro Hukum melaksanakan 8 program dimana 4 program merupakan rutin kantor dan 4 program merupakan prioritas daerah dan SKPD dengan total keseluruhan kegiatan sebanyak 20. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program rata-rata sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan rata-rata capaian kinerja anggaran sebesar 96,78% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi.

Tabel 2.101 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Hukum Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Biro Hukum	**20**	**100,00**	**96,78**
Program Dokumentasi dan Informasi Hukum	1	100,00	99,56
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	100,00	99,47
Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum	2	100,00	91,75
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1	100,00	99,94
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	100,00	96,76
Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda	2	100,00	87,69
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2	100,00	100,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3	100,00	99,05

Sumber : Lampiran 1

Terdapat 4 Program yang menjadi prioritas daerah dan SKPD yaitu, Program Dokumentasi dan Informasi Hukum memiliki 1 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 99,56% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi, Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum memiliki 2 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 91,75% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan memiliki 1 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 99,94% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi, Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda memiliki 2 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 87,69% dengan kata lain memiliki kriteria tinggi.

2.2.37. Evaluasi Kinerja Biro Humas Dan Protokol

Biro Humas Dan Protokol melaksanakan 8 program dimana 5 program merupakan rutin kantor dan 3 program merupakan prioritas daerah dan SKPD dengan total keseluruhan kegiatan sebanyak 31. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program rata-rata sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan rata-rata capaian kinerja anggaran sebesar 98,58% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi.

Tabel 2.102 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Humas Dan Protokol Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Biro Humas Dan Protokol	**31**	**100,00**	**98,58**
Program kerjasama informasi dengan mas media	4	100,00	99,97
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	100,00	93,96
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	8	100,00	99,52
Program peningkatan disiplin aparatur	1	100,00	99,66
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	100,00	95,66
Program Peningkatan Pelayanan Protokol dan Perjalanan	1	100,00	99,98
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	100,00	100,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3	100,00	99,88

Sumber : Lampiran 1

Terdapat 3 Program yang menjadi prioritas daerah dan SKPD yaitu, Program kerjasama informasi dengan mas media memiliki 4 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 99,97% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi, Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa memiliki 8 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 99,52% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi, Program Peningkatan Pelayanan Protokol dan Perjalanan memiliki 1 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki

kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 99,98% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi

2.2.38. Evaluasi Kinerja Badan Biro Kesejahteraan Masyarakat dan Kemasyarakatan

Badan Biro Kesejahteraan Masyarakat dan Kemasyarakatan melaksanakan 10 program dimana 4 program merupakan rutin kantor dan 6 program merupakan prioritas daerah dan SKPD dengan total keseluruhan kegiatan sebanyak 41. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program rata-rata sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan rata-rata capaian kinerja anggaran sebesar 99,18% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi.

Tabel 2.103 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Kesejahteraan Masyarakat dan Kemasyarakatan Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Biro Kesejahteraan Masyarakat dan Kemasyarakatan	**41**	**100,00**	**99,18**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	100,00	99,84
Program Pemberdayaan Keagamaan	8	100,00	95,93
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1	100,00	98,93
Program Pembinaan Mental Spritual	3	100,00	99,49
Program Pengembangan Data dan Informasi	1	100,00	100,00
Program Peningkatan dan Pembinaan di Bidang Bina Kesejahteraan Rakyat, Bina Mental Spiritual dan Bina Kemasyarakatan	5	100,00	99,56
Program peningkatan disiplin aparatur	2	100,00	98,48
Program Peningkatan Koordinasi, Singkronisasi dan Fasilitasi di Bidang Bina Kesejahteraan Rakyat, Bina Mental Spiritual dan Bina Kemasyarakatan	4	100,00	99,77
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	100,00	100,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4	100,00	99,77

Sumber : Lampiran 1

Terdapat 6 Program yang menjadi prioritas daerah dan SKPD yaitu, Program Pemberdayaan Keagamaan memiliki 8 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 95,93% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur memiliki 1 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 98,93% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi, Program Pembinaan Mental Spritual memiliki 3 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 99,49% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi, Program Pengembangan Data dan Informasi memiliki 1 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi, Program Peningkatan dan Pembinaan di Bidang Bina Kesejahteraan Rakyat, Bina Mental Spiritual dan Bina Kemasyarakatan memiliki 5 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 99,56% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi, Program Peningkatan Koordinasi, Singkronisasi dan Fasilitasi di Bidang Bina Kesejahteraan Rakyat, Bina Mental Spiritual dan Bina Kemasyarakatan memiliki 4 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 99,77% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi.

2.2.39. Evaluasi Kinerja Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan 6 program dimana 5 program merupakan rutin kantor dan 1 program merupakan prioritas daerah dan SKPD dengan total keseluruhan kegiatan sebanyak 27. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program rata-rata sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan rata-rata capaian kinerja anggaran sebesar 80,49% dengan kata lain memiliki kriteria tinggi.

Tabel 2.104 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	**27**	**100,00**	**80,49**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	100,00	91,78
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3	100,00	76,21
Program peningkatan disiplin aparatur	1	100,00	98,47
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2	100,00	99,25
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6	100,00	37,49
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	7	100,00	79,75

Sumber : Lampiran 1

Terdapat 1 Program yang menjadi prioritas daerah dan SKPD yaitu, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur memiliki 3 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 76,21% dengan kata lain memiliki kriteria tinggi.

2.2.40. Evaluasi Kinerja Biro Organisasi

Biro Organisasi melaksanakan 4 program dimana 3 program merupakan rutin kantor dan 1 program merupakan prioritas daerah dan SKPD dengan total keseluruhan kegiatan sebanyak 20. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program rata-rata sebesar 92,86% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan rata-rata capaian kinerja anggaran sebesar 97,32% dengan kata lain memiliki kriteria tinggi.

Tabel 2.105 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Organisasi Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Biro Organisasi	**20**	**92,86**	**97,32**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	92,83	94,71
Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan	9	92,98	99,23
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	93,46	95,80
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	92,19	99,55

Sumber : Lampiran 1

Terdapat 1 Program yang menjadi prioritas daerah dan SKPD yaitu, Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan memiliki 9 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 92,98% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 99,23% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi.

2.2.41. Evaluasi Kinerja Biro Otonomi Khusus

Biro Otonomi Khusus melaksanakan 6 program dimana 4 program merupakan rutin kantor dan 2 program merupakan prioritas daerah dan SKPD dengan total keseluruhan kegiatan sebanyak 22. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program rata-rata sebesar 93,23% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan rata-rata capaian kinerja anggaran sebesar 82,73% dengan kata lain memiliki kriteria tinggi.

Tabel 2.106 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Otonomi Khusus Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Biro Otonomi Khusus	**22**	**93,23**	**82,73**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	93,24	65,27
Program peningkatan disiplin aparatur	1	92,94	96,04

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Program Peningkatan Kapasitas SDM Papua	2	93,22	97,02
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	92,62	42,34
Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	7	93,44	98,35
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3	93,05	92,39

Sumber : Lampiran 1

Terdapat 2 Program yang menjadi prioritas daerah dan SKPD yaitu, Program Peningkatan Kapasitas SDM Papua memiliki 2 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 93,22% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 97,02% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi, Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah memiliki 7 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 93,44% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 98,35% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi.

2.2.42. Evaluasi Kinerja Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri

Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri melaksanakan 7 program dimana 5 program merupakan rutin kantor dan 2 program merupakan prioritas daerah dan SKPD dengan total keseluruhan kegiatan sebanyak 23. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program rata-rata sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan rata-rata capaian kinerja anggaran sebesar 99,75% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi.

Tabel 2.107 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri	**23**	**100,00**	**99,75**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	100,00	99,61
Program Pengelolaan Batas Wilayah dan Lintas Batas	1	100,00	100,00
Program peningkatan disiplin aparatur	1	100,00	100,00
Program Peningkatan Hubungan Kerjasama Luar Negeri	1	100,00	100,00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2	100,00	99,10
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	100,00	100,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3	100,00	100,00

Sumber : Lampiran 1

Terdapat 2 Program yang menjadi prioritas daerah dan SKPD yaitu, Program Pengelolaan Batas Wilayah dan Lintas Batas memiliki 1 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi, Program Peningkatan Hubungan Kerjasama Luar Negeri memiliki 1 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi.

2.2.43. Evaluasi Kinerja Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam melaksanakan 3 program dimana 2 program merupakan rutin kantor dan 1 program merupakan prioritas daerah dan SKPD dengan total keseluruhan kegiatan sebanyak 12. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program rata-rata sebesar 91,97% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan rata-rata capaian kinerja anggaran sebesar 99,51% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi.

Tabel 2.108 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam	**12**	**91,97**	**99,51**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7	92,09	99,66
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4	92,01	99,19
Program perencanaan pembangunan ekonomi	1	90,95	99,76

Sumber : Lampiran 1

Terdapat 1 Program yang menjadi prioritas daerah dan SKPD yaitu, Program perencanaan pembangunan ekonomi memiliki 1 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 90,95% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 99,76% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi.

2.2.44. Evaluasi Kinerja Biro Tata Pemerintahan

Biro Tata Pemerintahan melaksanakan 6 program dimana 3 program merupakan rutin kantor dan 3 program merupakan prioritas daerah dan SKPD dengan total keseluruhan kegiatan sebanyak 13. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program rata-rata sebesar 92,29% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan rata-rata capaian kinerja anggaran sebesar 95,01% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi.

Tabel 2.109 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Tata Pemerintahan Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Biro Tata Pemerintahan	**13**	**92,29**	**95,01**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5	92,11	97,41
Program Pembinaan dan Penataan Administrasi Pemerintahan	1	90,05	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung di Provinsi Papua	1	93,45	100,00

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	2	93,16	99,97
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2	93,91	75,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	2	90,83	99,07

Sumber : Lampiran 1

Terdapat 3 Program yang menjadi prioritas daerah dan SKPD yaitu, Program Pembinaan dan Penataan Administrasi Pemerintahan memiliki 1 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 90,05% dengan kata lain memiliki kriteria tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung di Provinsi Papua memiliki 1 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 93,45% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria tinggi, Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah memiliki 2 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 93,16% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 99,97% dengan kata lain memiliki kriteria tinggi

2.2.45. Evaluasi Kinerja Biro Umum

Biro Umum melaksanakan 5 program dimana 5 program ini merupakan rutin kantor dengan total keseluruhan kegiatan sebanyak 25. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program rata-rata sebesar 93,01% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan rata-rata capaian kinerja anggaran sebesar 70,07% dengan kata lain memiliki kriteria sadang.

Tabel 2.110 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Biro Umum Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Biro Umum	**25**	**93,01**	**70,07**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	93,19	79,14
Program peningkatan disiplin aparatur	2	91,54	96,42
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2	92,86	57,11
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4	93,26	0,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6	93,03	95,70

Sumber : Lampiran 1

2.2.46. Evaluasi Kinerja Inspektorat

Inspektorat melaksanakan 9 program dimana 5 program merupakan rutin kantor dan 4 program merupakan prioritas daerah dan SKPD dengan total keseluruhan kegiatan sebanyak 42. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program rata-rata sebesar 98,15% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan rata-rata capaian kinerja anggaran sebesar 73,51% dengan kata lain memiliki kriteria sedang.

Tabel 2.111 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Inspektorat Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Inspektorat	**42**	**98,15**	**73,51**
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	1	100,00	85,49
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	97,96	71,77
Program peningkatan disiplin aparatur	2	100,00	96,93
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2	95,83	78,05
Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	10	96,87	61,25

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	2	96,21	83,71
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	100,00	81,63
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	3	100,00	69,87
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6	98,68	77,49

Sumber : Lampiran 1

Terdapat 4 Program yang menjadi prioritas daerah dan SKPD yaitu, Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat memiliki 1 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 85,49% dengan kata lain memiliki kriteria tinggi, Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan memiliki 10 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 96,87% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 61,25% dengan kata lain memiliki kriteria rendah, Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur memiliki 2 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 96,21% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 83,71% dengan kata lain memiliki kriteria tinggi, Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan memiliki 3 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 69,87% dengan kata lain memiliki kriteria sedang.

2.2.47. Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 9 program dimana 5 program merupakan rutin kantor dan 4 program merupakan prioritas daerah dan SKPD dengan total keseluruhan kegiatan sebanyak 35. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program rata-rata sebesar 97,19% dengan kata lain memiliki kriteria sangat

tinggi dan rata-rata capaian kinerja anggaran sebesar 101,21% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi.

Tabel 2.112 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Satuan Polisi Pamong Praja	**35**	**97,19**	**101,21**
Porgram Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1	93,50	100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	99,30	98,30
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	3	96,70	98,54
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1	92,95	97,61
Program peningkatan disiplin aparatur	2	100,00	99,95
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2	93,95	98,05
Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	6	98,84	95,61
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	91,73	100,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3	97,97	133,31

Sumber : Lampiran 1

Terdapat 4 Program yang menjadi prioritas daerah dan SKPD yaitu, Porgram Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal memiliki 1 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 93,50% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 100% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi, Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan memiliki 3 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 96,70% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 98,54% dengan kata lain memiliki kriteria tinggi, Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam memiliki 1 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 92,95% dengan kata lain memiliki kriteria

sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 97,61% dengan kata lain memiliki kriteria tinggi, Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan memiliki 6 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 98,84% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 95,61% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi.

2.2.48. Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah melaksanakan 5 program dimana 4 program merupakan rutin kantor dan 1 program merupakan prioritas daerah dan SKPD dengan total keseluruhan kegiatan sebanyak 31. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program rata-rata sebesar 92,95% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan rata-rata capaian kinerja anggaran sebesar 92,44% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi.

Tabel 2.113 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Sekretariat Daerah	**31**	**92,95**	**92,44**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	92,09	95,06
Program peningkatan disiplin aparatur	2	93,09	99,57
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	9	93,30	96,95
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4	93,35	96,25
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6	93,56	76,39

Sumber : Lampiran 1

Terdapat 1 Program yang menjadi prioritas daerah dan SKPD yaitu, Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah memiliki 9 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 93,30% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 96,95% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi.

2.2.49. Evaluasi Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua melaksanakan 6 program dimana 5 program merupakan rutin kantor dan 1 program merupakan prioritas daerah dan SKPD dengan total keseluruhan kegiatan sebanyak 59. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program rata-rata sebesar 94,05% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan rata-rata capaian kinerja anggaran sebesar 89,31% dengan kata lain memiliki kriteria tinggi.

Tabel 2.114 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	**59**	**94,05**	**89,31**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15	98,73	89,57
Program peningkatan disiplin aparatur	2	93,44	97,28
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	21	92,34	91,11
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	3	91,18	72,02
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	93,28	99,78
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	13	92,44	84,83

Sumber : Lampiran 1

Terdapat 1 Program yang menjadi prioritas daerah dan SKPD yaitu, Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah memiliki 21 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 92,34% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 91,11% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi.

2.2.50. Evaluasi Kinerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua

Sekretariat Majelis Rakyat Papua melaksanakan 6 program dimana 5 program merupakan rutin kantor dan 1 program merupakan prioritas daerah dan SKPD dengan total keseluruhan kegiatan

sebanyak 36. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program rata-rata sebesar 92,06% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan rata-rata capaian kinerja anggaran sebesar 70,75% dengan kata lain memiliki kriteria sedang.

Tabel 2.115 Capaian Kinerja Program Dan Anggaran Sekretariat Majelis Rakyat Papua Tahun 2018

OPD	Kegiatan		Capaian Kinerja Anggaran
	Jumlah	Capaian Kinerja Fisik	
Sekretariat Majelis Rakyat Papua	**36**	**92,06**	**70,75**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	92,29	76,60
Program peningkatan disiplin aparatur	2	92,69	99,63
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga MRP	10	91,93	60,84
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	93,42	90,61
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	91,50	31,55
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5	91,80	99,05

Sumber : Lampiran 1

Terdapat 1 Program yang menjadi prioritas daerah dan SKPD yaitu, Program Peningkatan Kapasitas Lembaga MRP memiliki 10 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 91,93% dengan kata lain memiliki kriteria sangat tinggi dan capaian kinerja anggaran sebesar 60,84% dengan kata lain memiliki kriteria rendah.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dalam konteks ini, permasalahan pembangunan daerah yang ditemukan di Provinsi Papua selama ini adalah :

1. Akses, mutu dan tata kelola pendidikan belum optimal;

2. Derajat, akses dan sumberdaya kesehatan masyarakat yang belum optimal;
3. Rendahnya daya saing keolahragaan;
4. Rendahnya keberdayaan pemuda;
5. Rendahnya ketahanan pangan;
6. Rendahnya konsumsi pangan lokal;
7. Menurunnya kualitas dan kuantitas nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat;
8. Belum optimalnya penanganan terhadap penyelesaian masalah keamanan, ketentraman dan ketertiban;
9. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi ;
10. Belum maksimalnya birokasi memberi pelayanan publik secara transparan dan akuntabel;
11. Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas;
12. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan;
13. Rendahnya daya saing perekonomian wilayah;
14. Belum optimalnya konektivitas transportasi;
15. Rendahnya tingkat penghunian rumah layak dan sehat;
16. Belum optimalnya pelayanan informasi dan komunikasi;
17. Rendahnya kampung mandiri dan berkembang di Papua;
18. Tingginya ketimpangan dan kemiskinan penduduk OAP;
19. Belum optimalnya pembangunan di wilayah perbatasan;
20. Tingginya kerentanan sosial masyarakat;
21. Tingginya ketimpangan gender dalam pembangunan.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah. Berikut ini

sampaikan permasalahan menurut penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Provinsi Papua.

2.3.2.1. Pendidikan

1. Ketersediaan tenaga pendidik belum merata;
2. Cakupan sekolah pada daerah dengan aglomerasi rendah belum optimal;
3. Kelayakhunian bangunan sekolah relatif rendah;
4. Angka putus sekolah SD yang masih tinggi di Mamta dan La pago
5. Angka putus sekolah SMP yang tinggi di Me Pago, Anim Ha dan La Pago;
6. Belum optimalnya akses pendidikan pada jenjang SMA/SMK;
7. Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK yang masih tinggi;
8. Belum maksimalnya melek aksara penduduk;
9. Pelayanan PKBM yang relatif rendah;
10. Kualifikasi mengajar tenaga pendidik belum optimal;
11. Kedisiplinan tenaga pengajar terhadap pelaksanaan tugas masih relatif rendah;
12. Ketersediaan tenaga kependidikan belum merata terutama di wilayah adat Lapago, Mepago, dan sebagian wilayah Haanim;
13. Penerapan kurikulum sesuai dengan standar belum maksimal terutama di wilayah adat Lapago dan Mepago;
14. Penerapan manajemen berbasis sekolah belum optimal;
15. Pendidikan ekstrakulikuler dan program pengayaan belum berkembang dengan optimal;
16. Belum optimalnya akses pendidikan pada jenjang SMA/SMK;

2.3.2.2. Kesehatan

1. Belum optimalnya pelayanan Puskesmas;
2. Kualitas layanan kesehatan yang belum maksimal ;
3. Aksesbilitas dan pelayanan kesehatan belum merata menjangkau seluruh kabupaten;
4. Kemiskinan atau ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pangan minimal;
5. Pengeluaran perkapita masyarakat untuk kesehatan yang masih rendah;

6. Pola asuh yang kurang tepat;
7. Belum maksimalnya pelayanan kefarmasian dan obat-obatan tradisional;
8. Pelayanan kefarmasian dan obat-obat tradisional yang belum memadai;
9. Masih tingginya angka penderita malaria;
10. Meningkatnya pengidap HIV/AIDS terutama di wilayah La Pago dan Me Pago;
11. Kesadaran masyarakat dampak bahaya seks bebas masih rendah;
12. Frekuensi kunjungan ibu hamil ke pelayanan kesehatan masih rendah;
13. Angka kematian ibu masih tinggi;
14. Tingginya angka kematian perempuan;
15. Belum optimalnya penanganan agar AHH perempuan meningkat;
16. Pemenuhan gizi masyarakat belum ideal;
17. Sosialisasi dampak gizi buruk belum optimal;
18. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi bagi ibu dan anak masih rendah;
19. Sosialisasi faktor pemicu gizi lebih belum optimal;
20. Ketersediaan dan kedisiplinan tenaga medis rendah;
21. Keterbatasan dan penyebaran yang tidak merata tenaga medis dan cenderung menurun;
22. Keterbatasan sarana prasarana rumah sakit daerah;
23. Belum optimalnya pelayanan rumah sakit daerah;
24. Kondisi lingkungan yang buruk beresiko pada kesehatan;
25. Masih tingginya kematian ibu (OAP) melahirkan;
26. Belum optimalnya pelayanan kesehatan pada bayi OAP baru lahir;
27. Rendahnya anak-anak OAP yang memiliki gizi baik;
28. Ketersediaan tenaga medis dan nonmedis, serta puskemas masih belum memadai dan dibawah standar.

2.3.2.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Konstruksi jalan dan jembatan tidak sesuai standar
2. Lambatnya rehabilitasi jalan dan jembatan rusak
3. Belum terhubungnya beberapa ibukota kabupaten

4. Belum optimalnya konektivitas antar kawasan strategis provinsi
5. Belum optimalnya pengawasan pemanfaatan ruang
6. Minimnya ketersediaan jaringan irigasi
7. Banyak daerah yang belum memiliki sumber air baku kontinyu
8. Banyak daerah belum mengoptimalkan sumber air baku secara kontinyu
9. Rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur pengendali banjir

2.3.2.4. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

1. Rendah ketersediaan rumah layak huni
2. Belum memadainya pemukiman layak huni
3. Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni

2.3.2.5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi penegakan hukum dan keamanan
2. Belum optimalnya penegakan perda dan perkada
3. Masih tingginya tingkat kejahatan yang tertangani
4. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi penegakan hukum dan keamanan
5. Belum optimalnya penegakan perda dan perkada
6. Masih tingginya tingkat kejahatan yang tertangani
7. Belum optimalnya penyelesaian tindak pidana
8. Masih rendahnya Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) kabupaten/kota dalam daerah layanan
9. Masih rendahnya tenaga pengendali dan kenyamanan lingkungan yang terampil
10. Belum optimalnya Komunikasi antarumat beragama yang masih renggang
11. Belum optimalnya penanganan disintegrasi bangsa
12. Belum maksimalnya koordinasi Forkompimda
13. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap HAM
14. Belum optimalnya penanganan kasus pelanggaran HAM

15. Masih rendahnya pendidikan politik dan demokrasi dalam pendidikan menengah
16. Belum optimalnya pembinaan terhadap lembaga dan partai politik
17. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu belum optimal
18. Belum optimalnya pembinaan terhadap LSM dan Ormas
19. Rendahnya peranan lembaga adat untuk harmonisasi regulasi dan mitra strategis pembangunan
20. Rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur pengendali longsor
21. Rendahnya informasi mengenai kondisi kerawanan bencana yang diketahui oleh masyarakat
22. Rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur pengendali abrasi dan erosi
23. Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana masih rendah
24. Pola mitigasi bencana masih belum optimal dipahami oleh masyarakat

2.3.2.6. Sosial

1. Belum optimalnya perlindungan sosial bagi keluarga OAP
2. Belum optimalnya rehabilitasi sosial bagi PMKS
3. Belum optimalnya upaya pemberdayaan sosial bagi PMKS
4. Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS
5. Koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan PMKS masih lemah
6. Masih rendahnya kemandirian ekonomi masyarakat.
7. Minimnya sarana prasarana penanganan PMKS
8. Pendataan terhadap KAT kurang optimal
9. Rentang jangkauan terhadap KAT sangat luas
10. Masih rendahnya koordinasi antar stakeholder dalam penanganan PMKS

2.3.2.7. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Belum optimalnya capaian penduduk yang memiliki legal identitas
2. Belum tersedianya data terpilah khusus OAP

2.3.2.8. Kebudayaan

1. Rendahnya penuturan terhadap bahasa asli Papua
2. Belum terdata dan terjaganya benda-benda budaya Papua
3. Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok-kelompok seni (sanggar)
4. Belum tersedianya ruang publik untuk ekspresi budaya
5. Tingginya pengaruh budaya dari luar
6. Kurangnya penghargaan terhadap nilai-nilai budaya
7. Promosi budaya yang belum memadai
8. Masih rendahnya jumlah pengunjung event seni budaya di anjungan Papua TMII

2.3.2.9. Kepemudaan dan Olahraga

1. Minimnya event-event keolahragaan (kompetisi) tingkat daerah
2. Minimnya pembinaan terhadap olahraga
3. Minimnya SDM keolahragaan (wasit, pelatih, tenaga penyelenggara event, tenaga medis olahraga)
4. Minimnya sarana dan prasarana olahraga
5. Minimnya upaya pembibitan atlet asli Papua
6. Rendahnya integrasi antara event-event keolahragaan dengan pengembangan sektor-sektor strategis lainnya (terutama kesehatan, pendidikan dan ekonomi)
7. Merosotnya moralitas pemuda yang mengakibatkan perilaku asosial
8. Minimnya pengembangan wawasan kebangsaan pemuda
9. Minimnya kegiatan pemberdayaan bagi generasi muda
10. Belum tersediannya sarana dan prasarana pengembangan pemuda
11. Rendahnya kesadaran pemuda terhadap perannya sebagai penerus bangsa

2.3.2.10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Masih tingginya jumlah kasus KDRT, baik pada perempuan maupun anak
2. Partisipasi perempuan dalam berbagai kegiatan publik sangat rendah (proses pengambilan keputusan)

3. Upaya pemberdayaan perempuan yang belum optimal
4. Budaya Papua menempatkan posisi perempuan sebagai faktor produksi
5. Upaya penyadaran terkait kesetaraan gender masih belum optimal
6. Pemahaman aparatur terkait kesetaraan gender masih rendah
7. Masih rendahnya perencanaan pembangunan dan kebijakan yang responsif gender
8. Tingginya kasus kekerasan terhadap anak

2.3.2.11. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Rendahnya literasi fungsi dan keterkaitan KB terhadap pencegahan resiko kesehatan
2. Belum optimalnya penyediaan alat kontrasepsi bagi PUS
3. Fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan layanan pemasangan alat kontrasepsi masih relatif terbatas
4. Belum optimalnya penyuluhan dan perencanaan KB
5. Penempatan Tenaga penyuluh dan pelayanan KB yang belum merata

2.3.2.12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Belum optimalnya Penyelenggaraan pemerintaha kampung yang mandiri
2. Ketersediaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna di kampung masih sangat rendah
3. Belum berkembangnya sentra produksi komoditi unggulan kampung
4. Minimnya ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur kampung
5. Belum maksimalnya penyediaan infrastruktur dasar di daerah perbatasan
6. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau terluar

2.3.2.13. Perhubungan

1. Meningkatnya investasi berbasis lahan skala luas yang belum menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan
2. Rendahnya penggunaan energi listrik yag terbarukan

3. Kurangnya pengelolaan persampahan
4. Meningkatnya Penggunaan BBM yang tidak ramah lingkungan
5. Meningkatnya penggunaan barang-barang penghasil Gas Rumah Kaca
6. Meningkatnya jumlah kendaraan di perkotaan

2.3.2.14. Komunikasi dan Informatika

1. Rendahnya akses informasi dan komunikasi
2. Masih rendahnya akses jaringan berbasis teknologi informasi
3. Minimnya kapasitas jaringan BTS yang terbangun
4. Minimnya kapasitas jaringan BTS yang terpelihara
5. Rendahnya kapasitas SDM yang memiliki kompetensi dalam teknologi informasi dan komunikasi

2.3.2.15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1. Rendahnya kemampuan wirausaha dagang
2. Barang yang diproduksi belum berorientasi pasar
3. Keterbatasan ketersediaan dan kualitas sarana pendukung distribusi barang industri
4. Kurangnya akses masyarakat bantuan permodalan (KUR)
5. Terbatasnya jaringan pemasaran UKM di dalam dan ke luar daerah
6. Kurangnya jiwa wirausaha masyarakat asli papua
7. Rendahnya kualitas dan jumlah tenaga pendamping pengembangan koperasi dan UKM

2.3.2.16. Ketahanan Pangan

1. Rendahnya produktifitas pangan lokal
2. Rendahnya daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan
3. Beum memadainya lumbung pangan di wilayah perdesaan
4. Rendahnya produksi tanaman pangan lokal Papua
5. Belum optimalnya ketersediaan lumbung pangan lokal
6. Belum optimalnya diversifikasi pangan lokal
7. Belum adanya sertifikasi layak konsumsi dari dalam daerah
8. Panjangnya rantai distribusi pangan yang berakibat pada penurunan kualitas pangan
9. Ketersediaan dan keterjangkauan ekonomi terhadap pangan masih terbatas

10. Belum optimalnya sosialisasi budaya konsumsi pangan lokal
11. Masih rendahnya minat konsumsi pangan local sebagai sumber energi dan protein utama
12. Terbatasnya akses penduduk pada makanan local dan bergizi
13. Ketahanan pangan pada keluarga OAP relatif masih rendah

2.3.2.17. Penanaman Modal Daerah

1. Minimnya infrastruktur pendukung investasi
2. Belum memadainya promosi investasi

2.3.2.18. Tenaga Kerja

1. Kualitas tenaga kerja yang rendah
2. Pencari kerja yang lebih dominan pada pendidikan rendah
3. Belum memadainya kualitas Balai Latihan Kerja
4. Tingkat kepatuhan perusahaan dalam menerapkan UMP yang ditetapkan masih sangat rendah
5. Kurangnya minat pencari kerja terhadap sektor informal
6. Rendahnya etos kerja OAP
7. Penanganan perselisihan tenaga kerja belum maksimal

2.3.2.19. Lingkungan Hidup

1. Meningkatnya investasi berbasis lahan skala luas yang belum menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan
2. Rendahnya penggunaan energi listrik yag terbarukan
3. Kurangnya pengelolaan persampahan
4. Meningkatnya Penggunaan BBM yang tidak ramah lingkungan
5. Meningkatnya penggunaan barang-barang penghasil Gas Rumah Kaca
6. Meningkatnya jumlah kendaraan di perkotaan

2.3.2.20. Kearsipan

1. Belum memadainya pelestariaan arsip dan pustaka yang bernilai guna statis

2.3.2.21. Statistik

1. Belum optimalnya ketersediaan data SIPD
2. Belum optimalnya ketersediaan dokumen analisis kinerja pembangunan daerah yang berkualitas

2.3.2.22. Pertanahan

1. Belum optimalnya ketersediaan data SIPD
2. Belum optimalnya ketersediaan dokumen analisis kinerja pembangunan daerah yang berkualitas

2.3.2.23. Persandian

1. Belum optimalnya sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah
2. Belum optimalnya pelaksanaan standar operasional prosedur persandian

2.3.2.24. Perpustakaan

1. Kualitas sarana dan prasarana perpusatakaan daerah yang sangat tidak memadai
2. Keterbatasan masyarakat dalam mengakses perpustakaan

2.3.2.25. Pertanian

1. Masih rendahnya kualitas kelembagan petani
2. Rendahnya spesialisasi dan peningkatan kualitas produk-produk pertanian yang dapat meningkatkan NTP
3. Masih rendahnya kualitas kelembagan petani
4. Rendahnya spesialisasi dan peningkatan kualitas produk-produk pertanian yang dapat meningkatkan NTP
5. Belum optimalnya produksi pangan lokal
6. Rendahnya kualitas produk pangan lokal
7. Belum memadainya kawasan pertanian pangan yang berkelanjutan
8. Masih kurangnya ketersediaan dan kualitas penyuluh
9. Belum terbangunnya sistem agribisnis yang kuat
10. Belum memadainya kompetensi penyuluh lapangan pertanian
11. Masih belum optimalnya ekstensifikasi dan intensifikasi lahan
12. Belum optimalnya penerapan metode pertanian modern
13. Masih terbatasnya teknologi tepat guna pertanian
14. Rendahnya kualitas/standarisasi produk pertanian/perkebunan
15. Rendahnya produktifitas tanaman perkebunan
16. Keterbatasan infrastruktur jaringan irigasi tersier di kawasan pertanian
17. Panjangnya rantai distribusi produk pertanian/perkebunan

18. Rendahnya promosi produk-produk unggulan pertanian/perkebunan
19. Rendahnya kontinuitas produksi pertanian/perkebunan
20. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dan pengawasan hewan ternak
21. Skala usaha peternakan masih kecil
22. Kapasitas peternak dalam memenuhi kebutuhan lokal sangat rendah
23. Rendahnya sertifikasi produk hasil ternak

2.3.2.26. Kelautan dan Perikanan

1. Belum memadainya kelembagaan kelompok nelayan
2. Rendahnya kualitas SDM dan jumlah penyuluh perikanan tangkap
3. Masih terbatasnya teknologi perikanan tangkap
4. Masih rendahnya kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pendukung produksi perikanan
5. Belum memadainya kelembagaan kelompok pembudidaya ikan tawar
6. Rendahnya kualitas SDM dan jumlah penyuluh perikanan tangkap
7. Belum optimalnya penyediaan benih/bibit unggul dan pusat pembibitan ikan
8. Keterbatasan sarana dan prasarana produksi budidaya ikan air tawar
9. Meningkatnya pemukiman masyarakat di daerah tangkapan sumber air baku

2.3.2.27. Kehutanan

1. Koordinasi pengelolaan lingkungan hdup provinsi dan Kabupaten/kota perlu ditingkatkan
2. Belum optimalnya pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), seperti buah merah, sagu
3. Pemberdayaan masyarakat adat sekitar hutan
4. Pemberdayaan masyarakat adat sekitar hutan
5. Kurangnya pengawasan terhadap kawasan hutan
6. Investasi pada bidang kehutanan masih berorientasi pada pemanfaatan hasil hutan kayu

7. Tingginya pembukaan lahan karena pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah
8. Tingginya pola pembukaan lahan berpindah
9. Belum disahkannya regulasi khusus pengelolaan hutan adat di Provinsi Papua
10. Belum optimalnya perlindungan tumbuhan dan satwa liar spesifik Papua

2.3.2.28. Pariwisata

1. Pengembangan ekoturisme dan wisata budaya yang bernilai tambah tinggi untuk mendukung pengembangan kemandirian ekonomi dengan dampak lingkungan dan budaya serendah mungkin
2. Belum optimalnya kelembagaan kelompok pengelola wisata
3. Belum adanya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)
4. Rendahnya kualitas infrastrukur pendukung pariwisata
5. Rendahnya kualitas fasilitas sarana dan prasarana pendukung pariwisata
6. Keterbatasan kualitas penyelenggaraan event-event pariwisata
7. Masih kurangnya pengembangan daerah obyek tujuan wisata (DOTW) potensial dan DOTW yang sudah ada
8. Belum optimalnya pengembangan kampung wisata
9. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak pengembangan pariwisata
10. Terbatasnya promosi pengembangan pariwisata Provinsi Papua di event-event nasional dan internasional yang disertai analisa pasar yang baik
11. Kurangnya partisipasi dalam event-event pariwisata nasional maupun internasional

2.3.2.29. Perdagangan

1. Panjangnya rantai distribusi pangan ke berbagai wilayah
2. Besarnya ongkos angkut distribusi pangan
3. Rendahnya kualitas infrastruktur pendukung distribusi pangan
4. Rantai pemasaran pangan yang masih panjang

5. Kurangnya kontinuitas ketersediaan barang karena persoalan akses dari hulu ke hilir
6. Rendahnya ketersediaan bahan baku produksi
7. Rendahnya daya beli keluarga OAP

2.3.2.30. Perindustrian

1. Belum adanya konsep kluster industri hasil hutan
2. Rendahnya kualitas kelembagaan pelaku industri
3. Belum adanya rencana induk pembangunan industri daerah, yang akan melahirkan pembangunan kluster industri per wilayah adat

2.3.2.31. Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Belum efektifnya proses perizinan pertambangan (IUP)
2. Belum optimalnya pengawasan pertambangan emas tanpa izin (PETI)
3. Kuantitas dan kualitas penelitian dan survey pelayanan geologi masih sangat kurang
4. Rendahnya kompetensi tenaga kerja lokal di sektor pertambangan
5. Rendahnya daya serap sektor pertambangan dalam menyerap produk-produk pertanian lokal
6. Masih rendahnya ekspor barang nonmigas
7. Minimnya ketersediaan energi listrik untuk kegiatan industri
8. Rendahnya pemanfaatan energi listrik baru terbarukan

2.3.2.32. Administrasi Pemerintahan

1. Belum maksimalnya Perdasi tentang pemerintahan yang ditetapkan
2. Belum optimalnya SDM kampung dan distrik
3. Masih rendahnya LPPD kabupaten/kota yang berpredikat Sangat Tinggi
4. Belum optimalnya Penataan Peraturan Perundang-undangan
5. Belum optimalnya warga miskin yang memperoleh pendampingan terkait kasus hukum
6. Belum optomalnya Produk Hukum Kabupaten/Kota se Papua yang difasilitasi
7. Rendahnya produk hukum daerah yang didesiminasi

8. Belum optimalnya OPD yang memiliki data uraian jabatan
9. Masih rendahnya OPD yang memiliki SOP yang berkaitan dengan kinerja utama
10. Belum optimalnya OPD Provinsi Papua yang sudah dilakukan analisis dan/atau evaluasi jabatan
11. Belum optimalnya Rekomendasi dari Analisa Beban Kerja yang ditindaklanjuti
12. Belum optimalnya kinerja BUMD
13. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan keprotokolan Pemprov Papua
14. Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui ULP
15. Belum memadainya sarana dan prasarana Pos Lintas Bantas yang memenuhi standar
16. Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan
17. Minimnya sarana dan prasarana ekonomi di daerah perbatasan
18. Belum optimalnya implementasi kerja sama antar negara di kawasan perbatasan

2.3.2.33. Penelitian dan Pengembangan

1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan
2. Belum memadainya SDM kelitbangan

2.3.2.34. Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Belum optimalnya capaian realisasi program-program Otsus
2. Belum optimalnya Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
3. Belum optimalnya konsistensi Program RKPD kedalam APBD
4. Masih rendahnya LPPD kabupaten/kota yang berpredikat Sangat Tinggi
5. Belum optimalnya dokumen perencanaan yang menampung aspirasi masyarakat
6. Belum optimalnya asistensi Musrenbang Kabupaten
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua
8. Penyusunan LKPJ tidak tepat Waktu
9. Belum optimalnya Evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota se Papua
10. Belum optimalnya Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota se Papua

11. Belum optimalnya ketersediaan analisis data informasi pembangunan daerah
12. Belum optimalnya rekomendasi hasil kajian yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan kebijakan ekonomi
13. Rendahnya capaian indikator sasaran pembangunan bidang ekonomi
14. Rendahnya capaian indikator sasaran pembangunan bidang sosbud
15. Rendahnya capaian indikator sasaran pembangunan bidang fispra
16. Belum optimalnya kerjasama pembangunan
17. Masih perlunya peningkatan efektivitas sistem perencanaan pembangunan berbasis elektronik
18. Belum optimalnya kesesuaian antara RTRW Provinsi dan RTRW Kab/Kota
19. Kurang dimanfaatkannya hasil perencanaan percepatan pembangunan kawasan perbatasan

2.3.2.35. Keuangan Daerah

1. Belum optimalnya penerapan Sistem Informasi Data Pengelolaan Keuangan
2. Belum optimalnya implementasi regulasi pengelolaan dana Otsus
3. Penyusunan APBD dan Perubahan APBD tidak tepat waktu
4. Belum optimalnya Implementasi Analisis Standar Belanja Daerah
5. Belum optimalnya aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan retribusi
6. Penyampaian LKPD tidak Tepat Waktu
7. Tertib Administrasi BMD
8. Penyusunan APBD kabupaten/kota yang tidak tepat waktu
9. Belum optimalnya evaluasi laporan pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota Kabupaten/Kota Se Papua
10. Belum optimalnya Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah
11. Belum Efektifinya pendapatan asli daerah
12. Belum optimalnya Kontribusi UPTB dalam pungutan Pendapatan Asli Daerah

2.3.2.36. Pengawasan

1. Belum optimalnya tenaga pemeriksa yang tersertifikasi
2. Belum optimalnya tindaklanjut hasil pemeriksaaan
3. Belum optimalnya tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemerikasaan
4. Persentase OPD dengan nilai SAKIP B yang masih rendah
5. Belum optimalnya Implementasi SPIP pada perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Papua
6. Belum optimalnya penetapan perdasi dan perdasus berdasarkan prolegda
7. Belum optimalnya Pembahasan APBD Tepat Waktu
8. Belum tuntasnya pengawalan revisi undang-undang otonomi khusus Papua

2.3.2.37. Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

1. Masih rendahnya kapasitas SDM dalam melakukan promosi potensi daerah
2. Belum optimalnya ASN peserta diklat teknis fungsional
3. Belum optimalnya ASN peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan
4. Belum optimalnya penyelesaian administrasi kepegawaian
5. Belum optimalnya Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda
6. Masih rendahnya ASN yang mengikuti bimtek sesuai tupoksinya

2.3.2.38. Pendidikan dan Pelatihan

1. Belum memadainya akses OAP dalam pendidikan dan pelatihan
2. Belum optimalnya Diklat yang terakreditasi

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bagian ini sebagaimana arahan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diuraikan dua point utama yakni Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Namun demikian, analisis perlu diperluas dalam lingkup pembangunan ekonomi, mengingat tujuan hakiki pembangunan ekonomi yakni kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditujukan oleh indikator makroekonomi, namun juga tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, sehingga arah kebijakan ekonomi menjadi arah kebijakan pembangunan ekonomi.

Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk Tahun 2020 tidak akan terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2018, proyeksi Tahun 2019 dan 2020. Dengan demikian pembahasan pada bagian ini diawali dengan Kondisi Pembangunan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2017/2018, selanjutnya tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2019 dan 2020. Bagian akhir sub bab adalah poin-poin arah kebijakan pembangunan ekonomi dan keuangan daerah pada tahun 2020.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua 2018-2023, kebijakan ekonomi daerah diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan investasi melalui pengembangan ekonomi lokal yang unggul berbasis kewilayahan, berkeadilan dan berkelanjutan. Sebagaimana yang termuat dalam Misi ke-4 RPJMD Provinsi Papua 2018-2023 yaitu Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural Secara Berkelanjutan.

Selain diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Papua 2018-2023, arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2020 perlu diselaraskan juga dengan arah kebijakan ekonomi nasional yang termuat dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2020. Oleh karena RKP 2020 merupakan RKP transisi dan unik, maka penentuan struktur prioritas dan arah kebijakan masih menggunakan RKP sebelumnya yaitu RKP 2019,

tidak merujuk kepada RPJMN 2020-2024 yang memang belum ada. Dan sesuai dengan RKP 2019 sebelumnya, maka arah kebijakan ekonomi nasional adalah :

1. Mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tahun politik, dengan arahnya : (1) meningkatkan daya saing ekspor; (2) melanjutkan momentum peningkatan investasi; (3) memperkuat konsumsi masyarakat; (4) meningkatkan nilai tambah sektor.
2. Menjaga stabilitas makroekonomi ditengah tekanan eksternal, dengan arahnya : (1) menjaga stabilitas nilai tukar ditengah tekanan normalisasi kebijakan moneter negara maju; (2) menjaga defisit transaksi berjalan pada tingkat yang aman; (3) mempertahankan suistainabilitas fiskal; (4) menjaga inflasi pada tingkat yang stabil; (5) memperkuat resiliensi sistem keuangan.
3. Mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan arahnya : (1) meningkatkan produktifitas melalui reformasi struktural; (2) mendorong pemerataan dan penurunan tingkat kemiskinan; (3) mempertahankan keseimbangan lingkungan (4) mengantisipasi tantangan disrupsi ekonomi di masa depan.

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Papua 2018-2023, pembangunan ekonomi Provinsi Papua tahun 2020 akan diarahkan pada 3 (tiga) orientasi pembangunan yaitu : (1) Orientasi Pembangunan Manusia; (2) Orientasi Pertumbuhan dan Potensi Unggulan; dan (3) Orientasi Pemerataan, Keadilan dan Kewilayahan. Ketiganya ini menjadi rujukan rumusan *grand strategy* pembangunan ekonomi 2020 yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Strategi pembangunan ekonomi berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (*fullfilmen of basic needs*). Strategi ini bertujuan pada perbaikan kualitas hidup, peningkatan produksi dan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja baru, upah layak sehingga tercapai tingkat hidup minimal untuk seluruh masyarakat.
2. Strategi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang bertumpu pada masyarakat (*people centered development*). Menurut Asian Development Bank, pertumbuhan inklusif ialah pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan yang akan menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi, serta

memastikan akses yang lebih luas kepada semua lapisan masyarakat. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan inklusif.

3. Srategi pembangunan ekonomi kewilayahan kontekstual (*contextual regional economic development*). Makna kontekstual ini dapat diartikan sebagai makna yang muncul berdasarkan konteksnya. Papua adalah salah satu daerah di Indonesia yang sangat unik, karena terdiri atas ratusan suku bangsa dan bahasa, dengan zona ekologi kewilayahannya yang berbeda satu sama lainnya. Sehingga membangun Papua tidak dapat dilakukan secara simetris atau disamaratakan untuk semua wilayah. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi kewilayahan di Papua yang kontekstual merupakan pembangunan yang memperhatikan : (1) *Zona Ekologi* yang meliputi ekologi dan sistem mata pencaharian, etika kerja, dan lingkungan lokal; (2) *Kearifan Lokal* yang mencakup sistem penguasaan tanah, agama dan sistem kepercayaan; dan (3) *Sosio Budaya* yang meliputi struktur sosial, nilai-nilai budaya dan sistem politik.

Guna menyusun rumusan kebijakan pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk mewujudkan keberhasilan dari misi RPJMD Provinsi Papua 2018-2023, maka perlu dilihat terlebih dahulu gambaran umum tentang perkembangan perekonomian Papua tahun 2017/2018 serta proyeksinya untuk tahun 2019 dan 2020.

3.1.1. Perkembangan Ekonomi Provinsi Papua

3.1.1.1. Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi

Jika dirinci berdasarkan sektoral, hampir semua sektor pertumbuhannya terlihat tidak stabil yang cenderung menurun selama periode 2013-2018. Sektor transportasi & pergudangan dan kontruksi terlihat memiliki rata-rata dengan pertumbuhan tertinggi masing-masing sebesar 8.43% dan 8.36% per tahun untuk periode tersebut, disusul kemudian oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Real Estate; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan

dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dengan kisaran pertumbuhannya antara 7,39% sampai dengan 8,29% per tahun. Adapun sektor yang terlihat paling rendah pertumbuhannya adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan hanya mencapai 4,33% per tahun. Selengkapnya lihat Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Di Provinsi Papua Periode 2013 – 2018 (dalam %)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata²
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.04	5.64	5.26	1.75	3.98	3.29	4.33
B. Pertambangan dan Penggalian	9.00	-2.81	6.72	13.10	3.90	10.52	6.74
C. Industri Pengolahan	2.13	8.72	3.77	4.47	6.46	5.65	5.20
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7.45	8.41	0.63	11.86	4.11	6.89	6.56
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.53	6.25	3.99	3.37	6.38	5.72	5.37
F. Konstruksi	11.79	8.56	10.70	8.81	5.18	5.12	8.36
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.36	7.30	8.13	6.91	6.24	6.39	7.39
H. Transportasi dan Pergudangan	8.15	10.57	9.59	8.13	5.98	8.16	8.43
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11.67	12.57	7.52	6.54	6.04	5.41	8.29
J. Informasi dan Komunikasi	12.79	6.63	5.19	3.42	6.99	3.52	6.42
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	13.89	7.26	2.63	6.08	2.61	5.35	6.30
L. Real Estate	11.67	8.09	5.86	7.02	5.60	6.57	7.47
M,N. Jasa Perusahaan	5.88	9.65	3.97	5.68	5.77	6.70	6.28
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.80	14.85	10.89	9.64	4.36	3.90	7.74
P. Jasa Pendidikan	9.75	7.45	7.23	7.83	5.55	4.18	7.00
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.29	9.36	8.36	8.08	5.20	5.73	7.67
R,S,T,U. Jasa lainnya	10.42	8.55	7.04	6.43	5.62	7.34	7.57
PDRB Papua	8.55	3.65	7.35	9.14	4.64	7.33	6.78

Sumber : BPS Provinsi Papua (2019)

Peranan sektor pertambangan dan penggalian terhadap fluktuasi pertumbuhan ekonomi Papua masih sangat dominan setiap

tahunnya selama periode 2013-2018. Walaupun sempat berkontribusi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Papua yaitu di tahun 2014, namun setelah itu kontribusinya terus positip sehingga secara keseluruhan sepanjang tahun 2013-2017 andil sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua mencapai 2,84% per tahun. Setelah sektor pertambangan, sektor kontruksi, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor semuanya cukup berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi Papua. Sementara sektor-sektor utilitas seperti Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, serta Pengadaan Listrik dan Gas kurang signifikan untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Papua oleh karena kontribusinya yang paling kecil diantara semua sektor, tidak lebih dari 0,01% per tahun. Lihat Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Kontribusi Sektoral Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Periode 2013 – 2018 (dalam %)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata²
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.72	0.66	0.63	0.20	0.43	0.36	0.50
B. Pertambangan dan Penggalian	3.90	-1.22	2.74	5.32	1.64	4.39	2.80
C. Industri Pengolahan	0.04	0.17	0.08	0.09	0.12	0.11	0.10
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.002	0.003	0.000	0.004	0.001	0.002	0.002
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003
F. Konstruksi	1.15	0.86	1.13	0.96	0.56	0.56	0.87
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.72	0.56	0.65	0.56	0.49	0.51	0.58
H. Transportasi dan Pergudangan	0.32	0.41	0.40	0.34	0.25	0.35	0.34
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.07	0.08	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05
J. Informasi dan Komunikasi	0.45	0.24	0.19	0.13	0.24	0.13	0.23
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0.20	0.11	0.04	0.09	0.04	0.07	0.09
L. Real Estate	0.26	0.19	0.14	0.17	0.13	0.16	0.17

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata²
M,N. Jasa Perusahaan	0.07	0.11	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.22	1.11	0.90	0.82	0.37	0.33	0.63
P. Jasa Pendidikan	0.19	0.15	0.15	0.16	0.11	0.09	0.14
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.13	0.13	0.13	0.12	0.08	0.09	0.11
R,S,T,U. Jasa lainnya	0.10	0.09	0.07	0.07	0.06	0.08	0.08
PDRB Papua	8.55	3.65	7.35	9.14	4.64	7.33	6.78

Sumber : BPS Provinsi Papua (2019)

Struktur perekonomian Provinsi Papua bila dinilai dengan memasukkan sektor pertambangan terlihat masih bersifat *resourced based* yang sangat bertumpu pada dua sektor sumber daya alam yaitu sektor pertambangan dan pertanian. Peranan sektor pertambangan sangat dominan dengan rata-rata pertahun mencapai 41,98% namun dengan kecenderungan yang terus menurun. Begitu juga dengan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menempati urutan kedua kontribusinya, sekitar 11,21% per tahun, cenderung mengalami penurunan setiap tahun, termasuk sektor kontruksi. Sementara untuk sektor yang lain terlihat stabil sepanjang tahun 2013-2018. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.3 Struktur Ekonomi Provinsi Papua Periode 2013 – 2018 (dalam %)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata²
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.66	11.89	11.66	10.87	10.80	10.39	11.21
B. Pertambangan dan Penggalian	43.56	40.84	40.60	42.08	41.78	43.02	41.98
C. Industri Pengolahan	1.96	2.06	1.99	1.91	1.94	1.91	1.96
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05
F. Konstruksi	10.07	10.54	10.87	10.84	10.90	10.67	10.65
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.71	7.98	8.04	7.88	8.00	7.93	7.92
H. Transportasi dan Pergudangan	3.88	4.14	4.23	4.19	4.24	4.27	4.16
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.63	0.68	0.68	0.66	0.67	0.66	0.66

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata²
J. Informasi dan Komunikasi	3.65	3.75	3.68	3.48	3.56	3.43	3.59
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.47	1.53	1.46	1.42	1.39	1.37	1.44
L. Real Estate	2.32	2.42	2.39	2.34	2.36	2.35	2.36
M,N. Jasa Perusahaan	1.11	1.18	1.14	1.10	1.11	1.11	1.12
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.47	8.27	8.55	8.59	8.56	8.29	8.29
P. Jasa Pendidikan	2.00	2.07	2.07	2.04	2.06	2.00	2.04
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.42	1.50	1.52	1.50	1.51	1.49	1.49
R,S,T,U. Jasa lainnya	1.00	1.05	1.05	1.02	1.03	1.03	1.03
PDRB Papua	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Provinsi Papua (2019)

Berdasarkan komponen pengeluaran, laju pertumbuhan ekonomi terlihat sangat variatif dengan capaian tertinggi pada komponen ekspor luar negeri rata-rata pertahun 10,95% selama periode 2013-2018, kemudian disusul oleh investasi (Pertambahan Modal tetap Bruto + Inventory) sebesar 8,78% per tahun untuk periode yang sama. Laju pertumbuhan negatif rata-rata terbesar terlihat dialami oleh komponen Net Ekspor Antar Daerah yaitu-220,79% per tahun, yang mengindikasikan semakin tingginya ketergantungan Papua terhadap luar daerah.

Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2018 (dalam %)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata²
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6.23	7.10	6.11	5.84	5.43	5.74	6.07
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7.25	12.29	5.89	6.52	9.95	5.58	7.91
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8.73	8.62	5.14	2.08	4.20	0.10	4.81
Investasi	6.90	41.04	-18.44	6.54	5.06	11.61	8.78
Ekspor Luar Negeri	32.38	-46.83	38.88	6.74	-5.49	40.00	10.95
Impor Luar Negeri	-41.20	105.27	-20.50	4.64	-36.03	8.43	3.44
Net Ekspor Antar Daerah	-240.41	-151.90	-118.46	-414.00	-47.85	-352.12	-220.79
PDRB Papua	8.55	3.65	7.35	9.14	4.64	7.33	6.78

Sumber : BPS Provinsi Papua (2019)

Dari sisi pengeluaran, faktor stimulus perekonomian Provinsi Papua sampai saat ini masih didominasi oleh pengeluaran rumahtangga. Kontribusi pengeluaran rumahtangga dalam menstimulasi PDRB Provinsi Papua sangat besar dan cukup fluktuatif dengan kisaran rata-ratanya per tahun mencapai 40,44% sepanjang periode 2013-2018. Lihat Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.5 Struktur Ekonomi Provinsi Papua Menurut Pengeluaran Tahun 2013-2018 (dalam %)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata²
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	40.27	41.61	41.13	39.88	40.18	39.59	40.44
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.52	1.64	1.62	1.58	1.66	1.64	1.61
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	18.86	19.76	19.35	18.10	18.03	16.81	18.49
Pembentukan Modal Tetap Bruto	26.28	27.32	27.26	26.60	26.79	26.74	26.83
Perubahan Inventori	0.19	8.69	0.10	0.12	0.03	1.15	1.71
Ekspor Luar Negeri	27.44	14.08	18.22	17.82	16.09	20.99	19.11
Impor Luar Negeri	4.65	9.22	6.83	6.55	4.00	4.04	5.88
Net Ekspor Antar Daerah	-9.90	4.96	-0.85	2.45	1.22	-2.87	-0.83
PDRB Papua	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Provinsi Papua (2019)

Selanjutnya yang juga dominan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Provinsi Papua adalah komponen investasi, yang cenderung stagnan pada rata-rata 26,83% per tahun. Adapun untuk pengeluaran konsumsi pemerintah, terindikasi kontribusinya hanya mencapai 18,49% per tahun, relatif di bawah komponen ekspor luar negeri yang bisa mencapai 19,11% per tahun.

Peningkatan investasi diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Papua dan menurunkan angka pengganggguran di Provinsi Papua. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang dharapkan, diperlukan adanya perkiraan kebutuhan investasi untuk mencapai sasaran pertumbuhan output tersebut yang dilazim diukur

dengan ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*). Namun perlu disadari bahwa besar kecilnya ICOR tersebut, sangat dipengaruhi juga oleh teknologi yang digunakan, efisiensi dalam penggunaan faktor produksi, pengelolaan sumber daya alam, persebaran penduduk, kemampuan menajerial, laju dan komposisi investasi dan prasarana sosial ekonomi yang tersedia.

Dalam perkembangannya, pertumbuhan investasi di provinsi Papua tahun 2013-2018 terlihat mengalami fluktuasi. Pertumbuhan investasi tertinggi terjadi di tahun 2014 yaitu 8,78%, dengan ICOR yang sangat tinggi mencapai 7,89 dan COR sebesar 3,60. Ini mengindikasikan bahwa meskipun investasi mengalami pertumbuhan, namun daya saingnya masih rendah, karena berdasarkan angka ICOR terlihat bahwa kebutuhan untuk menaikkan 1 unit output PDRB pada tahun 2014 dibutuhkan 7,89 unit modal jauh diatas angka moderat yang semestinya maksimal 4 unit modal, sehingga jika dilihat secara rata-rata maka dapat dikategorikan Papua masih mengalami ekonomi biaya tinggi.

Gambar 3.1 Pertumbuhan Investasi, COR Dan ICOR Provinsi Papua Tahun 2013-2018

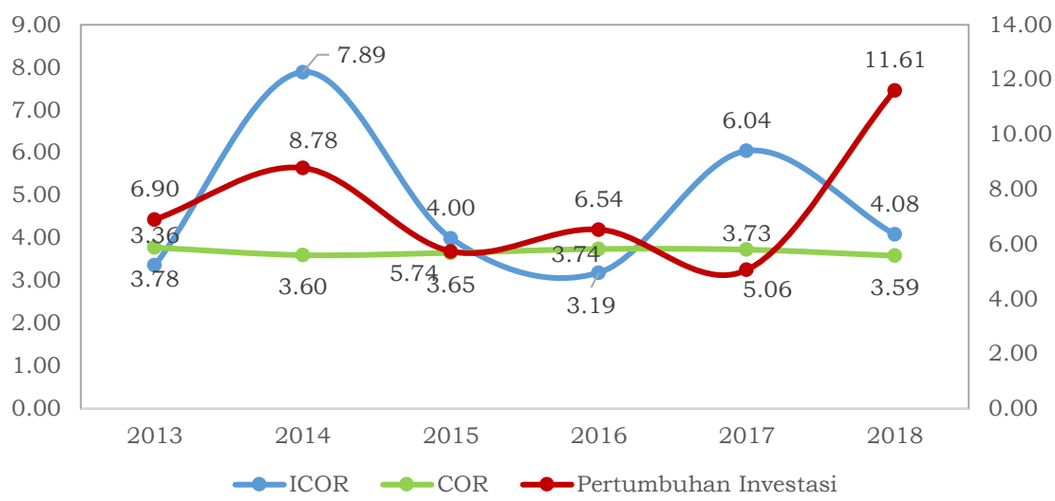

Sumber : BPS Provinsi Papua (2019)

Perlunya memperbaiki daya saing investasi merupakan hal yang mendesak karena selama ini rangking daya saing Papua dalam penilaian *Asia Competitiveness Institute Lee Kuan Yew School of Public Policy* selalu berada dibawah pada urutan ke 31 (2014), 33 (2015), 33 (2016) dan 32 (2017), dengan *score overall competittivenes* rata-rata negatif 1,706 di tahun 2017 (lihat Tabel 3.7) yang diukur dengan 100

indikator terkelompok dalam 4 komponen besar lingkungan investasi yaitu (1) stabilitas makroekonomi; (2) kebijakan institusional dan pemerintah; (3) kondisi keuangan bisnis dan tenaga kerja; dan (4) pembangunan infrastruktur dan kualitas hidup.

Tabel 3.6 Indonesia Provincial Competitiveness Ranking & Score Overall Competitiveness

Rank				Province	Score
2014	2015	2016	2017		2017
1	1	1	1	DKI Jakarta	3.459
2	2	2	2	East Java	1.723
3	3	5	3	East Kalimantan (inc. North Kalimantan)	1.303
4	5	3	4	Central Java	1.035
5	4	4	5	West Java	0.946
12	9	11	6	Banten	0.741
14	12	7	7	Bali	0.687
7	10	6	8	South Sulawesi	0.557
6	6	10	9	DI Yogyakarta	0.423
11	7	12	10	Riau Islands	0.399
8	8	8	11	South Kalimantan	0.318
21	20	14	12	Central Sulawesi	0.270
15	13	13	13	Central Kalimantan	0.090
24	25	18	14	Lampung	0.061
17	22	23	15	West Sumatra	-0.018
9	16	15	16	Riau	-0.093
10	11	9	17	North Sulawesi	-0.270
14	27	28	18	Jambi	-0.296
28	27	21	19	Gorontalo	-0.298
19	15	24	20	North Sumatra	-0.304
18	19	17	21	West Kalimantan	-0.308
20	30	20	22	Bangka Belitung Islands	-0.403
29	21	16	23	Southeast Sulawesi	-0.412
16	17	22	24	South Sumatra	-0.460
13	24	26	25	Aceh	-0.526
22	26	19	26	West Nusa Tenggara	-0.582
30	23	25	27	Bengkulu	-0.595
25	18	30	28	West Sulawesi	-0.597
23	29	29	29	Maluku	-0.712
32	32	32	30	East Nusa Tenggara	-1.238
33	31	31	31	North Maluku	-1.304
31	33	33	32	Papua	-1.706
26	28	27	33	West Papua	-1.891

Sumber : The World Bank Group & ACI Lee Kuan Yew School of Public Policy (2017)

Daya saing daerah selain dari investasi dapat diamati juga pada perkembangan ekspor wilayah. Perkembangan nilai ekspor luar negeri Provinsi Papua mengalami surplus, atau selalu lebih besar dari pada impor, namun dengan perkembangan yang berkontraksi sepanjang tahun 2011-2016. Tahun 2011 dan Tahun 2013, terlihat ekspor Papua mencapai angka tertinggi yaitu masing-masing sebesar Rp 33,91 Triliun dan Rp 32,14 triliun. Kondisi ini tidak berlangsung lama, karena mengalami penurunan di tahun 2014 atau terendah sepanjang tahun 2011-2016. namun kemudian terlihat meningkat lagi di tahun-tahun berikutnya. Impor Luar Negeri Provinsi Papua tertinggi terlihat di Tahun 2014 yaitu sebesar Rp 11,19 triliun dan terendah di tahun 2013 yaitu sebesar Rp 5,45 triliun. Kondisi ini juga yang menyebabkan neraca perdagangan atau *Balance of Trade* (BOT) antar negara tahun 2013 menjadi tertinggi jika dibanding tahun tahun lainnya.

Gambar 3.2 Perkembangan Neraca Perdagangan Luar Negeri Provinsi Papua Tahun 2011-2016 (Rp. Triliun)

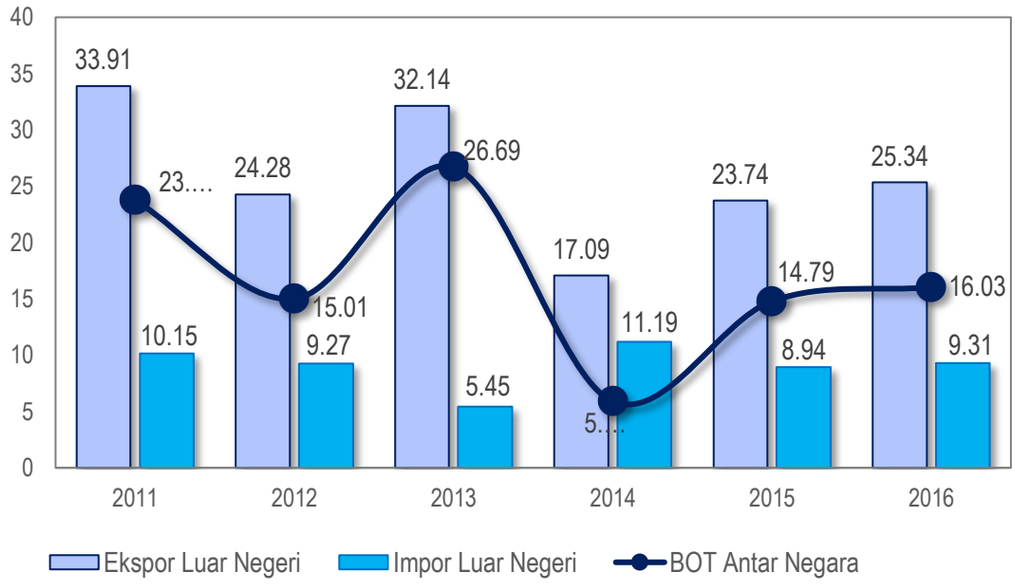

Sumber : BPS Papua, 2016 (data diolah)

Kondisi berbeda jika dibandingkan BOT antar negara dengan BOT antar daerah. Neraca perdagangan antar daerah provinsi Papua terlihat dominan defisit kecuali untuk tahun 2014 dan 2016. Defisit tertinggi terllihat di tahun 2013 yang mencapai Rp 11,59 triliun.

Gambar 3.3 Perbandingan Neraca Perdagangan Luar Negeri Dan Antar Daerah Provinsi Papua Tahun 2011-2016 (Rp. Triliun)

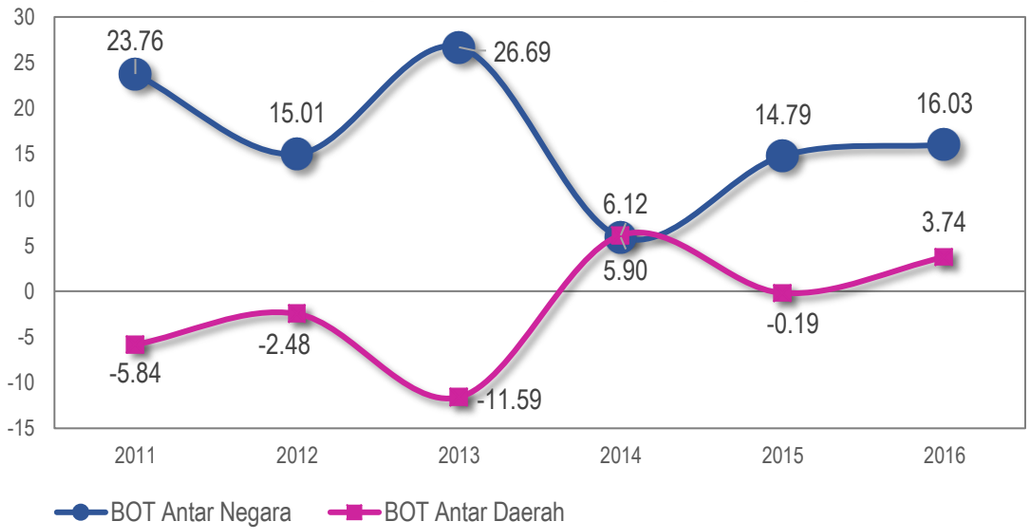

Sumber : BPS Papua, 2016 (data diolah)

JIka disimak pada Tabel 3.8, tujuan ekspor dari Provinsi Papua terbesar ke enam negara yaitu Spanyol, Jepang, Filipina, Korea Selatan, India dan Tiongkok. Negara tujuan ekspor tahun 2013-2015 terbesar terlihat ke India dengan proporsi paling besar di tahun 2014 yang mencapai 38,81% atau mencapai 778,15 juta US$. Tahun 2016,

proporsi ekspor terbesar bergeser ke negara Jepang yaitu 24,46% atau mencapai 489,14 juta US$. Secara keseluruhan total ekspor dari Provinsi Papua, paling tinggi dicapai di tahun 2013 yaitu sebesar 2,728.04 juta US$.

Tabel 3.7 Ekspor Provinsi Papua Menurut Negara Tujuan Tahun 2013 - 2016

Negara Tujuan	Jan-Des 2013		Jan-Des 2014		Jan-Des 2015		Jan-Des 2016	
	juta US$	Share %	juta US$	Share %	juta US$	Share %	juta US$	Share %
Spanyol	295.18	10.82	297.93	19.48	56.57	2.82	54.22	2.71
Jepang	685.97	25.15	270.23	17.67	403.16	20.11	489.14	24.46
Filipina	223.14	8.18	24.51	1.60	183.32	9.14	258.88	12.95
Korea Selatan	263.09	9.64	80.11	5.24	109.23	5.45	178.97	8.95
India	754.42	27.65	338.79	22.15	778.15	38.81	482.93	24.15
Tiongkok	414.05	15.18	359.32	23.49	310.71	15.50	460.43	23.02
Total 6 Negara Utama	2,635.85	96.62	1,370.89	89.62	1,841.12	91.82	1,924.57	96.24
Lainnya	92.19	3.38	158.78	10.38	164.04	8.18	75.20	3.76
Total	2,728.04	100.00	1,529.67	100.00	2,005.16	100.00	1,999.77	100.00

Sumber : BPS Papua, 2016 (data diolah)

3.1.1.2. Perkembangan Inflasi dan Tingkat Kemahalan Di Provinsi Papua

Berdasarkan perkembangan harga barang dan jasa bulanan di kota Jayapura terlihat pergerakan harga dari paket barang dan jasa di Provinsi Papua dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2017 menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Lonjakkan harga barang dan jasa terlihat meningkat dan menurun tajam pada bulan-bulan tertentu. Tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara umun terlihat pada bulan Januari 2014, bulan Desember 2014, bulan Desember 2015, bulan Juni 2016 dan bulan Desember 2016 . Sedangkan tingkat inflasi terendah, terlihat pada bulan bulan April 2014, Agustus 2015 dan bulan juli 2016.

Gambar 3.4 Tingkat Inflasi Bulanan Kota Jayapura dan Indonesia Periode Januari 2013 - Desember 2017

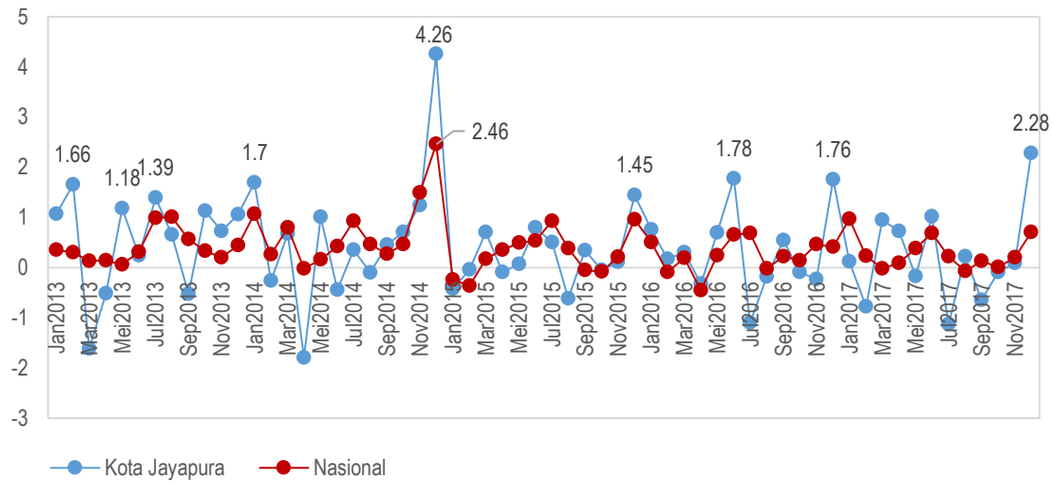

Sumber : BPS Papua, 2017 (data diolah)

Secara kumulatif inflasi di Kota Jayapura, yang merepresentasikan kondisi inflasi Provinsi Papua, selama ini selalu terkendali (dibawah 10%) dengan kecenderungan berada di bawah inflasi nasional, terkecuali di tahun 2018. Tingkat pergerakan harga paket barang dan jasa secara kumulatf selama tahun 2013-2015 terlihat menurun dari 8,27% di tahun 2013 menjadi 2,79% di tahun 2015 dan masih dengan besaran inflasi dibawah 10%. Namun ada kecenderungan meningkat dan tidak stabil yang akan berpengaruh kepada pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan dan dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Gambar 3.5 Tingkat Inflasi Tahunan Kota Jayapura dan Indonesia Tahun 2013 – 2018

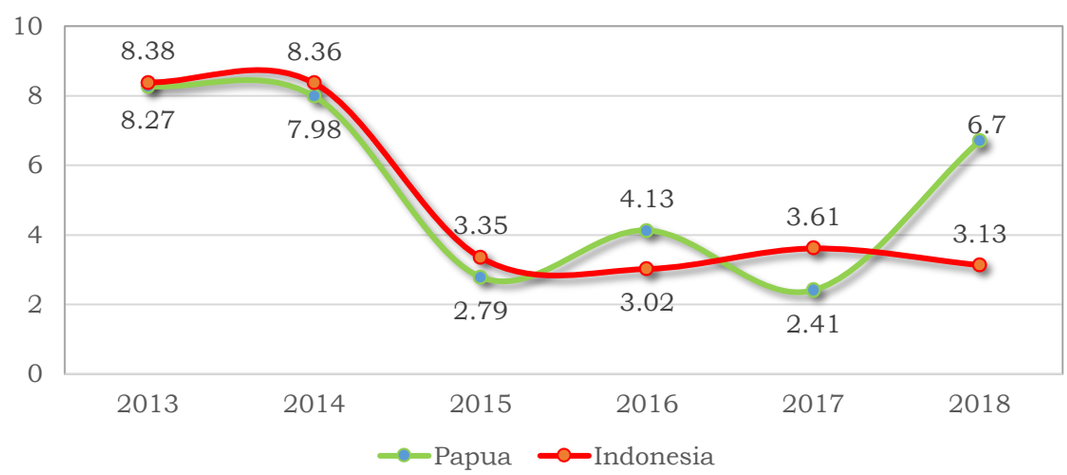

Sumber : BPS RI (2019)

Selain inflasi, perkembangan harga yang juga menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi adalah tingkat kemahalan harga, yang selama ini menggunakan indikator Indeks Kemahalan Kontruksi atau IKK. IKK digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Dengan digunakannya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pembentukan modal tetap sebagai salah satu penimbang IKK, maka IKK suatu kabupaten/kota relatif terhadap kabupaten/kota acuan dapat berubah-ubah tergantung dari realisasi APBD masing-masing kabupaten/kota.

IKK sudah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK adalah *Bill of Quantity* (BoQ) satu proyek yang sudah selesai. Perkembangan teknik sipil sangat cepat ditambah lagi dengan pesatnya industri bahan bangunan. Saat ini material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang berubah atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan, kusen aluminium, dan sebagainya. Peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal-hal tersebut mengakibatkan BoQ 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu mulai tahun 2013 penghitungan IKK sudah menggunakan BoQ terbaru yang dikumpulkan pada tahun 2012. Sedangkan IKK tahun 2016 menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan *up to date* yaitu menggunakan updating BoQ sampai tahun 2015. Berikut ini perkembangan IKK di Provinsi Papua selama tahun 2013-2017.

Sepanjang tahun 2012-2014 cenderung IKK Provinsi Papua mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun tetap dalam posisi teratas di seluruh Indonesia. Adanya perubahan daerah acuan di tahun 2015, yaitu dari Kota Samarinda/Provinsi Kalimantan Timur ke Kota Surabaya/Provinsi Jatim mengakibatkan IKK Provinsi Papua naik hingga menjadi 247,91. Ini berarti kenaikan IKK tersebut bukan terjadi secara struktural, namun lebih kepada teknis. Di tahun 2016 terjadi penurunan IKK dengan angka yang tipis hanya sebesar 7,93 point, sehingga IKK di tahun 2016 menjadi 239,98, yang menandakan

harga-harga bahan kontruksi di Provinsi Papua secara rata-rata lebih tinggi 139,88 persen dibandingkan daerah acuan (Kota Surabaya). Selanjutnya menurun kembali di tahun 2017 menjadi 229,82.

Gambar 3.6 Indeks Kemahalan Kontruksi Di Provinsi Papua Tahun 2010 - 2017

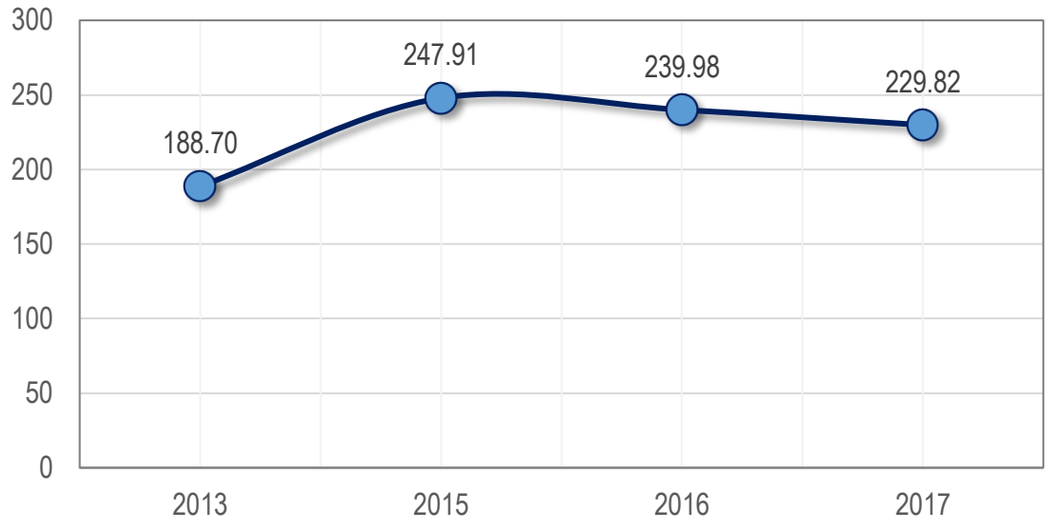

Sumber : BPS Indonesia, 2017 (data diolah)

3.1.2. Tantangan Dan Prospek Perekonomian Wilayah Tahun 2019 dan 2020

3.1.2.1. Eksternalitas Ekonomi

Dari sisi permintaan, perekonomian Papua yang masih dipengaruhi oleh ekspor luar negeri komoditas non migas akan menghadapi tantangan pada tahun 2019 dan 2020 mendatang. Sampai dengan Desember 2018, ekspor Papua didominasi oleh komoditas biji tembaga dengan negara tujuan terbesar yaitu Jepang, dan China, kemudian disusul Korea Selatan dan India. Sedangkan untuk komoditas kayu olahan tujuan ekspor terbesar ke AS, kemudian Arab Saudi dan Korea Selatan. Naik turunnya perekonomian nasional di negara-negara tersebut dipastikan secara simultan akan berpengaruh terhadap pemintaan ekspor dari Provinsi Papua, yang akhirnya secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah.

Kondisi ekonomi global yang masih diselimuti ketidakpastian, berpotensi mempe¬ngaruhi kinerja ekonomi Indonesia demikian juga kinerja ekonomi Papua masih akan menghadapi tekanan eksternal perekonomian global di tahun 2019 dan 2020 mendatang. Tantangan dan tekanan perekonomian global yang perlu diwaspadai terutama

untuk Papua yang mengandalkan ekspor tembaga dan kayu olahan yaitu pertama adanya perang dagang antara China, Jepang dan AS, yang jika terus berlanjut akan berdampak pada penyusutan perdagangan gobal. Hal ini dapat merugikan perekonomian Jepang baik secara langsung dan tidak langsung jika mereka terdampak pada pertumbuhan ekonomi China. Kedua, perlambatan ekonomi RRT, seperti yang disampaikan IMF yang mana telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi China yang menurun dari 6,6% menjadi 6,2% tahun 2019, ketiga, terdapatnya potensi penurunan harga komoditas dan pembatasan impor komoditas di beberapa negara, khususnya terkait dengan kebijak¬an ramah lingkungan tentunya akan sangat berpengaruh terhadap harga komoditas dan ekspor Papua ke negara-negara tujuan ekspor. Melemahnya perekonomian China diperkirakan dapat menular ke negara tetangga, Jepang. Tahun 2019, IMF dalam *World Economic Outlook Update* memperkirakan Jepang akan tumbuh 1,1% tahun 2019 atau naik 0,2 poin persentase dibandingkan proyeksi sebelumnya. Tahun 2020, Pertumbuhan Jepang diproyeksikan moderat menjadi 0,5% (lebih tinggi 0,2 poin persentase dibandingkan WEO Oktober 2018). Menurut IMF, Revisi prediksi pertumbuhan Jepang ini utamanya "menggambarkan dukungan fiskal tambahan terhadap perekonomian tahun 2019, termasuk upaya memitigasi dampak rencana kenaikan pajak konsumsi di Oktober 2019". Sedangkan para ekonom dalam survei Reuters memperkirakan ekonomi Jepang hanya tumbuh 0,8% sepanjang tahun fiskal 2019 yang dimulai April untuk kemudian melambat menjadi 0,6% di tahun 2020. Potensi meruncingnya ketegangan perdagangan Jepang dan AS dalam bidang otomotif (AS) juga masih menjadi risiko besar bagi ekonomi Jepang yang sangat mengandalkan ekspor, penurunan tajam ekspor Jepang ke China khususnya terkait dengan pelemahan permintaan teknologi tinggi atau industri teknologi dan informasi juga dapat mempengaruhi perekonomian Jepang.

Berdasarkan laporan World Economic Outlook (WEO) Januari 2019, IMF memperkirakan PDB ekonomi global akan tumbuh 3,5% pada 2019 dan 3,6% pada 2020. Angka tersebut lebih rendah masing-masing 0,2% dan 0,1% dari WEO Oktober 2018. Pertumbuhan tersebut juga lebih lambat jika dibandingkan dengan estimasi

pertumbuhan ekonomi pada 2018 sebesar 3,7%. Sebelumnya, Bank Dunia juga telah lebih dulu merevisi turun pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2019 menjadi 2,9%, lebih rendah dari proyeksi pada Juni 2018 sebesar 3%. Penurunan pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akibat masih adanya potensi pelemahan aktivitas perdagangan, investasi, serta rencana peningkatan suku bunga khususnya di sejumlah negara berkembang.

India yang dipercaya akan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Berdasarkan laporan Dana Moneter Internasional (IMF) melalui IMF Economic Outlook, pertumbuhan ekonomi India diprediksi mencapai 7,4 persen pada tahun 2018 dan tahun 2019 di prediksi mencapai 7,8%. Namun perekonomian India terlihat juga mengalami perlambatan yang mana Kementerian Statistik India merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi negaranya pada tahun fiskal 31 Maret 2019 ke level terendah, yakni 7 persen, dari perkiraan sebelumnya sebesar 7,2 persen. Walaupun demikian, pertumbuhan ekonomi India masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan China yang sebesar 6,4 persen. Artinya, pertumbuhan ekonomi India masih yang tertinggi. Pendapatan pertanian yang melorot dan lemahnya pertumbuhan pekerjaan berdampak pada permintaan konsumen yang lemah dan pengeluaran pemerintah yang rendah menjadi biang keladi atas lambatnya pertumbuhan ekonomi India.

Berbeda dengan Jepang, China, dan India, Ekonomi Korea Selatan tumbuh mencapai 2,7% sepanjang 2019 jika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya seperti yang dirilis oleh Bank of Korea. Bank of Korea juga menyebutkan bahwa kenaikan produk domestik bruto (PDB) ini sejalan dengan prediksi bank sentral. Namun demikian perekonomian global juga masih merupakan resiko tertinggi yang mempengaruhi perekonomian Korea Selatan. Ekspor Korea Selatan terlihat memgalami penurunan 2,2% yang dipicu oleh penurunan ekspor cip dan produk elektronik.

Berdasarkan perkiraan kondisi ekonomi global pada keempat negara tujuan ekspor terbesar di atas maka cukuplah relevan jika diprediksi akan ada perlambatan ekspor Provinsi Papua di tahun 2019 ini, dan tahun 2020 mendatang, namun bukannya menurun.

Terutama sekali datang dari negara tujuan ekspor Papua yaitu China, Jepang dan India yang diprediksi akan mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2019 dan 2020 sebagaimana yang diestimasi oleh IMF. Dengan demikian, kondisi perekonomian Provinsi Papua di tahun 2019 dan 2020 akan menghadapi tantangan berat, akibat pelambatan ekonomi di negara tujuan ekspor Papua yang mengalami pelambatan maka pengaruh negara tersebut terhadap perekonomian wilayah Papua tidak dapat diabaikan.

Sedangkan untuk pasar negara berkembang (EMDE), pertumbuhan ekonomi diproyeksi melambat menjadi 4,5% pada 2019 dari 4,6% pada 2018. Namun, pada tahun 2020 IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi bisa naik menjadi 4,9%. Pertumbuhan ekonomi EMDE di Asia juga diproyeksikan melambat menjadi 6,3% pada tahun 2019 dari 6,5% pada 2018. pada 2020 akan tumbuh 6,4%. Selain itu, perlambatan ekonomi juga diprediksi terjadi di kawasan Asean-5 yang terdiri dari Indonesia; Malaysia, Philippines, Thailand, Vietnam. Ekonomi kawasan tersebut diprediksi tumbuh 5,1% pada 2019 dari estimasi 2018 sebesar 5,2%, tetapi pada 2020 laju perekonomian bisa kembali ke level 5,2%.

Negara tujuan ekspor Papua berikutnya yang cukup besar yaitu Philippines juga mengalami imbas dari perang dagang. Pertumbuhan ekonomi Philippines merosot dari 6,7 persen pada 2017 menjadi 6,2 persen, terendah dalam tiga tahun terkahir. Pelemahan pertumbuhan ekonomi disebabkan anjloknya konsumsi karena inflasi meningkat. Namun untuk tahun 2019 World Bank memperkirakan, ekonomi Filipina akan tumbuh 6,4% dan 6,5% tahun 2020. Angka ini hanya turun tipis daripada prediksi sebelumnya masing-masing 6,5% dan 6,6%. Prediksi pertumbuhan ekonomi yang meningkat disebabkan konsumsi swasta yang tinggi karena inflasi rendah, pertumbuhan remitansi yang stabil serta pengeluaran pemilu menjadi sumber pertumbuhan tahun 2019. Pada akhirnya, dalam konteks pengaruh global negara Asia, diperkirakan perekonomian Provinsi Papua dapat ikut melambat di tahun 2019 dan tahun 2020,

3.1.2.2. Perekonomian Domestik

Kondisi ekonomi global termasuk perang dagang AS dan China di prediksi akan terus berlanjut sampai dengan tahun 2020. Oleh karena itu antisipasi Indonesia sangat diperlukan karena tidak bisa berharap banyak pergerakan ekonomi dunia, dan harus bersiap untuk mengantisipasi perubahan ekonomi dunia yang mengarah ke krisis keuangan finansial 2020. Indonesia sudah melewati tahun 2018 dengan tidak mudah, yang mana banyak masalah perekonomian mulai dari fluktuasi menurun nilai tukar rupiah, masalah fiscal, menurunnya pendapatan dari ekspor, perang dagang AS dan China yang turut menjadi batu sandungan ekonomi Indonesia. Selain itu, tahun 2019 ini menjadi tahun politik yang sangat menentukan kondisi perekonomian Indonesia lima tahun kedepan. Tahun 2019, penuh ketidakpastian ekonomi dan politik sampai dengan terpilihnya presiden memunculkan ketidakpastian kebijakan ekonomi politik sampai dengan semester ke dua tahun 2019. Perlu penyesuaian kebijakan (time lag) jika ada penggantian pemerintahan yang akan membutuhkan waktu sampai dengan tahun 2020, sedangkan jika tidak ada pergantian pemerintahan tentunya kebijakan ekonomi dan program yang sama akan terus dijalankan, sehingga secara hitungan ekonomis lebih bermanfaat buat pasar dan investor, karena mereka sudah familier dengan pola kebijakan pada pemerintahan sebelumnya, sehingga mereka bisa melakukan hitungan ekonomis yang lebih jelas. Walaupun demikian Indonesia belum bebas dari berbagai permasalahan ekonomi yang kemungkinan besar akan lebih berat di tahun 2019 dan 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi belum akan menunjukkan pergerakan yang signifikan.

Dalam asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, pemerintah dan DPR mematok pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 bisa lebih tinggi dari yang dipatok APBN. Sedangkan ekonom dan lembaga local maupun internasional memprediksi mengenai perekonomian Indonesia 2019 ternyata akan lebih rendah dari yang ditargetkan. Bank Dunia (World Bank) dan Dana Moneter Internasional (IMF) menilai sulit mencapai target pertumbuhan 5,3%. Lembaga

pemeringkat global, seperti Fitch dan S&P memprediksi perekonomian Indonesia tahun depan hanya akan mencapai 5,2%. Bahkan, proyeksi Moody's hanya 4,8%, lebih rendah dari tahun 2018. Hal ini disebabkan karena Indonesia dianggap masih rentan terhadap sentiment eksternal. Konsumsi masih akan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Konsumsi akan membuat pertumbuhan kredit perbankan mencapai 12%. Diprediksi belanja pemerintah dan investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI), berada di peringkat dua dan tiga penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan. Menurut riset BPS, dari segi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yaitu sebesar 9,08%. Kemudian dari sisi produksi, sektor jasa sudah dominan dalam perekonomian yakni hampir mendekati 60%. BPS pun menyajikan perkembangan yang sama di mana dari sisi produksi pertumbuhan tertingginya justru dicapai oleh lapangan usaha jasa yakni sebesar 8,99%.

Permasalahan menahun yang dialami Indonesia sejak orde baru yaitu tingkat produktivitas (ekspor barang yang memiliki nilai tambah) yang sangat rendah dan ketergantungan pada impor bahan bakar minyak sepertinya terus menghantui nilai pergerakan Rupiah, inflasi dan kesehatan keuangan negara. Minimnya pendapatan negara dari sektor pajak, yang disebabkan oleh rendahnya nilai ekspor akan terus menggerus keuangan negara. Sementara itu, untuk meningkatkan produktivitas yang berbasis teknologi terapan dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Kalau dilihat dari kondisi pembangunan sumber daya manusia dari tingkat *competitiveness index* di tahun 2018 menunjukkan Indonesia berada di posisi ke 45 jauh tertinggal dari negara tetangga terdekat seperti Thailand, Malaysia dan Singapura, meskipun dalam kurun sepuluh tahun Indonesia sudah naik 10 digit dari posisi 55 ke 45. Selain harga batu bara dan *Crude Palm Oil* diprediksikan akan jatuh pada tahun 2019-2020, hal ini disebabkan, masing-masing negara membuat pengetatan belanja dan perubahan kebijakan ekonomi terutama negara-negara Eropa untuk mengantisipasi gejolak krisis ekonomi di

tahun 2020. Melihat kondisi ini, Indonesia harus berbenah diri dengan membangun relasi ekonomi bilateral yang lebih kuat, mengingat sejak terpilihnya Trump dan *Brexit* terjadi pola kebijakan ekonomi dunia dari ekonomi terbuka ke ekonomi tertutup. Pemerintah harus bisa memperkuat dan membangun ekonomi regional yang kuat, mengingat perekonomian Indonesia masih sangat ditunjang oleh belanja nasional. Kesetaraan kualitas pembangunan infrastruktur fisik dan manusia di 35 provinsi di Indonesia harus terwujud, atau paling tidak di setiap pulau besar di Indonesia terdapat satu wilayah yang menjadi pusat dagang dan transformasi ekonomi berbasis teknologi terapan.

Tahun 2019 yang merupakan tahun politik menjadi peluang cukup besar untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena, konsumsi khususnya non rumah tangga diprediksi mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan adanya pesta demokrasi. Sisi investasi mengalami sedikit pelemahan karena investor atau pengusaha cenderung menunggu dan mencermati peluang investasi di tahun politik di 2020. Hal itu disebabkan pelaku usaha, khususnya untuk sektor besar masih harus menunggu kepastian dari siapa yang menjadi presiden Indonesia pada 2019. Akan tetapi, melambatnya investasi bisa ditutup dengan kenaikan konsumsi non rumah tangga. Belanja barang seperti kaos, spanduk, stiker dan yang lainnya untuk kebutuhan kampanye meningkat cukup pesat. Hal inilah, yang menjadi dasar bahwa pertumbuhan ekonomi tahun depan tidak akan terlalu terganggu kegiatan politik.

3.1.2.3. Prospek Perekonomian Provinsi Papua Tahun 2020

Dalam konsep ekonomi makro pendapatan regional tersebut merupakan penjumlahan dari konsumsi rumahtangga (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan net ekspor (X-M), atau dalam bentuk persamaan pengeluaran agregate : $Y = C + I + G + X - M$. Persamaan ini menunjukan bahwa jika faktor-faktor stimulus ekonomi (C, I, G, X) meningkat, baik itu secara keseluruhan atau salah satu diantaranya, sedangkan faktor *leakage* ekonomi yaitu impor (M) tidak berubah, maka dipastikan pendapatan regional akan naik yang menciptakan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, jika ingin menaikan pertumbuhan ekonomi wilayah, dapat dilakukan dengan

cara mendorong peningkatan pada variabel-variabel C, I, G dan X, serta dengan menekan M.

Berdasarkan konsep pemikiran diatas, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 dapat ditentukan, menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut.

1). Asumsi-asumi yang mendistorsi pertumbuhan ekonomi

a. Meskipun porsi ekspor Provinsi Papua dalam struktur ekspor luar negeri Indonesia masih sangat kecil, namun jika dilihat dari kontribusinya terhadap perekonomian wilayah sendiri, dapat dikatakan perekonomian Papua sudah sangat terbuka karena kontribusi ekspor luar negeri terhadap pembentukan PDRB rata-rata mencapai 19,11% per tahun yang berada di urutan ketiga setelah investasi dan konsumsi RT. Selama ini ada 3 negara tujuan ekspor yang sangat mendominasi komposisi ekspor luar negeri Provinsi Papua yaitu India, China dan Jepang, dengan kisaran kotribusinya terhadap total ekspor Papua selama periode 2014 - 2016 rata-rata mencapai 23,16% per tahun. Tantangan terberat adalah ekspor ke negara Jepang, terutama dengan semakin menguatnya mata uang Yen terhadap US dolar diperkirakan dapat melemahkan nilai ekspor Papua ke Jepang. Selain itu adanya kemungkinan perang dagang yang berlanjut antara China dengan USA, dipastikan dapat mengganggu aliran ekspor Papua ke China di tahun 2020.

b. Disamping risiko global, permasalahan ketergantungan ekspor Provinsi Papua terhadap satu komoditi yaitu tambang tembaga yang diproduksi oleh PT. Freeport Indonesia juga sangat mengganggu ekspor Papua di tahun 2020 mendatang. Ketergantungan terhadap satu komoditi ini menyebabkan perekonomian Provinsi Papua menjadi penuh ketidakpastian (*uncertainty*).

c. Walaupun eksistensi pasar tunggal MEA dapat memberi pengaruh yang positip, namun dampak negatifnya perlu diperhatikan juga oleh Provinsi Papua. Dengan adanya MEA, arus barang yang masuk dari negara-negara ASEAN tidak dapat dihindari oleh Provinsi Papua di tahun 2020. Kondisi ini dapat berdampak dengan menurunnya surplus perdagangan luar

negeri diakibatkan impor yang akan terus meningkat, ditambah lagi dengan kurs rupiah terhadap dolar AS yang diperkirakan akan naik di tahun 2020 dengan kisaran pada nilai Rp.15.000 per dolar AS (asumsi kurs dolar AS pada RAPBN 2019) menyebabkan *leakage* (kebocoran) dalam neraca perdagangan akan semakin besar.

d. Neraca perdagangan antar daerah yang selalu rendah dibawah Rp. 4 triliun per tahun, bahkan untuk beberapa tahun sebelumnya sempat mengalami defisit, mengindikasikan sangat tergantungnya perekonomian Provinsi Papua terhadap daerah-daerah lainnya di Indonesia, terutama dengan Pulau Jawa dan Sulawesi. Terjadinya perubahan ekonomi nasional, terutama akibat kenaikan harga BBM yang mengikuti harga pasar akan memicu kenaikan harga-harga barang yang diimpor Provinsi Papua dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Dalam hal ini berdasarkan data *time series* selama periode 2011 - 2016, dan menggunakan *trend analysis* maka diproyeksi harga BBM umum di tahun 2020 rata-rata bisa mencapai Rp. 6.600 - Rp. 6.800 per liter. Kenaikan harga BBM tersebut akan berimbas pada naiknya harga-harga barang dari luar daerah yang diperkirakan sebesar 5%, yang dimungkinkan dapat mengurangi pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Papua.

2). Asumsi-asumi yang menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi

a. Kontribusi pengeluaran RT masih mendominasi pembentukan PDRB pengeluaran sampai dengan tahun 2020. Sehingga gejolak ekonomi global yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah dapat diminimalisir melalui peningkatan konsumsi RT yang diperkirakan berdasarkan data proyeksi *time series* (2013 - 2020) dapat tumbuh antara 6,40% - 7,40% dengan kontribusinya sebesar 40,85 persen pada tahun 2020. Walaupun ada distorsi akibat inflasi pada harga BBM namun angka proyeksi sebesar itu tidaklah naif, mengingat ekspetasi konsumen rumahtangga terhadap kondisi perekonomian di Provinsi Papua selama ini cenderung meningkat setiap tahunnya. Seperti yang dirilis oleh BPS Papua bahwa Indeks Tendensi Konsumen (ITK) sepanjang tahun 2017-2018 rata-rata

mencapai 108.24, yang selalu dominan dibentuk oleh optimisme dari konsumen bahwa pendapatan rumah tangga meningkat. Adapun stimulus terbesar berasal dari pengeluaran konsumsi makanan dan minum serta transportasi.

b. Pelaksanaan PON XX di Papua pada tahun 2020 mendatang dipastikan akan membawa berkah ekonomi bagi seluruh masyarakat dan wilayah Papua pada umumnya. Mulai dari konsumsi, perhotelan, restauran, kuliner, transportasi, dan industri kreatif selama berlangsungnya PON akan memberi pendapatan ekonomi kepada masyarakat. Sehingga dapat mendorong variabel-variabel stimulus ekonomi konsumsi rumahtangga dan investasi. Meskipun porsinya paling kecil dalam struktur nilai tambah menurut pengeluaran, namun efek multiplier yang dapat dihasilkan dari pengeluaran pemerintah saat mempersiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan PON XX dipastikan sangat besar terhadap perekonomian daerah. Geliat ekonomi riil menyambut PON XX di tahun 2019 sudah terlihat nyata. Mulai dari banyaknya investasi yang bertambah di sektor akomodasi (Hotel dan tempat penginapan), peningkatan sarana dan prasarana transportasi berbasis *on line* seperti Gojek dan Grab, hingga usaha-usaha kerajinan yang terus mengalami pertumbuhan di tahun 2018 dan berlanjut di tahun 2019. Semuanya ini akan mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi pada tahun 2020 mendatang.

b. Secara sektoral, meskipun kontribusinya terhadap PDRB masih dibawah sektor pertambangan, namun kinerja sektor pertanian selama periode 2013 - 2018 menunjukan arah yang lebih baik dengan rata-rata pertumbuhannya 4,33% per tahun. Selain itu, sektor pertanian yang digerakan oleh 5 sub sektor produktif yaitu tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan semuanya juga memperlihatkan kinerja pencapaian yang baik di tahun 2016 (hasil evaluasi RPJMD 2013-2018 sebelumnya), rata-rata sekitar 97,6% - 101,30%. Untuk itu sangatlah relevan jika semua sub sektor pertanian tersebut ditempatkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi di tahun 2020, yang diperkirakan mampu

meningkatkan nilai tambah sektor pertanian rata-rata 6% pada tahun tersebut. Namun perkiraan pertumbuhan ini dapat dicapai apabila ada injeksi yang proporsional pada faktor-faktor *final demand* (permintaan akhir) dari sektor pertanian, terutama pada PMTB dan pengeluaran pemerintah.

c. Kemudian tidak kalah pentingnya lagi adalah sektor kontruksi dan transportasi, yang terindikasi sangat berperan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua. Dalam perekonomian Papua, selama periode 2013-2018 kedua sektor infrastruktur ini tercatat mempunyai pertumbuhan yang paling tinggi diantara semua sektor, masing-masing sebesar 8,36% untuk sektor kontruksi, dan 8,43% untuk sektor transportasi. Terhubungnya Kota Jayapura dengan Kota Wamena di Jayawijaya saat ini telah berhasil menumbuhkan perekonomian wilayah disekitar daerah-daerah pegunungan dan pesisir sulit akses, seperti Keerom, Yalimo dan Jayawijaya. Dampaknya sudah sangat terasa di tahun 2019, dengan turunnya beberapa harga kebutuhan pokok dan semakin lancarnya arus barang dan jasa diantara dua kota terhubung tersebut. Hal ini diperkirakan semakin bertambah besar dampak ekonominya di tahun 2020 sehingga dapat mendorong faktor-faktor konsumsi, investasi dan ekspor wilayah. Sektor infrastruktur mempunyai pengaruh ganda dalam perekonomian wilayah, yaitu *direct effect* (pengaruh langsung) dan *indirect effect* (pengaruh tidak langsung). Pengaruh langsungnya dapat dilihat dalam menyerap lapangan kerja, mendorong produksi di sektor lainnya yang terkait, meningkatkan pendapatan per kapita, dan sebagainya. Sedangkan pengaruh tidak langsungnya menyebar sangat luas baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti memacu kenaikan investasi, menggerakan produksi di sektor-sektor *tradeable*, menurunkan angka kemiskinan, ketimpangan, inflasi, dan lain-lain. Singkatnya, sektor infrastruktur merupakan faktor *enabler* yang paling utama dan strategis dalam perekonomian wilayah, dan menjadi *first order condition* untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Kondisi ini semakin nyata di tahun 2019 dengan dikeluarkannya

Inpres Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang mengintruksikan kepada seluruh jajaran kementerian, Gubernur Papua dan Papua Barat, serta seluruh bupati/walikota di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengkoordinasikan, menyinergikan penyusunan, menetapkan Rencana Aksi Tahunan, penyusunan dan penajaman program, kegiatan, proyek, lokasi dan (keluaran) Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat sampai dengan Tahun 2019, yang sumber pendanaannya berasal dari belanja kementerian/lembag, belanja non kementerian/lembaga, transfer ke daerah, dan dana desa. Percepatan pembangunan Provinsi Papua menjadi *highligt* Prioritas Nasional melalui pengembangan infrastruktur yang diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah Papua, khususnya wilayah pegunungan dan pesisir pantai.

d. Pengeluaran konsumsi pemerintah juga diharapkan bisa mnjadi stimulus yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020, sejalan dengan percepatan realisasi anggaran dan kemungkinan tidak adanya skenario fiskal pemerintah pusat terkait penundaan pencaisran dana perimbangan. Adanya peningkatan pembangunan dan penyelesaian infrastruktur-infrastruktur strategis di Provinsi Papua diperkirakan akan berdampak positif terhadap kinerja serta kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah. Selain itu pelaksanaan PON XX yang mengeluarkan biaya besar akan memberi efek mulitplier bagi perekonomian wilayah, terutama di daerah-daerah tempat penyelenggaraan PON XX seperti Kota Jayapura, Keerom, Tolikara, dan Mimika. Kondisi ini menyebabkan stimulus fiskal semakin besar dalam perekonomian wilayah yang didorong dengan peningkatan pengeluaran pemerintah.

e. Peningkatan produktifitas tenaga kerja regional yang terjadi selama tahun 2013-2017, yang bahkan lebih baik dari produktifitas nasional, merupakan indikator bahwa tenaga kerja di Provinsi Papua dapat diandalkan sebagai salah satu stimulus pertumbuhan ekonomi wilayah. Terlebih lagi dengan adanya

Bonus Demografi yang akan lebih dirasakan pada tahun 2020 merupakan modal yang potensial untuk meningkatkan produktifitas regional. Dalam hal ini, mengikuti kecenderungan tahun-tahun sebelumnya, maka berdasarkan *trend analysis* produktifitas regional di tahun 2020 diperkirakan akan meningkat menjadi 89.26 juta per tenaga kerja.

f. Faktor stimulus lainnya adalah terkait dengan ekspektasi lingkungan bisnis. Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) diperkirakan masih akan tumbuh positif, sejalan dengan ekspektasi kenaikan pertumbuhan kredit, perbaikan kondisi lingkungan investasi dan perekonomian serta dampak dari relaksasi kebijakan pemerintah melalui implementasi paket-paket kebijakan ekonomi di tahun 2020. Kemudian terkait dengan reformasi fiskal, dan penurunan *moral hazard* juga akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua yang diindikasikan dengan (1) kinerja belanja yang semakin baik, (2) penambahan dana dan dengan insentif yang lebih baik bagi pemerintah daerah, (3) strategi penerimaan jangka menengah yang fokus pada keberlanjutan, (4) reformasi struktural yang diarahkan untuk meningkatkan investasi infrastruktur, perbaikan kondisi bisnis, logistik yang lebih baik, perbaikan pendidikan dan pelatihan vokasi, kebijakan pertanahan/reformasi agraria, kebijakan industrialisasi, hilirisasi industri dan industri parawisata, dan deregulasi peraturan/ perijinan di daerah.

Semua faktor pendukung di atas ini dapat memberi harapan yang optimis bahwa pertumbuhan investasi di tahun 2020 bisa mencapai antara 10,12-12,45%, konsumsi sebesar 8,26-8.65%, pengeluaran pemerintah sebesar 6,13-7.20%, ekspor luar negeri tetap tumbuh namun melambat sebesar 16-17%, impor dan net ekspor dalam negeri tidak banyak mengalami perubahan. Seluruh faktor *aggregate demand* ini pada akhirnya diproyeksikan dapat menghasilkan nilai tambah (PDRB menurut harga konstan) Provinsi Papua di tahun 2020 sekitar Rp. 177.464.719,57 juta sampai dengan Rp. 179.394.523,23 atau naik dalam skala interval 6,43% - 7,58% jika dibandingkan tahun 2019.

Adapun untuk perkiraan indikator ekonomi lainnya, berdasarkan pertimbangan bahwa : (1) pendapatan per kapita meningkat secara proporsional dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi; (2) terdapat peningkatan lapangan kerja; (3) terjadi kenaikan produktifitas di sektor-sektor pertanian, industri, kontruksi, transportasi, dan jasa-jasa lainnya; (4) adanya *highligt* prioritas nasional untuk melaksanakan percepatan pembangunan Papua yang akan berdampak terhadap perbaikan kualitas pendidikan dan derajad kesehatan masyarakat, dan terakhir (5) dengan tetap memperhatikan target RPJPD 2005-2025 serta RKP 2020, maka secara keseluruhan dapat diurai target-target pembangunan ekonomi Provinsi Papua di tahun 2019 selengkapnya sebagai berikut.

Tabel 3.8 Target Pembangunan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Nilai
1. Pertumbuhan PDRB	%	6,43 – 7,58
2. Laju Inflasi	%	2,50 - 4,00
3. PDRB per kapita	juta rp	29,95 – 30,27
4. Gini Rasio	indeks	0,34 - 0,39
5. Rasio penduduk yang Bekerja	%	93 – 96
6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	75,10 - 77,25
7. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,27 - 3.60

Sumber : data diolah (2019)

Dalam rangkaian perencanaan dan penganggaran tahun 2020, secara ekonomi ada empat hal penting yang perlu diantisipasi menghadapi tantangan domestik, nasional dan global. ***Pertama,*** konsumsi rumah tangga harus dijaga bertahan dan terus tumbuh, sebab 40,44% ekonomi Papua digerakkan oleh sektor konsumsi rumah tangga. ***Kedua***, investasi yang menjadi penggerak kedua ekonomi yang menyumbang sebesar 27,17 persen. Melalui investasi diharapkan menambah penciptaan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. ***Ketiga*** adalah netto antara perdagangan keluar dan ke dalam daerah. Ini penting untuk menciptakan surplus perdagangan. Untuk itu pada tahun 2020,

pemerintah provinsi perlu lebih serius berupaya meningkatkan agribisnis pertanian dan perikanan guna memperlambat tekanan dari luar. ***Keempat***, yang berkaitan dengan yang pembahasan Musrenbang yaitu belanja pemerintah daerah. Efektivitas dan efisiensi belanja pemerintah daerah akan terus ditingkatkan, sehingga kontribusi APBD Provinsi Papua tahun 2020 akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan lebih tinggi lagi. Oleh sebab itu, sebagai provinsi yang memiliki SAKIP dengan nilai baik, Setiap aparatur harus mengubah *mind set* dari bermental membagi-bagi dan menghabiskan anggaran menjadi mental memberi manfaat dari hasil kerja yang dilakukan berdasarkan program-program prioritas.

3.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Tahun 2020

Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi sebagaimana yang diproyeksikan di atas, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi di tahun 2020 adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif, melalui kebijakan yang diarahkan pada :
   a. Reformasi prosedur peijinan investasi;
   b. Mengembangkan kualitas dan kuantitas informasi peluang investasi daerah, Membangun sarana dan prasarana investasi, dan
   c. Menyiapkan dokumen pendukung penyusunan regulasi.
2. Tercapainya stabilitas makro ekonomi, melalui kebijakan yang diarahkan pada :
   a. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa;
   b. Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri;
   c. Pengendalian laju inflasi.
3. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK, melalui kebijakan yang diarahkan pada :
   a. Fasilitasi kemudahan formalisasi Badan Usaha Kecil dan Menengah, Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah;
   b. Fasilitasi pengamanan kawasan usaha kecil menengah;
   c. Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis;
   d. Peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;

e. Pengembangan sarana promosi hasil produksi;
f. Pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah;
g. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi, Penyediaan lembaga keuangan mikro di tingkat Distrik/ Kampung.

4. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah, melalui kebijakan yang diarahkan pada :
   a. Pengembangan industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya;
   b. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri;
   c. Kemudahan ijin usaha industri kecil dan menengah;
   d. Pemberian akses perbankan bagi industri kecil dan menengah;
   e. Mendorong kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan pihak swasta;
   f. Menyusun kebijakan keterkaitan industri hulu dan hilir;
   g. Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial, dan Penyediaan sarana prasarana klaster industri.
   h. Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah.
5. Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja, melalui kebijakan yang diarahkan pada :
   a. Penyiapan tenaga kerja siap pakai;
   b. Penyedian peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan.
6. Terselenggaranya Promosi potensi kepariwisataan daerah, melalui kebijakan yang diarahkan pada :
   a. Promosi dan pemasaran obyek pariwisata;
   b. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata;
   c. Promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
   d. Pengembangan obyek pariwisata unggulan;
   e. Pembangunan saran dan prasarana pariwisata, dan pengembangan jenis dan paket wisata.

7. Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat, melalui kebijakan yang diarahkan pada:
   a. Optimalisasi lahan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
   b. Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah;
   c. Mewujudkan kecukupan pangan dan gizi masyarakat;
   d. Meningkatkan produksi pertanian yang berbasis sumber daya lokal, meningkatkan kapasitas kelembagaan petani;
   e. Penyediaan tenaga penyuluh/ pendamping ditingkat masyarakat;
   f. Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
8. Meningkatnya pendapatan masyarakat adat pemilik hak ulayat, melalui kebijakan yang diarahkan pada:
   a. Peningkatan kapasitas masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan;
   b. Pengembangan usaha pemanfaatan kayu masyarakat hukum adat;
   c. Pengembangan industri kayu masyarakat hukum adat, Pengembangan usaha pengolahan hasil hutan bukan kayu;
   d. Pengembangan usaha wisata alam masyarakat adat;
   e. Pemetaan partisipatif masyarakat adat pemilik hak ulayat;
   f. Pengembangan sertifikasi usaha pemanfaatan industri kayu rakyat masyarakat adat dan
   g. Mengembangan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) untuk perbaikan tata kelola kehutanan.
9. Meningkatnya konektivitas antar wilayah, melalui kebijakan yang diarahkan pada :
   a. Perencanaan teknis jalan dan jembatan;
   b. Pengawasan teknis jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan yang tersebar di 5 wilayah adat;
   c. Pembangunan jaringan air bersih tersebar di 5 wilayah adat; pembangunan pengaman pantai;
   d. Pembangunan bandara dan pelabuhan yang tersebar di 5 wilayah adat;

e. Pembangunan jaringan telekomunikasi tersebar di 5 wilayah adat.

10. Berkembangnya perekonomian wilayah berbasis ekonomi kerakyatan, berkelanjutan dan merata, melalui kebijakan yang diarahkan :

a. Pengembangan Perekonomian Wilayah Berbasis Komoditas Lokal, yaitu : (1) pengembangan sektor primer berupa komoditi perkebunan (kopi, kakao, karet sagu, tebu, kelapa sawit, buah merah), komoditi tanaman pangan (ubi jalar, padi), perikanan laut dan budidaya, peternakan besar, kecil, dan unggas, serta pertambangan rakyat; (2) pengembangan sektor sekunder berupa komoditi industri pengolahan tepung sagu dan ubi jalar, buah merah, minyak curah, pengolahan ikan, dan pengolahan kayu; (3) pengembangan sektor tersier berupa pariwisata, perdagangan dan jasa.

b. Pengembangan Klaster Ekonomi yang memiliki daya saing, yang diarahkan pada pengembangan : (1) Klaster Pertanian di Wamena, Tanah Merah, Kepi, Merauke, Mimika, Sarmi, dan Jayapura; (2) Klaster Perkebunan di Wamena, Nabire, Jayapura, (3) Klaster Perikanan di Kepi, Merauke, Mimika, Sarmi, Keerom, Jayapura, Biak Numfor dan Waropen; (4) Klaster Pariwisata KPPN Timika-Lorentz di Kabupaten Mimika, KPPN Jayawijaya di Kabupaten Jayawijaya; KSPN Wasur dan KPPN Kimaam di Kabupaten Merauke; KPPN Danau Bian di Kabupaten Merauke; KPPN C.A. Weyland di Kabupaten Nabire; KPPN Paniai di Kabupaten Paniai; KSPN Agats- Asmat di Kabupaten Asmat; KPPN i Timika-Lorentz dan sekitarnya di Kab. Mimika dan Jayawijaya; KSPN Sentani di Kab. Jayapura, KPPN Jayapura; KSPN Biak dan KPPN Numfor Kabupaten Biak numfor; KPPN Serui di Kabupaten Kep.Yapen; KPPN Supiori di kabupaten Supiori

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan

sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan baik dan profesional.

Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan), dana kemitraan, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta bina lingkungan di Provinsi Papua yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan Provinsi Papua Tahun 2019 disusun dalam rangka mewujudkan prioritas daerah dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK, Dana Bagi Hasil, dan (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang meliputi hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain

penerimaan, dana transfer pusat dan dana insentif daerah. Sementara penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Gambar 3.7 Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2018

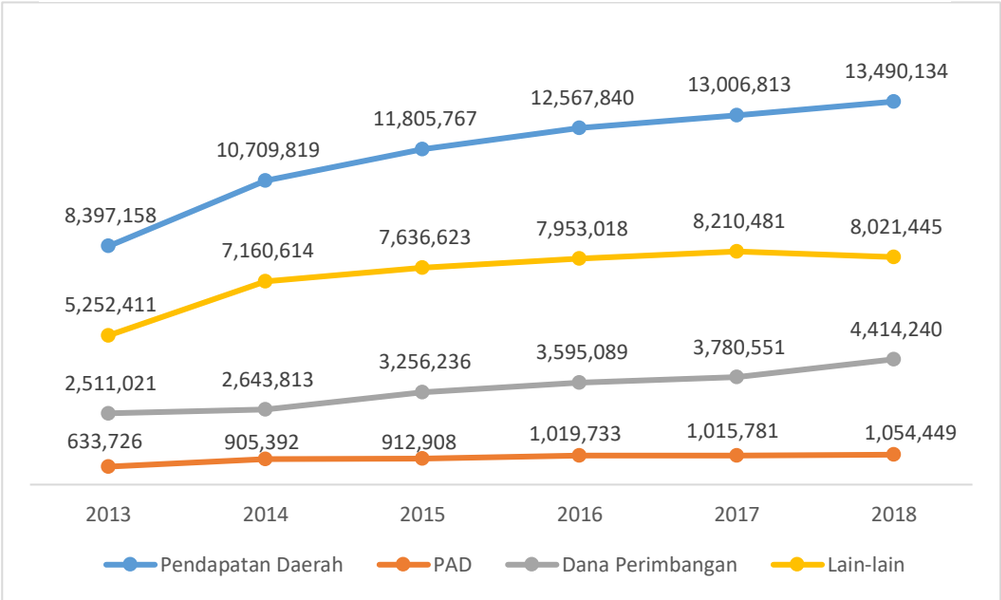

Sumber Data : Diolah dari Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013– 2018

Gambar 3.7 di atas menunjukkan perkembangan realisasi pendapatan daerah Provinsi Papua dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Secara umum, realisasi pendapatan daerah Provinsi Papua mengalami perkembangan yang konsisten dan terus menanjak sepanjang periode ini, dari sebesar Rp 8,39 trilyun pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp.10,70 trilyun pada tahun 2014 dan kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 11,80 trilyun pada tahun 2015 dan menjadi sebesar Rp 12,56 trilyun pada tahun 2016 dan menjadi sebesar Rp 13,00 trilyun pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 menjadi sebesar 13.49 trilyun.

Tabel 3.9 Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 -2017 (Rp juta)

Uraian	2013			2014			2015			2016			2017		
	A	R	%	A	R	%	A	R	%	A	R	%	A	R	%
PENDAPATAN	8.298.239	8.397.158	101,2	10.802.461	10.709.819	99,1	11.987.596	11.805.767	98,5	13.065.980	12.567.840	96,2	14.116.823	13.006.813	92,1
Pendapatan Asli Daerah	512.034	633.726	123,8	927.254	905.392	97,6	882.299	912.908	103,5	1.161.422	1.019.733	87,8	1.367.161	1.015.781	74,3
Pendapatan Pajak Daerah	413.950	453.677	109,6	592.820	566.063	95,5	659.442	633.392	96,0	879.024	666.992	75,9	1.045.479	756.689	72,4
Hasil Retribusi Daerah	17.639	24.524	139,0	53.865	57.092	106,0	59.670	49.085	82,3	83.188	58.077	69,8	82.930	77.988	94,0
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.493	25.793	101,2	32.917	32.942	100,1	15.899	15.932	100,2	52.810	53.759	101,8	52.810	721	1,4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	54.952	129.732	236,1	247.651	249.295	100,7	147.288	214.498	145,6	146.399	240.905	164,6	185.942	180.383	97,0
Dana Perimbangan	2.506.984	2.511.021	100,2	2.753.097	2.643.813	96,0	3.457.230	3.256.236	94,2	3.949.272	3.595.089	91,0	4.543.835	3.780.551	83,2
Bagi Hasil Pajak	314.281	308.441	98,1	313.663	244.217	77,9	288.080	196.894	68,3	310.889	277.042	89,1	309.397	257.824	83,3
Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	169.538	179.414	105,8	327.725	287.888	87,8	430.914	321.105	74,5	610.502	487.428	79,8	296.766	155.189	52,3
Dana Alokasi Umum	1.889.268	1.889.268	100,0	1.991.202	1.991.202	100,0	2.277.933	2.277.933	100,0	2.502.449	2.502.449	100,0	2.570.118	2.338.201	91,0

Uraian	2013			2014			2015			2016			2017		
	A	R	%	A	R	%	A	R	%	A	R	%	A	R	%
Dana Alokasi Khusus	133.897	133.897	100,0	120.506	120.506	100,0	460.304	460.304	100,0	514.750	317.778	61,7	1.367.553	1.029.338	75,3
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.279.221	5.252.411	99,5	7.122.111	7.160.614	100,5	7.648.066	7.636.623	99,9	7.955.286	7.953.018	100,0	8.205.827	8.210.481	100,1
Dana Penyesuaian	351.842	325.033	92,4	345.040	343.560	99,6	457.146	445.645	97,5	560.235	560.235	100,0	0	0	0,0
Dana Otonomi khusus	4.355.950	4.355.950	100,0	4.777.071	4.777.071	100,0	4.940.430	4.940.430	100,0	5.395.052	5.395.052	100,0	5.580.152	5.580.152	100,0
Dana Tambahan Infrastruktur	571.429	571.429	100,0	2.000.000	2.000.000	100,0	2.250.000	2.250.000	100,0	1.987.500	1.987.500	100,0	2.625.000	2.625.000	100,0
Pendapatan Lainnya	0	0	0,0	0	39.538	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	4.591	0,0

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013– 2017

Keterangan

A= Anggaran dan R = Realisasi

Jika dilihat dari pertumbuhan masing-masing jenis pendapatan, maka terlihat adanya perbedaan pola pertumbuhan sesuai dengan pengaruh fakor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Selama periode tahun 2013-2017, pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi, dari sebesar Rp 512,03 milyar pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 927,2 milyar pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi Rp 8827,2 milyar dan 2016 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 1,16 trilyun dan sebesar Rp 1,36 trilyun pada tahun 2017. Sepanjang tahun 2013-2017, pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14 persen per tahun

Selanjutnya pos dana perimbangan secara konsisten mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan pertumbuhan yang cukup bervariasi setiap tahunnya, dari sebesar Rp 2,50 trilyun pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp 2,75 trilyun pada tahun 2014 dan mengalami peningkatan cukup besar menjadi Rp 3,45 trilyun pada tahun 2015 dan sebesar Rp 3,94 trilyun pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017, dana perimbangan kembali mengalami peningkatan cukup besar menjadi Rp 4,54 trilyun. Sepanjang tahun 2013-2017, pos dana perimbangan mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 11 persen per tahun.

Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terutama disumbangkan oleh dana otonomi khusus papua dan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dari sebesar Rp 4,35 trilyun pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp 4,77 trilyun pada tahun 2014 dan meningkat lagi menjadi sebesar Rp 4,94 trilyun pada tahun 2015. Peningkatan terjadi pada tahun 2016 dan 2017 menjadi Rp 5,399 trilyun dan Rp 5,58 trilyun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13 persen per tahun.

Dalam perspektif distribusi, struktur pendapatan daerah Provinsi Papua dapat dikatakan sangat berbeda dengan kebanyakan daerah lain di Indonesia yang umumnya didominasi oleh besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataupun dana perimbangan. Sesuai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua, pendapatan daerah Provinsi Papua

didominasi oleh besarnya kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah yang dalam hal ini bersumber dari dana otonomi khusus Papua yang dihitung sebesar 2 persen dari DAU nasional serta dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Papua.

Gambar 3.8 menunjukkan perkembangan struktur pendapatan daerah Provinsi Papua sepanjang tahun 2013-2018. Pada periode tersebut terlihat bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah hanya berkisar pada angka 7,55% sampai dengan 8,45 %, kemudian Dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak dan SDA serta DAU dan DAK memberikan kontribusi dalam kisaran angka 24,6% sampai dengan 32,72%. Sedangkan dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus memberikan kontribusi yang dominan melebih separuh dari APBD yang mencapai kisaran angka 58,68% sampai dengan 63,28%.

Gambar 3.8 Struktur Pendapatan Daerah Provinsi Papua 2013-2018

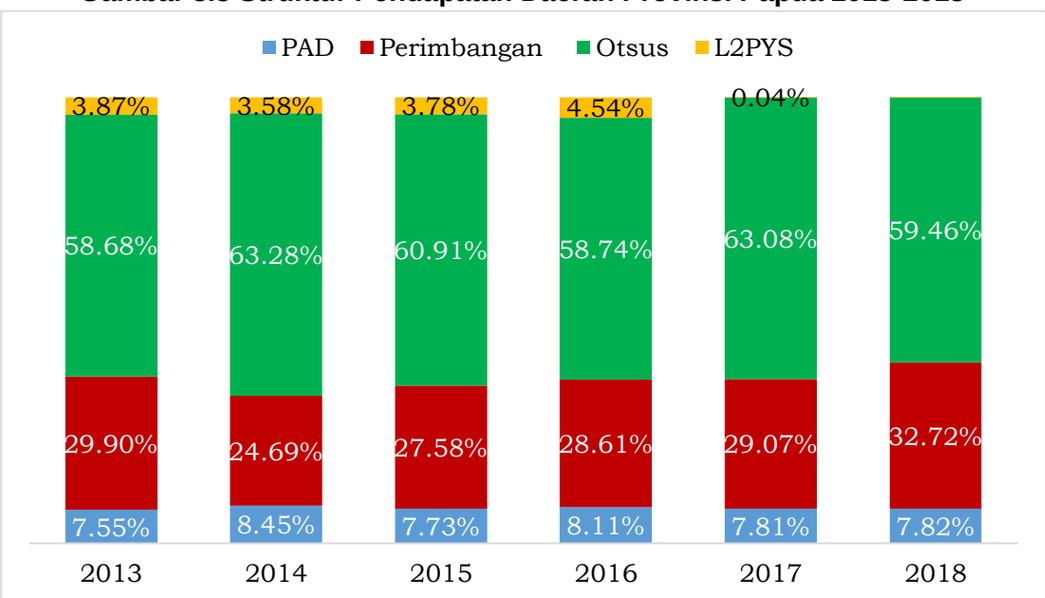

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013 – 2018 (diolah)

Selama periode tahun 2013-2018, hanya pada tahun 2013 target pendapatan dapat direalisasikan dengan baik yang mencapai angka sebesar 101,2 persen, sedangkan periode tahun 2014-2018, realisasi pendapatan selalu berada dibawah target yang ditetapkan. Kondisi ini terutama disebabkan tidak terealisasinya beberapa sumber pendapatan yang berasal dari dana perimbangan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Selisih
2013	8.298.239.247.000,00	8.397.158.332.245,00	101,2%	98.919.085.245
2014	10.802.461.214.000,00	10.709.818.949.527,00	99,1%	-92.642.264.473
2015	11.987.595.808.455,00	11.805.767.353.119,00	98,5%	-181.828.455.336
2016	13.065.980.097.715,00	12.567.839.768.232,70	96,2%	-498.140.329.482
2017	14.116.822.510.433,00	13.006.812.664.926,50	92,1%	-1.110.009.845.507
2018	13.988.040.559.046,00	13.490.134.388.313,00	96,4%	-497.906.170.733

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013–2018 (diolah)

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan adanya pengalihan beberapa kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi, dari provinsi ke kabupaten/kota, dari provinsi ke pusat, dan sebaliknya, menyebabkan terjadinya peningkatan yang cukup signifikan dalam komponen Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan. Hal ini disebabkan adanya perubahan peralihan pada beberapa urusan pembangunan ke pemerintahan daerah.

Urusan yang mengalami perubahan antara lain Urusan Pendidikan terkait dengan Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Dan Muatan Lokal Pendidikan Khusus sehingga Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami kenaikan yang cukup signifikan dikarenakan pada DAK terdapat penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunjangan Profesi Guru, dana tersebut berasal dari pusat ditempatkan pada posting DAK non Fisik. Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), mengacu kepada peningkatan asumsi efektivitas KBM yang melakukan pembayaran PKB, sehingga diestimasi pada akhir tahun akan terealisasi cukup signifikan. Dengan tetap mengandalkan PKB sebagai sumber utama penerimaan daerah, maka setiap daerah harus segera melakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan

terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat terbatas (*limitative*).

Berdasarkan berbagai kondisi faktual perekonomian wilayah Papua dan dinamika urusan pembangunan, serta asumsi-asumsi di atas, maka target pendapatan daerah Provinsi Papua pada kurun waktu Tahun 2019, serta proyeksi pendapatan di Tahun 2020 dan 2021 disajikan pada Tabel 3.11. Tabel tersebut menunjukan bahwa target pendapatan asli daerah terlihat menurun dari tahun 2019 ke tahun 2020, sedangkan tahun 2019 dan 2020 ke tahun 2021 target pendapatan asli daerah meningkat. Peningkatan target pada jenis-jenis pendapatan daerah lainnya juga terlihat dari tahun 2019-2020 ke tahun 2021 yaitu dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel 3.11 Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Provinsi Papua Tahun 2017 s.d tahun 2021 (dalam Rp.)

No	URAIAN	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi/Target 2021
1	2	3	4	5	6	7
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**1,015,781,099,671**	**1,054,449,344,145**	**938,055,365,341**	**843,808,046,279**	**1,113,022,059,298**
1.1.1	Pajak Daerah	756,688,629,518	802,674,672,858	669,939,278,125	575,691,959,063	880,000,000,000
1.1.2	Retribusi Daerah	77,988,433,617	59,316,519,857	41,604,581,700	41,604,581,700	55,022,059,298
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	720,598,381	11,911,412,021	53,580,182,602	53,580,182,602	28,000,000,000
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	180,383,438,155	180,546,739,409	172,931,322,914	172,931,322,914	150,000,000,000
1.2	**Dana Perimbangan**	**3,780,551,017,562**	**4,414,240,479,168**	**4,407,385,762,146**	**3,940,829,022,046**	**4,959,000,000,000**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	413,012,330,146	924,041,168,288	648,886,536,000	443,984,334,000	882,000,000,000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	2,338,200,799,000	2,571,298,119,000	2,616,545,381,000	2,354,890,842,900	2,977,000,000,000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	1,029,337,888,416	918,901,191,880	1,141,953,845,146	1,141,953,845,146	1,100,000,000,000

No	URAIAN	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi/Target 2021
1	2	3	4	5	6	7
1.3	**Lain-lain Pendapatan daerah yang sah**	**8,210,480,547,693**	**8,021,444,565,000**	**8,632,676,695,000**	**8,632,676,695,000**	**9,771,000,000,000**
1.3.1	Hibah	736,936,000	590,450,000			
1.3.2	Dana Darurat					
1.3.3	Bagi hasil pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah daerah lainnya					
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	8,205,152,407,000	8,020,854,115,000	8,632,676,695,000	8,632,676,695,000	6,461,000,000,000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah daerah lainnya**)					
1.3.6	Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku	4,591,204,693				
1.3.7	Dana Tambahan Infrastruktur					3,310,000,000,000
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**13,006,812,664,927**	**13,490,134,388,313**	**13,978,117,822,487**	**13,417,313,763,325**	**15,843,022,059,298**

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya. Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah di Provinsi Papua, proporsi sumber pendapatan utama daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), masih diproyeksikan dengan proporsi rata-rata masih dibawah 10% dari total pendapatan daerah, maka perlu adanya strategi-strategi dalam rangka peningkatan PAD di waktu yang akan datang. Disamping itu, sumber–sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lain-Lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, proporsi DAU dan Dana Otsus secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber–sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan–kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah.

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik–baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada pemerintah pusat. Sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program–program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan DAK. Bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan demikian semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mendorong peningkatan aktivitas perekonomian.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana pendapatan daerah (target dan proyeksi), diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut.

1. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui:
   a. Penggalian dan peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan (intensifikasi dan ekstensifikasi) terutama bagi sumber pendapatan pajak dan retribusi yang potensial;
   b. Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan perangkat daerah penghasil;
   c. Optimalisasi penggunaan teknologi dan sistem infomasi untuk pengelolaan pendapatan daerah;
   d. Meningkatkan efisiensi, efektivitas serta kinerja BUMD dan perusahaan daerah guna peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
   e. Meningkatkan pendayagunaan aset-aset daerah guna memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah;
   f. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penghasilan dana bagi hasil baik dari pajak maupun bukan pajak lainnya;
   g. Meningkatkan akurasi data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan dana perimbangan;
   h. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
   i. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
   j. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
   k. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak.
   l. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
   m. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya antar lain : pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan

Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan;

n. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
o. melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil.

2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui:
   a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
   b. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
   c. Peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
   d. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
3. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang sah, strategi yang ditempuh melalui :
   a. Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri.
   b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

3.2.2.1. Kebijakan Belanja Daerah Yang Bersumber Pada Dana PAD dan Transfer

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah dikelompokan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL yaitu belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan BL merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Terlihat dalam Tabel 3.12 realisasi belanja daerah Provinsi Papua selama tahun 2013-2017 meningkat cepat dengan rata-rata 17,95% per tahun. Dimana komponen belanja yang memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan belanja daerah selama ini adalah belanja modal yang tumbuh sekitar 31,64% per tahun. Adapun belanja operasi yang mencakup antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa, subsidi dan bantuan sosial, rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 13,51% per tahun.

Sebagaimana yang disajikan pada Gambar 3.9 struktur belanja daerah di Provinsi Papua masih dominan pada belanja operasi, kurang lebih proporsinya 66,42% dari total belanja. Sementara proporsi belanja modal sebesar 33,43%, dan hanya 0,14% untuk belanja tak terduga. Porsi belanja terbesar pada belanja operasi adalah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan barang dan jasa yaitu sekitar 54,43% per tahun.

Gambar 3.11.
Struktur Belanja Daerah Provinsi Papua
Rata-Rata Selama Tahun 2013-2017
(dalam %)

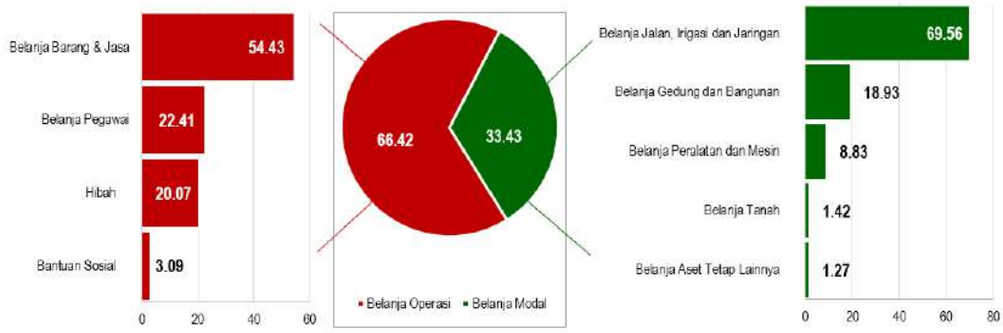

Sumber : Bappeda Papua, LKPJ Tahun 2013-2017 (data diolah)
Keterangan :
* Porsi belanja operasi dan modal dirasiokan dengan total belanja daerah
** Struktur belanja operasi dirasiokan dengan total belanja operasi
*** Struktur belanja modal dirasiokan dengan total belanja modal

Tabel 3.12 Perkembangan Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2017 (Rp juta)

Uraian	2013			2014			2015			2016			2017		
	A	R	%	A	R	%	A	R	%	A	R	%	A	R	%
Belanja	8.941.437	8.171.352	91%	11.520.664	10.303.787	89%	13.268.460	12.396.447	93%	13.601.165	11.968.494	88%	15.654.664	13.303.282	85%
Belanja Tidak Langsung	5.322.500	5.080.595	95%	6.842.740	6.419.562	94%	7.155.349	6.980.188	98%	7.563.695	6.782.511	90%	8.102.810	7.614.480	94%
Belanja Pegawai	733.505	657.546	90%	898.649	744.258	83%	1.006.629	919.022	91%	1.082.739	986.869	91%	1.319.848	1.110.723	84%
Belanja Hibah	685.960	651.084	95%	863.485	732.224	85%	885.017	835.350	94%	1.167.661	1.077.607	92%	1.038.385	1.025.283	99%
Belanja Bantuan Sosial	274.646	178.167	65%	157.227	88.454	56%	100.034	94.309	94%	153.745	145.771	95%	101.028	96.897	96%
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	233.162	232.801	100%	280.831	280.781	100%	297.467	290.677	98%	362.829	313.262	86%	390.165	310.131	79%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	3.365.227	3.348.441	100%	4.612.843	4.562.249	99%	4.843.201	4.829.852	100%	4.791.205	4.258.952	89%	5.203.385	5.071.446	97%
Belanja Tidak Terduga	30.000	12.557	42%	29.705	11.595	39%	23.000	10.978	48%	5.516	49	1%	10.000	0	0%
Belanja Langsung	3.618.937	3.090.757	85%	4.677.924	3.884.225	83%	6.113.112	5.416.259	89%	6.037.470	5.185.984	86%	7.551.853	5.688.802	75%
Belanja Pegawai	195.333	175.894	90%	218.273	196.401	90%	214.620	190.579	89%	260.967	235.694	90%	274.065	248.630	91%
Belanja Barang dan Jasa	1.898.047	1.694.118	89%	2.189.514	1.998.521	91%	2.729.760	2.360.218	86%	2.838.475	2.459.957	87%	3.821.939	3.112.159	81%
Belanja Modal	1.525.557	1.220.745	80%	2.270.138	1.689.303	74%	3.168.733	2.865.462	90%	2.938.028	2.490.333	85%	3.455.849	2.328.013	67%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013– 2017 (diolah)

Keterangan

A= Anggaran R = Realisasi

Setelah itu untuk pengeluaran belanja pegawai dan hibah, masing-masing sebanyak 22,41% dan 20,07% per tahun. Adapun di belanja modal, yang terbesar porsinya adalah untuk belanja untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringannya yang bisa mencapai 69,59% per tahun. Selengkapnya hal ini dapat lihat pada Gambar 3.11.

Daya serap belanja di Provinsi Papua meskipun masih di bawah 100% akan tetapi cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan diantara tahun 2013 - 2017, terutama di tahun 2015 sempat meningkat tajam hingga mencapai 93%. Rata-rata daya serap belanja daerah di Provinsi papua selama periode tersebut adalah 89% per tahun.

Tabel 3.13 Target dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Rencana	Realisasi	%	Selisih
2013	8.941.437.247.000	8.171.352.348.477	91%	-770.084.898.523
2014	11.520.664.078.000	10.303.786.846.381	89%	-1.216.877.231.619
2015	13.268.460.356.704	12.396.447.236.264	93%	-872.013.120.440
2016	13.601.164.762.819	11.968.494.421.588	88%	-1.632.670.341.230
2017	15.654.663.746.433	13.303.282.243.301	85%	-2.351.381.503.131

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua TA 2013–2017 (diolah)

Berdasarkan fakta kecenderungan daya serap belanja selama ini, serta pertumbuhan belanja daerah dari tahun ke tahun relatif meningkat, selanjutnya pada tahun 2018 diperkirakan belanja tidak langsung mengalami kenaikan dikarenakan pada tahun tersebut ada kenaikan pada Belanja Pegawai sebagai konsekuensi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu beralihnya gaji dan tunjangan tenaga kependidikan SMA/SMK seiring dengan beralihnya pengelolaan sekolah menengah dari urusan Kabupaten/Kota menjadi urusan Provinsi, sehingga besaran belanja pegawai mengalami kenaikan yang cukup signifikan, maka dari hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, serta realisasi dan proyeksi pendapatan daerah 2 (dua) tahun kedepan, arah kebijakan belanja daerah pada Tahun 2020 disajikan dalam Tabel 3.14 di bawah ini.

Tabel 3.14 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Tahun 2017 s.d tahun 2021 (dalam Rp.)

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi/Target 2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2.1	**Belanja Tidak Langsung**					
2.1.1	Belanja Pegawai	1,110,723,063,509	158,040,619,633	2,728,997,543,848	2,865,447,421,040	3,008,719,792,092
2.1.2	Belanja Bunga					
2.1.3	Belanja Subsidi					
2.1.4	Belanja Hibah	1,025,283,304,735	-	1,212,829,878,600	1,273,471,372,530	1,337,144,941,157
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	96,897,363,512	-	65,380,508,471	100,000,000,000	100,000,000,000
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa*	310,130,859,569	-	459,263,805,847	482,226,996,139	506,338,345,946
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa*	5,071,445,774,171	-	2,142,902,959,600	2,848,513,217,447	2,937,773,405,214
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000
B	**JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**7,614,480,365,496**	**158,040,619,633**	**6,634,374,696,366**	**7,594,659,007,156**	**7,914,976,484,409**
2.2	**Belanja Langsung**					
2.2.1	Belanja Pegawai	248,630,252,397	33,068,947,500	280,798,315,300	294,000,000,000	308,700,000,000
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,112,158,950,882	594,647,187,430	4,018,589,277,765	4,219,518,741,653	4,430,494,678,736
2.2.3	Belanja Modal	2,328,012,674,526	82,168,746,419	2,955,873,828,710	3,103,667,520,146	3,258,850,896,153
C	**JUMLAH BELANJA LANGSUNG**	**5,688,801,877,805**	**709,884,881,349**	**7,255,261,421,775**	**7,617,186,261,799**	**7,998,045,574,889**
D	**TOTAL JUMLAH BELANJA**	**13,303,282,243,301**	**867,925,500,982**	**13,889,636,118,141**	**15,211,845,268,955**	**15,913,022,059,298**

Penyusunan anggaran belanja tahun 2020 berpedoman pada Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, yang didasarkan pada beberapa hal yaitu : (1) Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah; (2) Prinsip penyusunan APBD; (3) Kebijakan penyusunan APBD; (4) Teknis penyusunan APBD; dan (5) Hal khusus lainnya.

RKP Tahun 2020 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. Berkaitan dengan itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD. 5 (lima) prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 dimaksud, meliputi:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; dan
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2020 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 mengenai Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2020 berpedoman pada RKPD Tahun 2020 masing-masing provinsi yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2020, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun 2020 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2020 dan RKPD provinsi Tahun 2020.

Adapun untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan
6. Mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
7. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
8. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Penyusunan RKPD Tahun 2020 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas daerah/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Oleh karena itu arah kebijakan belanja daerah untuk

Tahun 2020 yang mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD, program prioritas nasional dalam RKP, dan program strategis nasional yang ditetapkan untuk Provinsi Papua, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pemenuhan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua tahun 2018-2023;
2. Prioritas pembangunan, program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian, urusan pembangunan, *Sustainable Development Goals* (SDGs), penurunan kemiskinan dan ketimpangan;
3. Dukungan terhadap RKP 2020;
4. Penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar 20% dari total belanja;
5. Penggunaan dana fungsi kesehatan sebesar 10%;
6. Bantuan keuangan kabupaten/kota, bantuan pada pemerintahan kampung, hibah, Bansos dan subsidi;
7. Penggunaan Dana DAK, Dana Bagi Hasil, Dana Penyesuaian/BOS, dan Dana Otonomi Khusus;
8. Dukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
9. Dukungan penyelenggaraan PON XX Tahun 2020;
10. Pembinaan bagi atlet berprestasi;
11. Dukungan terhadap DPRP dan MRP;
12. Pembangunan dan pengembangan pusat pelayanan publik dan sosial;
13. Penganggaran belanja kegiatan yang proporsional, rasional, efektif dan efisien berbasis program prioritas dalam rangka memenuhi janji politik dan program pirirtas kepala daerah;
14. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah dan di jabarkan secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;

15. Pemenuhan belanja untuk program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan target kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
16. Efisiensi Pemenuhan alokasi anggaran untuk pelayanan dan operasional perangkat daerah.

3.2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah Yang Bersumber Pada Dana Otonomi Khusus

Terkait dengan pengelolaan Dana Otonomi Khusus, disebutkan dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus, pada Pasal 5 bahwa Sumber Penerimaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua adalah : (a) dana dalam rangka Otonomi Khusus setara 2% (dua perseratus) dana alokasi umum nasional, dan (b) dana tambahan infrastruktur.

Belanja yang bersumber dari dana Otonomi Khusus menurut Perdasus Nomor 13 Tahun 2016 di atas akan dikelola dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, melalui pembagian 20% untuk pemerintah provinsi, dan 80% untuk pemerintah kabupaten/kota, setelah dari total penerimaan dana Otonomi Khusus dikeluarkan untuk pembiayaan program strategis lintas kabupaten/kota. Sebagaimana yang telah diarahkan dalam Pasal 7 ayat 2 bahwa pembagian penerimaan dana otonomi khusus antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi di atur dengan terlebih dahulu dikurangi kebutuhan dana untuk program strategis lintas Kabupaten/Kota.

Selama tahun 2013-2016, program strategis lintas kabupaten/kota yang diamanatkan oleh Perdasus Nomor 13 Tahun 2016 tersebut telah diterjemahkan kedalam program-program strategis Otonomi Khusus yang lazim dikatakan Urusan Bersama (Program Strategis Lintas Kabupaten/Kota) yang mencakup kebijakan-kebijakan afirmatif yang strategis bagi Orang Asli Papua yaitu Prospek, KPS (Kartu Papua Sehat), Gerbangmas Hasrat Papua, Perumahan Rakyat dan Pendidikan. Serta Bangun Generasi Keluarga Papua (Bangga Papua) yang dimulai pada tahun 2018. Oleh karena itu berdasarkan realisasi penerimaan dana otsus tahun 2018, dan target

di tahun 2019, serta merujuk kepada pembagian dana Otonomi Khusus untuk kabupaten/kota yang telah dilakukan selama ini, maka alokasi belanja yang bersumber dari dana Otonomi Khusus untuk tahun 2020 selengkapnya dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3.15 Target Dan Proyeksi Belanja Daerah Yang Bersumber Dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun 2019 dan 2020 (dalam Rp.)

Uraian	Target 2019	Proyeksi 2020
Total Dana Otsus	5.808.230.158.000	6.054.499.117.000
Urusan Bersama	3.861.473.585.000	4.067.291.115.400
a. Beasiswa Siswa Unggulan Papua	733.679.981.150	735.724.430.000
b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat	501.991.566.050	514.362.215.000
c. Ekonomi	77.229.471.700	78.969.381.000
d. Perumahan dan Fasilitas Umum	115.844.207.550	121.454.072.000
e. Perlindungan Sosial (Bangga Papua)	270.303.150.950	284.908.143.000
f. Keagamaan	77.229.471.700	77.229.471.700
g. Pengalihan Kewenangan (SMU/SMK dan Kehutanan)	772.294.717.000	780.163.411.000
h. PON XX (Pendidikan, Olahraga)	1.062.901.018.900	1.224.479.991.700
i. MRP	250.000.000.000	250.000.000.000
C. Bagian Yang Di Bagi (A - B)	1.946.756.573.000	1.987.208.001.600
1. Provinsi Sebesar 20%	389.351.314.600	397.441.600.000
a. Pendidikan	116.805.394.380.00	119.232.480.000
b. Kesehatan	77.870.262.920.00	79.488.320.000
c. Ekonomi	58.402.697.190.00	59.616.240.000
d. Afirmasi	116.805.394.380.00	119.232.480.000
e. Pengawasan dan Pengendalian	19.467.565.730.00	19.872.080.000
2. Kabupaten/Kota Sebesar 80%	1.557.405.258.400	1.589.766.401.280

Sumber : data diolah (2019)

Menurut ketentuan Perdasus Nomor 13 Tahun 2016 bahwa pembiayaan program pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang bersumber pada Dana Otonomi Khusus dianggarkan sebagai belanja bantuan khusus pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia unggul Papua. Sedangkan pembiayaan program perumahan rakyat dianggarkan sebagai belanja bantuan khusus perumahan layak huni bagi orang asli Papua.

Pengelolaan belanja Dana Otsus yang merupakan pembagian 80% untuk pemerintah kabupaten/kota, dan 20% untuk pemerintah provinsi telah diarahkan alokasi belanjanya sebagai berikut :

a. Pembiayaan pelayanan bidang pendidikan minimal 30% (tiga puluh perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarannya untuk membiayai penuntasan buta aksara, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, pendidikan non formal, dan pendidikan tinggi;
b. Pembiayaan pelayanan bidang kesehatan minimal 15% (lima belas perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses kesehatan bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarannya dialokasikan untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, dan pelayanan kesehatan dalam situasi bencana;
c. Pembiayaan pengembangan ekonomi kerakyatan minimal 25% (dua puluh lima perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan ekonomi bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarannya dialokasikan untuk pembentukan dan pembinaan peran dan fungsi lembaga profesi untuk pengembangan usaha kecil/mikro, perkreditan usaha ekonomi rakyat, subsidi harga kebutuhan bahan pokok, dan pengembangan komoditas unggulan;
d. Pembiayaan pembangunan infrastruktur minimal 20% (dua puluh perseratus) yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana perumahan rakyat, penerangan, air bersih dan telekomunikasi;
e. Pembiayaan bantuan afirmasi kepada lembaga keagamaan, lembaga masyarakat adat asli, dan kelompok perempuan yang penganggarannya dialokasikan maksimal 6% (enam perseratus);
f. Pembiayaan perencanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, dan pelaporan program dan kegiatan yang penganggarannya dialokasikan maksimal 2 % (dua perseratus); dan

g. Pembiayaan program prioritas selain yang disebutkan di atas, dialokasikan maksimal 2% (dua perseratus).

Menurut Perdasus Nomor 13 Tahun 2016, bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang telah diarahkan di atas akan dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran atas Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Dimana penundaan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Mengacu kepada target dan proyeksi pengelolaan belanja yang bersumber pada dana Otonomi Khusus di atas, serta kebutuhan belanja dalam rangka mengimplementasi amanat Perdasus Nomor 13 Tahun 2016, berikut ini disampaikan target dan proyeksi alokasi belanja dana Otonomi Khusus pada setiap pemerintah kabupaten/kota untuk tahun 2019 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 3.16 Target Dan Proyeksi Alokasi Dana Otonomi Khusus Untuk Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2019 dan 2020 (dalam Rp.)

Wilayah Adat Dan Kabupaten/Kota		Target 2019	Proyeksi 2020	Selisih
ANIMHA		**232,103,024,357.08**	**236,925,866,000**	**4,822,841,642.92**
1	Merauke	48,495,887,123.16	49,503,578,000	1,007,690,876.84
2	Mappi	61,685,777,431.10	62,967,539,000	1,281,761,568.90
3	Asmat	61,939,361,529.60	63,226,392,000	1,287,030,470.40
4	Boven Digoel	59,981,998,273.22	61,228,357,000	1,246,358,726.78
MAMTA		**210,426,739,846.85**	**214,799,173,000**	**4,372,433,153.15**
5	Kota Jayapura	31,867,021,099.00	32,529,182,000	662,160,901.00
6	Jayapura	46,073,463,891.39	47,030,819,000	957,355,108.61
7	Sarmi	44,404,979,591.99	45,327,666,000	922,686,408.01
8	Keerom	29,015,053,505.56	29,617,954,000	602,900,494.44
9	Mamberamo Raya	59,066,221,758.91	60,293,552,000	1,227,330,241.09
MEE PAGO		**325,082,440,569.00**	**331,837,291,000**	**6,754,850,431.00**
10	Nabire	45,756,973,242.93	46,707,752,000	950,778,757.07
11	Mimika	31,309,836,558.85	31,960,420,000	650,583,441.15
12	Paniai	64,189,783,336.76	65,523,575,000	1,333,791,663.24
13	Dogiyai	61,730,319,464.80	63,013,007,000	1,282,687,535.20
14	Intan Jaya	61,756,420,382.30	63,039,650,000	1,283,229,617.70
15	Deiyai	60,339,107,583.36	61,592,887,000	1,253,779,416.64
LA PAGO		**624,311,440,273.37**	**637,283,935,000**	**12,972,494,726.63**

Wilayah Adat Dan Kabupaten/Kota		Target 2019	Proyeksi 2020	Selisih
16	Jayawijaya	51,356,987,511.63	52,424,128,000	1,067,140,488.37
17	Puncak Jaya	64,622,624,148.52	65,965,410,000	1,342,785,851.48
18	Puncak	64,316,106,423.53	65,652,523,000	1,336,416,576.47
19	Yahukimo	65,595,198,072.37	66,958,193,000	1,362,994,927.63
20	Peg. Bintang	62,592,857,239.28	63,893,467,000	1,300,609,760.72
21	Tolikara	64,759,842,666.91	66,105,480,000	1,345,637,333.09
22	Nduga	62,185,842,294.06	63,477,995,000	1,292,152,705.94
23	Lanny Jaya	65,793,806,208.36	67,160,928,000	1,367,121,791.64
24	Mamb. Tengah	61,543,588,793.15	62,822,396,000	1,278,807,206.85
25	Yalimo	61,544,586,915.56	62,823,415,000	1,278,828,084.44
SAERERI		**165,481,613,353.70**	**168,920,137,000**	**3,438,523,646.30**
26	Biak Numfor	32,258,636,567.29	32,928,935,000	670,298,432.71
27	Supiori	43,402,635,532.33	44,304,494,000	901,858,467.67
28	Kepulauan Yapen	45,992,775,230.57	46,948,454,000	955,678,769.43
29	Waropen	43,827,566,023.51	44,738,254,000	910,687,976.49

Sumber : data diolah (2019)

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2019 belum merencanakan SiLPA. Kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Papua diarahkan untuk menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Dalam hal APBD

mengalami defisit, maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan untuk menutup defisit tersebut (pembiayaan penerimaan). Apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada item-item pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan. Oleh karena itu, dengan menggunakan asumsi bahwa pada tahun 2018 belum memperkirakan SiLPA, serta dari analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah dalam 4 (empat) tahun terakhir, maka proyeksi tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 3.17 Target Dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 dan 2020 (dalam Rp.)

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi/Target 2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**					
3.1.1	Sisa Lebih perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	1,009,244,331,459	-	-	120,000,000,000	120,000,000,000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang daerah	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**1,009,244,331,459**	**-**	**-**	**120,000,000,000**	**120,000,000,000**

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi/Target 2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**					
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	65,462,264,136	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	75,000,000,000	50,500,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		**140,462,264,136**	**50,500,000,000**	**50,000,000,000**	**50,000,000,000**	**50,000,000,000**
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		**868,782,067,323**	**- 50,500,000,000**	**- 50,000,000,000**	**70,000,000,000**	**70,000,000,000**

Sumber : data diolah (2019)

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan anggaran kinerja memungkinkan adanya surplus atau defisit pada penyusunan APBD. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hadiah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, Pemerintah daerah berhak melakukan pinjaman daerah dengan ketentuan besaran pinjaman daerah tidak melebihi kemampuan daerah dalam mengembalikan pinjaman. Kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur pembiayaan seperti mengatur defisit anggaran dan pinjaman daerah (*sub national deficit, borrowing and debt*) dan mengatur surplus anggaran dan penyertaan modal (investment).

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun 2020 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target Visi dan Misi sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2018-2023. Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2020. Selain itu prioritas pembangunan daerah tersebut juga dimaksudkan untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana yang dimuat dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2020.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Papua tahun 2020, tentu saja tidak lepas dari arahan umum dan panduan utama, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan lima tahunan Provinsi Papua, dimana visi pembangunan Provinsi Provinsi Papua Tahun 2018-2023 adalah:

PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Provinsi Papua tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Provinsi Papua tahun 2018-2023, dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut:

1. **Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM.**

   - Misi memantapkan kualitas dan daya saing SDM Papua akan menjadi prioritas utama dalam pembangunan periode 2018-2023, yang berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. SDM yang berdaya saing juga akan tercapai jika SDM Papua terjaga pasokan pangannya terjamin dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Untuk itu kemandirian pangan dan gizi merupakan prioritas dalam pembangunan Papua.

2. **Memantapkan Rasa Aman, Tentram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI.**

   - Terjaminnya ketentraman dan ketertiban akan menciptakan rasa aman bagi masyarakat Papua, merupakan jaminan bagi terlaksananya pembangunan. Oleh karena itu pembangunan akan diarahkan untuk memperkuat kerukunan hidup umat beragama, menghargai nilai budaya masing-masing etnik sebagai suatu nilai keunggulan Provinsi Papua, penerapan dan penegakan hukum dan HAM yang dilaksanakan secara tegas dan profesional dengan tetap berdasarkan pada penghormatan HAM serta peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Masyarakat yang demokratis merupakan landasan penting untuk tercapainya masyarakat yang mandiri. Untuk mewujudkan hal itu dilakukan dengan memperkuat kelembagaan sosial politik dan peran masyarakat, melaksanakan tata pemerintahan yang terdesentralisasi pada tingkat distrik dan kampung, meningkatkan partisipasi dan transparansi, mendorong peningkatan peran media massa dan pers dalam pembangunan.

3. **Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.**

   - Peningkatan tata kelola pemerintahan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatnya daya saing suatu daerah. Wujud dari penguatan tata kelola adalah meningkatnya transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas serta meningkatnya pelayanan kepada publik. Oleh karena itu langkah-langkah yang telah dilakukan akan dimantapkan dan diperkuat, demikian pula perubahan *mind-set*, *culture-set* dan pengembangan budaya kerja

akan dilakukan secara lebih cepat dan terarah. Demikian juga upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantas korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*) dan bebas KKN dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Reformasi birokrasi ini juga akan memperkuat hubungan kelembagaan yang harmonis antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan kampung, untuk memastikan implementasi Otonomi Khusus Papua dengan baik, termasuk melalui pembiayaan bersama dan transfer anggaran yang mendukung pemerataan dan keadilan.

4. **Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara Berkelanjutan.**

   - Penguatan dan percepatan perekonomian Provinsi Papua akan tetap melanjutkan pengembangan ekonomi daerah untuk memperkuat ekonomi daerah yang berbasis potensi masing-masing wilayah dan kampung. Dengan menitikberatkan pada hubungan antar wilayah/kampung didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar wilayah/daerah yang kokoh serta berkesinambungan. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan perwilayahan berdasarkan karakteristik/ kondisi wilayah dan potensi masing-masing wilayah serta peningkatan produktivitas sumber daya ekonomi secara berkelanjutan, meningkatkan mutu produk dan menciptakan nilai tambah. Pengembangan wilayah tetap dilakukan berbasis kultural yaitu wilayah ***La Pago***, ***Mee Pago***, ***Mamta***, ***Saereri*** dan ***Animha***, yang akan difokuskan pada pembangunan berbasis kampung dengan prinsip kesetaraan pemenuhan kebutuhan hidup dan pencapaian kualitas hidup di seluruh wilayah Papua, sehingga mewujudkan pelayanan pemerintahan yang lebih mampu mendorong percepatan kemandirian masyarakat asli Papua.

5. **Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu.**

   - Pembangunan yang merata dan berkeadilan akan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Papua

tahun 2018-2023 mengingat pelaksanaan pembangunan di masa lalu, belum mampu mewujudkan pemerataan dan keadilan yang menjadi harapan seluruh Masyarakat. Penyebabnya antara lain, proses pembangunan yang tidak adil sedemikian intensif pada masa lalu sehingga dampaknya tidak dapat diselesaikan atau diperbaiki dalam satu periode pelaksanaan pembangunan. Dalam lima tahun ke depan, penguatan pemerataan dan keadilan akan dilakukan untuk setiap kebijakan dan kegiatan. Langkah ini diharapkan dalam jangka pendek akan memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga tersebut (memperbaiki distribusi pendapatan) dan dalam jangka panjang akan dihasilkan generasi baru yang lebih baik tingkat pendidikan dan kesehatannya. Pemerintah Daerah akan memperkuat pengawasan dan pengendalian dari semua program agar benar-benar menyasar orang Asli Papua khususnya yang berada di kampung-kampung. Selanjutnya pengurangan kemiskinan akan diprioritaskan bantuan langsung (*cash transfer*) kepada seluruh penduduk anak usia 4 tahun ke bawah dan usia 60 tahun keatas melalui Program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (BANGGA PAPUA) dan perlindungan sosial melalui bantuan langsung dan program pembedayaan KAT dan bantuan sosial PMKS. Untuk memperkuat perekonomian di level wilayah akan menerapkan trilogi pengembangan ekonomi Papua, yaitu : 1) perubahan pola pikir masyarakat; 2) pengwilayahan komoditas unggulan daerah; 3) penerapan prinsip tanam, petik, olah dan jual.

Untuk melaksanakan setiap misi pembangunan di atas, telah dirumuskan dan ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan, serta strategi dan arah kebijakan di tahun 2020 yang merujuk kepada RPJMD Provinsi Papua tahun 2018-2023 sebagai berikut.

Tabel 4.1 Keselarasan Misi, Tujuan, Sasaran Dan Strategi Pembangunan

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi Pertama, Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM		
1. Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing	1. Meningkatnya Aksesibiltas, Mutu dan Tata Kelola	1. Peningkatan kemitraan lembaga pendidikan dengan lembaga agama dan lembaga sosial lainnya.

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
	Penyelenggaraan Pendidikan •	2. Pengembangan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Papua
		3. Akselarasi dan afirmasi pendidikan dengan melaksanakan Program Pendidikan anak berprestasi dan unggul Papua
		4. Peningkatan pendidikan kecakapan hidup, yang dilakukan melalui pelatihan-pelatihan keterampilan.
		5. Pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) di lima wilayah adat, serta Politeknik berbasis potensi unggulan
		6. Perlindungan sosial untuk menjamin generasi emas papua.
		7. Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dengan biaya gratis bagi masyarakat Papua
		8. Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP serta Rumah Guru sesuai dengan kondisi lokal khas Papua (SD kecil dan pendidikan berpola asrama).
		9. Peningkatan akses pendidikan melalui guru kunjung, terutama di daerah terpencil.
		10. Peningkatan profesionalisme dan tunjangan guru untuk daerah tertinggal dan terluar.
		11. Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, dan tunjangan guru
		12. Peningktan akses dan kualitas pendidikan berbasis e-learning
	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita serta peningkatan dan pemenuhan Gizi masyarakat
		2. Peningkatan Pelayanan kesehatan bagi penduduk berdampak bencana dan kejadian luar biasa
		3. Memperkuat dan memantapkan pelayanan kesehatan yang berbasis kondisi lokal Papua melalui pelayanan kesehatan pro aktif/bergerak (Pelayanan kesehatan Kaki Telanjang),
		• puskesmas keliling, flying health care, puskesmas apung termasuk penyiapan mobile medical service, dan telemedicine
		4. Menyempurnakan dan memantapkan pelaksaan program jaminan kesehatan Papua (KPS) baik dari segi kualitas pelayanan, akses pelayanan, akuntabilitas anggaran.

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
		5. Peningkatan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
		6. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita serta peningkatan dan pemenuhan Gizi masyarakat dalam rangka mewujudkan Generasi Emas Papua.
		7. Pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria dan TBC.
		8. Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit rujukan di 5 wilayah adat.
		9. Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan
		10. Ketersediaan air bersih, sistem sanitasi, pengelolaan persampahan, dan air limbah
	3. Sukses pelaksanaan PON dan prestasi olahraga	1. Pemantapan persiapan pelaksanaaan PON Papua XX Papua
		2. Penguatan seleksi dan pembinaan bibit bibit muda atlet olahraga berprestasi daerah
		3. Meningkatkan prestasi melalui kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan, terutama sukses prestasi PON XX tahun 2020 dan pengembangan industri olah raga Indonesia
		4. Menyiapkan infrastruktur dan sarana PON, serta pengembangan ekonomi berbasis keunggulan
		• komoditas masing-masing wilayah
		5. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan nilai tambah komoditas melalui pelatihan yang strategis
	4. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	1. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembagunan daerah terutama dalam bidang kewirausahaan
		2. Menumbuhkan talenta-talenta kewirausahaan di kalangan pemuda
		3. Meningkatkan aktualisasi seni dan budaya pemuda
		4. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan pemuda
		5. Percepatan peningkatan kapasitas SDM pemuda OAP
		6. Meningkatkan prestasi melalui kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan dan pengembangan industri olah raga Indonesia

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
	5. Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan	1. Peningkatan dan pemenuhan infrastruktur pertanian yang menghubungkan produksi pangan dan tujuan pasar.
		2. Perbaikan sistem distribusi dan logistik termasuk pergudangan secara terintegrasi dengan memperhatikan supply chain, agar mampu mengurangi gejolak harga dan pasokan secara musiman pada komoditas pangan utama.
		3. Penguatan petani dan menjaga daya beli serta nilai tukar petani dengan menjaga stabilitas harga-harga komoditas yang dapat memberikan keuntungan pada petani.
		4. Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar)
	6. Terwujudnya internalisasi nilai adat dan budaya asli Papua dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat	1. Meningkatkan pembinaan mental dan spritual masyarakat
		2. Pembinaan kelembagaan umat beragama
		3. Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam aktivitas keagamaan melalui bantuan kepada lembaga agama dan yayasan pengelola pendidikan keagamaan
		4. Peningkatan apresiasi terhadap adat dan budaya dalam berbagai bidang kehidupan
Misi Kedua, Memantapkan Rasa Aman, Tentram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI		
1. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang berbasis pada kohesivitas sosial dan harmonisasi keberagaman potensi kehidupan masyarakat Papua	1. Meningkatnya suasana tertib, aman dan kepastian hukum	1. Mendorong komunikasi yang intensif antara penegak hukum, masyarakat dan pemerintah daerah
		2. Menumbuhkembangkan ketentraman dan ketrtiban umum
	2. Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	1. Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antar umat beragama, etnik dan kelompok sosial
		2. Meningkatkan penciptaan lingkungan kondusif bagi kehidupan umat beragama
		3. Memperkuat kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan saling menghargai, rasa percaya dan harmonisasi antar kelompok
		4. Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
		5. Memperkuat peran adat dan lembaga keagamaan dalam kemitraan pemerintahan dan pembangunan •
	3. Meningkatnya penegakan HAM	1. Memperkuat kemitraan dan kolaborasi efektif dengan lembaga-lembaga penegak hukum dalam penerapan dan penegakan hukum dan HAM
		2. Meningkatkan fasilitasi berbagai lembaga pada kasus kasus pelanggaran HAM
		3. Peningkatan kesadaran masyarakat pada HAM
		4. Menciptakan dan melembagakan komunikasi politik sehingga kepentingan Orang Asli Papua dapat diartikulasikan dan diagregasikan dalam pembuatan/pengambilan keputusan publik
		5. Memperkuat peran lembaga adat dan lembaga keagamaan dalam kemitraan pemerintahan dan pembangunan •
Misi Ketiga, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan		
1. Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua •	1. Pemantapan sistem pengalokasian dana otonomi khusus yang efisien, efektif dan berkeadilan
		2. Penguatan implementasi sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi serta transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi khusus Provinsi Papua
		3. Pengembangan instrumen kebijakan afirmatif bagi OAP dalam penyelenggaraan otonomi khusus
		4. Penguatan kelembagaan dan rambu-rambu hukum otonomi khusus Provinsi Papua
		5. Mendata dan menjamin OAP memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil
		6. Bantuan pembiayaan infrastruktur bagi kabupaten/kota yang diprioritaskan pada peningkatan konektivitas dalam rangka pengembangan rantai nilai hulu-hilir komoditi unggulan •
	2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam	1. Mengoptimalkan Sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta peran Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat di Daerah

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
	penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	2. Meningkatkan kinerja kelembagaan dengan memperbaiki prosedur kerja (business process)
		3. Meningkatkan sistem monitoring, pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah
		4. Meningkatkan tata hukum dan kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
		5. Meningkatkan upaya fasilitasi penyelesaian tapal batas antar wilayah kabupaten
		6. Meningkatkan pengembangan sistem pencegahan korupsi
		7. Meningkatkan sistem pengadaan barang dan jasa berbasis online dan transparan
		8. Menciptakan fungsi lembaga perwakilan rakyat DPRP dan MRP dalam menjalankan amanah rakyat
		9. Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan
		10. Mengarusutamakan inovasi dalam pelayanan publik bersifat lintas sektor
		11. Memperbaiki prosedur kerja dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan
		12. Penguatan kapasitas kelembagaan kampung dalam meningkatkan efektivitas dan Alokasi Dana Kampung
		13. Menata struktur organisasi agar makin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan penegakan aturan • • •
	3. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang terintegratif secara sektoral dan spasial
		2. Memperkuat Perencanaan Pembangunan berbasis Data/Bukti (*evidence base planning*) serta penguatan pengendalian pelaksanaan pembangunan
		3. Membuka ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat untuk berperan dalam pembangunan daerah
		4. Memperkuat integrasi perencanaan pembangunan

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
		dengan perencanaan tata guna lahan, kewilayahan serta sektor sehingga prioritas pembangunan dapat terarah, terukur dengan jelas, dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan
		5. Peningkatan pembiayaan melalui kerjasama dengan berbagai pihak dalam pemenuhan infrastruktur
		6. Bantuan pembiayaan infrastruktur bagi kabupaten/kota yang diprioritaskan pada peningkatan konektivitas dalam rangka pengembangan rantai nilai hulu-hilir komoditi unggulan
	4. Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	1. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkuatan kapabilitas APIP dan perkuatan SPIP
		2. Meningkatkan ketepatan waktu dan kualitas penyusunan APBD
		3. Memperkuat dan melanjutkan sistem Tunjangan Kinerja Daerah bagi ASN
		4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan melalui pengawasan kinerja dan pemberantasan korupsi yang tegas
Misi Keempat, Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural Secara Berkelanjutan		
1. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	1. Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas •	1. Peningkatan produktivitas tanaman pangan/perkebunan/peternakan melalui penerapan teknologi, serta fasilitasi pemasaran
		2. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat provinsi yang berbasis penganekaragaman komoditas pangan lokal
		3. Peningkatan dan pemenuhan infrastruktur pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
		4. Pembangunan dan pengembangan klaster ekonomi berbasis wilayah adat dengan komoditi lokal unggulan
		5. Menyiapkan Sarana dan Prasarana Ekonomi Berbasis Keunggulan komoditas tanaman pangan/perkebunan/peternakan masing-masing Wilayah (mendukung pelaksanaan PON XX tahun 2020)
		6. Memantapkan hubungan antar wilayah/daerah/kampung dengan membangun

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
		infrastruktur dan keterkaitan sistem produksi dan distribusi komoditas pertanian dan perkebunan, serta pelayanan yang kokoh serta berkesinambungan.
		7. Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar)
		8. Peningkatan agroindustri lokal yang mampu mendorong perkembangan kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah.
		9. Perbaikan iklim Investasi dan usaha dengan pemihakan kepada sektor UMKM agribisnis sebagai tiang penyerap tenaga kerja terutama OAP.
	2. Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan	1. Pengembangan industri pertambangan yang berkelanjutan
		2. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertambangan
		3. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sektor pertambangan
		4. Perbaikan tata kelola perizinan berbasis SDA dan lahan skala luas
		5. Pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) di lima wilayah adat, serta Politeknik berbasis potensi unggulan
	3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	1. Meningkatkan pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan
		2. Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK)
		3. Pengendalian pengelolaan lingkungan hidup
		4. Konservasi sungai dan danau
		5. Perbaikan tata kelola perizinan berbasis SDA dan lahan skala luas
	4. Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan melalui pelibatan masyarakat sekitar hutan dan pemanfaatan jasa lingkungan
		2. Optimalisasi konservasi sumberdaya alam hayati
		3. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
		atau menghasilkan nilai tambah (value added) komoditas
		4. Peningkatan industri non pertanian (off farm) yang mampu mendorong perkembangan kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah
		5. Meningkatkan kemitraan usaha mikro kecil menengah dengan perbankan dan fasilitasi pemasaran produk
		6. Pengembangan destinasi pariwisata andalan Provinsi Papua
		7. Pengembangan kepariwisataan diutamakan pada kegiatan ekoturisme yang bernilai tambah tinggi, sehingga secara efeitif dan efisien dapat mendukung upaya pengembangan kemandirian ekonomi dengan dampak lingkungan dan budaya serendah mungkin
		8. Menjaga nilai tukar dan daya beli petani, peternak, dan nelayan (BULOG PROVINSI) •
	5. Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya
		2. Peningkatan dan pemenuhan infrastruktur perikanan
	6. Meningkatnya daya saing tenaga kerja, kesempatan dan perluasan kesempatan kerja	1. Peningkatan daya saing tenaga kerja disertai dengan perluasan kesempatan kerja
		2. Pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) di lima wilayah adat, serta Politeknik berbasis potensi unggulan
	7. Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	1. Peningkatan daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor unggulan daerah
		2. Perbaikan tata kelola perizinan berbasis SDA dan lahan skala luas
2. Mewujudkan percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna menopang	1. Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung	1. Meningkatkan akses transportasi antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh masyarakat di wilayah Papua

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
pengembangan wilayah serta akses pada layanan dasar dan pasar	pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah •	2. Memantapkan hubungan antar wilayah/ daerah/ kampung dengan penyediaan infrastruktur transportasi dengan membangun keterkaitan sistem produksi,
		• distribusi, dan pelayanan antar wilayah / daerah yang kokoh serta berkesinambungan
		3. Menyiapkan Sarana dan Prasarana Ekonomi Berbasis Keunggulan Masing-masing Wilayah
		4. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang untuk pembangunan dengan RTRW Provinsi •
	2. Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	1. Pengendalian pemanfaatan ruang
		2. Sosialisasi rencana tata ruang dan penegakan hukum serta konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan
		3. Peningkatan pembinaan penataan ruang dan pertanahan
		4. Peningkatan kapasitas penegakan hukum terhadap rencana tata ruang
		5. Penataan guna lahan permukiman di perkotaan
	3. Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	1. Meningkatkan kapasitas daya tampung jaringan irigasi dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat
		2. Penyediaan dan pengelolaan air baku
		3. Pengendalian banjir dan abrasi pantai
	4. Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	1. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat
		2. Ketersediaan air bersih, sistem sanitasi, pengelolaan persampahan, dan air limbah
	5. Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan	1. Peningkatan ketersediaan energi (listrik / penerangan)
	6. Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah	1. Peningkatan akses informasi dan komunikasi di seluruh wilayah
Misi Kelima, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu		

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Meningkatkan pemerataan pembangunan	1. Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	1. Fasilitasi penataan kelembagaan kampung, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat
		2. Penguatan dan pendampingan tata kelola pemerintahan kampung serta memperkuat peran distrik dalam pembangunan kampung dan pelayanan kepada masyarakat
		3. Melakukan perbaikan kebijakan pembagian dana Otsus ke Kabupaten/kota untuk mengurangi kesenjangan.
		4. Percepatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah terluar dan tertentu.
		5. Mengurangi kesenjangan jender dengan meningkatkan kebijakan pemihakan kepada perempuan dan pengarusutamaan jender dalam strategi pembangunan.
		6. Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar)
		7. Penguatan kapasitas kelembagaan kampung dalam meningkatkan efektivitas dan Alokasi Dana Kampung
	2. Meningkatnya efektivitas upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	1. Peningkatan akses masyarakat di wilayah pegunungan terhadap infrastruktur pelayanan dasar dan perekonomian
		2. Pemenuhan rumah layak huni untuk OAP •
		3. Akselerasi dan afirmasi pendidikan dengan melaksanakan Program Pendidikan anak berprestasi dan unggul Papua
		4. Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar)
		5. Perlindungan sosial untuk generasi emas, lanjut usia, dan difabel
	3. Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	1. Percepatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah terluar dan tertentu.
	4. Meningkatnya pemberdayaan	1. Revitalisasi dan optimalisasi kelembagaan penanggulangan kemiskinan daerah dan SDM

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
	terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS	yang menangani kesejahteraan sosial
		2. Perluasan aksesibilitas penanganan kesejahteraan sosial yang terpadu dan konprehensif ke arah pemberdayaan masyarakat berketahanan sosial
		3. Meningkatkan terwujudnya sinkronisasi kebijakan permasalahan kesejahteraan sosial melalui peran koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dari Pemerintah Provinsi Papua
		4. Perlindungan sosial untuk generasi emas, lanjut usia, dan difabel
	5. Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	1. Fasilitasi rencana kontijensi pada kabupaten/kota yang berisiko tinggi terhadap bencana
	6. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	1. Meningkatkan terwujudnya sinkronisasi kebijakan pemberdaayan perempuan dan pelindungan anak melalui peran koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dari Pemerintah Provinsi Papua
		2. Meningkatkan pastisipasi perempuan dalam pembangunan daerah
		3. Mengurangi kesenjangan jender dengan meningkatkan kebijakan pemihakan kepada perempuan dan pengarusutamaan jender dalam strategi pembangunan
		4. Meningkatkan perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Prioritas pembangunan RKPD tahun 2020 disusun dengan berlandaskan dan memperhatikan: (1) tema dan prioritas pembangunan nasional tahun 2020; (2) tema dan prioritas RPJMD Provinsi Papua Tahun 2018-2023 untuk pembangunan di tahun 2020; (3) arah kebijakan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025; (4) isu-isu strategis pembangunan provinsi yang berhubungan dengan isu nasional; (5) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/ SDGs); (6)

RTRW Provinsi Papua; dan (7) Pokok-pokok pikiran DPRP Provinsi Papua untuk penyusunan RKPD 2020. Berdasarkan ke-7 landasan tersebut selanjutnya ditetapkan prioritas-prioritas pembangunan daerah Provinsi Papua tahun 2020.

Prioritas pembangunan yang telah dirumuskan tersebut dikaitkan dengan sasaran pembangunan Provinsi Papua dalam dokumen RPJMD Provinsi Papua tahun 2019-2023. Sasaran pembangunan tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi kepala satuan kerja perangkat daerah.

4.2.1. Fokus Pembangunan Tahun 2020

RKPD tahun 2020 merupakan tahapan ke dua dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2018-2023 dalam rangka mewujudkan visi "Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang Berkeadilan". Untuk Pembangunan tahun 2020 ini difokuskan pada upaya "melanjutkan peningkatan kualitas SDM dan perekonomian daerah berbasis wilayah dan berkelanjutan disertai pemantapan rasa aman dan tata kelola", sebagaimana fokus pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 di bawah ini.

Gambar 4.1 Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2018-2023

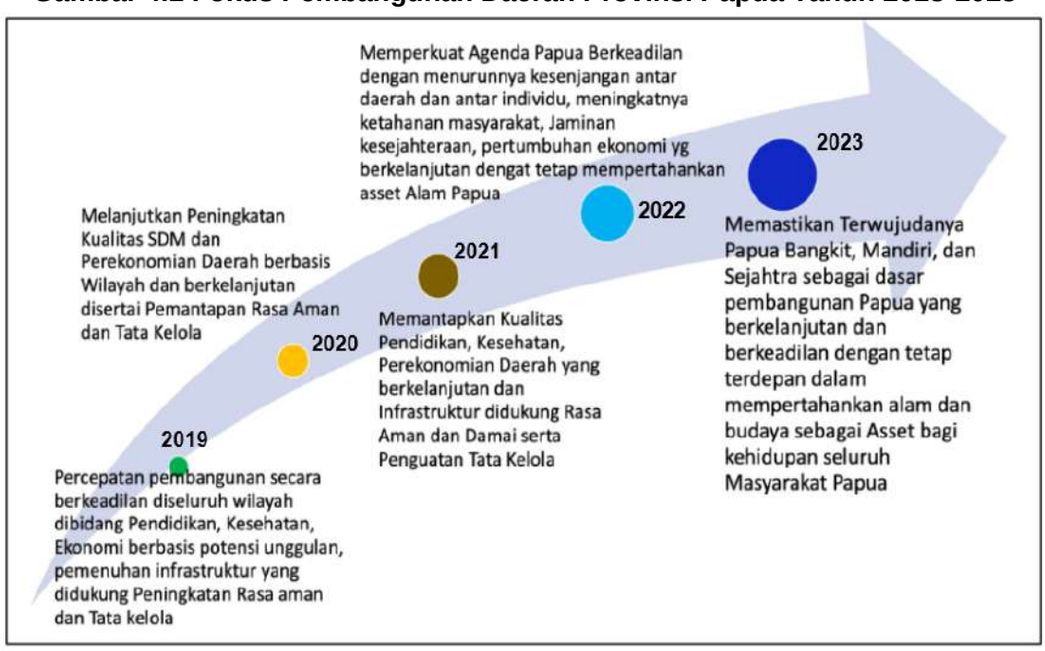

Selain fokus pembangunan yang menjadi arah kebijakan pembangunan di tahun 2020, penyusunan tema pada tahun ini juga

merujuk kepada isu-isu strategis nasional, isu strategis RPJMD Provinsi Papua 2018-2023, dan isu strategis RKPD Provinsi Papua Tahun 2020, yang dapat dijabarkan kesandingannya sebagai berikut.

Tabel 4.2 Sandingan Isu-Isu Strategis Nasional, RPJMD Provinsi Papua Tahun 2018-2023 dan RKPD 2020

Isu Strategis Kewilayahan Dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024	Isu Strategis RPJMD Provinsi Papua 2018-2023	Isu Strategis RKPD Provinsi Papua 2020
1. Pemenuhan pelayanan dasar	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi), baik dari Status Golongan Pendapatan, Gender maupun Antar Wilayah	1. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, peran pemuda, perempuan, internalisasi nilai budaya, dan daya saing olah raga terutama pada PON XX
	2. Pemantapan Rasa Aman dan Suasana Demokrasi yang Kondusif sebagai Landasan Utama Pembangunan	2. Peningkatan keamanan dan ketertiban, serta kehidupan sosial politik berdemokrasi yang kondusif
	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Publik	3. Percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan profesionalisme aparatur dalam memberi pelayanan publik
2. Peningkatan daya saing daerah • 3. Penguatan pusat pertumbuhan wilayah	4. Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan berbasis Komoditas dan Karakteristik Lokal didukung oleh Pembangunan Infrastruktur yang Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.	4. Percepatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur kewilayahan yang terintegrasi dengan pengembangan komoditas unggulan lokal

Isu Strategis Kewilayahan Dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024	Isu Strategis RPJMD Provinsi Papua 2018-2023	Isu Strategis RKPD Provinsi Papua 2020
4. Penurunan ketimpangan antarwilayah • 5. Pemanfaatan Ruang dan Urbanisasi	5. Pengurangan Kesenjangan, Peningkatan Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas antar Wilayah dan Kabupaten serta Peningkatan Kualitas Ekosistem dan Jasa Lingkungan	5. Pemerataan pembangunan dan konektivitas antarwilayah

Penjabaran isu-isu strategis daerah yang termuat dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2018-2023 di atas, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi), baik dari Status Golongan Pendapatan, Gender maupun Antar Wilayah**

   Isu strategis ini didasarkan pada kondisi ketertinggalan yang dialami oleh hampir semua wilayah di Papua dalam bidang pendidikan, kesehatan dan jaminan ketersediaan gizi yang memadai.

   Dalam bidang pendidikan, beberapa indikator menunjukkan bahwa daya saing pendidikan masih rendah yang disebabkan oleh akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas masih terkendala oleh berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan pokok misalnya adalah; cakupan sekolah pada daerah dengan aglomerasi rendah belum optimal, tenaga pendidik belum berkualitas dan merata, penerapan kurikulum sesuai dengan standar belum maksimal terutama di wilayah adat Lapago dan Mepago dan Kedisiplinan tenaga pengajar terhadap pelaksanaan tugas masih relatif rendah

   Demikian juga dalam bidang kesehatan yang kondisinya hampir sama dengan bidang pendidikan, Akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas masih menjadi faktor krusial di hampir semua wilayah Papua yang ditandai dengan masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari masih rendahnya Angka Harapan Hidup (AHH) walaupun terlihat secara

rerata mengalami peningkatan di Papua, Demikain juga terkait *stunting* (pendek) perlu mendapatkan perhatian di Papua karena capaiannya yang berada diatas rata-rata Indonesia. Fakta lainnya lagi adalah Angka kematian ibu (AKI) Provinsi Papua per 100.000 penduduk selama ini termasuk dalam kategori tinggi, dimana data terakhir tahun 2017 menunjukan terjadi kematian ibu sebesar 289 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Provinsi Papua secara keseluruhan masih rendah, hanya 41,52% di tahun 2017, termasuk juga kunjungan K4 lengkap bagi ibu hamil sangat rendah hanya sebesar 40,90% pada tahun 2017. Sedangkan dari sumber daya kesehatan yang tersedia, terlihat bahwa sebaran puskesmas di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2016 belum terdistribusi secara merata ke 29 kabupaten/kota. Kondisi yang lebih memprihatinkan adalah rasio dokter terhadap penduduk, dimana pada tahun 2016 hanya mencapai 24,13 dokter per 100.000 penduduk. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab juga belum maksimalnya penanganan penyakita malaria di Provinsi Papua, sehingga sampai tahun 2017 tercatat API Provinsi Papua paling tinggi di Indonesia yaitu 59 per 1.000 penduduk, yang cenderung meningkat bila dibandingkan tahun 2014. Dalam hal kasus HIV/AIDS terindikasi jumlah kasus kematian akibat virus mematikan tersebut terus mengalami kenaikan, hingga pada tahun 2017 tercatat ada 1.883 kematian akibat HIV/AIDS

Selanjutnya dalam bidang gizi, Papua seringkali masih dibayangi oleh adanya ancaman kelaparan di beberapa wilayah yang disebabkan oleh kondisi alam ataupun masalah rantai distribusi pangan yang kurang lancar serta beberapa penyebab eksternal lain. Oleh sebab itu, Upaya penciptaaan ketahanan pangan merupakan prasyarat untuk kedaulatan pangan. Kondisi Ketahanan pangan di Papua sampai dengan saat ini masih rendah. Untuk itu pengembangkan dan peningkatan produksi komoditi pangan local dan membudayakan konsumsi pangan local perlu ditingkatkan di Papua untuk mencapai kedulatan pangan dan menciptakan ketahanan pangan. Masalah pangan di Papua

merupakan salah satu penyebab gizi buruk kondisi *stunting* di Papua

2. **Pemantapan Rasa Aman dan Suasana Demokrasi yang Kondusif sebagai Landasan Utama Pembangunan**

   Kondisi kurang stabilnya kemanan serta demokrasi lokal yang kurang kondusif seringkali mengganggu aktivitas pembangunan daerah di beberapa wilayah di Provinsi Papua. Beberapa rumusan permaalahan yang patut diperhatikan kedepan terkait dengan isu strategis **Pemantapan Rasa Aman dan Suasana Demokrasi yang Kondusif sebagai Landasan Utama Pembangunan** adalah; masih adanya kasus-kasus pelanggaran HAM, tingkat kesadaran terhadap HAM masih rendah, masih tingginya gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum, masih tingginya konflik sosial, belum optimalnya pelayanan keagamaan antar umat, menurunnya toleransi kehidupan beragama, belum maksimalnya toleransi antar umat beragama, belum optimalnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, belum optimalnya kehidupan berdemokrasi secara baik, masih banyaknya kasus money politic dalam berdemokrasi.

3. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Publik**

   Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik menjadi satu isu krusial yang menjadi penyokong penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkualitas. Wujud dari penguatan tata kelola adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas serta meningkatnya pelayanan kepada publik. Disiplin ASN meningkat secara signifikan dan Pemerintah Provinsi Papua telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK atas Laporan Keuangan Daerah. Hal ini memberikan indikasi bahwa upaya keras dalam memperbaiki tatakelola pemerintahan selama lima tahun terakhir, telah berada dalam arah yang benar. Meskipun demikian capaian selama periode sebelumnya masih perlu ditingkatkan dan dimantapkan. Harus ada upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktik tatakelola pemerintahan ini.

   Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan berkelanjutan.

Reformasi birokasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Pada periode 2013-2018 telah dilakukan Reformasi Birokrasi, dilakukan dengan langkah-langkah peningkatan disiplin bagi ASN, peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan penerapan e-Government Provinsi Papua pada perencanaan dan penganggaran daerah, pendapatan daerah, investasi daerah, serta penerapan system Tunjangan Kinerja Daerah. Kesemuanya itu, diharapkan dapat membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan pelayanan publik dan penanggulangan korupsi.

Oleh karena itu langkah-langkah yang telah dilakukan akan dimantapkan dan diperkuat, demikian pula perubahan mind-set, culture-set dan pengembangan budaya kerja akan dilakukan secara lebih cepat dan terarah. Demikian juga upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantas korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government) dan bebas KKN harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, dan akan dipimpin langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Reformasi Birokrasi ini juga akan memperkuat hubungan kelembagaan yang harmonis antara Pemerintah, Provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan implementasi Otonomi Khusus Papua secara murni dan konsekuen

4. **Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan berbasis Komoditas dan Karakteristik Lokal didukung oleh Pembangunan Infrastruktur yang Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.**

   Pertumbuhan ekonomi menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan pembangunan yang dlakukan oleh multistakeholder di Papua. Hal ini terkait dengan penciptaan kue pembangunan yang akan didistribusikan kepada seluruh masyarakat Papua. Patut dijadikan pelajaran bahwa proses pembangunan ekonomi pada masa lalu telah menciptakan pertumbuhan yang memadai namun belum mampu mewujudkan pemerataan dan keadilan yang

menjadi harapan seluruh masyarakat. Penyebabnya antara lain, belum cukup inklusifnya pertumbuhan ekonomi yang tercipta yang diandai dengan rendahnya pelibatan tenaga kerja lokalserta tumpuan pertumbuhan yang berbasis sektor ekstraktif yang cenderung merusak lingkungan hidup.

Pada masa mendatang perlu dinisiasi pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan berbasis komoditas dan karakteristik lokal didukung oleh pembangunan infrastruktur yang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian perlu penguatan supra dan infrastruktur bagi percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan pada sektor-sektor ekstraktif seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan perikanan dan kelautan, Disamping itu perhatian juga harus diarahkan pada pengembangan sektor-sektor non ekstraktif dan ekonomi kreatif yang memberi nilai tambah berlipat seperti; sektor industri, perdagangan dan pariwisata.

5. **Pengurangan Kesenjangan, Peningkatan Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas antar Wilayah dan Kabupaten serta Peningkatan Kualitas Ekosistem dan Jasa Lingkungan**

   Isu strategis pengurangan kesenjangan, peningkatan pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah dan kabupaten serta peningkatan kualitas ekosistem dan jasa lingkungan penting artinya dalam konteks pembangunan di Papua.

   Terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kabupaten bisa jadi disebabkan oleh tidak memadainya infrastruktur wilayah yang mengakibatkan mahalnya investasi bagi pengembangan wilayah disamping belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal sehingga nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu wilayah terhitung tidak memadai dan kurang menarik bagi investor. Disamping itu, pengelolaan potensi suatu wilayah seringkali berhadapan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup, kedepan harus dicari terobosan pengembangan potensi wilayah yang selaras dengan peningkatan kualitas ekosistem dan jasa lingkungan.

RPJMD Provinsi Periode 2018-2023 merupakan tahap ke tiga dalam proses pencapaian Visi Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua.

Visi Pembangunan Daerah Jangka Panjang seperti yang telah dituangkan dalam dokumen Rancangan RPJPD Provinsi Papua tahun 2005-2025 adalah Terwujudnya Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik. Dimana agenda atau tema tahap ke tiga pembangunan jangka panjang Provinsi Papua yang sesuai dengan periode RPJMD Provinsi Papua 2018-2023, ditujukan untuk Memantapkan Pembangunan yang didukung SDM yang Berkualitas dan Kemapanan di Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik, Lingkungan. Arah kebijakan RPJPD ini juga menjadi rujukan dalam penyusunan tema pembangunan 2020.

Pembangunan Provinsi Papua tidak akan terlepas dari arah dan kebijakan pembangunan nasional, oleh karenanya tema pembangunan nasional di tahun 2020 juga menjadi rujukan perumusan tema pembangunan Provinsi Papua tahun 2020. Dalam hal ini telah ditetapkan Tema RKP 2020 adalah ***"Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas"***, yang memuat 5 (lima) prioritas nasional yaitu : (1) Pembangunan Manusia; (2) Penguatan Konektivitas; (3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi; (4) Pemantapan Ketahanan Energi, pangan, dan sumber daya air; dan (5) Stabilitas Keamanan Nasional.

Berdasarkan isu-isu strategis nasional dan daerah pada tahun 2020, tema RKP 2020, serta mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005-2025, selain itu karena pendekatan penyusunan RKP dan RKPD 2020 dilakukan dengan penguatan pelaksanaan kebijakan *money follow program priority*, selanjutnya dengan memperhatikan bahwa tahun 2020 merupakan pelaksanaan PON XX, yang menjadikan RKPD 2020 sangat strategis untuk memastikan tercapainya sasaran-sasaran utama RPJMD 2018-2023 dalam proses mewujudkan *Papua Bangkit, Mandiri Dan Sejahtera Berkeadilan*, maka secara substansial rumusan terhadap tema pembangunan RKPD tahun 2020 adalah: ***"Peningkatan Kualitas Hidup Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan"***. Dengan unsur utama dalam tema tersebut adalah : (1) Peningkatan Kualitas SDM Dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar; (2) Pemantapan Rasa Aman, Tentram & Kedewasaan Berdemokrasi; (3) Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan; (4) Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Dan Peningkatan Investasi; dan (5) Pemantapan Infrastruktur Dasar Serta Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan Dan Tertentu.

4.2.2. Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada tahun 2014, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melakukan pembaruan *Millenium Development Goals* (MDGs) dengan agenda pembangunan global yang bernama *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan-tujuan yang tertuang dalam SDGs merupakan penyempurnaan tujuan pembangunan MDGs. Melalui mandat SDGs, PBB berupaya untuk mewujudkan sumberdaya manusia global yang berkualitas, meningkatkan perekonomian global yang tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk 2016-2030 meliputi:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara;

11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagai upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup, 17 Tujuan dan 169 target sebagaimana tertuang dalam agenda SDGs dinilai sangat relevan untuk konteks pembangunan Papua. Untuk itu, Provinsi Papua juga berkomitmen untuk melaksanakan agenda-agenda SDGs yang targetnya dapat tercapai pada tahun 2030.

Berdasarkan hasil sintesis terhadap 169 TPB, terdapat 10 isu strategis prioritas pembangunan berkelanjutan yang menjadi penekanan dan urgensi bagi pembangunan di Provinsi Papua sebagai berikut:

1. Administrasi kependudukan
2. Akses terhadap air bersih dan sanitasi layak
3. Akses terhadap pelayanan kesehatan
4. Akses terhadap pendidikan
5. Ekonomi lokal dan pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan
6. Kerusakan hutan dan lingkungan

7. Ketahanan energi
8. Ketahanan pangan
9. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
10. Tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum

Selanjutnya dari hasil KLHS, maka TPB yang perlu diperkuat dalam perencanaan program berdasarkan isu strategis adalah sebagai berikut:

a. Menjaga dan memperbaiki transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum dan koordinasi (tata kelola) Lingkungan hidup dan Sumberdaya Alam;
b. Memastikan masyarakat Papua, khususnya OAP mendapatkan Pendidikan yang layak dan memadai, Kualitas Sanitasi dan Air Bersih yang layak, Asupan Gizi dan Kesehatan Lingkungan yang baik, Pemerataan Pembanguan dan Pembangunan Sumberdaya Manusia yang inklusif;
c. Melakukan perencanaan dan menginternalisasi pembangunan ekonomi hijau dengan tetap menjaga dan melestarikan budaya masyarakat dan kearifan lokal dalam pembangunan dan tata guna lahan.

4.2.3. Telaah RTRW Provinsi Papua

Salah satu dasar penentuan prioritas daerah adalah mempertimbangkan arahan RTRW Provinsi Papua khususnya wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi untuk dapat diprioritaskan. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi,
sosial, budaya dan atau lingkungan.

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wewenang Pemerintah Provinsi dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi adalah melaksanakan:

1. Penetapan kawasan strategis provinsi;
2. Perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;
3. Pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi;
4. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi;

5. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
6. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi.

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi mencakup aspek yang terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis. Pemerintah daerah kabupaten/kota tetap memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan aspek yang tidak terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga memiliki kewenangan dalam penyusunan Rencana Detail terhadap Kawasan Strategis Provinsi.

Berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033 Sistem perkotaan di Provinsi Papua terdiri atas PKN (Pusat Kegiatan Nasional), PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), dan PKL (Pusat Kegiatan Lokal. PKN dan PKW ditentukan oleh pemerintah, sedangkan PKL ditetapkan dalam RTRW Provinsi berdasarkan kajian akademis dan usulan pemerintah kabupaten/kota. Untuk mendorong perkembangan kawasan perbatasan ditentukan PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional) .

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) merupakan kawasan perkotaan yang perperan sebagai pintu gerbang ke kawasan internasional dan memiliki potensi untuk mendorong perkembangan wilayah sekitarnya dan berfungsi sebagai pusat pengembangan kegiatan jasa, pusat pengolahan, simpul transportasi dengan skala pelayanan nasional atau beberapa provinsi.

a. Rencana pengengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Provinsi Papua

1) Jayapura

PKN Jayapura memiliki 2 wilayah administratif yakni Kota dan Kabupaten Jayapura. Sebagai simpul utama transportasi nasional, Kota Jayapura memiliki pelabuhan laut, dan Kabupaten Jayapura memiliki bandara Sentani. Bandara Sentani saat ini memiliki peran sebagai simpul utama transportasi skala nasional. Berdasarkan pertimbangan

tersebut, penentuan peran PKN tidak hanya berada di Kota Jayapura tetapi juga kawasan perkotaan Kabupaten Jayapura.

2) Timika

Timika, merupakan simpul transportasi utama yang melayani wilayah selatan Provinsi Papua dan kawasan pertambangan sebagai kawasan strategis nasional, didukung dengan keberadaan bandara Mozes Kilangin.

Beberapa kawasan perkotaan di Provinsi Papua memiliki potensi berperan sebagai Pusat Kegiatan Nasional.

3) Merauke

Merauke di wilayah selatan diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhan bagian selatan Provinsi Papua. Merauke saat ini memiliki bandara Mopah dan pelabuhan, didukung dengan kebijakan pengembangan bandara, serta perannya sebagai kawasan andalan.

4) Biak

Berdasarkan pertimbangan luas wilayah yang dilayani, dan sebagai upaya penyeimbang perkembangan di wilayah barat-utara-timur-selatan, diusulkan memacu perkembangan pusat pelayanan Biak. Biak saat ini memiliki bandara Frans Kaisepo yang kualitas prasarananya layak menjadi bandara internasional. Biak sebagai PKNp (Pusat Kegiatan Nasional Promosi) didukung dengan perannya saat ini sebagai PKW, sebagai kawasan strategis nasional, dan sebagai kawasan andalan. Potensi Kabupaten Biak dalam pengembangan pariwisata bahari dan merupakan pusat pergerakan nasional dan wilayah sekitarnya.

5) Wamena

Wamena sebagai pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di wilayah Pegunungan Tengah diarahkan dapat mendorong percepatan pertumbuhan bagian tengah Provinsi Papua. Wamena merupakan pusat distribusi barang dan jasa untuk wilayah Pegunungan Tengah dan merupakan pintu masuk dan keluarnya barang dan orang.

b. Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Provinsi Papua

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah perkotaan sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten. PKW ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
- kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau
- kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

Dalam RTRWN, pusat-pusat perkotaan di Provinsi Papua yang ditentukan sebagai PKW adalah Merauke, Biak, Muting, Bade, Wamena, Nabire, Arso, Sarmi. Dengan diusulkannya Merauke, Wamena, dan Biak sebagai PKNp, maka ketiganya tidak lagi sebagai PKW.

1) Nabire

Nabire memiliki peran sebagai pusat pelayanan wilayah barat. Keberadaan jalan provinsi yang menghubungkan Nabire-Waghete-Enarotali-Timika, dan pelabuhan pengumpan, dan bandara Wanggar menjadikan Nabire memiliki peran strategis menunjang perkembangan wilayah sekitarnya.

2) Muting

Muting pada saat ini merupakan pusat pelayanan wilayan bagian selatan, dan sebagai titik pertemuan dari Boven Digoel dan Pegunungan Bintang menuju Merauke.

3) Sarmi

Pada saat ini merupakan pusat pelayanan wilayah utara bagian tengah.

Beberapa kawasan perkotaan di Provinsi Papua memiliki potensi berperan sebagai PKW, di samping perkotaan Nabire, Muting, dan Sarmi. Pusat-pusat perkotaan tersebut dapat dipromosikan sebagai PKWp adalah sebagai berikut:

4) Kepi

Kepi merupakan ibukota Kabupaten Mappi.

5) Enarotali

Enarotali merupakan pusat perkotaan yang akan dikembangkan sebagai PKW promosi. PKW promosi Enarotali ini merupakan pusat distribusi barang dan jasa untuk beberapa kabupaten seperti Intan Jaya, Deiyai, dan Puncak.

5) Dekai

Dekai di Kabupaten Yahukimo merupakan pusat perkotaan yang akan dikembangkan sebagai PKW Promosi. Dekai merupakan pusat simpul masuknya barang dan jasa serta pusat pengembangan industri di wilayah selatan masuk ke Pegunungan Tengah dari Pelabuhan Logpon.

6) Waris

Waris memiliki fasilitas perkotaan memadai.

c. Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah perkotaan sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu kabupaten atau beberapa distrik. Kriteria penentuan PKL adalah:

- kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau
- kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Penetapan PKL diarhkan pada setiap Ibukota Kabupaten yang tidak memiliki fungsi sebagai PKN maupun PKW.

d. Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah kota atau perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan khusus dalam menunjang sektor strategis nasional, menunjang pengembangan wilayah baru atau penyebaran kegiatan ekonomi dan berfungsi

sebagai daerah penyangga aglomerasi pertumbuhan pusat kegiatan yang sudah ada. PKSN ditetapkan dengan kriteria:

1. pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga;
2. pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga;
3. pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/atau
4. pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.

RTRWN menentukan PKSN berada di Arso (Kabupaten Keerom), Tanah Merah (Kabupaten Boven Digoel), dan Merauke (Kabupaten Merauke), namun perlu ditambahkan dengan Oksibil (Kabupaten Pegunungan Bintang) dan Kota Jayapura, yang merupakan kabupaten/kota perbatasan dengan Papua New Guinea. Oksibil dan Kota Jayapura ditentukan sebagai PKSNp.

Penentuan PKSN perlu dipertegas dengan arahan lokasi yang lebih tepat sesuai kriteria. Beberapa simpul lintas batas yang akan dikembangkan yaitu:

a. Kampung Skouw Sae, Distrik Muara Tami, di Kota Jayapura;
b. Kampung Kombut, Distrik Kombut, di Kabupaten Boven Digoel;
c. Kampung Toray, Distrik Elikobel, di Kabupaten Merauke;
d. Kampung Waris, Distrik Waris, di Kabupaten Keerom;
e. Kampung Muara Asbi, Distrik Batom di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Pengembangan lintas batas dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat di kawasan perbatasan, termasuk pelayanan kegiatan lintas batas antarnegara.

4.2.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRP Provinsi Papua Terhadap Penyusunan RKPD 2020

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan

kapasitas riil anggaran. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.2.4.1. Rumusan Pokok-Pokok Pikiran DPR Provinsi Papua

Salah satu tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua (DPRP Papua) ialah melakukan fungsi pengwasan pelakanaan pembangunann di Provinsi Papua yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Konsep kemitraan antara DPRP dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua, tercermin dari partisipasi dewan dalam memberikan arahan prioritas daerah berdasarkan kondisi faktual dan aspirasi masyarakat yang diperoleh dalam setiap agenda DPRP Papua. Sejalan dengan itu, saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Papua sedang menyusun Dokumen Perencanaan Tahunan RKPD Tahun 2020, dalam kerangka menguatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan tersebut, maka DPRP memiliki tanggung jawab dalam memberikan arahan dan masukan dalam bentuk Pokok-Pokok Pikiran Dewan, yang nantinya akan disingkronkan dan disinerjikan oleh Pemerintah Daerah dalam teknis Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2020. Sehingga menjadi sebuah prinsip bahwa Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua menjadi bahan masukan yang sangat penting didalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi papua Tahun 2020. Adapun rumusan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua, sebagaimana yang telah di input oleh masing-masing Komisi DPRD sebagai berikut.

a. Urusan Pemerintahan Umum, Hukum, Politik, Pertahanan dan Keamanan

(1) Upaya untuk meningkatkan pelayanan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di seluruh tanah papua perlu ditingkatkan.

(2) Sengketa pemilukada dibeberapa kabupaten yang belum tuntas hendaknya diselesaikan dengan mengikutsertakan semua steak holder.

(3) Konflik tapal batas yang terjadi dibeberapa daerah, komisi I memandang perlu untuk diselesaikan secara bijaksana tampa menimbulkan masalah baru dikemudian hari.

(4) Kepemilikan ganda atas tanah, yang diklaim oleh masyarakat sebagai hak ulayat, perlu diatur dalam regulasi hukum adat yang tidakbertentangan dengan hukum positif.

(5) Rekruitmen aparatur sipil negara (ASN) maupun TNI/POLRI, hendaknya memperhatikan Putra/Putri Asli papua dengan porsi 80% dan Non OAP sebesar 20%.

(6) Permasalahan Hak Asasi manusia (HAM) yang terjadi selama ini terkesan berjalan di tempat. Komisi I memandang perlu untuk diselesaikan secara bijaksana oleh Pemeerintah Daerah serta Lembaga terkait termasuk TNI/POLRI.

(7) Permasalahan yang terkait dengan konflik di DPRD Mimika telah berlangsung lebih dari dua tahun. Belum terlihat tanda-tanda penyelesaian, Komisi I mengharapkan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk segera menyelesaikan secara baik.

b. Urusan Otonomi Khusus

(1) Perlu ditata manajemen keuangan bagi para siswa dan mahasiswa papua yang kuliah di luar papua dan di luar negeri agar tidak menghambai proses beiajar mengajar.

(2) Perlu dicari system yang lebih efisien agar khusus bahasa inggris dilakukan di provinsi papua dan setelah lulus yang bersangkutan boleh melanjutkan pendidikan ke luar negeri.

(3) Bagi mereka yang kuliah diluar papua dan di luar negeri sebaiknya diwakili oleh 5 wilayah adat.

c. Urusan Pendidikan

(1) Masih banyak status guru yang belum terdaftar dalam proses pelimpahan pada Dinas Pendididkan Provinsi papua, baik guru SMA dan SMK.

(2) Masih banyak terdapat sekolah-sekolah yang tidak jelas pendiriannya yang didirikan oleh masyarakat atau yayasan yang status pendiriannya belu diakui pemerintah.

(3) Belum menentukkan pengambilan gaji bagi guru SMA/SMK pada bank yang belum di tunjuk oleh pemerintah daerah provinsi papua dalam ha! ini Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Provinsi papua.

(4) Masih banyak terdapat SMA/ SMK baik negeri maupun sawasata yang belum mampu melaksanakan ujian nasional/UNBK hingga sampai saat ini sehingga siswa kelas Ill dititipkan pada SMK/SMA yang telah diakui Pemerintah I Terakreditasi.

(5) kurang kontrolnya dinas pendidikan dan pengajaran provinsi papua sehingga masih banyak SMA /SMK tidak memiliki sarana prasarana dan infrastruktur sesuai standar normative yang dltentukan oleh pemerintah.

(6) masih banyak kepala sekolah yang belum memiliki sertifikasi guru, sehingga tidak mampu melaksanakan manajemen pendididkan di SMA dan SMK.

(7) Masih terdapat guru - guru yang belum mengikuti sertifikasi bidang studi sesuai dengan kompetensinya.

(8) Masih terjadi perbedaan yang tinggi antara kualitas pendiddikan pada sekolah - sekolah di ibu kola kabupaten dan sekolah - sekolah yang berada di kampung - kampung. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di provinsi papua.

d. Urusan Kesehatan

(1) Persoalan kesehatan di provinsi papua terutama di era otonomi khusus akan terjadi integrasi antara kartu Papua (KPS) dan badan penyelenggraan jaminan Kesehatan (BPJS)

(2) Hal ini sangat berkaitan erat dengan dinas kependuudkan dan dinas social untuk mendata seluruh pendudukan papua untuk dilayani BPJS. Walaupun KPS dintegrasikan ke bpjs tetapi harapan komisi v apa yang dilakukan KPS selama ini tetap dipertahankan. Kondisi manajemen rumah sakit dok 2 segera ditinjau kembali. Hal ini dipertanyakan komsi v karena manajemen rumah sakit dok 2 terkesan buruk alat -ala! kesehatan tidak berfungsi dengan baik untuk melayani masyarakat dengan fasilitas yang ada banyak sudah rusak

(3) Masih terdapat banyak tunggakan dana yang terdapat di berbagai rumah sakit baik swsata maupun pemerintah yang belum dilunasi oleh BPJS.

(4) Masih banyak terdapat puskesmas di daerah - daerah terpencil tidak memiliki alat kesehatan dan dokter -dokter yang menangani masalah kesehatan di daerah.

(5) Banyak rumah sakit di Kabuapten/kota yang tidak memiliki dokter spesialis serta alat kesehatan yang memadai. Hal ini dapat kita dilihat dari banyaknya rujukan ke rumah dok 2 jayapura. Hal lain juga perlu disampaikan kepada pemerintah provinsi papua barat untuk mendirikan rumah sakit jiwa sehingga tidak menyerap pasien dari pemerintah provinisi papua.

e. Urusan Sosial

(1) Dana 10% bagi bantuan keagamaan sebagai perpuluhan kepada sin ode dan keuskupan komisi V lima meminta dalam bentuk hibah uang kepada masing - masing sinode tidak dalam bentuk program kegiatan biro kesra.

(2) Pembangunan gereja induk dibawah sinode - sinode dan keuskupan dapat dibantu dari otsus sampai tuntas.

(3) Fungsi BPN segera membuat sertifikat hak pakai dan hak guna bagunan kepada semua ternpat ibadah.

f. Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(1) Sampai saat ini masih banyak infrastruktur jalan dan jembatan pada daerah pelosok yang belum terkoneksi dengan baik;

(2) Belum maksimalnya pemeliharaan bangunan fisik penunjang kegiatan masyarakat;

(3) Program-program pembangunan infrastruktur yang diusulkan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang berorientasi pada jalan, jembatan, bangunan-bangunan kantor pelayanan masyarakat, gedung sekolah, terminal-terminal, bandar udara, dan dermaga-dermaga penghubung yang nantinya akan menghubungkan daerah satu ke daerah yang lain;

(4) Pembangunan infrastruktur harus dapat dirasakan juga sampai pada pelosok-pelosok daerah terpencil masyarakat dalam Provinsi Papua.

g. Urusan Pemuda dan Olah Raga

Partisipasi Kabupaten yang menyelenggarakan PON masih rendah. Hal ini merupakan pekerjaan besar Komisi V sebagai wakil Rakyat untuk mendorong pemerintah daerah dalam hal ini (PB PON) dan KONI Provinsi dapat bekerja extra ketat guna mensukseskan PON XX tersebut.

h. Urusan Ketenagakerjaan

Dalam rangka pengolahan hasil pangan lokal maka diperlukan adanya pelatihan Tenaga Kerja Penghasil Pangan Lokal yang dilakukan dengan Balai Latihan Kerja yaitu pengolaan basil sagu dan ubi scrta kerja kegiatan ini fokuskan Kabupaten Jayapura, Kabupaten Asmat, Kabupaten Supiori, Kabupaten Keplauan Yapen, Kabupaten Nabire dan Kota jayapura

i. Urusan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

Dalam mendukung pengembangan bidang pertanian dalam rangka mcndukung suksesnya PON XX maka perlu diberikan dukungan modal bagi mama- mama pengrajin, basil kerajinan tangan dan pengrajin kulit kayu dan juga usaha-usaha kecil di bidang Ekonomi Kreatif. Dukungan modal tersebut diberikan kepada mama-mama di wilayah Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Lainnya tempat pelaksanaan PON XX.

j. Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan

Diperlukan Pengembangan Pangan Lokal di masing-rnasing keluarga, Kampung dengan cara tiap kampung di wajibkan membangun, budidaya Lumbung Pangan Lokal minimal 5 hektar. Dalam kaitan itu Pemeritah Provinsi Papua harus dapat menetapkan Sentra Pengembangan Pangan Lokal, sesuai dengan Potensi daerah yang ada (yang sedang dikerjakan dan yang telah ada secara turun temurun atau pernah dikembangkan pada Zaman Belanda). Selain itu, dalam peningkatan potensi daerah di Provinsi Papua terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan :

(1) **Sistem Pemasaran,** Pemasaran hasil pangan lokal haruslah dapat dilakukan oleb Pemerintah melalui BUMD atau Koperasi Mitra, yang selama ini serius bekerja untuk

membantu Petani dan Pedagang Orang asli Papua ataupun koperasi-koperasi binaan, teknis yang diusul adalah hasil Pangan Lokal atau Komoditi Pertanian Masyarakat Papua dibeli Langsung oleh Pernerintah melalui BUMD atau Koperasi-koperasi. Selanjutnya, hasilnya pengolahan tersebut dijual kepada Toko - Toko modern, Perusahaan di Papua dengan mewajibkan kepada ASN di Pemerintah Provinsi/ Kabupaten untuk mengambil di BUMD/Koperasi. Hal ini dilakukan agar hasil produksi cepat laku di pasaran dan ada peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk kepastian Usaha, Pemerintah pcrlu menetapkan harga beli dari masyarakat dan juga harga jual agar BUMD/ Koperasi-koperasi rnernpcroleh kcuntungan.

(2) Pengembangan Industri Berdasarkan Komoditas Lokal, Setelah dilakukan Penampungan dari pasar lokal maka langkah berikutnya yang hams dilakukan adalah Pengembangan Industri Pangan Lokal di Propinsi Papua antara lain :

1. **lndustri Tepung sagu,** Dalam Rangka Pengembangan Pangan Lokal khususnya sagu maka diperlukan adanya sebuah pabrik pengolahan sagu di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Asrnat, Kabupaten Keerom, Kabupaten Supiori dan Kabupaten Yapen , untuk pengolahan hasil sagu milik masyarakat adat Papua.
2. **lndustri Tepung dari Ubi Jalar,** Pangan Ubi yang dibudidayakan oleh masyarakat dalam rangka pengembangan kami mendorong menyelesaikan Industri Tepung dari Ubi di Kabupaten Keerom di Tahun 2019 agar kemudian seluruh hasil pertanian dari masyarakat dapat itampung & dibeli oleh industri ini dan ada peningkatan pendapatan masyarakat serta basil dari industri ini dapat digunakan juga untuk kepcntingan pelaksanaan PON XX.
3. **Industri Minyak Buah Merah,** Dalam pengembangan pangan lokal buah merah maka buah merah yang telah ditampung dikernbangkan rnelalui lndustri minyak buah merah dikabupatenJayawijaya.

a) **Industri Kopi,** Pengembangan Pangan yang ditanam olch masyarakat maka perlu pengembanagn Industri kopi yang telah dikembangan sejak zaman belanda hingga sckarang oleh karena itu perlu dibangun Industri kopi di Papua antara lain : (a) Kopi Robusta**,** Pengembangan Kopi Robusta difokuskan di Kabupaten Yapen khusunya berlokasi Ambai diru; (b) Kopi Arabika**,** Pengambangan Kopi Arabika difokuskan di Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabuapten Lani Jaya dan Kabupaten Puncak Jaya

(3) Bantuan Modal Usaha

Mendorong pengembangan dan peningkatan hasit produksi kakao di Kabupaten Jayapura dengan cara memberikan dukungan modal usaha bagi petani dan peralatan yang memadai.

k. Urusan Pariwisata

Dalam rangka pengembangan pariwisata maka diperlukan adanya program pembukaan daerah tujuan wisata (DTW). Beberapa tempat yang perlu di kembangkan karena terkait dengan adanya event PON XX di Papua serta adanya Pemilihan Putri Indonesia di Kabupaten Jayapura. Untuk itu diperlukan adanya Sarana pendukung dan adanya pemeliharaan asset pariwisata, hal ini dilakukan dengan kegiatan antara lain:

(1) **Festival Teluk tanah Merah,** Dalam rangka menuju ke DTW teluk Tanah Merah dan untuk mendukung event Pemilihan Putri Indonesia rnaka perlu Penyelesaian dan pengaspalan ruas jalan, Jayapura-Depapre.

(2) **Hotel dan Homestay,** Untuk Akomodasi maka perlu dilakukan renovasi Hotel-hotel yang merupakan aset Pemerintah Provinsi dan juga perlu disiapkan dana yang memadai untuk pengembangan homestay di daerah tujuan wisata agar dapat digunakan oleh pengunjung/ wisatawan teristimewa pengunjung PON XX. Adapun daerah yang dituju adalah Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura tempat kabupaten dimana akan dilaksanakan PON XX.

(3) **Tamu Budaya di Wacana,** Untuk menciptakan Tempat/ Objek wisata di Kota Jayapura maka harus dibangun atau di renovasi Taman Budaya Papua di kampung Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura. Hal ini akan mendukung suksesnya Pelaksanaan PON XX.

l. Urusan Perikanan

Dalam rangka Perlindungan dan pengembangan nelayan Masyarakat Adat Papua, belum dilakukan penctapan zona sepajang 5 mil dari garis pantai sebagai Zona mencari dari Nelayan Masyarakat Papua, Zona ini tidak boleh dengan alasan apapun di masuki oleh nelayan nusantara. Ini penting agar jangan terjadi konflik seperti yang terjadi di ponakao, Kabupaten Mimika, Nelayan dan pembudidaya ikan di papua juga mengalami permasalahan adalah kurangnya sarana penangkapan ikan serta budidaya ikan serta kelangkaan BBM khusus bagi nelayan OAP. Permasalahan ini perlu di perhatikan dengan program antara lain:

(1) **Kapal Ikan Tonase 10 GT Kapal Pengangkut ikan,** Sarana yang diperlukan oleh nelayan di Papua ini yaitu kapal Ikan *I* 10 GT yang difokuskan pada wilayah Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, Kota Jayapura dan Kabupaten Kepulauan Yapen.

(2) **Motor Tempel,** yang difokuskan pada 9 wilayah di antaranya ialah Kabupatcn Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten·Paniai, Kabupaten Deyai dan Kabupaten Asmat.

(3) **Pemberian bantuan pengembangan usaha nelayan berupa keramba/ tambak lkan dan bibit ikan,** yang tersebar pada Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori dan Kabupaten Yapcn.

m. Urusan Peternakan

Dalam Rangka Peningkatan ketersediaan daging dan sumber Gizi masyarakat dan juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat serta mendukung pelaksanaan PON XX, maka diperlukan adanya penyediaan ternak dan adanya hewan peliharaan. Dalam rangka itu maka diperlukan adanya aktivitas seperti:

(1) **Penyediaan Bibit Sapi,** Penyediaan bibit sapi dan haruslah di sediakan untuk daerah-daerah yang cocok yaitu daerah yang dataran rendah di antaranya Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Nabire.

(2) **Pengadaan Bibit Babi,** Dalam rangka membantu menyediakan bibit babi maka diperlukan adanya bibit yang dibagikan pada kabupaten antara lain Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deyai, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Lani Jaya

(3) **Penyediaan Bibit Ayam,** Dalam rangka penyediaan Bibit Ayam, Bibit Ayam Broiler dan Ayam Petelur yang difokuskan pada Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Yapen dan Kabupaten Merauke

4.2.4.2. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRP Provinsi Papua

Telaah rumusan pokok-pokok pikiran DPRP menjadi bagian sangat penting dalam upaya mengakomodir berbagai konsep pemikiran yang diajukan oleh pihak legislatif guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Provinsi Papua di tahun 2020. Melalui penelaahan ini, dapat disinkronkan dan disinerjikan rumusan dan usulan program/kegiatan yang disampaikan oleh pihak legislatif kedalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2020, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Urusan Pemerintahan Umum, Hukum, Politik, Pertahanan dan Keamanan

Sampai dengan saat ini masih terdapat berbagai masalah dalam Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara, Otonomi Daerah di Provinsi Papua, diantaranya yang krusial dan perlu segera diatasi adalah : (1) masih rendahnya kualitas aparatur Pemerintah Daerah baik kompetensi maupun spesialisasi sesuai potensi dan tantangan daerah, (2) budaya komunikasi pemerintahan belum mampu mengatasi berbagai kebuntuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, (3) belum optimalnya pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua kepada Pemerintah Kabupaten dan

Kota, dalam hal pelaksanaan kegiatan yang bersumber dana belanja bantuan keuangan alokasi dana otonomi khusus dalam sektor pendidikan, kesehatan dan beberapa program yang disepakati, dan (4) restrukturisasi organisasi pemerintahan Provinsi Papua belum didukung dengan acuan standar kinerja/ SPM, *Standart Operating and Procedure* (SOP) dan belum mempertimbangkan semangat pembangunan di era Otsus. Semua ini mengakibatkan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua terlihat belum optimal hingga saat ini, khususnya kepada masyarakat Orang Asli Papua, dan keseluruhan masyarakat pada umumnya.

Selain itu, saat ini juga *e-Government* merupakan salah satu instrumen perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Papua yang sangat penting guna memantau dan mengendalikan implementasi dari perencanaan dan penganggaran untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dianggarkan dapat mewujudkan Visi dan Misi RPJMD 2018-2023, sehingga setiap rupiah yang dianggarkan dan dikeluarkan bisa memberikan kesejahteraan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat di Provinsi Papua.

Untuk mengatasi berbagai masalah di atas, sebagaimana yang diindikasikan dalam rumusan pokok-pokok pikiran DPR Provinsi Papua, maka terdapat beberapa program yang dirancang dalam RKPD 2020 yang dapat mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRP tersebut sebagai berikut :

1. Program pengembangan wawasan kebangsaan;
2. Program Pendidikan Politik Masyarakat;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
4. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Distrik dan Kampung;
5. Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
6. Program Pengelolaan Batas Wilayah dan Lintas Batas;
7. Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda;
8. Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum;
9. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
10. Program Pengelolaan hutan masyarakat hukum adat;

11. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
12. Program Pengembangan Data/Informasi;
13. Program Pengembangan Kawasan;
14. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh;
15. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
17. Program Perencanaan Sosial Dan Budaya;
18. Program Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana Dan Lingkungan Hidup;
19. Program Perencanaan Tata Ruang;
20. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
21. Program Pemanfaatan Ruang;
22. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar;
23. Program Kerjasama Pembangunan;
24. Program Perencanaan Kawasan.
25. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
26. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota;
27. Program Peningkatan Pendapatan Daerah.

b. Urusan Pendidikan

Pemerataan dalam pendistribusian guru merupakan permasalahan yang fundamental dan struktural di Provinsi Papua. Hingga saat ini masih dirasakan adanya ketidakmerataan dalam pendistribusian guru antara wilayah perkotaan dengan perdesaan, dan antara daerah pesisir mudah akses dengan daerah pegunungan dan pesisir sulit akses. Fenomena yang terjadi sebagian besar guru berada di wilayah perkotaan, sedangkan untuk wilayah pegunungan yang terisolasi masih banyak kekurangan guru. Permasalahan lainnya terkait eksistensi guru adalah tingkat kemangkiran guru. Faktor-faktor rendahnya kesejahteraan guru, jarak yang jauh, topografi yang ekstrim, minimnya sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi merupakan faktor penyebab laten yang perlu diatasi segera di tahun 2020, sebagaimana yang disebutkan dalam pokok-

pokok pikiran DPRD. Kemudian untuk sarana dan prasarana pendidikan, terutama untuk penunjang pengajaran dan pembelajaran murid (misalkan buku pelajaran, peralatan laboratorium, perpustakaan, dan sebagainya), meskipun setiap tahun telah menjadi fokus perhatian dalam perencanaan pembangunan pendidikan, dan terus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya namun sampai saat ini masih terlihat belum optimal, sehingga kualitas lulusan sekolah belum meningkat signifikan. Semua kondisi faktual ini (belum optimalnya guru dan prasarana pendidikan) menjadi salah satu penyebab RLS (Rata-Rata Lama Sekolah) di Provinsi Papua sangat rendah, sehingga IPM (Indeks Pembangunan Manusia) sampai dengan tahun 2018 masih yang terendah di Indonesia.

Dalam upaya mengatasi permasalahan guru, pemerintah provinsi telah melaksanakan program nasional yaitu Program SM-3T (Sarjana Mendidik Di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Melalui Program SM-3T tersebut maka kekurangan guru dan atau ketidakmerataan dalam pendistribusian guru diharapkan dapat teratasi dengan baik, khususnya di daerah-daerah pegunungan dan pesisir sulit akses yang merupakan daerah tertinggal. Sedangkan untuk meningkatkan RLS, melalui salah satu program pendidikan yang strategis yaitu Sekolah Asrama Satu Atap (SATAP) pemerintah provinsi selama ini berupaya untuk memupuk dan meningkatkan kesadaran penduduk usia sekolah mengenai pentingnya program wajib belajar sembilan tahun untuk menciptakan kualitas pendidikan anak-anak Papua yang handal. Melalui SATAP ini juga pemerintah provinsi melakukan gerakan literasi guna meningkatkan angka melek huruf yang masih belum optimal mencapai 100%.

Untuk tata kelola, khususnya yang terkait dengan pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan sekolah di jenjang pendidikan SMA dan SMK, menurut pokok-pokok pikiran DPRD jangan sampai mengorbankan kualitas SMA dan SMK yang sudah terbangun selama ini yang di kelola oleh pemerintah kabupaten. Selain itu, perlu adanya kepatuhan mengikuti peraturan yang berlaku dalam merubah struktur Dinas Pendidikan berdasarkan tipenya (Tipe A atau Tipe B).

Program ADIK (Afirmasi Pendidikan Tinggi) merupakan salah satu program afirmasi bagi Orang Asli Papua yang dilaksanakan

pemerintah provinsi selama ini. Tujuannya adalah membidik potensi anak-anak Papua lulusan SMA/SMK/sederajat yang berprestasi akademik untuk memperoleh pendidikan tinggi di PTN unggulan baik itu di dalam negeri maupun luar negeri, dan menyiapkan sumber daya manusia anak-anak Papua yang berkualitas untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Transparansi dalam seleksi penerimaan ADIK perlu ditingkatkan, dan harus berlandaskan pada kompetensi yang menjunjung kualitas tinggi. Selain itu perlu didukung dengan pendanaan yang memadai hingga peserta ADIK selesai perkuliahan, dimana pada akhir pelaksanaan program tersebut harus dilaksanakan evaluasi yang menyeluruh dan luas hingga mencapai penilaian *outcome* dan *benefit*.

Berdasarkan seluruh telaah pokok-pokok pikiran DPRP di atas, maka untuk RKPD Provinsi Papua Tahun 2020 telah disusun program-program pembangunan pendidikan sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
3. Program Pendidikan Menengah Atas;
4. Program Pendidikan Non Formal;
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
6. Program Pendidikan Menengah Kejuruan;
7. Program Pemberantasan Buta Aksara;
8. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.

c. Urusan Kesehatan

Pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan terisolir telah menjadi program prioritas yang ditetapkan dalam rencana strategis urusan kesehatan, yakni memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat pada daerah terpencil, terisolir, dan perbatasan. Daerah yang menjadi sasaran kegiatan adalah daerah yang mempunyai kriteria sulit dari segi transportasi, memiliki topografi yang ekstrim, dan masyarakat yang masih tergolong miskin dengan status kesehatan yang masih rendah. Permasalahan penting yang masih dihadapi dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Papua selama ini adalah terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada kelompok penduduk miskin, penduduk daerah tertinggal, terpencil dan daerah perbatasan. Hal ini, antara

lain, disebabkan oleh karena kendala jarak, biaya dan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan jaringannya yang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat.

Selain memberikan rekomendasi untuk peningkatan derajad kesehatan, dalam rumusan pokok-pokok pikiran DPRP juga diungkap rekomendasi yang terkait dengan peningkatan upaya kesehatan masyarakat dan sumber daya kesehatan, yakni : (1) penambahan dana operasional untuk membangun dan mengembangkan Balai laboratorium Kesehatan Provinsi Papua, (2) memberi perhatian yang lebih serius terhadap pemberian fasilitas kesejahteraan bagi para dokter spesialis, (3) menganggarkan biaya operasional pemantauan distribusi obat yang lebih besar, khususnya untuk pendistribusian obat yang cepat sampai di daerah wilayah pegunungan agar tidak menjadi kadaluarsa, dan (4) pemberian anggaran untuk biaya operasional verifikator dalam melaksanakan memonitoring KOS dan BPJS.

Kemudian secara spesifik, untuk meningkatkan pelayanan pada RSUD (Rumah Sakit Umumk Daerah) dan RSJ (Rumas Sakit Jiwa), patut diperhatikan beberapa hal oleh pemerintah provinsi yaitu : (1) memberikan dana yang lebih banyak pada RSJ untuk melakukan monitoring jumlah pasien dan pelayanan pasien Jiwa diberbagai daerah di Papua dan Papua Barat, (2) menganggarkan pembayaran hak ulayat dalam pelepasan tanah adat untuk pembangunan RSJ dilokasi baru Koya Barat, (3) penambahan dokter spesialis di RSUD Abepura dan RSUD Dok II, serta penambahan anggaran untuk biaya operasioal keperawatan dan kebidanan, (4) meningkatkan porsi belanja untuk pasien rujukan dari kabupaten/kota ke RSUD Dok II, dan ke rumah sakit rujukan di luar Papua khususnya yang sudah ada MOU seperti RSUD Sarjito, RS Dharmais, dan RS Cikini di Jakarta, rumah sakit di Makassar, RS Dr. Sutomo di Surabaya, (5) meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana RSUD Dok II seperti ketel uap, listrik, ruang gizi, ruang bersalin, dan bak penampung air.

Beranjak dari berbagai masalah pembangunan kesehatan di atas, dan rekomendasi yang disampaikan oleh DPRP, maka dalam

RKPD Provinsi Papua Tahun 2020 telah diakomodir beberapa program kesehatan yang strategis sebagai berikut :

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
5. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
6. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
7. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
8. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita.

d. Urusan Sosial Dan Keagamaan

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba, khususnya ganja, di Provinsi Papua sudah pada tahap yang cukup mengkhawatirkan. Apabila dibiarkan berlarut, dapat merusak generasi muda Papua. Penyalahgunaan narkoba juga mempunyai dampak multidimensi yang sangat luas bagi suatu daerah, mencakup dampak kesehatan, sosial dan ekonomi. Mengingat dampaknya begitu buruk, maka pemerintah provinsi selama ini sudah berupaya untuk menekan dan menghapus peredaran narkoba. Misalkan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir Kabupaten Keerom di tahun 2014 telah mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayahnya. Kondisi geografis wilayah Keerom yang memiliki garis batas darat dan pintu masuk dengan Papua New Guenia (PNG) merupakan salah satu kerawanan masuknya narkotika gelap. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan BNN Propinsi Papua menginisiasi terciptanya kampung siaga narkoba di daerah yang berbatasan dengan NKRI. Masyarakat kampung setempat yang diwakili oleh kepala kampung, perwakilan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut telah menyatakan komitmen bersama untuk menanggulangi peredaran narkoba. Namun demikian, program penanggulangan yang dijalankan pemerintah daerah tersebut tampak

belum optimal. Sampai saat ini ternyata masih ditemukan beberapa ladang ganja di daerah perbatasan RI - PNG. Tawaran yang menggiurkan dari bandar narkoba untuk menanam ganja di kebun milik masyarakat kampung tidak dapat ditolak karena tekanan ekonomi. Rumahtangga petani di daerah-daerah tersebut pada umumnya miskin dan berpendidikan rendah. Sehingga ketika diiming-imingi dengan uang puluhan juta untuk menanam ganja, mereka tergiur untuk melaksanakannya. Untuk itu dalam rumusan pokok-pokok pikiran DPRD tersirat bahwa pemerintah provinsi harus memberikan perhatian yang lebih serius terhadap Ketahanan Sosial Keluarga Miskin di daerah-daerah perbatasan. Program-program penanggulangan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) harus lebih dioptimalkan hingga bisa memperkuat daya tahan sosial keluarga miskin mencapai terwujudnya keluarga yang sejahtera baik itu dari sisi ekonomi maupun kehidupan sosial. Jika hal ini terwujud dengan baik maka tidak akan ada lagi keluarga petani di daerah perbatasan yang mau menanam ganja.

Dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 ditegaskan bahwa Fakir Miskin dan anak - anak yang terlantar dipelihara oleh negara. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 tersebut mempunyai makna bahwa selain gelandangan dan pengemis, anak-anak jalanan juga harus dipelihara dan diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian secara khusus juga ada aturan hukum yang ditujukan untuk melindungi anak yaitu UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban anak, pada Pasal 4 disebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan amanat dari UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tersebut maka sudah seharusnya dan merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah provinsi untuk selalu memperhatikan, melindungi dan mensejahterakan anak-anak papua, termasuk anak jalanan. Sehubungan dengan hal itu maka menurut pokok-pokok pikiran DPRD diperlukan anggaran dan perhatian yang lebih besar dari pemerintah provinsi untuk menangani anak jalanan sebagai potensi sumber manusia Papua masa depan yang sudah harus

di inventarisasi untuk di lakukan pembinaan sehingga masa depan anak Papua tidak mengalami kendala sebagai pelaku pembangunan di kemudian hari.

Beranjak dari rumusan pokok-pokok pikiran DPRP di atas, maka terdapat beberapa program kesejahteraan sosial yang telah disusun sebagai program prioritas dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT); dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
4. Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Kesejahteraan Sosial;
6. Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan.

e. Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Berbagai infrastruktur dasar masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat Papua dengan penyediaan yang harus memperhatikan pola sebaran pemukiman penduduk dalam kelompok-kelompok kecil dan tersebar dengan kondisi geografis yang berat. Isu-isu strategis yang mengemuka di tahun 2020 terkait dengan pembangunan infrastruktur dasar sebagaimana yang tersirat dalam pokok-pokok pikiran DPRP adalah : (1) jaringan jalan dan jembatan belum menjangkau banyak wilayah pemukiman penduduk sehingga pelayanan dasar belum dirasakan oleh sebagian besar penduduk, (2) jalan dalam kondisi yang baik, dan permukaan jalan yang beraspal masih sangat kurang, sehingga mengganggu kelancaran pendistribusian barang dan penumpang yang pada akhirnya berakibat pada *high cost economy* di daerah-daerah pegunungan dan sulit akses di Provinsi Papua, (3) kuantitas dan kualitas jembatan yang masih belum memadai menyebabkan hubungan transportasi darat antara satu daerah dengan daerah lainnya menjadi terhambat dan tidak lancar.

Untuk mengatasi permasalahan infrastruktur dasar di atas, serta mengakomodir pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh DPRP maka dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2020 telah dibuat program-program pekerjaan umum sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Program Pembangunan turap/talud/brojong;
3. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
4. Program pengendalian banjir;
5. Program pembangunan infrastruktur pedesaaan;
6. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan;
7. Program Pengembangan Perumahan.

f. Urusan Pemuda dan Olah Raga

Selepas PON XIX di Provinsi Jawa Barat, pelaksanaan PON XX sudah ditetapkan oleh KONI Pusat di Provinsi Papua. PON XX akan di diselenggarkan pada tahun 2020 yang disebar pada 5 klaster yakni (1) Klaster Jayapura meliputi Kabupaten dan Kota Jayapura dengan daerah peyangga Kabupaten Keerom, (2) Klaster Biak Numfor dengan daerah peyangga Kabupaten Supiori dan Kabupaten Kepulauan Yapen, (3) Klaster Merauke di Kabupaten Merauke, (4) Klaster Mimika di Kabupaten Mimika, dan (5) Klaster Jayawijaya di Kabupaten Jayawijaya dengan daerah peyangga Kabupaten Tolikara.

Persiapan menuju PON XX sudah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi semenjak tahun 2016 lalu, mulai dari pembangunan fisik yang terkait dengan berbagai venue PON XX, termasuk juga sarana dan prasarana pendukung PON XX, hingga koordinasi yang intensif guna mendapatkan dana penyelenggaraan PON XX yang sangat besar, baik itu dengan pemerintah pusat, maupun dengan pihak swasta lokal dan nasional. Hasilnya dapat dilihat sampai dengan tahun 2019 ini, beberapa venue sudah mulai dibangun. Bahkan di Kabupaten Mimika sudah terbangun salah satu venue yang siap 100% untuk pelaksanaan PON XX yaitu *Mimika Sport Complex* (MSC). Sementara di Kabupaten Merauke, pembangunan infrastruktur Stadion Katalpal telah mencapai 40 persen, yang dipastikan akan rampung di akhir tahun 2019. Begitu juga dengan Stadion Papua Bangkit di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura, sudah dalam taraf penyelesaian.

Lobi dan koordinasi pemerintah provinsi terhadap pemerintah pusat juga membuahkan hasil yang sangat menggembirakan. Dimana dari hasil Ratas Kabinet (Rapat Terbatas) bulan Juli 2017 dengan Presiden Joko Widodo yang antara lain membahas program-program strategis nasional (PSN) yang ada di Provinsi Papua, salah satunya adalah penyelenggaraan PON XX Papua, diperintahkan oleh presiden untuk mengeluarkan INPRES (Intruksi Presiden) PON XX tahun 2020. Dengan Inpres tersebut, Kementerian PUPR akan membantu pembangunan beberapa venue yang penting antara lain Istana Olah Raga (Stadion Papua Bangkit), stadion akuatik, hockey dan sepeda.

Dalam hal kesiapan atlet PON, maka perolehan medali emas dan peringkat Papua di PON XIX Jawa Barat dapat dijadikan sebagai indikatornya. Peringkat Papua di PON XIX Jawa Barat naik signifikan jika dibandingkan dengan posisinya di PON XVIII Riau yaitu dari peringkat 15 menjadi peringkat 7, dengan jumlah medali emas yang berhasil diraih mencapai 19 emas, atau bertambah 10 emas dari PON XVIII sebelumnya. Fakta ini menunjukan bahwa saat ini atlet-atlet papua sudah cukup siap menghadapi PON XX. Dengan sisa waktu 3 tahun lagi, maka DPRP merekomendasikan agar dilaksanakan kompetisi bibit muda terbaik Papua menjelang PON XX untuk dapat diprediksi jumlah perolehan sesuai kemampuan prestasi yang diperoleh.

Untuk mengakomodir berbagai konsep pemikiran dari DPRD yang terkait dengan persiapan penyelenggaraan PON XX di atas, maka dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2020 telah disusun program-program pemuda dan olah raga sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga;
2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
4. Pengembangan Prasarana PON;
5. Program Penyelenggaraan Kompetisi/ Pekan Olahraga/ Kejuaraan Olah Raga;
6. Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas untuk Penyelenggaraan PON XX 2020;
7. Program Pembinaan Atlit Muda dan OLahraga Prestasi;

8. Program Persiapan Penyelenggaraan PON XX 2020;
9. Program Pelaksanaan Penyelenggaraan PON XX 2020.

g. Urusan Ketenagakerjaan

Terjadinya ketimpangan pendapatan yang cukup mencolok di Provinsi Papua selama ini jika diamati dengan seksama berakar pada ketidakmerataan dalam kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Terutama sekali ketimpangan antara peluang kesempatan kerja pada Orang Asli Papua dengan Non Papua. Walaupun pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua di tahun 2016 dinyatakan yang paling baik di Indonesia, akan tetapi pembagian nilai tambah yang diberikan dalam perekonomian wilayah sangatlah tidak merata jika disoroti pada tenaga kerja Orang Asli dan Non Papua. Fenomena tersebut disebabkan peluang kerja yang terbuka selama ini lebih banyak diserap oleh tenaga kerja Non Papua. Misalkan di sektor jasa perdagangan, perhotelan, restoran, transportasi, komunikasi, perusahaan, perbankan, dan sebagainya, sebagian besar menyerap tenaga kerja Non Papua. Sementara tenaga kerja Orang Asli Papua, dikarenakan kualitas dan produktifitas kerjanya masih rendah, akhirnya kalah bersaing dalam kompetisi pasar kerja. Jumlah tenaga kerja Orang Asli Papua yang bekerja pada sektor-sektor tersebut sangat sedikit. Tidak seperti pada peluang kerja di sektor pemerintahan yang dapat diintervensi oleh Pemerintah Provinsi Papua, pada sektor swasta berlaku hukum pasar yang lebih mengedepankan kompetensi tenaga kerja yang tinggi, yang sulit diintervensi langsung oleh pemerintah provinsi.

Kondisi faktual pasar kerja seperti ini sudah terbaca oleh pihak legislatif secara komprehensif dan holistik. Oleh karena itu dalam rumusan pokok-pokok pikiran DPRP tersirat bahwa pemerintah provinsi perlu meningkatkan produktifitas dan kualitas tenaga kerja Orang Asli Papua melalui pelatihan-pelatihan yang intensif dan peningkatan pendidikan vokasional yang mengarah pada tenaga kerja yang siap pakai dan mampu bersaing dalam pasar kerja, misalkan pelatihan tentang kewirausahaan, pengenalan budaya kerja secara faktor psikologi kerja. Selain itu pemerintah provinsi juga perlu memikirkan kebijakan afirmasi pada Orang Asli Papua, namun dengan tetap mengindahkan persaingan yang sehat, untuk meningkatkan

daya serap tenaga kerja Orang Asli Papua dalam perekonomian wilayah, bukan hanya sebatas pada sektor pertanian, namun juga pada sektor-sektor ekonomi produktif lainnya terutama di sektor industri dan jasa perdagangan. Patut dilakukan kajian yang mendalam dan survey tenaga kerja untuk hal ini.

Telah diatur secara nasional bahwa setiap daerah provinsi dan kabupaten/kota harus menetapkan Upah Minimum Regional (UMR), yang merupakan standar kelayakan hidup yang minimum bagi tenaga kerja. Setiap pelaku bisnis pada sektor swasta diharuskan mematuhi penetapan UMR yang berlaku. Oleh sebab itu, direkomendasikan dalam pokok-pokok pikiran DPRP agar Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Dinas Tenaga Provinsi Papua melakukan kontrol tehadap berbagai perusahaan yang beroperasi di Papua, agar konsekwen dan konsisten membayar upah yang minimum sama dengan UMR, sehingga tidak menimbulkan sengketa antara tenaga kerja dengan perusahaan.

Bertitik tolak dari berbagai wacana dan pemikiran konstruktif yang disampaikankan oleh DPRP di atas, maka dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2019 telah disusun program-program yang terkait dengan ketenagakerjaan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
3. Program Pengiolahan dan Penyebarluasan Informasi Produktivitas;
4. Program Pengawasan Ketenagakerjaan;
5. Program Peningkatan Kinerja Organisasi;
6. Program Pengembangan Produktivitas Kerja.

h. Urusan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

Sebagaimana yang tersirat juga dalam pokok-pokok pikiran DPRP Provinsi Papua bahwa target utama pengembangan ekonomi masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas yang diskenariokan melalui kegiatan-kegiatan spesifik lokal yang dikelola oleh Pemda, swadaya masyarakat, pelaku ekonomi swasta, dan lain-lain. Untuk mengakomodir konsep berpikir dari anggota DPRP tersebut maka dalam RKPD Provinsi Papua

Tahun 2020 telah dibuat beberapa program yang terkait dengan perekonomian yaitu :

1. Program Pengawasan Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Dan Bahan Bakar Gas (BBG);
2. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah;
3. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
5. Program Pengembangan Kemitraan;

i. Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sebagaimana yang tersirat juga dalam pokok-pokok pikiran DPRP Provinsi Papua bahwa target utama pengembangan ekonomi masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas yang diskenariokan melalui kegiatan-kegiatan spesifik lokal yang dikelola oleh Pemda, swadaya masyarakat, pelaku ekonomi swasta, dan lain-lain. Untuk mengakomodir konsep berpikir dari anggota DPRD tersebut maka dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2020 telah dibuat beberapa program yang terkait dengan perekonomian yaitu :

1. Program Membangun SDM Petani Papua;
2. Program Pembangunan Kawasan Industri Agribisnis;
3. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan;
4. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Lokal;
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan;
7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
9. Program Pengembangan Agribisnis;
10. Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian;
11. Program Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal;
12. Program Peningkatan Dan Pengembangan Teknologi Budidaya Tani;
13. Program Penggunaan Pupuk Organik;

14. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
15. Program Pengembangan Kemitraan;
16. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;
17. Program Penataan Kawasan Hutan;

j. Urusan Pariwisata

Sebagaimana yang tersirat juga dalam pokok-pokok pikiran DPRP Provinsi Papua bahwa target utama pengembangan ekonomi masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas yang diskenariokan melalui kegiatan-kegiatan spesifik lokal yang dikelola oleh Pemda, swadaya masyarakat, pelaku ekonomi swasta, dan lain-lain. Untuk mengakomodir konsep berpikir dari anggota DPRD tersebut maka dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2020 telah dibuat beberapa program yang terkait dengan perekonomian yaitu :

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
3. Program Pengembangan Kemitraan;
4. Program Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata.

Selengkapnya kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada setiap program dibidang ekonomi ini, dan telah mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD dapat dilihat pada lampiran.

k. Urusan Perikanan

Sebagaimana yang tersirat juga dalam pokok-pokok pikiran DPRP Provinsi Papua bahwa target utama pengembangan ekonomi masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas yang diskenariokan melalui kegiatan-kegiatan spesifik lokal yang dikelola oleh Pemda, swadaya masyarakat, pelaku ekonomi swasta, dan lain-lain. Untuk mengakomodir konsep berpikir dari anggota DPRD tersebut maka dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2020 telah dibuat beberapa program yang terkait dengan perekonomian yaitu :

1. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan Dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat;
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;

3. Program Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap;
4. Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan;
5. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar;
6. Program Peningkatan Mutu Produksi Nelayan, Pengelolaan Dan Pemasaran;
7. Program Optimalisasi Dan Pembangunan Prasarana Perikanan Tangkap;
8. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
9. Program Pengawasan Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Dan Bahan Bakar Gas (BBG);
10. Program Pengembangan Kemitraan;

l. Urusan Peternakan

Sebagaimana yang tersirat juga dalam pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Papua bahwa target utama pengembangan ekonomi masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas yang diskenariokan melalui kegiatan-kegiatan spesifik lokal yang dikelola oleh Pemda, swadaya masyarakat, pelaku ekonomi swasta, dan lain-lain. Untuk mengakomodir konsep berpikir dari anggota DPRP tersebut maka dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2020 telah dibuat beberapa program yang terkait dengan perekonomian yaitu :

1. Program Membangun SDM Petani Papua;
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
3. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan;
5. Program Pengembangan Agribisnis;
6. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;
8. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah;
9. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial;
10. Program Pengembangan Kemitraan;

4.2.5. Penetapan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Papua tahun 2020 disusun dengan mempertimbangkan berbagai rumusan kebijakan pembangunan baik di tingkat nasional maupun provinsi, yakni:

1. Isu-isu strategis nasional dan daerah yang menjadi permasalahan pembangunan, serta akar permasalahan dari pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah;
2. Komitmen-komitmen nasional, seperti program pembangunan yang berkeadilan (penanggulangan kemiskinan dan *Sustainable Development Goals*/SDG's) sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2010 dan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004;
3. Tema dan prioritas pembangunan nasional tahun 2020;
4. Sasaran pembangunan yang dimuat dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2018-2023;
5. Arah pembangunan tahap ke-3 RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025;
6. Pokok-pokok pikiran DPRP Provinsi Papua terhadap penyusunan RKPD 2020;
7. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2018, dan target Tahun 2020 yang menunjukkan berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh pemerintah provinsi yang bersifat mendesak dan harus segera diatasi pada tahun 2020.

Keterkaitan Tema RKP dan RKPD Provinsi Papua tahun 2020

Tema RKP 2020

PENINGKATAN KUALITAS SDM UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS

Tema RKPD Provinsi Papua 2020

PENINGKATAN KUALITAS HIDUP YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN

Berdasarkan berbagai rumus kebijakan pembangunan dan Tema pembangunan di atas, maka prioritas pembangunan daerah dan fokus kebijakan pembangunan Provinsi Papua tahun 2020 yang diselaraskan dengan prioritas nasional tahun 2020.

Tabel 4.3 Prioritas Nasional 2020, Prioritas Daerah Dan Fokus Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2020

Prioritas Nasional 2020	Prioritas Daerah 2020	Fokus Pembangunan 2020
PN 1 : Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	**PD 1 : Peningkatan Kualitas SDM dan Pemenuhan Dasar**	1. Perlindungan sosial untuk menjamin generasi emas papua.
		2. Peningkatan Prestasi melalui kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan, terutama sukses prestasi PON XX tahun 2020 dan pengembangan industri olah raga Indonesia
		3. Pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Politeknik berbasis potensi unggulan di lima wilayah
		4. Peningkatan pendidikan kecakapan hidup, yang dilakukan melalui pelatihan-pelatihan keterampilan.
		5. Akselarasi dan afirmasi pendidikan dengan melaksanakan Program Pendidikan anak berprestasi dan unggul Papua
		6. Penguatan Sistem Inovasi Daerah melalui pengembangan IPTEK di PTN/PTS
		7. Pengembangan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Papua
		8. Peningkatan kemitraan lembaga pendidikan dan kesehatan dengan lembaga agama dan lembaga sosial lainnya.
	Pemenuhan Dasar Pendidikan	1. Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dengan biaya gratis bagi masyarakat Papua;
		2. Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP serta rumah guru sesuai dengan kondisi lokal khas Papua (SD kecil dan pendidikan berpola asrama).
		3. Peningkatan akses pendidikan melalui guru kunjung, terutama di daerah terpencil.
		4. Peningkatan profesionalisme dan tunjangan guru untuk daerah tertinggal dan terluar.

Prioritas Nasional 2020	Prioritas Daerah 2020	Fokus Pembangunan 2020
		5. Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, dan pelatihan guru
	Pemenuhan Dasar Kesehatan	6. Menyempurnakan dan memantapkan pelaksanaan program jaminan kesehatan Papua (KPS) baik dari segi kualitas pelayanan, akses pelayanan, akuntabilitas anggaran.
		7. Peningkatan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
		8. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita serta peningkatan dan pemenuhan gizi masyarakat dalam rangka mewujudkan Generasi Emas Papua.
		9. Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan
		10. Pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria dan TBC.
		11. Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua Puskesmas dan jaringannya, dengan diprioritaskan pada peningkatan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan
		12. Penyempurnaan sistem insentif dan penempatan SDM kesehatan sesuai dengan tingkat kesulitan, peningkatan kompetensi SDM kesehatan serta adanya jaminan keamanan bagi seluruh tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan.
		13. Pembangunan dan pengembangan rumah sakit rujukan di 5 wilayah adat.
		14. Peningkatan dan pembenahan jumlah puskesmas dan jaringannya serta pengembangan puskesmas rawat inap, yang didukung fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai terutama pada daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta

Prioritas Nasional 2020	Prioritas Daerah 2020	Fokus Pembangunan 2020
		daerah dengan aksesibilitas relatif rendah
		15. Memperkuat dan memantapkan pelayanan kesehatan yang berbasis kondisi lokal Papua melalui pelayanan kesehatan pro aktif/bergerak (Pelayanan kesehatan Kaki Telanjang), puskesmas keliling, flying health care, puskesmas apung termasuk penyiapan mobile medical service.
	Pemenuhan Dasar Perumahan dan Permukiman	16. Penataan guna lahan permukiman di perkotaan
		17. Ketersediaan energi (listrik/penerangan
		18. Pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat, khususnya OAP
		19. Ketersediaan air bersih dan sistem sanitasi
PN 4 : Ketahanan pangan, Energi dan Lingkungan Hidup	Pemenuhan Dasar Pangan	20. Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan dasar sandang, pangan dan papan (menghindari ketergantungan dari luar)
		21. Penguatan ketahanan pangan lokal.
		22. Penelitian dan pengembangan bibit unggul dan teknologi pertanian berkelanjutan, serta peningkatan penyuluhan untuk penggunaan secara tepat dan akurat dengan resiko yang dapat dijaga.
		23. Melaksanakan kebijakan pengembangan industri hilir pertanian dengan diberikan insentif dalam pengembangannya
		24. Penguatan petani, dan menjaga daya beli serta nilai tukar petani dengan menjaga stabilitas harga-harga komoditas yang dapat memberikan keuntungan pada petani.

Prioritas Nasional 2020	Prioritas Daerah 2020	Fokus Pembangunan 2020
		25. Perbaikan sistem distribusi dan logistik termasuk pergudangan secara terintegrasi dengan memperhatikan supply chain, agar mampu mengurangi gejolak harga dan pasokan secara musiman pada komoditas pangan utama.
		26. Peningkatan dan pemenuhan infrastruktur pertanian yang menghubungkan produksi pangan dan tujuan pasar.
PN2 : Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	**PD 2 : Pemantapan Rasa Aman, Tentram Dan Kedewasaan Berdemokrasi**	1. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik
		2. Menciptakan dan melembagakan komunikasi politik sehingga kepentingan Orang Asli Papua dapat diartikulasikan dan diagregasikan dalam pembuatan/pengambilan keputusan publik
		3. Meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik
		4. Memperkuat lembaga-lembaga adat untuk menjadi mitra dalam pembangunan
		5. Memperkuat kerukunan hidup umat beragama dengan memperkuat kemitraan dengan lembaga agama.
		6. Memperkuat kesadaran dan penanaman nilai tentang persamaan, penghormatan, berbangsa dan bernegara secara formal maupun informal.
		7. Memperkuat kemitraan yang efektif dengan lembaga penegak hukum dalam penerapan dan penegakan hukum dan HAM.
		8. Memperkuat peran lembaga adat dalam pemerintahan dan pembangunan.
	PD 3 : Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	1. Mengoptimalkan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta peran Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat di Daerah.

Prioritas Nasional 2020	Prioritas Daerah 2020	Fokus Pembangunan 2020
		2. Memperkuat integrasi perencanaan pembangunan dengan perencanaan tataguna lahan, kewilayahan serta sektor sehingga prioritas pembangunan dapat terarah, terukur dengan jelas, dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan
		3. Meningkatkan fungsi pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan eksternal dan internal serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan.
		4. Melakukan pengawasan kinerja dan pemberantasan korupsi yang tegas bagi pelanggaran sumpah jabatan, aturan, disiplin, dan etika kerja birokrasi.
		5. Meneruskan reformasi birokrasi secara bertahap, terukur dan akuntabel.
		6. Memperkuat dan melanjutkan sistem tunjangan kinerja daerah bagi ASN yang jelas dalam peningkatan kinerja Aparatur.
		7. Memperbaiki prosedur kerja dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan,.
		8. Menata struktur organisasi agar makin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan penegakan aturan
PN 3 : Peningkatan Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja	**PD 4 : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Peningkatan Investasi**	1. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan nilai tambah komoditas melalui pelatihan yang strategis (mendukung pelaksanaan PON XX tahun 2020)
		2. Mengembangkan rantai nilai hulu-hilir (termasuk jaringan dan informasi pasar lokal) untuk komoditas unggulan di tiap wilayah melalui kerjasama lintas sektor dan dengan pihak swasta

Prioritas Nasional 2020	Prioritas Daerah 2020	Fokus Pembangunan 2020
		3. Penguatan kemauan dan kemampuan masyarakat kampung untuk berinovasi dalam berproduksi dan mengelola ekonomi lokal
		4. Memantapkan hubungan antar wilayah/daerah/ kampung dengan membangun infrastruktur dan keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan yang kokoh serta berkesinambungan.
		5. Menyiapkan sarana dan prasarana ekonomi berbasis keunggulan komoditas masing-masing wilayah (mendukung pelaksanaan PON XX tahun 2020)
		6. Penguatan kelembagaan ekonomi petani untuk peningkatan produktifitas dan pemasaran dalam perekonomian masyarakat lokal.
		7. Revitalisasi Program PROSPEK yang bersinergi dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Kampung.
		8. Prioritas investasi pada pengembangan komoditas unggulan papua
		9. Perbaikan tata kelola perizinan berbasis SDA dan lahan skala luas
		10. Pembangunan dan pengembangan kluster kawasan ekonomi khusus berbasis wilayah adat dengan komoditi unggulan
		11. Perbaikan iklim Investasi dan usaha dengan pemihakan kepada sektor usaha kecil menengah sebagai tiang penyerap tenaga kerja terutama OAP
		12. Pengembangan ekoturisme dan wisata budaya yang bernilai tambah tinggi, serta mekanisme imbal jasa lingkungan untuk mendukung pengembangan kemandirian ekonomi dengan dampak lingkungan dan budaya serendah mungkin

Prioritas Nasional 2020	Prioritas Daerah 2020	Fokus Pembangunan 2020
		13. Peningkatan industri lokal yang mampu mendorong perkembangan kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah
		14. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah di sektor primer terutama sektor pertanian, kehutanan, kelautan, dan pertambangan dengan mutu serta kualitas prima
PN 5 : Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	**PD 5 : Pemantapan Infrastruktur Dasar Serta Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan Dan Tertentu**	1. Pengendalian banjir dan abrasi pantai
		2. Pengelolaan persampahan dan air limbah
		3. Peningkatan layanan air bersih dan sanitasi
		4. Peningkatan pembiayaan dalam rangka pemenuhan infrastruktur melalui kerjasama dengan berbagai pihak termasuk swasta (mendukung pelaksanaan PON XX tahun 2020)
		5. Memberikan kewenangan bagi kabupaten/kota melalui mekanisme bantuan pembiayaan infrastruktur bagi kabupaten/kota yang diprioritaskan pada peningkatan konektivitas dalam rangka pengembangan rantai nilai hulu-hilir komoditi unggulan
		6. Peningkatan akses informasi dan komunikasi di seluruh wilayah
		7. Peningkatan akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh masyarakat di wilayah Papua (mendukung pelaksanaan PON XX tahun 2020)
		8. Pengendalian pemanfaatan ruang
		9. Penanggulangan bencana
		10. Pengendalian pengelolaan lingkungan hidup
		11. Konservasi sungai dan danau
		12. Penyediaan dan pengelolaan air baku

Prioritas Nasional 2020	Prioritas Daerah 2020	Fokus Pembangunan 2020
		13. Penataan kawasan sentra ekonomi, sosial dan permukiman
		14. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan daerah perbatasan terluar dan terpencil, melalui sinergi program pada bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
		15. Mengurangi kesenjangan jender dengan meningkatkan kebijakan pemihakan kepada perempuan dan pengarusutamaan jender dalam strategi pembangunan.
		16. Melakukan perbaikan kebijakan pembagian dana Otsus ke Kabupaten/kota untuk mengurangi kesenjangan dan memberi insentif jasa lingkungan.

4.2.6. Sasaran Pembangunan tahun 2020

Prioritas Pembangunan tahun 2020 sebagaimana tersebut diatas merupakan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2020 yang berkolerasi dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023. Adapun Sasaran Makro Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua tahun 2020 sebagai perwujudan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Papua tahun 2019-2023, adalah:

Tabel 4.4 Sasaran Makro Pembangunan Daerah tahun 2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET 2020	TARGET 2023	TARGET RPJPD
1	**IPM**	indeks	60,06	62,20	65	70
2	**Persentase Penduduk Miskin**	%	27,43	25.73 - 26.28	20	< 19
3	**Pertumbuhan Ekonomi**	%	7,33	6,43 – 7,58	5 – 6,5	6,21
4	**PDRB Perkapita Tanpa Tambang**	juta Rp	40,12	29,95 – 30,27	50	> 40
5	**Gini Rasio**	%	0,384	0,34 - 0,39	0,385	-

6	**Pengangguran Terbuka**	%	2,91	2,27 - 3.60	2,57 – 1,75	2,5
7	**Konektivitas Wilayah**	%	64,29	70	100	-
8	**Intensitas Emisi GRK**	Ton CO2/Juta rupiah	0.329	0.311	0,282	-

Sedangkan keterkaitan Prioritas Pembangunan Tahun 2020 dengan Sasaran Pembangunan tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Sasaran Pembangunan		Indikator		Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
1	*2*		*3*		*4*	*5*
Peningkatan Kualitas SDM dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	1	Meningkatnya Aksesibiltas dan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,17	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, Rumah Sakit Jiwa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Olah Raga dan Pemuda, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan
			2	Harapan Lama Sekolah	11,25	
			3	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	76,88	
			4	Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung untuk kelas 2 dan 3	48,99	
	2	Meningkatnya budaya baca pada masyarakat	1	Cakupan kabupaten/kota yang memiliki sarana dan prasarana perpustakaan yang berkualitas	21,00	
	3	Meningkatnya prestasi olah raga dan Sukses penyelenggaraan PON	1	Perolehan medali emas dalam PON	90,00	
			2	Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	5,00	
	4	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	71,46	
			2	Persentase pemuda Asli Papua yang menjadi wirausahawan	18,98	
	5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Angka Harapan Hidup	67,33	
			2	Angka Kematian Bayi (AKB)	6,00	
			3	Angka Kematian Ibu (AKI)	230,16	
			4	Angka Kesakitan	5,08	
	6	Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan	1	Cakupan daerah rawan pangan	10,00	
			2	Persentase kenaikan cadangan pangan	28,43	
			3	Persentase penduduk tahan pangan	49,01	
	7	Meningkatnya kuantitas dan	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,31	

Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Sasaran Pembangunan		Indikator		Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
1	*2*		*3*		*4*	*5*
		kualitas pelayanan sosial keagamaan	2	Cakupan pembinaan organisasi keagamaan	55,91	Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan
	8	Terwujudnya internalisasi nilai adat dan budaya asli Tanah Papua dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat	1	Cakupan budaya tak benda yang ditetapkan	1,00	
			2	Cakupan Cagar budaya yang ditetapkan	0,00	
Pemantapan Rasa Aman, Tentram dan Kedewasaan Berdekomokrasi	1	Meningkatnya penegakan HAM	1	Cakupan kabupaten/kota yang melaksanakan RANHAM (Rencana Aksi Nasional HAM)	3,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kebudayaan, Sekretariat Daerah, Biro Hukum, Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
			2	Rata-rata Nilai Skor Peduli HAM	60,00	
	2	Meningkatnya suasana tertib, aman dan kepastian hukum	1	Rasio kriminalitas yang ditangani	66,73	
	3	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,31	
	4	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	1	Nilai skor aspek kebebasan sipil	93,56	
			2	Nilai skor aspek hak-hak politik	45,35	
			3	Nilai skor aspek lembaga demokrasi	56,63	
Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	1	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	1	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	93,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah, Biro Hukum, Biro Organisasi, Biro Umum, Biro Humas dan Protokol, Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa, Biro Otonomi Khusus, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Badan Penghubung Daerah, Sekretariat Majelis Rakyat Papua, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
			2	Cakupan kabupaten/kota yang menyampaikan infografis hasil pengelolaan dana Otsus	5,00	
	2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B	
			2	Cakupan database kependudukan skala provinsi (usia +17 tahun memiliki NIK)	79,51	
			3	Capaian Implementasi e-government terintegrasi (masukan e-planning dll ke program)	85,00	
			4	Persentase kenaikan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui ULP	5,00	
			5	Indeks Kinerja Pembangunan	52,12	
			6	Indeks Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Papua	5,50	

Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Sasaran Pembangunan		Indikator		Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
1	*2*		*3*		*4*	*5*
			7	Cakupan inovasi pelayanan publik yang masuk dalam List Outstanding (terpuji)	1,00	Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan
			8	Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan	30,00	
	3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	1	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD	85,00	
			2	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target	40,00	
			3	Cakupan ketersediaan data statistik bagi pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	57,20	
			4	Rasio belanja langsung dalam komposisi APBD	41,53	
	4	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	1	Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	WTP	
			2	Ketepatan waktu Penetapan APBD	tepat waktu	
			3	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	10,46	
			4	Indeks Kinerja Pembangunan	52,12	
			5	Indeks Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Papua	5,50	
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Peningkatan Investasi	1	Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	1	Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan	26,79	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pengelola Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kebudayaan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kehutanan, Dinas
			2	Pertumbuhan PDRB sub-sektor kehutanan	1,97	
			3	Laju Deforestasi	34,86	
	2	Membangun struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada penciptaan nilai tambah yang optimal terutama pada sektor-sektor industri manufaktur, jasa, dan ekonomi kreatif	1	Kontribusi sektor perdagangan Terhadap PDRB	8,94	
			2	Indeks Kemahalan Kontruksi	214,39	
			3	Kontribusi sektor Industri Terhadap PDRB	2,79	
			4	Jumlah kawasan industri rakyat yang dikembangkan	1,00	
			5	Persentase koperasi aktif dan berkembang	56,11	
			6	Jumlah UMKM yang berkembang	3703,00	
			7	Jumlah Kunjungan Wisatawan	1162,26	
			8	Lama Tinggal Wisatawan	2,65	
	3	Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi	1	Persentase tenaga lokal yang terserap pada sektor pertambangan	44,39	

Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Sasaran Pembangunan		Indikator		Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
1	*2*		*3*		*4*	*5*
		ketimpangan pendapatan antarpersonal, antarsektor dan antarwilayah	2	Cakupan produk pertanian lokal yang terserap dalam usaha pertambangan	5,00	Perindustrian dan Perdagangan
			3	Rata-rata pendapatan perkapita di wilayah kabupaten sekitar daerah pertambangan	18,17	
	4	Meningkatnya daya saing tenaga kerja, kesempatan dan perluasan kesempatan kerja	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	80,45	
			2	Tingkat Kesempatan Kerja	97,59	
			3	Persentase tenaga kerja yang berpendidikan tinggi	31,80	
			4	Persentase tenaga kerja OAP yang terserap di sektor industri manufaktur dan jasa	10,00	
	5	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	1	Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	58389000	
			2	Jumlah nilai investasi PMA yang direalisasikan	81753000	
			3	Lama hari pengurusan ijin investasi	60,00	
	6	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	1	Persentase jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik	45,00	
			2	Persentase jaringan irigasi fungsional	45,00	
Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan Yang Berkelanjutan	1	Pengarusutamaan Pembangunan rendah karbon sebagai upaya tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan	1	Tingkat penurunan emisi gas rumah kaca (gas karbon)	7,34	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Pengelola Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri, Biro Otonomi Khusus, Badan Penanggulangan
			2	Indeks Kualitas Udara	92,93	
			3	Indeks Kualitas Air	78,65	
			4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	81,52	
			5	Rasio capaian indikator-indikator pembangunan berkelanjutan SDGs	35,36	
			6	Cakupan kabupaten/kota yang melaksanakan Rencana Aksi Pelaksanaan SDGs	3,00	
	2	Peningkatan akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	1	Persentase aksesibilitas antar wilayah kabupaten/kota yang tehubung sarana transportasi jalan	65,52	
			2	Persentase jalan provinsi dengan kualitas baik	41,42	
			3	Persentase jembatan provinsi dengan kualitas baik	37,72	
	3	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung	1	Persentase jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik	45,00	
			2	Persentase jaringan irigasi fungsional	45,00	

Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Sasaran Pembangunan		Indikator		Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
1	*2*		*3*		*4*	*5*
		produktivitas wilayah				Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
	4	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	1	Cakupan Rumah Layak Huni	59,72	
			2	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	36,36	
			3	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	60,53	
	5	Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan	1	Cakupan ketersediaan Mikrohidro energi listrik perdesaan	20,00	
			2	Cakupan ketersediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di wilayah perdesaan	50,00	
			3	Persentase rumah tangga perdesaan yang menggunakan sumber penerangan listrik	42,73	
	6	Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah	1	Persentase penduduk +5 thn menggunakan telepon seluler	46,15	
			2	Prosentase distrik yang terlayani Sistem Komunikasi dan informasi	25,10	
	7	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	1	Cakupan kampung yang telah menjalankan pelayanan pemerintahan	0,00	
			2	Cakupan kampung yang berkembang	18,27	
	8	Meningkatnya efektivitas upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	1	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	0,00	
			2	Jumlah penduduk Miskin OAP	611,50	
	9	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah-wilayah perbatasan menjadi halaman depan negara	1	Jumlah Lokpri di Papua yang potensial bisa berkembang	1,00	
			2	Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Pendidikan di perbatasan	175,00	
			3		20,00	
			4		25,00	
			5	Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Kesehatan di perbatasan	0,50	
			6		8,00	
			7	Cakupan wilayah perbatasan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	0,00	
	10	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial	1	Cakupan warga KAT yang meningkat kesejahteraannya (diberdayakan)	50,00	
			2	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	20,00	

Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Sasaran Pembangunan		Indikator		Target Tahun 2020	Perangkat Daerah
1	*2*		*3*		*4*	*5*
			3	Persentase jumlah orang yang bekerja	97,68	
	11	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	1	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Tinggi	
			2	Cakupan pengembangan EWS (early warning systems) kebencanaan	0,00	
			3	Cakupan kampung tangguh bencana	10,00	
	12	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	1	Indeks Pemberdayaan Gender	79,69	
			2	Cakupan KDRT	313,00	
			3	Proporsi perempuan di DPRP	20,00	

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH

BAB 5 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH

Kebijakan pembangunan wilayah pada dasarnya merupakan keputusan dan intervensi pemerintah, baik secara nasional maupun regional untuk mendorong proses pembangunan daerah secara keseluruhan. Analisis ini sangat penting artinya dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan pada wilayah yang masih terbelakanag. Semua ini diperlukan untuk dapat meningkatkan proses pembangunan daerah sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pada tingkat wilayah diperlukan karena kondisi permasalahan dan potensi pembangunan yang dimiliki suatu wilayah umumnya berbeda satu sama lainnya sehingga kebijakan yang diperlukan tidak sama. Untuk itu sejak tahun 2013 Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan lima Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) berbasis wilayah adat di Papua dengan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi sektoral dan spasial. Lima KPE berbasis wilayah adat yang dimaksud adalah : (1) Wilayah adat Saireri yang terdiri atas kabupaten-kabupaten yang terletak di wilayah Kepulauan Teluk Cenderawasih yaitu Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen, (2) Wilayah adat Mamta yang terbagi atas kabupaten yang berada disepanjang sungai mamberamo hingga lautan pasifik yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom dan Mamberamo Raya, (3) Wilayah adat Me Pago yang terletak di wilayah Pegunungan Tengah sisi barat terdiri atas Kabupaten Mimika, Nabire, Paniai, Intan Jaya, Dogiyai dan Deyiai, (4) Wilayah adat La Pago yang terletak di kawasan Pegunungan Tengah sisi timur, terdiri atas Kabupaten Jayawijaya, Puncak Jaya, Puncak, Nduga, Yahukimo, Yalimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya dan Pegunungan Bintang, dan terakhir (5) Wilayah adat Anim Ha yang berada di wilayah selatan Papua, yaitu Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digul.

5.1. Kerangka Pengembangan Kewilayahan

Dalam rangka mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Berkadilan maka pelaksanaan pembangunan akan

dilakukan secara simultan dengan tahapan-tahapan yang jelas dan sistematis, memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan wilayah, memperhatikan dan menghormati nilai-nilai serta hak-hak adat masyarakat asli Papua.

Arah kebijakan spasial akan berintegrasi dengan kebijakan sektoral untuk mewujudkan harmonisasi pembangunan wilayah yang dilaksanakan secara sektoral oleh SKPD maupun pelaku pembangunan lainnya. Dan sebagai landasannya, berikut ini disampaikan kerangka pengembangan kewilayahan Papua.

Gambar 5.1 Kerangka Pengembangan Kewilayahan Papua

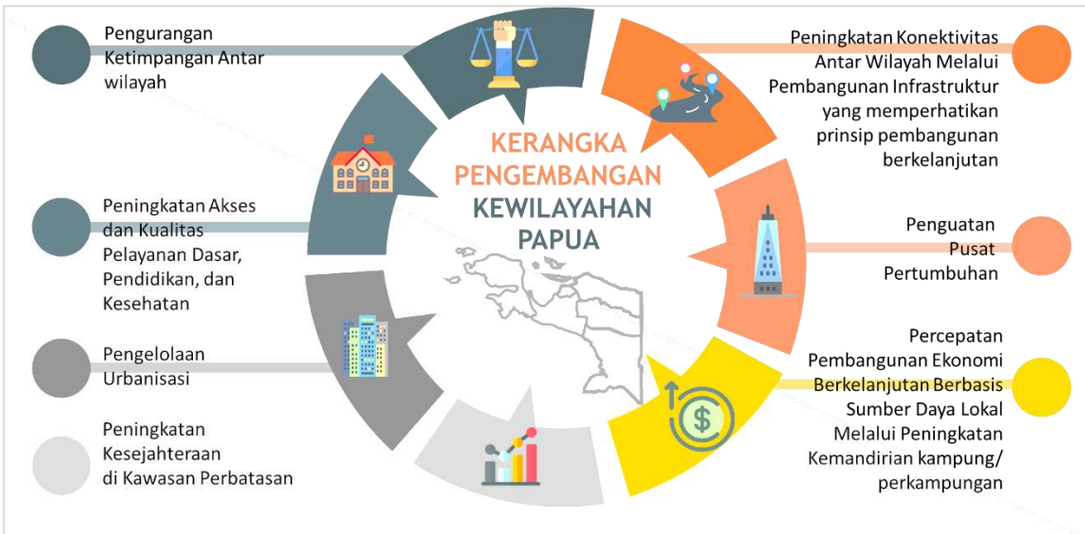

Penjelasan masing-masing kerangka pengembangan kewilayahan di atas dapat diurai sebagai berikut :

a. Penguatan Pusat Pertumbuhan

- Peningkatan skill OAP untuk mengisi sektor unggulan di pusat pertumbuhan;
- Keterkaitan antar kegiatan sektor ekonomi secara berkeadilan & berkelanjutan;
- Pengembangan industri pengolah produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan;
- Penguatan pusat pertumbuhan tersebar setara.

b. Peningkatan Kesejahteraan di Kawasan Perbatasan

- Pengintegrasian PLBN, PKSN, dengan lokasi prioritas
- Penguatan kegiatan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan di kawasan PKSN
- Penguatan distrik sebagai ujung tombak koordinasi pembangunan di lokasi prioritas
- Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur PLBN, PKSN, dan lokasi prioritas

- Pelintas batas tradisional

c. Percepatan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Lokal Melalui Peningkatan Kemandirian kampung/ perkampungan

- Budidaya dan nilai tambah lahan komunal untuk kegiatan ekonomi berkelanjutan berbasis sumber daya lokal
- Teknologi dan organisasi produksi pertanian berbasis sumber daya lokal
- Pengolahan hasil produksi pertanian agar bernilai tambah lebih tinggi
- Peningkatan akses produk lokal terhadap lokal, regional, dan nasional
- Keterampilan masyarakat lokal dalam kerjasama pemanfaatan lahan komunal dengan pihak luar secara berkelanjutan
- Efisiensi Perdagangan lokal

d. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar, Pendidikan, dan Kesehatan

- Pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan terutama untuk daerah pinggiran
- Pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di daerah pinggiran dengan insentif dan disinsentif untuk memastikan mereka dapat bekerja di wilayah tersebut
- Memastikan keberadaan sekolah kecil di kampung dan sekolah berasrama untuk memastikan siswa dapat mengakses
- Pengembangan kurikulum lokal berbasis budaya dan kearifan masyarakat
- Pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk pengembangan obat-obatan tradisional

e. Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah

- Pemerataan kesempatan ekonomi
- Pemerataan infrastruktur dasar
- Konsistensi penerapan penataan ruang

f. Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah Melalui Pembangunan Infrastruktur yang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan

- Menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dengan lokasi produksi komoditas berbasis sumber daya lokal, khususnya dalam pengembangan ekonomi Orang Asli Papua
- Pemanfaatan Energi baru terbarukan

g. Pengelolaan Urbanisasi

- Memastikan perencanaan dan penerapan tata guna lahan berkelanjutan
- Penyediaan perumahan layak dan infrastruktur dasar di kawasan perkotaan
- Pencegahan konflik horizontal
- Pengendalian kerusakan lingkungan

Dalam pengembangan wilayah Provinsi Papua tersebut, terdapat target keberhasilan per wilayah adat yang merupakan hasil berbagai program dan kegiatan pada tahun 2020, sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 5.1 – 5.6 berikut ini.

Tabel 5.1 Target Pertumbuhan PDRB Tahun 2020 Menurut Wilayah Adat Dan Kabupaten/Kota

Wilayah Adat dan Kabupaten/Kota	satuan	Target PDRB 2020	
		Dengan Pertambangan	Tanpa Pertambangan
MAMTA	Persen	**6.81-9.37**	**6.69-8.00**
Jayapura	Persen	9.37	8.00
Sarmi	Persen	6.81	6.69
Keerom	Persen	6.54	6.71
Mamberamo Raya	Persen	8.20	7.41
Kota Jayapura	Persen	7.85	7.98
LA PAGO	**Persen**	**6.46-8.51**	**6.34-7.00**
Jayawijaya	Persen	6.82	6.97
Puncak Jaya	Persen	6.46	6.34
Yahukimo	Persen	6.67	7.16
Peg. Bintang	Persen	7.04	6.54
Tolikara	Persen	7.13	7.18
Nduga	Persen	7.45	7.23
Lanny Jaya	Persen	7.40	7.21
Mamberamo Tengah	Persen	7.38	6.66
Yalimo	Persen	8.51	7.00
Puncak	Persen	6.75	6.54
MEE PAGO	**Persen**	**6.46-6.67**	**6.59-7.00**
Nabire	Persen	6.67	6.86
Paniai	Persen	6.53	6.39
Mimika	Persen	6.56	6.59
Dogiyai	Persen	6.64	6.81
Intan Jaya	Persen	6.46	6.74
Deiyai	Persen	6.88	7.00
SAERERI	**Persen**	**6.46-7.35**	**2.22-5.00**
Kepulauan Yapen	Persen	7.26	4.37
Biak Numfor	Persen	6.46	2.22
Waropen	Persen	7.35	5.00
Supiori	Persen	6.65	3.71
ANIMHA	**Persen**	**7.18-9.98**	**6.93-8.00**
Merauke	Persen	9.98	8.00
Boven Digoel	Persen	7.18	6.93

Wilayah Adat dan Kabupaten/Kota	satuan	Target PDRB 2020	
		Dengan Pertambangan	Tanpa Pertambangan
Mappi	Persen	8.81	7.33
Asmat	Persen	7.40	7.82

Tabel 5.2 Target Pertumbuhan PDRB Per Kapita Tahun 2020 Menurut Wilayah Adat Dan Kabupaten/Kota

Wilayah Adat dan Kabupaten/Kota	satuan	Target PDRB 2020	
		Tanpa Pertambangan	Dengan Pertambangan
MAMTA	**Rp juta**	**53.76-56.76**	**58.61-62.61**
Jayapura	Rp juta	55.43	59.28
Sarmi	Rp juta	54.85	58.61
Keerom	Rp juta	53.76	59.07
Mamberamo Raya	Rp juta	55.66	58.94
Kota Jayapura	Rp juta	56.76	62.61
LA PAGO	**Rp juta**	**11.87-15.37**	**13.75-20.75**
Jayawijaya	Rp juta	14.56	20.75
Puncak Jaya	Rp juta	13.93	17.35
Yahukimo	Rp juta	14.23	18.79
Peg. Bintang	Rp juta	15.37	15.39
Tolikara	Rp juta	13.52	18.87
Nduga	Rp juta	14.85	18.80
Lanny Jaya	Rp juta	11.87	13.75
Mamberamo Tengah	Rp juta	13.13	19.34
Yalimo	Rp juta	14.54	17.57
Puncak	Rp juta	13.53	17.39
MEE PAGO	**Rp juta**	**23.98-28.98**	**79.15-81.65**
Nabire	Rp juta	25.21	81.19
Paniai	Rp juta	27.43	80.24
Mimika	Rp juta	28.98	81.65
Dogiyai	Rp juta	23.98	79.15
Intan Jaya	Rp juta	26.50	80.48
Deiyai	Rp juta	28.70	80.23
SAERERI	**Rp juta**	**37.28 - 40.78**	**38.05-43.05**
Kepulauan Yapen	Rp juta	38.56	40.96
Biak Numfor	Rp juta	37.28	38.05
Waropen	Rp juta	40.78	43.05
Supiori	Rp juta	39.40	41.78
ANIMHA	**Rp juta**	**34.15-37.15**	**33.76-38.76**
Merauke	Rp juta	36.55	36.27

Wilayah Adat dan Kabupaten/Kota	satuan	Target PDRB 2020	
		Tanpa Pertambangan	Dengan Pertambangan
Boven Digoel	Rp juta	37.15	38.76
Mappi	Rp juta	35.87	37.18
Asmat	Rp juta	34.15	33.76

Tabel 5.3 Target Ketimpangan Pendapatan Gini Ratio Tahun 2020

Wilayah Adat dan Kabupaten/Kota	satuan	Target Gini Ratio 2020
MAMTA	**indeks**	**0.3471 - 0.2641**
Jayapura	indeks	0.2981
Sarmi	indeks	0.3471
Keerom	indeks	0.3327
Mamberamo Raya	indeks	0.2582
Kota Jayapura	indeks	0.2641
LA PAGO	**indeks**	**0.3481 - 0.1674**
Jayawijaya	indeks	0.3481
Puncak Jaya	indeks	0.1480
Yahukimo	indeks	0.2449
Peg. Bintang	indeks	0.2521
Tolikara	indeks	0.3682
Nduga	indeks	0.2244
Lanny Jaya	indeks	0.2501
Mamberamo Tengah	indeks	0.2391
Yalimo	indeks	0.1674
Puncak	indeks	0.1705
MEE PAGO	**indeks**	**0.3174 - 0.2271**
Nabire	indeks	0.3174
Paniai	indeks	0.4486
Mimika	indeks	0.2714
Dogiyai	indeks	0.2271
Intan Jaya	indeks	0.2642
Deiyai	indeks	0.2371
SAERERI	**indeks**	**0.3417 - 0.2824**
Kepulauan Yapen	indeks	0.3093
Biak Numfor	indeks	0.3417
Waropen	indeks	0.2817
Supiori	indeks	0.2824
ANIMHA	**indeks**	**0.4286 - 0.3141**
Merauke	indeks	0.3141
Boven Digoel	indeks	0.3074
Mappi	indeks	0.4286

Wilayah Adat dan Kabupaten/Kota	satuan	Target Gini Ratio 2020
Asmat	indeks	0.2817

Tabel 5.4 Target Tingkat Kemiskinan Tahun 2020 Menurut Wilayah Adat Dan Kabupaten/Kota

Wilayah Adat dan Kabupaten/Kota	satuan	Target Tingkat Kemiskinan 2020
MAMTA	**Persen**	**28.67 - 10.27**
Jayapura	Persen	12.54
Sarmi	Persen	11.73
Keerom	Persen	13.84
Mamberamo Raya	Persen	28.67
Kota Jayapura	Persen	10.27
LA PAGO	**Persen**	**37.68 - 28.67**
Jayawijaya	Persen	36.24
Puncak Jaya	Persen	34.17
Yahukimo	Persen	36.71
Peg. Bintang	Persen	28.67
Tolikara	Persen	30.74
Nduga	Persen	34.71
Lanny Jaya	Persen	37.68
Mamberamo Tengah	Persen	34.17
Yalimo	Persen	32.27
Puncak	Persen	35.64
MEE PAGO	**Persen**	**42.58 - 12.15**
Nabire	Persen	23.71
Paniai	Persen	34.17
Mimika	Persen	12.15
Dogiyai	Persen	28.74
Intan Jaya	Persen	40.71
Deiyai	Persen	42.58
SAERERI	**Persen**	**28.17 – 22.73**
Kepulauan Yapen	Persen	24.63
Biak Numfor	Persen	22.73
Waropen	Persen	28.17
Supiori	Persen	35.28
ANIMHA	**Persen**	**23.86 - 8.26**
Merauke	Persen	8.26
Boven Digoel	Persen	17.67
Mappi	Persen	23.86
Asmat	Persen	25.17

Tabel 5.5 Target Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 Menurut Wilayah Adat Dan Kabupaten/Kota

Wilayah Adat dan Kabupaten/Kota	satuan	Target IPM 2020
MAMTA	**indeks**	**52.51 - 81.09**
Jayapura	indeks	72.99
Sarmi	indeks	64.02
Keerom	indeks	66.04
Mamberamo Raya	indeks	52.51
Kota Jayapura	indeks	81.09
LA PAGO	**indeks**	**29.30 - 58.21**
Jayawijaya	indeks	58.21
Puncak Jaya	indeks	49.75
Yahukimo	indeks	49.48
Peg. Bintang	indeks	45.90
Tolikara	indeks	50.06
Nduga	indeks	29.30
Lanny Jaya	indeks	47.52
Mamberamo Tengah	indeks	47.55
Yalimo	indeks	47.97
Puncak	indeks	42.77
MEE PAGO	**indeks**	**48.29 - 69.62**
Nabire	indeks	69.62
Paniai	indeks	56.39
Mimika	indeks	76.09
Dogiyai	indeks	56.67
Intan Jaya	indeks	48.29
Deiyai	indeks	50.42
SAERERI	**indeks**	**64.55 - 74.08**
Kepulauan Yapen	indeks	69.30
Biak Numfor	indeks	74.08
Waropen	indeks	66.20
Supiori	indeks	64.55
ANIMHA	**indeks**	**50.41 -71.31**
Merauke	indeks	71.31
Boven Digoel	indeks	62.42
Mappi	indeks	60.67
Asmat	indeks	50.41

Tabel 5.6 Target Tingkat Pengangguran Tahun 2020 Menurut Wilayah Adat Dan Kabupaten/Kota

Wilayah Adat dan Kabupaten/Kota	satuan	Target Tingkat Pengangguran 2020
MAMTA	**Persen**	**1.75 - 11.39**

Wilayah Adat dan Kabupaten/Kota	satuan	Target Tingkat Pengangguran 2020
Jayapura	Persen	11.39
Sarmi	Persen	7.61
Keerom	Persen	1.75
Mamberamo Raya	Persen	6.92
Kota Jayapura	Persen	10.95
LA PAGO	**Persen**	**2.58 - 0.36**
Jayawijaya	Persen	0.58
Puncak Jaya	Persen	0.62
Yahukimo	Persen	0.51
Peg. Bintang	Persen	2.58
Tolikara	Persen	0.83
Nduga	Persen	1.67
Lanny Jaya	Persen	0.36
Mamberamo Tengah	Persen	0.54
Yalimo	Persen	2.12
Puncak	Persen	0.36
MEE PAGO	**Persen**	**6.17 - 0.24**
Nabire	Persen	6.17
Paniai	Persen	0.24
Mimika	Persen	5.71
Dogiyai	Persen	0.38
Intan Jaya	Persen	0.86
Deiyai	Persen	1.04
SAERERI	**Persen**	**6.37 - 1.28**
Kepulauan Yapen	Persen	2.15
Biak Numfor	Persen	6.37
Waropen	Persen	1.28
Supiori	Persen	2.62
ANIMHA	**Persen**	**5.70 - 0.28**
Merauke	Persen	2.87
Boven Digoel	Persen	2.14
Mappi	Persen	5.70
Asmat	Persen	0.28

5.2. Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah

Arah pengembangan kewilayahan Papua terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), khususnya dalam penetapan fungsi ruang dan lokasi pengembangan wilayah. Integrasi ini diperlukan untuk mewujudkan perkembangan wilayah yang seimbang serta sesuai dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam hal ini, kebijakan umum pembangunan berkelanjutan "*Green Growth* berbasis wilayah adat" diperlukan sebagai bagian dari fokus pembangunan daerah Papua, khususnya dalam penguatan pusat-pusat pertumbuhan, akselerasi pembangunan wilayah tertinggal, serta mewujudkan keterkaitan antar sektor ekonomi secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Gambar 5.2 Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah Provinsi Papua

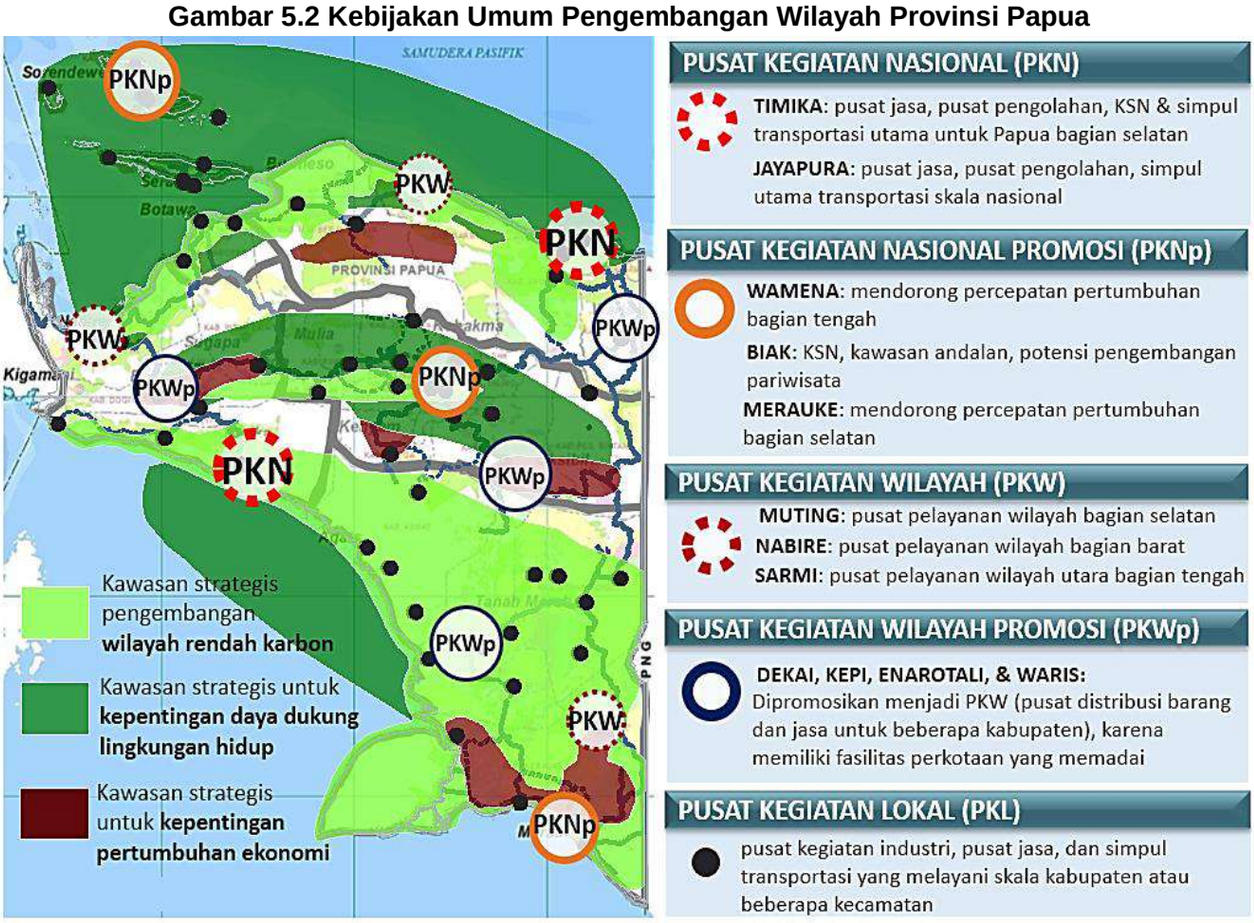

Tabel 5.7 Pusat Pertumbuhan dalam Pengembangan Wilayah Provinsi Papua

PUSAT PERTUM-BUHAN	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	**KEDUDUKAN:** • pintu gerbang ke kawasan internasional • berpotensi mendorong perkembangan wilayah sekitarnya • pusat pengembangan kegiatan jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi dengan skala pelayanan nasional atau beberapa provinsi				
			Timika di Kab. Mimika • KSN • simpul transportasi utama yang melayani Papua bagian selatan	**Kota Jayapura dan Kab. Jayapura** • simpul utama transportasi skala nasional dengan adanya pelabuhan laut dan bandara Sentani	
Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp)	**KEDUDUKAN:** dipromosikan menjadi PKN				
	Wamena di Kab. Jayawijaya • mendorong percepatan pertumbuhan bagian tengah Papua	**Merauke** • mendorong percepatan pertumbuhan di bagian selatan Papua			**Biak** • KSN • kawasan andalan, potensi pengembangan pariwisata
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	**KEDUDUKAN:** • mendukung PKN • pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten				
		Muting di Kab. Merauke • pusat pelayanan wilayah bagian selatan	**Nabire** • pusat pelayanan wilayah barat • menunjang willayah sekitarnya dengan adanya jalan, pelabuhan, dan bandara	**Sarmi** • pusat pelayanan wilayah utara bagian tengah	
Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp)	**KEDUDUKAN:** dipromosikan menjadi PKW				
	Dekai di Kab. Yahukimo • pusat simpul masuknya barang dan jasa • pusat pengembangan industri di wilayah selatan	**Kepi di Kab. Mappi** • ibukota Kab. Mappi	**Enarotali di Kab. Paniai** • pusat distribusi barang dan jasa untuk beberapa kabupaten seperti Intan Jaya, Deiyai, dan Puncak	**Waris di Kab. Keerom** • memiliki fasilitas perkotaan memadai	
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	**KEDUDUKAN:** • pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. • simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. (Semua ibukota kabupaten yang tidak termasuk PKN, PKNp, dan PKW maka ditentukan sebagai PKL)				

5.3. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan SDM di Papua untuk mewujudkan "*green growth* berbasis wilayah adat" dan pengembangan klaster ekonomi dilakukan dengan pembentukan SDM unggul melalui *center* of *knowledge*, politeknik agroindustri,

technopark, SMK pertanian, dan balai latihan kerja yang terletak di lokasi-lokasi strategis dalam pembentukan klaster ekonomi setiap wilayah adat.

Secara umum SDM di klaster pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pariwisata di Papua harus menguasai kompetensi dasar untuk dapat menjalankan kegiatan budidaya, pengolahan dan pemasaran. Selain itu, keberadaan pusat klaster yang membantu memberikan informasi mengenai peluang pasar untuk hasil produk budidaya olahan pertanian tersebut mengharuskan para pelaku usaha pertanian menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai kompetensi yang harus dimiliki oleh masyarakat tersebut tidak harus dipelajari secara mandiri, namun terdapat lembaga antar klaster yang menjalin kemitraan dengan berbagai aktor yaitu pemerintah, pelaku usaha pertanian eksternal, akademisi, swasta, organisasi sosial, dan lembaga keuangan eksternal untuk membantu SDM pelaku usaha pertanian. Bentuk bantuan yang diberikan tidak hanya dalam bentuk pelatihan atau sosialisasi, namun juga dalam bentuk studi banding, penelitian & pengembangan, investasi, serta memberi bantuan input (benih, pupuk, modal, teknologi, dll). Kemitraan tersebut diharapkan dapat mendorong SDM pelaku usaha pertanian di Papua yang saling bertukar input, output, pengetahuan, informasi dan teknologi serta bekerja sama dengan pelaku usaha pertanian eksternal, sehingga dapat tercipta SDM yang kompeten, kompetitif, dan inovatif dalam implementasi *green growth* berbasis wilayah adat.

Tabel 5.8 Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan

	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
Politeknik Agroindustri terakreditasi B	Wamena di Kab. Jayawijaya* (*opsional)	Kab. Merauke* (*opsional)			
Technopark sebagai *center of excellence* sektor unggulan klaster ekonomi	V	V	V	V	V
SMK pertanian, pariwisata, dan/atau pertambangan	Wamena di Kab. Jayawijaya	Kab. Merauke	Timika di Kab. Mimika Kab. Nabire	Kab. Jayapura Kab. Sarmi	Kab. Biak Numfor
Balai Latihan Kerja (BLK)	Wamena di Kab. Jayawijaya Kab. Yahukimo	Kab. Merauke Kepi di Kab. Mappi Kab. Boven Digoel	Timika di Kab. Mimika Kab. Nabire	Kab. Jayapura	Kab. Biak Numfor
Lembaga standarisasi mutu					Kab. Biak Numfor

Tentu saja strategi pembangunan pendidikan menengah dan tinggi di atas tidak mengabaikan strategi yang saat ini telah dilakukan untuk mendukung pendidikan dasar, yaitu melalui penguatan sekolah kecil dan sekolah berasrama untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar.

b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan Papua dilakukan dengan mempercepat pemenuhan dan peningkatan pelayanan sarana prasarana permukiman sesuai dengan karakteristik wilayah, Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan kearifan lokal masyarakat Papua. Dalam implementasi upaya peningkatan tersebut diperlukan peran aktif masyarakat khususnya dalam peningkatan kapasitas tenaga kesehatan lokal. Secara umum, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan Papua dilakukan dengan pemberian tunjangan tenaga kesehatan, penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan, pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan sarana kesehatan, pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat, pengembangan obat-obat tradisional, serta pencegahan dan penanggulangan enyakit menular HIV Aids, TB paru, dan malaria.

Tabel 5.9 Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Peningkatan Sarana Kesehatan dalam Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan di Papua

	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
RSUD tipe A				Kota Jayapura	
RSUD tipe B	v	v	v		v
Rumah sakit pratama	Kab. Tolikara Kab. Pegunungan Bintang	Mindiptana di Kab. Boven Digoel Muting di Kab. Merauke	Kab. Dogiyai	Kab. Sarmi	Kab. Supiori
Rumah sakit mata				Kota Jayapura	
Rumah sakit jiwa		Kab. Merauke	Kab. Mimika	Kota Jayapura	
Sarana kesehatan terapung		v		v	
Sarana kesehatan keliling				v	v

Sebagaimana bidang pendidikan, penguatan di bidang kesehatan skunder juga paralel dengan strategi pengembangan

kesehatan primer dan kesehatan berbasis masyarakat melalui skema dukungan otonomi khusus.

5.4. Pengembangan Perekonomian Wilayah

Pengembangan ekonomi wilayah adat secara umum disesuaikan berdasarkan potensi pengembangan komoditas lokal, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta prospek pasar. Sebagai perwujudan pengembangan keterkaitan ekonomi hulu dan hilir di Papua terdapat arah pengembangan klaster (*cluster*) pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata di Papua. Penentuan lokasi klaster telah mempertimbangkan potensi komoditas lokal, kedudukan dan fungsi lokasi dalam sistem perkotaan, kondisi infrastruktur pendukung, arahan KLHS, serta penetapan fungsi lindung dan budidaya dalam RTRWP.

Gambar 5.3 Pengembangan Klaster Ekonomi di Papua

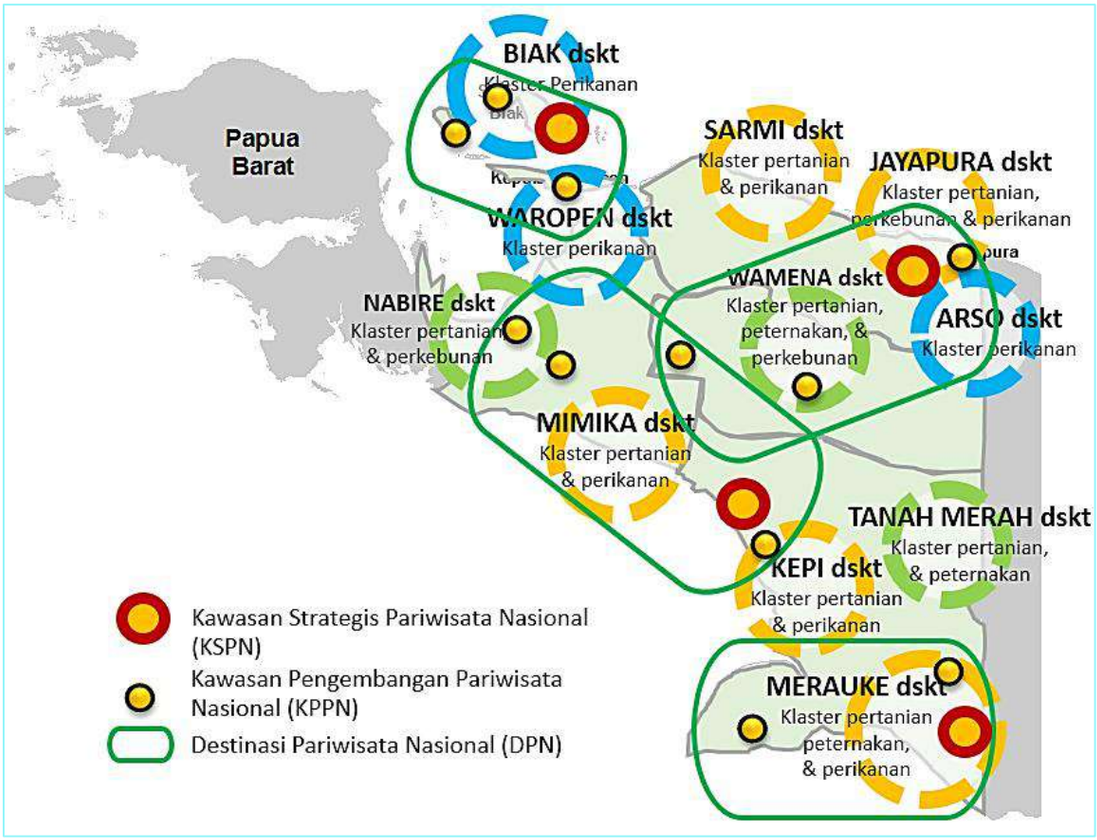

Tantangan dalam pengembangan klaster ekonomi di Papua adalah dampak yang tidak dapat dirasakan dalam jangka waktu yang pendek sehingga diperlukan upaya lebih agar klaster ekonomi terbentuk secara berkelanjutan. Klaster yang berhasil adalah klaster yang terspesialisasi, memiliki daya saing dan keunggulan komparatif,

dan berorientasi eksternal. Klaster tersebut memiliki jaringan lokal, akses yang baik pada permodalan, institusi penelitian dan pengembangan, tenaga kerja yang berkualitas, melakukan kerjasama yang baik antara perusahaan dan lembaga lainnya, mengikuti perkembangan teknologi, dan adanya tingkat inovasi yang tinggi.

Tabel 5.10 Pengembangan Perekonomian Wilayah

	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN WILAYAH BERBASIS KOMODITAS LOKAL					
Sektor Primer	kopi, buah merah, ubi jalar, sagu	padi, karet, kopi, tebu, perikanan, peternakan, kelapa sawit	kopi, buah merah, ubi jalar, tambang, perikanan, sagu	kakao, kelapa dalam, kelapa sawit, perikanan	hasil Laut, perIkanan
Sektor Sekunder	industri pengolahan sagu, buah merah,ubi jalar, kopi	industri pengolahan tebu, kelapa sawit, peternakan, dan pengalengan ikan	industri pengolahan hasil pertambangan, pertanian, dan/ atau perkebunan	industri pengolahan ikan dan hasil perkebunan	industri kayu, pengolahan ikan
Sektor Tersier	pariwisata, perdagangan dan jasa	pariwisata, perdagangan dan jasa	pariwisata, perdagangan dan jasa	pariwisata, perdagangan dan jasa	pariwisata, perdagangan dan jasa
PENGEMBANGAN KLASTER EKONOMI DI PAPUA					
Klaster Pertanian	• Wamena dan sekitarnya	• Tanah Merah dan sekitarnya • Kepi dan sekitarnya • Merauke dan sekitarnya	• Nabire dan sekitarnya • Mimika dan sekitarnya	• Sarmi dan sekitarnya • Jayapura dan sekitarnya	
Klaster Perkebunan	• Wamena dan sekitarnya		• Nabire dan sekitarnya	• Jayapura dan sekitarnya	
Klaster Peternakan	• Wamena dan sekitarnya	• Tanah Merah dan sekitarnya • Merauke dan sekitarnya			
Klaster Perikanan		• Kepi dan sekitarnya • Merauke dan sekitarnya	• Mimika dan sekitarnya	• Sarmi dan sekitarnya • Arso dan sekitarnya • Jayapura dan sekitarnya	• Biak dan sekitarnya • Waropen dan sekitarnya

	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
Klaster Pariwisata	• KPPN Timika-Lorentz dan sekitarnya di Kab. Mimika dan Jayawijaya • KPPN Jayawijaya di Kab. Jayawijaya • KPPN Wamena di Kab. Jayawijaya	• KSPN Wasur-Merauke dan sekitarnya di Kab. Merauke • KPPN Kimaam dan sekitarnya di Kab. Merauke • KPPN Danau Bian dan sekitarnya di Kab. Merauke	• KPPN C.A. Weyland dan sekitarnya di Kab. Nabire • KPPN Paniai dan sekitarnya di Kab. Paniai • KSPN Agats- Asmat dan sekitarnya di Kab. Asmat • KPPN Timika-Lorentz dan sekitarnya di Kab. Mimika dan Jayawijaya	• KSPN Sentani dan sekitarnya di Kab. Jayapura • KPPN Jayapura dan sekitarnya di Kota Jayapura	• KSPN Biak dan sekitarnya di Kab. Biak • KPPN Numfor dan sekitarnya di Kab. Biak numfor • KPPN Serui dan sekitarnya di Kab. Kep.Yapen • KPPN Supiori dan sekitarnya di Kab. Supiori

5.5. Kebijakan Pengembangan Konektivitas

Pengembangan konektivitas Papua diarahkan untuk memadukan sistem pelayanan transportasi antarmoda, dalam menciptakan dan meningkatkan aksesibilitas di dalam maupun antar wilayah adat, khususnya antara pusat pertumbuhan dengan kawasan penyangga. Pada pengembangan klaster, infrastruktur menghubungkan lokasi produksi komoditas berbasis sumber daya lokal dengan pusat pertumbuhan dan wilayah luar Papua, khususnya dalam pengembangan ekonomi OAP. Dengan adanya aksesibilitas yang memadai diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah, serta menarik dan mengembangkan minat investasi di berbagai sektor, baik pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, maupun pertambangan.

a. Arah Pengembangan Konektvitas MAMTA

<u>Jalan dan jembatan</u>:

1. Peningkatan, pemeliharaan, dan penuntasan ruas jalan sesuai dengan SK No. 188.4/365/Tahun 2016
2. Pembangunan jalan non status untuk menghubungkan antar kawasan sentra ekonomi masyarakat yang tersebar di seluruh kabupaten

Gambar 5.4 Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Mamta

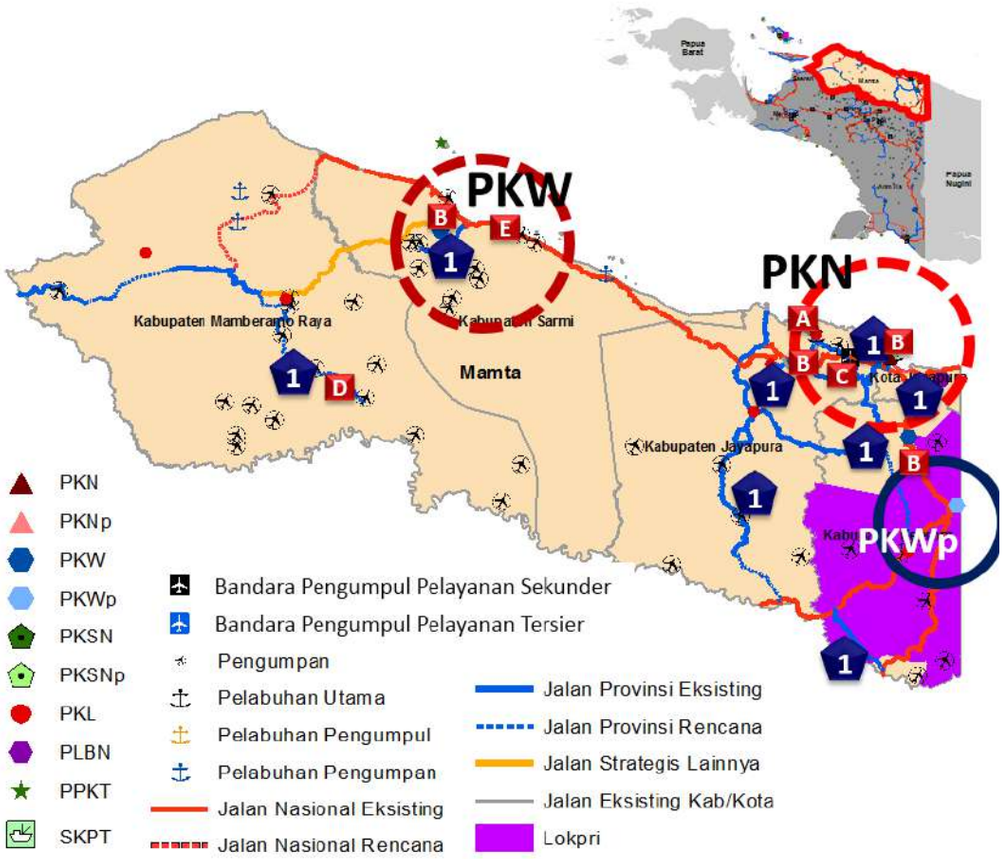

<u>Perhubungan:</u>

A. Pembangunan pelabuhan peti kemas Depapre di Kab. Jayapura
B. Pembangunan terminal type B di Kab./kota Jayapura, Sarmi, dan Keerom
C. Pembangunan dermaga-dermaga di Danau Sentani
D. Pembangunan Bandara Kustra di Kab.Mamberamo Raya
E. Pembangunan Pelabuhan Wakde di Kab. Sarmi

b. Arah Pengembangan Konektivitas SAERERI

<u>Jalan dan jembatan</u>:

1. Peningkatan, pemeliharaan, dan penuntasan ruas jalan sesuai dengan SK No. 188.4/365/Tahun 2016
2. Pembangunan jalan non status untuk menghubungkan antar kawasan sentra ekonomi masyarakat (tersebar di seluruh kabupaten)

Gambar 5.5 Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Saereri

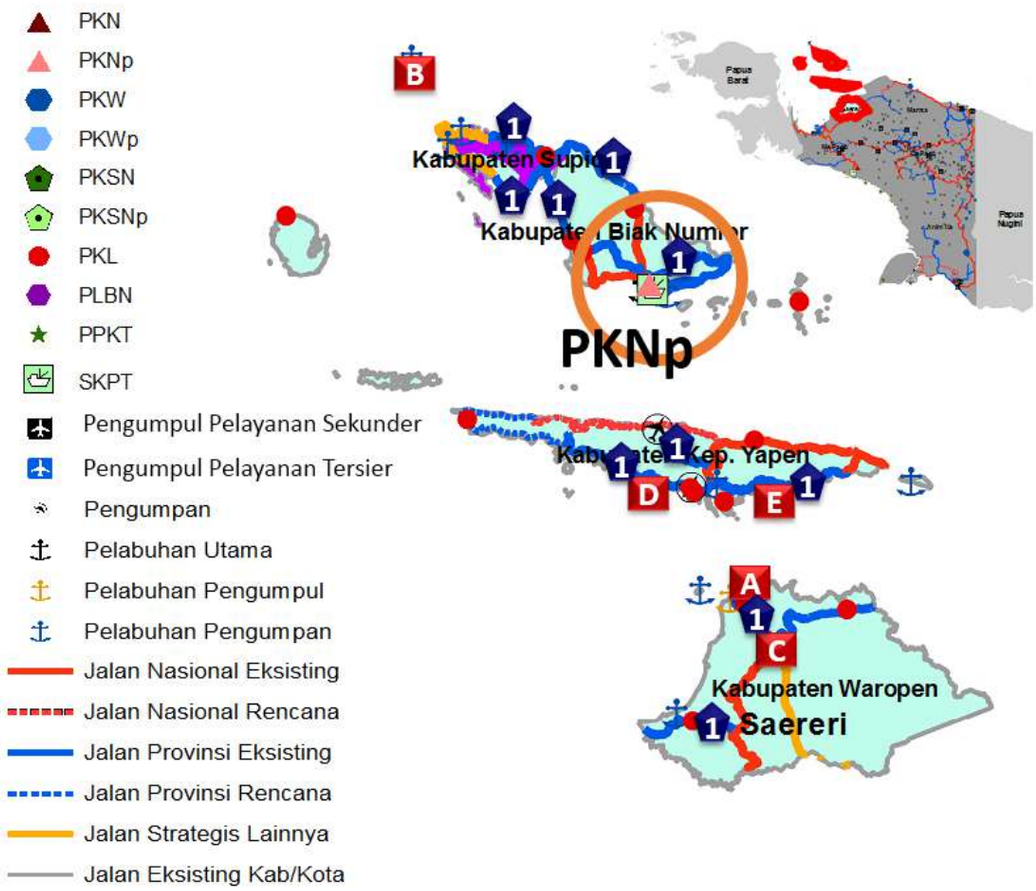

<u>Perhubungan:</u>

A. Pembangunan Pelabuhan Waren di Kabupaten Waropen
B. Pembangunan Pelabuhan Miosbepondi di Kab. Supiori
C. Pembangunan Bandara Botawa di Kabupaten Waropen
D. Pembangunan dan peningkatan Bandara Kamanap di Kab. Kepulauan Yapen
E. Pembangunan Pelabuhan Ampimoi di Kab. Kepulauan Yapen

c. Arah Pengembangan Infrastruktur MEE PAGO

<u>Jalan dan jembatan</u>:

1. Peningkatan, pemeliharaan, dan penuntasan ruas jalan sesuai dengan SK No. 188.4/365/Tahun 2016
2. Pembangunan jalan non status untuk menghubungkan antar kawasan sentra ekonomi masyarakat (tersebar di seluruh kabupaten)

Gambar 5.6 Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Mee Pago

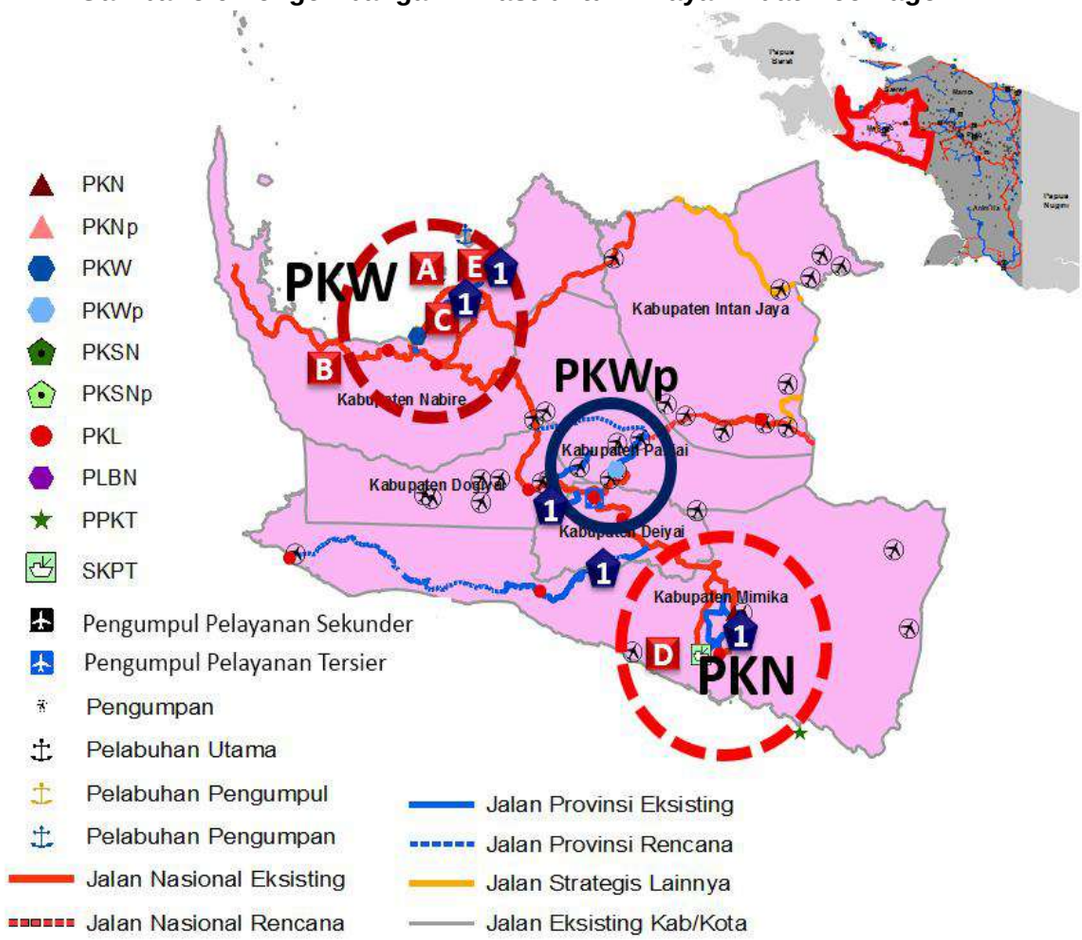

<u>Perhubungan:</u>

A. Pembangunan Pelabuhan Perintis Pulau Mambor di Kab. Nabire
B. Pembangunan Bandara Wanggar di Kab.Nabire
C. Pembangunan Terminal type B di Anibe
D. Pembangunan Dermaga Sungai Sipu-sipu di Kab. Mimika
E. Rehabilitasi dan peningkatan Dermaga Samabusa di Kab. Nabire

d. Arah Pengembangan Infrastruktur LA PAGO

<u>Jalan dan jembatan</u>:

1. Peningkatan, pemeliharaan, dan penuntasan ruas jalan sesuai dengan SK No. 188.4/365/Tahun 2016
2. Pembangunan jalan non status untuk menghubungkan antar kawasan sentra ekonomi masyarakat (tersebar di seluruh kabupaten)

Gambar 5.7 Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat La Pago

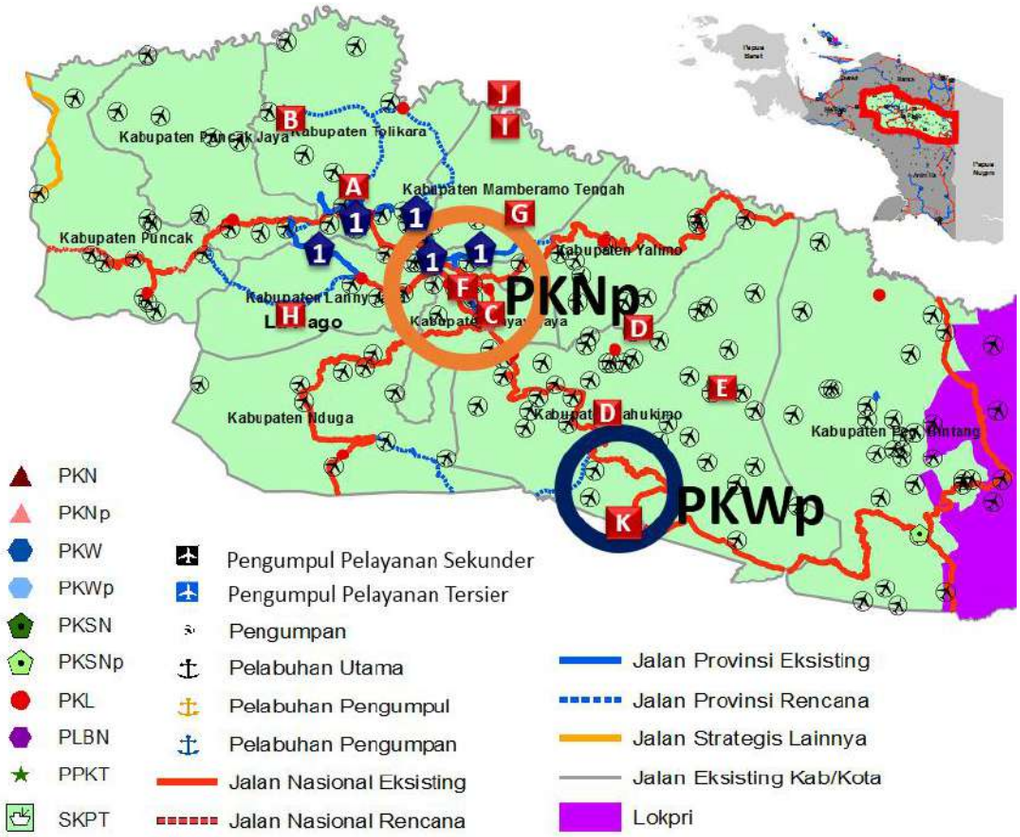

<u>Perhubungan:</u>

A. Pembangunan Bandara Mamit di Tolikara
B. Pembangunan Bandara Fawi di Puncak Jaya
C. Pembangunan Bandara Wamena
D. Pembangunan Bandara Panggema & Ninia di Yahukimo
E. Pembangunan Bandara Saminage di Yahukimo
F. Pembangunan Terminal Tipe B di Jayawijaya
G. Pembangunan Bandara Kobakma di Mamberamo Tengah
H. Pambangunan Bandara Kuyawge di Lanny Jaya
I. Pembangunan Bandara Taria Mamberamo Tengah
J. Pembangunan Dermaga Sungai Taria di Mamberamo Tengah
K. Pembangunan Bandara Nop Gollat di Yahukimo

e. Arah Pengembangan Infrastruktur Anim Ha

<u>Jalan dan jembatan</u>:

1. Peningkatan, pemeliharaan, dan penuntasan ruas jalan sesuai dengan SK No. 188.4/365/Tahun 2016

Gambar 5.8 Pengembangan Infrastruktur Wilayah Adat Anim Ha

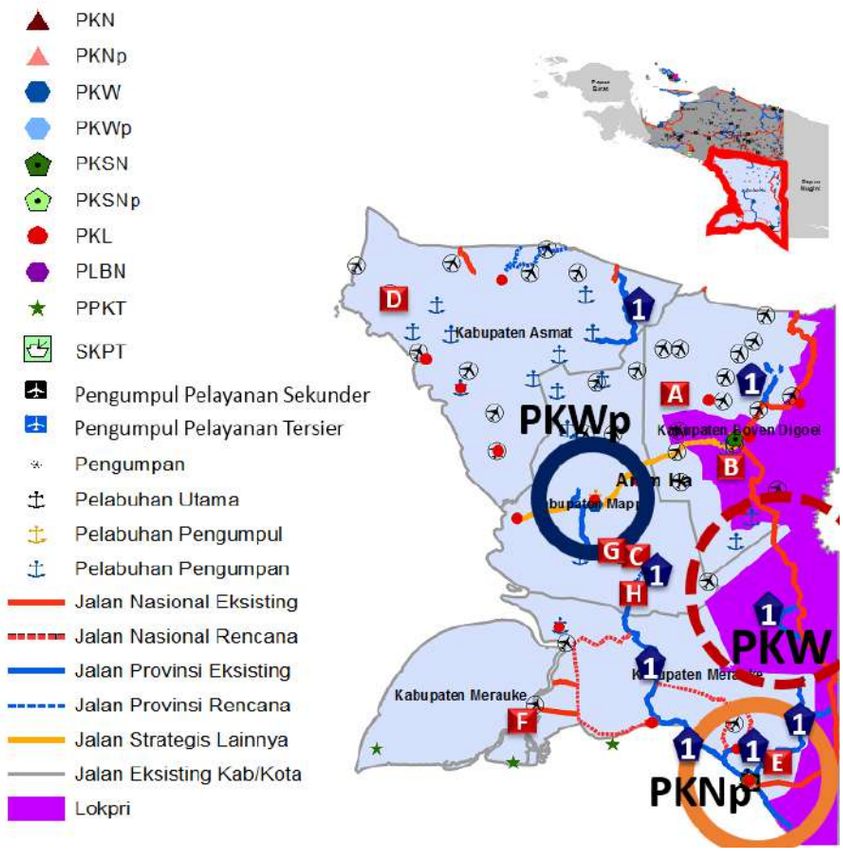

2. Pembangunan jalan non status untuk menghubungkan antar kawasan sentra ekonomi masyarakat (tersebar di seluruh kabupaten)

<u>Perhubungan:</u>

A. Pembangunan Pelabuhan Perintis Bomakia di Boeven Digul
B. Pengembangan Pelabuhan Tanah Merah di Boeven Digul
C. Pembangunan Bandara Kepi di Mappi
D. Pembangunan Bandara Ewer di Asmat
E. Pembangunan Terminal Tipe B di Merauke
F. Pembangunan Pelabuhan Kimam di Merauke
G. Pengembangan Pelabuhan Kepi
H. Pembangunan Pelabuhan Bade di Kabupaten Mappi

5.5.1.1. Pengembangan Wilayah Pinggiran dan Perbatasan

Pengembangan wilayah pinggiran menjadi prioritas daerah dalam pembangunan pelayanan dasar terutama untuk menjami

bahwa pelayanan dasar, kesempatan ekonomi dan infrastruktur dasar sampai ke kampung-kampung yang ada di wilayah pinggiran.

Salah satu Kawasan pinggiran yang perlu mendapatkan prioritas pembangunan adalah kawasan perbatasan. Pembangunan Kawasan perbatasan bertujuan untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Terdapat 2 (dua) pendekatan pembangunan dalam mengembangkan kawasan perbatasan di Papua, yaitu pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*). Pendekatan keamanan dilakukan melalui:

- Tranformasi kelembagaan lintas batas negara menjadi satu sistem pengelolaan yang terpadu, yaitu *costum, immigration, quarantine, security* (CIQS)
- Peningkatan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana prasarana pengamanan perbatasan laut dan darat, yang melibatkan peran aktif masyarakat
- Peningkatan kerjasama pertahanan dan keamanan

Adapun pendekatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*) dilakukan melalui:

- Penguatan kegiatan ekonomi berbasis komoditas lokal di PLBN, PKSN, dan lokpri yg mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga, serta didukung pembangunan infrastruktur & pelayanan dasar
- Pembangunan SDM yg handal & pemanfaatan IPTEK
- Pembangunan konektivitas antara PKSN, lokpri, PKW, & PKN
- Penguatan distrik sebagai ujung tombak koordinasi pembangunan di lokasi prioritas
- Peningkatan kerjasama perdagangan dengan negara tetangga

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, maka peran provinsi Papua akan lebih banyak pada pendekatan kesejahteraan masyarakat. Karena menyangkut Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) , maka penyelenggaraan kewenangan ini tentu saja dilaksanakan bekerja sama dengan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi juga akan mendorong daerah kabupaten di perbatasan agar mendayaguanakan sumber daya ekonomi lokal dalam mendukung PKSN agar

pembangunan PKSN memberikan kontribusi positif bagi penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat kampung-kampung di sekitarnya.

Tabel 5.11 Pengembangan Wilayah Perbatasan

	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	**ANIM HA**	**MEE PAGO**	**MAMTA**	**SAERERI**
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	**KEDUDUKAN:** • menunjang sektor strategis nasional • menunjang pengembangan wilayah baru atau penyebaran kegiatan ekonomi • daerah penyangga aglomerasi pertumbuhan pusat kegiatan yang telah ada • berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga • pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga • simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya				
	Oksibil di Kab. Pegunungan Bintang • pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya	**Tanah Merah di Kab. Boven Digoel** • pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu; • pusat perdagangan skala internasional • pengembangan sekolah bertaraf internasional		**Arso di Kab. Keerom** • pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya • pengembangan sekolah bertaraf internasional	
PKSN Promosi	**KEDUDUKAN:** Kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara				
		Merauke di Kab. Merauke • pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu; • peningkatan kualitas dan kuantitas hasil perikanan • pusat perdagangan skala internasional • pengembangan sekolah bertaraf internasional		**Jayapura** • pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu • peningkatan kualitas dan kuantitas hasil perikanan • pusat perdagangan skala internasional	
Lokasi Prioritas (lokpri) perbatasan	**KEDUDUKAN:** Kawasan yang mempercepat pembangunan dan efektivitas peningkatan kualitas pelayanan publik di perbatasan				
	Kab,Pegunungan Bintang (9 distrik) Batom, Iwur, Kiwirok, Pepera, Oksomol, Tarub, Murkim, Kiwirok Timur, Mufinop	**Kab. Merauke (5 distrik)** Eligobel, Muting, Sota, Ulilin, Naukenjeri **Kab. Boven Digoel (4 distrik)** Mindiptana, Tanah Merah, Jair, Waraopko		**Kab. Keerom (5 distrik)** Web, Senggi, Waris, Arso Timur, Towe **Kota Jayapura (2 distrik)** Muara Tami, Jayapura Utara	**Kab. Supiori (3 distrik)** Supirori Barat, Supirori Utara, Kepulauan Aruri
Pulau-Pulau Terkecil Terluar (PPKT)	**KEDUDUKAN:** • Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), yang berperan dalam kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia • Penempatan pos pertahanan, pos keamanan, dan/atau pos lain • Penempatan sarana bantu navigasi pelayaran • Peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk usaha kelautan dan perikanan, ekowisata bahari, pendidikan dan penelitian, pertanian subsisten, dan industri jasa maritim				

	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	**ANIM HA**	**MEE PAGO**	**MAMTA**	**SAERERI**
Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)	**KEDUDUKAN:** ● Pusat pembangunan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan dengan basis sektor kelautan dan perikanan				
		SKPT Merauke	**SKPT Timika**	**SKPT Sarmi**	**SKPT Biak Numfor**
Pos Lintas Batas Negara (PLBN)		**PLBN Sota** di Kab. Merauke		**PLBN Skouw** di Kota Jayapura	

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

RKPD Provinsi Papua Tahun 2020

BAB 6 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah, adalah bagian yang tidak terpisahkan yang penyusunannya memperhatikan batasan urusan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah. Sejalan dengan perubahan paradigma penganggaran " *money follow function* kepada *money follow program*", maka perlu dilakukan penjabaran secara operasional tentang program prioritas. Hal penting yang menjadi penekanan dalam perubahan paradigma tersebut, bahwa program prioritas wajib mendapat penguatan penganggaran, sehingga penganggaran untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 merupakan rumusan penganggaran yang memiliki korelasi terhadap pembangunan daerah yang dimana penganggaran lebih fokus dan terarah kepada target capaian pembangunan daerah. Adapun penentuan program prioritas disusun berdasarkan : (1). Merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2020 sesuai dengan pentahapan tema RPJPD Provinsi Papua 2005-2025, (2). Merupakan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2020 serta indikatornya. (3). Merupakan prioritas program ditingkat Perangkat Daerah yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD,dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1). Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan. (2). Menentukan keluaran/output setiap kegiatan. (3). Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program. (4). Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.

Menghitung alokasi Perangkat Daerah berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan,

kerangka waktu pelaksanaan dan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke Perangkat Daerah sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan Perangkat Daerah juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra- Perangkat Daerah sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

6.1. Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2020

Dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan, dirumuskan Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2020 untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023. Program dan Kegiatan Prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua tahun 2020 yang telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1 Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; 4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	1. Peningkatan Kualitas Sdm Dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	1.1.1. Meningkatnya Aksesibiltas dan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan; 1.1.2. Meningkatnya budaya baca pada masyarakat; 1.1.3. Meningkatnya prestasi olah raga dan Sukses penyelenggaraan PON; 1.1.4. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah; 1.1.5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 1.1.6. Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan; 1.2.1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan sosial keagamaan; 1.2.2. Terwujudnya internalisasi nilai adat dan budaya asli Tanah Papua dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat				
			Program Pendidikan Anak Usia Dini			
				Pengadaan alat permainan edukatif (APE) dalam	5	Dinas Pendidikan
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Penambahan Ruang Kelas SD dan Perpustakaan Model Gerbangmas	1	Dinas Pendidikan
				Pelatihan Guru SMP Gerbangmas Hasrat Papua	125 Orang	Dinas Pendidikan
			Program Pendidikan Non Formal			
				Rapat Koordinasi Tim Pengendali Percepatan Tuntas Buta Aksara Provinsi	100 Orang	Dinas Pendidikan
				Penguatan KKN Tematik untuk Pemberantasan Buta Aksara	20000 Kelompok	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
				Pelaksanaan sertifikasi pendidik	220 Orang	Dinas Pendidikan
				Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	200 Orang	Dinas Pendidikan
				Penyediaan Bantuan Biaya MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran)	12 Kelompok	Dinas Pendidikan
				Pembekalan dan Pengiriman Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Tenaga Kependidikan Lainnya Yang Berprestasi dan Berdedikasi	145 Orang	Dinas Pendidikan
				SERTIFIKASI GURU DAN PROGRAM KEAHLIAN SMK	600 Orang	Dinas Pendidikan
				Magang Guru Produktif SMK	80 Orang	Dinas Pendidikan
				Penguatan dan Sertifikasi Guru SMA/SMK/PKLK	384 Orang	Dinas Pendidikan
				Penyediaan Tenaga Guru	40 Orang	Dinas Pendidikan
				Pemetaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/PKLK	87 Orang	Dinas Pendidikan
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	100 %	Dinas Pendidikan
				Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah	100 %	Dinas Pendidikan
				Pengelolaan PAK (pengelolaan angka kredit) guru, pengawas sekolah, dan pamong belajar	100 %	Dinas Pendidikan
				Pengembangan Website Pendidikan	100 %	Dinas Pendidikan
				Supervisi dan Monitoring PBM di Sekolah	100 %	Dinas Pendidikan
			Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus			
				Pembinaan dan Pengembangan PK/PLK	500 Orang	Dinas Pendidikan
				Makan dan Minum Siswa SMA N 3 dan SMANKOR	455 Orang	Dinas Pendidikan
				Biaya Operasional KPG,SMA N 3 Buper dan SMA N Keberbakatan Olahraga	5 Sekolah	Dinas Pendidikan
				Pembinaan Siswa SMANKOR Jayapura Mengikuti Kejuaraan	20 Orang	Dinas Pendidikan
				penyediaan biaya operasional PAUD bahasa ibu Paud Model di 10 lembaga	10 Sekolah	Dinas Pendidikan
				Fasilitasi lomba O2SN SD tk Provinsi	100 Orang	Dinas Pendidikan
				pengadaan peralatan latihan dan bertanding 8 CABOR untuk siswa SMANKOR	16 Alat	Dinas Pendidikan
			Program Pendidikan Menengah Kejuruan			
				Lomba Ketrampilan Siswa (LKS-SMK)	100 Orang	Dinas Pendidikan
				Magang Guru Produktif dan Siswa		Dinas Pendidikan
				Lomba Debat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia	100 %	Dinas Pendidikan
				Penerapan dan Pelatihan MBS SMK	100 %	Dinas Pendidikan
				TOT Penyusunan Kurikulum SMK	100 Orang	Dinas Pendidikan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Pembinaan Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah SMK		Dinas Pendidikan
				Revitalisasi Kajian Kurikulum SMK di lima Wilayah Adat		Dinas Pendidikan
				Lomba O2SN SMK	100 Orang	Dinas Pendidikan
				Lomba FLS2N SMK	100 Orang	Dinas Pendidikan
				Lomba debat bahasa inggris dan indonesia		Dinas Pendidikan
				Lomba Adiwiyata Mandala SMK	116 Sekolah	Dinas Pendidikan
				Lomba Karya Ilmiah siswa SMK		Dinas Pendidikan
				Lomba Keterampilan Siswa (LKS)		Dinas Pendidikan
				Magang siswa produktif SMK		Dinas Pendidikan
				Magang guru produktif SMK		Dinas Pendidikan
				Praktek kerja industri siswa	100 Orang	Dinas Pendidikan
				Pengembangan unit Produksi untuk SMK	18 Unit	Dinas Pendidikan
				DAK Penugasan SMK	9600 Orang	Dinas Pendidikan
				pelatihan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) SMK	100 Orang	Dinas Pendidikan
				pelatihan penyusunan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) SMK	100 Orang	Dinas Pendidikan
				Pengembangan Unit Produksi (Kantin Sekolah Berbasis Makanan Lokal dan toko Souvenir dan Portal Informasi Berbasis Online) SMK di 6 Kota		Dinas Pendidikan
				Penyusunan Kurikulum Praktek Kerja Siswa SMA/SMK		Dinas Pendidikan
				Revitalisasi SMK		Dinas Pendidikan
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan			
				Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	29 Kabupaten	Dinas Kesehatan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Pengiriman dan Relokasi Obat buffer stok dan program provinsi ke Kab dan 14 titik terisolir	29 Kabupaten	Dinas Kesehatan
				Pengadaan obat buffer stock provinsi	87 Produk	Dinas Kesehatan
				Pengadaan obat-obatan untuk program HIV/AIDS	21 Produk	Dinas Kesehatan
				Pengadaan Obat-obatan Program P2M	11 Produk	Dinas Kesehatan
				Pengadaan logistik Non Oat Provinsi Papua	4 Produk	Dinas Kesehatan
				Pengadaan reagen IMS Provinsi Papua	2 Produk	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Perbekalan Farmasi/Gudang Obat Buffer Stock Provinsi	1 Tahun	Dinas Kesehatan
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat			
				Pelatihan Pendampingan Akreditasi Puskesmas	30 Orang	Dinas Kesehatan
				Pertemuan Koordinasi Akreditasi FKTP	40 Orang	Dinas Kesehatan
				Pelatihan Manajeman Puskesmas	30 Orang	Dinas Kesehatan
			Program Pengembangan Perumahan			
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Keerom	16	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mappi	8 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Boven Digoel	6 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Biak Numfor	4 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Supiori	3 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Kepulauan Yapen	4 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Waropen	12 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Nabire	12 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Paniai	7 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Dogiai	5 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Intan Jaya	8 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Deiyai	6 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Jayawijaya	25 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Puncak Jaya	10 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Lanny Jaya	5 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Puncak	10 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Nduga	8 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mamberamo Tengah	30 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Yalimo	5 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Yahukimo	4 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mimika	4 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Asmat	5 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mamberamo Raya	14 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Sarmi	5 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Merauke	9 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Pegunungan Bintang	6 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Jayapura	10 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Tolikara	30 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kota Jayapura	19 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Pembangunan Rumah Susun di Kota Jayapura	1 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Pembangunan Rumah Susun di Kabupaten Merauke	1 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Penyusunan Roadmap Pengembangan Perumahan dan Pemukiman	1 Dokumen	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Gedung Perkantoran Pemerintah Provinsi Papua	2 Dokumen	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman Kampung Nelayan	6 Ha	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
			Program Lingkungan Sehat Perumahan			
				Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	29 Lokasi	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Perencanaan Penataan Kawasan Permukiman Danau Sentani	2 Dokumen	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
				Penataan Kawasan Permukiman Danau Sentani	3 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
			Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam			
				Pelatihan Manajemen Logistik dan Peralatan PB	29 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Kegiatan Bulan Bhakti PRB (Setiap Bulan Oktober)	1 Kegiatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				RAKERNIS dan Evaluasi BPBD Se- Papua	29 Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Simulasi Peralatan Teknis Penanggulangan Bencana	150 Orang Hari	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana	100 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Bintek Jitu-PB/PDNA	60 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Pembentukan Desa/Kampung Tangguh	2 Kampung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Bimtek dan Pembentukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	30 Orang Hari	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Fasilitasi dan Legislasi RPB	1 Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Bimtek Tenaga Pendampingan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PB	60 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Rapid Assesment Pasca Bencana	2 Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Pengembangan Sistem Informasi BPBD (Operasional Pusdalops)	12 Bulan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Bimtek TOT Penanggulangan Bencana	30 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Assesment Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			
				Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	225 KK	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
				Penanggulangan Kemiskinan	130 KK	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
				Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	100 KK 100 KK 100 Unit 100 KK	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
				Pelayanan dan rehabilitasi sosial Lanjut Usia	60 Orang	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
				Pelayanan dan rehabilitasi sosial anak	100 Orang	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
				Pelayanan dan Rehabilitasi sosial Penyandang Cacat	60 Orang	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
				Sosialisasi Penyalahgunaan Napza	60 Orang	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
			Perlindungan dan Jaminan Sosial			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Penguatan Program Keluarga Harapan di 29 Kabupaten/Kota	3 Kabupaten	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
				Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (BANGGA PAPUA)	34790 Orang	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
			Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti			
				Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi anak dan remaja	80 Orang	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			
				Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	500 Orang	Dinas Tenaga Kerja
				Sosialisasi Standarisasi dan Setifikasi Kompetensi Kerja	40 Orang	Dinas Tenaga Kerja
				Monitoring Pengupahan	5 Kabupaten	Dinas Tenaga Kerja
				Pemasaran hasil Lulusan BLKI Provinsi Papua	200 Orang	Dinas Tenaga Kerja
				Pelatihan Teknologi Informatika (IT) bagi Pencari Kerja	40 Orang	Dinas Tenaga Kerja
				Sosialisasi Program Pemagangan	50 Orang	Dinas Tenaga Kerja
				Pelatihan Mengemudi Bagi Pencari kerja	50 Orang	Dinas Tenaga Kerja
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja			
				Pamerran Bursa Tenaga Kerja (JOB FAIR) Provinsi Papua	25 Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja
				Pembekalan Wirausaha Baru (WUB)	25 Orang	Dinas Tenaga Kerja
				Pendataan dan Cheking TKA di Perusahaan Pengguna TKA	40 Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja
				Pembekalan Teknologi Tepat Guna	40 Orang	Dinas Tenaga Kerja

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK) di 20 Kab/Kota	15 Kabupaten	Dinas Tenaga Kerja
				Penyuluhan Bursa kerja Bagi kabupaten/Kota	30 Orang	Dinas Tenaga Kerja
				Bimbingan Teknis Pemandu Wirausaha	20 Orang	Dinas Tenaga Kerja
				BIMTEK Petuga Lapangan Kerja Sukarela	20 Orang	Dinas Tenaga Kerja
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)			
				Penanganan daerah rawan pangan	28 Lokasi 1 Dokumen	Dinas Ketahanan Pangan
				Pengembangan cadangan pangan daerah	50 Ton	Dinas Ketahanan Pangan
				Pengembangan Diversifikasi Pangan	14 Kali	Dinas Ketahanan Pangan
				Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar	29 Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan
				Pemantauan Harga dan Distribusi Pangan	18 Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan
				Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia (HPS)	1 Kali	Dinas Ketahanan Pangan
				Pengembangan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan Segar	30 Sampel	Dinas Ketahanan Pangan
				Pembangunan Gedung dan Laboratorium OKKPD (DAK)	1 Unit	Dinas Ketahanan Pangan
				Peningkatan Pola Konsumsi Pangan B2SA	1500 Orang	Dinas Ketahanan Pangan
				Sarana dan Prasarana Gedung OKKPD (DAK)	1 Unit	Dinas Ketahanan Pangan
				Sarana dan Prasarana Laboratorium OKKPD (DAK)	1 Unit	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Penataan Administrasi Kependudukan			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Penambahan dan Pengembangan Program Pendataan Penduduk Orang Asli Papua	5 Dokumen	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
				Pengembangan sistem informasi Administrasi kependudukan (SIAK)	2 Unit	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program peningkatan peran serta kepemudaan			
				Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	125 Orang	Dinas Olah Raga dan Pemuda
				Pertukaran Pemuda antar Negara dan Provinsi	35 Orang	Dinas Olah Raga dan Pemuda
				Pembinaan PASKIBRAKA Provinsi dan Nasional	65 Orang	Dinas Olah Raga dan Pemuda
				Jambore Pemuda Daerah	2500 Orang	Dinas Olah Raga dan Pemuda
			Porgram Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga			
				Pendataan dan Pelaporan Keolahragaan dan Kepemudaan	2 Dokumen	Dinas Olah Raga dan Pemuda
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			
				Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	30600 Orang Hari	Dinas Olah Raga dan Pemuda
				Peningkatan kesegaran jasamani dan rekreasi	1000 Orang	Dinas Olah Raga dan Pemuda

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Penyelenggaraan kompetisi olahraga	2000 Orang Kegiatan	Dinas Olah Raga dan Pemuda
				Pelaksanaan Sosialisasi PON XX 2020	10000 Orang Lokasi	Dinas Olah Raga dan Pemuda
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			
				Pembangunan sarana dan prasarana olahraga penunjang PON XX Tahun 2020	3 Lokasi	Dinas Olah Raga dan Pemuda
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Latihan dan Pertandingan bagi Atlet dan Pelatih POPWIL, POPNAS, Kejurnas, PON Remaja dan PON	200 Orang Paket	Dinas Olah Raga dan Pemuda
			Program Penyelenggaraan Kompetisi/Pekan Olahraga/Kejuaraan OLahraga			
				Penyelenggaraan Test Event PON XX Tahun 2020	45 Peserta	Dinas Olah Raga dan Pemuda
			Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas untuk Penyelenggaraan PON XX/2020			
				Pembinaan dan Peningkatan Mutu SDM Pertandingan Pendukung PON XX/2020	750 Orang	Dinas Olah Raga dan Pemuda
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi Teknis Kesiapan Penyelenggaraan PON XX/2020 di 5 Cluster	1000 Orang Lokasi	Dinas Olah Raga dan Pemuda
			Program Pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional dan Internasional			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Pembangunan Lapangan Hockey Indoor dan Outdoor	1 Lokasi	Dinas Olah Raga dan Pemuda
				Sertifikasi Peralatan dan Perlengkapan Olahraga serta Sarana dan Prasarana Olahraga Penunjang PON XX/2020	48 Jenis	Dinas Olah Raga dan Pemuda
			Program Persiapan Penyelenggaraan PON XX 2020			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Penunjang PON XX / 2020	69 Jenis	Dinas Olah Raga dan Pemuda
				Koordinasi Penyiapan Venues dan Persiapan Penyelenggaraan PON XX	12 Bulan	Dinas Olah Raga dan Pemuda
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Cabang Olahraga PEPARNAS Tahun 2020	20 Alat	Dinas Olah Raga dan Pemuda
			Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan			
				Pembangunan database informasi kearsipan	1	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Kajian sistem administrasi kearsipan	1 Dokumen	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			
				Peningkatan Pengelolaan dan Penataan Arsip	1500 Boks	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Pelestarian Arsip-arsip yang Bernilai Guna Statis	100 Dokumen	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Penilaian dan Penyusutan Arsip	250 Berkas 4750 Berkas	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Peningkatan Pembinaan Kearsipan	52 SKPD 34 Kali	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Layanan Informasi Kearsipan	100 Berkas	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			
				Pengembangan Minat dan Budaya Baca	1 Orang Kali	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Penyediaan Bahan Pustaka Peprustakaan Umum dan Daerah	200 Buku	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Penyelenggaraan Peprustakaan Keliling	240 Kali 96 Kali	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Otomasi Perpustakaan	500 Buku	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Reprografi bahan Pustaka	312 Eksemplar	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan Perkembangan perpustakaan didaerah	25 Laporan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan			
				Patroli Rutin Perairan	50 Kali	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pengadaan Speed Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DAK)	1 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pembangunan Garasi (Stayger) speed boad Pengawasan SDKP (DAK)	500 M3	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pembangunan Gedung Pengawasan SDKP (DAK)	100 M3	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pengadaan Peralatan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) (DAK)	50 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Program pengembangan budidaya perikanan			
				Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	100 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Bantuan sarana produksi kolam/karamba masyarakat	100 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Bantuan Saprodi Kepada Pembudidaya Bandeng	10 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pencetakan Kolam Dengan Alat Berat Becho	30 Kolom	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Optimalisasi Lahan Usaha Pembudidaya Pemula	100 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Bantuan Bibit Ikan dan Pakan kepada Pembudidaya Air Tawar	100 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan	25 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pengadaan Sarana Produksi Keramba Jaring Apung untuk Pembudidaya Ikan	5 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pengembangan Calon Induk Ikan Unggul	11000 Ekor	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pengembangan Budidaya Rumput Laut	30 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap			
				Monitoring PPI Se- Papua	8 Kabupaten	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Motorisasi perahu nelayan /armada kapal kecil	30 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Bantuan Sarana Penangkapan Ikan (Rumpun)	4 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Restocking Ikan di Perairan Umum dan Danau	150000 Ekor	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan			
				Rehabilitasi unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Kecil - DAK	2 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Peningkatan Mutu Produksi Nelayan, Pengelolaan dan Pemasaran			
				Pembangunan Cold Storage di Sentra-Sentra Nelayan	1 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pembinaan Mutu Produksi Perikanan	10 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Kemitraan Usaha Pengolahan Ikan	2 Kegiatan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Lomba Masak Serba Ikan Tk. Provinsi dan Nasional	2 Kegiatan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pelatihan Pengolahan hasil perikanan	4 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Sarana dan Prasrana Pengolahan dan Pemasaran bagi Nelayan	30 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pelaksanaan Peringatan Hari Nusantara dan HARKANAS,	2 Kegiatan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Optimalisasi dan Pembangunan Prasarana Perikanan Tangkap			
				Penunjang Kegiatan PPI di Kab/Kota	8 Kegiatan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (DAK)	80 % 3 Lokasi	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pembangunan Cold Storage (DAK)	1 M3	Dinas Kelautan dan Perikanan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				PPI OMOR (DAK)	1 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
				PPI Nabire (DAK)	1 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
				PPI Hamadi (DAK)	1 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
				PPI Fandoi (DAK)	1 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
				PPI POMAKO (DAK)	1 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
				PPI Kab Jayapura (DAK)	1 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)			
				Penunjang Kegiatan Balai Benih Ikan Sentra Berap- Kab. Jayapura	5 Kegiatan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Optimalisasi Fungsi Balai Benih Ikan Partai (BBIP) Bosnik Biak	5 Tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan BPPMHP Merauke	4 Kegiatan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan BPPMHP Biak	4 Tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan BPPMHP Jayapura	4 Tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pembangunan dan Pengembangan BBIS (DAK)	7500 Ekor	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pembangunan dan Pengembangan BBIP (DAK)	12500 Ekor	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Paket Pengukuran dan Pemeriksaan Kesehatan ikan BBIP Biak (DAK)	2 Kegiatan	Dinas Kelautan dan Perikanan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)			
				Peningkatan produksi dan produktivitas kawasan Tanaman pangan	1000 Ha	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan			
				Peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian	10 Unit	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak			
				Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	10 Lokasi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Pencegahan, pengendalian, Pemberantasan penyakit hewan menular dan gangguan penyakit reproduksi ternak	10000 Dosis	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan			
				Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat	1	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat	1 Kegiatan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Program Pelayanan Air Bersih			
				Pemboran air bawah tanah untuk masyarakat kampung sulit air bersih	20 Titik	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
			Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
				Pengawasn terhadap barang dan jasa bagi masyarakat	5 Komoditi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				pengawasan dan sidang barang kadaluarsa bagi pelaku usaha	5 Kegiatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Pelatihan Kewirausahaan bagi pedagang kaki lima dan asongan	10 Orang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor			
				Penyusunan Kajian Prosedur dan dokumen ekspor dan	5 Dokumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Melakukan join even pameran bersama di daerah perbatasan RI/PNG	5 Laporan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Pembentukan panitia tetap ekspor daerah di provinsi papua TA.2018	4 Dokumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Pameran dalam dan luar negeri dalam rangka promosi komoditi ekspor daerah	3 Dokumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Publikasi dan promosi produk ekspor daerah secara online	2 Produk	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Pelatihan teknis ekspor dan simulasi bagi dunia usaha dan aparatur	50 Orang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri			
				Pengambangan pasar lelang daerah	1 Kegiatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Pelaksanaan pasar murah di lima wilayah adat	8 Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah	10 Kegiatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	2. Pemantapan Rasa Aman, Tentram Dan Kedewasaan Berdekomokrasi	2.1.1. Meningkatnya penegakan HAM; 2.1.2. Meningkatnya suasana tertib, aman dan kepastian hukum; 2.1.3. Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat; 2.1.4. Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi				
			Porgram Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal			
				Sosialisasi Upaya pencegahan konflik sosial	350 Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Sosialisasi Upaya pencegahan konflik sosial	100 Orang	Satuan Polisi Pamong Praja
				Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing di Daerah	5 Dokumen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Monitoring dan Evaluasi pelanggaran-pelanggaran Perda	5 Kabupaten	Satuan Polisi Pamong Praja
				Peningkatan ketrampilan dan ketangkasan lapangan	500 Orang Kali	Satuan Polisi Pamong Praja
				Bimtek PERMENDAGRI Nomor 27 Tahun 2010	75 Orang	Satuan Polisi Pamong Praja
				Pelatihan dan Pembinaan PPNS	50 Orang	Satuan Polisi Pamong Praja

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja Bagi Anggota (PTI)	30 Orang	Satuan Polisi Pamong Praja
				Pendidikan dan Latihan PPNS	5 Orang	Satuan Polisi Pamong Praja
				Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada Provinsi Papua	10 Kali	Satuan Polisi Pamong Praja
			Program pengembangan wawasan kebangsaan			
				Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	30 Orang 350 Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Sosialisasi Ketahanan Bela Negara	350 Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Sosialisasi Peningkatan Wawasan kebangsaan	350 Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Forum SKPD Provinsi Papua	120 Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan			
				Pelatihan Dasar Bagi Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	150 Orang Hari	Satuan Polisi Pamong Praja
				Rakernis Satpol PP Se-Provinsi Papua	100 Orang	Satuan Polisi Pamong Praja
				Bimtek Peningkatan Kapasitas Tugas dan Fungsi Linmas Kampung	100 Orang	Satuan Polisi Pamong Praja
			Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Sosialisasi Bahaya Miras dan Narkoba Bagi Generasi Muda di Daerah	100 Orang	Satuan Polisi Pamong Praja
				Operasi / Penertiban PKL, PSK dan Anak Sekolah	30 Orang Kali	Satuan Polisi Pamong Praja
				Bimtek Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Trantibum Satpol PP	100 Orang	Satuan Polisi Pamong Praja
				Rakorda Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Se-Provinsi Papua	100 Orang	Satuan Polisi Pamong Praja
				Bimtek Pemahaman Tuposi Satpol PP dalam Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	250 Orang	Satuan Polisi Pamong Praja
				Rakorda PPNS Se-Papua	100 Orang	Satuan Polisi Pamong Praja
				Forum Sinkronisasi Program dan Kegiatan Satpol PP	50 Orang	Satuan Polisi Pamong Praja
			Program Pendidikan Politik Masyarakat			
				FGD Indeks Demokrasi Indonesia	100 Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Desk Pilkada	11 Kabupaten	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Fasilitasi Kemitraan Eksekutif, Legislatif dan Parpol	350 Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan			
				Fasilitasi Pembinaan Ormas/LSM di Daerah	350 Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan			
				Patroli Wilayah	50 Orang Kali	Satuan Polisi Pamong Praja
				Pengamanan dan Pengawalan Protokoler KDH/ Pejabat Penting	50 Orang Kali	Satuan Polisi Pamong Praja
				Penyelidikan Kasus PPNS	4 Orang Bulan	Satuan Polisi Pamong Praja
				Pendidikan dan Latihan Satpol PP	5 Orang	Satuan Polisi Pamong Praja
				Forum Komunikasi dan Temu Konsultasi Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam pencegahan tindak kriminal di daerah	125 Orang	Satuan Polisi Pamong Praja
			Program Pengembangan Nilai Budaya			
				Kajian Penerapan Kurikulum Bahasa Ibu di 5 Wilayah Adat Lapago dan Saireri	2 Kabupaten	Dinas Kebudayaan
				Pengembangan Aplikasi Data Khusus Kebudayaan	5 Kegiatan	Dinas Kebudayaan
				Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	100 Kali	Dinas Kebudayaan
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			
				Penyuluhan Nilai-Nilai Budaya	1 Kegiatan	Dinas Kebudayaan
				Monitoring dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Pemilihan Direktori Lembaga Budaya di 5 Wilayah Adat	5 Kegiatan	Dinas Kebudayaan
				Survey Potensi Sejarah Dan Peninggalan Bawah Air	1 Laporan	Dinas Kebudayaan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Survey Potensi Cagar Budaya di 29 Kabupaten/Kota	2 Data	Dinas Kebudayaan
				Pemeliharaan Koleksi Museum Negeri Papua	1 Jenis	Dinas Kebudayaan
			Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya			
				Gita Bahana Nusantara di 5 Wilayah Adat	29 Kabupaten	Dinas Kebudayaan
				Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bidang Budaya OAP Bendawi dan Non Bendawi	1 Dokumen	Dinas Kebudayaan
				Duta Budaya Papua ke Belanda dalam Rangka Penataan Sejarah Budaya Orang Asli Papua (OAP)	10 Orang	Dinas Kebudayaan
				Forum OPD Bidang Kebudayaan se Provinsi Papua	65 Orang	Dinas Kebudayaan
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya			
				Festival Seni Kreasi Papua	800 Jenis	Dinas Kebudayaan
				Pesta Budaya Papua	29 Kelompok	Dinas Kebudayaan
				Lomba Seni Anak, Remaja dan Lomba Cerita Rakyat Tk. Anak dan Remaja di 5 Wilayah Adat	29	Dinas Kebudayaan
				Temu Karya Seni Daerah Papua (Taman Budaya)	29	Dinas Kebudayaan
				Prametting Kegiatan Pesta Budaya	29	Dinas Kebudayaan
				Temu Taman Budaya Tingkat Nasional	23	Dinas Kebudayaan
				Lomba Cerita Rakyat Tingkat Anak dan Remaja	70	Dinas Kebudayaan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah			
				Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	20 %	Sekretariat Daerah
				Penerimaan kunjugan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	12 %	Sekretariat Daerah
				Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	12 %	Sekretariat Daerah
				Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	12 %	Sekretariat Daerah
				Kunjungan kerja / inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	12 %	Sekretariat Daerah
				Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	12 Bulan	Sekretariat Daerah
				Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan KDH / WKDH / SEKDA	12 Bulan	Sekretariat Daerah
				Penyediaan jasa rumah tangga KDH / Wakil KDH / SEKDA	12 Bulan	Sekretariat Daerah
				Peningkatan Tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Stabilitas Daerah	12 %	Sekretariat Daerah
			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			
				Pembentukan Produk Hukum Daerah	500 Dokumen	Biro Hukum
			Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda			
				Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan	15 Perkara	Biro Hukum
				Penyusunan RANHAM	1 Kegiatan	Biro Hukum

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Program Pembinaan Mental Spritual			
				Pembinaan dan Peningkatan Iman dan Taqwa bagi Aparatur	3000 Orang	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
				Rapat koordinasi lembaga-lembaga keagamaan dalam dan luar daerah	51 Lembaga	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
				Penyediaan aparatur pendamping keagamaan	1500 Orang	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
			Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum			
				Pembinaan dan Pengkajian Produk Hukum Kabupaten/Kota se Papua	29 Kabupaten	Biro Hukum
				Forum SKPD Bidang Hukum	68 Orang	Biro Hukum
				Konsultasi Ranperda Kabupaten/Kota	12 Bulan	Biro Hukum
				Penyusunan Pelaporan TP2K SKPD	60 Buku	Biro Hukum
				Penyusunan LAKIP dan LPPD	12 Bulan	Biro Hukum
			Program Dokumentasi dan Informasi Hukum			
				Updating dan Pengembangan Website Biro Hukum	1 Kegiatan	Biro Hukum
				Penyediaan Bahan Pustaka dan Penataan Dokumen	100 Buku	Biro Hukum
			Program Peningkatan Koordinasi, Singkronisasi dan Fasilitasi di Bidang Bina Kesejahteraan Rakyat, Bina Mental Spiritual dan Bina Kemasyarakatan			
				Fasilitasi Rapat Koordinasi Pencegahan dan Menindakan Bahaya Penjualan dan Peredaran Miras/Narkoba Antara Stakholder Provinsi Papua	8 SKPD	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Koordinasi Bidang Bina Kemasyarakatan	3 SKPD	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
				Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan	3 SKPD	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
				Penguatan Kapasitas, Fasilitasi Keberpihakan Peluang Pasar bagi Pengrajin Perempuan Asli Papua	50 Orang	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
				Koordinasi dan Fasilitasi ASN Bebsa Narkoba Melalu Tes Urin Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	500 Orang	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
			Program Pemberdayaan Keagamaan			
				Fasilitasi, Pembangunan dan Pembinaan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Umat Katolik Secara Terintregasi pada Keuskupan di Provinsi Papua	100 Lembaga	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
				Fasilitasi, Pembangunan dan Pembinaan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Umat Babtis secara Terintregasi pada Gereja Babtis di Provinsi Papua	100 Lembaga	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
				Fasilitasi, Pebangunan dan Pembinaan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Umat GPDI secara Terintregasi di Sinode GPDI di Indonesia Provinsi Papua	100 Lembaga	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
				Fasilitasi Pembangunan dan Pembinaan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Umat Kingmi secara terintergrasi di Sinode Kingmi di Provinsi Papua	100 Lembaga	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
				Fasilitasi, Pembangunan dan Pembinaan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Umat GIDI secara terintegrasi di Sinode GIDI di Indonesia	100 Lembaga	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Fasilitasi, Pembangunan dan Pembinaan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Umat GKI secara Terintegrasi di Sinode GKI di Tanah Papua	100 Lembaga	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
				Fasilitasi, Pembangunan dan Pembinaan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Umat ADVENT Secara Terintegrasi di Sinode Gereja ADVENT di Indonesia	100 Lembaga	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
				Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Keagamaan Papua	100 Lembaga	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	3.1.1. Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua; 3.1.2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; 3.1.3. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah; 3.1.4. Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah				
			Porgram Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal			
				Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Satpol PP dan Satlinmas Se-Provinsi Papua	1 Dokumen	Satuan Polisi Pamong Praja

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Pengendalian Unjuk Rasa dan kerusuhan massa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	20 Kali	Satuan Polisi Pamong Praja
				Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Bagi anggota Pengamanan	250 Orang Hari	Satuan Polisi Pamong Praja
			Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan			
				Fasilitasi pemberdayaan FKDM	150 Orang	Satuan Polisi Pamong Praja
				Bimtek Pemahaman Intelijen dalam menghadapi menghadapi gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	50 Orang	Satuan Polisi Pamong Praja
				Magang Penyelenggaraan Trantibumlinmas, Penegakan Perda dan Damkar	20 Orang	Satuan Polisi Pamong Praja
			Perlindungan dan Jaminan Sosial			
				Pelatihan dan Pengarahan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	300 Orang	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
				Bantuan Kedaruratan Logistik Bencana alam dan sosial	7 Jenis	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
			Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti			
				Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi Lanjut Usia terlantar	70 Orang	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
				Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	60 Orang	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi Cacat Netra	18 Orang	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
			Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Kesejahteraan Sosial			
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	15 Dokumen	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
				Penyusunan Data dan Informasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	2 Dokumen	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Penataan Administrasi Kependudukan			
				Pelaksanaan Pembinaan, sosialisasi dan pengawasan penyelenggaraan Pencatatan sipil di wilayah Provinsi	65 Orang	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
				Monitoring dan Evaluasi Penyerasian Kebijakan Kependudukan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
				Sosialisasi Penerapan Kebijakan Kependudukan	65 Orang	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
				Pengelolaan Dokumen Register Akta Catatan Sipil di Wilayah Provinsi Papua	150 Dokumen	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Pembinaan Kependudukan			
				Sosialisasi Adminduk bagi masyarakat perbatasan/daerah tertentu	65 Orang	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
				Pelatihan Administrasi Data Base (ADB) Kependudukan bagi Aparatur	15 Orang	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa			
				Pengembangan Aplikasi e-Government	8 Aplikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi			
				Pengembangan/pembangunan JARKOMDA di lingkungan pemerintah	105 Unit	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			
				Pembahasan rancangan peraturan daerah	15 Produk	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
				Hearing/dialog dan koordinasi Pimpinan DPRP dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	175 Kegiatan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
				Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	500 Kali	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
				Rapat-rapat paripurna	8 Kali	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
				Kegiatan reses	4 Kali	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
				Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	69 Orang	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
				Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	11 Kali Tahun	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Peningkatan Peran dan Fungsi Pengawasan PERDASI/ PERDASUS Provinsi Papua	12 Kali	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
				Hearing/ dialog dan Koordinasi Anggota DPRP dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh masyarakat/ Tokoh Agama	100 Kali Tahun	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
				Pelayanan Formal Pimpinan dan Anggota DPR Papua	4 Kali Tahun	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
				Publikasi Kinerja Pimpinan dan Anggota DPR Papua	12 Bulan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
				Rapat - Rapat Koordinasi Pimpinan dan Anggota DPR Papua	12 Kali	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
				Peningkatan Peran dan Fungsi Serta Kinerja Kinerja Alat - Alat Kelengkapan Dewan	69 Orang	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
				Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Papua	10 Kegiatan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
				Pelayanan Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRP	70 Orang	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
				Publik Hearing Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	1500 Kegiatan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
				Pengawasan Persiapan PON XX Tahun 2020	12 Kegiatan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
				Pembahasan Rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja(APBD), perubahan APBD dan pertanggung jawaban APBD	40 Kegiatan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Monitoning, Evaluasi dan Pengawasan Peraturan serta Kebijakan Lainnya	12 Kegiatan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
			Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah			
				Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	12 Bulan	Badan Penghubung Daerah
				Monitoring dan evaluasi keprotokolan bagi 5 wilayah adat	5 Kabupaten	Biro Humas dan Protokol
				Pelayanan Keprotokolan Pemerintah Provinsi Papua	581 Kali	Biro Humas dan Protokol
				Sosialisasi Penyesuaian Nomor Urut Kendaraan Dinas Forkompimda Provinsi Papua	50 Orang	Biro Humas dan Protokol
			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			
				Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi	25 Dokumen	Biro Hukum
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga MRP			
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Tahun	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
				Rapat-Rapat Alat Kelengkapan MRP	1 Tahun	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
				Rapat-Rapat Pleno	1 Tahun	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
				Kegiatan Reses	4 Kali	Sekretariat Majelis Rakyat Papua

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	1 Tahun	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
				Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota MRP	1 Tahun	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
				Pelayanan Informal Pimpinan MRP	1 Tahun	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
				Panitia Khusus (PANSUS) Masalah-Masalah di Tanah Papua	1 Tahun	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
				Peningkatan Kinerja Alat Kelengkapan MRP	1 Tahun	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
			Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan			
				Penataan Kelembagaan Provinsi Papua	35 SKPD 62 Peraturan 1 rekomendasi	Biro Organisasi
				Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se Provinsi Papua	1 Dokumen	Biro Organisasi
				Rapat Kerja Pembinaan Kelembagaan Kabupaten/Kota se Papua	1 Dokumen	Biro Organisasi
				Penyusunan Uraian Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	40 %	Biro Organisasi
				Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	35 % 20 %	Biro Organisasi
				Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	60 % 60 Dokumen 35 Dokumen 40 % 40 %	Biro Organisasi

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Penyusunan Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	35 SKPD 60 SKPD 35 SKPD	Biro Organisasi
				Penyesuaian Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	35 Dokumen 100 %	Biro Organisasi
				Penyusunan Data Kompetensi Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	35 Dokumen	Biro Organisasi
				Monitoring dan Evaluasi Data kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen 8 Kabupaten	Biro Organisasi
				Penyusunan LAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	77 % 66 Laporan 55 % 35 Dokumen	Biro Organisasi
				Penataan standarisasi sarana dan prasarana kerja	752 Orang	Biro Organisasi
				Pengelolaan Data Kinerja Organisasi pada Web Side Biro Organisasi	6 Dokumen	Biro Organisasi
				Rapat Koordinasi Teknis Bidang Ketatalaksanaan se Provinsi Papua	200 Orang 3 Peraturan 1 Dokumen	Biro Organisasi
				Penyusunan Data Formasi Jabatan dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua	35 SKPD	Biro Organisasi
				Evaluasi jabatan dilingkungan Pe,rintah Provinsi Papua	35 Orang 35 SKPD	Biro Organisasi
				Bintek SAKIP dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua	150 Orang	Biro Organisasi
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			
				Evaluasi Pasca Diklat Pim	40 Orang	Badan Pengembangan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						Sumber Daya Manusia
				Rakornis Bidang Kediklatan	150 Orang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur	10 Orang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Pengembangan Kerjasama Penyelenggaraan Diklat	1 Dokumen	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	35 Orang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Bantuan Pendidikan Program S2 bagi Aparatur	20 Orang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Pengembangan Data dan Informasi Diklat	1 Dokumen	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Diklat TOT Subtansi WI	40 Orang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Analisis Kebutuhan Diklat	1 Dokumen	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat	1 Laporan	Badan Pengembangan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						Sumber Daya Manusia
				Monitoring Persiapan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Diklat di Kabupaten/Kota	10 Kabupaten	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Diklat TOC bagi Penyelenggara Diklat	30 Orang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Perencanaan dan Pembinaan Diklat Aparatur	1 Laporan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Diklat di Kabupaten/Kota	10 Kabupaten	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Diklat Kepamongprajaan	120 Orang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Diklat Pengelolaan Keuangan Desa	30 Orang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Workshop Pengembangan Kompetensi ASN	80 Orang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Pim II	10 Orang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Pengembangan Penataan dan Pentas Anjungan			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Promosi Budaya 5 Wilayah Adat Papua ditingkat Nasional/Internasional	6 Kali	Badan Penghubung Daerah
				Promosi Objek Wisata 5 Wilayah Adat Papua ditingkat Nasional/Internasional	6 Kali	Badan Penghubung Daerah
				Optimalisasi Pengelolaan Anjungan Daerah Papua di TMII sebagai Pusat Promosi Papua	12 Media	Badan Penghubung Daerah
				Rapat Koordinasi dan Komunikasi dengan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah dalam Rangka Kerjasama Daerah	24 Kali	Badan Penghubung Daerah
				Pembuatan Media Promosi tentang Potensi Sumber Daya Alam, Objek Pariwisata dan Budaya Papua	12 Media	Badan Penghubung Daerah
			Program Pendidikan Kedinasan			
				Diklat Pim Tingkat III	120 Orang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Diklat Pim Tingkat IV	120 Orang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Diklat Pim Tingkat II	120 Orang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Diklat Pimpemdagri Jabatan Administrator	40 Orang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Diklat Pimpemdagri Jabatan Pengawas	40 Orang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Diklat Prajabatan CPNS	120 Orang	Badan Pengembangan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						Sumber Daya Manusia
				Pelatihan Dasar CPNS	400 Orang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Pembinaan Mental Spritual			
				Peningkatan penunjang sarana peribadatan di provinsi papua	3 Unit	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
				Pemantauan Dana pembinaan dan pengembangan Kepada Lembaga Keagamaan	51 Dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
			Program Pelayanan Informasi			
				Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan PON XX Tahun 2020 di Papua	12 Kegiatan 12 Kegiatan	Badan Penghubung Daerah
				Pengembangan Sistem Informasi Publik melalui media	5 Media	Biro Humas dan Protokol
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Publikasi	7 Unit	Biro Humas dan Protokol
				Supervisi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	50 Unit	Biro Humas dan Protokol
				Peningkatan Kapasitas dan Monitoring PPID Utama Provinsi Papua	50 Unit	Biro Humas dan Protokol
				Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Budaya di Wilayah Adat Papua	5 Dokumen	Badan Penghubung Daerah
				Strategi Komunikasi Terpadu dalam Rangka Penyebarluasan Informasi tentang Papua	12 Dokumen	Badan Penghubung Daerah
			Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Penguatan Peran Bakohumas Provinsi Papua dan Kab/Kota	100 Orang	Biro Humas dan Protokol
				Publikasi Kebijakan Pemda Provinsi Papua	18 Kali	Biro Humas dan Protokol
				Pembuatan film Dokumenter	1 Film/Video	Biro Humas dan Protokol
				Sayembara Foto Pembangunan	10 Buah	Biro Humas dan Protokol
				Penyelenggaraan Rakor Kehumasan, Pelayanan Informasi Publik serta Keprotokolan se Papua	350 Orang	Biro Humas dan Protokol
				Pendokumentasian Sambutan/Pidato Gubernur	240 Dokumen	Biro Humas dan Protokol
				Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Provinsi Papua	250 Kali	Biro Humas dan Protokol
				Publikasi Media Luar Ruang	500 Kali	Biro Humas dan Protokol
				Pameran Pembangunan/Bakohumas	8 Orang	Biro Humas dan Protokol
				Publikasi Visi Misi Pemerintah dan Hasil2 Pembangunan	3500 Eksemplar	Biro Humas dan Protokol
				Penerbitan Buletin Kabar Papua	1800 Eksemplar	Biro Humas dan Protokol
				Kerjasama Media Cetak	15 Media	Biro Humas dan Protokol
				Penayangan Iklan dan Advertorial Provinsi Papua di Media Cetak	8 Kali	Biro Humas dan Protokol
				Penayangan Siaran Langsung di Media Elektronik	5 Kali	Biro Humas dan Protokol
				Kerjasama Media Elektronik	4 Media	Biro Humas dan Protokol
				Produksi Iklan layanan Masyarakat	3 Iklan	Biro Humas dan Protokol
				Penayangan Iklan Layanan masyarakat di media elektronik	184 Kali	Biro Humas dan Protokol

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Pengelolaan Analisis Informasi melalui Media Cetak dan Online	200 Kliping	Biro Humas dan Protokol
				Temu Wicara Pimpinan Daerah dengan Publik Melalui Para-para Publik	150 Orang	Biro Humas dan Protokol
			Program peningkatan kapasitas kelembagaan barang dan jasa			
				Peningkatan pelayanan Pengadaan barang dan jasa	51 Unit	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
				peningkatan pelayanan pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi	51 Unit	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
				Pendampingan hukum dan sanggah	12 Laporan	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
				Penyusunan peraturan tentang kode etik dan majelis etik dalam penyelenggaraan pengadaan	1 Peraturan	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
				Monitoring dan evaluasi (MONEV) Pengadaan barang/Jasa	29 Lokasi	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
				Pendampingan perencanaan pengadaan	3 Dokumen	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
				Klinik pengadaan barang/jasa	50 Kali	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
				Pembinaan UKPBJ	29	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
			Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan			
				Diklat sertifikasi jabatan fungsional bagi aparatur	40 Orang	Inspektorat

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Diklat Pengembangan Profesi Pengawasan	35 Orang	Inspektorat
				Pelatihan Peningkatan Kapasitas Inspektorat	85 Orang	Inspektorat
			Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat			
				Penanganan kasus pengaduan masyarakat/ Non PKPT di Lingkungan Pemerintah Daerah	10 Laporan	Inspektorat
			Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur			
				Pemeriksaan Reguler sesuai PKPT	16 Kabupaten 51 SKPD	Inspektorat
				Pemeriksaan Dana Otonomi Khusus (OTSUS)	8 Kabupaten	Inspektorat
			Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan			
				Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Papua,Inspektorat Jenderal Departemen dan BPK RI	60 Obyek	Inspektorat
				Tuntutan perbendaharaan ganti rugi keuangan dan barang daerah	6 Dokumen	Inspektorat
				Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ke Dalam Aplikasi SIM HP	1 Kegiatan	Inspektorat
				Monitoring Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	52 SKPD	Inspektorat
				Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional	1 Kegiatan	Inspektorat
				Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaaan Tingkat Regional dan Provinsi	2 Dokumen	Inspektorat

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Forum SKPD Tingkat Provinsi	29 Kabupaten	Inspektorat
				Operasionalisasi Unit Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	29 Kabupaten	Inspektorat
				Pengelolaan LHKPN	1 Laporan	Inspektorat
				Monitoring dan Evaluasi Laporan Gratifikasi	52 SKPD	Inspektorat
			Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota			
				Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota	1 Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
				Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota	29 Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBD Kabupaten/ Kota se Provinsi Papua	29 Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
				Koordinasi dan Sinkronisasi Sumber Dana OTSUS	1 Kegiatan	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
				Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	1 Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
			Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			
				Pelaksanaan Mutasi, Kenaikan Pangkat dan Pindah	4000 Orang	Badan Kepegawaian Daerah
				Peningkatan Pelayanan Administrasi PNS	3500 Orang	Badan Kepegawaian Daerah
				Peningkatan Pelayanan Administrasi Pensiun	190 Orang	Badan Kepegawaian Daerah

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Pemberian penghargaan bagi pegawai purna tugas	300 Orang	Badan Kepegawaian Daerah
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			
				Pengembangan Kualitas SDM	150 Orang	Badan Kepegawaian Daerah
				Penyelenggaraan Seleksi Pendidikan dan Latihan Aparatur	400 Orang	Badan Kepegawaian Daerah
				Bimbingan Teknis Penyusunan Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS Daerah	150 Kali	Badan Kepegawaian Daerah
				Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas	5 Eselon	Badan Kepegawaian Daerah
				Seleksi Penerimaan Calon PNS	3000 Orang	Badan Kepegawaian Daerah
				Penilaian potensi dan kompetensi jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan pegawai	4000 Orang	Badan Kepegawaian Daerah
				Monitoring dan evaluasi pelaksanaan TPP PNS	7000 Orang	Badan Kepegawaian Daerah
				Pelaksanaan penerimaan calon praja IPDN	1000 Orang	Badan Kepegawaian Daerah
				Penyelenggaraan Ujian Dinas	250 Orang	Badan Kepegawaian Daerah
				Pembangunan Stasion Cat (Computer Assisted Test)	50 Unit	Badan Kepegawaian Daerah
				Pengendalian Jabatan	51 SKPD	Badan Kepegawaian Daerah
				Evaluasi Jpt, Administrator Dan Pengawas	51 SKPD	Badan Kepegawaian Daerah
				Penyusunan Profil Jpt, Administrator Dan Pengawas	51 SKPD	Badan Kepegawaian Daerah

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional	51 SKPD	Badan Kepegawaian Daerah
			Program Pengembangan Mutu Penelitian dan Pengembangan			
				Lomba karya tulis ilmiah bidang IPTEK dan Inovasi Teknologi	20 Peserta	Badan Penelitian dan Pengembangan
				Penelitian Mandiri Fungsional	8 Dokumen	Badan Penelitian dan Pengembangan
				kajian akademis tentang regulasi pengembangan komoditas unggulan	1 Dokumen	Badan Penelitian dan Pengembangan
				Pengembangan Kampung Inovasi Berbasis Komoditas Lokal	1 Kampung	Badan Penelitian dan Pengembangan
			Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK			
				fasilitasi pembinaan tim kelitbangan papua	7 Tim	Badan Penelitian dan Pengembangan
				Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Papua	1 Dokumen	Badan Penelitian dan Pengembangan
				Fasilitasi Pameran Pengembangan IPTEK di Provinsi Papua	1 Kegiatan	Badan Penelitian dan Pengembangan
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi			
				FGD Isu-isu Aktual di Provinsi Papua	5 Kegiatan	Badan Penelitian dan Pengembangan
			Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Penguatan Kelembagaan SIDa (Sistem Inovasi Daerah)	1 Kegiatan	Badan Penelitian dan Pengembangan
				Rapat Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan se Provinsi Papua	1 Kegiatan	Badan Penelitian dan Pengembangan
				Forum Desiminasi Hasil Riset dan Inovasi Daerah	120 Orang	Badan Penelitian dan Pengembangan
3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Peningkatan Investasi	4.1.4. Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan; 4.1.5. Membangun struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada penciptaan nilai tambah yang optimal terutama pada sektor-sektor industri manufaktur, jasa, dan ekonomi kreatif; 4.1.6. Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan antarpersonal, antarsektor dan antarwilayah; 4.1.7. Meningkatnya daya saing tenaga kerja, kesempatan dan perluasan kesempatan kerja; 4.1.8. Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah; 4.2.2. Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah				

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya			
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	8000 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Rehabilitasi Jaringan Rawa DR. Salor	3000 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Rehabilitasi Jaringan Rawa DR. Wasum-Nasem		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jaringan Irigasi DI Lereh		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lereh	1000 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jaringan Irigasi DI Legare	2350 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Rehablitasi Jaringan Irigasi DI Legare		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jaringan Irigasi DI Maidey		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Maidey		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jaringan Irigasi DIR Kuprik - Sidomulyo		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Kuprik - Sidomulyo		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Gudang Arang - Serapu		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jaringan Rawa DIR Okaba		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Okaba		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Penyusunan Perda tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Provinsi Papua	1 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Penyelenggaraan kelembagaan Komisi Irigasi di Provinsi Papua	3 Kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Review DED Daerah Irigasi	8 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Survey Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (Aknop) Daerah Irigasi (DI)	8 Lokasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)			
				Pengembangan desa mandiri pangan	30 Kampung 30 Kampung	Dinas Ketahanan Pangan
				Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	206 Kelompok	Dinas Ketahanan Pangan
				Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan melalui Pola PUPM/TTI dan CPP	7 Unit	Dinas Ketahanan Pangan
			Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi	1	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup
				Pemberdayaan MAsyarakat Asli Papua dalam ekowisata di Provinsi Papua	1 Kabupaten	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup
			Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim			
				Kampung Iklim Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	10 Kampung	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			
				Pengembangan UMKM Pengelola sumber daya Lokal	100 UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Penumbuhan dan Pengembangan kewirausahaan	100 Unit	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Pelatihan Kewirausahaan Bagi Mama-Mama Asli Papua	200 Orang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Pelatihan Kewirausahaan bagi Usaha Kecil (DAK Non Fisik)	400 Orang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal Bagi UMKM	100 Orang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Pelatihan Peningkatan Keterampilan Produk Unggulan Daerah Potensi Eksport (Vokasional)	150 Orang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Pelatihan Perkoperasian dan Kewirausahaan Bagi Koperasi Sektor Aneka Jasa	150 Orang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Pelatihan Perkoperasian dan Kewirausahaan Bagi Koperasi Sektor Industri Kerajinan, Perikanan, Kehutanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan	200 Orang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Pelatihan Keterampilan Produksi Handycraft dan Souvenir	10 Kelompok	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Penguatan Usaha Ekonomi Produktif UKM Melalui Sarana Produksi Berbasis Komoditi Unggulan Daerah	10 Kelompok	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Pelatihan Manajemen bagi Usaha Kecil	200 Orang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Pelatihan Kewirausahaan berbasis teknologi informasi	80 Orang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			
				Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah	1 Unit	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Partisipasi pameran gelar produk KUMKM	5 Orang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Seleksi Tenaga Pendamping Bagi Koperasi dan UMKM (DAK Non Fisik)	40 Orang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Peningkatan Usaha UMKM Melalui Jaringan Kemitraan	120 UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
				Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	30 Unit	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus / Pengelola Koperasi (DAK Non Fisik)	40 Orang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Pelatihan Perkoperasian dan Kewirausahaan bagi Pendamping (DAK Non Fisik)	40 Orang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Bimtek KSP/USP dengan Peralatan Kerja	45 Unit	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Revitalisasi Kelembagaan Koperasi Yang Tidak Aktif	10 Unit	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Sosialisasi perkoperasian bagi Koperasi orang asli papua	100 Orang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Fasilitasi pembentukan koperasi sekunder di provinsi papua	3 Unit	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	100 Orang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Pelatihan perkoperasian dan kewirausahaan koperasi di lingkungan gereja	200 Orang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			
				Pengembangan potensi unggulan daerah	1 Wilayah	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT)	1	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Penyelenggaraanpameran investasi	10 Kegiatan	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			
				Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	1 Dokumen	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal			
				Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal Melalui PTSP	1100 Jenis	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Perijinan dan Non Peijinan diBidang Penanaman Modal	20 Buah	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				survey indeks kepuasan masyarakat terhadap perijinan	1100 Buah	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Penyediaan Informasi Perijinan	5 Jenis	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal			
				Pemantauan Perkembangan Realisasi Perusahaan Penanaman Modal	250 Perusahaan	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Pengelaan Data dan Sistem Informasi Penanaman modal	1 Sistem	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Temu Usaha dan Dialog Investasi	1 Kali	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Pengawasan dan Pemantauan Kawasan Konservasi	1 Dokumen	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pembinaan Kelompok Sistem Pengawas Masyarakat	50 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pembentukan kelompok masyarakat pengamanan sumberdaya kelautan	50 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program pengembangan budidaya perikanan			
				Pembinaan dan pengembangan perikanan	100 Orang	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap			
				Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	20 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			
				Penyuluhan dan penguatan kelompok sadar wisata	50 Orang	Dinas Pariwisata
				pengembangan objek pariwisata unggulan	2 Unit	Dinas Pariwisata
				peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	2 Lokasi	Dinas Pariwisata
				Penataan Daya Tarik Wisata dan Amenitas Pariwisata (DAK)	5 Lokasi	Dinas Pariwisata
				Pelatihan Pengelola Daya Tarik Wisata (DTW)	30 Orang	Dinas Pariwisata
				Pengembangan dan Penataan Kampung Wisata	1 Kampung	Dinas Pariwisata
				Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) dan Perdasi tentang Kepariwisataan	2 Dokumen	Dinas Pariwisata

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Program Pengembangan Kemitraan			
				Pelatihan ekonomi kreatif	30 Orang	Dinas Pariwisata
				Pengadaan Ruang Kreatif	1 Unit	Dinas Pariwisata
				Pengadaan Peralatan Ruang Kreatif	50 Buah	Dinas Pariwisata
			program pengembangan kapasitas			
				Pelatihan SDM bagi pemandu pariwisata	30 Orang	Dinas Pariwisata
				Pelatihan pengembangan SDM kepariwisataan	30 Orang	Dinas Pariwisata
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			
				Pelatihan Petani dan Pelaku Agrobisnis	60 Orang	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Pelatihan Petani dan Pelaku Agrobisnis	250 Orang	Dinas Perkebunan
				Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis	10 Kegiatan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis	12 Kegiatan	Dinas Perkebunan
				Peningkatan kemampuan lembaga petani	1 Lembaga	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Peningkatan kemampuan lembaga petani	6 Lembaga	Dinas Perkebunan
				Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur	15 Kelompok	Dinas Perkebunan
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	1000 Hektar	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Pengembangan pertanian pada lahan kering	250 Ha	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Pengembangan perbenihan/perbibitan	100 Ha 12 Lokasi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Pengembangan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan dan GRK	5 Laporan 5 Lokasi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Hortikultura	500 Ha	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Pengembangan Pupuk dan Alsin Pertanian	1 Kegiatan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Pengembangan Balai Benih Palawija	30 Ha	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Pengembangan Balai Benih Hortikultura	1 Kegiatan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Pengembangan Kebun Bibit Hortikultura	1 Kegiatan 1 Unit	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan	50 Ha 50 Ha	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Pengembangan Produksi Benih Hortikultura	5 Ha 5 Ha	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Pengembangan Laboratorium Benih	6 Kabupaten 1 Unit	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Pengembangan Balai Benih Padi	2 Unit 25 Ha	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Peningkatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	12 Kabupaten	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				DAK Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	5 Kegiatan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			
				Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkabunan masyarakat yang akan dipasarakan	8 Unit	Dinas Perkebunan
				Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	6 Kelompok	Dinas Perkebunan
				Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan	5 Kegiatan	Dinas Perkebunan
				Pembangunan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	10 Unit	Dinas Perkebunan
				Investasi dan Perijinan Usaha Perkebunan	4 Kegiatan	Dinas Perkebunan
				Bimbingan Usaha Perkebunan	10 Kelompok	Dinas Perkebunan
				Pemantauan Stabilitas Harga Komoditi Perkebunan	1 Laporan	Dinas Perkebunan
				Pengembangan Pemasaran Hasil pertanian	5 Kegiatan	Dinas Perkebunan
			Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan			
				Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	1 Unit	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	50 Unit	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan			
				Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	100 Orang	Dinas Perkebunan
				Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	100 Unit 200 Liter	Dinas Perkebunan
				Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	25 Unit	Dinas Perkebunan
				Intensifikasi Tanaman Perkebunan	500 Hektar	Dinas Perkebunan
				Perluasan Areal Komoditas Perkebunan	2000 Hektar	Dinas Perkebunan
				Pembinaan Petani	200 Orang	Dinas Perkebunan
				Pemeliharaan Kebun Benih Tanaman Perkebunan	25 Hektar	Dinas Perkebunan
				Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan	1000 Hektar	Dinas Perkebunan
				Pembangunan UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan	1 M2	Dinas Perkebunan
				Perbaikan UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan	25 M2	Dinas Perkebunan
				Penyediaan Perlengkapan dan Sarana Perkantoran UPTD/Balai Perbenihan/Produksi	10 Alat	Dinas Perkebunan
				Peningkatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan	250000 Bibit	Dinas Perkebunan
				Pelaksanaan Fasilitasi, Identifikasi, Pengelolaan Lahan dan Air	100 Ha	Dinas Perkebunan
			Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	100 Orang	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	100 Kelompok	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Program peningkatan produksi hasil peternakan			
				Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	1 Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Pembibitan dan perawatan ternak	700 Kegiatan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat	5 Kali Tahun	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak	5 Kali Tahun	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Pengembangan agribisnis pertenakan	1000 Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Penguatan Kelembagaan Inseminasi Buatan	3000 Dosis	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Pengembangan sarana dan prasarana produksi ternak	10 Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Pengembagan ternak besar	15 Kelompok	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Pengembangan ternak kecil	30 Kelompok	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hash peternakan	5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. _	3 Kegiatan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Penyuluhan pemasaran produksi peternakan	10 Kelompok	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	12 Edisi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan	20 Orang 3 Kelompok	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian			
				Peningkatan Sarana Prasarana Diklat Pertanian	400 M2	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Peningkatan SDM Aparatur dan Non Aparatur Sekolah Pertanian	450 Orang	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah Pertanian	250 M2	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Peningkatan SDM Aparatur dan Non Aparatur Balai Diklat Pertanian	250 Orang	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Program Peningkatan kemananan pangan dan ketahanan pangan asal hewan			
				Peningkatan mutu kemanan pangan asal hewan	7 Kali	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Penangan pasca panen produk pangan asal hewan (PPAH) dan bahan pangan asal hewan (BPAH)	15 Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Pelayanan Pengujian bahan Pangan asal Hewan	500 Sampel	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal			
				Ekstensifikasi Lahan Pertanian Hortikultura Spesif	200 Ha	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan			
				Peningkatan kinerja pemanfaatan hasil hutan Kayu	5 Perusahaan	Dinas Kehutanan
				Peningkatan Tertib Produksi dan Peredaran Hasil Hutan	15 Perusahaan	Dinas Kehutanan
				Peningkatan Penatausahaan Iuran Kehutanan	50 Perusahaan	Dinas Kehutanan
				Pemetaan Partisipatif Masyarakat Adat Pemilik Hak Ulayat	2 Lokasi	Dinas Kehutanan
				Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Silvikultur pada IUPHHK-HA	5 Perusahaan	Dinas Kehutanan
				Pengembangan Usaha Pemanfaatan Kayu Masyarakat Hukum Adat	10 Unit	Dinas Kehutanan
				Pengembangan Industri Kayu Masyarakat Hukum Adat	5 Unit	Dinas Kehutanan
				Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) (DAK)	10 Kelompok	Dinas Kehutanan
			Program rehabilitasi hutan dan lahan			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan	100 Ha	Dinas Kehutanan
				Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	4 Kegiatan	Dinas Kehutanan
				Pengembangan perbenihan tanaman hutan	2 Ha	Dinas Kehutanan
				Kampanye Papua Menanam	5 Lokasi	Dinas Kehutanan
				Pengembangan kawasan hutan mangrove	5 Hektar	Dinas Kehutanan
				Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan	50 Kelompok	Dinas Kehutanan
				Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	10 Ha 10	Dinas Kehutanan
				Pengembangan Persemaian Tanaman hutan	100000 Bibit	Dinas Kehutanan
				Sertifikasi areal sumber benih	2 Lokasi	Dinas Kehutanan
				Pengembangan area sumber daya genetik	2 Lokasi	Dinas Kehutanan
			Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan			
				Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan	300 Orang	Dinas Kehutanan
				Penanggulangan kebakaran baton dan lahan	1 Lokasi	Dinas Kehutanan
				Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	5 Kelompok	Dinas Kehutanan
				Pengelolaan wisata alam di kawasan konservasi	5 Unit	Dinas Kehutanan
				Operasi pengamanan hutan terpadu	6 Lokasi	Dinas Kehutanan
				Penyidikan kasus bidang kehutanan	2 Kasus	Dinas Kehutanan
				Pengelolaan Taman Burung dan Taman Anggrek (TBTA) Biak	1 Persentase	Dinas Kehutanan
				Pembinaan Masyarakat Adat di dalam Kawasan Konservasi	3 Lokasi	Dinas Kehutanan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Pembentukan PAmhut Masyarakat Hukum Adat	2 Kelompok	Dinas Kehutanan
				Perlindungan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi	3 Kabupaten	Dinas Kehutanan
				Pengembangan Koleksi Satwa dan Anggrek di TBTA	5 Kegiatan	Dinas Kehutanan
				Pengembangan Wisata di TBTA Biak	1 Kegiatan	Dinas Kehutanan
				Pengelolaan Kawasan Gambut dan Rawa	2 Lokasi	Dinas Kehutanan
				Pengkajian PEP PPRK (Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon)	1 Dokumen	Dinas Kehutanan
				Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan dan PPNS Kehutanan	20 Orang	Dinas Kehutanan
				Pengembangan Data dan Informasi Cagar Alam Cycloop dan Danau Sentani	1 Dokumen	Dinas Kehutanan
				Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	1 Lokasi	Dinas Kehutanan
				Perlindungan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Penyangga Konservasi	3 Lokasi	Dinas Kehutanan
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Ekowisata	1 Unit	Dinas Kehutanan
				Pelatihan Pengelola Ekowisata	5 Kegiatan	Dinas Kehutanan
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelengkap Kebun Raya Koya Koso	2 Unit	Dinas Kehutanan
				Pembebasan Lahan/Tanah Kebun Raya Koya Koso	480 Hektar	Dinas Kehutanan
			Program perencanaan dan pengembangan hutan			
				Rapat Kerja Teknis Kehutanan Provinsi	1 Orang	Dinas Kehutanan
				Inventarisasi, Indentifikasi dan Pemetaan Potensi	1 Lembar	Dinas Kehutanan
				Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	2 Lokasi	Dinas Kehutanan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan	3 Laporan	Dinas Kehutanan
				Pengembangan dan Pembangunan KPH	6 Unit	Dinas Kehutanan
				Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu	1 Dokumen	Dinas Kehutanan
				Peningkatan Kinerja Pemanfaatan Hasil Hutan	2 Dokumen	Dinas Kehutanan
				Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Jasa Lingkungan	1 Dokumen	Dinas Kehutanan
				Pengembangan Regulasi Kehutanan Daerah	2 Peraturan	Dinas Kehutanan
			Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			
				Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	10 Kegiatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	1 Kegiatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	1 Unit	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Pengawasan dan monitoring BBM di Kab/Kota	1500 Ltr	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Pengadaan papan display advertising di kota Jayapura	1 Buah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Sosialisasi pemberdayaan konsumen cerdas didaerah dalam rangka hari konsumen nasional	5 Kegiatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				sosialisasi dan fasilitasi pembentukan BPSK di Provinsi dan Kabupaten/Kota	5 Lembaga	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Pengenbangan informasi peluang pasar perdagangan luar negri	5 Dokumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Pengembangan data base informasi potensi unggulan	5 Dokumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				kerjasama standardisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional, dan internasional	2 Kegiatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Kerjasama dengan lembaga internasional dalam rangka pengembangan produk	1 Kegiatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Membangun jejaring dengan eksportir	1 Kegiatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Pembangunan promosi perdagangan internasional	1 Dokumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Dukungan marketing poin didaerah perbatasan RI/PNG	2 Dokumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Penyusunan Kajian dan Prosedur Ekspor	5 Dokumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri			
				Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	2 Dokumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	2 Kelompok	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	1 Kegiatan 1 Bh	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Pemberian bantuan sarana usaha perdagangan bagi orang asli papua di daerah pesisir dan pulau terluar	120 Orang 150 Unit	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM	20 Orang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Pengendalian bongkar muat barang di pelabuhan dan bandar udara	6 Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; 4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar Dan Pemerataan Pembangunan Yang Berkelanjutan	4.1.3. Pengarusutamaan Pembangunan rendah karbon sebagai upaya tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan; 4.2.1. Peningkatan akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah; 4.2.2. Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah; 4.2.3. Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman; 4.2.4. Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan; 4.2.5. Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah; 5.1.1. Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung; 5.1.2. Meningkatnya efektivitas upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP; 5.1.3. Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah-wilayah perbatasan menjadi halaman depan				

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		negara; 5.1.4. Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial; 5.1.5. Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; 5.1.6. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak				
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			
				Pembangunan Jalan Duntek (Dogiyai)-Munayepa/Iyei (Paniai)	5 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Jalan Maatadi (Deiyai)-Digikebo (Dogiyai)	2 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Jalan Arimbet - Maju - Ujung - Manggelum (164)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Jalan Burmeso – Sikari (119)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Jalan Keppi - Bade (181)	10 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Jalan Karubaga - Wunim - Bokondini (154)	4 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Pembangunan Jembatan Kali Bian	200 Meq	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Jalan Elelim - Kobakma		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Jalan Wamena- Sekan-Apalapsilii - Elelim		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Jembatan Ogotho (Ruas Jalan Kepi-Bade)	30 Meq	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Jembatan Liba Kampung Harapan Dalam (PON XX)	27.27 Meq	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Jembatan Yomo 1 (Ruas Jalan Besum-Yanbra-Puay)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Jembatan Yomo 2 (Ruas Jalan Besum-Yanbra-Puay)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Jalan Ninati - Yetetkun		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Jalan Oksibil - Tarup - Denomngatupbin	10 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Eligobel - Tanas	3 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Jalan Tomer - Kondo	3 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Jembatan Nasem (Distrik Naukenjerai)	15 Meq	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Pembangunan Jalan Pattipi - Suator		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Jalan dan Jembatan Prov Papua	30 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			
				Pembangunan Drainase di Provinsi Papua	10000 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pembangunan turap/talud/brojong			
				Pembangunan Talud Permukiman di Provinsi Papua		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Talud Gereja GKIP-Yapis Dok V		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program penyediaan dan pengolahan air baku			
				Pembangunan infrastruktur air baku di Kabupaten Kabupaten Supiori	10 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan infrastruktur air baku di Kabupaten Jayapura		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Infrastruktur Air Bersih/Baku Kabupaten Nduga	10 Lt/dtk	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Mamberamo Raya	10 liter/detik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Biak Numfor	5 liter/detik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Waropen	10 liter/detik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Kep. Yapen	10 liter/detik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Nabire	10 liter/detik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Paniai	10 liter/detik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Deiyai	10 liter/detik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Dogiyai	10 liter/detik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Intan Jaya	10 liter/detik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Jayawijaya		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Mimika		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Asmat	10 liter/detik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Mappi	10 liter/detik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Perencanaan Infrastruktur Air Baku di Provinsi Papua	5 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Pembangunan infrastruktur Air baku di Kota Jayapura		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah			
				Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Jayapura		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kota Jayapura		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Keerom		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Biak Numfor		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Supiori		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Jayawijaya		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Nduga		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Asmat		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Merauke		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program pengendalian banjir			
				Pembangunan Pengamanan Pantai Kurudu Kep. Yapen	2000 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Pembangunan Pengaman Pantai MAF Kabupaten Nabire	800 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Pengaman Pantai Pasir Hitam Kabupaten Kepulauan Yapen		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pengendalian Banjir dan Normalisasi Sungai di Provinsi Papua (Gel)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Pegaman Pantai Mambui	700 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kab. Biak Numfor	1000 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kab. Yapen	500 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Perencanaan Pembangunan Pengaman Pantai		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Makanuay (Mendukung PON)	600 M3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Otonom Kota Jayapura (Mendukung PON)	200 M3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh			
				Penataan Kawasan Sekitar Stadion Katalpal Merauke		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Penataan Kawasan Sekitar Venue Bermotor Merauke		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Penataan Kawasan GOR Tinju Wamena		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Penataan Kawasan Stadion Pendidikan Wamena		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Penataan Kawasan Wisata Mac Arthur		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Penataan Kawasan/Sekitar Venue PON di Kota Jayapura		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Penataan Kawasan/Sekitar Venue PON di Kabupaten Jayapura		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Penataan Kawasan/Sekitar Venue PON di Kabupaten Keerom		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Penataan Kawasan/Sekitar Venue PON di Kabupaten Biak Numfor		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Penataan Kawasan/Sekitar Venue PON di Kabupaten Yapen Serui		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Penataan Kawasan/Sekitar Venue PON di Kabupaten Supiori		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Penataan Kawasan/Sekitar Venue PON di Kabupaten Merauke		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Penataan Kawasan/Sekitar Venue PON di Kabupaten Tolikara		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Penataan Kawasan Stadion Wainia SP 1 Kab Mimika		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Penataan Kawasan Parkir untuk Mimika Sport Centre dan Rumah Susun di Mimika		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Peningkatan Jalan dan Jembatan			
				Peningkatan Jalan Kemiri - Depapre (111)	5 KM2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan Waren - Botawa - Sumiangga (126)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon (110)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan Jayapura - Angkasa - Base"G - Dok II (101)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan Korem - Doubo (133)	3 KM2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan Wardo - Duber (134) 37,96 Km		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan BTS Kota Merauke - Kumbe - Bian - Okaba (185), 88,05 Km		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan Tiom, (Lanny Jaya) - Illu (Puncak Jaya), (163)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan Trikora (2 Jalur) (Mendukung PON)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan Garuda Spadem (2 Jalur) (Mendukung PON)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan Kamizaun (Mendukung PON)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Peningkatan Jalan Arafuru (Mendukung PON)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan Payum (Mendukung PON)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan Vihara - Tanah Hitam (105 K)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan Sisingamangaraja 2 Jalur	5 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan Wardo - Sorendiweri		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan Sewan - Petam	6 KM2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan Biak - Marau - 2 Jalur		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan Karubaga - Wunim - Bokondini (154)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan Besum - Yanbra - Puai (108)	6 KM2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan Lereh - Tengon	13 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan Manda - Wolo - Kobakma (169) (30 Km)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan Duntek (Dogiyai)-Munayepa/ Iyei (Paniai) (141)	5 KM2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Peningkatan Jalan Sultan Syahrir (Mendukung PON XX)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan Sultan Peternakan (Mendukung PON XX)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan Bolakme - Kelila - Bokondini (167) (61,5 Km)	8.3 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan Dekai - Logpond - Pattipi	6 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan Wamena - Sekan - Apalapsili	7 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan Waena - Arso V (100.K) 53 Km	20 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan Taja - SP V - Kwarja	15 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan Arimbet - Bukit - Ujung - Manggelum (164) 43.00Km	5 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan Doubo - Sorendiweri - Amyas (133) 45.27 Km	10 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan Masuk Stadion Katapal (PON XX)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan Masuk Otonom Kotaraja (PON XX)	0.71 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan Poros SP V - SP II (PON XX)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Peningkatan Jalan Masuk Mimika Sport Complex (PON XX)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan Diponegoro (PON XX)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan DI Panjaitan (PON XX)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan Stevanus Rumbewas (PON XX)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Peningkatan Jalan Maluku Serui (PON XX)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam			
				Survey dan pemetaan Daerah Rawan Bencana dan Pengadaan Pemasangan Rambu - Rambu		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Penyediaan dan Penyiapan Stok Logistik (Buffer Stok) Penanggulangan Bencana di Provinsi Papua	15 Jenis	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Rapat Inventarisasi Kesediaan Kebutuhan Logistik PB	2 Kali	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Penyusunan Rencana Kontijensi PB Kesiapsiagaan	2 Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Pelatihan hukum positif bagi guru dan orang tua	30 Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			
				Fasilitasi FORDA Provinsi Papua	150 Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di OPD di Provinsi/Kab/Kota	8 Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Sosialisasi dan advokasi pembentukan PAUD Holistik Integratif	40 Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Fasilitasi Klinik PPRG Provinsi/Kabupaten/Kota	35 SKPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Penguatan SDM Tim Driver Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG) Provinsi Papua	45 Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						dan Keluarga Berencana
				Penguatan kapasitas Vocal Point gender	19 Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
			Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak			
				Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan	130 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				TOT bagi Operator Simponi PPA	15 Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Pelatihan Psikososial bagi tenaga kepolisian dan P2TP2A Provinsi Papua	40 Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Penguatan kapasitas SDM pendamping korban kekerasan	20 Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan			
				Pemberdayaan ekonomi keluarga sejahtera	12 Kelompok	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Penguatan kapasitas SDM Wirausaha perempuan papua	50 Kelompok	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Fasilitasi dan pemberdayaan bagi penyandang cacat dan difabel	70 Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
			Program peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS			
				Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	100 Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
			Program Kesehatan Reproduksi Remaja			
				Pelatihan dan Advokasi Keluarga Berencana	100 Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						dan Keluarga Berencana
				Monitoring Kampung Keluarga Berencana	3 Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Advokasi dan KIE Kesehatan Remaja (KKR)	50 Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
			Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga			
				Pelatihan Tenaga Pendamping	100 Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
			Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan			
				Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	30 Kasus	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			
				Pembinaan dan Pengawasan Limbah B3	4 Kabupaten	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Peningkatan Kapasitas Komisi AMDAL Provinsi Papua	10 Orang	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup
				Pengawasan Lingkungan Hidup	14 Perusahaan	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup
				Peningkatan dan Pengembangan Laboratorium BPLH	60 Unit	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup
				Penyusunan RPPLH	1 Dokumen	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup
				Validasi KLHS	7 Dokumen	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
				Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (DDDTL)	1 Dokumen	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup
				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	2 Dokumen	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup
			Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan			
				Penyelamatan Danau di Papua	2 Kabupaten	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup
			Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim			
				Identifikasi Gas Rumah Kaca	5 Kabupaten	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup
				Pengolahan Sampah di Kab/kota (Pilot Project)	2 Unit 45 Unit	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup
				Fasilitasi Penyusunan Jakstrada Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH			
				Kampanye Go Adipura PON 20 di 5 Wilayah Adat	2 Kabupaten	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan LLAJ	1 Kegiatan	Dinas Perhubungan
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu APILL	20 Unit	Dinas Perhubungan
			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			
				Pembangunan Pelabuhan Laut Waren di Kabupaten Waropen	120 M1	Dinas Perhubungan
				Pembangunan Bandar Udara Mamit di Kabupaten Tolikara	1 Unit	Dinas Perhubungan
				Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kota Jayapura	1 Unit	Dinas Perhubungan
				Pembangunan Bandar Udara Saminage di Kabupaten Yahukimo	1 Unit	Dinas Perhubungan
				Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Jayawijaya	1 Unit	Dinas Perhubungan
				Pengembangan Pelabuhan Laut Tanah Merah di Kabupaten Boven Digoel	1 Unit	Dinas Perhubungan
				Pembangunan bandar Udara Kuyawage di Kabupaten Lanny Jaya	1 Unit	Dinas Perhubungan
				Pengadaan Speed Boat dalam rangka pengawasan dan pengendalian transportasi laut	4 Unit	Dinas Perhubungan
				Peningkatan Fasilitas Lapangan Terbang Kenkeni di Kabupaten Yahukimo	100 M2	Dinas Perhubungan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas			
				Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	1500 Unit	Dinas Perhubungan
				Pengadaan marka jalan	2000 M`	Dinas Perhubungan
				Pengadaan dan Pemasangan Repiter Alat Komunikasi HT	60 Unit	Dinas Perhubungan
				Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) untuk Pengawasan LLAJ	5 Unit	Dinas Perhubungan
				Pemasangan Guardrail	1000 Meter	Dinas Perhubungan
				Pengadaan Kendaraan Roda 2 Patroli	8 Unit	Dinas Perhubungan
				Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	100 %	Dinas Perhubungan
			Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa			
				Pengelolaan Informasi Pemerintah melalui Media Online	5 Jenis	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi			
				Pembangunan Command Center PON XX	1 Unit	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Pembangunan sistem aplikasi penyelenggaraan PON XX	5 Aplikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Pengadaan Media Center Utama PON XX	1 Website	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Pengadaan Media Center Cluster PON XX	1 Website	Dinas Komunikasi dan Informatika
				SDM TIK PON XX tahun 2020	150 Orang	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Pelayanan Air Bersih			

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Pemanfaatan dan pengelolaan mata air untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat kampung sulit air bersih (PROSPEK)	3 Lokasi	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
				Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Air Tanah	2 Laporan	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
			Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi			
				Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Papua (RUED-P)	2 Dokumen	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
			Pengembangan & Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan			
				Kegiatan Revitalisasi PLTMH / PLTS	5 Unit	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
				Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)	400 Unit	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
			Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah			
				Monitoring Penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan 29 Kab/Kota	6 Buku	Biro Otonomi Khusus
				Rapat Koordinasi Tentang Efektifitas Perdasi/Perdasus	3 Kali	Biro Otonomi Khusus
				Pemetaan Lima Wilayah Adat di Provinsi Papua	6 Dokumen	Biro Otonomi Khusus
				Rapat Koordinasi Forum Desentralisasi Asimetris Lima Provinsi Papua	150 Kegiatan	Biro Otonomi Khusus
				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Penyelengaran Otonomi Khusus	3 Dokumen	Biro Otonomi Khusus
				Inventarisasi Sarana dan Prasarana Otonomi Khusus	6 Kabupaten	Biro Otonomi Khusus

Jumlah program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebanyak 141 program, dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 4.159.626.664.000, yang melibatkan jumlah PD (Perangkat Daerah) pelaksana sebanyak 37 PD.

6.2. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaannya

Rencana Program Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2020 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah disampaikan secara detail pada **lampiran**.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau kepemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan kepemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran prioritas pembangunan.

7.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran pembangunan.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan yang mengacu kepada RPJMD Provinsi Papua Tahun 2018-2023. Berikut ini masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020
1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7.2
2. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	Persen	76.9
3. Angka Harapan Hidup	Tahun	67.33
4. Perolehan medali emas dalam PON	medali	90
5. Persentase organisasi pemuda yang aktif	persen	71.5
6. Cakupan daerah rawan pangan	kab/kota	10
7. Pengeluaran Per Kapita Yang Disesuaikan	Rp ribu/kapita	7,292
8. Cakupan budaya tak benda yang ditetapkan	jumlah	1
9. Rasio kriminalitas yang ditangani	persen	66.73
10. Indeks Kerukunan Umat Beragama	indeks	77.31
11. Nilai skor aspek kebebasan sipil	skor	93.56
12. Nilai skor aspek hak-hak politik	skor	45.35
13. Nilai skor aspek lembaga demokrasi	skor	56.63
14. Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	persen	93
15. Cakapaian Nilai SAKIP	predikat	B
16. Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD	persen	85.00
17. Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	Opini	WTP
18. Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	persen	3.37
19. Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	persen	2.00
20. Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	persen	2.02
21. Kontribusi sub Sektor perikanan Terhadap PDRB	persen	7.37
22. Kontribusi sektor Industri Terhadap PDRB	persen	2.79
23. Kontribusi sektor perdagangan Terhadap PDRB	persen	8.94
24. Jumlah Kunjungan Wisatawan	ribu orang	1162.26
25. Persentase luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan	persen	26.79
26. Indeks Kualitas Udara	indeks	92.93
27. Indeks Kualitas Air	indeks	78.65
28. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	81.52

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020
29. Tingkat Kesempatan Kerja	persen	97.59
30. Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	Rp. juta	58,389,000
31. Jumlah nilai investasi PMA yang direalisasikan	Rp.juta	81,753,000
32. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	persen	40
33. Persentase jembatan provinsi dengan beton dalam kondisi baik	persen	30
34. Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	persen	41.72
35. Indeks kampung membangun	Indeks	46.67
36. Cakupan warga KAT yang diberdayakan hingga sejahtera	kelompok	50
37. Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	ribu orang	20
38. Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Kategori	Tinggi
39. Indeks Pembangunan Gender	indeks	79.69
40. Indeks Pemberdayaan Gender	indeks	63.43

7.2. Indikator Kinerja Kunci

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK), ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman Outcome Level OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua. IKK merupakan salah satu bagian yang menjadi rujukan penilaian kinerja OPD dalam merealisasikan setiap target indikator pada masing-masing urusan yang ditargetkan pada tahun 2020 mendatang adalah sebagai berikut.

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2020

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2020
1.	**Layanan Urusan Wajib Dasar**		
1.1.	**Pendidikan**		
1.1.1	Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI/Paket A/sederajat	persen	0.37
1.1.2	Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs/sederajat	persen	1.10
1.1.3	Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SD/MI dengan kondisi bangunan baik	persen	25.97

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2020
1.1.4	Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik	persen	25.91
1.1.5	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	murid per guru	24.60
1.1.6	Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah pertama	murid per guru	20.47
1.1.7	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	murid per sekolah	190.26
1.1.8	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah pertama	murid per sekolah	198.03
1.1.9	Persentase siswa kelas 1, 2 dan 3 yang naik kelas	persen	98.00
1.1.10	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C/sederajat	persen	36.81
1.1.11	Angka Putus Sekolah (APTS SMA/SMK/MA/Paket C/sederajat	persen	0.68
1.1.12	Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SMA/SMK/MA dengan kondisi bangunan baik	persen	36.81
1.1.13	Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah atas/kejuruan	murid per guru	18.12
1.1.14	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah atas/kejuruan	murid per sekolah	228.91
1.1.15	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	persen	76.93
1.1.16	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15- 59 tahun	persen	92.12
1.1.17	Jumlah PKBM aktif	unit	420.00
1.1.18	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	persen	72.83
1.1.19	Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik	persen	69.28
1.1.20	Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik	persen	82.46
1.1.21	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik	persen	78.90
1.1.22	Persentase guru SMA/SMK yang bersertifikat pendidik	persen	79.37
1.1.23	Persentase guru SMLB yang bersertifikat pendidik	persen	64.81
1.1.24	Cakupan Guru SMK pemegang sertifikat keahlian khusus	persen	50.20

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2020
1.1.25	Cakupan Kurikulum Muatan Lokal Papua yang dikembangkan dalam proses pembelajaran	persen	7.00
1.1.26	Cakupan model Pendidikan Sekolah Kontekstual Papua yang dikembangkan	unit per tahun	2.00
1.1.27	Jumlah kemitraan pendidikan yang dikembangkan dengan lembaga sosial dan agama	unit	28.98
1.1.28	Cakupan PBM Sekolah yang di Supervisi dan di Monitoring	persen	66.93
1.1.29	Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S1 yang lulus tepat waktu	persen	89.86
1.1.30	Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S2 yang lulus tepat waktu	persen	64.81
1.1.31	Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S3 yang lulus tepat waktu	persen	57.01
1.1.32	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	persen	22.61
1.1.33	Capaian peserta program afirmasi pendidikan yang difasilitasi	orang per tahun	250.00
1.1.34	Capaian Siswa peserta ADEM/ADIK yang difasilitasi	orang	1025.00
1.1.35	Capaian Sekolah Program Khusus yang terbina	unit	10.00
1.1.36	Cakupan siswa lulus Sekolah Luar Biasa	persen	5.40
1.1.37	Rasio kecukupan rombel terhadap siswa SLB	rasio siswa SLB per rombel	14.56
1.1.38	APM pendidikan khusus	persen	10.52
1.1.39	Persentase OAP usia dini yang mengikuti PAUD	persen	43.51
1.1.40	Rasio OAP yang mengikuti kelas kecil	persen	88.52
1.1.41	Angka Putus Sekolah siswa OAP pada jenjang SD	persen	1.70
1.1.42	Angka Putus Sekolah siswa OAP pada jenjang SMP	persen	0.82
1.1.43	Persentase siswa SMA/SMK OAP yang lulus dengan nilai UAN di atas rata-rata	persen	40.05
1.1.44	Cakupan siswa lulusan OAP yang diterima di PTN	per 1000 siswa OAP	200

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2020
1.1.45	Angka Melek Huruf penduduk OAP	persen	48.36
1.1.46	Cakupan siswa OAP yang mendapatkan bantuan beasiswa lulus dengan IPK memuaskan	persen	70.00
1.1.47	Persentase Anak Asli Papua penerima Beasiswa Pendidikan Jenjang SMK	persen	38.73
1.1.48	Capaian SMK yang dikembangkan sesuai dengan potensi 5 Wilayah Adat	sekolah per tahun	2.00
1.1.50	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	persen	64.90
1.2.	**Kesehatan**		
1.2.1	Cakupan distrik yang sudah memiliki puskesmas	persen	15.13
1.2.2	Cakupan puskesmas terakreditasi	persen	7.88
1.2.3	Cakupan puskesmas pembantu	per 100.000 penduduk	119.05
1.2.4	Cakupan UKBM kabupaten/kota yang terpetakan	persen	55.00
1.2.5	Rasio kelompok Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	persen	25.00
1.2.6	Cakupan kabupaten/kota yang memiliki data profil kesehatan secara lengkap	persen	44.20
1.2.7	Cakupan Dinas Kesehatan dan RSUD kabupaten/kota yang memiliki RENSTRA yang berkualitas	persen	65.00
1.2.9	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	persen	39.81
1.2.10	Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS	persen	20.69
1.2.11	Persentase Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat dan vaksin	persen	85
1.2.12	Persentase PAK yang diawasi	persen	68
1.2.13	Tanaman obat tradisional yang berkembang di masyarakat	jumlah	10.00
1.2.14	API Malaria	persen	38.89
1.2.15	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	per 100.000 penduduk	45.27
1.2.16	Tingkat prevalensi DBD	persen	75.03
1.2.17	Angka penemuan kasus baru kusta (NCDR)	per 100.000 penduduk	35.83

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2020
1.2.18	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	per 1.000 penduduk	10.53
1.2.19	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	per 1.000 penduduk	40.50
1.2.20	Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	persen	15.00
1.2.21	Persentase penanganan kesehatan pada kejadian luar biasa	persen	75.00
1.2.22	Cakupan pelayanan keehatan lembaga mitra di 5 wilayah adat	kabupaten /kota	9.00
1.2.23	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	persen	20.00
1.2.24	Unmet need pelayanan kesehatan	persen	3.63
1.2.26	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	kasus	208.21
1.2.27	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	persen	49.54
1.2.28	Cakupan pelayanan nifas	persen	40.14
1.2.29	Cakupan Kelurahan/Kampung Universal Child Immunization (UCI)	persen	63.27
1.2.31	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	persen	28.64
1.2.32	Prevalensi Malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita	persen	1.02
1.2.33	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	persen	20.00
1.2.34	Angka Kematian Balita (AKBa)	per 1.000 klh	5.66
1.2.35	Rasio posyandu yang aktif	persen	66.71
1.2.36	Cakupan kunjungan bayi (KN1)	persen	50.42
1.2.37	Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi		48.91
1.2.38	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	persen	2205.61
1.2.39	Cakupan masyarakat teridentifikasi kurang gizi	persen	31.62
1.2.40	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	persen	56.12
1.2.41	Cakupan jumlah kabupaten/kota yang memiliki Rumah Sakit	jumlah per tahun	22.00

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2020
1.2.42	Cakupan pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit rujukan di 5 wilayah adat	unit	5.00
1.2.43	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	per 30.000 penduduk	26.57
1.2.44	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	2.24
1.2.45	Rasio Dokter per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	27.02
1.2.46	Rasio Tenaga medis per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	1.11
1.2.47	Cakupan kecukupan laboratorium dalam mendukung pelayanan kesehatan	persen	80.00
1.2.48	Cakupan ketersediaan data bidang kesehatan di tingkat provinsi yang valid dan reliabel	persen	90.00
1.2.49	Cakupan pasien penyakit jiwa yang tertangani	persen	43.00
1.2.50	Cakupan Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	kabupaten per tahun	-
1.2.51	Cakupan jumlah Rumah sakit yang sudah terakreditasi	persen	58.09
1.2.52	Cakupan pelayanan masyarakat miskin pada RSUD dan RSJ	persen	20.00
1.2.53	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	persen	65
1.2.54	Bed Occupancy Ratio (BOR)	rasio	-
1.2.55	Cakupan rumah sakit kelas C	persen	48,28
1.2.56	Cakupan pelayanan kesehatan RSUD yang telah sesuai standar nasional	persen	70.00
1.2.57	Bed Occupancy Ratio (BOR)	rasio	43.39
1.2.58	Cakupan rumah sakit kelas C	persen	48.28
1.2.59	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	persen	65.00
1.2.60	Tingkat kecukupan tenaga medis sesuai dengan standar rumah sakit	persen	67.50
1.2.61	Tingkat kecukupan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan standar	persen	72

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2020
1.2.62	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	persen	82
1.2.63	Cakupan masyarakat yang terakses pelayanan sanitasi baik	persen	36.36
1.2.64	Cakupan keluarga terakses air bersih	persen	41.72
1.2.65	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih untuk PON	orang	250
1.2.66	Jumlah Pos dan Peralatan kesehatan yang memenuhi standar nasional untuk pelaksanaan PON	unit	40
1.2.67	Persentase ibu hamil (OAP) yang rutin melakukan pemeriksaan K3	persen	28.12
1.2.68	Persentase bayi OAP baru lahir yang memperoleh pelayanan kesehatan	persen	63.44
1.2.69	Cakupan balita OAP yang bergizi baik	persen	46.01
1.2.70	Cakupan OAP yang sudah memiliki dan memanfaatkan Kartu Papua Sehat	persen	75.00
1.3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		
1.3.1.	**Pekerjaan Umum**		
1.3.1.1	Daerah irigasi provinsi yang berfungsi	hektar	2000
1.3.1.2	Persentas luas lahan yang terlayanii irigasi	persen	80
1.3.1.3	Tingkat produktifitas lahan sawah yang terpenuhi irigasi	ton per hektar	51.70
1.3.1.4	Cakupan layanan air bersih/air minum	persen	52
1.3.1.5	Terpeliharanya sempadan sumber air	sungai/lok asi	20
1.3.1.6	Persentase jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik	m	50
1.3.1.7	Panjang jalan provinsi yang fungsional	km	20
1.3.1.8	Panjang jembatan yang fungsional	m'	500
1.3.1.9	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	persen	38
1.3.1.10	Persentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi matap	persen	45
1.3.1.11	Panjang jalan dalam kondisi mantap	km	20
1.3.1.12	Panjang jembatan dalam kondisi mantap	meq	30
1.3.1.13	Cakupan perencanaan teknis jalan dan jembatan	persen	65
1.3.1.14	Cakupan keterlayanan air baku	persen	35

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2020
1.3.1.15	Cakupan keterlayanan air bersih	persen	43.86
1.3.1.16	Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besa	persen	74.38
1.3.1.17	Cakupan kawasan rawan abrasi yang tertangani	persen	35
1.3.1.18	Cakupan kawasan rawan banjir yang tertangani	persen	55
1.3.1.19	Cakupan penduduk OAP yang memiliki rumah layak huni	persen	32.24
1.3.2.	**Penataan Ruang**		
1.3.2.1	Cakupan ijin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pola ruang	persen	85
1.3.2.2	Persentase implementasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	persen	50
1.4.	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**		
1.4.1	Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh	persen	65
1.4.2	Cakupan rumah layak huni yang terbangun	unit	3000
1.4.3	Persentase lingkungan permukiman yang sehat	persen	35
1.4.4	Cakupan rumahtangga yang menggunakan air ledeng	per 1000 kk	180
1.4.5	Cakupan keluarga OAP yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	per 1000 keluarga	250
1.5.	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**		
1.5.1	Jumlah konflik horisontal	kasus	6.00
1.5.2	Cakupan penegakan Perda	persen	90.00
1.5.3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	rasio	13.19
1.5.4	Angka korban kejahatan pembuhunan per 100.000 penduduk	kasus	1.90
1.5.5	Jumlah konflik horisontal	kasus	6.00
1.5.6	Cakupan penegakan Perda	persen	90.00
1.5.7	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	rasio	13.19
1.5.8	Angka korban kejahatan pembuhunan per 100.000 penduduk	kasus	1.90

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2020
1.5.9	Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	persen	50.00
1.5.10	Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk	rasio	70.35
1.5.11	Cakupan penertiban dan penanggulangan penyakit masyarakat	persen	75.00
1.5.12	Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) kabupaten/kota dalam daerah layanan	persen	36.00
1.5.13	Cakupan tenaga pengendali dan kenyamanan lingkungan yang terampil	persen	50.00
1.5.14	Jumlah Pertemuan FKUB per tahun	kali	2.00
1.5.15	Cakupan peserta yang mengikuti kegiatan bela negara, pembauran kebangsaan, dan wawasan kebangsaan	orang	250.00
1.5.16	Cakupan fasilitasi Forkompimda	kali	5.00
1.5.17	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap HAM	persen	2.00
1.5.18	Persentase penanganan kasus pelanggaran HAM	persen	30.00
1.5.19	Cakupan muatan pendidikan politik dan demokrasi dalam pendidikan menengah	persen	2.50
1.5.20	Persentase lembaga dan partai politik yang dibina	persen	75.00
1.5.21	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu	persen	-
1.5.22	Persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	persen	80.00
1.5.23	Cakupan pertemuan dengan lembaga adat untuk harmonisasi regulasi dan mitra strategis pembangunan	kali	2.00
1.5.24	Cakupan Kampung dengan status Tangguh Bencana	persen	65
1.5.25	Cakupan lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	lokasi	2
1.5.26	Persentase kesiapsiagaan penanganan bencana	persen	85
1.5.27	Tingkat fasilitasi penanganan pasca bencana	persen	80
1.5.28	Cakupan pengembangan EWS (early warning systems) kebencanaan	persen	25
1.5.29	Persentase penanganan krisis kesehatan akibat dan atau potensi bencana	persen	85

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2020
1.6.	**Sosial**		
1.6.1	Persentase KAT yang memperoleh bantuan sosial	persen	45
1.6.2	Persentase PMKS yang tertangani	persen	35
1.6.3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	37.08
1.6.4	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pelatihan keterampilan usaha	KK	200
1.6.5	Persentase panti sosial yang menerima pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama	persen	75
1.6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	persen	70
1.6.7	Cakupan ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan	persen	85
1.6.8	Cakupan Pengembangan jaminan sosial bagi lanjut usia dan orang dengan kecacatan	persen	35
1.6.9	Persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	persen	20
1.6.10	Cakupan Kabupaten/Kota yang terakses perlindungan dan jaminan sosial	kab/kota	15
1.6.11	Cakupan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	orang	50
1.6.12	Jumlah anak dan remaja terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	orang	250
1.6.13	Cakupan penyandang cacat netra yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	persen	35
1.6.14	Cakupan Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	persen	65
1.6.15	Cakupan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dalam bidang kesejahteraan sosial	dokumen	2
2.	**Layanan Urusan Wajib Non Dasar**		
2.1.	**Tenaga Kerja**		
2.1.1	Persentase lulusan balai diklat tenaga kerja yang terserap	persen	85

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2020
2.1.2	Frekuensi promosi bursa tenaga kerja	kali	2
2.1.3	Persentase peserta pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi yang terserap dalam lapangan kerja	persen	80
2.1.4	Persentase Balai Latihan Kerja (BLK) kabupaten/kota yang terakreditasi	persen	25
2.1.5	Persentase kenaikan UMP	persen	1.5
2.1.6	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	persen	35
2.1.7	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	78.46
2.1.8	Tingkat pengangguran terbuka	persen	2.50
2.1.9	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial	persen	45
2.1.10	Cakupan perusahaan yang menerapkan norma K3	persen	65
2.2.	**Pangan**		
2.2.1	Cakupan penanganan daerah rawan pangan	persen	15.00
2.2.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	persen	48.99
2.2.3	Skor PPH	skor	90.10
2.2.4	Prevalensi penduduk OAP dengan kerawanan pangan sedang	persen	14.14
2.3.	**Pertanahan**		
2.3.1	Persentase penyelesaian konflik pertanahan	persen	65
2.3.2	Cakupan tanah adat yang terpetakan	persen	30
2.4.	**Lingkungan Hidup**		
2.4.1	Cakupan pemantauan dan pengendalian kualitas air	titik sungai	20
2.4.2	Cakupan lokasi pemantauan dan pengendalian kualitas udara	lokasi per kab/kota	40/8
2.4.3	Proporsi degradasi lahan yang tercemar	persen	3.70
2.4.4	Tingkat ketaatan pemegang ijin lingkungan	persen	65.00
2.4.5	Cakupan akses informasi LH yang berkualitas	kali	12
2.4.6	Cakupan kawasan ekowisata dan jasa lingkungan yang dikembangkan	lokasi	1

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2020
2.4.7	Persentase kontribusi sektor lahan terhadap penurunan emisi	persen	65
2.4.8	Persentase kontribusi sektor energi terhadap penurunan emisi	persen	25
2.4.9	Persentase kontribusi sektor limbah terhadap penurunan emisi	persen	35
2.4.10	Jumlah SDM bidang LH yang tersertifikasi	orang	12
2.4.11	Jumlah PPLHD yang dilatih dan bina	orang	-
2.5.	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		
2.5.1	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada/tidak	Ada
2.5.2	Cakupan penduduk ber KTP elektronik	persen	74.24
2.5.3	Persentase kepemilikan KK elektronik	persen	36.83
2.5.4	Persentasekepemilikan akta kelahiran	persen	49.38
2.5.5	Persentase pasangan berakte nikah	persen	50
2.6.	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**		
2.6.1	Cakupan kampung yang diberdayakan dalam bidang TTG	persen	30
2.6.2	Jumlah BUMKAM yang kelola Komoditas Unggulan	unit	10
2.6.3	Persentase kampung tertinggal	persen	82.05
2.6.4	Cakupan kampung mandiri	kampung	2
2.6.5	Cakupan jumlah kampung yang mendapatkan bantuan penguatan Lembaga Masyarakat Adat	kampung	10
2.6.6	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang berprestasi	persen	15
2.7.	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		
2.7.1	Cakupan sasaran Kelompok Masyarakat Peduli KB yang dibina	kelompok per tahun	100
2.7.2	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need)	persen	3
2.7.3	Persentase pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi	persen	65
2.7.4	Cakupan kampung KB	persen	25
2.7.5	Cakupan tenaga penyuluh KB yang terlatih	orang per tahun	30
2.8.	**Perhubungan**		

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2020
2.8.1	Cakupan terintegrasinya antarmoda angkutan antarwilayah adat	wilayah adat	2
2.8.2	Cakupan pelayanan moda angkutan	persen	25
2.8.3	Tingkat kecelakaan kendaraan bermotor	jiwa	160
2.8.4	Jumlah bandara pengumpul dengan skala pelayanan primer	unit	1
2.8.5	Jumlah dermaga penyeberangan Kelas II	unit	1
2.8.6	Jumlah pelabuhan strategis provinsi	unit	-
2.8.7	Jumlah terminal Tipe B yang fungsional	unit	2
2.8.8	Pertumbuhan arus penumpang angkutan udara	persen	6.0
2.8.9	Pertumbuhan arus penumpang angkutan laut	persen	3.0
2.8.10	Cakupan ketersediaan fasilitas Keselamatan Jalan	persen	65
2.9.	**Komunikasi dan Informatika**		
2.9.1	Cakupan pemenuhan kebutuhan akses internet dalam pelaksanaan PON	mbps	3200.00
2.9.2	Jumlah kerjasama media dalam mempublikasikan hasil hasil pembangunan	kerjasama	2
2.9.3	Persentase jaringan teknologi informasi antar OPD yang terintegrasi	persen	10
2.9.4	Cakupan wilayah yang terlayani jaringan telekomunikasi	persen	25
2.9.5	Persentase penduduk yang mengakses internet	persen	18.17
2.9.6	Cakupan SDM Kominfo yang kompeten di bidang teknologi informasi	persen	65
2.10.	**Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**		
2.10.1	Cakupan UMKM lokal yang bermitra dalam pelaksanaan PON	unit	50
2.10.2	Persentase peningkatan pengembangan UMKM keolahragaan	persen	1.50
2.10.3	Cakupan usaha mikro dan kecil yang mandiri dikelola pengusaha muda	unit	8594.00
2.10.4	Jumlah UMKM yang mandiri dalam kompetisi usaha	unit	30
2.10.5	Tingkat Partisipasi dalam pameran gelar produk KUMKM dalam negeri	kali	5

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2020
2.10.6	Cakupan fasilitasi pemasaran produk UMKM unggulan daerah	kelompok	10
2.10.7	Penyaluran kredit UMKM dari sektor perbankan	Rp milyar	12,343
2.10.8	Persentase koperasi aktif dan berkembang	persen	65
2.11.	**Penanaman Modal**		
2.11.1	Persentase realisasi investasi	persen	85
2.11.2	Tingkat pertumbuhan nilai investasi sektor unggulan	persen	7.0
2.11.3	Persentase UMKM lokal yang bermitra dengan PMA/ PMDN	persen	20
2.11.4	Frekwensi promosi potensi investasi Papua dalam ajang pameran tingkat nasional/internasional	kali	5
2.11.5	Persentase investasi yang direalisasikan dari ajang promosi nasional/internasional	persen	50
2.11.6	Lama waktu penerbitan izin investasi	hari	30
2.11.7	Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan	Skor	68.40
2.11.8	Persentase hasil pemantauan perusahaan investasi yang ditindaklanjuti	persen	70
2.12.	**Kepemudaan dan Olah Raga**		
2.12.1	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	organisasi	40.00
2.12.2	Cakupan monitoring atlet berprestasi	persen	85.00
2.12.3	Cakupan atlet yang diseleksi untuk mengikuti berbagai event olahraga nasional maupun internasional	orang	20.00
2.12.4	Jumlah gedung olahraga standar internasional yang terbangun	unit	10.00
2.12.5	Jumlah lapangan olahraga standar internasional yang terbangun	unit	6.00
2.12.6	Cakupan penyelesaian sarana dan prasarana PON Papua	persen	-
2.12.7	Cakupan venue berstandar internasional	persen	100.00
2.12.8	Cakupan penyelesaian Stadion utama untuk mendukung penyelenggaraan PON XX	persen	100
2.12.9	Jumlah pemuda yang dilatih dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan	orang	250.00

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2020
2.12.10	Jumlah organisasi kepemudaan	organisasi	53.00
2.12.11	Cakupan pengusaha muda asli Papua yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	persen	25.00
2.12.12	Cakupan pengusaha muda asli Papua yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	persen	25
2.13.	**Statistik**		
2.13.1	Cakupan ketersediaan data SIPD	persen	80.00
2.13.2	Jumlah dokumen analisis kinerja pembangunan daerah yang berkualitas	dokumen	5
2.14.	**Persandian**		
2.14.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	persen	85
2.15.	**Kebudayaan**		
2.15.1	Jumlah Pengembangan Kurikulum Bahasa Ibu di 5 Wilayah Adat	kurikulum	1.00
2.15.2	Frekwensi Festival Kebudayaan Malanesia yang berstandar internasional	kali	1.00
2.15.3	Cakupan budaya tak benda yang ditetapkan	jumlah	1.00
2.15.4	Frekwensi pergelaran, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman yang berstandar nasional	kali	5.00
2.15.5	Cakupan Cagar budaya yang ditetapkan	jumlah	0.00
2.15.6	Cakupan kelompok seni dan budaya asli Papua yang dibina	persen	45.00
2.15.7	Jumlah kerjasama dengan pihak potensial dalam pengembangan seni dan budaya Papua	jumlah	5.00
2.15.8	Cakupan partisipasi Papua dalam festival seni dan budaya tingkat nasional maupun internasional	kali	1.00
2.16.	**Perpustakaan**		
2.16.1	Cakupan pelayanan perpustakaan keliling	persen	30.00
2.16.2	Persentase pemustaka yang puas terhadap layanan perpustakaan	persen	75.00
2.17.	**Kearsipan**		
2.17.1	Persentase peningkatan arsip daerah yang telah dilakukan penyelamatan	persen	85.00

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2020
2.17.2	Persentase peningkatan SDM pengelola kearsipan dan kepustakaan	persen	2.00
3.	**Layanan Urusan Pilihan**		
3.1.	**Pariwisata**		
3.1.1	Jumlah kunjungan wisatawan PON yang terlayani	ribu orang	150
3.1.2	Destinasi wisata unggulan yang berkembang	destinasi	12
3.1.3	Kawasan wisata yang berstandar internasional	kawasan	1
3.1.4	Cakupan mitra pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif	perusahaa n	10
3.1.5	Tingkat partisipasi Papua dalam promosi pariwisata di tingkat regional dan internasional	orang	50
3.1.6	Cakupan pelaku usaha wisata yang dibina	pengusaha	10
3.2.	**Pertanian**		
3.2.1	Cakupan bina kelompok tani	persen	20
3.2.2	NTP peternakan	persen	99.94
3.2.3	NTP tanaman pangan	persen	92.90
3.2.4	Cakupan bina kelompok tani	persen	20
3.2.5	NTP perkebunan	persen	99.94
3.2.6	NTP tanaman pangan	persen	92.90
3.2.7	Produktifitas komoditas tanaman pangan dan hortikultura utama	ton per hektar	8.58
3.2.8	Cakupan komoditi pangan lokal berkualitas	persen	60
3.2.9	Luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan	juta hektar	3.27
3.2.10	Tingkat swasembada pangan	persen	30
3.2.11	Cakupan penyuluh fungsional yang mempunyai komptenesi memadai	persen	70
3.2.12	Persentase lahan yang dikembangkan sebagai kawasan agribisnis	persen	35
3.2.13	Persentase peningkatan kemampuan penyuluh pertanian melalui Diklat	persen	2.0
3.2.14	Cakupan pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura	kawasan	2
3.2.15	Cakupan teknologi pertanian/perkebunan rakyat tepat guna yang diterapkan	jenis	10

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2020
3.2.16	Tingkat produktifitas tanaman perkebunan	kg per hektar	497.46
3.2.17	Tingkat kemampuan petani lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	persen	30
3.2.18	Frekwensi promosi produk perkebunan	kali	2
3.2.19	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	persen	55
3.2.20	Produksi hasil ternak besar/kecil/unggas	Ton	33,667,475
3.2.21	Tingkat kemampuan peternakan lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	persen	34
3.2.22	Cakupan penerapan standar keamanan pangan asal hewan	persen	10
3.3.	**Kehutanan**		
3.3.1	Nilai produksi sumber daya kehutanan	Rp milyar	2,264.81
3.3.2	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	persen	27.79
3.3.3	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ha	4,884.83
3.3.4	Rasio pencapaian restorasi lahan gambut	persen	15
3.3.5	Luasan tutupan kawasan konservasi	Ha	7,755,284
3.3.6	Persentase luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	persen	35
3.4.	**Energi dan Sumber Daya Mineral**		
3.4.1	Cakupan pemenuhan air bersih dalam pelaksanaan PON	m3/jam	432.00
3.4.2	Cakupan pemenuhan listrik dalam pelaksanaan PON	persen	100.00
3.4.3	Persentase hasil pengendalian dan pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pengusaha pertambangan	persen	85
3.4.4	Cakupan kelompok penambang mineral non logam dan batuan yang dibina	persen	45
3.4.5	Persentase penambangan illegal yang ditertibkan	persen	85
3.4.6	Persentase pengembangan Sistem informasi sumber daya mineral	persen	50
3.4.7	Cakupan pemetaan kawasan potensi bencana berbasis geologi	persen	40

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2020
3.4.8	Cakupan Pengawasan dan Penertiban Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI)	persen	80
3.4.9	Cakupan penelitian dan survey pelayanan geologi	persen	50
3.4.10	Harga BBM premium dan pertalite yang terkendali	rp per liter	9,800
3.4.11	Tingkat elektrifikasi	persen	56.50
3.4.12	Persentase kampung terakses listrik	persen	50.79
3.4.13	Jumlah RT yang terlayani PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)	rumahtangga	250.00
3.4.14	Jumlah RT yang terlayani PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro)	rumahtangga	500
3.4.15	Jumlah kampung yang memanfaatkan sumber daya energi terbarukan	kampung	100
3.5.	**Perdagangan**		
3.5.1	Rata-rata margin harga bahan-bahan makanan kabupaten/kota terhadap ibu kota provinsi	persen rata-rata kab/kota	221.36
3.5.2	Cakupan penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	persen	80
3.5.3	Cakupan pengawasan peredaran barang dan jasa	persen	100
3.5.4	Nilai ekspor Non Migas Papua	Rp milyar	2,454.44
3.5.5	Cakupan pasar rakyat yang fungsional	unit	20
3.5.6	Persentase peningkatan pemasaran komoditas unggulan Provinsi Papua	persen	3.00
3.5.7	Rata-rata margin perdagangan barang-barang kebutuhan pokok	persen	225
3.5.8	Persentase kenaikan pengeluaran per kapita perbulan rumahtangga	persen	13.82
3.6.	**Perindustrian**		
3.6.1	Cakupan pengembangan industri kayu masyarakat adat	unit per tahun	10
3.6.2	Cakupan Industri kecil dan Menengah yang dibina	unit usaha	50
3.6.3	Kawasan sentra industri rakyat yang berfungsi	kawasan	1
3.7.	**Kelautan dan Perikanan**		
3.7.1	Persentase meningkatknya kemampuan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	persen	1.50

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2020
3.7.2	Cakupan kabupaten/kota yang memiliki POKMASWAS berfungsi	kab/kota	10
3.7.3	Produksi perikanan budidaya	ton	130.19
3.7.4	Produksi perikanan tangkap	ton	7,695.71
3.7.5	Nilai ekspor produk perikanan	Rp. juta	43,480.75
3.7.6	Nilai investasi sektor perikanan yang direalisasikan	Rp. juta	7368.95
3.7.7	Cakupan unit pengembangan pelabuhan perikanan yang berfungsi	persen	2
3.7.8	Cakupan peningkatan kinerja UPTD Perikanan	persen	1.50
3.7.9	Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	persen	65
3.7.10	Persentase nelayan OAP yang memiliki Kartu Nelayan	persen	319.20
4.	**Layanan Penunjang Urusan**		
4.1.	**Perencanaan Pembangunan**		
4.1.1	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	persen	
4.1.2	Cakupan LPPD kabupaten/kota yang berpredikat Sangat Tinggi	jumlah kab/kota	14
4.1.3	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	persen	85.00
4.1.4	Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD	persen	90
4.1.5	Cakupan fasilitasi asistensi Musrenbang Kabupaten	persen	100
4.1.6	Tingkat keterwakilan stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua (MUSRENBANGDA)	persen	96.55
4.1.7	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua tepat waktu	tepat/tidak tepat	Ya
4.1.8	Penyusunan LKPJ tepat Waktu	tepat/tidak tepat	Ya
4.1.9	Cakupan Evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota se Papua	persen	100
4.1.10	Cakupan Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota se Papua	persen	95
4.1.11	Cakupan ketersediaan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	persen	85

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2020
4.1.12	Cakupan hasil kajian yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan kebijakan ekonomi	persen	85
4.1.13	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang ekonomi	persen	35.36
4.1.14	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang sosbud	persen	35.36
4.1.15	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang fispra	persen	35.36
4.1.16	Jumlah kemitraan yang dilaksanakan untuk peningkatan perencanaan pembangunan daerah	jumlah	4
4.1.17	Cakupan ketersediaan dokumen perecanaan tata ruang mandatoris yang telah ditetapkan	persen	70
4.1.18	Persentase implementasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	persen	50
4.2.	**Keuangan**		
4.2.1	Persentase penerapan Sistem Informasi Data Pengelolaan Keuangan Otsus	persen	100
4.2.2	Jumlah Kabupaten/kota yang melakukan pengelolaan keuangan secara baik	dokumen	-
4.2.3	Cakupan implementasi regulasi pengelolaan dana Otsus	persen	90
4.2.4	Tersusunnya APBD dan Perubahan APBD secara tepat waktu dan berkualitas	ya/tidak	Ya
4.2.5	Cakupan Implementasi Analisis Standar Belanja Daerah	persen	100
4.2.6	Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan retribusi	persen	20
4.2.7	Penyampaian LKPD Tepat Waktu	tepat/tidak tepat	Ya
4.2.8	Tertib Administrasi BMD	ya/tidak	Ya
4.2.9	Cakupan jumlah kabupaten/kota yang menyusun APBD secara tepat waktu dan berkualitas	persen	85
4.2.10	Cakupan evaluasi laporan pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota Kabupaten/Kota Se Papua	persen	100

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2020
4.2.11	Tersusunnya APBD dan Perubahan APBD secara tepat waktu dan berkualitas	ya/tidak	Ya
4.2.12	Cakupan Implementasi Analisis Standar Belanja Daerah	persen	100
4.2.13	Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan retribusi	persen	20
4.2.14	Opini Pemeriksaan BPK	Opini	WTP
4.2.15	Penyampaian LKPD Tepat Waktu	ya/tidak	Ya
4.2.16	Tertib Administrasi BMD	ya/tidak	Ya
4.2.17	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	persen	2.41
4.2.18	Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah	persen	10.46
4.2.19	Efektifitas pendapatan asli daerah	persen	2.42
4.2.20	Prosentase Peningkatan Kontribusi UPTB dalam pungutan Pendapatan Asli Daerah	jenis	2
4.2.21	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Persen	20
4.3.	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**		
4.3.1	Jumlah SDM Papua yang mengikuti pelatihan dan magang	orang	100.00
4.3.2	Jenis Diklat yang terakreditasi A	jumlah	3
4.3.3	Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan II yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen	82
4.3.4	Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan III yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen	75
4.3.5	Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan IV yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen	70
4.3.6	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek sesuai tupoksinya	orang	100
4.4.	**Penelitian dan pengembangan**		
4.4.1	Jumlah hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah	jenis per tahun	5
4.4.2	Tingkat pemanfaatan teknologi Informasi dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah	persen	45
4.5	**Penerapan SIDa**		

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Target 2020
4.5.1	Jumlah Teknologi Tepat Guna dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah	jenis	1
4.6.	**Pengawasan**		
4.6.1	Persentase kasus pelanggaran administrasi yang tertangani	persen	80.00
4.6.2	Cakupan pengaduan dan gugatan masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	20
4.6.3	Cakupan tenaga pemeriksa yang telah memilki sertifikat kompetensi	orang per tahun	1
4.6.4	Cakupan jumlah temuan hasil pemeriksaaan yang ditindaklanjuti	persen	85
4.6.5	Cakupan tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemerikasaan	persen	40
4.6.6	Persentase OPD dengan nilai SAKIP B	persen	25
4.6.7	Cakupan Implementasi SPIP pada perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Papua	persen	40
4.7.	**Sekretariat Dewan**		
4.7.1	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/tidak	Ada
4.7.2	Terintegrasi program - program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak	Ada

BAB VIII

PENUTUP

BAB 8 P E N U T U P

Berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2020 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2020, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2020. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2020, mengacu pada isu-isu strategis serta melalui pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh SKPD Provinsi Papua dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh pelaku pembangunan di Provinsi Papua berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2020, secara sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan;
2. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2020, RKPD Tahun 2020 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020, hasil kesepakatan bersama dengan DPRP;
3. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap SKPD harus menyusun dan membuat RENJA-SKPD masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2020;

4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum SKPD serta Forum Musyawarah Perencanaan Pemba-ngunan (MUSRENBANG), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodasi secara baik;
5. Secara proaktif, BAPPEDA Provinsi Papua, wajib melakukan monitoring, pengkajian pelaksanaan RKPD Tahun 2020 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing PD dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur;
6. Pada akhir tahun anggaran 2020, setiap kepala SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2020, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Gubernur BAPPEDA Provinsi Papua ;
7. RKPD Tahun 2020 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Keberhasilan implementasi pelasaksanaan RKPD Provinsi Papua Tahun 2020 sangat tergatung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, mengawal, dan melaksanakan RKPD Provinsi Papua Tahun 2020 ini dengan sebaik-baiknya.

Jayapura, ... 2019

Gubernur Papua

_____

BAPPEDA
Provinsi Papua
Tahun 2019

Siap Sukseskan
Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2020 Papua

PON XX
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL
PAPUA
2020